BANK BNP

Fine-Tuning Our Strengths

Menata Kembali Kekuatan Seluruh Lini Usaha

Laporan Tahunan 2016 Annual Report

Daftar Isi
Table of Contents

01 - 06
Prolog
Prolog

05 Kesinambungan Tema
Continuity of the Theme

06 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab
Disclaimer

07 - 22
Kilas Kinerja
Performance Review

08 Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah
Our Milestones

10 Peristiwa Penting
Event Highlights

16 Penghargaan, Peringkat dan Sertifikasi
Awards, Ratings and Certifications

18 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

19 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

20 Rasio Keuangan
Financial Ratios

21 Ikhtisar Saham dan Obligasi
Stocks and Bonds Highlights

22 Grafik Ikhtisar Saham
Chart of Shares Highlights

22 Aksi Korporasi
Corporate Action

23 - 52
Laporan Manajemen
Management Report

25 Sambutan Presiden Komisaris
Message from the President Commissioner

28 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

34 Laporan Komite Audit
Report of the Audit Committee

38 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

51 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

53 - 90
Profil Perusahaan
Company Profile

54 Informasi Perusahaan
Company's Information

55 Sekilas Perusahaan
Company in Brief

59 Visi dan Misi
Vision and Mission

60 Bidang Usaha
Line of Business

62 Struktur Organisasi
Organizational Structure

64 Struktur Korporat
Corporate Structure

64 Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates

65 Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile

69 Profil Direksi
The Board of Directors Profile

75 Profil Anggota Komite
Profiles of Committee Member

77 Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang
List of Head of Divisions and Branch Offices

79 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

82 Kronologi Pencatatan Saham dan Efek
Chronology of Shares and Securities Listing

84 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professional Institution

85 Nama dan Alamat Jaringan Kantor
Name and Address of Office Branch Offices

88 Peta Operasional
Operational Map

89 - 100
Unit Pendukung Bisnis
Supporting Business Unit

90 Sumber Daya Manusia
Human Resources

96 Teknologi Informasi
Information Technology

100 Bank Koresponden
Correspondent Banks

101 - 142
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

102 Analisis Makro Ekonomi
Macroeconomic Analysis

104 Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen
About Management Discussion and Analysis

108 Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

120 Tinjauan Keuangan
Financial Review

127 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility Level

129 Perbandingan Target dan Realisasi 2016 dan Proyeksi 2017
Comparison of 2016 Targets and Actual Achievements, and Financial Projections for 2017

129 Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih
Material Increase/Decrease of Operating and Net Income

130 Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

131 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
Material Commitments Related to Investments in Capital Goods

132 Investasi Barang Modal
Investment in Capital Goods

132 Komitmen dan Kontijensi
Commitments and Contingencies

133 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

134 Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Public Offering Proceeds

134 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
Derivatives and Hedging Facility

134 Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
Employee and Management Share Option Program

101 - 142
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Management Discussion and Analysis

135 Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Rare & Extraordinary Financial Events

135 Informasi Material mengenai Investasi, Divestasi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investments, Divestments, and Debt/Capital Restructuring

135 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transactions with Conflict of Interest or Transactions with Related Parties

135 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Events and Information

136 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan
Changes In Accounting Principles Bearing Significant Impact On Financial Performance

136 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

137 Prospek Usaha
Business Prospects

142 Perubahan Undang-Undang yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan
Changes in Regulation with Significant Impact on Financial Performance

143 - 250
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

144 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Implementation

145 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap

146 Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment

153 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Structure and Mechanism

217 Laporan Manajemen Risiko
Risk Management Report

143 - 250
Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

231 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2016
Compliance Function Implementation in 2016

232 Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Code of Conduct and Corporate Culture

234 Kasus Hukum dan Sanksi Administratif
Litigations and Administrative Sanctions

236 Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Konsumen
Commitment to Consumer Protection

240 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

243 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

244 Kepatuhan Perpajakan
Tax Compliance

245 Kebijakan Strategi *Anti-Fraud*
Policy on Anti-Fraud Strategy

247 Pakta Integritas
Integrity Pact

248 Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank
Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

250 Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan *Roadmap* GCG OJK
Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

251 - 258
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

252 Filosofi dan Dasar Kebijakan CSR
CSR Philosophy and Policy

253 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan
Corporate Social Responsibility towards Environmental Conservation

254 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility towards Social & Community Empowerment

255 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility towards Labor Practices and Occupational Health and Safety

256 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Nasabah
Our Responsibility towards Customers

257 Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan
Banking Education for the Public

259 - 370
Laporan Keuangan
Financial Report

259 Laporan Keuangan
Financial Report

371 - 399
Lampiran Laporan Tertentu
Attachment of Other Reports

371 Lampiran Laporan Tertentu
Attachment of Other Reports

Kesinambungan Tema

Continuity of the Theme

2016

Fine-Tuning Our Strengths

Menata Kembali Kekuatan Seluruh Lini Usaha

Berlandaskan pada berbagai perbaikan terhadap kebijakan, sistem, dan prosedur operasi yang telah dijalankan di tahun sebelumnya, Bank BNP mengarungi kerasnya situasi bisnis sepanjang 2016 dengan terus menyempurnakan baik tata kelola internalnya maupun kinerja pengumpulan dana pihak ketiga dan penyaluran kreditnya. Strategi ini memampukan Bank BNP untuk bersiap membukukan kinerja bisnis yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Grounded on the various improvements in policies, systems, and operating procedures carried out in the previous year, in 2016 Bank BNP navigated through the tough business situation by continuously fine-tuning both its internal governance as well as its funding and lending performance. This strategy will enable Bank BNP to perform excellently in the coming years.

2015

Reinforcing the Business Fundamentals

Memperkuat Landasan Bisnis

Menghadapi iklim perekonomian yang terus menghadirkan tantangan dan menuntut kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, Bank BNP terus berupaya memperkokoh fundamental bisnisnya agar semakin siap dalam menghadirkan produk dan layanan perbankan yang tepat sasaran dan memuaskan bagi setiap nasabahnya. Ini dilakukan seiring Bank BNP mulai menyeimbangkan fokusnya ke segmen-segmen yang diyakini akan menghadirkan tingkat pertumbuhan yang baik bagi Bank, dengan terus mempertimbangkan setiap aspek risiko dan menjalankan praktik tata kelola yang baik secara disiplin.

Facing the current economic climate that brings forth challenge upon challenge and calls for the ability to adeptly adapt to change, Bank BNP continues to strengthen its business fundamentals so as to be more prepared to offer effective products and services to satisfy its customers' needs. This measure is in line with Bank BNP's shifting of focus towards segments that are believed to boost the Bank's growth rate, as the Bank carefully considers every aspect of risk in its conduct guided by the disciplined implementation of good corporate governance practices.

2014

Confident Steps towards Future

Langkah Pasti Menuju Masa Depan

Membangun perusahaan dengan maksimal senantiasa Bank BNP terapkan melalui kerja sama tim yang baik. Dengan selalu memegang teguh visi dan misi, Bank BNP sepanjang 2014 telah menjalankan kegiatan usaha secara profesional yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, Bank BNP tetap menjaga nilai-nilai keindonesiaan berupa keharmonisan antar individu dalam bekerja sama guna menciptakan hasil terbaik.

Building a Company with maximum effort continuously implemented by Bank BNP through solid teamwork. By constantly hold firm to the vision and mission, Bank BNP throughout 2014 has been running business activities in a professional and sustainable way. In addition to that, Bank BNP continuously maintain values of Indonesia in form of harmony among individuals in cooperating to create the best result.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Bank BNP yang diambil dari laporan keuangan Bank, serta data eksternal seperti Pemerintah, Bank Indonesia, dan sumber terpercaya lainnya. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, dan dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat menggunakan sejumlah asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Bank, serta lingkungan bisnis di mana Bank menjalankan kegiatan usahanya. Bank tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai ekspektasi.

Laporan tahunan ini memuat kata ”Bank” dan “Bank BNP”, yang didefinisikan sebagai PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, yang menjalankan kegiatan usaha utama dalam industri perbankan. Kata “Kami” dan “Perseroan” juga digunakan dalam laporan ini atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company’s purpose, which is classified as future statements within the meaning of prevailing regulations, excluding historical matters. The statements have the prospective risk and uncertainty which may lead to actual material developments different from what has been written.

Prospective statements in this annual report are composed using various assumptions regarding current conditions and forecast of future conditions of the Company and the business environment in which the Company conducts its business activities. The Company does not guarantee that all measures have been taken to ensure the validity of this document will bring specific results as expected.

This report also contains the terms “Bank” and ”Bank BNP”, which is defined as PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, which conducts business mainly in the field of banking. The terms “We” or “the Company” are also used at times in this report, on the basis of convenience to refer to PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Kilas Kinerja

Performance Review

08 Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah
Our Milestones

10 Peristiwa Penting
Event Highlights

16 Penghargaan, Peringkat dan Sertifikasi
Awards, Ratings and Certifications

18 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

19 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Highlights

20 Rasio Keuangan
Financial Ratios

21 Ikhtisar Saham dan Obligasi
Stocks and Bonds Highlights

22 Grafik Ikhtisar Saham
Chart of Shares Highlights

22 Aksi Korporasi
Corporate Action

Tonggak Sejarah dan Jejak Langkah

Our Milestones

1972

Didirikan dengan nama PT Bank Pasar Karya Parahyangan pada 18 Januari.

Established under the name of PT Bank Pasar Karya Parahyangan on 18 January

1989

Perubahan status menjadi bank umum dan berganti nama menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan di bulan Juli.

Changedits status into a commercial bank, with its name changed to PT Bank Nusantara Parahyangan in July.

1994

Memperoleh izin operasional sebagai bank devisa di bulan Agustus.

Obtained permit to operate as a foreign exchange bank in August.

2000

Menjadi perusahaan publik dengan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 50.000.000 lembar saham, dan mengubah status menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. di bulan Desember.

Went public through the Initial Public Offering of 50,000,000 of its shares, and changed its status to PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. in December.

2001

Mencatatkan saham hasil penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia di bulan Januari.

Listed its shares from the Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange in January.

2004

Exercise waran terhadap saham sebanyak 8.275.000 lembar saham.

Exercised warrants on the 8,275,000 shares.

2006

Menerbitkan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) I di bulan Juli sebanyak 158.275.000 lembar saham.

Issued 158,275,000 new shares through the Rights Issue I in July.

2008

Penawaran tender atas kepemilikan saham Bank oleh ACOM Co Ltd berkaitan dengan praktik akuisisinya di bulan Januari hingga Maret.

Tender offering of the ownership of the Bank's shares by ACOM Co Ltd, related to its acquisition, from January to March.

2013

Menerbitkan saham baru melalui PUT III di bulan Mei.

Issued new shares through the Rights Issue III in May.

2007

ACOM Co Ltd dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd mengakuisisi saham Bank pada 17 Desember.

ACOM Co Ltd and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd acquired the Bank's shares on 17 December.

2010

Melaksanakan PUT II di bulan Oktober, dengan menerbitkan saham baru sebanyak 99.963.158 lembar.

Conducted Rights Issue II in October, whereby 99,963,158 new shares were issued.

Peristiwa Penting

Event Highlights

Januari
January

23 Januari 2016
Di Ciater Highland Resort – Subang, Jawa Barat, Bank BNP secara resmi meluncurkan produk Mirai+ melalui acara yang dipimpin langsung oleh Presiden Direktur Bank BNP, Takeru Agawa. Peluncuran Mirai+ ini dilakukan bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun Bank BNP yang ke-44.

23 January 2016
At Ciater Highland Resort – Subang, West Java, Bank BNP officially launched its product, Mirai+, in an event hosted by President Director of Bank BNP, Takeru Agawa. Mirai+ was launched at the celebration of Bank BNP's 44th anniversary.

Februari
February

19 Februari 2016
Bank BNP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 19 Februari 2016 bertempat di BNP University Bandung. Dengan agenda Pengangkatan Sdr. Eiichiro Sakai sebagai Direktur Kredit, Perencanaan & IT.

19 February 2016
Bank BNP carried out the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 19 February 2016 at BNP University Bandung. The agenda of the meeting was the appointment of Eiichiro Sakai as the Director of Credit, Planning & IT.

April
April

05 April 2016
Pada 5 April 2016, Bank BNP secara resmi membuka Kantor Kas Hanafiah di Jl. Kapten Hanafiah Ruko Rawa Badak C-3, Subang.

Peresmian Kantor Kas Hanafiah ini diawali dengan acara pengguntingan pita oleh Takeru Agawa selaku Presiden Direktur didampingi oleh Kevin Cahyadi selaku Direktur Bisnis dan disaksikan oleh para pejabat Bank BNP, dan nasabah yang hadir untuk melakukan transaksi keuangan.

05 April 2016
On 5 April 2016, Bank BNP officially opened Hanafiah Cash Office located on Jl. Kapten Hanafiah Ruko Rawa Badak C-3, Subang.

The Hanafiah Cash Office's inauguration ceremony was commenced by Takeru Agawa as President Director, accompanied by Kevin Cahyadi as Business Director and witnessed by Bank BNP officials and customers, who were there to perform financial transactions.

April - Mei
April - May

30 April - 1 Mei 2016
Bank BNP mengikuti festival budaya Jepang Sakura Matsuri yang diadakan di MaxxBox Orange County, Lippo Cikarang, yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2016 dan dihadiri oleh 80.000 pengunjung. Selama dua hari, Bank BNP ikut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan membuka stand untuk mempromosikan produk unggulan Bank BNP yaitu Mirai+.

30 April - 1 May 2016
Bank BNP participated in the Japanese culture festival, Sakura Matsuri, held at MaxxBox Orange County, Lippo Cikarang, held from 30 April until 1 May 2016, and attended by 80,000 visitors. During these two days, Bank BNP participated in the event by promoting its primary product, Mirai+, at its booth.

Peristiwa Penting

Event Highlights

Juni
June

27 Juni 2016
Pada 27 Juni 2016 Bank BNP menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Paparan Publik di Hotel Hilton Bandung.

Salah satu keputusan dalam pelaksanaan RUPST 2016 untuk tahun buku 2015, Bank BNP membagikan dividen tunai sebesar Rp 9,- per sahamnya, hal tersebut membuktikan komitmen Perseroan kepada para Pemegang Saham sekalipun pencapaian kinerja Perseoan tidak bertumbuh secara signifikan, namun Perseroan mampu membukukan laba dan membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya.

27 June 2016
On 27 June 2016, Bank BNP carried out its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Public Expose at Hilton Hotel Bandung.

One of the resolutions of the 2016 AGMS for FY2015 was that Bank BNP was to distribute cash dividend of Rp 9,- per share, attesting the Company's commitment to the Shareholders, despite the relatively minor growth in its business performance. However, the Company remained able to yield net profit and distribute the cash dividends to the Shareholders.

September
September

16 September 2016
Pada 16 September 2016, Bank BNP bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat-1, melaksanakan Seminar dan Sosialisasi Pengampunan Pajak/ *Tax Amnesty* kepada kurang lebih 200 nasabah Bank BNP, bertempat di Hotel Four Points Dago, Bandung.

16 September 2016
On 16 September 2016, Bank BNP together with the Tax Office under the West Java-1 Tax Directorate, carried out Tax Amnesty Seminar and Dissemination to approximately 200 customers of Bank BNP at Four Points Hotel Dago, Bandung.

September
September

20 September 2016
Pada 20 September 2016 bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, Bank BNP bersama-sama dengan empat institusi lainnya menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Disdukcapil) untuk pemanfaatan data kependudukan secara online dalam rangka memperkuat akurasi basis data nasabah Bank BNP.

20 September 2016
On 20 September 2016, at Hotel Bidakara Jakarta, Bank BNP with four other institutions signed an agreement with the Directorate General of Civil Registries, Ministry of Home Affairs, to employ the population data through an online system in order to improve the accuracy of Bank BNP's customer database

Oktober
October

06 Oktober 2016
Bank BNP secara resmi membuka dua Kantor Kas yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme Padalarang No. 29 Padalarang, dan di Jalan Raya Bandung – Garut Km. 24.5, Rancaekek, pada 6 Oktober 2016.

Acara pembukaan Kantor Kas kali ini dihadiri oleh Shigeyoshi Kinoshita selaku Presiden & CEO Acom dan Michio Atsuda selaku Presiden Komisaris, Takeru Agawa selaku Presiden Direktur, dan Kevin Cahyadi selaku Direktur Bisnis serta sejumlah undangan lainnya.

06 October 2016
Bank BNP officially opened two Cash Offices, each located on Jalan Raya Cimareme Padalarang No. 29, Padalarang, and on Jalan Raya Bandung – Garut Km. 24.5, Rancaekek, on 6 October 2016.

The opening ceremony of the new Cash Offices was attended by Shigeyoshi Kinoshita as President & CEO of Acom and Michio Atsuda as the Bank's President Commissioner, Takeru Agawa as President Director, and Kevin Cahyadi as Business Director, along with other invitees.

Peristiwa Penting

Event Highlights

Desember
December

08 Desember 2016

Bank BNP secara resmi membuka dua Kantor Kas yang berlokasi di Jalan Siliwangi Rt. 01 Rw. 018 Kelurahan Cibadak Kab. Sukabumi, dan di Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok B No. 17, Jl. Hamengkubuwono IX Km. 25 Cakung, Jakarta Timur, pada 8 Desember 2016.

Acara pembukaan Kantor Kas ini dihadiri oleh Takeru Agawa (Presiden Direktur), Kevin Cahyadi T. (Direktur Bisnis) serta sejumlah undangan lainnya.

08 December 2016

Bank BNP officially opened two Cash Offices, each located on Jalan Siliwangi Rt. 01 Rw. 018 Cibadak, Sukabumi, and on Kompleks Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok B No. 17, Jl. Hamengkubuwono IX Km. 25 Cakung, East Jakarta, on 8 December 2016.

The opening ceremony was attended by Takeru Agawa (President Director), Kevin Cahyadi T. (Business Director), and other invitees.

Mirai+
Mirai+
Mirai+

Penghargaan, Peringkat & Sertifikasi

Awards, Ratings & Certifications

Pada Agustus 2016, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. mendapatkan penghargaan dari PT Bursa Efek Indonesia atas partisipasi Bank BNP dalam Kampanye Yuk Nabung Saham.

In August 2016, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. received an award from PT Bursa Efek Indonesia for its participation in the *Yuk Nabung Saham* Campaign.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. meraih predikat *Most Efficient Bank* untuk kategori Bank Buku II pada bulan Oktober 2016 pada ajang Bisnis Indonesia Banking Award 2016.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. was awarded as the Most Efficient Bank for Banks in the Buku II category, in October 2016 during the Bisnis Indonesia Banking Award 2016 event.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. meraih peringkat 1 untuk kategori *Private* Keuangan *Listed* dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2016 yang diselenggarakan oleh 6 (enam) institusi utama di bidang keuangan, antara lain Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), PT Bursa Efek Indonesia (IDX), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. was named the 1st winner of the Annual Report Award (ARA) 2016 for the Private Financial Listed category. The event was held by six major institutions in the financial sector, among others the National Committee on Governance Policy (KNKG), PT Bursa Efek Indonesia (IDX), Bank Indonesia, and the Financial Services Authority (OJK).

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in thousand of rupiah, unless otherwise stated

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Neraca				**Balance Sheets**
Total Aset	7.705.782	8.613.114	9.468.873	Total Assets
Kredit yang Diberikan	5.313.629	6.477.703	6.711.199	Total Loans
Surat Berharga	1.012.183	568.715	522.803	Marketable Securities
Aset Produktif	7.111.379	7.871.879	8.618.368	Earning assets
Dana Pihak Ketiga	6.312.303	7.183.830	7.876.660	Third Party Fund
Giro	553.893	674.911	798.453	Current Accounts
Tabungan	931.836	977.427	1.141.340	Saving Accounts
Deposito	4.826.574	5.531.492	5.936.867	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain	53.358	69.615	286.197	Deposits from Other Banks
Total Liabilitas	6.508.273	7.417.621	8.330.772	Total Liabilities
Pinjaman Subordinasi	79.946	81.800	73.493	Subordinated Loans
Ekuitas	1.197.510	1.195.493	1.138.101	Equity
Laba Rugi				**Profit and Loss**
Pendapatan Bunga	905.311	1.006.417	1.080.295	Interest Income
Beban Bunga	419.598	558.732	642.578	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	485.713	447.685	437.717	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	41.146	38.964	41.017	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	510.375	399.640	348.328	Other Operating Expenses
Laba Operasional Bersih	16.485	87.009	130.408	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak	12.073	90.315	130.448	Income Before Tax
Laba Bersih	8.109	66.867	96.532	Net Income
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	12	99	143	Earnings Per Share (in full Rupiah)
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Important Financial Highlights

Kredit yang Diberikan
Total Loans

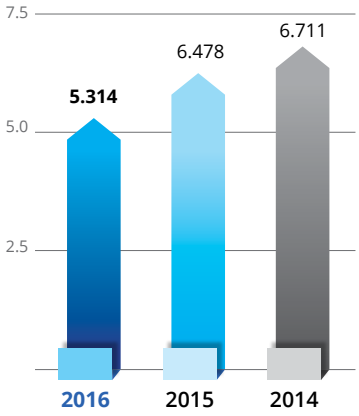

Laba Sebelum Pajak
Income Before Tax

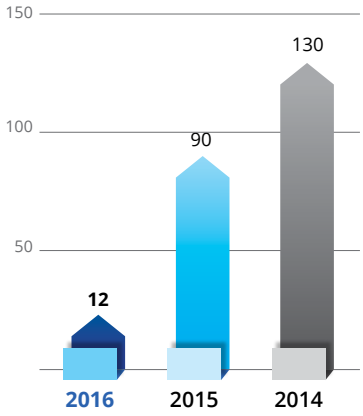

Dana Pihak Ketiga
Third Party Funds

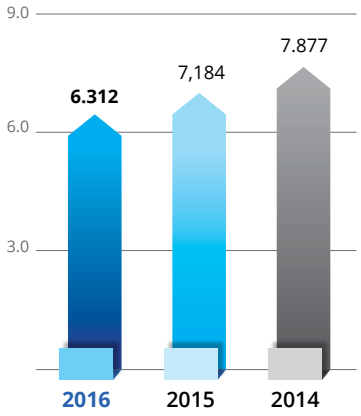

Total Aset
Total Assets

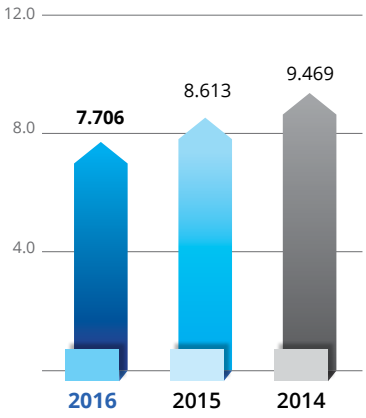

Tingkat Kecukupan Modal
Capital Adequacy Ratio (CAR)

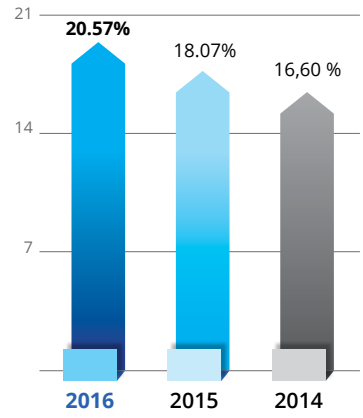

Pendapatan Bunga
Interest Income

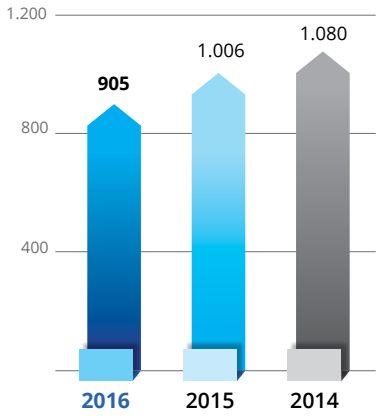

Rasio Keuangan

Financial Ratios

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
(Dalam jutaan Rupiah)

Expressed in Rupiah, unless stated otherwise
(Stated In Million of Rupiah)

Keterangan	2016	2015	2014	Description
Rasio Bisnis				**Business Ratios**
Imbal Hasil atas Aset	0,15%	0,99%	1,32%	Return on Asset
Imbal Hasil atas Ekuitas	0,70%	5,71%	9,09%	Return on Equity
Margin Bunga Bersih	6,13%	5,18%	4,69%	Net Interest Margin
Kredit yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga	84,18%	90,17%	85,19%	Loan to Deposit (LDR)
Rasio Kredit Bermasalah Bersih	4,07%	3,98%	1,41%	Non Performing Loans – Net
Tingkat Kecukupan Modal	20,57%	18,07%	16,60%	Capital Adequacy Ratio
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	98,52%	91,91%	88,37%	Operating Expense to Operating Income
Kepatuhan				**Compliance**
Persentase Pelanggaran BMPK				Legal Lending Limit Violation Percentage
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Third Parties
Persentase Pelampauan BMPK				Excess of Legal Lending Limit Percentage
Pihak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Related Parties
Pihak Tidak Terkait	0,00%	0,00%	0,00%	Third Parties
Giro Wajib Minimum (GWM)				**Minimum Reserve Requirement (MRR)**
GWM Utama Rupiah	6,68%	7,63%	8,09%	8,28%
GWM Sekunder	15,16%	7,16%	6,57%	4,39%
GWM Valuta Asing	8,10%	8,21%	10,29%	51,53%
Posisi Devisa Neto Secara Keseluruhan	0,25%	0,74%	0,56%	0,72%
Lainnya				**Others**
Jumlah Karyawan	1.676	1.511	1.579	Number of Employees
Jumlah Kantor	62	68	69	Total Offices
Jumlah Anjungan Tunai Mandiri	64	72	69	Total ATMs

Komposisi Pendanaan Desember 2016 / Funding Composition December 2016

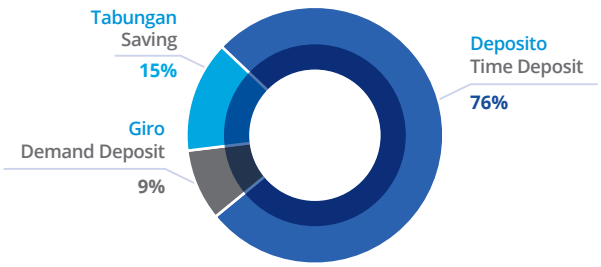

Komposisi Kredit Desember 2016 / Loan Composition December 2016

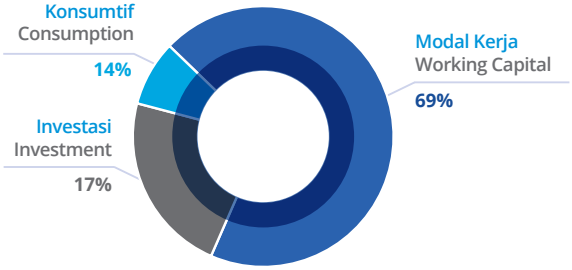

Ikhtisar Saham dan Obligasi

Stocks and Bonds Highlights

Saham

Jumlah saham Bank BNP yang telah dikeluarkan hingga akhir tahun 2016 seluruhnya adalah 676.833.882 lembar saham, terdiri dari saham biasa bersifat ekuitas yang ditatakelolakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan harga nominal per lembar saham sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah).

Jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dapat diperjualbelikan adalah 99% dari total saham yang diterbitkan Bank BNP.

Berikut adalah Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham:

Shares

Total shares of Bank BNP which have been issued until the end of 2016 amounted to 676,833,882 shares, consisting of equity common shares administered by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) with nominal price per share of Rp 500 (five hundred Rupiah).

The shares listed on the Indonesia Stock Exchange that are tradable compose 99% of the total shares issued by Bank BNP.

Share listing chronology and changes to the total number of shares are described below:

Informasi Harga Saham per Triwulan 2015

Share Price Information by Quarter 2015

Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in rupiah, unless otherwise stated

Periode	Harga Saham Tertinggi / Highest (Rp)	Harga Saham Terendah/ Lowest (Rp)	Harga Penutupan/ Closing Price (Rp)	Volume Perdagangan/ Trade Volume	Kapitalisasi Pasar/ Market Capitalization (Rp)	Period
Q1 – 2015	2.310	1.850	2.310	1.300	3.003.000	Q1 – 2015
Q2 – 2015	2.320	2.310	2.320	1.600	3.698.000	Q2 – 2015
Q3 – 2015	2.320	2.320	2.320	3.500	8.106.000	Q3 – 2015
Q4 – 2015	2.320	1.860	1.860	5.300	11.734.500	Q4 – 2015

Informasi Harga Saham per Triwulan 2016

Share Price Information by Quarter 2016

Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in rupiah, unless otherwise stated

Periode	Harga Saham Tertinggi / Highest (Rp)	Harga Saham Terendah/ Lowest (Rp)	Harga Penutupan/ Closing Price (Rp)	Volume Perdagangan/ Trade Volume	Kapitalisasi Pasar/ Market Capitalization (Rp)	Period
Q1 – 2016	1.860	1.860	1.860	0	1.246.321.909.980	Q1 – 2016
Q2 – 2016	1.860	1.860	1.860	0	1.246.321.909.980	Q2 – 2016
Q3 – 2016	1.910	1.910	1.910	200	1.279.825.187.130	Q3 – 2016
Q4 – 2016	1.910	1.910	1.910	0	1.279.825.187.130	Q4 – 2016

Obligasi

Hingga akhir tahun 2016 Bank BNP tidak menerbitkan obligasi.

Bonds

As at the end of 2016 Bank BNP had not yet issued any bonds.

Grafik Ikhtisar Saham

Chart of Shares Highlights

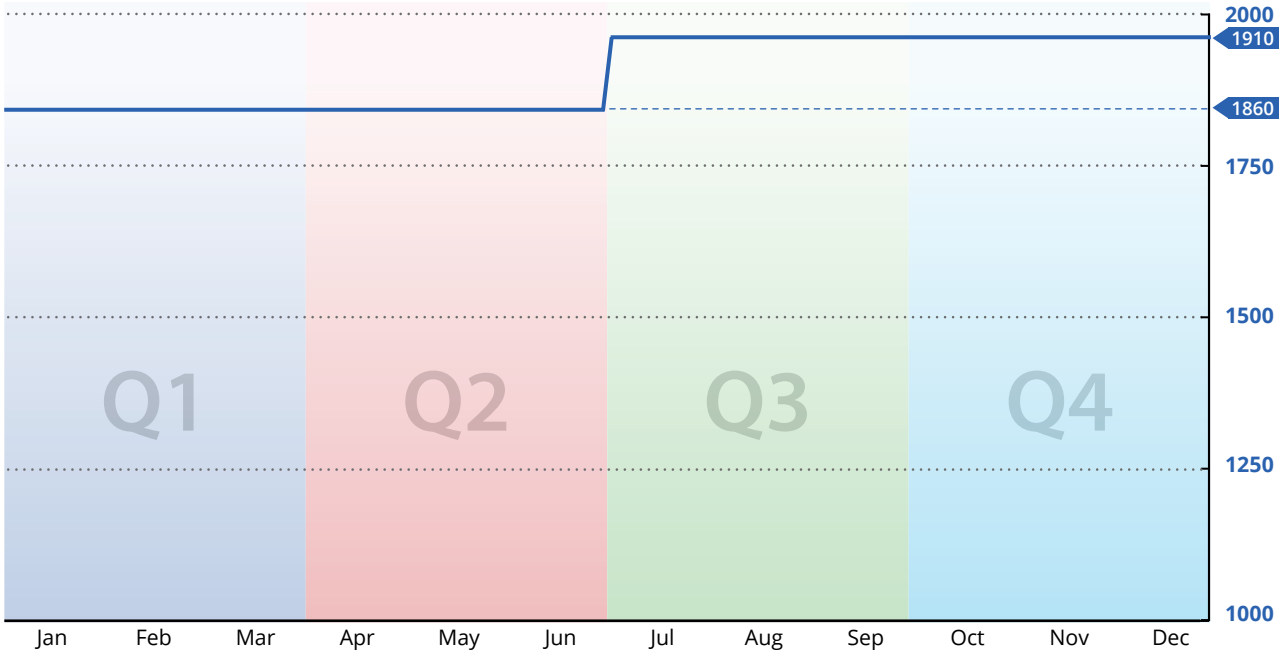

Aksi Korporasi

Corporate Actions

Pada tahun 2016 Bank BNP telah menyelenggarakan aksi korporasi sebagai berikut:

- Pembagian Dividen Tunai sebanyak 1 (satu) kali kepada pemegang saham sebesar Rp 9,-/lembar saham.
- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebanyak 1 (satu) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebanyak 1 (satu) kali.
- Penyelenggaraan Paparan Publik sebanyak 1 (satu) kali.

In 2016 Bank BNP carried out the following corporate actions:

- One time Distribution of Cash Dividends to shareholders, with a dividend amount of Rp 9,-/share.
- One time Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and one time Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).
- One time Public Expose.

Laporan Manajemen

Management Report

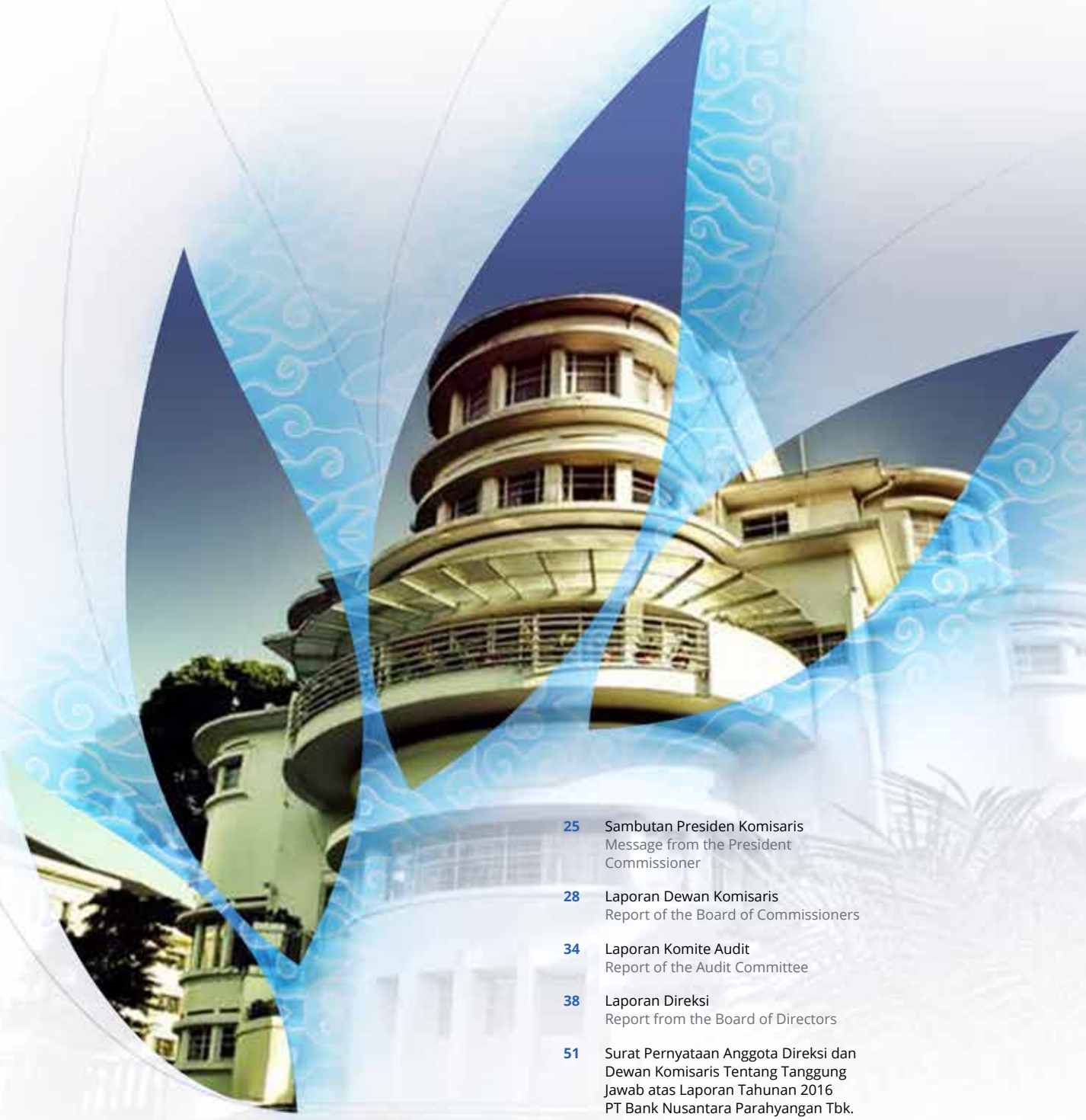

25 Sambutan Presiden Komisaris
Message from the President Commissioner

28 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners

34 Laporan Komite Audit
Report of the Audit Committee

38 Laporan Direksi
Report from the Board of Directors

51 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Michio Atsuda

Presiden Komisaris
President Commissioner

Sambutan Presiden Komisaris

Message from the President Commissioner

"... dampak yang ditimbulkan sebagai akibat kebijakan manajemen untuk memperbaiki kualitas proses dan kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Bank BNP

... the impact of the management policy to improve the quality of processes and the quality of productive assets owned by Bank BNP"

Pemegang Saham yang terhormat,
Meskipun tantangan dalam dunia bisnis perbankan nasional pada tahun 2016 cukup berat, namun Bank BNP telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi tantangan yang ada sepanjang tahun dengan memaksimalkan segala sumber daya organisasi yang ada, memberdayakan seluruh unit kerja, menyempurnakan sistem proses persetujuan kredit agar dapat menopang capaian kinerja dengan kualitas baik dan menaati ketentuan yang berlaku.

Esteemed Shareholders,
Despite the difficult condition in the national banking business in 2016, Bank BNP strived to overcome the challenges throughout the year by optimizing all the existing organization recources, empowering all the working units, completing the credit approval process system to support an excellent quality performance, and complying with the applicable regulations.

Kondisi perekonomian Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global maupun regional. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan penurunan suku bunga Fed oleh Bank Sentral AS berimbas pada bisnis perbankan nasional.

Indonesia's economic condition is to some degree influenced by the global and regional economic conditions. The slow pace of China's economic growth and the decline of The Fed's interest rate impacted the national banking business.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 sebesar 5,02% atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,88%. Kendati demikian, angka pertumbuhan tersebut sedikit di bawah ekspektasi pemerintah di awal tahun untuk dapat menembus angka 5,1%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, serta angka inflasi yang rendah. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berjalan cukup lambat dengan adanya pelemahan di sektor ekspor.

The Central Agency of Statistics (BPS) declared that the growth of Indonesia's economy in 2016 was 5.02% or higher than the previous year of 4.88%. However, the rate was slightly below the government's expectation of 5.1%, set in the beginning of the year. This economic growth rate was driven by domestic consumption and investments, and the low inflation rate. Economic growth was relatively sluggish due to weakening of export.

Meskipun keadaan perekonomian nasional dirasa cukup sulit, kami tetap memberikan apresiasi kepada jajaran manajemen yang telah mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan segala tantangan tersebut. Untuk itu di tahun yang akan datang, Bank BNP telah berkomitmen dan berinisiatif untuk mempercepat proses restrukturisasi kredit, pemulihan kredit bermasalah, serta sejumlah inisiatif lain terkait pengelolaan dalam rangka efisiensi biaya.

Although the condition of the national economy was considered difficult, we appreciate the management for being able to adapt and adjust to all the challenges. Therefore, in the following year, Bank BNP has committed and initiated to accelerate the credit restructuring process, to perform recovery of non-performing loans, as well as a number of other initiatives related to a cost-efficient management.

Dalam hal kinerja keuangan, Bank BNP secara umum belum berhasil merealisasikan rencana bisnisnya di tahun 2016 ini dengan baik. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan manajemen untuk memperbaiki kualitas proses dan kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh Bank BNP, sehingga secara keseluruhan hal ini mempengaruhi pencapaian terhadap seluruh komponen keuangan yang ada dalam Neraca Bank BNP. Indikator ketidakberhasilan pencapaian tersebut tercermin dari deviasi atas pencapaian beberapa target pada Rencana Bisnis Bank BNP tahun 2016 antara lain yaitu: Total Aset sebesar Rp7,7 triliun dengan pencapaian sebesar 81,8% dari target, penghimpunan dana pihak ketiga Rp6,32 triliun atau hanya tercapai sebesar 79,8% dari target, dan penyaluran kredit sebesar Rp5,3 triliun atau sama dengan tercapai sebesar 75,5% dari target. Sementara itu, perolehan Laba Bersih setelah pajak adalah sebesar Rp8,1 miliar atau tercapai sebesar 11,2% dari target.

In terms of financial performance, Bank BNP in general in 2016 did not perform as expected, in comparison to its business plan. This was the impact of the management policy to improve the quality of processes and the quality of productive assets owned by Bank BNP, so overall it affected the achievement of all financial components in Bank BNP's Balance Sheet. The nonperformance indicators were reflected in the deviations from the achievements of some targets in Bank BNP's Business Plan in 2016, among others: Total assets amounting to Rp7.7 trillion, achieving 81.8% of the target, third-party fund collection amounting to Rp6.32 trillion or only reaching 79.8% of the target, and loan disbursement amounting to 75.5% of the target. Meanwhile, Net Profit After Tax amounted to Rp8.1 billion or 11.2% of the target.

Dalam hal Rasio Keuangan, beberapa indikator rasio keuangan tertentu antara lain adalah ROA 0,15%, ROE 0,78%, NIM 6,13%, NPL *gross* dan *net* sebesar 5,31% dan 4,07%, hal ini merefleksikan kinerja keuangan secara menyeluruh sekalipun terdapat perbaikan dalam perolehan rasio *net interest margin* (NIM) yang naik hampir sebesar 1%.

In terms of Financial Ratios, certain financial ratios used as indicators include ROA of 0.15%, ROE of 0.78%, NIM of 6.13%, and NPL–gross and NPL–net of 5.31% and 4.07%, respectively, reflecting the overall performance although there was an improvement in the ratio of net interest margin (NIM) that increased by nearly 1%.

Faktor utama yang menghambat pencapaian kinerja keuangan Bank BNP pada tahun 2016 adalah penurunan atas kualitas Kredit (*Non-Performing Loan*) yang meningkat cukup signifikan dari semula 3,98% menjadi 4,07% (*Netto*) sehingga mendorong Bank BNP untuk meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari semula Rp41,62 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp101,1 miliar pada akhir Desember 2016, atau sama dengan naiknya pencadangan sebesar 143% dari tahun sebelumnya.

The main factors that hindered the achievement of Bank BNP's financial performance in 2016 was the decline in the quality of Non-Performing Loans, that increased significantly from 3.98% to 4.07% (Net), which prompted Bank BNP to increase the Allowance for Impairment Losses (CKPN) from previously Rp41.62 billion in 2015 to Rp101.1 billion as at the end of December 2016, or equal to an increase of the allowance by 143% from the previous year's.

Kondisi ini menuntut Dewan Komisaris untuk senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang ada. Kami percaya bahwa Direksi akan mampu menjaga kinerjanya sekalipun menghadapi kondisi turbulensi di dalam kualitas perkreditan ini demi pencapaian kualitas perkreditan yang lebih baik lagi.

This condition compelled the Board of Commissioners to continue providing recommendations and guidance to the Board of Directors to anticipate and to address the challenges. We believe that the Board of Directors shall be able to maintain its performance, despite the turbulence faced by credit quality, to achieve a higher credit quality in the future.

Kami berharap Bank BNP akan senantiasa mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Namun demikian, kami tetap berharap agar debitur kami yang bermasalah dapat secepatnya pulih seiring dengan iklim investasi dan pasar ekspor yang diharapkan dapat semakin membaik ke depannya. Bank BNP akan terus berusaha mengembangkan aset dengan fokus pada hubungan kemitraan yang luas dengan nasabah dan juga akan lebih berhati-hati untuk tidak terlalu terkonsentrasi pada kredit korporasi.

We hope the Company will always be able to seize the opportunity of the economic recovery in the future. Nevertheless, we also hope that our non-performing customers will have their businesses restored as soon as possible, along with the investment climate and export market which are expected to improve in the future. Bank BNP will continue to strive to develop its assets by focusing on its vast partnership with customers and will also be more prudent so as not to become too concentrated on corporate loans.

Bank BNP senantiasa memperbarui dan meningkatkan kualitas proses pemberian keputusan yang bersifat strategis, khususnya dalam kebijakan pemberian kredit. Secara internal, Bank perlu memastikan bahwa semua karyawan telah mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dari

Bank BNP constantly updates and improves the quality of its strategic decisionmaking processes, particularly in lending policy. Internally, the Bank has to ensure that all employees have complied with the applicable regulations. In terms of organization, the Board of Commissioners appreciates

segi organisasi, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya yang konsisten dalam mencermati tata kelola perusahaan serta standar praktik terbaik terkait kebijakan dan proses operasional.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris beserta seluruh komite di bawah Dewan Komisaris telah secara maksimal terlibat aktif dalam mengawasi jalannya Bank, termasuk setiap perkembangan yang terjadi, baik melalui pertemuan langsung dengan Direksi dan Manajemen Bank maupun melalui komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Struktur tata kelola yang ada di Bank BNP memungkinkan Direksi untuk dapat berkomunikasi secara efektif dengan Dewan Komisaris mengenai seluruh peristiwa penting dan hal signifikan lainnya yang terjadi di Perusahaan serta Dewan Komisaris dapat dengan segera menanggapinya secara cepat atas hal-hal yang sifatnya mendesak yang tengah dihadapi oleh Bank BNP.

Kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada seluruh Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi atas profesionalisme dan kerja keras yang telah ditunjukkan selama ini untuk Bank BNP. Demikian halnya dengan Direksi, yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan roda bisnis ini di tengah tekanan yang semakin sulit serta dalam komitmennya untuk terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen manajemen atas transparansi dan akuntabilitas terhadap para *stakeholders*.

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas segala upaya Direksi dan seluruh manajemen yang telah mampu menjaga Bank BNP untuk dapat melalui gejolak pasar dan bisnis perbankan nasional di tahun 2016 serta tetap menjaga *prudential banking* dan fungsi intermediasi Bank BNP dalam menjalankan roda bisnisnya di dunia perbankan di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh *stakeholders* atas upayanya dalam mempertahankan stabilitas ekonomi di Indonesia. Kepada para pemegang saham dan nasabah kami yang kami banggakan serta segenap karyawan Bank BNP, kami juga ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan kepercayaannya yang telah diberikan kepada Bank BNP selama ini. Semoga ke depannya Bank BNP dapat terus maju dan meningkatkan pelayanannya sehingga akan terus dicintai serta dipercaya oleh seluruh *stakeholders*.

the consistent efforts in paying attention to corporate governance as well as the best practice standards related to policies and operational processes.

Throughout 2016, the Board of Commissioners and all the committees under the Board of Commissioners were actively involved in overseeing the Company including its developments, both through direct meetings with the Board of Directors and Management of the Bank, as well as through the committees under the Board of Commissioners. The governance structure in Bank BNP allows the Board of Directors to be able to communicate effectively with the Board of Commissioners regarding all important events and other significant matters occurring in the Company, and the Board of Commissioners can also immediately respond to urgent issues faced by Bank BNP.

On behalf of the Board of Commissioners, we would like to thank all the Committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee, for their professionalism and hard work dedicated to Bank BNP. We also would like to thank the Board of Directors for their effort in running the business in the middle of an increasingly tough situation, for their commitment in applying the principles of good corporate governance, and also for the management's commitment in transparency and accountability to stakeholders.

The Board of Commissioners would like to express its gratitude and appreciation for all the efforts of the Board of Directors and the entire management who have been able to preserve the Bank's business and get through the fluctuating market and national banking business in 2016 as well as to maintain prudential banking and Bank BNP's intermediary functions in running its business in the banking sector in Indonesia.

We also would like to thank all the stakeholders for their efforts in maintaining economic stability in Indonesia. To all esteemed shareholders, customers, and employees of Bank BNP, we thank you for all the support and trust that have been given to Bank BNP. Hopefully in the future the Bank will continue to progress and improve its services, so it may be ever loved and trusted by all its stakeholders.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.

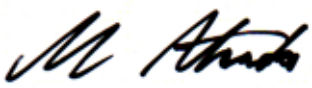

MICHIO ATSUDA
Presiden Komisaris / President Commissioner

Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners

Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. terdiri dari 4 (empat) orang, termasuk 2 (dua) orang diantaranya atau sekitar 50% adalah Komisaris Independen.

Susunan lengkap Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. sampai dengan akhir Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	:	Michio Atsuda
Komisaris	:	Tatang Hermawan
Komisaris Independen	:	Karel Tanok
Komisaris Independen	:	Bachtiar Alam

Dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada saat ini, pengurus masih memandang hal ini sejalan dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga sampai saat ini tetap dipertahankan jumlah keanggotaan Dewan Komisaris sebagaimana yang ada, yaitu sebanyak 4 (empat) orang. Komisaris Independen yaitu Sdr. Karel Tanok menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, sedangkan Komisaris Independen yaitu Sdr. Bachtiar Alam menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan berpedoman pada prinsip penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik, dalam upaya memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh tingkatan organisasi dan level unit kerja, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat berupa rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi, untuk memastikan terlaksananya ketentuan-ketentuan perbankan yang ada dan selain itu juga memastikan agar Direksi menindaklanjuti temuan audit baik dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Akuntan Publik, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan.

Composition and Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. consists of four (4) persons, including two (2) persons or 50% of the members being Independent Commissioners.

The composition of the Board of Commissioners of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. until the end of December 2016 is as follows:

President Commissioner	:	Michio Atsuda
Commissioner	:	Tatang Hermawan
Independent Commissioner	:	Karel Tanok
Independent Commissioner	:	Bachtiar Alam

The current number of members of the Board of Commissioners is considered to be in accordance with the provisions governing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) regarding the number of members of the Board of Commissioners, i.e. four. One Independent Commissioner, Karel Tanok, serves as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee, while another Independent Commissioner, Bachtiar Alam, serves as Chairman of the Risk Monitoring Committee and Chairman of the Audit Committee.

The Board of Commissioners has been carrying out its duties and responsibilities independently guided by the principles of corporate governance (GCG), in an effort to ensure the implementation of corporate governance both within each of the Bank's business activities at all levels of the organization and on each unit. The Board of Commissioners also carried out oversight over the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors and provided advice to the Board of Directors, to ensure the implementation of the provisions of the existing banking regulations, and also ensures that the Board of Directors follow up on the audit findings from the Internal Audit Unit (IAU), Public Accountants, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority.

Fungsi pengawasan serta pemberian nasihat atau rekomendasi kepada Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris demi kepentingan Bank dalam rangka untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Direksi telah dilakukan sesuai dengan visi dan misi Bank. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional Bank demi menjaga independensi Dewan Komisaris, terkecuali hal-hal lain yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada Direksi, dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan dan perundang-undangan. Tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan tercapainya maksud dan tujuan Bank dan untuk menjaga bahwa Bank telah dikelola dengan baik demi kepentingan Pemegang Saham dan *stakeholder* lainnya.

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah melakukan 19 (sembilan belas) kali rapat, termasuk Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi serta Rapat dengan Komite-Komite. Hal-hal yang menjadi fokus pengawasan dari Dewan Komisaris adalah realisasi rencana bisnis Bank, pembahasan hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya beberapa aspek penting rencana bisnis Bank, penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, serta produktivitas dan efisiensi Bank. Pemantauan pengembangan kualitas sumber daya manusia, memastikan terselenggaranya prinsip *Good Corporate Governance,* memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta melakukan pengawasan dan pembahasan dengan Direksi dalam upaya-upaya memperbaiki dan mempertahankan tingkat kesehatan Bank, hal-hal tersebut juga menjadi fokus perhatian penting Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Bank.

The oversight function and the provision of advice or recommendations to the Board of Directors by the Board of Commissioners in the interest of the Bank were performed to ensure that the execution of duties of the Board of Directors had been in accordance with the vision and mission of the Bank. In conducting its oversight function, the Board of Commissioners was not involved in any decision-making, so as to maintain the Board of Commissioners' independence, except for certain matters governed by the Bank's Articles of Association and the prevailing regulations.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Members of the Board of Commissioners are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) to carry out oversight function over the Board of Directors, with emphasis on the principle of prudence and compliance with banking regulations and the laws. The main task of the Board of Commissioners being to ensure the intent and purpose of the Bank and to maintain that the Bank has been managed peroperly in the interest of shareholders and other stakeholders.

In 2016, the Board of Commissioners convened 19 (nineteen) meetings, which include Board Meetings, Joint Meetings with the Board of Directors, and the Board of Commissioners Meetings with the Committees. The issues that were the focus of the Board of Commissioners' supervision were the realization of the Bank's business plan, the discussion of matters that led to the underachievement of several important aspects of the Bank's business plan, lending, third-party funding, as well as the Bank's productivity and efficiency. Other issues also included the monitoring of the development of human resources quality, ensuring the implementation of the principles of Good Corporate Governance, ensuring the implementation of internal control system and risk management, and monitoring and discussion by the Board of Directors in their effort to improve and maintain the Bank's financial soundness.

Komite-Komite yang Berada Di Bawah Pengawasan Dewan Komisaris

Menunjuk ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal No.003/PM/05/2000 tanggal 5 Mei 2000 tentang Prinsip Penerapan *Good Corporate Governance* maka dibentuklah Komite Audit dan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-399/BEJ/07-2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Peraturan Pencatatan Efek No. 1-A huruf C.1.b. tentang Kewajiban Perusahaan Tercatat memiliki Komite Audit serta menindaklanjuti Surat Edaran No. SE-008/BEJ/12-2001 tentang Keanggotaan Komite Audit, maka Perseroan telah memiliki Komite Audit sejak tanggal 26 Desember 2001. Sementara itu, menindaklanjuti Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan*Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, maka Bank BNP pada tanggal 17 Maret 2008 membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dan pada tanggal 30 Januari 2009 membentuk Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian, Bank BNP telah memiliki semua Komite yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dimaksud.

Setiap Komite beranggotakan pihak-pihak yang independen dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Kecuali Komite Remunerasi dan Nominasi yang berdasarkan peraturan Bank Indonesia dapat menugaskan pejabat yang bertanggung jawab di Bidang SDM untuk duduk sebagai salah seorang anggota Komite tersebut. Sebagai organ yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi, ketiga Komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan melakukan pertemuan/rapat dengan unit-unit kerja terkait di Bank BNP. Informasi/hasil dari pertemuan tersebut kemudian direkomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi Direksi.

Komite Audit

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota Komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Audit per Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Bachtiar Alam
Anggota : Inge Barlian
Anggota : Elizabeth Tiur Manurung

Committees Under The Supervision of the Board Of Commissioners

In light of the Regulation of the Capital Market Supervisory Board No. 003/PM/05/2000 dated 5 May 2000 on the Implementation of Good Corporate Governance Principles, the Audit Committee was established. And pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-399/BEJ/07-2001 dated 20 July 2001 on the Securities Listing Rule No. 1-A point C.1.b. on the Obligation of Listed Companies to Possess an Audit Committee, and following up on the Circular No. SE-008/BEJ/12-2001 on Audit Committee Membership, the Company established the Audit Committee on 26 December 2001. Meanwhile, following up Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated 5 October 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, Bank BNP on 17 March 2008 established the Remuneration and Nomination Committee and on 30 January 2009 established the Risk Monitoring Committee. Thus, Bank BNP currently has all the committees as required by said Bank Indonesia Regulations.

Each committee comprises of independent parties and is chaired by an Independent Commissioner. An exception is the Remuneration and Nomination Committee, which based on the regulations of Bank Indonesia may assign an official in the field of HR to sit as a member of the Committee. As the organ which assists the Board of Commissioners in supervising the implementation of the duties of the Board of Directors, these three committees have perofrmed their job exceptionally, by conducting meetings with related work units at Bank BNP. Information and results of the meetings have been subsequently proposed to the Board of Commissioners to be used as input for the Board of Directors.

Audit Committee

The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner with two (2) members from independent parties. The composition of the Audit Committee in December 2016 was as follows:

Chairman : Bachtiar Alam
Member : Inge Barlian
Member : Elizabeth Tiur Manurung

Komite Pemantau Risiko

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan 2 (dua) orang anggota komite dari pihak independen. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite : Bachtiar Alam
Anggota : Inge Barlian
Anggota : Elizabeth Tiur Manurung

Komite Remunerasi dan Nominasi

Diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggota seluruh anggota Dewan Komisaris dan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2016 adalah:

Ketua Komite : Karel Tanok
Anggota Komite : Michio Atsuda
Anggota Komite : Tatang Hermawan
Anggota Komite : Bachtiar Alam
Anggota Komite : Agung Subagiyo (Kepala Divisi SDM)

Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi pada bank yang sama maupun bank lain, tidak merangkap jabatan pada bank yang sama, bank dan/atau perusahaan lain, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite

Komite Audit

Tugas utama Komite Audit adalah memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya meliputi:

1. Melakukan kajian atas rencana kerja Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), memantau pelaksanaannya dan melakukan evaluasi atas hasil kerjanya;
2. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
3. Memantau kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku;

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner with two (2) members from independent parties. The composition of the Risk Monitoring Committee in December 2016 was as follows:

Chairman : Bachtiar Alam
Member : Inge Barlian
Member : Elizabeth Tiur Manurung

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration & Nomination Committee is chaired by an Independent Commissioner, with all the members of the Board of Commissioners and the HR Division Head as its members. The composition of the Remuneration & Nomination Committee in December 2016 was as follows:

Chairman : Karel Tanok
Member : Michio Atsuda
Member : Tatang Hermawan
Member : Bachtiar Alam
Member : Agung Subagiyo (HR Division Head)

Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee are not part of the Board of Directors of the Bank or any other bank, do not hold any other position in the Bank, or any other bank and/or company, do not have financial, management, share ownership and/or family relationship whatsoever with any Commissioner, Director, and/or Controlling Shareholder or the Bank.

Implementation of Duties and Responsibilities of The Committees

Audit Committee

The main duty of the Audit Committee is to provide opinions in a professional and independent manner to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners, and to assist the Board of Commissioners in carrying out the duties of:

1. Reviewing the work plan of the Internal Audit Unit (IAU), monitoring the implementation and evaluating the results of the work;
2. Monitoring the compliance of the audit performed by the Public Accounting Firm with the applicable auditing standards;
3. Monitoring the conformity of the financial statements with the applicable accounting standards;

4. Memastikan terlaksananya tindak lanjut hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia oleh Direksi secara tepat waktu guna mendapatkan informasi yang digunakan sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau risiko meliputi:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Memastikan ketersediaan informasi dan implementasi dari standar, kontrol, batasan, pedoman dan kebijakan sehubungan dengan pengukuran dan pengelolaan risiko terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, risiko hukum dan risiko kepatuhan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan Remunerasi:
   1.1 melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
   1.2 memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan kebijakan Nominasi:
   2.1 menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   2.2 memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
   2.3 memberikan rekomendasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana yang dipersyaratkan kepada Dewan Komisaris.
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan:
   3.1 kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   3.2 prestasi kerja individual;
   3.3 kewajaran dengan *peer group*; dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

4. Ensuring the implementation of the Board of Directors's follow-up of Internal Audit, Public Accounting Firm, and Bank Indonesia findings from their respective audit results, in a timely manner in order to obtain information that will be used as a recommendation for the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee include:

1. Evaluating the conformity of the policies, procedures and limits of risk management with the implementation of these policies;
2. Monitoring and evaluating the implementation of the Risk Monitoring Committee and Risk Management Unit.
3. Ensuring the availability of information and the implementation of the standards, controls, limits, guidelines and policies with respect to the measurement and management of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, reputation risk, strategic risk, legal risk and compliance risk.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee include:

1. Related to the Remuneration Policy:
   1.1 evaluating the remuneration policy; and
   1.2 providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy of the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to the GMS.
2. Related to the Nomination Policy:
   2.1 preparing and providing recommendations on the systems and procedures and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   2.2 providing recommendations on prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
   2.3 providing recommendations of Independent Parties to be appointed as committee members (as per requirements) to the Board of Commissioners.
3. Ensuring that the remuneration policy at least is aligned to:
   3.1 the Bank's financial performance and fulfillment of reserve requirements, as stipulated in the prevailing regulations;
   3.2 individual work performance;
   3.3 fairness in the peer group; and consideration of the long-term goals and strategies of the Bank.

PELAKSANAAN RAPAT KOMITE-KOMITE

Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan agenda kerja yang telah disusun dan membahas hal-hal yang telah ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016 Komite-Komite telah melakukan rapat dengan divisi-divisi dan unit kerja terkait, dengan agenda rapat dan materi pembahasan yang signifikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat, apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dan segala keputusan rapat Komite bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite. Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan pendapat tersebut. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Demikian kami sampaikan.

COMMITTEE MEETINGS

Committee Meetings had been held in accordance with the work agendas as prepared, and in these meetings were discussed issues that have been assigned by the Board of Commissioners.

Throughout 2016 the committees held meetings with relevant divisions and work units, with the agendas and materials discussed being in accordance with the committees' duties and responsibilities in assisting the Board of Commissioners' supervisory function. The Audit Committee convened 6 (six) meetings, the Risk Monitoring Committee convened 15 (fifteen) meetings, and the Remuneration and Nomination Committee convened 9 (nine) meetings in 2016.

Decisions in committee meetings are arrived at consensus. Should there be no consensus, decisions are arrived at by a majority vote and all decisions in committee meetings are binding to all committee members. Decisions Committee meetings are recorded in the minutes of meetings and signed by all committee members present. The minutes of meetings are to be properly documented, and must include the dissenting opinions in the committee meetings and the reasons for such dissent. The results of these meetings constitute recommendations to be utilized optimally by the Board of Commissioners.

Thus this information has been presented.

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk.
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

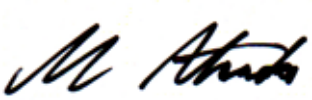

MICHIO ATSUDA
Presiden Komisaris
President Commissioner

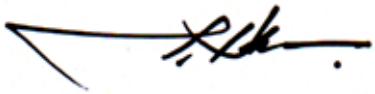

TATANG HERMAWAN
Komisaris
Commissioner

KAREL TANOK
Komisaris Independen
Independent Commissioner

BACHTIAR ALAM
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Laporan Komite Audit

Report of the Audit Committee

Komite Audit

Merujuk pada Surat Edaran Bapepam-LK, Departemen Keuangan No. 003/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 yang dipertegas dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit telah dibentuk sejak tahun 2001 oleh Dewan Komisaris PT Bank Nusantara Parahyangan.

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi pengelolaan Bank dan memastikan bahwa pengelolaan Bank dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independence* dan *fairness*, dalam rangka pencapaian nilai perusahaan dan nilai kepentingan stakeholders yang optimal.

Susunan Komite Audit per Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Bachtiar Alam
Anggota : Inge Barlian
Anggota : Elizabeth Tiur Manurung

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite Audit bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemantauan terhadap kecukupan pengendalian intern, kecukupan dan kebenaran atas proses pembuatan Laporan Keuangan, efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Auditor Eksternal dan Internal, melakukan identifikasi terhadap hal–hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, melakukan penyusunan konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan
   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Informasi Keuangan yang akan diterbitkan oleh Bank BNP, seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya.

Audit Committee

In light of the Circular of the Bapepam-LK, Department of Finance No. 003/PM/2000 dated 5 May 2000, affirmed by the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-41/PM/2003 dated 22 December 2003 on the Establishment and Work Guideline of the Audit Committee, the Board of Commissioners of PT Bank Nusantara Parahyangan established the Audit Committee in 2001.

The Audit Committee was established in order to assist the Board of Commissioners in carrying out its authority to supervise the management of the Bank and to ensure that the Bank has been managed under the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, in order to provide optimum value for the Company as well as the stakeholders.

The composition of the Audit Committee in December 2016 is as follows:

Chairman : Bachtiar Alam
Member : Inge Barlian
Member : Elizabeth Tiur Manurung

Duties And Responsibilities

In accordance with the Audit Committee Charter, the duties and responsibilities of the Audit Committee are to be performed professionally and independently. The Audit Committee is responsible for carrying out the duties and functions of supervision and monitoring of the adequacy of internal control, adequacy and correctness of the financial statements preparation processes, effectiveness of the Inspection Result Reports (LHP) made by the External Auditor and Internal Auditors, identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, performing the drafting and analysis related to the functions of the Audit Committee, and carrying out other tasks given by the Board of Commissioners, which includes the following:

1. Financial Statements
   Monitoring and evaluating all financial information to be published by Bank BNP, such as financial statements, financial projections, and other financial information.

2. Sistem Pengawasan Internal
   Melakukan review dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Auditor Eksternal.

3. Kepatuhan/*Compliance*
   Melakukan review dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank BNP terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Ketentuan atau Perundang-undangan lain yang berlaku terkait dengan kegiatan/usaha perbankan.

4. Internal Audit
   Melakukan review dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

5. Audit Eksternal
   Melakukan review dan evaluasi terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal.

6. *Good Corporate Governance* (GCG)
   Mendorong secara berkelanjutan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan Bank yang meliputi transaparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independence*) dan kewajaran (*fairness*).

7. Manajemen Risiko – bekerja sama dengan Komite Pemantau Risiko
   Melakukan *review* dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dari pengelolaan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi melalui koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala, seperti yang tercermin dalam beberapa hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2016 berikut ini:

1. Memberikan tanggapan terhadap hasil temuan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali terkait kelengkapan dokumen pemeriksaan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi KAP.

2. Internal Control System
   Conducting review and evaluation of the effectiveness of the implementation and Inspection Result Reports (LHP) made by the Internal Audit Unit (IAU) as well as the External Auditor.

3. Compliance
   Conducting review and evaluation of the compliance of Bank BNP with the Financial Services Authority regulations and other prevailing regulations in the banking industry.

4. Internal Audit
   Conducting review and evaluation of the implementation of Internal Audit Unit (IAU) duties.

5. External Audit
   Conducting review and evaluation of the actions taken by the auditees on the results of audit conducted by the external auditor.

6. Good Corporate Governance (GCG)
   Promoting the constant application of the principles of Good Corporate Governance (GCG) in the management of the Bank, which includes the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

7. Risk Management – in collaboration with the Risk Monitoring Committee
   Conducting review and evaluation and reporting all potential risks resulting from risk management implemented by the Board of Directors, through coordination with the Risk Monitoring Committee.

The results of monitoring conducted by the Audit Committee are reported to the Board of Commissioners on a regular basis, as reflected in the following achievements of the Audit Committee in 2016:

1. Responded to the findings of Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali in relation to the completeness of audit documentation as input and consideration for the Public Accounting Firm.

2. Memberikan laporan secara berkala, disertai rekomendasi dan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Manajemen.

3. Memberikan rekomendasi mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2016, yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) yang merupakan *independent member* BKR International.

4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala.

5. Membantu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan komunikasi secara langsung maupun dalam rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

6. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.

7. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan yang dilakukan Bank BNP telah mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan *Good Corporate Governance.*

Demikian pula Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP telah mengacu pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Provided regular reports, along with recommendations and suggestions to the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in supervising the Management.

3. Provided recommendations regarding the appointment of a Public Accounting Firm for the audit of financial statements for FY2016, i.e. the Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a), independent member of BKR International.

4. Monitored and evaluated the execution of Internal Audit Unit's (IAU) tasks in an intensive and regular manner.

5. Helped monitor the follow-up to audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process, by communicating directly and in meetings with the Internal Audit Head.

6. Monitored and evaluated the compliance of the audit conducted by the Public Accounting Firm with the applicable Auditing Standards.

7. Supervised the preparation of the financial statements to ensure compliance with the applicable accounting standards and policies.

The Audit Committee's evaluation results demonstrate that all activities of Bank BNP have taken into consideration proper risk management and implementation of Good Corporate Governance principles.

The Financial Statements for FY2016 as presented by the Public Accounting Firm have been in accordance with the Financial Accounting Standards and Bank Indonesia Regulations. The independence and objectivity of the public accounting firm in auditing the financial statements of Bank BNP have been in compliance with the auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Penyelenggaraan Rapat

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam tahun 2016. Sesuai dengan Piagam, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.

Penyelenggaraan rapat sepanjang tahun 2016 tersebut meliputi rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk membahas ruang lingkup audit internal, rencana audit internal, temuan audit internal, perkembangan pemeriksaan audit internal dan hasil pemeriksaan cabang-cabang yang telah dilakukan oleh SKAI serta rekomendasi dan usulan-usulan yang diberikan oleh Komite kepada SKAI.

Selain itu rapat dengan Akuntan Publik untuk membahas ruang lingkup audit, rencana audit, temuan audit dan perkembangan pemeriksaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Serta rapat dengan Direksi, Divisi Terkait dan Akuntan Publik untuk membahas laporan akhir atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik.

Meetings

The Audit Committee convened 6 (six) meetings in 2016. In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee held meetings with the frequency of at least equal to the minimum number of Board of Commissioners Meetings set out in the Articles of Association, or at least 4 (four) times in year.

Meetings held in 2016 included meetings with the Internal Audit Head to discuss internal audit scope, internal audit plan, and internal audit findings, as well as development of internal audit investigations and results of branch audit performed by the IAU, and also the recommendations given by the Committee to the IAU.

In addition, meetings were also held with the Public Accounting Firm to discuss audit scope, audit plan, audit findings and the progress of the audit conducted by the Public Accounting Firm. Other meetings were meetings with the Board of Directors, related divisions, and the Public Accounting Firm to discuss the final report of the audit results the Firm had performed.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

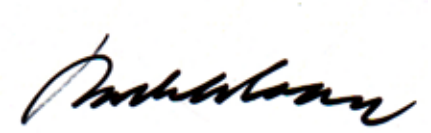

BACHTIAR ALAM
Ketua Komite Audit
Audit Committee Chairman

Laporan Direksi

Report from the Board of Directors

"... ke depan, pertumbuhan KTA Mirai+ dapat menjadi kontributor pendapatan bunga yang signifikan dan terus bertumbuh serta menjadi produk unggulan Bank BNP

... going forward the growth of Mirai+ will be the primary driver of interest income and will consistently grow, thus becoming Bank BNP's flagship product"

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kami tidak dapat menyangkal bahwa periode 2016 merupakan periode yang sangat berat dan penuh dengan perjuangan serta kerja keras bagi seluruh insan Bank BNP. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi makro yang cukup menekan sektor riil, kami harus mempertahankan kinerja keuangan dan upaya perbaikan kualitas aset Bank BNP yang sangat tidak mudah. Kami menutup tahun 2016 dengan mencatatkan kinerja keuangan yang kurang seperti diharapkan, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan target dalam Rencana Bisnis Bank BNP. Hasil yang kami raih belum memuaskan dan rata-rata deviasi terhadap pencapaian budget adalah sekitar 75% - 80%.

Ini dipengaruhi selain oleh kondisi makro, juga sebagai konsekuensi kebijakan strategis yang ditempuh Bank BNP dalam upaya melakukan perbaikan di sisi kualitas proses internal Bank. Sebagai dampak dari kondisi eksternal dan strategi perbaikan proses internal, khususnya dalam pemberian keputusan kredit, Bank harus meningkatkan pembentukan Cadangan Penurunan Kerugian Nilai (CKPN) kredit sebagai akibat naiknya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loans) dan mengalami penurunan volume portofolio kredit-nya. Sekalipun perolehan laba bersih tidak sesuai dengan proyeksi, namun secara kualitas proses, Bank BNP telah memiliki kesiapan untuk berhasil dalam peningkatan kinerja bisnis dan keuangannya di tahun yang akan datang.

Esteemed Shareholders and Stakeholders,

It is undeniable that 2016 was truly a rough period for us, which we had to overcome with hard work involving all employees of Bank BNP. Amidst the macroeconomic downturn that pressured the real sector, we had to maintain our financial performance while improving Bank BNP's asset quality—not an easy task to begin with. We closed the year 2016 with our financial fundamentals being lower than the previous year's financial achievements and also below the targets set in Bank BNP's Business Plan. Our financial results was less than satisfactory, deviating about 75% - 80% from the stated budget.

This was partially owing to the macroeconomic conditions as well as to the consequence of Bank BNP's strategic policy, implemented in order to improve the Bank's internal processes' quality. As an impact of the external conditions and the internal process improvement measures, in particular with regards to decision-making in lending, the Bank had to increase its Allowance for Impairment Losses owing to the increase in Non-Performing Loans, thus having its lending portfolio declining in terms of volume. Although our actual net income for the year was lower than the projected figure, in terms of process quality, Bank BNP now is prepared to improve its business and financial performance in the coming years.

Takeru Agawa

Presiden Direktur
President Director

Lingkungan Usaha di Tahun 2016

Pertumbuhan ekonomi di awal tahun 2016 masih mengalami perlambatan dengan tantangan yang cukup berat. Harga beberapa komoditas yang tetap rendah dan transaksi berjalan dalam posisi defisit menyebabkan nilai tukar Rupiah belum beranjak naik, disertai dengan turunnya harga bahan bakar minyak, sedangkan kondisi likuiditas dan tingkat persaingan yang semakin ketat juga memicu naiknya biaya dana.

Untuk itu sebagai upaya untuk meredam dampak dari situasi global tersebut terhadap ketahanan keuangan negara, Bank Indonesia telah mengambil langkah dengan menurunkan suku bunga acuan (BI rate) yang sampai pada akhir tahun 2016 berada pada angka 4,75% (7-Day Repo Rate) dari semula 7,25% pada awal tahun 2016 (masih menggunakan nilai bulanan).

Di akhir tahun 2016, indikator makro ekonomi Indonesia secara umum terlihat membaik. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,02%, sedikit di bawah proyeksi pemerintah sebesar 5,1%, naik dari semula 4,88% di tahun sebelumnya.

Perbankan Nasional

Peran sektor perbankan nasional di Indonesia selama tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu pada kisaran rata-rata 7,4% (yoy) untuk kredit dan rata-rata 6,5% (yoy) untuk Simpanan Dana Pihak Ketiga.

Kinerja industri perbankan nasional di tahun 2016 memang masih dibayangi beberapa permasalahan dan mengalami tekanan yang besar khususnya terhadap risiko likuiditas dan risiko kredit yaitu dengan kekhawatiran dan kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah sekalipun secara nasional rasio NPL mengalami penurunan dari 3,10% menjadi 2,93% pada triwulan IV tahun 2016.

Hal ini disikapi Bank BNP sepanjang tahun 2016 dengan berupaya mengurangi dampak eksternal terhadap kinerja bank dan di saat yang sama perbaikan terhadap kualitas proses tetap dijalankan agar dapat menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan di masa datang.

Kebijakan/Langkah Strategis

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai komitmen atas tujuan dan sasaran perusahaan pada tahun 2016, Bank BNP melakukan beberapa kebijakan/langkah strategis diantaranya menerapkan tata kelola perbankan yang sehat (Good Corporate Governance), perbaikan Governance Risk Compliance (GRC), peningkatan peran dan fungsi Manajemen Risiko di berbagai aspek.

Mengoptimalkan jaringan kantor yang ada dengan penerapan model bisnis yang sesuai dengan kekuatan BNP akan mendorong pencapaian raihan target market yang

2016 Business Climate

In the beginning of 2016, economic growth was sluggish in the face of massive challenges. The prices of certain commodities remained very low, and the current account balance was in deficit, resulting in the Rupiah's stagnating exchange rate in the market. Those were coupled with the decrease in fuel prices, while tighter liquidity and fiercer competition in the industry made cost of funding rise.

Therefore, as a measure to dampen the impacts of the global situation on the state finance, Bank Indonesia lowered its reference interest rate, the BI rate, which stood at the end of 2016 at 4.75% (7-Day Repo Rate), from 7.25% at the beginning of 2016 (where the monthly reference rate was still used).

At the end of 2016, Indonesia's macroeconomic indicators showed some improvement. Indonesia's economy grew by 5.02%, slightly lower than the Government's projection of 5.1%, but higher than the previous year's achievement of 4.88%.

National Banking Industry

The national banking sector in Indonesia throughout 2016 demonstrated a modest increase of about 7.4% (yoy) in terms of lending, and an average of 6.5% (yoy) in terms of third party funding.

The performance of the national banking industry in 2016 was shadowed by various issues and pressures, in particular regarding liquidity risk and credit risk, with the worry about and tendency of rising non-performing loans, although the nationwide NPL ratio declined from 3.10% to 2.93% by the fourth quarter of 2016.

Bank BNP addressed this issue throughout the year by striving to diminish the external impacts on the Bank's performance and improving its process quality at the same time, in order to improve its business further in the coming years.

Strategic Policies/Measures

In an effort to support the commitment to achieving the Company's targets and goals for 2016, Bank BNP conducted a number of strategic policies/measures, among others, implementation of Good Corporate Governance, strengthening Governance Risk Compliance (GRC), and strengthening the role and function of Risk Management across all aspects.

Optimizing the existing office network and implementing a model business tailored to Bank BNP's strengths will help the Bank penetrate its target market, while continuing to

efektif disertai dengan upaya secara terus-menerus untuk meningkatkan fungsi internal control (dual control, waskat, dan three lines of defense).

Manajemen menempuh kebijakan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan soft skill maupun technical skill karyawan dan mewujudkan organisasi yang sehat. Ini diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas proses bisnis dan operasional yang selalu mengandalkan pada kemampuan teknologi informasi yang dimiliki serta selalu dikembangkan sesuai dengan kekiniannya.

Untuk melengkapi aspek pemasaran dan ekspansi bisnis, inovasi dan pengembangan terhadap produk dan jasa selalu dikaji dan dicermati sesuai dengan kebutuhan nasabah (customer needs), sehingga produk dan aktivitas yang dijual ke pasar sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai respons dari kondisi eksternal yang memberi tekanan pada bisnis Bank secara keseluruhan, Bank BNP melakukan beberapa langkah strategis lainnya yaitu dengan melakukan penyesuaian suku bunga untuk simpanan khususnya yang mengandung bunga mahal seperti Deposito Berjangka, meningkatkan porsi CASA, dan menjaga Net Interest Margin di tingkat yang memadai, mempercepat proses restrukturisasi dan recovery kredit bermasalah, dan meningkatkan efisiensi melalui inisiatif-inisiatif effective cost management.

Layanan *Internet Banking* (*Digital Banking*)

Untuk meningkatkan dan memberikan kepuasan kepada para pelanggan kami (customer experience) kami terus berupaya untuk mengembangkan layanan perbankan melalui akses internet dan mengoptimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi yang dimiliki oleh Bank BNP. Sebagaimana Laporan kami pada tahun lalu, bahwa Bank BNP telah mengimplementasikan internet banking yang secara terbatas masih dilakukan hanya untuk Karyawan saja, dan pada tahun 2016 akses layanan telah kami tingkatkan kepada nasabah-nasabah tertentu terlebih dahulu/pihak ketiga.

Kami berharap bahwa layanan perbankan secara digital yang ditawarkan kepada para nasabah melalui fasilitas internet banking akan menjadi salah satu alternatif dalam melengkapi kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi keuangan melalui Bank BNP. Di samping itu, perluasan delivery channel terus dilakukan seperti pemanfaatan mesin Electronic Data Capture (EDC) dan kerjasama dengan jaringan ATM seperti dengan ATMI akan turut melengkapi kemudahan transaksi keuangan nasabah melalui Bank BNP.

Lebih jauh harapan kami bahwa di era digital ini, Bank BNP dapat terus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan layanan jasa perbankan yang up to date dan kami memiliki keyakinan bahwa dengan pelayanan yang baik dan

improve the functions of internal control (dual control, waskat, and the three lines of defense).

The management pursued the policy to continuously improve human resources competence via soft skill and technical skill training for employees and shape a healthy organization. This is expected to support the efforts to improve business and operational processes' quality, by relying on its information technology capability which is constantly updated.

To strengthen its marketing and business expansion efforts, the Bank constantly reviews its product innovations and development to be always aligned with what the customers need, thus ensuring that the products and activities the Bank offers to the market are in demand.

In response to the external pressures that weighed down the Bank's overall business performance, the Bank conducted a number of other strategic measures, such as adjusting its interest rate for deposits especially those with high interest rates such as time deposits, increasing the portion of CASA, and maintaining the Net Interest Margin at an acceptable rate, speeding up restructuring and recovery of non-performing loans, and improving efficiency via effective cost management initiatives.

Internet Banking Services

To improve the level of satisfaction and ensure a good customer experience, we constantly strive to develop our banking services via internet access and optimize our services by making use of Bank BNP's existing technologies. As stated in our previous year's report, Bank BNP had been running the internet banking platform on a limited basis covering only our employees. In 2016, this service was expanded to our select customers and third parties.

It is our hope that the digital banking services we offer to our customers via internet banking will be one of the alternatives to meet what our customers need in their financial transaction needs via Bank BNP. In addition, the expansion of our delivery channels continued to take place, via the use of Electronic Data Capture (EDC) machines and cooperation with ATM networks such as ATMI—all this will help improve our customers' experience in performing financial transactions with Bank BNP.

Furthermore, we also hope that in this digital era Bank BNP may continue to adapt to the recent developments in banking. We have a firm conviction that with the help of a high level of service and support from an advanced IT

dukungan kemampuan sistem IT yang maju, Bank BNP akan mampu memberikan layanan perbankan yang terintegrasi (one-stop service) dan tanpa batas kepada para nasabah.

Komitmen Baru

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik baik dari sisi peningkatan bisnis maupun kualitas usaha, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh unsur yang ada di Bank BNP, di mana Manajemen di tahun 2016 telah berupaya untuk terus meningkatkan nilai-nilai dalam bekerja untuk memberikan customer experience yang semakin baik.

Pembaharuan komitmen Bank BNP dalam pencapaian target dan sasaran di samping visi yang telah ada yaitu dengan "Menjadikan Bank Bank BNP yang dicintai oleh Karyawan maupun Nasabahnya" tidak berdiri sendiri, secara internal pengejawantahan nilai-nilai utama pelayanan dalam bekerja dan budaya perusahaan (3 NO's) terus dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan.

Komitmen Bank BNP untuk mempermudah akses layanan nasabah secara bertahap terus dilakukan baik melalui kemudahan memperoleh informasi maupun kebutuhan atas transaksi lainnya yang tentunya didukung oleh teknologi yang dimiliki Bank BNP seperti upaya untuk melakukan e-statement, form aplikasi yang secara elektronik, persiapan Mobile Banking dan pengembangan internet banking phase 2 diharapkan dapat menambah nilai pelayanan Bank kepada nasabahnya.

Perubahan Pengurus

Pada tahun 2016 awal setelah diperolehnya pernyataan lulus fit & proper test dari OJK, Bank BNP telah mengangkat Saudara Eiichiro Sakai sebagai Direktur yang baru yang akan bertanggung jawab atas proses dan kegiatan Perencanaan, Perkreditan dan IT. Pengangkatan ini dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Februari 2016.

Pengangkatan Direktur ini guna melengkapi dan menggantikan Saya, Takeru Agawa yang telah ditetapkan RUPS untuk menjadi Presiden Direktur, sehingga kekosongan pada posisi Direktur Perencanaan dan Keuangan harus segera dipenuhi guna memperkuat daya saing dan mempertahankan pencapaian bisnis yang telah diperoleh serta kebutuhan untuk pertumbuhan Bank BNP di masa mendatang.

Sedangkan perubahan pengurus juga terjadi pada layer kedua/pejabat eksekutif yang secara bertahap mengalami beberapa penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank BNP.

system, Bank BNP will be able to provide a one-stop service solution without bounds to our employees.

New Commitments

To achieve the best results both in terms of business expansion and quality, a staunch commitment is required from all elements from within Bank BNP. Thus, in 2016 the management sought to strengthen its working values in order to deliver better customer experience.

The renewing of Bank BNP's commitment to achieving its targets and goals in addition to the realizing the vision of "Making Bank BNP's business loved by employees and customers alike" was not performed solitarily; internally, the manifestation of the core values in service and corporate culture (the 3 NO's) took place continuously via various media and activities.

Bank BNP's commitment to improving ease of access to all services for customers was continuously fulfilled in terms of ease of acquiring information as well as ease of access to other transactions, supported by the technologies owned by Bank BNP, such as e-statement, electronic application forms, Mobile Banking preparation, and development phase 2 of the internet banking—all of these are expected to improve the Bank's quality of service to its customers.

Change in Management

In early 2016, after passing the fit and proper test conducted by the OJK, Eiichiro Sakai was appointed by Bank BNP as a new Director to be responsible for the processes and activities of Planning, Credit, and IT. His appointment was based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 19 February 2016.

The appointment of the new Director was intended to strengthen the composition of the Board of Directors as well as to replace myself, Takeru Agawa, who had been appointed by the GMS to be the President Director of the Bank, which resulted in the vacancy of the Planning and Finance Director position, which had to be filled immediately in order to strengthen the Bank's competitiveness and maintain the business performance and fulfill future business needs of the Bank to expand.

Changes in management also took place on the second layer, namely the layer of executive officers, who were gradually replaced and adjusted by taking into account the needs and condition of Bank BNP.

Kinerja Keuangan Bank BNP Tahun 2016

Manajemen dan karyawan Bank BNP bersama-sama berupaya merealisasikan dan mempertahankan kinerja keuangan yang mengalami tekanan dalam portofolio kredit yang dimiliki. Seiring berjalannya waktu penyelesaian kredit bermasalah dan ketidakmampuan untuk mengatasi run off loan yang berjalan mengakibatkan menurunnya volume bisnis Bank BNP secara umum. Di samping itu, persaingan usaha di industri perbankan juga ketat. Hasil pencapaian kinerja keuangan Bank BNP tahun 2016 tercermin dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan 2016 ini.

Sepanjang tahun 2016, Bank BNP berhasil membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp 12,07 miliar menurun sebesar 86,63% dari perolehan Laba tahun sebelumnya sebesar Rp 90,31 miliar. Penurunan perolehan laba ini terutama disebabkan oleh naiknya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terkait dengan naiknya NPL netto dari semula 3,98% pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,07%, atau naik 0,09% di tahun 2016 termasuk didalamnya adalah CKPN untuk penghapusan Kredit. *Return on equity* (ROE) tercatat sebesar 0,70% turun 5,01% dari perolehan tahun 2015, sementara rasio kecukupan modal atau CAR meningkat menjadi sebesar 20,57% dari semula 18,07% di tahun 2015.

Total Pendapatan Operasional Bersih Bank mencapai Rp 16,48 miliar dari sebelumnya tercatat mencapai Rp 87,01 miliar di tahun 2015. Penyebab utama turunnya Pendapatan Operasional selain yang telah disebutkan diatas adalah naiknya biaya Beban Lain-Lain dan Beban Operasional Lainnya di luar bunga, masing-masing 35,27% dan 28,77%, dimana jumlah peningkatan Beban ini lebih besar dari persen peningkatan perolehan Pendapatan Bunga Bersih yang besarnya hanya 8,49%.

Total Aset Bank mengalami penurunan sebesar 10,53% menjadi sebesar Rp 7,71 triliun dari semula Rp 8,61 triliun pada tahun 2015, hal ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan Kredit sebesar 17,97% menjadi hanya Rp 5,31 triliun di akhir 2016. Di sisi pendanaan, total dana nasabah juga mengalami penurunan sebesar 12,13% dari semula Rp 7,18 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 6,31 triliun pada akhir tahun 2016, dengan komposisinya masih didominasi dana dengan bunga mahal yaitu Simpanan Berjangka. Penurunan pada simpanan ini juga sebagai akibat kebijakan internal manajemen untuk melakukan perhitungan kembali atas biaya dana/cost of fund sehingga pada triwulan 4 suku bunga simpanan berjangka secara bertahap disesuaikan menurut suku bunga acuan dan perhitungan kemampuan pembayaran bunga.

Pencapaian versus Target

Manajemen Bank BNP menyadari sepenuhnya bahwa strategi penguatan dan perbaikan dalam sisi proses dan kualitas aset akan berdampak cukup signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi perekonomian nasional yang masih bergerak lambat telah menekan hasil

Bank BNP's 2016 Financial Performance

Together, the management and employees of Bank BNP worked hard to maintain the Bank's financial performance which continued to be weighed down by the pressures surrounding its lending portfolio. In time, the resolution of non-performing loans and the inability to overcome the ongoing run off loans resulted in the decline in Bank BNP's overall business volume. In addition, business competition in the banking industry remained tight. Bank BNP's financial achievements in 2016 are therefore reflected in the 2016 Financial Statements as included in this Annual Report.

In 2016 Bank BNP recorded income before tax of Rp 12.07 billion, down by 86.63% from the previous year's income before tax of Rp 90.31 billion. The decline in income before tax was attributable to the formation of Allowance for Impairment Losses in relation to the rising NPL – net ratio, from 3.98% in 2015 to 4.07% in 2016, or a rise of 0.09%. Included in this was the allowance for impairment losses for loan write-offs. Return on Equity (ROE) stood at 0.70%, down by 5.01% from 2015's figure, while the Capital Adequacy Ratio (CAR) increased from 18.07% in 2015 to 20.57% in 2016.

The Bank's total net operating income in 2016 stood at Rp 16.48 billion, down from Rp 87.01 billion in 2015. The main factors that contributed to this decline aside from the factors mentioned above were the increases in Other Expenses and Other Operating Expenses apart from Interest, at 35.27% and 28.77%, respectively. The increase in these expenses was more than the percentage increase in Net Interest Income, which stood at 8.49%.

The Bank's Total Assets dropped by 10.53% to Rp 7.71 trillion, from Rp 8.61 trillion in 2015. This was in line with the decline in credit growth by 17.97% to Rp 5.31 trillion by the end of 2016. In terms of funding, total funds dropped by 12.13% from Rp 7.18 trillion as at the end of 2015 to Rp 6.31 trillion as at the end of 2016. The composition was largely formed by high cost funds, i.e. Time Deposits. The decline in this type of deposit was due to the management's internal policy to recalculate its cost of fund, and thus at Q4 2016, the Bank's time deposit's interest rates were adjusted to the prevailing reference interest rate and the calculation on the ability to pay interest.

Achievements vs. Targets

Bank BNP's management fully realizes that the strategy of strengthening and improving processes and asset quality will significantly impact the ability to achieve targets set by the shareholders. Taking into consideration the national economic situation, which was moving only sluggishly, Bank BNP's performance in 2016 was hampered. This is reflected

pencapaian kinerja Bank BNP di tahun 2016 ini. Hal ini tergambar dari beberapa indikator keuangan dalam Neraca Bank yang mencatatkan realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank BNP.

Beberapa indikator keuangan dalam neraca terdeviasi cukup signifikan, seperti Jumlah Kredit yang disalurkan hampir mencapai 24,52% dari target, serta Laba Bersih yang terdeviasi sangat signifikan yaitu sebesar 88,79% dari target 2016. Penurunan pencapaian Kredit dari tahun sebelumnya lebih dikarenakan Bank BNP pada awalnya melakukan perubahan ticket size untuk pemberian kreditnya menjadi hanya maksimal Rp 10 miliar – Rp 25 miliar saja, sehingga pergerakan antara run off dan pertumbuhan kredit baru menjadi tidak seimbang. Kendati seakan-akan ini menyebabkan penurunan volume, pada dasarnya Bank BNP menempuh kebijakan resizing portofolio kreditnya, ditambah dengan terdapatnya beberapa debitur yang terdampak oleh kebijakan perbaikan kualitas proses dan kualitas aset yang dijalankan oleh manajemen Bank BNP.

Sedangkan deviasi negatif dalam perolehan Laba Bersih Tahun Berjalan selain disebabkan terjadinya peningkatan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 143%, juga Beban Operasional tetap yang tidak dapat dihindari seperti Biaya Administrasi dan Umum, Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Lain-Lain. Dibandingkan dengan targetnya, Laba Bersih belum terproyeksi sebagai dampak memburuknya kualitas kredit yang akhirnya membuat Bank melakukan hapus buku terhadap beberapa outstanding debitur yang bermasalah. Upaya untuk dilakukannya penghapusan atas kredit bermasalah tersebut juga ditempuh setelah menilai kemampuan debitur untuk menyelesaikan utangnya sudah tidak memiliki harapan lain.

Tinjauan Lini Usaha

Beberapa lini usaha Bank BNP selama tahun 2016 cenderung menurun, hal ini tidak terlepas dari kebijakan umum Bank BNP yang fokus pada perbaikan system process, baik dalam kegiatan penyediaan dana maupun kegiatan penghimpunan dana, dan diberlakukannya kebijakan profiling terhadap portofolio kredit besar.

Kebijakan penyediaan dana dalam bentuk penyaluran kredit baik untuk Komersil maupun Konsumer pada tahun 2016 diproyeksikan tidak tumbuh agresif hanya berkisar 7%, namun pada realisasinya run off dari existing debitur cukup besar, sehingga menguras portofolio outstanding loan yang ada, dan dengan demikian volume pinjaman/kredit yang diberikan mengalami penurunan.

Lini Usaha untuk jenis kredit konsumtif relatif mengalami pertumbuhan yang negatif, karena target pertumbuhan kredit konsumtif memang tidak diproyeksikan untuk tumbuh terlalu besar, mengingat beberapa kondisi bisnis di sektor properti/perumahan dan otomotif cukup tinggi penawarannya dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut Bank BNP tidak memproyeksikan kredit untuk konsumtif tumbuh.

by a number of financial indicators in the Bank's financial position, which were lower than the targets set in the Bank's Business Plan.

Certain financial indicators of the Bank's financial position were deviated greatly from the target. As an example, total lending was only 24.52% off the stated target. Meanwhile, net income was off by 88.79% from the 2016 target. The decline in lending from the previous year's amount was largely owing to Bank BNP's switching of ticket size for its loan facility, down to a maximum of Rp 10–25 billion only, thus disrupting the balance in the movements between run off and new lending growth. What seems like a decline in volume was in fact because of Bank BNP's policy to resize its lending portfolio, plus a number of debtors that were affected by the policy for improving process quality and asset quality, as implemented by the Bank's management.

The negative deviation in Income for the Year was attributable not only to the additional formation of Allowance for Impairment Losses by 143%, but also to the routine Operating Expenses, comprising the Administrative and General Expenses, Employee Expenses, and Other Expenses. The Bank was unable to achieve its Net Income target owing to the declining lending quality, which resulted in the Bank's writing off the loans of some outstanding troubled debtors. The write-off was done on the troubled loans only after the Bank thoroughly evaluated the debtors' ability and concluded that there were no further recourse for them to repay their debts.

Business Review

Certain business lines of Bank BNP in 2016 tended to decline, resulting from Bank BNP's general policy that was focused on system process improvement in both lending and funding, and the enactment of profiling of large debtors.

Lending policy for lending to the Commercial and Consumer sectors in 2016 had initially been projected to grow relatively conservatively, by 7%. However, the run off loans of existing debtors were substantial, and thus this drained the outstanding loan portfolio of the Bank. And thus, the lending volume of the Bank shrank.

The Bank's consumer loans experienced a negative growth. However, this sector was not targeted to grow significantly, considering the prevailing conditions in the housing/property market and automotive market. To anticipate this, Bank BNP did not set a strong growth projection for its consumer loans.

Kredit Tanpa Agunan yang disebut dengan Mirai+ yang diluncurkan di awal tahun 2016, sangat memberikan kontribusi positif khususnya pada sisi perolehan Interest Margin, mengingat suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Dengan menggunakan JKT 48 sebagai brand ambassador KTA Mirai+, pertumbuhan volume pinjaman KTA Mirai+ sangat progresif hal ini nampak dari pertumbuhan volume yang meningkat sebesar 142% dari semula Rp 157 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp 380 miliar pada akhir tahun 2016.

Unsecured Loan product marketed with the Mirai+ brand, launched in early 2016, contributed positively to the Bank's Interest Margin, considering the high interest rate associated with this loan. Using JKT 48 as Mirai+'s brand ambassador, growth in Mirai+ was highly progressive in terms of volume, up by 142% from Rp 157 billion in 2015 to Rp 380 billion in 2016.

Tata kelola yang lebih advanced telah menunjang proses percepatan approval atas aplikasi yang masuk baik dengan menggunakan aplikasi scoring model untuk memberikan dasar pertimbangan keputusan yang relatif terukur akurasinya, mengingat kredit ini cukup high risk/unsecured karena tidak didukung oleh adanya agunan. Oleh karenanya Bank BNP terus-menerus mengembangkan sistem proses yang aman, cepat dan akurat serta didukung oleh scoring model yang akurat, sehingga diharapkan ke depannya pertumbuhan KTA Mirai+ dapat menjadi kontributor pendapatan bunga yang signifikan dan terus bertumbuh serta menjadi produk unggulan Bank BNP.

A more advanced governance sped up the approval process on incoming applications using the scoring model to provide the basis for decision-making with relatively high accuracy, given that this type of loan, being unsecured by collateral, has a high inherent risk. Therefore, Bank BNP continued to develop a safe, fast, and accurate process supported by an accurate scoring model so that going forward the growth of Mirai+ will be the primary driver of interest income and will consistently grow, thus becoming Bank BNP's flagship product.

Pada lini usaha penghimpunan dana/funding Bank BNP menempuh upaya untuk menyesuaikan suku bunga dengan tidak terlalu mengikuti trend pasar, namun mengacu pada suku bunga acuan dengan mempertimbangkan beban biaya dana/cost of fund. Diharapkan dengan dilakukannya penataan kembali atas pricing dana pihak ketiga ini perolehan NIM Bank BNP akan lebih baik. Sekalipun NIM telah diupayakan untuk diperbaiki namun terdapat konsekuensi atas kebijakan tersebut yaitu terjadinya penurunan atas volume simpanan, khususnya untuk Simpanan Berjangka/ Deposito, yang memang mengandung suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan Tabungan dan Giro.

In terms of funding, Bank BNP pursued the strategy to adjust its interest rate away from being too closely linked to the market trend but more to the reference interest rate, by considering the cost of fund. This realignment of interest rate for the third party funds pricing was expected to result in a greater NIM for Bank BNP. Despite this effort aimed at strengthening NIM, the policy had its consequences, among others the decline in the total funds, in particular in time deposits, which are associated with higher interest rates than savings or demand deposits.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam menghadapi era persaingan berat khususnya di dunia perbankan yang sarat dengan kemajuan teknologi, Bank BNP perlu memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada di pasar dengan mengoperasikan sumber daya IT yang dimiliki oleh Bank BNP.

Bank BNP telah memiliki rumusan strategi pengembangan SDM baik soft skill maupun technical skill yang terfokus pada pembentukan karakter, kualitas layanan dan operasional dan pemantauan kinerja, serta pemberian penghargaan kepada karyawan berkinerja tinggi, yang semuanya memungkinkan perbaikan praktik manajemen secara berkesinambungan melalui pendidikan untuk layanan perbankan yang keseluruhannya diwadahi oleh Learning Center melalui BNP University.

Pengembangan SDM senantiasa diselaraskan dengan pengembangan bisnis Bank, yakni melalui pembentukan fondasi yang mampu mengakomodasi proses yang

Human Resources Development

Facing the harsh climate of competition in the banking industry that is becoming increasingly more dependent on technological advancements, Bank BNP requires a high quality workforce that is able to adapt to the fierce challenges in the market by harnessing the information technology (IT) resources owned by Bank BNP.

Bank BNP has already formulated its human resources management strategy, for both the employees' soft skills as well as technical skills. The strategy is focused on shaping the characters, improving service and operations and performance monitoring, and conferring rewards to high-performing employees—all of which allowed for the continuous improvement in management practices via banking services and education, which fall under the responsibility of the Learning Center, via the BNP University.

Human resources development has constantly been aligned with the Bank's business growth, i.e. by forming the foundation that will accommodate processes required to

diperlukan untuk mencapai tingkat layanan yang memenuhi bahkan melebihi ekspektasi nasabah.

Pernyataan Kepatuhan Bank terhadap Tata Kelola Perusahaan

Kami menekankan kepada seluruh jajaran pengurus dan karyawan, bahwa sekalipun Bank BNP sedang berada pada kinerja yang berat dan penuh tantangan, namun upaya untuk meminimalkan dampak atas tekanan kondisi eksternal maupun internal dalam menjalankan roda bisnisnya harus tetap berlandaskan pada struktur tata kelola perusahaan yang telah dibangun selama ini. Dengan adanya struktur tata kelola ini setiap lini kerja dapat berkomunikasi secara efektif baik dengan Direksi, Dewan Komisaris maupun seluruh elemen Bank dalam merespons berbagai tantangan dan isu yang muncul di sepanjang tahun 2016.

Selama tahun 2016 Bank BNP senantiasa menjaga kualitas penerapan GCG di seluruh lini kerja dengan mengutamakan prinsip dasar GCG yaitu TARIF, serta upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan di Bank BNP melalui pembahasan dan penetapan self assessment dan kualitas pelaksanaan GCG melalui Komite Kepatuhan, yang terdiri dari unsur Satuan Pengendali Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Perangkat pendukung pada organ utama GCG yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko, sedangkan Komite Eksekutif yang menjadi tanggung jawab Direksi adalah Komite IT, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite ALCO, Komite Produk dan Aktivitas Baru, Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Komite Kepatuhan dan Komite Strategi Anti Fraud. Perangkat ini menjadi pendukung sumber data dan pengolahan informasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Penerapan prinsip dasar dari GCG pada seluruh lini kerja setidaknya sudah dapat membantu memberi respons atas berbagai tantangan/masalah yang muncul, termasuk dalam memberi solusi terbaik bagi pengelolaan bisnis Bank dan mendukung manajemen Bank agar dapat lebih baik lagi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG kedepannya.

Sebagai realisasi dari kepatuhan terhadap ketentuan di Pasar Modal, Bank BNP telah memenuhi jumlah pemegang saham minimum sebagai perusahaan terbuka yaitu sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham yang telah dipenuhi pada bulan Oktober 2016 dimana pemegang saham baru tersebut merupakan Karyawan Bank BNP, serta kepemilikannya bukan merupakan/berasal dari program ESOM/MSOP namun perolehan murni dari perdagangan di Pasar Saham.

Dalam menjaga dan mengamankan penerapan tata kelola yang baik, kami terus-menerus mengedepankan upaya-

achieve a service level that not only meets but also exceeds customers' expectations.

Compliance with Corporate Governance

We would like to assert to all the management and employees of the Bank, that even when Bank BNP is currently beset with immense challenges that hamper its performance, the efforts to minimize the impacts from the external and internal challenges are in place, and they must be based on the governance structure that the Bank has been developing all this time. The existence of this governance structure has allowed all lines of work to communicate effectively with the Board of Directors, the Board of Commissioners and every element of the Bank in response to the challenges and issues that arose in 2016.

Throughout 2016 Bank BNP c0nsistently maintained its GCG implementation on all lines of work by upholding TARIF (the basic principles of GCG), and by enacting efforts to improve the quality of corporate governance performance in Bank BNP, which had been made manifest in the discussions and implementation of GCG self assessment by the Compliance Committee, consisting of the Internal Control Unit, Risk Management Unit, and Compliance Unit.

There were a number of GCG supporting organs under the remit of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, the Remuneration and Nomination Committee, and the Risk Monitoring Committee; while those under the remit of the Board of Directors were the IT Committee, the Credit Policy Committee, the ALCO Committee, the New Products and Activities Committee, the Risk Management Committee, the Compliance Committee, and the Anti-Fraud Strategy Committee. These organs support the Board of Commissioners and Board of Directors by providing data and information required to facilitate the boards' execution of duties.

Implementation of the basic GCG principles across all lines of work at least had provided the proper response to the various issues and challenges that arose, including in the provision of the best solutions for the management of the Bank's business, and supporting the Bank in improving further its GCG performance in the future.

To comply with the capital market regulations, Bank BNP has now met the minimum number of shareholders requirement for public companies, namely by having at least 300 (three hundred) shareholders, as of October 2016. The new shareholders comprised employees of Bank BNP and the ownership was not derived from ESOM/MSOP program, but instead purely from trading on the stock market.

In order to maintain its good corporate governance, we continuously conduct measures to protect our business and

upaya untuk melindungi kegiatan bisnis dan operasional serta berorientasi pada perlindungan konsumen, memperkuat sistem penanganan pengaduan nasabah dan mediasi perbankan, menindaklanjuti masukan dari sarana whistle blowing system, penguatan monitoring anti money laundering, dan penerapan know your customer dan employee yang padu, tanpa mengabaikan perundangan yang berlaku.

operational activities as we orient ourselves to the protection of consumer rights, strengthening of the whistleblowing system and banking mediation system, following up to the reports received via the whistleblowing system, strengthening the anti-money laundering monitoring, and integrating the know your customer and know your employee principles, with due regard to the prevailing regulations.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Bank BNP sebagai institusi yang dalam menjalankan roda bisnisnya, tidak terlepas dari kondisi dan sekaligus keberadaannya mempengaruhi lingkungan di mana kantor tersebut beroperasi. Sehingga, tanggung jawab moral Bank BNP terhadap lingkungan dan sosial di sekitar harus dapat memberikan dampak yang berkelanjutan/ sustainability. Sehingga sudah seyogyanya model dan pola pelaksanaan tanggung jawab sosial harus dilakukan secara berkesinambungan dan memberikan nilai tambah baik bagi masyarakat maupun Bank BNP sebagai Bank, tentunya aktivitas CSR ini juga disesuaikan dengan kondisi Bank BNP secara keseluruhan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a business institution, Bank BNP cannot be entirely separated from the prevailing conditions taking place in its surroundings, namely the areas where its offices operate. Thus, Bank BNP's moral responsibility towards the surrounding environment and society must be manifested in a way that results in sustainable outcomes. Naturally, the corporate social responsibility (CSR) model and implementation must be continuous and provide added value to the society and to Bank BNP alike, and furthermore, these CSR activities must be adjusted to Bank BNP's overall business condition.

Selama tahun 2016 kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan masih didominasi oleh aktivitas Pendidikan, Filantropi, dan Kelestarian Lingkungan dan kegiatan Kemanusiaan sebagaimana terurai dalam pembahasan mengenai Corporate Social Responsibility pada bahasan berikutnya.

In 2016, the Bank's corporate social responsibility programs were dominated by educational, philanthropic, and environmental conservation activities as well as humanitarian ones. These are further detailed in the section on Corporate Social Responsibility in this Annual Report.

Prospek Usaha 2017

Kondisi perekonomian dalam setahun mendatang masih akan diwarnai dengan berbagai tantangan dan dibayangi oleh ketidakpastian baik regional maupun global, terlebih dengan adanya beberapa isu global seperti Kebijakan Trump di USA, Brexit, MEA, dan beberapa isu lain yang signifikan.

2017 Business Prospects

The economic condition in 2017 will largely be foreshadowed by challenges and uncertainties in the regional as well as global scale, in particular owing to the presence of certain global issues, such as President Trump's policies in the USA, Brexit, the ASEAN Economic Community, and other no less significant issues.

Pemerintah Indonesia masih cukup optimis untuk memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 berada pada kisaran 5,1% - 5,5%. Kendati demikian, Bank Indonesia dan beberapa pengamat ekonomi memperkirakan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan akhir 2015 akan mendekati 5,3% - 5,5%.

The Indonesian Government remains optimistic as it predicts that the Indonesian economic growth in 2017 will range between 5.1% to 5.5%. However, Bank Indonesia and a number of economic analysts predict that Indonesian economic growth by Q4 will be around 5.3% to 5.5%.

Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional Asia khususnya Tiongkok tidak serta-merta membuat pesimis pemerintahan Indonesia, tentunya dengan melihat bahwa Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang begitu besar dan ketersediaan sumber daya alam yang demikian melimpah akan menjadi salah satu faktor pendorong selama pengelolaannya dilakukan dengan baik dan maksimal. Dampak cashflow atas hasil dana repatriasi pajak juga akan menambah geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.

On the other hand, economic growth in the Asian region, especially in China, is not a source of distress for the Indonesian Government in predicting the country's economic growth, as Indonesia has an immense economic potential as a country, supported by an abundance of natural resources. These will serve as supporting factors as long as their management is performed properly and optimally. Capital inflow from the tax amnesty's wealth repatriation will also bolster Indonesia's future economic growth.

Berbekal salah satu populasi terbesar di dunia dan tenaga kerja yang cukup memadai untuk menjadi basis produksi/ manufaktur, Indonesia dapat menarik minat para produsen mancanegara untuk berinvestasi terlebih dengan berlakunya MEA.

Sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada beberapa tahun ke depan masih tetap berasal dari konsumsi rumah tangga, karena adanya peningkatan daya beli yang semakin membaik berkat inflasi yang terkendali dan aktivitas perekonomian yang meningkat. Hal lain adalah kegiatan investasi yang menggeliat lagi karena suku bunga rendah, dampak paket-paket kebijakan pemerintah, dan pulihnya kepercayaan investor terlebih dengan adanya peningkatan infrastruktur dan belanja infrastruktur untuk memfasilitasi investasi swasta di tanah air.

Hal ini tentunya akan memberikan dampak pada proses bisnis Bank yang ada di Indonesia, dengan harapan bahwa sektor riil tidak akan mendapatkan dampak negatif yang sangat berpengaruh sehingga optimistis pertumbuhan atas kinerja keuangan perbankan Indonesia akan meningkat.

Strategi Usaha 2017

Dalam menghadapi situasi persaingan bisnis di tahun 2017 mendatang, manajemen telah merumuskan beberapa strategi yang memberikan penekanan pada kualitas pembiayaan (kredit) yang disalurkan serta penyatuan risk appetite ke dalam strategi yang akan diambil. Strategi ini didukung dengan pembenahan proses internal terkait semua aspek bisnis terutama terkait risiko, infrastruktur proses persetujuan kredit, pembenahan tata kelola, pengembangan produk, dan peningkatan kompetensi di sisi sumber daya manusia untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik. Bank BNP juga akan menerapkan model bisnis yang sesuai dengan kekuatan Bank BNP, analisis dan pemberdayaan net-working yang ada dan memaksimalkan sumber daya IT, untuk mendukung akselerasi bisnis Bank BNP.

Langkah stratejik bisnis lainnya yang masih akan akan tetap diterapkan adalah profiling portofolio kredit ke dalam segmen kredit pada pembiayaan menengah guna memperbesar spreading risk, sehingga risiko konsentrasi dan besaran pembiayaan dapat diperkecil.

Penerapan suku bunga akan tetap memperhitungkan suku bunga dasar kredit dan BI rate yang berlaku, tanpa menghilangkan kemampuan bersaing Bank di pasar pendanaan maupun pembiayaan pinjamannya.

Demikian pula halnya dengan kebijakan net-working, Bank BNP terus melakukan kajian untuk merevitalisasi/ merelokasi kantor-kantor yang tidak berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja dan juga pemanfaatan jaringan kemitraan dan kemajuan teknologi untuk terus meningkatkan kerjasamanya dalam jaringan distribusi/ delivery channel yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Bank BNP.

With one of the biggest populations in the world and an adequate workforce to become a manufacturing-heavy economy, Indonesia has the capability to attract foreign producers to invest in the country, even more so with the enactment of the ASEAN Economic Community.

The main driver of the economy will still be household consumption, as there has been a significant increase in terms of purchasing power, owing to a controlled inflation rate and more robust economic activities throughout the country. Furthermore, a revival of investments resulting from a low interest rate climate and the impacts of the Government's policy packages, as well as the recovering trust and sentiment among investors due to increased spending in infrastructure, will pave a way for more private-sector investments in the country.

This will certainly affect the Bank's business in Indonesia, and it is hoped that the real sector will not pose a negative impact to performance. Thus we are optimistic that the Indonesian banking industry's performance will improve in the future.

2017 Business Strategies

Facing the existing competition in 2017 and onwards, the management has formulated a set of strategies that will emphasize on lending quality and on the integration of risk appetite into the strategies that are taken. This strategy is supported by the reorganization of internal processes across all business aspects, in particular those related to risk, infrastructure for loan application approval, governance restructuring, product development, and human resources competence enhancement, in order to perform better. Bank BNP will also implement a business model that is more suited to its strength, the analysis and utilization of its existing network, and maximizing its IT resources' potentials to support the Bank's business acceleration.

Bank BNP will also enact another business strategy, namely profiling of lending portfolio, thus focusing on the medium-sized segment in order to spread its risks and reduce its concentration and individual amount of loans.

The interest rate policy of the Bank will be adapted to the prevailing lending interest rates and BI's reference interest rate (BI rate), without disrupting the Bank's competitive ability in the funding and lending sectors.

In terms of networking, Bank BNP is constantly reviewing its policy to revitalize and relocate its branch offices that are no longer contributing positively to its business, and also utilizing its partnership network and technological advancements, by participating in various delivery channels that will be able to positively boost Bank BNP's business growth.

Apresiasi

Tidak mudah untuk kami melalui tahun 2016 ini, karena banyak pekerjaan yang cukup sulit dan menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam mengevaluasi kualitas aset yang ada, kebutuhan reorganisasi, maksimalisasi pertumbuhan bisnis dengan mengupayakan optimalisasi network yang dimiliki, langkah-langkah peningkatan efisiensi biaya operasional, dan adanya komitmen untuk pencapaian target yang telah disepakati, namun pada akhirnya kita dapat melewati tahun 2016 dengan cukup baik. Kami optimis bahwa Bank BNP akan mampu kembali kepada rel bisnisnya yang terbaik dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan menumbuhkan semangat untuk bekerja disertai dengan tetap tersenyum untuk menyambut masa depan yang lebih baik lagi. Khususnya kepada Manajemen dan Karyawan, izinkan saya atas nama Direksi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan hingga kita dapat mengakhiri tahun 2016 ini dengan baik.

Kepada Nasabah, Dewan Komisaris dan seluruh Komite, Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan sehingga kita dapat melalui tantangan ini bersama-sama. Kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta seluruh lembaga terkait lainnya, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan bimbingan dalam membina dan mengawasi Bank BNP selama tahun 2016 lalu.

Demikian pula kepada para pemegang saham, saya secara khusus ingin menyampaikan penghargaan atas kepercayaan dan dukungan khususnya dari ACOM CO., LTD. dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. selaku pemegang saham pengendali, atas komitmennya untuk senantiasa mengarahkan dan membimbing Bank BNP sebagai bagian penting dari MUFG Group, khususnya di Indonesia.

Acknowledgments

It was certainly not easy for us to navigate through 2016—there were a host of challenging tasks that require serious and sincere efforts in evaluating our asset quality, our reorganization needs, our maximization of business growth through existing network optimization, our measures to improve operational efficiency, and our commitment to achieve the predetermined targets. However, we managed to do that and now we are optimistic that Bank BNP will be back on track again shortly, as we have a range of efforts that we will pursue in order to foster our spirit to work with a smile in anticipation of a brighter future. To the management and employees of the Bank, I on behalf of the Board of Directors would like to express our gratitude for the dedication and hard work which had seen us through the year 2016.

To our customers, the Board of Commissioners, and all Committees, I express my gratitude for the support and cooperation that had allowed us to deal with the abovementioned challenges together. To Bank Indonesia, the Financial Services Authority, and all relevant authorities, we express our thanks and utmost appreciation for their support, guidance and supervision of Bank BNP throughout 2016.

Last but not least, to the shareholders, I would especially like to appreciate the trust and support of ACOM CO., LTD., and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. as the controlling shareholders. We thank them for their constant guidance for Bank BNP as a crucial part of the MUFG Group in Indonesia.

Bandung, Maret 2017
Salam / Regards,

TAKERU AGAWA
Presiden Direktur / President Director

Mirai+
Mirai+

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2016 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Statement of Members of Board of Directors and Board of Commissioners on the Responsibility for the 2016 Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. for 2016 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian penyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Direksi
Board of Directors

Takeru Agawa
Presiden Direktur
President Director

Kevin Cahyadi Tatang
Direktur Bisnis
Business Director

Markus Sugiono
Direktur Operasional
Operation Director

Trie Karjati Wibowo
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

Eiichiro Sakai
Direktur Kredit, Perencanaan & IT
Credit, Planning & IT Director

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Michio Atsuda
Presiden Komisaris
President Commissioner

Tatang Hermawan
Komisaris
Commissioner

Karel Tanok
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Bachtiar Alam
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank

Profil Perusahaan

Company Profile

54 Informasi Perusahaan
Company's Information

55 Sekilas Perusahaan
Company in Brief

59 Visi dan Misi
Vision and Mission

60 Bidang Usaha
Line of Business

62 Struktur Organisasi
Organizational Structure

64 Struktur Korporat
Corporate Structure

64 Entitas Anak dan Asosiasi
Subsidiaries and Associates

65 Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile

69 Profil Direksi
The Board of Directors Profile

75 Profil Anggota Komite
Profiles of Committee Member

77 Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang
List of Head of Divisions and Branch Offices

79 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

82 Kronologi Pencatatan Saham dan Efek
Chronology of Shares and Securities Listing

84 Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Professional Institution

85 Nama dan Alamat Jaringan Kantor
Name and Address of Office Branch Offices

88 Peta Operasional
Operational Map

Informasi Perusahaan

Company's Information

Uraian	Keterangan/Remarks	Description
Nama	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Name
Pendirian	18 Januari 1972/January 18, 1972	Establishment
Bidang Usaha	Perbankan/Banking	Line of Business
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung 40132, Jawa Barat - Indonesia	Address
Telepon	(022) 82560100 (Hunting)	Telephone
Call Center	(022) 82560163 – 164	
Fax	(022) 2514580	Fax
Situs Web	www.bankbnp.com	Website
E-mail	corp_communication@bankbnp.com	Email
Pencatatan Saham	Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon: (021) 5150515	Share Listing
Kode Saham	BBNP	Ticker Code
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal		Capital Market Supporting Institutions & Professions
Akuntan Publik	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (independent member of BKR International) Jl. Haruman No. 2 Bandung 40262 Telepon: (022) 7218235	Public Accountant
Biro Administrasi Efek	PT Sinartama Gunita Plaza BII Menara I Lt. 9 Jl. M. H. Thamrin Kav. 22 No. 51 Jakarta 10350 Telepon: (021) 3922332	Share Registrar
Notaris	DR. Ely Baharini, S.H., Sp.N., M.H. Jl. Raya Gadobangkong No. 38A Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 40552 Telepon: (022) 70808505 Yuliani Idawati, S.H., Sp.N. Ruko Lucky Town Jl. Ters. Jakarta No. 30 C Bandung Telepon: (022) 7231014	Notary

Sekilas Perusahaan

Company in Brief

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("Bank BNP") adalah salah satu bank umum devisa nasional yang masuk dalam kategori BUKU 2 di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2016 asetnya mencapai Rp7,7 triliun dengan komposisi Dana Nasabah yang terdiri dari Simpanan dan Deposito sebesar Rp6,3 triliun, permodalan sebesar Rp1,2 triliun dan portofolio pinjaman sebesar Rp5,3 triliun.

Bank BNP menyediakan beragam produk dan layanan yang lengkap dan inovatif, mulai dari kredit pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kredit Konsumer dan Komersial, Kredit Tanpa Agunan, hingga produk *Funding* berupa Simpanan Berjangka, Tabungan dan Giro, yang ditopang oleh kapabilitas IT dan Tresuri, dan disertai fitur-fitur layanan jasa perbankan yang lengkap.

Di pertengahan tahun 2015, *online banking* telah diluncurkan pada skala terbatas, karena masih memerlukan uji kelayakan sebelum diluncurkan kepada masyarakat umum. Hal ini bertujuan memberikan *added value* kepada para pemangku kepentingan Bank BNP.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("Bank BNP") is one of the foreign exchange commercial banks operating in the category of BUKU 2 in Indonesia. As at 31 December 2016, its assets stood at Rp7.7 trillion, with Third Party Funds consisting of Savings and Time Deposits amounted to Rp6.3 trillion, capital of Rp1.2 trillion, and lending portfolio of Rp5.3 trillion.

Bank BNP provides a wide range of innovative banking products and services, from Lending facility for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Consumer Loans, Commercial Loans, Non-Collateral Loans, to Funding products comprising Time Deposits, Savings, and Current Accounts. The Bank is supported by a dedicated IT capability and treasury function as well as many banking service features.

In mid 2015, the Bank launched its online banking feature on a limited scale, as it still required feasibility studies to be conducted prior to its full public launching. This is intended to provide added value to all stakeholders of Bank BNP.

Bank BNP merupakan bank lokal dengan tambahan modal campuran yang berasal dari pemodal Jepang, seperti ACOM CO., LTD. (ACOM) Jepang dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) Jepang di tahun 2007 akhir.

Pemegang saham pengendali Bank BNP saat ini dengan kepemilikan sebesar 66,15% adalah ACOM dan BTMU (bank universal terbesar ke-8 di dunia versi Bloomberg tahun 2010), dengan kepemilikan sebesar 9.35%. Keduanya merupakan anak perusahaan dari konglomerasi keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) Jepang yang memiliki jaringan internasional yang luas memberikan keuntungan berupa konektivitas Bank BNP ke dalam jaringan internasional melalui MUFG Group.

Menunjuk pada Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BNP tergabung dalam grup konglomerasi tersebut bersama dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd Jakarta (BTMU) (*Lead Entity*) bersama dengan dua anak perusahaan lainnya, yakni BTMU–BRI Finance yang berfokus dalam pemberian fasilitas sewa guna usaha (*leasing*) untuk pembiayaan barang modal dalam berbagai industri, dan U Finance yang berfokus pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.

Sebagai salah satu Bank Devisa Nasional, Bank BNP menawarkan berbagai ragam produk dan layanan serta solusi yang komprehensif bagi perusahaan dalam mengelola operasional keuangannya, baik transaksi domestik maupun internasional, dengan memanfaatkan jaringan atau akses ke hubungan korespondensi dan depositori koresponden dengan beberapa bank yang memiliki akses jaringan internasional yang terjamin baik dari sisi teknologi, layanan, dan keamanannya. Jasa layanan perbankan ini meliputi *Remittance*, *Collection*, *Trade Finance*, dan *Money Changer*.

Selain itu, nasabah Bank BNP juga dapat mengakses berbagai ATM nasional dan regional, antara lain melalui jaringan ATM Prima, ATM Bersama, VISA, dan MEPS. Hal ini dilakukan untuk memberikan nasabah keleluasaan dan kemudahan dalam bertransaksi melalui ATM, baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN.

Pada posisi 31 Desember 2016, jumlah jaringan kantor Bank BNP adalah 62 kantor dengan 64 unit ATM yang didukung oleh 1.676 karyawan, didominasi lulusan sarjana (1.024 karyawan) dan kelompok usia 20–30 tahun (741 karyawan), yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali.

Bank BNP pada mulanya didirikan dengan nama "Bank Pasar Karya Parahyangan PT" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pasar Karya Parahyangan PT No. 47 tanggal 18 Januari 1972 yang dibuat di hadapan Komar

Bank BNP as a local bank received capital injection from Japanese investors, namely ACOM CO., LTD. (ACOM) Japan and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) Japan, in late 2007.

The controlling shareholders of Bank BNP are ACOM, with ownership of 66.15% of total shares, and BTMU (the eight largest universal bank in the world according to Bloomberg in 2010), holding 9.35% of total shares. Both ACOM and BTMU are subsidiaries of the financial conglomerate Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG) Japan, with a vast international network that provides Bank BNP with excellent connectivity with international network through MUFG Group.

Referring to OJK Regulation No. 17/POJK.03/2014 on Implementation of Integrated Risk Management in Financial Conglomerates, Bank BNP is integrated into the conglomerate together with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd Jakarta (BTMU) (Lead Entity) together with two other subsidiaries, namely BTMU–BRI Finance which focuses on leasing facility for capital goods investments in various industries, and U Finance which focuses on financing of motorized vehicles.

As one of the National Foreign Exchange Banks, Bank BNP offers various products and services and comprehensive solutions for companies in managing their financial operations, including domestic and international transactions, by utilizing its correspondent networks and depository correspondence with many banks with access to international networks that are renowned for their use of technology, service, and security. These banking services include Remittance, Collection, Trade Finance, and Money Changer.

In addition, customers of Bank BNP can access various national and regional ATM networks, among others the ATM Prima, ATM Bersama, VISA, and MEPS networks. This allows the Bank's customers to conveniently perform transactions at ATMs located in Indonesia and the ASEAN region.

As at 31 December 2016, Bank BNP had 62 offices in its business network, with 64 ATMs and 1,676 employees, chiefly comprising bachelor degree holders (1,024 employees) and in the 20–30 years old age group (741 employees) spread across Java and Bali.

Bank BNP was initially established as "Bank Pasar Karya Parahyangan PT", based on the Notarial Deed on Establishment of Bank Pasar Karya Parahyangan PT Limited Company No. 47 dated 18 January 1973, drawn before Komar

Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/11/19 tanggal 15 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 6 Juni 1974 di bawah No. 81/1974 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1974 No. 68, Tambahan No. 426/1074.

Andasasmita, S.H., Notary in Bandung, and legalized by the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. Y.A.5/11/19 dated 15 May 1974, and registered in the District Court's Clerk Office in Bandung dated 6 June 1974 under No. 81/1974, and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia on 23 August 1974 No. 68, Supplement No. 426/1074.

Nama Bank diubah menjadi PT Bank Nusantara Parahyangan berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 27 tanggal 10 Maret 1989 yang dibuat oleh Albertus Soetjipto Budhardjoputera, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-4155 HT.01.04.Th.89 tanggal 2 Mei 1989 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 11 Mei 1989 di bawah No. 313/1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 Juni 1989 No. 49, Tambahan No. 1093/1989.

The Bank's name was changed to PT Bank Nusantara Parahyangan, based on the Deed of Minutes No. 27 dated 10 March 1989, drawn by Albertus Soetjipto Budhardjoputera, S.H., Notary in Bandung, and approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through the Decree No. C2-4155 HT.01.04.Th.89 dated 2 May 1989, and registered in the District Court's Clerk Office in Bandung on 11 May 1989 under No. 313/1989, and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia on 29 June 1989 No. 49 Supplement No. 1093/1989.

Bank BNP mulai beroperasi sebagai bank umum di Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia dengan Surat No. 27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994, Bank BNP ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa.

Bank BNP started to operate as a commercial bank in Bandung, based on the Decree of the Minister of Finance No. 748/KMK.013/1989 dated 3 July 1989. Subsequently, based on the Decision of the Board of Directors of Bank Indonesia with the Letter No. 27/54/KEP/DIR dated 5 August 1994, Bank BNP's status was leveled up as foreign exchange bank.

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, Bank BNP mengubah status perusahaan menjadi perusahaan publik (terbuka) dan menawarkan 50.000.000 saham biasa kepada masyarakat dengan harga nominal Rp500 per lembar sahamnya. Bersamaan dengan penawaran saham tersebut, Bank BNP juga melakukan penerbitan waran sejumlah 20.000.000 lembar yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada 10 Januari 2001, sehingga jumlah saham beredar saat itu menjadi sebanyak 150.000.000 saham. Sebagai akibat adanya *exercise* waran sebanyak 8.275.000 lembar pada 2004, maka jumlah saham beredar bertambah menjadi 158.275.000 saham.

Based on the Decision of EGMS dated 15 September 2000, Bank BNP changed its status to public company and offered 50,000,000 ordinary shares to the public with nominal value of Rp500 per shares. Along with the offering, Bank BP also conducted issuance of warrants amounting to 20,000,000 sheets registered on the Jakarta Stock Exchange (now Indonesian Stock Exchange) on 10 January 2011, so that the amount of outstanding shares at that time was 150,000,000 shares. As the result of the exercise of warrants amounting to 8,275,000 shares in 2004, the total outstanding shares was increased to 158,275,000 shares.

Untuk memperkuat struktur permodalan, pada Juli 2006 dilakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT I) kepada pemegang saham atas sejumlah 158.275.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp550 per saham, sehingga jumlah saham beredar yang telah dikeluarkan Bank BNP menjadi 316.550.000 saham.

To strengthen its capital structure, in July 2006, Bank BNP conducted the Limited Public Offering or Rights Issue (PUT I) to the shareholders on the 158,275,000 shares with offering price of Rp550 per shares, so that the amount of outstanding shares issued by Bank BNP became 316,550,000 shares.

Pada 17 Desember 2007, kepemilikan mayoritas saham Bank BNP telah beralih kepada ACOM CO., LTD.,Japan (ACOM) dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) melalui akuisisi saham sebanyak 75,41%. ACOM menguasai 55,41% dan BTMU menguasai 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan, menjadikan keduanya sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank BNP.

Dari Januari hingga Maret 2008 dilakukan penawaran tender/*tender offer* atas kepemilikan saham Bank BNP oleh ACOM CO., LTD., sehingga jumlah kepemilikan saham ACOM CO., LTD., berubah menjadi 55,68%.

Selanjutnya, pada Oktober 2010 bank BNP kembali melakukan penambahan Modal Disetor melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) sebanyak 99.963.158 lembar saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp1.000 per saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dikeluarkan Bank BNP secara keseluruhan berjumlah 416.513.158 lembar dengan nominal Rp208.256.579.000.

Bank BNP melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) pada Mei 2013 dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 260.320.724 dengan nominal Rp500 setiap saham dan ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.150 setiap saham. Hasil PUT III tersebut mengubah komposisi kepemilikan saham Bank, di mana ACOM CO., LTD., menguasai 66,15% dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd menguasai 9,35% dari total 676.833.882 saham.

On 17 December 2007, the majority ownership of Bank BNP's shares was switched to ACOM CO., LTD., Japan (ACOM) and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) through the acquisition of shares amounting to 75.41%. ACOM controlled 55.41% and BTMU controlled 20% from the remaining issued shares, thus the two institutions became the Controlling Shareholders of Bank BNP.

From January to March 2008, a tender offer was conducted on the ownership of Bank BNP by ACOM CO., LTD., so that the total shares ownership of ACOM CO., LTD., became 55.68%.

Subsequently, in October 2010 Bank BNP conducted the addition of Paid-In Capital through Rights Issue II (PUT II) of 99,963,158 new shares with offering price of Rp1,000 per shares. Therefore, the total shares issued by Bank BNP in total became 416,513,158 shares with a nominal value of Rp208,256,579,000.

Bank BNP conducted Rights Issue III (PUT III) in May 2013 with total new shares offered amounting to 260,320,724 with the nominal value of Rp500 per shares, offered with a price of Rp1,150 per shares. The result of PUT III changed the shareholding composition of the Bank, whereby ACOM CO., LTD., controlled 66.15% and The Bank of Tokyo-Mistubishi UFJ Ltd controlled 9.35% of the total of 678.833.882 shares of the Bank.

Visi

Menjadi salah satu bank ritel pilihan yang berskala nasional yang sehat, andal, dan terpercaya dalam menjalankan aktivitas perbankan dan jasa keuangan.

Vision

To be one of the preferred retail banks with national scale, healthy, reliable, and trustworthy in carrying out banking activities and financial services.

Misi

- Berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang ritel;
- Melaksanakan tata kelola usaha yang baik dan benar seiring pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berkesinambungan;
- Menjadi mitra usaha terpercaya yang memberi nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

Mission

- Participate in supporting economic growth and national development, especially in the retail industry;
- Implement good and proper corporate governance along with the company's sustainable growth and development;
- To be a reliable business partner that gives added value to all stakeholders.

Dewan Komisaris dan Direksi telah bersama-sama membahas, mengkaji, dan menyetujui Visi dan Misi Bank, dan telah berkomitmen untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dalam menghadapi dinamika bisnis perbankan yang selalu berubah. Visi dan Misi Bank BNP telah ada sejak Bank BNP berdiri.

The Board of Commissioners and the Board of Directors have gathered to discuss, review, and approve the Bank's Vision and Mission, and have committed to implementing this Vision and Mission in facing the everchanging dynamics in the banking industry. The Vision and Mission of Bank BNP have existed since the foundation of Bank BNP.

Bidang Usaha

Line of Business

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Pasal 3 ayat 1, Bank BNP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Bank Umum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut, kegiatan usaha yang dijalankan Bank BNP meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya, menyalurkan kredit, dan kegiatan Perbankan pada umumnya, serta kegiatan transaksi valas.

Produk dan Layanan

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan, Bank BNP melakukan peningkatan kualitas produk dan layanan kepada nasabah. Peningkatan ini ditujukan agar Bank BNP senantiasa memiliki daya saing tinggi di industri perbankan.

Based on the Bank's Articles of Association Article 3 paragraph 1, Bank BNP runs a business activity in the field of Commercial Bank in accordance with the provisions in Indonesia's Legislation.

Pursuant to the Articles of Association, the business activities run by Bank BNP include fundraising from public in the form of savings, namely demand deposits, time deposits, certificate deposits, savings and/or other forms, credit distribution, and other banking activities in general as well as foreign exchange transactions.

Products and Services

In the lines of business the Bank is engaged in, Bank BNP consistently improves the quality of its products and services to its customers. This improvement is intended to render Bank BNP competitive in the banking industry at all times.

Produk/ Product	**Layanan/** Services
Pembiayaan / Lending	**Bank Garansi (IDR & Major Currency) /** Bank Guarantee (IDR & Major Currency)
• Pinjaman Modal Kerja (IDR, USD) / Working Capital Loan (IDR, USD)	• Tender Bid Bond Tender Performance Bond
• Investasi (IDR, USD) / Investment Loan (IDR, USD)	• Advance Payment Bond
• Kredit Konsumtif / Consumer Loan	• Shipping Guarantee
• Kredit Pemilikan Rumah (KPR) / Housing Loans	**Referensi Bank /** Bank References
• Kredit Pemilikan Mobil (KPM) / Car Loans	**Letter of Credit**
• Kredit Renovasi Rumah / House Renovation Loans	**Jual Beli Mata Uang Asing /** Foreign Exchange Transactions
• Kredit Tanpa Agunan (KTA) / Unsecured Loans	**Kiriman Uang Dalam dan Luar Negeri /** Domestic & International Remittances
• Kredit Multi Guna / Multi-Purpose Loan	
• Lainnya / Others	**Kliring /** Clearing and Intercity Clearing
• Kredit Ekspor-Impor / Export-Import Loans	**Inkaso dalam negeri dan luar negeri /** Domestic & International Collection
	Bank Draft, Traveller Cheque
Pendanaan / Funding	**Kartu ATM & Debit /** ATM & Debit Cards:
• Giro / Current Accounts	• ATM Bersama
• Giro Rupiah / Rupiah Current Account	• ATM ALTO
• Giro Valas / Foreign Exchange Current Account	• ATM Prima
• Tabungan / Savings	• ATM Visa
• Tabungan Parahyangan / Parahyangan Savings	• Debit Visa
• Tabungan Payroll / Payroll Savings*	• Pembayaran tagihan PLN dan Token *on-line* / Online payment of utility bill and purchase of PLN token
• TabunganKu	• Pembayaran tagihan Telkom & Speedy *On-line* / Online payment of Telkom & Speedy bills
• Tabungan Sakura / Sakura Savings	• Pembayaran tagihan Telkomsel (pascabayar) dan pengisian pulsa Telkomsel (prabayar) / Payment of Telkomsel bills (postpaid) and purchase of Telkomsel top-up (prepaid)
• Tabungan Dollar / Dollar Savings	• Pembayaran tagihan Indosat (pascabayar) dan pengisian pulsa Indosat (prabayar) / Payment of Indosat bills (postpaid) and purchase of Indosat top-up (prepaid)
• Tabungan Japan / Japan Savings	• Pembayaran uang sekolah pendaftaran Sekolah Dasar/Menengah/Atas / Payment of tuition & enrollment fee for Elementary/Junior High/Senior High School
• Deposito / Time Deposits	• Pembayaran pajak dengan sistem MPN G 2 / Tax payments using the MPN G 2 system
• Deposito IDR / IDR Time Deposit	**Safe Deposit Box**
• Deposito USD / USD Time Deposit	**Pembayaran gaji karyawan (*payroll*) /** Employee's salary payment (Payroll)
	Penerimaan Uang Western Union / Western Union Money Remittance
	Kartu Kredit / Credit Card
	Bancassurance
	PDAM / Payment of Water Bill
	Pembayaran Bussan Auto Finance (BAF) / Payment of Bussan Auto Finance (BAF)
	BNP Call
	Internet Banking

* Produk telah dihentikan./Product has been discontinued.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

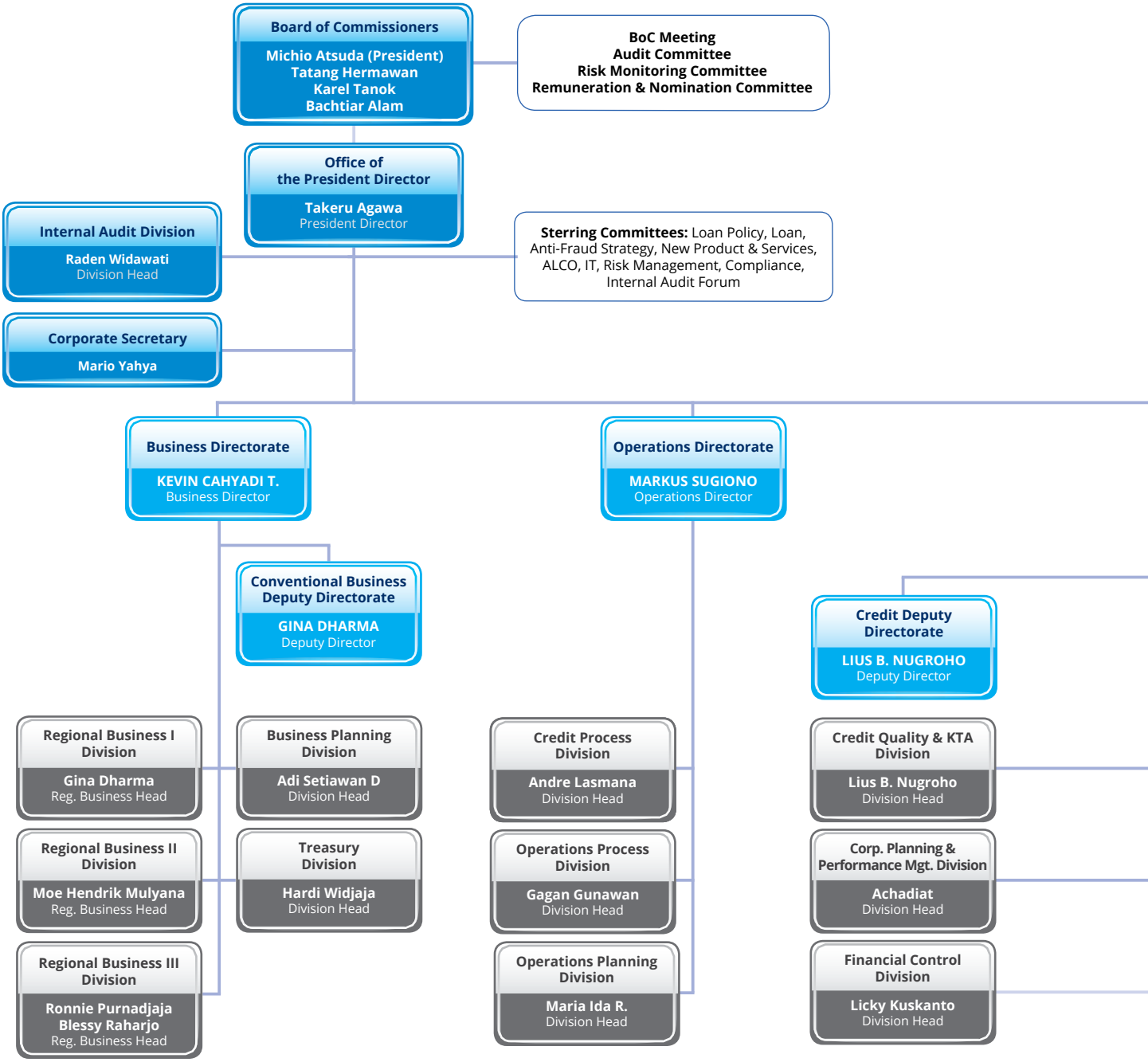

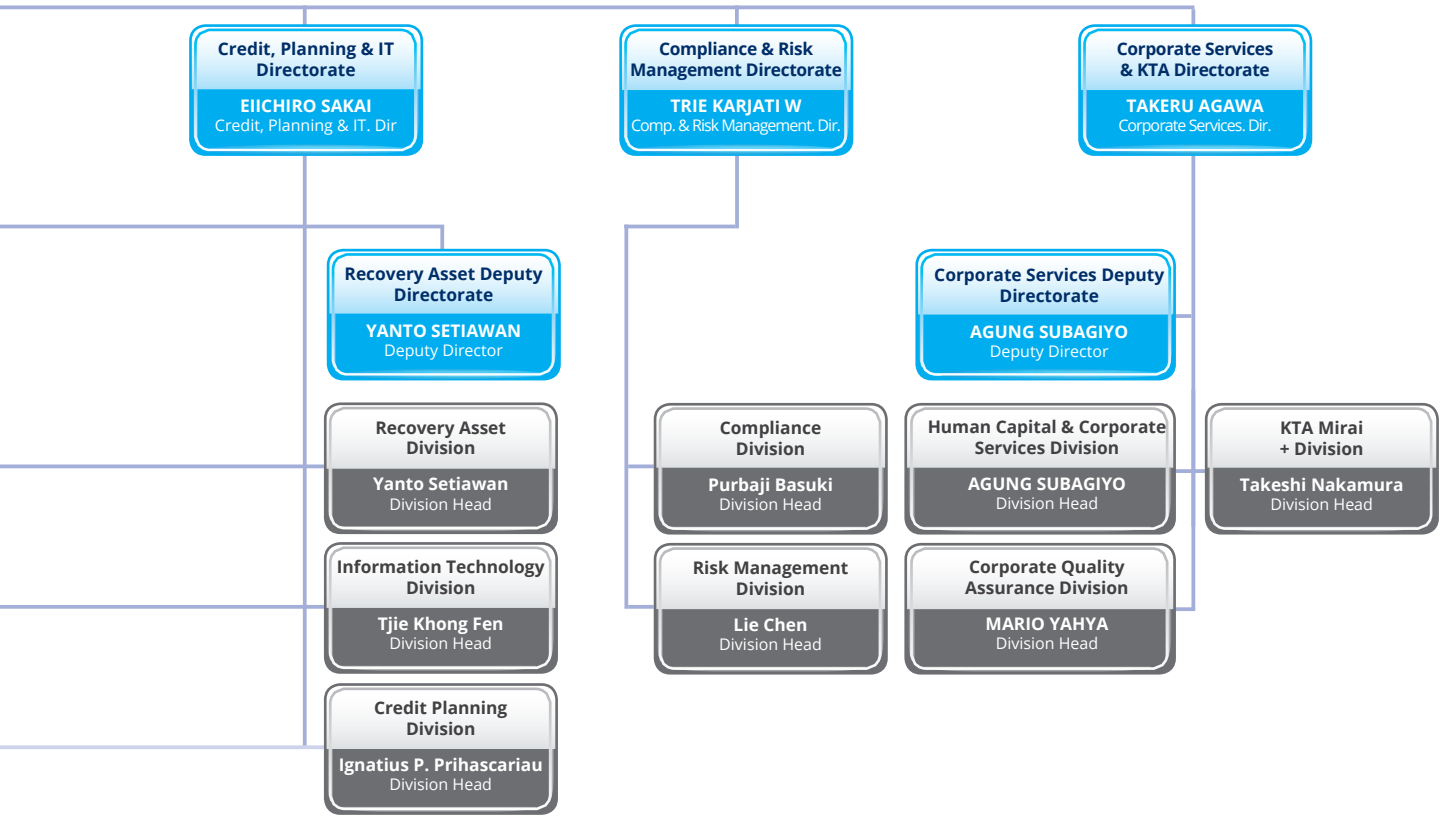
Credit, Planning & IT Directorate
EIICHIRO SAKAI
Credit, Planning & IT. Dir
Compliance & Risk Management Directorate
TRIE KARJATI W
Comp. & Risk Management. Dir.
Corporate Services & KTA Directorate
TAKERU AGAWA
Corporate Services. Dir.
Recovery Asset Deputy Directorate
YANTO SETIAWAN
Deputy Director
Corporate Services Deputy Directorate
AGUNG SUBAGIYO
Deputy Director
Recovery Asset Division
Yanto Setiawan
Division Head
Information Technology Division
Tjie Khong Fen
Division Head
Credit Planning Division
Ignatius P. Prihascariau
Division Head
Compliance Division
Purbaji Basuki
Division Head
Risk Management Division
Lie Chen
Division Head
Human Capital & Corporate Services Division
AGUNG SUBAGIYO
Division Head
Corporate Quality Assurance Division
MARIO YAHYA
Division Head
KTA Mirai + Division
Takeshi Nakamura
Division Head

Struktur Korporat

Corporate Structure

Bank BNP tidak memiliki grup usaha, sehingga informasi mengenai struktur korporat tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Bank BNP does not have a business group, and thus information regarding group or corporate structure is not presented in this Annual Report.

Entitas Anak dan Asosiasi

Subsidiaries and Associates

Bank BNP tidak memiliki anak perusahaan sehingga informasi mengenai anak perusahaan tidak disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Bank BNP has no subsidiaries, and thus information regarding subsidiaries is not presented in the Annual Report.

Bank BNP merupakan bagian dari unit usaha ACOM CO., LTD., dan sebagai anak perusahaan, laporan keuangan Bank BNP dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Konsolidasian ACOM CO., LTD., sebagai pemegang saham mayoritas Bank BNP.

Bank BNP is a subsidiary of ACOM CO., LTD., and as such, the financial statements of Bank BNP are consolidated to the Consolidated Financial Statements of ACOM CO., LTD., as the majority shareholder of Bank BNP.

Profil Dewan Komisaris

The Board of Commissioners Profile

MICHIO ATSUDA

Presiden Komisaris / President Commissioner

Warga Negara Jepang, 58 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB tanggal 23 November 2015. Lulus dari Hitotsubashi University, Jepang, tahun 1982. Pernah bekerja antara lain di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd dengan posisi terakhir sebagai Chief General Manager – Internal Audit & Credit Examination Department hingga tahun 2011, kemudian bekerja di ACOM CO., LTD., mulai November 2011, dengan posisi terakhir sebagai Executive Managing Officer – Overseas Business Department (sejak 2015).

Japanese citizen, 58 years of age. Appointed as President Commissioner of Bank BNP at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 23 November 2015. Graduated from Hitotsubashi University, Japan, in 1982. Has worked among others at The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd with his final position as Chief General Manager – Internal Audit & Credit Examination Department up to 2011, and subsequently at ACOM CO., LTD., starting from November 2011, with the final position being Executive Managing Officer – Overseas Business Department (since 2015).

TATANG HERMAWAN

Komisaris / Commissioner

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Diangkat menjadi Komisaris Bank BNP pada RUPST 26 Juni 2015, pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris Bank BNP pada RUPST 26 Mei 2001, dan pertama kali menjadi anggota Dewan Komisaris pada 10 Maret 1989. Berpengalaman sebagai pengusaha tekstil dan pebisnis di bidang *hospitality*. Pernah mengendalikan beberapa perusahaan, antara lain PT Nam Nam Fashion, PT Fuji Palapa Textile, PT Central Georgette Nusantara, PT Hermawan Ladang Arta, PT Hermawan Sentral Investama, dan Oriental Indah Bali Hotel.

Indonesian citizen, 68 years of age. Appointed as Commissioner of Bank BNP at the AGMS on 26 June 2015, with previous engagement as President Commissioner of Bank BNP starting from the AGMS on 26 May 2001, and initial term as Commissioner commencing at the AGMS on 10 March 1989. Has substantial experience in the textile and hospitality industries. Has controlled a number of companies, among others PT Nam Nam Fashion, PT Fuji Palapa Textile, PT Central Georgette Nusantara, PT Hermawan Ladang Arta, PT Hermawan Sentral Investama, and Oriental Indah Bali Hotel.

KAREL TANOK

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST pada tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPST tanggal 26 Mei 2001. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode sesuai dengan SE POJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 1967. Pernah bekerja sebagai Akuntan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat (1968–1973), Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1969–1982), Senior Consultant Group PT Jasumana, General Manager PT Carlo Erba, Direktur Keuangan & Administrasi PT Naintex, dan Managing Partner Kantor Akuntan Drs. Karel Widyarta. Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2016 antara lain Lokakarya Akuntansi dan Audit Overview Proses Akuntansi Terkait Tutup Buku EOY 2015 dan Pemutakhiran PSAK-IFRS & SPAP-ISA Terkait Pelaporan Keuangan dan Opini Auditor Independen, Kode Etik Profesi Akuntan Publik & Standar Pengendalian Mutu KAP, Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pengaturan Bersama Serta Perjanjian Konsesi Jasa, Lokakarya Akuntansi – Audit Isu Terkini Implementasi PSAK 70 (2016) Terkait UU Pengampunan Pajak Beserta Aspek Auditnya, Akuntan Profesional Membangun Negeri, dan Penerapan Manajemen Resiko Operasional Menggunakan Strategi yang Efektif.

Indonesian citizen, 78 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the AGMS on 26 May 2001. He therefore has carried out his term of office for over two periods, in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) and therefore the Statement of Independence of the Independent Commissioner has been accepted by the Company. He concurrently presides as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee. Graduated with a bachelor's degree in Economics and Accounting from Padjajaran University in 1967. Previously worked as Accountant (BPKP) West Java Representative (1968–1973), Lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University (1969–1982), Senior Consultant for PT Jasumana Group, General Manager of PT Carlo Erba, Finance & Administration Director of PT Naintex, and Managing Partner at Public Accounting Firm of Drs. Karel Widyarta. He participated in various training programs in 2016 including Accounting Workshop and Audit Overview of Accounting Process related to Closing of EOY 2015 and Updating of PSAK-IFRS & SPAP-ISA related to Financial Reporting and Independent Auditor's Opinion, Professional Code of Ethics for Public Accountants & Quality Control Standards for Public Accounting Firms, Accounting & Financial Reporting for Common Management and Services Concession Agreements, Accounting Workshop – Audit of Latest Issues related to Implementation of PSAK 70 (2016) on Tax Amnesty and Its Audit Aspects, Professional Accountants Building the Nation, and Implementation of Operational Risk Management Using Effective Strategies.

BACHTIAR ALAM

Komisaris Independen / Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST pada tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPSLB 26 Desember 2007. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode sesuai dengan SE POJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan Ketua Komite Audit. Pemegang gelar Doctor of Philosophy (PhD) jurusan Antropologi dari Harvard University tahun 1995 dan Master of Arts (AM) di bidang Regional Studies East Asia dari Harvard University tahun 1989. Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, sejak 1987. Visiting Professor di Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, tahun 2003. Memperoleh penghargaan bintang jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette dari pemerintah Jepang pada tahun 2016 untuk kontribusinya bagi kemajuan Studi Jepang di Indonesia dan peningkatan saling pengertian di antara Indonesia dan Jepang. Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2016 antara lain pelatihan persiapan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan Penerapan Manajemen Resiko Operasional Menggunakan Strategi yang Efektif.

Indonesian citizen, 58 years of age. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, with initial term as Independent Commissioner of Bank BNP commencing at the EGMS on 26 Desember 2007. He therefore has carried out his term of office for over two periods, in line with the POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Public Issuers' Annual Report (point III no. 8.i) and therefore the Statement of Independence of the Independent Commissioner has been accepted by the Company. He concurrently presides as the Chairman of the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee. Graduated as Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology from Harvard University in 1995 and as Master of Arts (AM) in Regional Studies East Asia from Harvard University in 1989. Has been working as Lecturer at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia, since 1987, and was Visiting Professor at Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, in 2003. He was awarded The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette from the Japanese government in 2016 for his contributions to the advancement of Japanese studies in Indonesia and the fostering of mutual understanding between Japan and Indonesia. He participated in various training programs in 2016 including preparatory training for the Level 3 Risk Management Certification Examination and Implementation of Operational Risk Management Using Effective Strategies.

4 1 2 3

Board of Commissioners

1	**MICHIO ATSUDA**	**Presiden Komisaris /** President Commissioner
2	**TATANG HERMAWAN**	**Komisaris /** Commissioner
3	**KAREL TANOK**	**Komisaris Independen /** Independent Commissioner
4	**BACHTIAR ALAM**	**Komisaris Independen /** Independent Commissioner

Profil Direksi

The Board of Directors Profile

TAKERU AGAWA

Presiden Direktur / President Director

Warga Negara Jepang, 51 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur pada RUPSLB tanggal 12 Oktober 2015, dan pertama kali menjadi anggota Direksi pada RUPSLB tanggal 2 Mei 2013. Beliau merangkap sebagai Ketua ALCO, Ketua Komite Manajemen Risiko dan Ketua Komite Kebijakan Perkreditan. Lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Doshisha University, Jepang, tahun 1988. Pernah bekerja di The Mitsubishi Bank, Jepang, sebagai Account Officer (1988–1995), sebagai General Manager di PT Mitsubishi Buana Bank, Jakarta (1995–1997), kemudian di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd sebagai Business Promotion Group Leader di Jakarta (1997–2000), sebagai Manager Corporate Banking di Aoyama, Jepang (2000–2003), sebagai Kepala Departemen Corporate Banking di Sydney, Australia (2003–2008), Chief Manager di Sendai, Jepang (2008–2010), dan Deputy General Manager di Singapura (2010–2013). Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2016 adalah mengenai Kebijakan *Tax Amnesty*.

Japanese citizen, 51 years of age. Appointed as President Director at the EGMS on 12 October 2015, with initial term as Director commencing at the EGMS on 2 May 2013. Concurrently holding the position as Chairman of ALCO, Risk Management, and Credit Policy Committees. Graduated with a bachelor's degree in Economics from Doshisha University, Japan, in 1988. Has worked at The Mitsubishi Bank, Japan, as Account Officer (1988–1995), then as General Manager at PT Mitsubishi Buana Bank, Jakarta (1995–1997), and subsequently at The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, namely as Business Promotion Group Leader in Jakarta (1997–2000), as Manager Corporate Banking at Aoyama, Japan (2000–2003), as Corporate Banking Department Head in Sydney, Australia (2003–2008), as Chief Manager in Sendai, Japan (2008–2010), and as Deputy General Manager in Singapore (2010–2013). He participated in a training on Tax Amnesty Policy in 2016.

KEVIN CAHYADI TATANG

Direktur Bisnis / Business Director

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPST tanggal 26 Juni 2015. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Manajemen Risiko, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dari Technical and Further Education di North Sydney, NSW, Australia jurusan Akuntansi (1985) dan Pemrosesan Data (1987). Pernah bekerja di Bank Bali (1989–1997), kemudian di Bank Universal (2000–2003), Bank Permata (2003–2007) dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President, SME & Branch Banking Head, dan di Bank Danamon Indonesia sebagai Vice President Regional SME Head (2008–2009). Bergabung dengan Bank BNP pada tahun 2010 dan menjabat sebagai Regional Business Head I (2010–2014) dan Business Deputy Director (2014). Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2016 adalah mengenai Kebijakan *Tax Amnesty*.

Indonesian citizen, 53 years of age. Appointed as Director at the AGMS on 26 June 2015. Concurrently holding the position as member of the Risk Management, Credit Policy, and ALCO Committees. Graduated from Technical and Further Education in North Sydney, NSW, Australia in Accounting (1985) and Data Processing (1987). Has worked at Bank Bali (1989–1997), then at Bank Universal (2000–2003), then at Bank Permata (2003–2007) with his final position as Senior Vice President SME & Branch Banking Head, and at Bank Danamon Indonesia as Vice President Regional SME Head (2008–2009). Joined Bank BNP in 2010 to serve as Regional Business Head I (2010–2014) and subsequently as Business Deputy Director (2014). He participated in a training on Tax Amnesty Policy in 2016.

MARKUS SUGIONO

Direktur Operasional / Operations Director

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPST tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali diangkat menjadi anggota Direksi pada RUPSLB tanggal 26 Agustus 2009. Beliau merangkap sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, anggota Komite Manajemen Risiko, dan anggota Komite Kebijakan Perkreditan. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Nasional tahun 1990. Pernah bekerja di Bank Bali (1989–1994) kemudian di Bank BNP sebagai Kepala Ekspor Impor (1994), selanjutnya di Bank Bisnis Internasional (1994–1997), di Bank Pikko (1997–1998), sebagai Branch Manager di Keppel Tat Lee Buana Bank (1998–2001), dan Deputy Manager di Bank UOB Indonesia (2003–2004). Bergabung kembali dengan Bank BNP pada tahun 2003 sebagai Kepala Bagian Operasional (hingga 2004), dan sebagai Kepala Biro Operasional (2004–2009). Pelatihan yang telah diikuti selama tahun 2016 antara lain *International Trade Workshop* 2016, Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*, *Workshop* Pelaporan SID Dalam Rangka Program *Data Quality Control* (QC) SID Tahun 2016, dan *Risk Management Certification Refreshment Program*.

Indonesian citizen, 51 years of age. Appointed as Director at the AGMS on 26 June 2016, with initial term as Director commencing at the EGMS on 26 August 2009. Concurrently holding the position as member of Information Technology Steering Committee as well as Risk Management and Credit Policy Committees. Graduated with a bachelor's degree in Industrial Engineering from the National Institute of Technology in 1990. Has worked at Bank Bali (1989–1994) and at Bank BNP as Head of Export & Import (1994), then at Bank Bisnis Internasional (1994–1997), at Bank Pikko (1997–1998), as Branch Manager at Keppel Tat Lee Buana Bank (1998–2001), and as Deputy Manager at Bank UOB Indonesia (2003–2004). Rejoined Bank BNP in 2003 as Head of Operations (up to 2004), and subsequently as Operations Bureau Head (2004–2009). He participated in various training programs in 2016, including International Trade Workshop 2016, Dissemination of the Tax Amnesty Policy, Workshop on the Reporting of SID for 2016 SID Data Quality Control (QC) Program, and Risk Management Certification Refreshment Program.

TRIE KARJATI WIBOWO

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko /
Compliance & Risk Management Director

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Diangkat sebagai anggota Direksi pada RUPSLB 23 Januari 2015. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Kepatuhan, anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1986, dan Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988. Pernah bekerja di Bank Central Asia (1988), kemudian di PT Jaya Obayashi (1989–1995), di PT Asih Eka Abadi, AEA International, SOS Medika (1995–1996), sebagai Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer di PT Bank Sanwa Indonesia (1996–2001), sebagai Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer di PT Bank UFJ Indonesia (2001–2006), sebagai Vice President Planning & Compliance Department (2006–2008) dan Direktur Kepatuhan (2008–2014) di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2016 antara lain Peningkatan Pemahaman Tentang Proses Hukum Litigasi Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Permasalahannya, Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank, Seminar Kesiapan Perbankan Dalam Menghadapi Penilaian *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) Terhadap Indonesia, Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty*, Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level Eksekutif, Pelatihan Data Debitur Melalui SLIK, *Workshop* OJK – Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan, EY *Thought Leadership Financial Services* 2016, dan Seminar *Business Risk*.

Indonesian citizen, 55 years of age. Appointed as Director at the EGMS on 23 January 2015. Concurrently holding the position as Chairman of Compliance Committee and member of Information Technology Steering Committee as well as Credit Policy and ALCO Committees. Graduated with a bachelor's degree in Economics, majoring in Management, from Atmajaya University Yogyakarta in 1986, bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, from Gadjah Mada University Yogyakarta in 1988. Has worked at Bank Central Asia (1988), then at PT Jaya Obayashi (1989–1995), di PT Asih Eka Abadi, AEA International, SOS Medika (1995–1996), at PT Bank Sanwa Indonesia (1996–2001) as Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer, then at PT Bank UFJ Indonesia as Senior Manager Corporate Planning Department & Compliance Officer (2001–2006), then as Vice President Planning & Compliance Department (2006–2008) and subsequently as Compliance Director (2008–2014) at PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. He participated in various training programs in 2016, including Knowledge Upgrading on Legal Processes related to Resolution of Non-Performing Loans and Related Issues, Effective Loan Restructuring and Salvage for Improving Bank's Performance, Seminar on Banking Industry's Preparedness in Anticipation of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Evaluation in Indonesia, Dissemination on Tax Amnesty Policy, Preparation for Executive Level Compliance Certification Examination, Training of Debtors' Data via SLIK, OJK Workshop on Handling of Banking Fraud and Financial Crime, and EY Thought Leadership Financial Services 2016, and a Seminar on Business Risk.

EIICHIRO SAKAI

Direktur Kredit, Perencanaan & IT /
Credit, Planning & IT Director

Warga Negara Jepang, 44 tahun. Menjabat sebagai anggota Direksi pada RUPSLB tanggal 19 Februari 2016. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi, Ketua Komite Produk dan Aktivitas Baru, anggota Komite Manajemen Risiko, anggota Komite Kebijakan Perkreditan, dan sebagai anggota ALCO. Lulus dari Rikkyo University Japan Jurusan Ekonomi tahun 1996. Mengawali karir di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Kameari Branch sebagai Account Officer (1996–2000), kemudian sebagai Trainee di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2000–2001), sebagai Customer Relation Officer di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2001–2002), sebagai Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. Jinbocho Commercial Banking Office (2002–2004), sebagai Central Executive Committee di Employees' Union for the Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. (2004–2005), sebagai Manager Credit Policy and Planning Division di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2005–2011), kemudian di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Berhard Kuala Lumpur, Malaysia sebagai Executive Advisor (2011–2013), dan sebagai Manager IT Solutions Department di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Tokyo, Jepang (2013–2016). Pelatihan atau seminar yang telah diikuti di tahun 2016 adalah Seminar *Business Risk*.

Japanese citizen, 44 years of age. Appointed as Director at the EGMS on 19 February 2016. Concurrently holding the position as Chairman of the Information Technology Steering Committee and New Products & Activities Committee, and member of the Risk Management, Credit Policy, and ALCO Committees. Graduated from the Faculty of Economics, Rikkyo University Japan in 1996. Commenced his career at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Kameari Branch as Account Officer (1996–2000), then as Trainee at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch (2000–2001), as Customer Relation Officer at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta (2001–2002), as Manager at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jinbocho Commercial Banking Office (2002–2004), as Central Executive Commitee at the Employee's Union for The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2004–2005), as Manager Credit Policy and Planning Division at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. (2005–2011), and then at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Berhard Kuala Lumpur, Malaysia, as Executive Advisor (2011–2013), and subsequently as Manager IT Solutions Department at The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Tokyo, Japan (2013–2016). He participated in a Seminar on Business Risk in 2016.

2 4 1 3 5

Board of Directors

1	**TAKERU AGAWA**	**Presiden Direktur /** President Director
2	**KEVIN CAHYADI TATANG**	**Direktur Bisnis /** Business Director
3	**MARKUS SUGIONO**	**Direktur Operasional /** Operations Director
4	**TRIE KARJATI WIBOWO**	**Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director**
5	**EIICHIRO SAKAI**	**Direktur Kredit, Perencanaan & IT /** Credit, Planning & IT Director

Profil Anggota Komite

Profiles of Committee Members

Dr. ELIZABETH TIUR MANURUNG, Msi.AK.,CA

Anggota Komite Independen /
Independent Committee Member

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Sesuai dengan SE POJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 4.g) perihal Surat Pernyataan Independensi Komite Independen telah diterima Perseroan. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1985, melanjutkan S2 Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister Sains tahun 1996, kemudian memperoleh gelar Doktor Akuntansi pada tahun 2003 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Pengalaman jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2006–2014), sebagai Kepala Biro Keuangan Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2003–2005), sebagai Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1998–2003), setelah memulai karirnya sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1991–1998).

Indonesian citizen, 56 years of age. Appointed as Member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. In line with POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Annual Report of Public Companies (III no. 4.g), the Statement of Independence of the Independent Committee has been accepted by the Company. Graduated with a bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from Padjajaran University in 1985, a master's degree in Economics from the University of Indonesia, a Master of Science degree in 1996, and a doctorate in Accounting in 2003 from Padjajaran University, Bandung, in 2003. Previously worked as the Dean of the Faculty of Economics of Parahyangan University, Bandung (2006–2014), Head of the Finance Bureau of Parahyangan Catholic University, Bandung (2003–2005), Head of Accounting Department of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1998–2003), after commencing her career as Secretary at the Accounting Department of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1991–1998).

Dra. INGE BARLIAN, M.SC. AKT.

Anggota Komite Independen /
Independent Committee Member

65 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Sesuai dengan SE POJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1978, dan melanjutkan S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1984, kemudian memperoleh Sarjana Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1986. Pengalaman bekerja sebagai Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2008–2010), sebagai Ketua Ujian Saringan Masuk Universitas Katolik Parahyangan (1990), sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (1987–1993), setelah memulai karirnya sebagai Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985–1986).

Indonesian citizen, 65 years of age. Appointed as Member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. In line with POJK Circular No. 30/SEOJK.04/2016 on Form and Content of Annual Report of Public Companies (III no. 8.i), the Statement of Independence of the Independent Commissioner has therefore been accepted by the Company. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from Parahyangan Catholic University in 1978, a master's degree in Industrial Management and Engineering at Bandung Institute of Technology in 1984, and a bachelor's degree in Accounting from the Parahyangan Catholic University, Bandung, in 1986. Previously worked as Secretary of the Senate of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (2008–2010), as Chair of Entry Examination of Parahyangan Catholic University (1990), as Assistant Dean I of Academic Affairs of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1987–1993), after commencing her career as Assistant Dean II of Administration and Finances of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1985–1986).

Daftar Nama Kepala Divisi dan Kepala Cabang

List of Head of Divisions and Branch Offices

Kepala Divisi / Head Of Division

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Divisi /** Division
Achadiat	Corporate Planning & Performance Management Division Head	Corporate Planning & Performance Management
Adi Setiawan Djajatanaga	Business Planning Division Head	Business Planning
Agung Subagiyo	Corporate Services Deputy Director	Direksi (Deputy)
Andre Lasmana	Credit Process Division Head	Credit Process
Gagan Gunawan	Operations Process Division Head	Operations Process
Gina Dharma	Conventional Business Deputy Director	Direksi (Deputy)
Hardi Widjaja	Treasury Division Head	Treasury
Ignatius P. Prihascariau	Credit Planning Division Head	Credit Planning
Licky Kuskanto	Financial Control Division Head	Financial Control
Lie Chen	Risk Management Division Head	Risk Management
Lius Budianta Nugroho	Credit Deputy Director	Direksi (Deputy)
Maria Ida Ratnawati	Operations Planning Division Head	Operations Planning
Mario Yahya	Corporate Quality Assurance Division Head	Corporate Quality Assurance
Moe Hendrik Muljana	Regional Business Head II	Regional Business II
Purbaji Basuki	Compliance Division Head	Compliance
Raden Widawati	Internal Audit Division Head	Internal Audit
Ronnie Purnadjaja	Regional Business Head III	Regional Business III
Takeshi Nakamura	KTA Mirai+ Division Head	KTA Mirai+
Tjie Khong Fen	Information Technology Division Head	Information Technology
Yanto Setiawan Simaputra	Recovery Asset Deputy Director	Direksi (Deputy)

Kepala Cabang / Head of Branch Offices

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Kantor Cabang /** Branch Offices
Agustinus Roy Ellery Vico	Branch Manager	KCP Pasteur
Ahmad Tedy Riswadi	Branch Manager	KCP Cicadas
Alexandri Gunawan	Branch Manager	KCP Terusan Buah Batu
Andreas Arief Yudianto	Branch Manager	KCP Cikarang
Audry Augustina	Branch Manager	KCP Majalaya
Bonifasius Adrian	Pjs. Branch Manager	KCP Pasar Baru
Camellia Diana Karossi	Branch Manager	KCP Cimahi
Dadan Darmawan	Branch Manager	KCP Cikampek
Dewi Khrisnawaty	Branch Manager	KCP Gatot Subroto
Dhorotea Kusuma Witri, S.E	Branch Manager	KC Solo
Eddy Susanto Wibowo	Branch Manager	KC Tegal
Ellyza Zakaria	Branch Manager	KC Darmo
F. Y. Gandhi Pudjiono	Branch Manager	KC Malang
Feiliana *)	Branch Manager	KCP Gajah Mada
Feiliana	Branch Manager	KCP Jatinegara

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Kantor Cabang /** Branch Offices
Fenti Widjaja *)	Branch Manager	KC Wahid Hasyim
Fenti Widjaja	Branch Manager	KCP Sahid
Frans Budiyanto	Branch Manager	KC Yogyakarta
Hendrawan Saputro Hadi	Branch Manager	KCP Kelapa Gading
Herman Kurniawan	Branch Manager	KCP Waringin
Ike Riani	Pjs. Branch Manager	KC Sukabumi
Iwan Jusup	Branch Manager	KCP Pagongan
Kartini	Branch Office Deputy Division Head	KCP Muara Karang
Lenggawati Setio	Branch Manager	KC Semarang
Lies Kurnia Hidayat	Branch Manager	KCP Soreang
Lilianti Wijaya	Branch Manager	KCP Kopo Sayati
Lusy	Branch Manager	KC Bogor
Maria Grace Sarlim	Branch Manager	KCP Pajajaran
Marlinah Ongkowidjojo	Branch Office Deputy Division Head	KC Yos Sudarso
Njo Budhi Junaidi Wijaya	Branch Manager	KC Denpasar
Ong Esther Mulan	Branch Manager	KC Juanda
Ore Supara	Branch Manager	KCP Jatibarang
Pratiwi	Branch Manager	KCP MTC
Reni Noer Diniyah	Pjs. Branch Manager	KCP Sudirman Semarang
Ronny Primadi Sutanto	Branch Manager	KCP Sukajadi
Rosalina	Branch Manager	KCP Fatmawati
Rossetiyawati Samara *)	Branch Manager	KCP Puri Niaga
Rossetiyawati Samara	Branch Manager	KCP Serpong
Rudy Supriyadi	Branch Manager	KC Gunung Sabeulah
Sandy Win	Branch Manager	KCP Kopo
Sudjaja Suhanta	Branch Manager	KC Bekasi
Sugito Santosa	Branch Manager	KCP Sumber Sari
Sysca Yulianawati	Branch Manager	KCP Karawang
Verry Budhiman	Branch Manager	KC Sudirman
Yanto Sutanto	Branch Manager	KC Purwokerto
Yenni Sandra	Pjs. Branch Manager	KCP Buah Batu
Yuliniar	Branch Manager	KCP Suniaraja

*) rangkap jabatan

Komposisi Pemegang Saham

Shareholder Composition

Berdasarkan daftar pemegang saham yang dikeluarkan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Bank, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Bank BNP per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on the list of shareholders issued by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar of the Bank, capital structure and share ownership composition of Bank BNP as at 31 December 2016 is as follows:

Kepemilikan Saham di atas 5%

Share Ownership of more than 5%

Keterangan / Description	**Nilai Nominal Rp 500,00 per saham** Par Value of Rp500 per Share		
	Jumlah Saham Number of Shares	**Jumlah Nominal** Nominal Value **(Rp)**	**Persentase** Percentage **(%)**
Modal Dasar / Authorized Capital	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-In Capital			
ACOM CO., LTD	447.707.012	223.853.506.000	66,15%
PT. Hermawan Sentral Investama	72.564.211	36.282.105.500	10,72%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	63.310.000	31.655.000.000	9,35%
Masyarakat/Lainnya di bawah 5% / Public/Others below 5%	93.252.659	46.626.329.500	13,78%
TOTAL	**676.833.882**	**338.416.941.000**	**100,00%**

Kepemilikan Saham oleh Direksi/Komisaris

Share Ownership by Directors/Commissioners

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Jumlah Saham /** Number of Shares	**Persentase /** Percentage **(%)**
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner	12.001.000	1,77%
Takeru Agawa	Presiden Direktur / President Director	100	0,00%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur / Director	100	0,00%
Markus Sugiono	Direktur / Director	100	0,00%
Trie Karjati Wibowo	Direktur / Director	100	0,00%

Jumlah saham yang telah diterbitkan Bank BNP per Desember 2016 adalah 676.833.882 lembar, terdiri dari saham biasa bersifat ekuitas yang ditatakelolakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan harga nominal per lembar sahamnya Rp500 (lima ratus Rupiah).

Total shares of Bank BNP issued per December 2016 amounted to 676,833,882 shares consisting of equity common stock governed by the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), with the par price per share is Rp500 (five hundred Rupiah).

Sekilas Pemegang Saham Bank BNP

Kepemilikan saham pengendali Bank BNP yang oleh 2 (dua) institusi keuangan yang berasal dari Jepang, yaitu ACOM CO., LTD. (ACOM), dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU) dilakukan dengan mengakuisisi saham Bank BNP sebanyak 75,50% pada 17 Desember 2007.

Ini menjadikan dua perusahaan tersebut sebagai pemegang saham dan pengendali Bank BNP, dengan pemegang saham dan pengendali akhir adalah Keluarga Kinoshita dan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG).

Overview of the Shareholders of Bank BNP

Two Japanese financial institutions, namely ACOM CO., LTD. (ACOM), and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (BTMU), are the controlling shareholders of Bank BNP, having acquired a total of 75,50% share ownership of the Bank on 17 December 2007.

Thus, both parties arethe controlling shareholders of Bank BNP, with the ultimate controlling shareholders being the Kinoshita Family and Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (MUFG).

Pemegang saham lain yang memiliki saham di atas 5% adalah PT Hermawan Sentral Investama.

Pemegang Saham Pengendali

ACOM CO., LTD.

ACOM adalah suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Jepang, berkedudukan dan berkantor di 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Jepang. Saham ACOM tercatat di Tokyo Stock Exchange. ACOM adalah anak perusahaan dari Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

Bisnis utama Grup ACOM adalah pinjaman dan bisnis kartu Kredit, bisnis penjaminan, pelayanan pinjaman dan bisnis keuangan di luar negeri, dan ACOM sendiri bergerak dalam bidang industri jasa pembiayaan dengan menyediakan pinjaman kepada perorangan.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham Mayoritas

Berdasarkan Laporan Keuangan ACOM Tahun Buku 2016 yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan data yang diperoleh dari ACOM, susunan pemegang saham mayoritas ACOM per 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

Another party that owns Bank BNP's shareswith more than 5% ownership is PT Hermawan Sentral Investama.

Controlling Shareholders

ACOM CO., LTD.

ACOM is a public company established under the Japanese law, having its registered office at 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Japan. ACOM's shares are listed on the Tokyo Stock Exchange. ACOM is a subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).

The main business of ACOM group is extending loans and credit cards, assurance business, loans service and financial business in overseas. ACOM itself engages in the financing service industry with the main activity of providing loans to individuals.

Capital Structure & Majority Shareholders

Based on ACOM's Financial Statements for the Financial Year of 2016, which ended on 31 March 2016, and data obtained from ACOM, the composition of majority shareholders of ACOM as at 31 March 2016 is as follows:

Nama Perusahaan Company Name	**Jumlah Saham** Number of shares (Thousands of shares)	**Persentase** Percentage (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc	588.723	36,88
Maruito Shokusan Co., Ltd.	273.467	17,13
Maruito Co., Ltd.	125.533	7,86
Foundation of Kinoshita Memorial Enterprise	92.192	5,77
Maruito Shoten Co., Ltd.	38.733	2,42
General Incorporated Association Kyoekai Trust Account	32.598	2,04
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Standing proxy: The Master Trust Bank of Japan, Ltd.)	31.572	1,97
Shigeyoshi Kinoshita	30.007	1,87
NOBUKA Co., Ltd	30.000	1,87
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)	26.824	1,68
Total	**1.269.653**	**79,53**

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1919 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Jepang, berkedudukan dan berkantor di 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, dan merupakan salah satu bank kelas dunia di Jepang yang kegiatan utamanya adalah usaha perbankan komersial.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham

Berdasarkan Laporan Keuangan BTMU Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, susunan permodalan dan pemegang saham BTMU pada tanggal 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") is a company established on 15 August 1919, under the laws and regulations of Japan. The company is domiciled and headquartered in Marunouchi 2-7-1, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan. It is one of the world-class banks in Japan which engage in commercial banking business.

Capital Structure & Shareholders

Based on the Financial Statements of BTMJ for the Fiscal Year ended 31 March 2016, the capital structure and shareholders of BTMJ as of 31 March 2016 are as follows:

Nama / Name	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase / Percentage (%)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12.350.038.000	97,18
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (*treasury stock*)	357.700.000	2,81
Total	**12.707.738.000**	**100.00**

Pemegang Saham di Atas 5%

PT Hermawan Sentral Investama

PT Hermawan Sentral Investama ("HSI"), salah satu pemegang saham pendiri, berkedudukan di Kota Bandung dan didirikan pada tanggal 31 Mei 1997 di Bandung dengan maksud dan tujuan dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, HSI dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa, konsultasi di bidang bisnis, manajemen, administrasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan manajemen perusahaan, manajemen properti, manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti *real estate*, serta manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri.

Struktur Permodalan & Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Gunawan Kamarga, S.H., Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HSI adalah sebagai berikut:

Shareholders With More Than 5% Ownership

PT Hermawan Sentral Investama

PT Hermawan Sentral Investama ("HSI"), one of the founding shareholders, is domiciled in Bandung and was established on 31 May 1997 in Bandung with the intent and purpose in the field of services. To achieve such purpose, HSI is entitled to carry out business activities in the field of services, business consulting, management, administration, human resources management, corporate management, property management, operation and maintenance management of real estate, as well asoperations and maintenance management of industrial estates.

Capital Structure & Shareholders

Based on the Deed of Meeting Resolution No. 18 dated 4 October 2014, drawn up before Gunawan Kamarga, S.H., Notary in Bandung, the capital structure and shareholding composition of HIS are as follows:

Keterangan / Description	Nilai Nominal Rp 1 juta per saham / Par Value of Rp 1 Million per Share		
	Jumlah Saham / Number of Shares	Jumlah Nominal / Nominal Value	Persentase / Percentage (%)
Modal Dasar / Authorized Capital	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-In Capital			
- Tatang Hermawan	5.738	5.738.000.000	37,00%
- Aling Hermawan	4.781	4.781.000.000	31,00%
- Afandi Hermawan	4.781	4.781.000.000	31,00%
Total	**15.300**	**15.300.000.000**	**100,00%**
Jumlah Saham dalam Portepel / Total Shares in Portfolio	4.700	4.700.000.000	

Kronologi Pencatatan Saham dan Efek

Chronology of Shares and Securities Listing

Kronologi Pencatatan Saham

PENAWARAN UMUM PERDANA

Berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 15 September 2000, pada tanggal 14 Desember 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM", sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat "OJK") melalui surat No. S-3663/PM/2000 melakukan Penawaran Umum Perdana atas 50.000.000 Saham Biasa dengan harga penawaran sebesar Rp525 setiap saham, dan 20.000.000 Waran Seri I disertai dengan Saham Biasa atas nama, Waran diberikan secara cuma-cuma dan periode pelaksanaan Waran Seri I mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan harga penawaran sebesar Rp600 per saham.

Pada tanggal 10 Januari 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 tanggal 8 Januari 2001.

Modal Disetor Bank BNP bertambah pada bulan Januari 2004 sebagai akibat adanya exercise waran sebanyak 8.275.000 lembar menjadi saham biasa atas nama dengan nominal Rp500 sehingga jumlah tersebut menambah jumlah saham beredar menjadi 158.275.000 saham.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank BNP, berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 tanggal 22 Juni 2006, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan cara penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak 158.275.000 lembar saham dari 7 Juli sampai dengan 13 Juli 2006 dengan harga penawaran sebesar Rp550 per saham.

Pada tanggal 17 Desember 2007, ACOM CO., LTD., Japan ("ACOM") dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. ("BTMU") mengakuisisi masing-masing sebanyak 55,41% dan 20% dari seluruh saham yang dikeluarkan Bank BNP.

Pada bulan Januari–Maret 2008 telah dilakukan penawaran tender atas kepemilikan saham Bank BNP oleh ACOM berkaitan dengan kegiatan akuisisi, sehingga jumlah kepemilikan saham ACOM berubah menjadi 55,68%.

Share Listing Chronology

INITIAL PUBLIC OFFERING

Based on the resolution of Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 15 September 2000, and an effective statement from the Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("BAPEPAM", now Otoritas Jasa Keuangan or "OJK" or the Financial Services Authority) through letter No. S-3663/PM/2000 obtained on 14 December 2000, the Bank executed an Initial Public Offering (IPO) of 50,000,000 Common Shares with offering price per share at Rp525 per share, and 20,000,000 Warrants Series I, embedded to the Common Shares. The Warrant was issued free of charge in which the period of exercisable Warrant Series I wasfrom 10 July 2001 to 9 January 2004 at the offering price of Rp600 per share.

On 10 January 2001, the shares were listed on the Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange) in accordance with the Letter of the Board of Directors of Jakarta Stock Exchange No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 dated 8 January 2001.

The paid-in Capital of Bank BNP increased in January 2004 due to an exercise of 8,275,000 warrants into ordinary shares with a par value of Rp500 per share, resulting in the increase of the outstanding shares of the Bank to 158,275,000 shares.

LIMITED PUBLIC OFFERING I

With a view to strengthen the Bank's capital structure, by an effective statement from BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 dated 22 June 2006, the Bank executed Limited Public Offering (Rights Issue) I through the issuance of preemptive rights (HMETD) of 158,275,000 shares from 7 July 2006 to 13 July 2006, with the offering price of Rp550 per share.

On December 17, 2007, ACOM CO., LTD., Japan ("ACOM") and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd ("BTMU") acquired 55.41% and 20% of the total shares issued by Bank BNP, respectively.

During the period of January–March 2008 the Bank conducted a tender offer of its shares belonging to ACOM with regard to the acquisition. As a result, ACOM's share ownership changed to 55.68%.

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Pada bulan Oktober 2010 Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) dengan cara Penerbitan HMETD atas sejumlah 99.963.158 Saham Biasa Atas nama dengan nilai nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp1.000 setiap saham.

Total dana hasil PUT II setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar Rp98.423.004.500 (sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ribu lima ratus rupiah) dan telah digunakan 100% sebagai Modal Kerja.

Per 31 Desember 2011, jumlah saham yang beredar adalah 316.513.158, di mana ACOM menguasai 60,31% dan BTMU menguasai 15.20% dari total saham tersebut.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Pada bulan Mei 2013 Bank BNP melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan jumlah saham baru yang ditawarkan sebanyak 260.320.724 dengan nominal Rp500 setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp1.150 setiap saham. Hasil PUT III tersebut mengubah komposisi kepemilikan saham Bank, di mana ACOM menguasai 66,15% dan BMTU menguasai 9,35% dari total 676.833.882 saham.

Kronologi Pencatatan Efek

Bank BNP tidak memiliki pencatatan efek lainnya, sehingga informasi kronologi pencatatan efek lainnya tidak disajikan.

LIMITED PUBLIC OFFERING II

In October 2010, the Bank performed Limited Public Offering II (PUT II) by issuing Preemptive Rights (HMETD) on 99,963,158 Registered Common Shares with nominal value of Rp500 each and offered price of Rp1,000 per share.

All PUT II proceeds after being deducted with issuance cost was Rp98,423,004,500 (ninety eight billion four hundred twenty three million four thousand five hundred rupiah); 100% of which had been used as Working Capital.

As at 31 December 2011, total circulating shares stood at 316,513,158; 60.31% of which owned by ACOM and 15,20% owned by BTMU.

LIMITED PUBLIC OFFERING III

In May 2013, Bank BNP performed Limited Public Offering III (PUT III) with total offered new shares of 260,320,724 shares, with nominal value of Rp500 per offered share with Offering Price of Rp1,150 each. The PUT III proceeds changed the Bank's shares ownership, whereby ACOM owned 66.15% and BMTU owned 9.35% of thetotal of 676,833,882 shares.

Securities Listing Chronology

Bank BNP does not have other securities listed, thus the information regarding the listing chronology of other securities is not presented.

Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Professional Institution

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
(an Independen member of BKR International)
Jl. Haruman No. 2 Bandung 40262 Indonesia
Telepon: 022 - 7218235 - 7317929
Fax: 022 - 7311375
Periode Penugasan: 5 (lima) bulan terhitung tanggal 1 September 2016 sd 15 Februari 2017

Biro Administrasi Efek / Share Registrar

PT Sinartama Gunita
Alamat: Plaza BII Menara I Lt. 9
Jl. MH Thamrin Kav. 22/No. 51
Telepon: 021 - 392 2332
Fax: 021 - 392 3003

Notaris / Notary

DR. Ely Baharini, S.H, Sp.N., M.H
Jl. Raya Gadobangkong No. 38A
Ngamprah, Kab. Bandung Barat - 40552
Telepon: 022 - 70808505
HP: 0818222833
Fax: 022 - 6127562
No. Rek: 003.3.300808.1

Yuliani Idawati, S.H., Sp.N.
Ruko Lucky Town
Jl. Ters. Jakarta No. 30 C Bandung
Telepon: (022) 7231014

Nama dan Alamat Jaringan Kantor

Name and Address of Office Branch Offices

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Pusat / Head Office	
Bandung	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung, Indonesia Tlp: +62-22-82560100 (Hunting) Fax: +62-22-2514580 SWIFT: NUPAID J6 Website: www.bankbnp.com
Kantor Cabang / Branch Offices	
Bandung	Jl. Jenderal Sudirman No. 30 - 32, Bandung Tlp: +62-22-4202088 (Hunting) Fax: +62-22-4206988
Jakarta	Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 171, Jakarta Tlp: +62-21-3901485 (Hunting) Fax: +62-21-3144589
Surabaya	Jl. Raya Darmo No. 71, Surabaya Tlp: +62-31-5678871 Fax: +62-31-5683861
Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 2, Cirebon Tlp: +62-231-221491 (Hunting) Fax: +62-231-221500
Denpasar	Rukan Teuku Umar Indah Jl. Teuku Umar No. 29-31, Denpasar Tlp: +62-361-225588 Fax: +62-361-238088
Semarang	Mataram Plaza Blok A No. 14-14A, Jl. MT. Haryono No. 427-429, Semarang Tlp: +62-24-3588789 (Hunting) Fax: +62-24-3588790
Bogor	Jl. Suryakencana No. 331, Bogor Telp. +62-251-8337558 Fax: +62-251-8337408
Bekasi	Kalimalang Commercial Center Blok A6/8, Jl. Ahmad Yani, Bekasi Tlp: +62-21-29257664 (Hunting) Fax: +62-21-29257674
Tasikmalaya	Jl. Gunung Sabeulah No.41 C, Tasikmalaya Tlp: +62-265-2350100 (Hunting) Fax: +62-265-2352500
Sukabumi	Jl. Ahmad Yani No. 317, Sukabumi - 43112 Tlp: +62-266-245310 Fax: +62-266-245314
Yogyakarta	Jl. Pangeran Mangkubumi No. 99, Yogyakarta Tlp: +62-274-584999 Fax: +62-274-562877

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang / Branch Offices	
Surakarta	Jl. Urip Sumohardjo No. 103, Surakarta Tlp: +62-271-645945 Fax: +62-271-645633
Tegal	Jl. Jendral Sudirman No. 22, Tegal Tlp: +62-283-343322 Fax: +62-283-343323
Malang	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 67, Malang Tlp: +62-341-344900 Fax: +62-341-344880
Purwokerto	Ruko Ex Kodim No. 24, Jl. Jendral Sudirman Tlp: +62-281-642377 Fax: +62-281-641500
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Bandung	Jl. Pajajaran No. 151, Bandung Tlp: +62-22-6019720 (Hunting) Fax: +62-22-6010579
	Jl. Suniaraja No. 57-59, Bandung Tlp: +62-22-4212188 (Hunting) Fax: +62-22-4239278
	Jl. Kopo No.97, Bandung Tlp: +62-22-5204888 Fax: +62-22-5203175
	Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 268, Bandung Tlp: +62-22-7306688 Fax: +62-22-7305133
	Pasteur Hyperpoint Jl. Dr. Djundjunan No. 126-128, Bandung Tlp: +62-22-2021330 (Hunting) Fax: +62-22-2021320
	Kompleks Pertokoan Sumber Sari Indah Jl. Sumber Sari Indah - T9, Bandung Tlp: +62-22-6120585 (Hunting) Fax: +62-22-6014901
	Pasar Baru Lantai 2 Blok D2 No. 01, Jl. Oto Iskandardinata No. 70, Bandung Tlp: +62-22-4245071 Fax: +62-22-4245076

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Bandung	Jl. Waringin No. 31, Bandung Tlp: +62-22-6013320 Fax: +62-22-6019754
	Metro Trade Center (MTC) Kav. B-07, Jl. Soekarno-Hatta No. 590, Bandung Tlp: +62-22-7537525 (Hunting) Fax: + 62-22-7536295
	Jl. Buah Batu No. 162, Bandung Tlp: +62-22-7322484 Fax: +62-22-7322426
	Jl. Kiaracondong No. 36B, Bandung Tlp: +62-22-7209240 Fax: +62-22-7209278
	Jl. Sukajadi No. 143, Bandung Tlp: +62-22-2042155 Fax: +62-22- 2042144
Kab. Bekasi	Rukan Cikarang Commercial Centre Blok B1 No. 7. Jl. Cibarusah Lemah Abang Cikarang, Bekasi Tlp: +62-21-8937552 Fax: +62-21-8937936
Cikampek	Jl. Ahmad Yani Ruko ex-Timbangan No. 3-4, Cikampek, Karawang Tlp: +62-264-8385660 Fax: +62-264-8385661
Cimahi	Jl. Jendral H. Amir Machmud No.355, Cimahi Tlp: +62-22- 86002100 Fax: +62-22- 86002100
Cirebon	Cirebon Grand Center Blok D No. 14 Jl. Surya Negara, Cirebon Tlp: +62-231-248688 (Hunting) Fax: +62-231-248686
Indramayu	Jl. Letnan Joni No. 327, Jatibarang Tlp: +62-234-351288 Fax: +62-234-351424
Jakarta Barat	Jl. Gajah Mada No. 71-73, Krukut Taman Sari, Jakarta Barat Tlp: +62-21-6333511 Fax: +62-21-6340393
	Ruko Puri Niaga Blok K6 No. 2B, Jl. Puri Kencana, Jakarta Barat Tlp: +62-21-58354091 Fax: +62-21-58351534
Jakarta Pusat	Grand Sahid Jaya Hotel Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Tlp: +62-21-5714260 Fax: +62-21-5714260

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices	
Jakarta Selatan	Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No. 21, Jl Raya Fatmawati No. 39 Jakarta Selatan Tlp: +62-21-29419740 Fax: +62-21-29419738
Jakarta Timur	Ruko Jatinegara, Jl. Pasar Barat No. 128/129 Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur Tlp: +62-21-85910018 Fax: +62-21-85909985
Jakarta Utara	Jl. Muara Karang Raya No.195, Jakarta Utara Tlp: +62-21-66696150 Fax: +62-21-66602274
	Jl. Boulevard Barat Raya Blok LC 7 No. 53, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tlp: +62-21-45853468 Fax: +62-21-45853466
Kab Bandung	Jl. Kopo Sayati No. 105, Kab. Bandung Tlp: +62-22-5401468 Fax: +62-22-5401458
	Jl. Raya Bojongsoang No. 110, Bandung - 40288 Tlp: +62-22-87306899 Fax: +62-22-87306807
	Jl. Raya Soreang Banjaran No. 453, Soreang Tlp: 62+22-5893988 Fax: +62-22-5891374
	Jl. Kondang No. 34, Majalaya Tlp: +62-22-5950519 Fax: +62-22-5950523
Karawang	Jl. Tuparev No. 429 Tlp: +62-267-8490455 Fax: +62-267-8490460
Semarang	Jl. Jendral Sudirman No. 290, Semarang Tlp: +62- 24-7627608 Fax: +62-24- 7627582
Surabaya	Komplek Ruko Darmo Park I Blok IV A/6, Jl. Mayjen Sungkono No. 112E, Surabaya Tlp: +62-31-5660755 Fax: +62-31-5612994
	Jl. Waspada No. 39-39A, Surabaya Tlp: +62-31-3530558 Fax: +62-31-3533266

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Kas / Cash Offices	
Bekasi	Ruko Metro Boulevard A No. 25 Cikarang Baru, Jababeka Tlp: +62-21-89842346 Fax: +62-21-89842345
Subang	Ruko Rawa Badak Regency C-3, Jl. Kapten Hanafiah Subang-41211 Tlp: +62-260-7605068 Fax: +62-260-7605089
Purwakarta	Jalan Veteran No. 136, Purwakarta - 41118 Tlp: +62-264-8305877 Fax: +62-264-8305876
Kab. Bandung Barat	Jalan Raya Cimareme - Padalarang No. 29 Padalarang-40552 Tlp: +62-22-86006208 Fax: +62-22-86006222
Kab. Bandung	Jalan Raya Bandung - Garut Km 24,5 Jalan Raya Rancaekek-40394 Tlp: +62-22-87833338 Fax: +62-22-87833339
Kab. Sidoarjo	Jalan Sunandar Priyosudarmo Blok L No. 138 Sidoarjo-61271 Tlp: +62-31-99703688 Fax: +62-31-99703992
Jakarta Timur	Komplek Pusat Perdagangan Ujung Menteng Blok B No. 17, Jl. Hamengkubuwono IX KM 25 Cakung Jakarta Timur-13960 Tlp. +62-21-29068648 Fax: +62-21-29068647

Kantor Wilayah Branch Office	Alamat Address
Kantor Kas / Cash Offices	
Sukabumi	Jalan Siliwangi No. 99 Cibadak Sukabumi-43351 Tlp. +62-266-6545408 Fax: +62-266-6545286
Tangerang Selatan	Ruko Sutera Niaga I No. 69, Jalan Raya Serpong Tangerang Selatan-15325 Tlp. +62-21-29672190 Fax: +62-21-5398666
Surabaya	Jalan Raya Tandes No. 03A Surabaya-60187 Tlp: +62-31-99147477 Fax: +62-31-99146810
Kantor Fungsional Non Operasional / Non-Operational Functional Office	
Bandung	Jl. Pager Gunung No. 18 Tlp. +62-22-82560256 Fax: +62-22-2502123

Peta Operasional

Operational Map

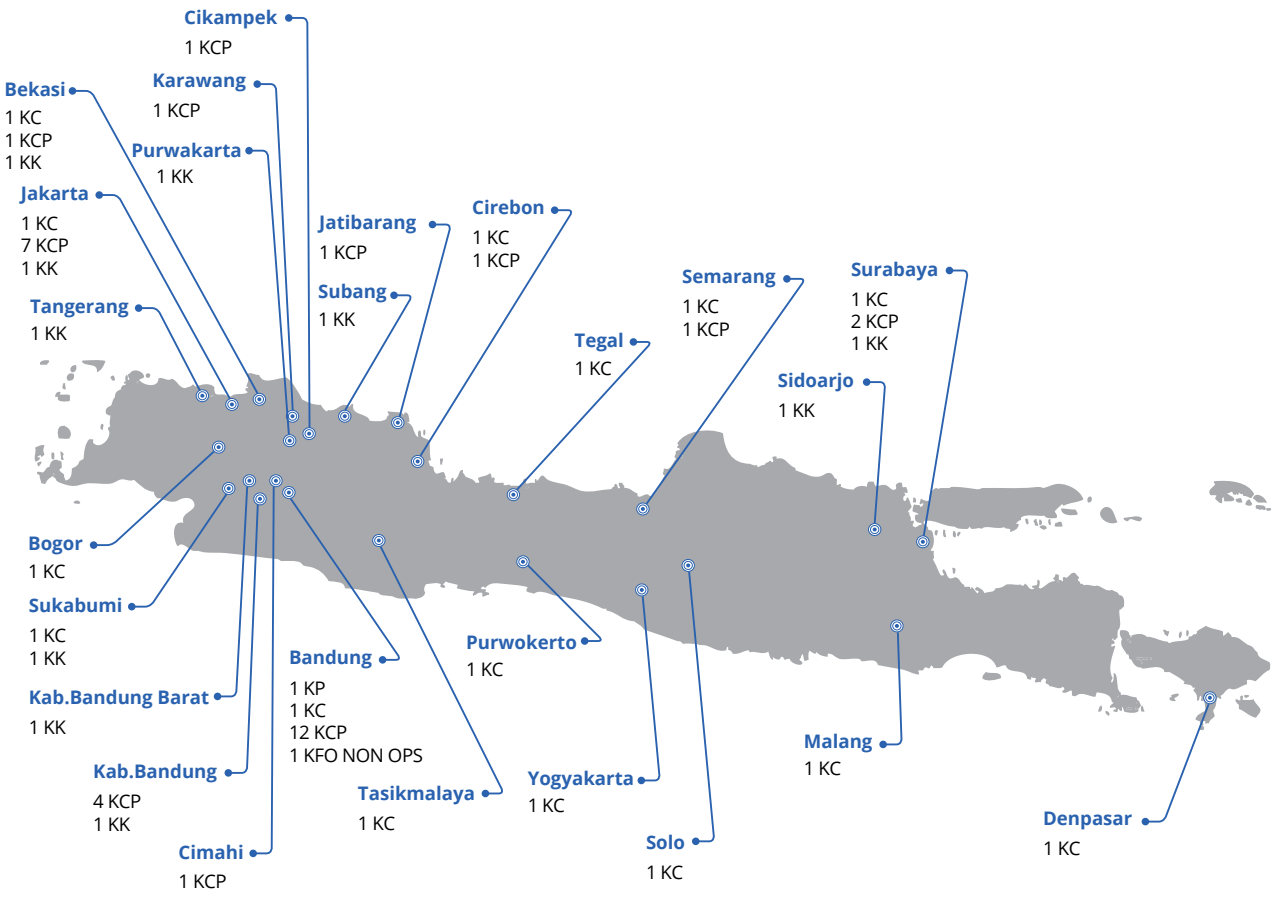

NOTE:

KP	=	Kantor Pusat / Head Office (1)
KC	=	Kantor Cabang / Branch Offices (15)
KCP	=	Kantor Cabang Pembantu / Supporting Branch Offices (32)
KK	=	Kantor Kas / Cash Offices (10)
KFO NON OPS	=	Kantor Fungsional Non Operasional (1) Mobil Kas / Cash Car (3)
ATM	=	Anjungan Tunai Mandiri / Automated Teller Machines (57)
ATM Seven Bank	=	ATM Seven Bank / ATM Seven Bank (3)*
ATM Non Tunai	=	ATM Non Tunai / Non Cash ATM (4)

*) ATM layanan khusus tergabung jaringan ATMI

Unit Pendukung Bisnis

Supporting Business Unit

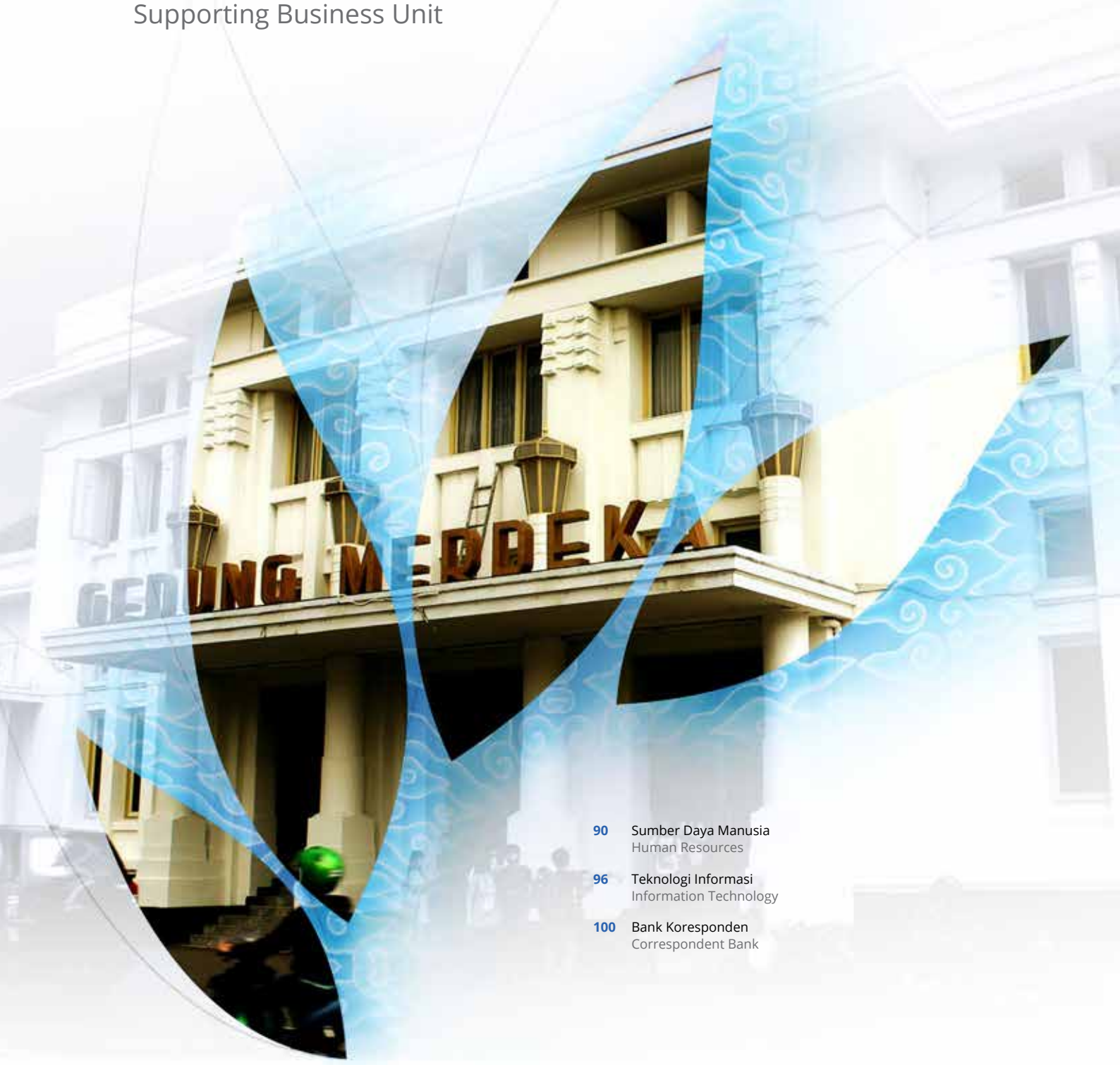

90 Sumber Daya Manusia
Human Resources

96 Teknologi Informasi
Information Technology

100 Bank Koresponden
Correspondent Bank

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Bank BNP menyadari pentingnya meningkatkan kualitas SDM dengan memilih orang-orang yang terbaik, profesional dan memiliki keahlian sesuai dengan fungsi bidangnya untuk mencapai tujuan Bank BNP. Mengembangkan strategi pengelolaan SDM yang bersinergi dengan tujuan perusahaan menjadi upaya penting agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.

Salah satu upaya dalam menciptakan SDM yang profesional terletak pada proses rekrutmen. Penyelenggaraan program rekrutmen bertujuan untuk menyaring orang-orang terbaik agar dapat mendukung perkembangan jaringan usaha. Juga dilakukan program *employee engagement* melalui berbagai fasilitas ketenagakerjaan dan *benefit* karyawan yang bersaing di industri perbankan serta program pengembangan kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* seluruh karyawannya.

Rekrutmen Karyawan

Bank BNP menjalankan *Man Power Planning* dengan didukung sistem rekrutmen berdasarkan prinsip *"the right man in the right position"*. Proses rekrutmen ini terdiri atas beberapa tahap seleksi yang harus dilalui setiap kandidat untuk dapat bergabung untuk menjadi karyawan Bank BNP.

Kandidat yang masuk dalam proses tahap seleksi merupakan kandidat yang telah terjaring dalam proses rekrutmen *pro-hire* yang menggunakan jasa *headhunter*, referensi, *campus hiring*, *job fair*, dan beberapa media *jobseeker*. Melalui proses ini diharapkan karyawan yang bergabung adalah kandidat terbaik yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang dibutuhkan.

Pada tahun 2016 Bank BNP merekrut total 530 orang karyawan, sementara 359 karyawan mengundurkan diri, 5 karyawan pensiun, dan 1 karyawan meninggal dunia.

Profil SDM

Per akhir tahun 2016, Bank BNP mempekerjakan total 1.676 karyawan, dengan komposisi sebagai berikut:

Bank BNP realizes the importance of improving human resources quality, and demonstrates this by choosing the best, most professional, and most skilled personnel in line with the areas needed to achieve Bank BNP's goals. Developing a human resources mangement strategy that maintains synergy with the Company's goals is a monumental effort to enable it to remain competitive.

One of the measures to foster a professional workforce is the recruitment process. The recruitment program is aimed at selecting the best people to support the Company's business network. In addition, the employee engagement program has also been held via multiple facilities for work, and competitive benefits within the banking industry are provided to employees as well as hard skills and soft skills competence development for all employees of the Bank.

Employee Recruitment

Bank BNP conducts its man power planning using a recruitment system that is based on the principle of "the right man in the right place". This recruitment process consists of a number of phases of selection which all candidates must pass in order to join Bank BNP as employee.

The candidates that have passed the selection process are candidates that have been selected via pro-hire recruitment processes that employ the service of headhunters, references, campus hiring, job fairs, and jobseeker media. Through this process, it is expected that the candidates are the best talents available to work at the Company with the proper qualifications to fill the positions that are vacant.

In 2016 Bank BNP recruited a total of 530 employees, while 359 of its employees resigned, 5 employees reached retirement age, and 1 employee passed away.

Workforce Profile

As at end of 2016, Bank BNP employed a total of 1,676 employees, with the following composition:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian / Workforce Composition by Employment Status

Uraian	2016	2015	Variansi / Variance (%)	Description
Tetap	1.244	1.299	(4,2%)	Permanent
Kontrak	432	212	103,7%	Contract
Total	**1.676**	**1.511**	**10,9%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi / Workforce Composition by Organizational Level

Uraian	2016			2015			Variansi / Variance (%)	Description
	P	L	Total	P	L	Total		
First Line	1	8	9	1	8	9	-	(Director / Commissioner)
Top Management	3	17	20	4	17	21	(4,7%)	(Deputy Director / Division Head)
Middle Management	49	79	128	48	81	129	(0,7%)	(Deputy Division / Dept. Head)
Lower Management	241	272	513	230	280	510	(0,7%)	(Section Head / Officer)
Staff	466	533	999	399	435	833	0,5%	Staff
Non Staff	0	7	7	0	9	9	(22,2%)	Non Staff
Total		**1.676**			**1511**		**10,9%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan / Workforce Composition by Level of Education

Uraian	2016	2015	Variansi / Variance (%)	Description
Master	21	22	(4,5%)	Master's degree
Bachelor	1024	927	10,4%	Bachelor's degree
Diploma	315	298	5,7%	Diploma
Non Graduate	316	264	19,7%	High School
Total	**1.676**	**1.511**	**10,9%**	**Total**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia / Workforce Composition by Age Group

Uraian	2016	2015	Variansi / Variance (%)	Description
18 – 19 Tahun	9	0	-	18 – 19 years old
20 – 30 Tahun	741	502	47,6%	20 – 30 years old
31 – 40 Tahun	612	670	(8,6%)	31 – 40 years old
41 – 50 Tahun	245	261	(6,1%)	41 – 50 years old
> 51 Tahun	69	78	(11,5%)	> 51 years old
Total	**1.676**	**1.511**	**10,9%**	**Total**

Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan / Diagram Based on Education Level

No.	Tingkat Pendidikan / Educational Level	FTE
1.	Master / Master's degree	21
2.	Bachelor / Bachelor's degree	1.024
3.	Diploma / Diploma	315
4.	Non Graduate / High School	316
Total		**1.676**

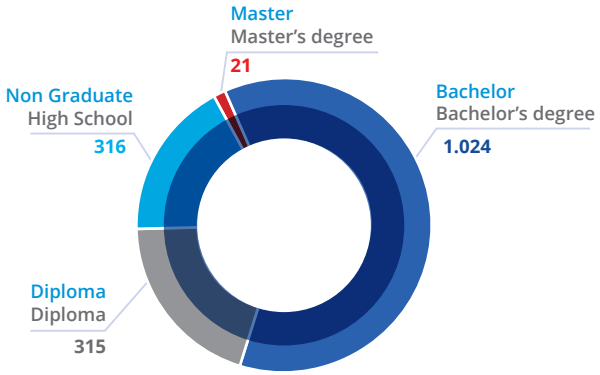

Diagram Berdasarkan Jenjang Jabatan / Diagram Based on Level of Position

No.	Tingkat Jabatan/ Position Level	FTE
1.	First Line / Director & Commisioner	9
2.	Top Management / Deputy Director & Division Head	20
3.	Middle Management / Deputy Division & Department Head	128
4.	Lower Management / Section Head & Officer	513
5.	Staff / Staff	999
6.	Non-Staff / Non-Staff	7
Total		**1.676**

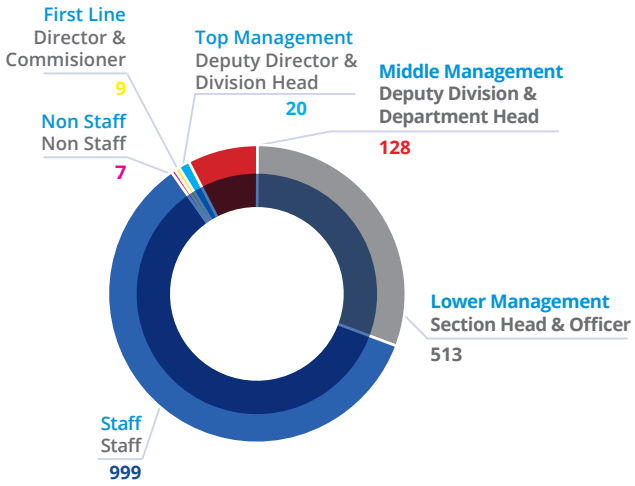

Diagram Berdasarkan Status / Diagram Based on Status

No.	Status / Status	FTE
1.	Karyawan Tetap / Permanent Employee	1.244
2.	Karyawan Tidak Tetap / Contract Employee	432
Total		**1.676**

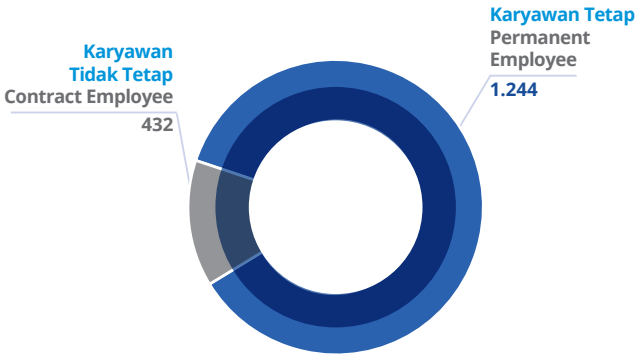

Diagram Berdasarkan Jenjang Usia / Diagram Based on Age Level

No.	Usia / Age	FTE
1.	18–19 tahun / 18–19 years old	9
2.	20–30 tahun / 20–30 years old	741
3.	31–40 tahun / 31–40 years old	612
4.	41–50 tahun / 41–50 years old	245
5.	> 51 tahun / > 51 years old	69
Total		**1.676**

Pengembangan SDM

Pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja terhadap perusahaan.

Pengembangan SDM merupakan cara efektif dalam menghadapi beberapa tantangan, termasuk keuangan atau ketertinggalan karyawan, diversifikasi tenaga kerja, perubahan-perubahan sosioteknis dan perputaran tenaga kerja

Strategi pengembangan SDM yang dijalankan Bank antara lain:

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja agar lebih transparan, adil, dan objektif melalui penerapan *Performance Management* setiap karyawan. *Performance Management* dijalani melalui penilaian *Key Performance Indicators*, *Work Behavior* dan penilaian 360-*Degree Feedback*.

- Penerapan kebijakan *compensation & benefit* yang kompetitif, menyesuaikan dengan keadaan pasar tenaga kerja.
- Penyelenggaraan berbagai pelatihan teknis maupun *soft skill* baik secara internal maupun eksternal.

Pada tahun 2016 Bank BNP menyelenggarakan berbagai program pelatihan, dengan total 5.051 peserta, dengan jumlah jam pelatihan 41.469,8 jam, atau rata-rata 8.2 jam/karyawan. Total biaya pelatihan karyawan untuk tahun 2016 adalah Rp7,3 miliar.

Human Resources Development

The Bank develops its human resources in order to foster employees that are of the highest quality and the strongest set of skills, capabilities, and loyalty toward the Company.

Human resources development is an effective means to help the Company face its challenges, including of financial challenges and lack of employee skills, workforce diversification, sociotechnical changes and employee turnover.

The human resources development strategies that the Bank is engaged in include:

- Developing and improving the quality of performance management system so as to become more transparent, fair, and objective by applying the Performance Management system on each employee. The Performance Management consists of evaluation of Key Performance Indicators, Work Behavior, and 360-Degree Feedback.
- Implementation of a competitive compensation & benefit policy, aligned with the latest conditions in the labor market.
- Numerous technical and soft skills training, both internally and externally.

In 2016 Bank BNP conducted various training programs involving a total of 5,051 participants, recording a total of 41,469.8 hours of training, resulting in an average training duration of 8.2 hours per employee. Total expenditures for employee training in 2016 reached Rp7.3 billion.

Pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2016 dijabarkan dalam tabel berikut.

Training programs held in 2016 are detailed in the following table.

Program Pelatihan Karyawan 2016 / 2016 Employee Training Programs

Jenis Pelatihan Type of Training	**Materi** Topic	**Peserta** Participant
Technical Skill	Pelaporan Bank / Reporting in Banking	12
	Perkreditan / Lending Treasuri / Treasury	48
	Manajemen Risiko / Risk Management	342
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan / Dissemination on Banking Regulations	600
	Audit	125
	Teknologi Informasi / Information Technology	77
	Manajemen Umum / General Management	430
	Manajemen Perbankan / Banking Management	1573
	Lainnya / Other	306
Soft Skill	Customer Relationship Skill	500
	Kepemimpinan / Leadership	237
	Teknik Presentasi & Komunikasi / Presentation & Communication Techniques	80
	Lainnya / Other	321
Total		**5.051**

Sertifikasi

Bank BNP mengikutsertakan karyawannya dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai persyaratan Bank Indonesia. Pada tahun 2016, sebanyak 123 karyawan mengikuti program Sertifikasi Manajemen Risiko, dengan tingkat kelulusan 86,20% atau setara dengan 106 orang. Selain Sertifikasi Manajemen Risiko, Bank BNP mengikutsertakan karyawannya dalam Sertifikasi Audit, Sertifikasi Kepatuhan, dan Sertifikasi Penilai (*Appraisal*), sesuai dengan bidang pekerjaan karyawan tersebut.

Selain Sertifikasi Manajemen Risiko, pegawai SKAI Bank BNP juga mengikuti Sertifikasi Profesi Audit Intern Level Auditor.

Fasilitas & Tunjangan Karyawan

Kesejahteraan karyawan Bank BNP dilengkapi dengan fasilitas dan tunjangan yang bersaing di industri perbankan nasional.

Karyawan Bank BNP mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala selain mendapatkan tunjangan kesehatan beserta tunjangan kacamata. Seluruh karyawan mendapatkan jaminan kesehatan dari asuransi kesehatan swasta dan juga diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Certifications

Bank BNP enrols its employees to the Risk Management Certification in accordance with the requirements of Bank Indonesia. In 2016, 123 employees participated in the Risk Management Certification program, with 106 employees graduating, reflecting a graduation rate of 86.20%. In addition to the Risk Management Certification, Bank BNP also enrols its employees to various certification programs including Audit, Compliance, and Appraisal certification programs, in line with the employees' respective fields of work.

In addition to the Risk Management Certification, the internal auditors of Bank BNP also participated in the Internal Auditor Profession certification for the Auditor Level.

Employee Benefits & Allowances

Bank BNP's employees' welfare is improved with the range of facilities and benefits whose scale is competitive within the banking industry.

Employees of Bank BNP also receive free medical check-up regularly, as well as allowances for prescriptive glasses and healthcare allowances. All employees are protected by a private health insurance scheme and are enrolled on the social security program run by the National Social Security Agency (BPJS).

TAKERU AGAWA
Presiden Direktur
President Director

EIICHIRO SAKAI
Direktur Kredit, Perencanaan & IT
Credit, Planning & IT Director

MICHIO ATSUDA
Presiden Komisaris
President Commissioner

FUMITAKA HAMANISHI
Advisor
Advisor

TAKESHI NAKAMURA
Kepala Divisi KTA Mirai+
KTA Mirai+ Division Head

Pengunaan Tenaga Kerja Asing & *Advisor*

Bank BNP mempekerjakan beberapa ekspatriat yang berasal dari atau direkomendasikan oleh pemegang saham. Para ekspatriat yang telah mendapatkan izin bekerja tersebut masing-masing menjabat sebagai Presiden Komisaris (Michio Atsuda), Presiden Direktur (Takeru Agawa), Direktur Kredit, Perencanaan & IT (Eiichiro Sakai), dan Kepala Divisi KTA Mirai+ (Takeshi Nakamura), dengan masa kerja sesuai batas waktu pengangkatannya melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham.

Keberadaan tenaga kerja asing adalah sesuai dengan kebutuhan Bank untuk peningkatan dan kemajuan kualitas bisnis Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, Bank BNP dalam mengembangkan bisnis, khususnya Kredit Tanpa Agunan, juga mempekerjakan seorang tenaga asing dari Jepang, yaitu Fumitaka Hamanishi sebagai *Advisor*.

Employment of Expatriates & Consultants

Bank BNP employs several expatriates that came from or were recommended by the Bank's shareholders. The expatriates that have obtained license to work at the Bank, have been serving as the President Commissioner (Michio Atsuda) and President Director (Takeru Agawa), Credit, Planning & IT Director (Eiichiro Sakai), and Non-Collateral Loans Mirai+ Division Head (Takeshi Nakamura), with their respective tenures in accordance with the limits set upon their appointment through the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The presence of expatriate employees is in line with the Bank's needs for improving the quality of its business.

In accordance with Regulation of Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 dated 13 June 2007 on the Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in Banking Sector, with respect to the development of its business, particularly in Non-Collateral Loans, Bank BNP also employs one expatriate from Japan, Fumitaka Hamanishi, as Advisor.

Teknologi Informasi

Information Technology

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat khususnya dalam dunia perbankan menuntut setiap bank untuk mengembangkan strategi bisnisnya dengan lebih optimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Bank BNP menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing.

Penerapan teknologi informasi membawa perubahan dalam kegiatan operasional dan pengelolaan data Bank, menjadikannya lebih efisien dan efektif serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi di Bank BNP merupakan tanggung jawab dari Divisi Teknologi Informasi (TI). Divisi ini bertugas untuk membantu Bank memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah melalui penerapan teknologi informasi yang tepat guna, agar nasabah dapat mengakses data perbankan mereka setiap saat.

Peran Divisi TI dalam meningkatkan pelayanan bagi nasabah melalui penerapan teknologi informasi antara lain:

1. Memberikan dukungan penuh untuk akselerasi bisnis tanpa mengabaikan *prudential banking*, dengan melakukan pengkajian yang efektif dan efisien dalam menentukan dukungan Teknologi Informasi terhadap kegiatan dan atau pengembangan bisnis;
2. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi pada lingkungan Bank yang mencakup namun tidak terbatas pada pengelolaan, pengendalian, penggunaan dan pengamanan layanan Teknologi Informasi;
3. Memperluas pengendalian internal pada unit kerja pengelola dan pengguna Teknologi Informasi, agar pengawasan melekat dapat berlangsung simultan;
4. Mendukung dan menjembatani setiap upaya untuk pengembangan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan unit kerja;
5. Melakukan analisis proses bisnis dan otomasi layanan perbankan di lingkungan Bank agar lebih efektif dan efisien; dan
6. Meningkatkan dan mengembangkan layanan *electronic banking*.

Program kerja dan pencapaian kinerja Divisi TI selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

The rapid development of information technology in the banking industry has prompted all banks to develop their business strategies more optimally by taking advantage of the advances in information technology. Bank BNP acknowledges the importance of information technology utilization to improve quality of service to customers and enhance its competitiveness.

Implementation of information technology has brought manifold changes to the Bank's operational activities and data management, rendering them more efficient and effective, with fast and accurate stream of information.

Issues related to information technology at Bank BNP fall under the remit of the Information Technology (IT) Division. This division is in charge of helping the Bank provide the best services to customers by applying information technology effectively so that customers can access their banking data at all times.

The role of the IT Division in improving customer service quality by applying information technology includes:

1. Providing full support to accelerate business without disregarding prudential banking principle, through effective and efficient reviews in determining what types of support Information Technology can give to the Bank's activities and or business development;
2. Improve Information Technology Governance within the Bank's environment which includes but not limited to the management, control, utilization and securing of Information Technology services;
3. Expanding internal control in the work units that manage and use Information Technology so inherent supervision can be carried out simultaneously;
4. Supporting and facilitating efforts to develop Information Technology further, in line with the needs of the work units;
5. Conducting business process analyses and banking service automation within the Bank's environment so as to be more effective and efficient; and
6. Improve and develop electronic banking services.

The IT Division's work plans and achievements in 2016 are as follows:

Program Kerja Work Plan	**Penjelasan** Description
Pengiriman SMS kepada nasabah secara otomatis Automatic delivery of SMS to customers	Aplikasi ini memberikan informasi kepada nasabah sesegera mungkin melalui SMS, terkait transaksi yang nasabah lakukan dan angsuran pinjaman nasabah yang akan jatuh tempo. This application provides immediate information to customers via SMS concerning transactions they have performed as well as their loan payment that will come due.
Autentikasi transaksi penarikan tunai dan over booking via EDC Authentication of cash withdrawals and over booking via EDC	Aplikasi ini mengautentikasi nasabah yang melakukan transaksi dengan kartu ATM milik sendiri dan kemudian memasukkan PIN di mesin EDC yang ada di Bank BNP. This application authenticates customers that perform transactions with their own ATM card and then input the PIN in the EDC available at Bank BNP.
Penggabungan scoring model ke dalam LOS (Loan Originating System) KTA Integration of scoring model to the Loan Originating System (LOS) of Unsecured Loans	Penggabungan perhitungan *scoring* terhadap calon debitur KTA, yang asalnya dilakukan di sistem yang terpisah menjadi ke dalam satu sistem, mempercepat pengambilan keputusan pemberian kredit. Integration of the system for scoring potential debtor obtaining Unsecured Loan (KTA). Previously it was conducted on a standalone system and now, having been integrated, it speeds up the relevant decisionmaking processes.
Penerimaan telephone masuk (*inbound call*) untuk aplikasi KTA Inbound call receipts for Unsecured Loans applications	Aplikasi ini memberikan fasilitas telepon balik bagi nasabah KTA yang tidak dapat dihubungi dan telepon balik dari nasabah ini akan secara otomatis dilayani bagian yang telah ditentukan secara khusus. This application provides call back facility for Unsecured Loans customers that cannot be reached, and the call back from said customers will be automatically handled by a designated department.
Pengkinian Firewall Firewall updating	Dengan diluncurkannya *Internet Banking*, jumlah pengguna aplikasi dari luar Bank BNP bertambah banyak. Semakin bertambah juga kemungkinan jumlah serangan terhadap aplikasi atau jaringan komunikasi Bank BNP. Untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan penjagaan keamanan, pengkinian dilakukan terhadap *firewall* sehingga berkapasitas dan berkemampuan lebih tinggi. The launching of internet banking increases the number of users of the application beyond Bank BNP's own customers. There is also a greater threat of attack to Bank BNP's applications or communication network. To improve performance and increase security, updating was made to the firewall so that the firewall now has a greater capacity and capability.
Penambahan *firewall* untuk aplikasi berbasis web Addition of firewall for web-based applications	Untuk menjaga berbagai serangan terhadap aplikasi berbasis web, baik *Internet Banking* maupun situs Bank BNP, digunakan aplikasi *firewall*. To protect against attacks to web-based applications such as Internet Banking or Bank BNP's website, the firewall application is employed.
Internet Banking untuk *business* Internet Banking for business	Setelah dipasarkan terbatas kepada nasabah perorangan pada akhir 2015, pada triwulan keempat tahun 2016 fasilitas *internet banking* telah dapat dinikmati nasabah korporasi. After being launched exclusively to individual customers in the end of 2015, in the fourth quarter of 2016 the internet banking facility began to be rolled out to corporate customers.
Aplikasi PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan) PPATK Application	Konsep aplikasi PPATK yang sebelumnya tersentralisasi di kantor pusat tanpa melibatkan review terlebih dahulu dari kantor cabang, pada tahun 2016 diubah menjadi tersentralisasi tetapi mengharuskan cabang-cabang untuk melakukan analisis terlebih dahulu terhadap transaksi yang diduga mencurigakan atau di luar kebiasaan sebelum dikirimkan oleh sistem ke bagian compliance di kantor pusat. PPATK application that was previously centralized in the head office without involving review by branch office was in 2016 changed to centralized but requiring the branches to perform analyses on suspicious or irregular transactions prior to the transactions being transmitted by the system to the compliance unit at the head office.
Aplikasi APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) APHT Application	Bertujuan untuk memantau agunan yang ada di Bank BNP. An application used to monitor collaterals in Bank BNP.

Program Kerja Work Plan	Penjelasan Description
Aplikasi MPN (Modul Penerimaan Negara) G2 MPN G2 Application	Aplikasi ini dibuat untuk mengikuti aturan dari Dirjen Pajak, di mana pembayar pajak diharuskan untuk mengambil *ID billing* terlebih dahulu, melalui internet atau melalui aplikasi di *core banking*. Selanjutnya wajib pajak dapat melakukan pembayaran. This application was developed to abide by the regulation by the Tax Directorate, whereby taxpayers are required to obtain a billing ID via internet or a core banking application prior to being able to make the payment.
Aplikasi *Remittance* Remittance Application	Aplikasi ini mencatat transaksi nasabah yang melakukan pembelian valas dan kemudian mengirimkannya ke luar negeri. This application records the transactions of customers purchasing foreign currencies and transferring them to offshore accounts.
Bill Payment dan MPN G2 via ATM Bill Payment and MPN G2 via ATM	Menu di ATM bagi nasabah Bank BNP untuk membayar pajak sesuai dengan nomor *ID billing* yang dimasukkan. An ATM menu for Bank BNP's customers to pay their taxes corresponding
Aplikasi KTP-el dengan Dukcapil e-KTP Application with Authorities	Aplikasi ini dapat mengakses data penduduk yang ada di Dukcapil. Data tersebut disimpan dalam basis data Bank BNP untuk kemudian digunakan sebagai alat memverifikasi nasabah baru atau nasabah yang sudah ada. This application can be used to access population data in the Directorate General of Civil Registries. The data is stored in Bank BNP's database to be used as a tool for verifying new customers and existing customers.

Pelatihan & Pengembangan

Bank BNP mengembangkan SDM TI dengan kompetensi dan kapasitas sesuai perkembangan teknologi informasi Bank, melalui pemberian pelatihan. Pelatihan yang diikuti selama 2016 adalah:

Training & Development

Bank BNP develops its IT human resources with the required competencies and capacity in accordance with the Bank's information technology development by providing training. The training programs conducted in 2016 were:

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants
BNP *Quick Starter Program*	2
Corporate Workshop 2016	5
Customer Service and Communication Management for Helpdesk Specialist	2
Evaluasi & Refreshment SKNBI *SKNBI Evaluation & Refreshment Course*	1
HR For Supervisor	3
HSM User Forum 2016	1
Management Project Officer Batch VI	13
On The Job Training	1
Pelatihan/Training BSMR Level I	1
Pelatihan Data Debitur Melalui SLIK *Training on Debtors' Data via SLIK*	3
Refreshment Sertifikasi Manajemen Resiko *Risk Management Certification Refreshment Course*	2
Seminar *Bridge The Seconds Gap*	1
Sosialisasi Aset Manajemen *Dissemination on Asset Management*	1
Sosialisasi *Business Development* *Dissemination on Business Development*	2
Sosialisasi dan Simulasi Aplikasi Orient *Dissemination and Simulation of Orient Application*	33
Sosialisasi Ketentuan Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa (LLD) Bank *Dissemination on the Provisions for Monitoring Foreign Exchange Traffic of Banks*	1

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants
Sosialisasi User Group *RTGS/SSSS Bank Indonesia* *Dissemination of User Group RTGS/SSS Bank Indonesia*	1
Training *Handling Effective Meeting*	3
Training *HR for Manager*	4
Training SMKI & ATM Wincor 2016	4
Training *Static Web Programming*	1
Uji/*Examination* BSMR Level 3	1
Uji/*Examination* BSMR Level 1	1
Workshop *"Data Quality Control SID"*	1
Workshop "Kerja Hebat – Karier Hebat"	1

Divisi TI telah menyusun rencana kerja untuk satu tahun ke depan (2017) dan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu lima tahun ke depan.

Rencana Jangka Pendek TI:

a) Kecukupan kaji ulang fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja yang terdapat pada struktur organisasi TI.
b) Peningkatan kualitas sumber daya TI yang dimiliki dan standar perekrutan karyawan baru serta pembinaan yang berkelanjutan agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis Bank;
c) Kecukupan pemantauan kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
d) Kecukupan penerapan dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan internal dan eksternal terkait dengan pengelolaan layanan dan tata kelola TI di Bank.
e) Kecukupan penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan TI oleh Bank BNP meliputi:
   - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
   - Kecukupan kebijakan manajemen risiko terkait pengelolaan dan penggunaan layanan TI di Bank BNP.
   - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pengelolaan dan penggunaan TI.
   - Sistem pengendalian intern atas pengelolaan dan penggunaan layanan TI.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang TI:

Merupakan sasaran kerja yang difokuskan dalam 5 tahun ke depan meliputi:

a) Menyelaraskan antara Rencana Strategis TI (RSTI) dan Rencana Strategis Bisnis Bank (RBB) sehingga peningkatan kinerja dan keunggulan kompetitif dapat diraih untuk dapat bertumbuh dan bertahan dalam kompetisi perbankan yang kian sengit;

The IT Division has prepared the work plans for the year 2017 as well as for a longer time frame, i.e. five years.

IT Short-Term Plans:

a) Adequacy of review of functions, duties and responsibilities of each work units in the IT organization structure.
b) Enhancement of IT human resources' quality and standardization of new employee recruitment criteria as well as continuous development to be aligned with the Bank's business goals;
c) Adequacy of monitoring of IT performance, and efforts of improvement, among others by detecting IT obsolescence and measuring the IT security policy's effectiveness and efficiency.
d) Adequacy of implementation and compliance with internal and external policies related to the management of IT services and governance at the Bank.
e) Adequacy of Risk Management implementation in the use of IT by Bank BNP, encompassing:
   - Active supervision by the Boards of Commissioners and Directors;
   - Adequacy of risk management policy on the Bank's management and use of IT services.
   - Adequacy of identification, measurement, monitoring and control processes of the risks related to IT management and use.
   - Internal control system on IT services management and use.

IT Medium- and Long-Term Plans:

These include goals to be attained within the next five years, such as:

a) Aligning the IT Strategic Plan (RSTI) and the Bank's Strategic Business Plan (RBB) so that performance improvement and competitive advantage can be attained to continue growing and thrive in the more competitive banking industry;

b) Memaksimalkan kinerja TI dalam memberikan dukungan pada kegiatan operasional dan secara efisien dan efektif seperti tertuang dalam *Key Performance Indicators* (KPI) untuk level personel, bagian, dan divisi TI, serta *Service Level Aggreement* (SLA) untuk masing-masing layanan TI bagi *end user*;
c) Meningkatkan kualitas personel TI dalam melakukan kegiatan operasional TI melalui pelatihan dan *workshop* sesuai dengan masing-masing bidang pekerjaannya;
d) Membentuk budaya risiko pada masing-masing personel TI dan organisasi TI dengan melakukan sosialiasi dan pelatihan yang berkesinambungan;
e) Menggunakan standar-standar yang sudah menjadi *best practice* seperti COBIT 5, CMMI, ValIT untuk melakukan tata kelola organisasi TI yang baik.

b) Maximizing IT performance in providing support to operational activities in an efficient and effective manner, as stipulated in the Key Performance Indicators (KPI) for IT personnel, units and division, as well as the Service Level Agreement (SLA) for each IT service provided to end users;
c) Enhancing the quality of IT personnel in conducting IT operational activities through training and workshops in line with their particular line of work;
d) Fostering the culture of risk awareness in each IT personnel and within the IT organization, by conducting dissemination and training continuously;
e) Employing standards that have been considered as best practice, such as COBIT 5, CMMI, ValIT, to ensure IT good governance.

Bank Koresponden

Correspondent Banks

Bank BNP sebagai Bank Devisa dan Perusahaan Publik memiliki akses dan jaringan transaksi domestik hingga ke mancanegara, keberadaan Bank Koresponden menjadi salah satu modal untuk melancarkan kegiatan bisnis perbankannya.

Hubungan Bank BNP dengan Bank Koresponden merupakan hal penting dalam mendukung berkembangnya usaha Bank BNP, dimana hubungan koresponden ini dapat terjalin diantara bank yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk mendukung kegiatan trade finance, remittance dan transaksi valuta asing lainnya, Bank Koresponden Bank BNP di Luar Negeri yang memiliki rekening Nostro (Depository Banks) terdiri dari beberapa mitra yang telah memiliki hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pada posisi Desember 2016, Bank Depositori Koresponden Bank BNP yang terdapat di dalam dan luar negeri untuk mata uang asing adalah sebagai berikut :

- Commonwealth Bank Of Australia Sydney, Australia (AUD)
- PT Bank ICBC Indonesia Jakarta, Indonesia (CNY)
- Standard Chartered Bank Frankfurt, Germany (EUR)
- Standard Chartered Bank London, United Kingdom (GBP)
- United Overseas Bank Ltd Hong Kong, Hong Kong (HKD)
- Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd Tokyo, Japan (JPY)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan (JPY)
- United Overseas Banks Singapore, Singapore (SGD)
- Standard Chartered Bank New York, U.S.A. (USD)
- Bank Central Asia Jakarta, Indonesia (USD)
- Bank Mandiri (Persero), PT, Jakarta, Indonesia (USD)

For Bank BNP, as a Foreign Exchange Bank and a Public Company, to have access and transaction networks domestically and abroad, it is essential for the Bank to have a host of Correspondent Banks to assist in its banking business activities.

Bank BNP's relationship with these Correspondent Banks is crucial for supporting the development of Bank BNP's business. This correspondence is established between the banks in the country and the banks abroad.

To support trade finance, remittance, and other foreign exchange activities, Bank BNP's Correspondent Banks located abroad owning the Nostro account (Depository Banks) consisting of a number of partners with mutuallybeneficial cooperation agreements. As of December 2015, Bank BNP's Correspondent Depository Banks located within and outside of the country to assist in foreign exchange transactions are:

- Commonwealth Bank Of Australia Sydney, Australia (AUD)
- PT Bank ICBC Indonesia Jakarta, Indonesia (CNY)
- Standard Chartered Bank Frankfurt, Germany (EUR)
- Standard Chartered Bank London, United Kingdom (GBP)
- United Overseas Bank Ltd Hong Kong, Hong Kong (HKD)
- Bank of Tokyo Mitsubishi Ufj Ltd Tokyo, Japan (JPY)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo, Japan (JPY)
- United Overseas Banks Singapore, Singapore (SGD)
- Standard Chartered Bank New York, U.S.A. (USD)
- Bank Central Asia Jakarta, Indonesia (USD)
- Bank Mandiri (Persero), Pt, Jakarta, Indonesia (USD)

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

102 Analisis Makro Ekonomi
Macroeconomic Analysis

104 Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen
About Management Discussion and Analysis

108 Tinjauan Operasional per Segmen Usaha
Operational Review by Business Segment

120 Tinjauan Keuangan
Financial Review

127 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility Level

129 Perbandingan Target dan Realisasi 2016 dan Proyeksi 2017
Comparison of 2016 Targets and Actual Achievements, and Financial Projections for 2017

129 Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih
Material Increase/Decrease of Operating and Net Income

130 Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Capital Structure and anagement Policy on Capital Structure

131 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
Material Commitments Related to Investments in Capital Goods

132 Investasi Barang Modal
Investment in Capital Goods

132 Komitmen dan Kontijensi
Commitments and Contingencies

133 Kebijakan Dividen
Dividend Policy

134 Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Public Offering Proceeds

134 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
Derivatives and Hedging Facility

134 Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
Employee and Management Share Option Program

135 Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi
Rare & Extraordinary Financial Events

135 Informasi Material mengenai Investasi, Divestasi, Restrukturisasi Utang/Modal
Material Information Regarding Investments, Divestments, and Debt/Capital Restructuring

135 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transactions with Conflict of Interest or Transactions with Related Parties

135 Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Events and Information

136 Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan
Changes In Accounting Principles Bearing Significant Impact On Financial Performance

136 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

137 Prospek Usaha
Business Prospects

142 Perubahan Undang-Undang yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan
Changes in Regulation with Significant Impact on Financial Performance

Analisis Makro Ekonomi

Perekonomian Global

Perekonomian global tahun 2016 mengalami perlambatan yang secara tidak langsung berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia, walaupun pada akhir tahun perekonomian global memperlihatkan perbaikan. Pemulihan perekonomian Amerika Serikat pada awal tahun terlihat belum solid akibat melemahnya konsumsi dan beberapa indikator ketenagakerjaan, serta rendahnya inflasi. Hal tersebut membuat The Fed berhati-hati dalam melakukan penyesuaian suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR). Pada triwulan kedua 2016 investasi Amerika Serikat masih melambat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di bawah perkiraan dan masih dibayangi oleh ketidakpastian pasca *Brexit*. Meskipun demikian ekonomi AS membaik dari triwulan sebelumnya tercermin dari meningkatnya konsumsi AS yang naik signifikan terutama didorong oleh *goods consumption.* Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang semakin baik pada triwulan III 2016 yang didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekspor dan investasi, walaupun terjadi penurunan pertumbuhan pada sektor konsumsi. Peningkatan ekspor dipicu oleh peningkatan ekspor kedelai dan investasi didorong oleh perbaikan inventori *non-farm*. Perbaikan perekonomian AS berlanjut meningkat sampai akhir tahun terutama didukung oleh peningkatan investasi dan peningkatan konsumsi yang dipicu oleh peningkatan keyakinan konsumen dan pertumbuhan penjualan ritel riil, kuatnya pendapatan nominal, serta menurunnya tingkat pengangguran di AS.

Perekonomian Tiongkok tahun 2016 cenderung lebih stabil dibandingkan dengan AS, walaupun memperlihatkan perlambatan yang disebabkan oleh investasi publik yang belum dapat memberikan dorongan pada sektor swasta karena menghadapi *overcapacity* dan tingginya utang korporasi. Perekonomian Tiongkok juga mengalami perubahan struktur ekonomi (*rebalancing*), ditopang oleh sektor tersier dan konsumsi. Pada triwulan IV 2016 perekonomian Tiongkok memperlihatkan perbaikan tercermin dari PDB Tiongkok yang tumbuh sebesar 6,8% (*yoy*), sehingga secara keseluruhan ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 6,7% pada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan proses ekonomi yang berlangsung secara gradual tercermin dari perlambatan investasi, akan tetapi di sisi konsumsi cenderung stabil.

Secara keseluruhan, perekonomian dunia memperlihatkan perlambatan pada tahun 2016, walaupun pada akhir tahun perekonomian global menunjukan perbaikan yang diikuti dengan perbaikan harga komoditas global yang terus meningkat.

Macroeconomic Analysis

Global Economy

The global economy in 2016 grew at a slower pace, which indirectly affected Indonesia's economic growth, although nearing the end of the year the global economy showed a substantial recovery. The recovery of the United States' economy was fragile in the beginning of the year due to weakening consumption and other labor market indicators, as well as low inflation rate. This prompted The Fed to be circumspect in adjusting its Fed Funds Rate (FFR). In the second quarter of 2016, the investment climate in the US continued to slow down, resulting in a less-than-forecast economic growth rate, which was hampered further by the uncertainties following the Brexit. However, the US economy improved from the previous period, as reflected by the increase in consumption level in the US, which increased significantly bolstered by consumption of goods. The US economy showed even better improvement in the third quarter of 2016, boosted by the growth in export and investment, although consumption level dropped. Growth in export was prompted by the increase in soybeans export, and investment climate improved on the back of non-farm inventory improvement. The US economy continued to improve further until the end of the year, mainly supported by the increase in both investment and consumption, which was triggered by consumer's confidence level, growth in real sector's retail sales, strong nominal income, and the drop in unemployment level in the US.

China's economy in 2016 was relatively moer stable than that of the US, although displaying a slowdown in terms of public investments that were too weak to bolster the private sector, which was facing issues of overcapacity and high level of corporate debt. China's economy also experienced a rebalancing of its economic structure, now fortified by its tertiary sector and strong consumption. In the fourth quarter of 2016 the Chinese economy improved as demonstrated by its GDP growth of 6.8% (yoy), which brought the Chinese economic aggregate growth to 6.7% in 2016. This was in line with the economic processes that were unfolding gradually, as seen in the slowing down of investments but stabilizing consumption level.

On the whole, the global economy displayed a slower growth in 2016, although in the end of the year it picked up, and this was followed up by generally improving global commodity prices.

Perekonomian Indonesia

Pada tahun 2016 perkembangan ekonomi cenderung memperlihatkan perlambatan di berbagai negara. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016 mencapai 4,91%. Kemudian, pada triwulan II 2016 sebesar 5,18%, triwulan III 2016 sebesar 5,02%, dan triwulan IV 2016 tercatat 5,02%, atau mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 4,88%.

Indonesia juga tercatat sebagai negara yang ketiga tertinggi pertumbuhannya, setelah Tiongkok dan India. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, perbaikan kinerja investasi, dan peningkatan ekspor. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh cukup kuat didukung oleh terkendalinya inflasi, peningkatan kinerja investasi didorong oleh pertumbuhan investasi non-bangunan dalam bentuk kendaraan dan peralatan lainnya dengan perbaikan kinerja sektor pertambangan dan perkebunan, sementara peningkatan kinerja ekspor naik signifikan seiring dengan perbaikan ekonomi global pada akhir tahun dan mulai meningkatnya harga beberapa komoditas seperti batubara dan CPO.

Secara spasial, tahun 2016 ekonomi di Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya ekspor, sementara itu pertumbuhan di Jawa masih kuat. Perekonomian Sumatera yang meningkat ditopang kinerja ekspor seiring perbaikan harga komoditas utama wilayah Sumatera seperti CPO, karet, batubara, dan kopi. Peningkatan ekspor juga menjadi penopang peningkatan pertumbuhan ekonomi di KTI khususnya dalam bentuk komoditas utama seperti batubara, nikel, tembaga, emas, dan CPO. Ekonomi Jawa masih kuat karena ditopang oleh menguatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor manufaktur.

Nilai Rupiah bergerak relatif stabil dengan kecenderungan menguat di tengah peningkatan ketidakstabilan terkait arah kebijakan AS. Pada triwulan IV 2016, secara *point to point* Rupiah melemah sebesar 3,13% menjadi Rp13.473 per dolar AS. Tekanan terhadap Rupiah antara lain berasal dari meningkatnya ketidakpastian global terkait pemilihan presiden AS, kenaikan FFR, dan meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri pada akhir tahun. Pelemahan tersebut masih tertahan oleh aliran dana masuk terkait *tax amnesty* dan sentimen positif seiring rendahnya inflasi.

Tinjauan Industri Perbankan

Ketahanan industri perbankan masih tetap kuat dengan didukungnya rasio kecukupan modal yang memadai dan terkendalinya risiko kredit. Pada triwulan IV 2016

Indonesian Economy

The economic development in many countries throughout 2016 displayed a meager growth. Amidst this global economic malaise, Indonesia's economy was able to post an economic growth of 4.91% in the first quarter of 2016. Then in the second quarter of 2016 growth was 5.18%, and in the third quarter of 2016 it was 5.02%, while in the fourth quarter of 2016 it was 5.02%, improving compared to 2015's growth of 4.88%.

Indonesia was the country with the third-highest growth rate in the world after China and India. Indonesia's economic growth was supported by growth in household consumption, improving investment performance, and expanding export. Household consumption's strong growth was helped by the controlled inflation rate, while investment performance was bolstered by non-construction investment growth in the form of vehicles and other equipment in line with the improvement in mining and plantation sectors' performance, and export performance improved on the back of recovering global economy in the end of the year and the rising prices of some commodities such as coal and CPO.

Geographically speaking, in 2016 economy in Sumatera and the Eastern Region of Indonesia grew in line with improving export, while growth in Java remained robust. Economy in Sumatera improved bolstered by export performance alongside the improvement in prices of commodities from Sumatera, such as CPO, rubber, coal, and coffee. Export improvement also caused faster economic growth in the Eastern Region of Indonesia, especially in terms of primary commodities, such as coal, nickel, copper, gold, and CPO. Economy in Java remained robust as supported by a strengthening household consumption, investment, and export in manufacturing.

Rupiah's exchange rate was relatively stable with a tendency to improve amidst the greater uncertainty in relation to the US policy's direction. In the fourth quarter of 2016, Rupiah weakened on a point to point term by 3.13% to reach Rp13,473 to the US dollar. Pressures on the Rupiah included rising global uncertainties in relation to the US presidential election, FFR hike, and increasing demand for US dollar for foreign debt servicing in the end of the year. Such weakening was still buffered by the capital inflow as a result from tax amnesty and a positive sentiment due to low inflation rate.

Banking Industry Review

The resilience of the banking industry remained strong, supported by acceptable capital adequacy ratio and a controlled credit risk. In the fourth quarter of 2016, banking

permodalan perbankan tercatat sebesar 22,69%, level kecukupan permodalan yang terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya diperkirakan masih mampu untuk menahan dampak negatif dari peningkatan risiko kredit.

Secara rata-rata, hampir seluruh bank mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans*—NPL) yang disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit oleh Bank sebagai dampak dari lesunya ekonomi secara global yang secara tidak langsung berdampak juga terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, sikap kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit menjadi salah satu faktor penurunan pertumbuhan kredit. Hal tersebut memicu bank memupuk cadangan sebagai antisipasi peningkatan rasio kredit bermasalah dan berdampak pada laba masing-masing bank. Rasio kredit menunjukan perbaikan pada akhir 2016, tercermin dari rasio *Non-Performing Loans* (NPL) bruto yang turun dari 3,10% di triwulan sebelumnya menjadi 2,93% di triwulan IV 2016.

Dari sisi fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2016 tercatat sebesar 7,9% (yoy), lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 6,5% (yoy), pertumbuhan kredit tersebut bersumber dari pertumbuhan kredit produktif yaitu kredit modal kerja dan investasi. Pertumbuhan kredit tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 yaitu sebesar 10,5%. Sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga pada triwulan IV 2016 tercatat 9,6% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,1% yang ditopang oleh peningkatan giro dan deposito, sedangkan tabungan masih cenderung stabil.

Tentang Analisis dan Pembahasan Manajemen

Pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh manajemen berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016.

Laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan memberikan opini bahwa Laporan Keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material seperti posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. Tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

sector's capital adequacy stood at 22.69%, continuously increasing since a number of years, and this is believed to be capable of mitigating the negative impacts arising from the increase of credit risk.

On average, virtually all banks experienced an increase in their Non-Performing Loans (NPL) ratio, owing to a drop in their lending activities as an impact of the weak global economy, which indirectly affected Indonesia's economy. In addition, the banks' caution in conducting their lending activities was another factor that contributed to the decline in lending growth pace. This had caused banks to increase their reserves to anticipate the increase in non-performing loans ratio, and subsequently also affected the profitability of the banks. Credit ratio improved in the end of 2016, as reflected by the Non- Performing Loans (NPL) – gross ratio, which dropped from 3.10% in the previous quarter to 2.93% in the fourth quarter of 2016.

In terms of intermediary functions, growth in lending in the fourth quarter of 2016 was recorded at 7.9% (yoy), higher than the previous period's growth rate of 6.5% (yoy), derived from the growth in productive loans, namely working capital loans and investment loans. Such lending growth was still relatively low compared to 2015's level of growth of 10.5%. Meanwhile, Third Party Funds in the fourth quarter of 2016 grew by 9.6% (yoy), higher than the previous quarter's growth rate of 3.1%. This was supported by the increase in demand deposits and time deposits, while the level of savings was relatively stable.

About Management Discussion & Analysis

The discussion and analysis conducted by the management was based on the Company's financial statements for the years ended on 31 December 2015 and 2016.

The financial statements for the fiscal year ended on 31 December 2016 was audited by Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang Sulistiyanto, Dadang & Ali with the opinion that the Financial statements have been presented fairly, in all material aspects, such as the financial position of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. dated 31 December 2016, as well as the financial performance and cash flows for the year in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Keterangan	2016	2015	Description
Neraca			**Balance Sheets**
Total Aset	7.705.782	8.613.114	Total Assets
Kredit yang Diberikan	5.313.629	6.477.703	Total Loans
Surat Berharga	1.012.183	568.715	Marketable Securities
Aset Produktif	7.111.379	7.871.879	Earning assets
Dana Pihak Ketiga	6.312.303	7.183.830	Third Party Fund
Giro	553.893	674.911	Current Accounts
Tabungan	931.836	977.427	Saving Accounts
Deposito	4.826.574	5.531.492	Time Deposits
Simpanan dari Bank Lain	53.358	69.615	Deposits from Other Banks
Total Liabilitas	6.508.273	7.417.621	Total Liabilities
Pinjaman Subordinasi	79.946	81.800	Subordinated Loans
Ekuitas	1.197.510	1.195.493	Equity
Laba Rugi			**Profit and Loss**
Pendapatan Bunga	905.311	1.006.417	Interest Income
Beban Bunga	419.598	558.732	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	485.713	447.685	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	41.146	38.964	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	510.375	399.640	Other Operating Expenses
Laba Operasional Bersih	16.485	87.009	Net Operating Income
Laba Sebelum Pajak	12.073	90.315	Income Before Tax
Laba Bersih	8.109	66.867	Net Income
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	12	99	Earnings Per Share (in full Rupiah)
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

dalam miliar rupiah | in Rp billion

Giro
Demand Deposits

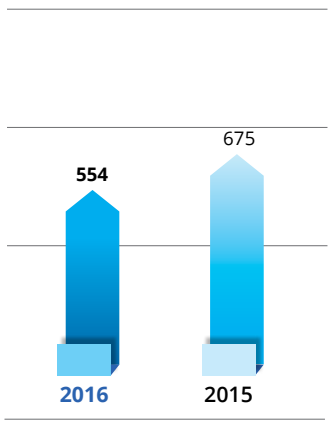

Tabungan
Savings

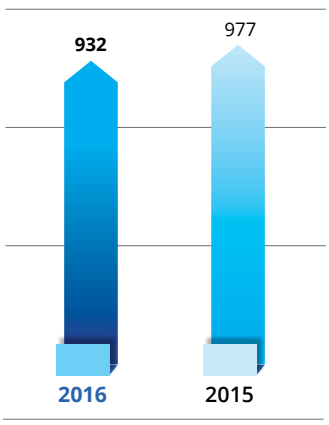

Deposito
Time Deposit

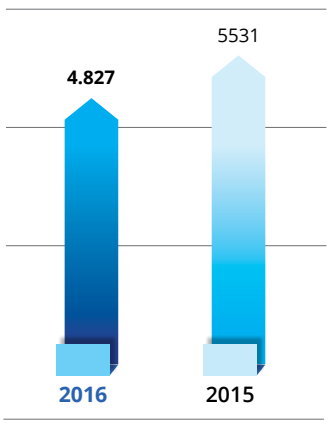

dalam miliar rupiah

in Rp billion

Kredit Mikro
Micro Loan

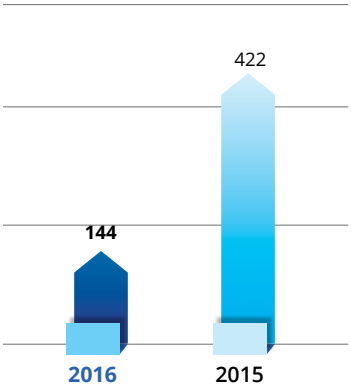

Kredit Tanpa Agunan
Unsecured Loan

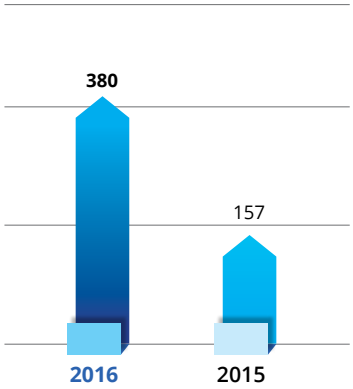

Kredit time loan flat
Time Loan Flat

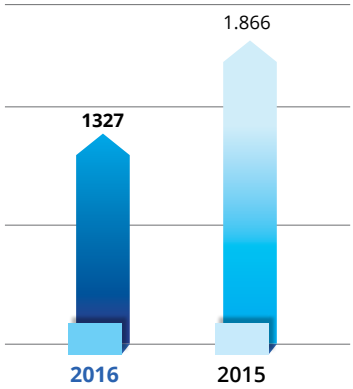

Time Loan Revolving
Time Loan Revolving

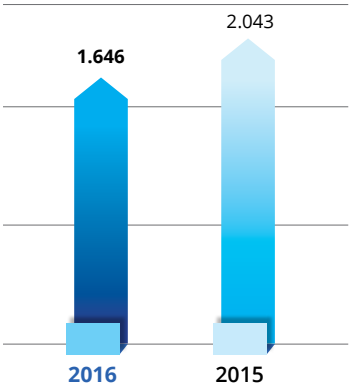

Overdraft Loan
Overdraft Loan

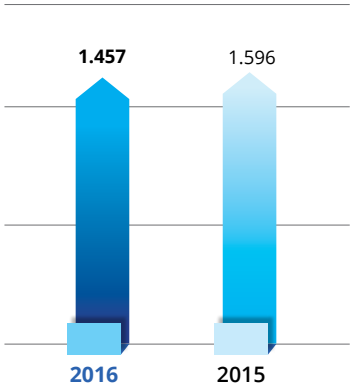

Kredit Pemilikan Kendaraan
Vehicle Loan

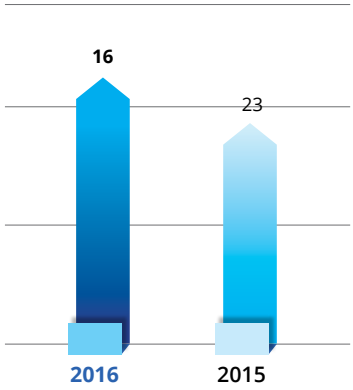

Kredit Pemilikan Rumah
Housing Loan

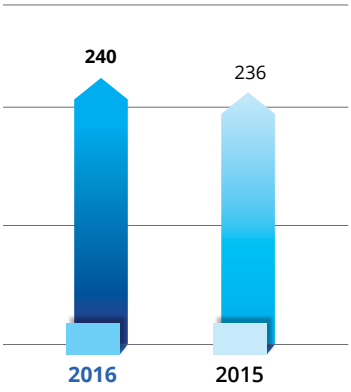

Kredit Multi Guna
Multipurpose Loan

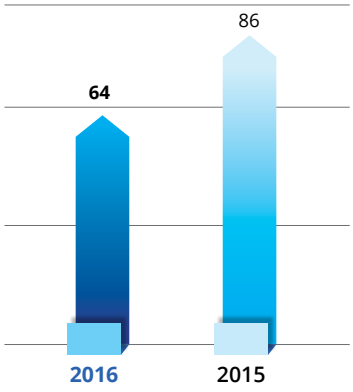

Kredit Lainnya
Other Loan

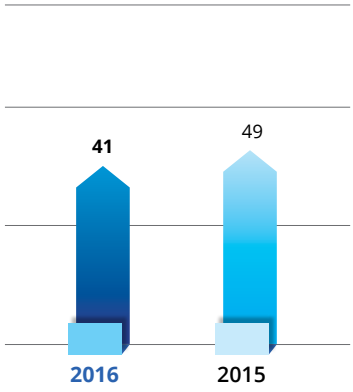

Tinjauan Bisnis

Manajemen Bank BNP melakukan konsolidasi berkelanjutan untuk membangun pondasi kuat bagi laju pertumbuhan bisnis Bank BNP ke depannya. Upaya konsolidasi yang telah dilakukan Bank dalam 2 tahun terakhir sedikit banyak telah memberikan perubahan positif dalam mengurangi kualitas portofolio kredit bermasalah di Bank BNP. Bank akan terus berupaya untuk meningkatkan portofolio kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja bisnis, Bank BNP akan menetapkan strategi bisnisnya dengan fokus kepada perbaikan model bisnis yang lebih ideal dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Strategi yang diterapkan hendaknya dapat memberikan dukungan yang bersifat langsung pada upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Bank BNP juga masih akan tetap fokus pada segmen UKM dengan sasaran debitur sampai dengan Rp10 miliar.

Sampai dengan tahun 2016, Bank BNP telah menyalurkan kredit sebesar Rp5,31 triliun. Sejalan dengan fokus utama Bank BNP, sebagian besar penyaluran kredit tersebut ditujukan pada segmen menengah ke bawah tanpa mengesampingkan segmen korporasinya. Jenis kredit modal kerja mencapai Rp3,70 triliun dengan komposisi kredit sebesar 69,55% dari total kredit. Kredit modal kerja tersebut disalurkan untuk pembiayaan sektor ekonomi seperti industri, pertanian, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan lain-lain.

Sedangkan konsentrasi penyaluran kredit dengan porsi/peringkat terbesar pada tahun 2016 dialokasikan untuk pembiayaan sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran dengan nilai kredit mencapai Rp1.97 triliun atau 37,11% dari total penyaluran kredit Bank BNP. Penyaluran kredit terbesar kedua adalah Industri Pengolahan sebesar Rp1,52 triliun, dan peringkat ketiga adalah sektor Ekonomi Lainnya sekitar Rp1,39 triliun.

Berdasarkan pada data di atas, sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Eceran menempati porsi terbesar sebesar 37,11% dari total penyaluran kredit. Persentase komposisi ini sedikit menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 37,75%. Hal ini sejalan dengan langkah mitigasi risiko terhadap risiko konsentrasi kredit pada satu segmen ekonomi.

Rasio NPL – neto untuk kredit per akhir Desember 2016 mencapai 4,07%, lebih tinggi dibandingkan NPL – neto untuk kredit per akhir Desember 2015 sebesar 3,98%. Rasio NPL – neto per akhir 2016 ini masih berada di bawah batas atas yang ditentukan oleh regulator, yaitu 5%.

Business Review

The management of Bank BNP continued its consolidation process of the Bank in order to establish a robust foundation for the subsequent growth of Bank BNP in the future. The effort at consolidation, which has been engaged by the Bank for the past two years, has contributed positively to reducing the non-performing loans' effect on the Bank's lending portfolio. The Bank shall continue to improve its lending portfolio by taking into consideration the principle of prudential banking in line with the specified business targets.

In an effort to improve its business performance, Bank BNP shall determine its business strategy by focusing on creating a more ideal business model by remaining compliant with the prevailing regulations. The strategy to be implemented shall provide a strong direct support to the Bank's effort to achieve its business targets. Bank BNP also shall remain focused on the SME segment, with its target market mainly the debtors with a maximum loan amount of Rp10 billion.

Up to 2016, Bank BNP had disbursed loans totaling Rp5.31 trillion. In line with Bank BNP's main business focus, most of the loans had been directed to the low-to-medium segment of the society, with also an emphasis on the corporate segment. Working capital loans amounted to Rp3.70 trillion, composing 69.55% of the total lending portfolio. The working capital loans were disbursed to finance various economic sectors, including industry, agriculture, trading, transportation, construction, and others.

The largest contributor to lending in 2016 was for the Wholesale and Retail Trade sector, with total lending amount of Rp1.97 trillion, making up 37.11% of Bank BNP's total lending portfolio. The second largest contributor was from the Processing Industry, with Rp1.52 trillion of loans, and the third largest contributor was Other Economic Sectors, with Rp1.39 trillion of value.

Based on the above data, the Wholesale and Retail Trade sector took the major part, namely at 37.11% of the total lending portfolio. This percentage in lending composition was slightly lower than the figure in the same period in last year, namely at 37.75%. This has been in line with the Bank's risk mitigation measures towards managing a high concentration of lending in any particular economic segment.

The NPL – net ratio for total loans by end of December 2016 was 4.07%, higher than the NPL – net ratio for total loans by end of December 2015 of 3.98%. This ratio of NPL – net by end of 2016 remained lower than the maximum regulatory limit, i.e. 5%.

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha

Segmen operasi didefinisikan sebagai komponen dari Bank BNP yang terlibat dalam aktivitas bisnis Bank, memperoleh pendapatan, dan menimbulkan beban terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh atau melibatkan Bank.

Operational Review by Business Segment

Operating segment is defined as a component of Bank BNP that is involved in the Bank's business activities, collects revenues and incur expenses related to the transactions performed by or involving the Bank.

Penyaluran Pinjaman

Lending

Tabel Jenis-Jenis Pinjaman / Types of Loan

Pinjaman	2016	2015	Loans
Kredit Mikro	144	422	Micro Finance
Kredit Tanpa Agunan (KTA)	380	157	Unsecure Loans
Pinjaman Berjangka Tetap	1.327	1.866	Time Loan Flat
Pinjaman Berjangka Revolving	1.646	2.043	Time Loan Revolving
Pinjaman Over Draft	1.457	1.596	Overdraft Loan
Kredit Pemilikan Kendaraan	16	23	Vehicle Loans
Kredit Pemilikan Rumah	240	236	Housing Loans
Kredit Multi Guna	64	86	Multi Purpose Loan
Kredit Lainnya	41	49	Other Loans

Pinjaman Komersil

Bank BNP menyediakan fasilitas pembiayaan bagi bisnis komersial untuk semua lini bisnis yang ada di pasar sepanjang bisnis tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan dan undang-undang, mempunyai tujuan komersil dan produktif.

Secara spesifik, Bank BNP lebih memfokuskan kegiatan penyaluran pinjaman ke segmen bisnis komersil menengah ke bawah. Ini berarti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan batas atas nilai pinjaman sebesar Rp10 miliar per debitur.

Wujud pinjaman atau kredit komersil yang ditawarkan oleh Bank BNP mencakup Kredit Modal Kerja yang menggunakan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pinjaman Investasi dengan skema *time loan flat* dan *revolving*.

Total nilai Kredit Modal Kerja di Bank BNP per akhir tahun 2016 mencapai Rp3,70 triliun, menyumbangkan 69,55% terhadap total kredit yang Bank BNP salurkan per akhir 2016. Kredit Modal Kerja tersebut disalurkan untuk pembiayaan sektor-sektor ekonomi seperti industri, pertanian, perdagangan, transportasi, dan konstruksi. Jika ditambah dengan Pinjaman Investasi dengan skema *time loan* termasuk untuk pembiayaan transaksi ekspor/impor, total kredit yang disalurkan per akhir 2016 mencapai Rp4,40 triliun, atau setara dengan 83,35% dari total portofolio kredit Bank.

Bank BNP menjalankan kegiatan bisnisnya di semua lini, termasuk dalam penyaluran kredit, dengan penuh

Commercial Loans

Bank BNP provides commercial lending facilities to various business lines in the market, as long as these businesses are conducted in a manner that complies with the prevailing laws and regulations, have a commercial purpose, and are productive by nature.

Specifically, Bank BNP focuses its commercial lending to the low to middle segment of the market. This translates to micro, small and medium enterprises (MSMEs) with the maximum lending limit of Rp10 billion per debtor.

Bank BNP offers commercial loans in the form of Working Capital Loans using the Pinjaman Rekening Koran (PRK) facility, and Investment Loans under the flat and revolving time loan schemes.

Total Working Capital Loans recorded by Bank BNP as at end of 2016 amounted to Rp3.70 billion, contributing 69.55% to the total lending portfolio of Bank BNP as at end of 2016. These Working Capital Loans were directed to finance various economic sectors, such as industry, agriculture, trading, transportation, and construction. Combined with the Investment Loans with the time loan schemes, including for the purpose of financing export/import transactions, total lending as at end of 2016 amounted Rp4.40 trillion, or equivalent to 83.55% of the Bank's total lending portfolio.

Bank BNP conducts its business across all business lines including in its lending activities with vigilance and caution,

perhitungan dan kehati-hatian, sejalan dengan prinsip *prudential banking* yang dianut, serta mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi bisnisnya sesuai dengan strategi umumnya.

Dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang bertumbuh namun masih sarat tantangan, sehingga menyebabkan tingginya rata-rata rasio NPL di banyak bank, Bank BNP semakin berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya sepanjang tahun 2016. Oleh karena itu, nilai penyaluran kredit Bank BNP di tahun 2016 mengalami penurunan 17,79% secara umum dibandingkan di tahun 2015.

Konsentrasi penyaluran kredit berdasarkan Debitur Inti perorangan dan grup per akhir tahun 2016 adalah 16,12% dari portofolio kredit keseluruhan, turun sebesar 2,31% dari akhir tahun 2015. Perhitungan ini didasarkan pada besaran aset Bank BNP yang pernah mencapai lebih dari Rp10 triliun, sehingga jumlah Debitur Inti ditentukan sebanyak 25 debitur besar saja. Sementara itu, pinjaman yang disalurkan kepada pihak berelasi/berafiliasi dengan Bank mencapai 1,65%, turun 0,38% dari proporsinya per akhir tahun 2015.

Pembiayaan Konsumen

Bank BNP menyalurkan pinjaman untuk penggunaan yang sifatnya konsumtif (non-produktif), berupa kredit pemilikan rumah, kredit pembelian mobil, dan kredit konsumtif lainnya yang tidak ditujukan untuk tujuan produktif. Pinjaman konsumen termasuk kredit yang diberikan kepada karyawan.

in line with the principle of prudential banking it espouses, while also striving to improve the efficiency and effectiveness of its business operations in keeping with its overarching strategy.

With the currently growing economy in Indonesia, albeit rife with challenges and thus resulted in the high average NPL ratios across many banks, Bank BNP became even more cautious in extending its lending facilities throughout 2016. Therefore, total lending amount recorded by Bank BNP in 2016 dropped by 17.79% generally compared to that in 2015.

Proportion of lending to Core Debtors of both individuals and groups as at the end of December 2016 was 16.12% of the total lending portfolio, down by 2.31% from that of the end of 2015. This calculation was based on the Bank's assets that had in the past exceeded Rp10 trillion, and thus the core debtors were limited only to the 25 largest debtors. Meanwhile, loans extended by the Bank to related/affiliated parties amounted to 1.65% of the total, down by 0.38% from that of end of 2015.

Consumer Loans

Bank BNP extends loans for uses that are consumptive (not productive) by nature, in the form of housing loans, vehicle loans, and other consumer loans that are not intended for productive users. Consumer loans include loans provided to employees.

dalam miliar rupiah / in Rp billion

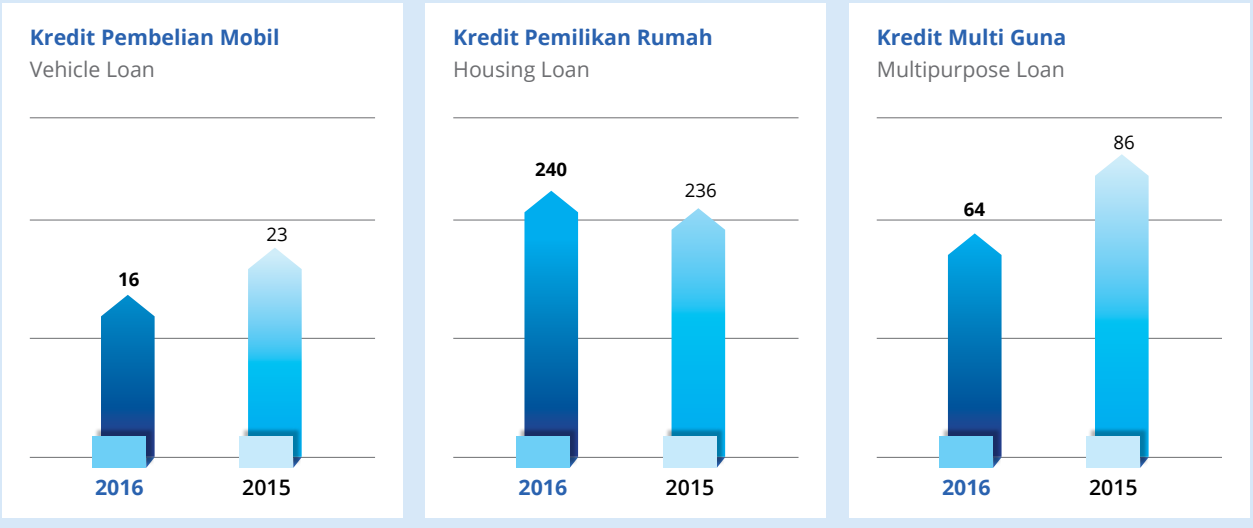

Sepanjang 2016, Bank BNP tidak aktif dalam menyalurkan kredit konsumtif. Dengan demikian, terjadi penurunan volume pinjaman konsumtif sebagai akibat pembayaran angsuran saja (*run off*) dalam segmen bisnis ini. Ini

Throughout 2016 Bank BNP was not actively pursuing its consumer lending business. As such, there was a decline in the amount of consumer loans, owing to the payment of outstanding loans being the only movement in this business

merupakan bagian dari kebijakan Bank BNP di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dan harga properti yang cukup berfluktuasi, agar Bank dapat lebih berhati-hati untuk tidak meningkatkan paparan risikonya di sektor properti dan otomotif.

Bisnis Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan Bank BNP. Produk yang bersifat unsecured ini cukup memberikan kontribusi terhadap pencapaian portofolio pinjaman dan menyumbang spread margin yang cukup baik.

Pada awal tahun 2016, Bank BNP melakukan rebranding produk KTA General Extra menjadi KTA Mirai+. Perubahan ini memberikan paradigma baru mengenai KTA Bank BNP di masyarakat. Fokus target market yang disasar oleh KTA Mirai+ adalah perorangan yang berprofesi sebagai karyawan tetap dan karyawan kontrak yang memiliki gaji minimal Rp1 juta.

Sepanjang 2016, respons masyarakat atas produk KTA Mirai+ sangat baik, sebagaimana tercermin dari jumlah aplikasi masuk yang meningkat hingga mencapai lebih dari 5 kali lipat dari semula 28.309 aplikasi di tahun 2015 menjadi 145.444 aplikasi di tahun 2016, dengan disbursement rate sebesar 43%, Number of Accounts (NoA) pun tumbuh menjadi 64.691 di akhir 2016, dari 10.188 di akhir 2015.

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan jumlah aplikasi masuk, NoA cair, dan pertumbuhan O/S.

segment. This was part of Bank BNP's policy amidst the economic situation that remained yet to fully recover and the relatively fluctuating property prices, to make the Bank more vigilant so as not to increase its risk exposure in the property and automotive sectors.

Unsecured Loans

KTA is a loan product offered by Bank BNP. The product, which is an unsecured loan, contributed considerably to the total lending portfolio of the Bank, and provided a fairly satisfactory spread margin.

In early 2016 Bank BNP rebranded its KTA General Extra product as KTA Mirai+. This change gave a new paradigm concerning Bank BNP's Unsecured Loan product in the public eyes. The target market of KTA Mirai+ is focused on individuals that work as permanent employees or contract employees with a minimal salary of Rp1 million.

In 2016, the public's response to KTA Mirai+ product was remarkably strong, as reflected by the total number of loan applications increasing more than fivefold, from 28,309 applications in 2015 to 145,444 applications in 2016, with a disbursement rate of 43%, total number of accounts (NoA) also increased from 10,188 as at end of 2015 to 64,691 accounts as at end of 2016.

The following graph illustrates the number of loan applications, current NoA, and O/S growth.

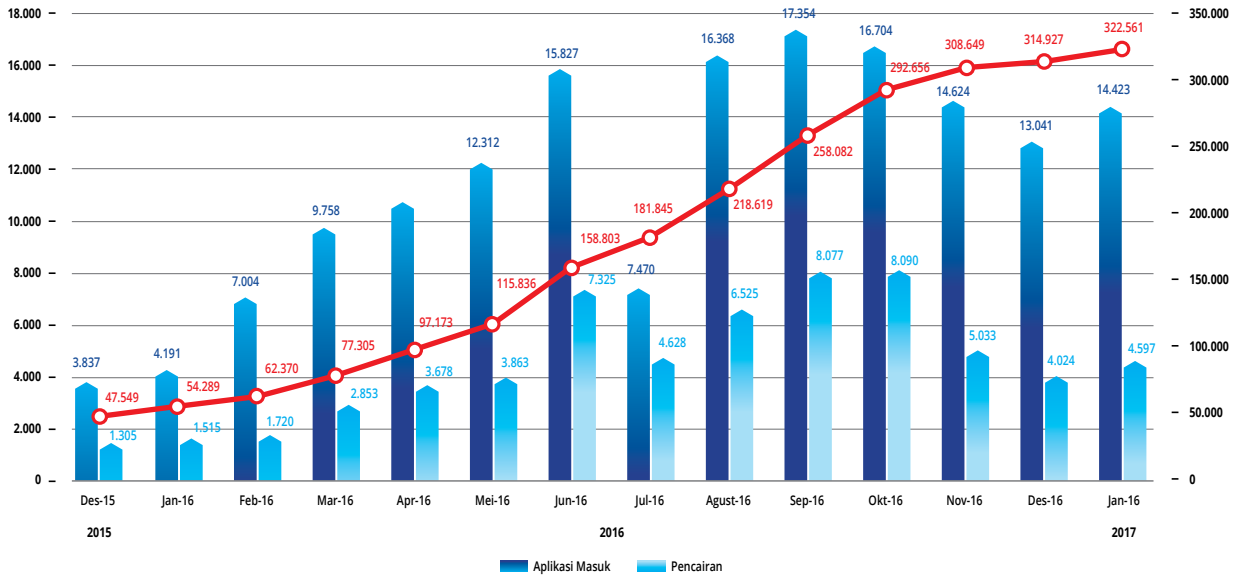

Untuk mengimbangi respons pasar yang sangat tinggi, Bank BNP melalui Divisi KTA Mirai+ pada tahun 2016 telah melakukan beberapa upaya perbaikan dan pengembangan proses baik secara kualitas, maupun akurasi dan percepatan dalam persetujuan pinjaman KTA Mirai+ tanpa mengabaikan faktor kehati-hatian, perbaikan dan pengembangan SDM serta lingkungan kerja yang kondusif dan memadai.

Berikut strategi yang dilakukan oleh Bank BNP untuk mencapai target KTA Mirai+:

1. Fokus ke target market karyawan khususnya karyawan pabrik (blue-collar workers).
2. Fokus ke area pemasaran sepanjang lintasan tol Jagorawi dan Cipularang, seperti Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, dll.
3. Pembukaan sales counter dan booth di area target pemasaran.
4. Efektivitas promosi yang memiliki korelasi positif terhadap peningkatan aplikasi masuk melalui sales counter dan open booth.
5. Sistem scoring yang lebih akurat.
6. Optimalisasi debitur eksisting dengan pemberdayaan tim Tele Message (Tele Sales) dalam menawarkan beberapa program pemasaran, seperti Member Get Member (MGM), Re-Instate dan Top-Up.
7. Promosi melalui social media dan video commercial di situs web.

Untuk ke depan, Bank BNP telah menyiapkan rencana kerja di tahun 2017 diantaranya dengan meningkatkan jumlah walk in customer melalui optimalisasi kantor cabang Bank BNP sebagai sales counter, memperluas jaringan target market ke area Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan meningkatkan peran IT di sisi proses persetujuan kredit dan collection, untuk mendukung program pencapaian target Mirai+ di tahun 2017 dengan kualitas yang baik.

Pembiayaan Berdasarkan Lapangan Usaha

Penyaluran kredit menurut Lapangan Usaha didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yakni 37,11% dari total penyaluran kredit 2016, target proyeksi yaitu sebesar 40%, hal tersebut seiring dengan perlambatan pertumbuhan kredit sektor Perdagangan Besar dan Eceran secara nasional pada tahun 2016. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran secara nasional juga mencatatkan kenaikan NPL sebesar 71 bps menjadi 4,24% pada akhir tahun 2016, oleh sebab itu prinsip kehati-hatian menjadi pertimbangan oleh Bank BNP dalam menyalurkan kredit. Pembiayaan kepada sektor-sektor lain seperti Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi, Real Estate dan lainnya terus diupayakan pertumbuhannya.

To keep up with the strong market response, through its Non-Collateral or Unsecured Loans (KTA) Mirai+ Division, Bank BNP in 2016 conducted various improvements and process development measures in terms of quality, accuracy, and speed in approving Unsecured Loans Mirai+ by abiding to the principle of prudence, improvement and development of human resources and working environment that are conducive to business.

In addition, Bank BNP also employed a number of strategies to achieve the KTA Mirai+ target, among others:

1. Focus on employees, especially blue-collar workers (factory workers) as the target market.
2. Focus on marketing areas along the Jagorawi and Cipularang toll roads, e.g. Bekasi, Karawang, Cikarang, Cikampek, etc.
3. Opening of sales counters and booths in the target market area.
4. Effectiveness of promotions that positively correlate with growth in incoming applications from sales counters and open booths.
5. More accurate scoring system.
6. Optimization of existing debtors by empowering the Tele Message (Tele Sales) team in marketing various programs, such as Member Get Member (MGM), Re-Instate, and Top-Up.
7. Promotion via social media and commercial videos on the website.

Going forward, Bank BNP has prepared its 2017 business plan, which includes increasing the number of walk in customers by optimizing Bank BNP's branch offices as sales counters, expanding the target market to Central Java and East Java, and improving the role of IT for loan approval and collection processes, to support the measures to achieve the Mirai+ targets in 2017 with the desirable quality.

Lending by Field of Business

Classified by field of business, lending was dominated by Wholesale and Retail Trade with a 37.11% contribution out of the total 2016 lending amount; this was lower than the projected target of 40% contribution, owing to the slowing of the Wholesale and Retail Trade lending sector nationwide in 2016. The national Wholesale and Retail Trade also posted an increase in NPL by 0.71% to 4.24% as at the end of the year, and hence Bank BNP continued to uphold the principle of prudence in carrying out its lending practices. Lending to other sectors, such as Processing Industry, Provision of Accommodation, Real Estate, and others was cultivated further.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No.	Lapangan Usaha / Business Field	Realisasi / Realization				Proyeksi / Projection		Pertumbuhan / Growth	Pencapaian RBB 2016 / Achievement RBB 2016	
		2016	Proporsi / Proportion	2015	Proporsi / Proportion	2016	Proporsi / Proportion		+/–	%
A	Industri Pengolahan / Processing Industry	1.518.915	28,59%	1.875.296	28,95%	2.091.486	29,71%	-19,00%	(572.571)	72,62%
B	Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale and Retail Trade	1.972.122	37,11%	2.445.209	37,75%	2.815.906	40,00%	-19,35%	(843.784)	70,04%
C	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Provision of Accommodation and Food & Drink	190.296	3,58%	260.237	4,02%	197.393	2,80%	-26,88%	(7.097)	96,40%
D	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan / Real Estate, Leasing, and Company Service	244.914	4,61%	479.439	7,40%	452.942	6,43%	-48,92%	(208.028)	54,07%
E	Lainnya / Others	1.387.383	26,11%	1.417.522	21,88%	1.482.037	21,05%	-2,13%	(94.654)	93,61%
	TOTAL	**5.313.629**	**100,00%**	**6.447.703**	**100,00%**	**7.039.764**	**100,00%**	**-17,97%**	**(1.726.135)**	**75,48%**

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran Kredit Bank BNP berdasarkan pada jenis penggunaan, adalah Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi.

Pada posisi Desember 2016 porsi terbesar penggunaan adalah Modal Kerja yaitu 69,55%, sedangkan pembiayaan untuk tujuan Investasi komposisinya 16,71%, serta sisanya sebesar 13,73% untuk tujuan Konsumsi.

Secara volume penyaluran kredit untuk tujuan Konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2015, sedangkan untuk tujuan Modal Kerja dan Investasi mengalami penurunan.

Lending by Type of Use

Bank BNP's lending by type of use is broken down as follows: Working Capital, Investment, and Consumption.

At the December 2016 position, the largest proportion was for Working Capital by 69.55%, while lending for Investment contributed 16.71% to total lending, and the remaining 13.73% was lending for Consumption.

In terms of amount, lending for Consumption purposes increased from its value as at the end of 2015, while the amount of lending for both Working Capital and Investment decreased from the previous year's figure.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No.	Jenis Penggunaan / Type of Use	Realisasi / Realization				Proyeksi / Projection		Pertumbuhan / Growth	Pencapaian RBB 2016 / Achievement RBB 2016	
		2016	Proporsi / Proportion	2015	Proporsi / Proportion	2016	Proporsi / Proportion		+/–	%
A	Modal Kerja / Work Capital	3.695.788	69,55%	4.490.631	69,32%	5.033.431	71,50%	-17,70%	(1.337.643)	73,42%
B	Investasi / Investment	888.022	16,71%	1.460.864	22,55%	1.390.354	19,75%	-39,21%	(502.332)	63,87%
C	Konsumsi / Consumption	729.818	13,73%	526.207	8,12%	615.979	8,75%	38,69%	113.839	118,48%
	TOTAL	**5.313.629**	**100,00%**	**6.477.703**	**100,00%**	**7.039.764**	**100,00%**	**-17,97%**	**(1.726.135)**	**75,48%**

Pembiayaan Berdasarkan Provinsi

Konsentrasi penyaluran pinjaman menurut wilayah dan provinsi masih terbesar berada di provinsi Jawa Barat, mengingat hampir lebih dari 70% sebaran jaringan kantor Bank BNP berada di wilayah tersebut.

Bank BNP terus-menerus melakukan upaya untuk memperbesar wilayah sebaran kreditnya ke provinsi lain selain di Jawa Barat, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan luar Jawa-Bali.

Lending by Province

The highest concentration of lending, broken down by region and province, remained in the West Java province. This was owing to the fact that more than 70% of all branch offices of Bank BNP are located in this province.

Bank BNP continuously expands its lending activities to provinces outside of West Java, such as to Jakarta, Central Java, East Java, Bali, and outside of Java–Bali region.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

No.	Province	Realisasi Realization				Proyeksi Projection		Pertumbuhan Growth	Pencapaian RBB 2016 / Achievement RBB 2016	
		2016	Proporsi Proportion	2015	Proporsi Proportion	2016	Proporsi Proportion		+/-	%
A	Bali	114.918	2,16%	278.634	4,30%	243.798	3,46%	-58,76%	(128.880)	47,14%
B	DKI Jakarta	493.751	9,29%	807.495	12,47%	834.232	11,85%	-38,85%	(340.481)	59,19%
C	Jawa Barat / West Java	3.879.323	73,01%	4.452.575	68,74%	4.894.722	69,53%	-12,87%	(1.015.399)	79,26%
D	Lainnya / Others	825.637	15,54%	938.999	14,50%	1.067.012	15,16%	-12,07%	(241.375)	77,38%
	TOTAL	**5.313.629**	**100,00%**	**6.477.703**	**100,00%**	**7.039.764**	**100,00%**	**-17,97%**	**(1.726.135)**	**75,48%**

Pembiayaan Berdasarkan UMKM

Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) semakin menggeliat dalam lima tahun terakhir. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM sekitar 60,34% terhadap perekonomian.

Di Indonesia, UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, juga membantu mengatasi pengangguran, sehingga sektor UMKM akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank BNP berkomitmen untuk turut serta mengembangkan potensi dari UMKM.

Bila melihat pada pencapaian akhir 2016, persentase kredit kepada UMKM memang belum menempati posisi terbesar, namun manajemen berkeyakinan bahwa pencapaian 47,46% ini cukup baik, karena mendekati target penyaluran kredit kepada UMKM sebesar 50%.

Lending to MSMEs

The contribution of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to the gross domestic product (GDP) has been increasing in the past five years. The Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) recorded a contribution of 60.34% to the economy from the MSME sector.

In addition to economic development, MSMEs also contribute significantly to resolving the issue of unemployment, and this is the way the MSMEs play a huge role in shaping the Indonesian economic growth. Bank BNP is committed to supporting the growth potential of these MSMEs.

At the end of 2016, lending to MSMEs was not yet the largest contribution to the total, but the management believes that a 47.46% contribution to total was an agreeable achievement for MSME lending, as it was close to the given target of 50% for MSME lending.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization		Proyeksi Projection	Pertumbuhan Growth	Achievement RBB 2016 Achievement of RBB 2016	
	2016	2015	2016		+/–	%
UMKM	2.521.926	3.106.303	3.519.882	-18,81%	(997.956)	71,65%
Non UMKM	2.791.703	3.371.400	3.519.882	-17,19%	(728.179)	79,31%
Total Kredit	5.313.629	6.477.703	7.039.764	-17,97%	(1.726.135)	75,48%
Rasio UMKM	47,46%	47,95%	50,00%	-1,03%	-2,54%	94,92%

Pembiayaan Berdasarkan UMKM Lapangan Usaha

Penyaluran kredit segmen UMKM menurut lapangan usaha, pada tahun 2016 secara komposisi pemberian pinjaman masih didominasi oleh sektor ekonomi Perdagangan Besar dan Kecil yaitu 41,74% sedikit meningkat dari tahun 2015, sedangkan Industri Pengolahan besaran alokasinya sebesar 28,11%, juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan volume penyaluran kredit segmen UMKM menurut lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, seiring dengan penurunan total penyaluran kredit.

MSME Lending by Field of Business

The breakdown of lending to MSME by field of business in 2016 resulted in the following: the dominant sector remained Wholesale and Retail Trade, with 41.74% of the total, slightly increasing from 2015 figure, while the Processing Industry contributed 28.11% to the total, also increasing from the previous year.

In terms of lending amount, all economic sectors for MSME lending experienced a decline compared to 2015 figures, in line with the decrease in total lending.

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

No.	Lapangan Usaha / Business Field	Realisasi / Realization				Proyeksi / Projection		Pertumbuhan / Growth	Pencapaian RBB 2016 / Achievement RBB 2016	
		2016	Proporsi / Proportion	2015	Proporsi / Proportion	2016	Proporsi / Proportion		+/–	%
A	Industri Pengolahan / Processing Industry	708.974	28,11%	817.658	26,32%	991.460	28,17%	-13,29%	(282.486)	71,51%
B	Perdagangan Besar dan Eceran / Wholesale and Retail Trade	1.052.612	41,74%	1.272.570	40,97%	1.438.689	40,87%	-17,28%	(386.077)	73,16%
C	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Provision of Accommodation and Food & Drink	141.339	5,60%	189.507	6,10%	180.188	5,12%	-25,42%	(38.849)	78,44%
D	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan / Real Estate, Leasing, and Company Service	190.548	7,56%	308.451	9,93%	306.458	8,71%	-38,22%	(115.910)	62,18%
E	Lainnya / Others	428.453	16,99%	518.116	16,68%	603.087	17,13%	-17,31%	(174.634)	71,04%
	TOTAL	**2.521.926**	**100,00%**	**3.106.303**	**100.00%**	**3.519.882**	**100,00%**	**-18,81%**	**(997.956)**	**71,65%**

Pembiayaan Berdasarkan UMKM Jenis Penggunaan

Secara komposisi pembiayaan UMKM yang digunakan untuk tujuan Modal Kerja naik dari periode yang sama tahun lalu menjadi sebesar 79,66%. Sisanya digunakan untuk Investasi sebesar 20,34% menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Penggunaan kredit sebagai modal kerja sifatnya jangka pendek (1 tahun) dan dapat diperpanjang memberikan efek *turn over* kebutuhan kredit menjadi sangat tinggi, hal tersebut diharapkan dapat menggairahkan pertumbuhan sektor riil dengan skala UMKM.

MSME Lending by Type of Use

MSME Lending to serve Working Capital needs increased from the previous year's figure to reach a contribution of 79.66% of the total. The remainder, for Investment purposes, contributed 20.34% to the total, a decrease from the previous year's figure. Lending for working capital purposes is short-term by nature, with a period of 1 year, and is extendable, so that the lending needs turnover effect became very strong. This is expected to encourage growth in the real sector for MSME business scale.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No.	Jenis Penggunaan / Type of Use	Realisasi / Realization		Proyeksi / Projection	Pertumbuhan / Growth	Pencapaian RBB 2016/ Achievement RBB 2016	
		2016	2015	2016		+/–	%
A	Modal Kerja / Work Capital	2.009.009	2.324.711	2.728.461	-13,58%	(719.452)	73,63%
B	Investasi / Investment	512.917	781.591	791.421	-34,38%	(278.504)	64,81%
C	%Modal Kerja / Work Capital	79.66%	74.84%	77,52%	6,44%	2,15%	102,77%
D	%Investasi / Investment	20.34%	25.16%	22,48%	-19,17%	-2,15%	90,46%
	TOTAL	**2.521.926**	**3.106.303**	**3.519.882**	**-18,81%**	**(997,956)**	**71,65%**

Pembiayaan Berdasarkan UMKM Provinsi

Sesuai dengan penjelasan pada alokasi portofolio pinjaman menurut wilayah/provinsi, maka secara segmen UMKM, penyaluran pinjaman berdasarkan wilayah, tidak jauh berbeda yaitu Provinsi Jawa Barat masih yang terbesar yaitu sebesar 73,85% naik dari periode sebelumnya. Di tahun mendatang, volume untuk provinsi Jawa Barat akan ditingkatkan dengan tetap memperhatikan penetrasi penyaluran kredit di wilayah luar Jawa Barat.

MSME Lending by Type of Use

In keeping with the explanation for lending portfolio allocation by region/province, thus for MSME lending broken down by region, the distribution was relatively similar, with the West Java province dominating the total with a 73.85% contribution, an increase from the previous period's figure. In the coming years, lending amount to West Java province shall be increased even further while penetration to serve lending needs outside of West Java will also be considered.

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

No.	Province / Province	Realisasi / Realization				Proyeksi / Projection		Pertumbuhan / Growth	Pencapaian RBB 2015/ Achievement RBB 2015	
		2016	Proporsi / Proportion	2015	Proporsi / Proportion	2016	Proporsi / Proportion		+/-	%
A	Bali	60.215	2,39%	104.182	3,35%	84.566	2,40%	-42,20%	(24.351)	71,20%
B	DKI Jakarta	293.074	11,62%	353.107	11,37%	396.212	11,26%	-17,00%	(103.138)	73,97%
C	Jawa Barat / West Java	1.862.448	73,85%	2.228.868	71,75%	2.586.656	73,49%	-16,44%	(724.208)	72,00%
D	Jawa Tengah / Central Java	168.471	6,68%	204.977	6,60%	244.741	6,95%	-17,81%	(76.270)	68,84%
D	Lainnya / Others	137.718	5,46%	215.169	6,93%	207.707	5,90%	-36,00%	(69.989)	66,30%
	TOTAL	**2.521.926**	**100,00%**	**3.106.303**	**100,00%**	**3.519.882**	**100,00%**	**-18,81%**	**(997.956)**	**71,65%**

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Kepatuhan Bank BNP terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 Bank telah mematuhi peraturan BMPK baik untuk pihak berelasi ataupun pihak ketiga dan Bank tidak ada pelanggaran ataupun pelampauan BMPK yang telah ditetapkan (Catatan 10.q atas Laporan Keuangan).

Legal Lending Limit (LLL)

Bank BNP's compliance with Bank Indonesia Regulation on the Legal Lending Limit (LLL), i.e. Bank Indonesia Regulation No. 8/13/PBI/2006 dated 5 October 2006 was reflected by the fact that on 31 December 2016 the Bank had fulfilled the LLL both for related parties as well as for third parties, and the Bank had not violated or exceeded the LLL as determined (Note 10.q to the Financial Statements).

Kegiatan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank BNP berasal dari dua sumber, yakni yang berasal dari masyarakat penyimpan (Pihak Ketiga) dan yang berasal dari Institusi perbankan (penempatan bank lain).

Funding Activities

Funding at Bank BNP is derived from two sources, namely public depositors (third party depositors) and banking institutions (placements from other banks).

Jumlah dana yang berhasil dihimpun dari Dana Pihak Ketiga per akhir 2016 adalah Rp6,31 triliun, atau 87,88% dari nilainya per akhir 2015 sebesar Rp7,18 triliun. Penurunan ini secara umum disebabkan oleh penyesuaian yang dilakukan Bank BNP terhadap suku bunga produk depositonya, untuk mengikuti suku bunga rata-rata yang berlaku di pasar.

Deposito memberikan kontribusi terbesar, yaitu 76%, terhadap total Dana Pihak Ketiga yang dihimpun per akhir tahun 2016, disusul oleh Tabungan sebesar 15% dan Giro sebesar 9%. Komposisi Dana Pihak Ketiga per akhir tahun 2016 tidak banyak berbeda dibandingkan kondisinya per akhir tahun 2015, yang juga didominasi oleh Deposito (77% dari total).

Total Third Party Funds as at end of 2016 amounted to Rp6.31 trillion, or 87.88% of the value as at end of 2015, which was Rp7.18 trillion. This decline was generally owing to the adjustment made by Bank BNP to its time deposit product's interest rate, to be more aligned with the average interest rates in the market.

Time Deposits contributed the largest amount to the Third Party Funds collected as at end of 2016, at 76%, followed by Savings with 15%, and then Demand Deposits (Current Accounts) at 9%. This composition of the Third Party Funds as at end of 2016 was relatively unchanged from that of the end of 2015, which was also dominated by Time Deposits (77% of the total).

dalam miliar rupiah

in Rp billion

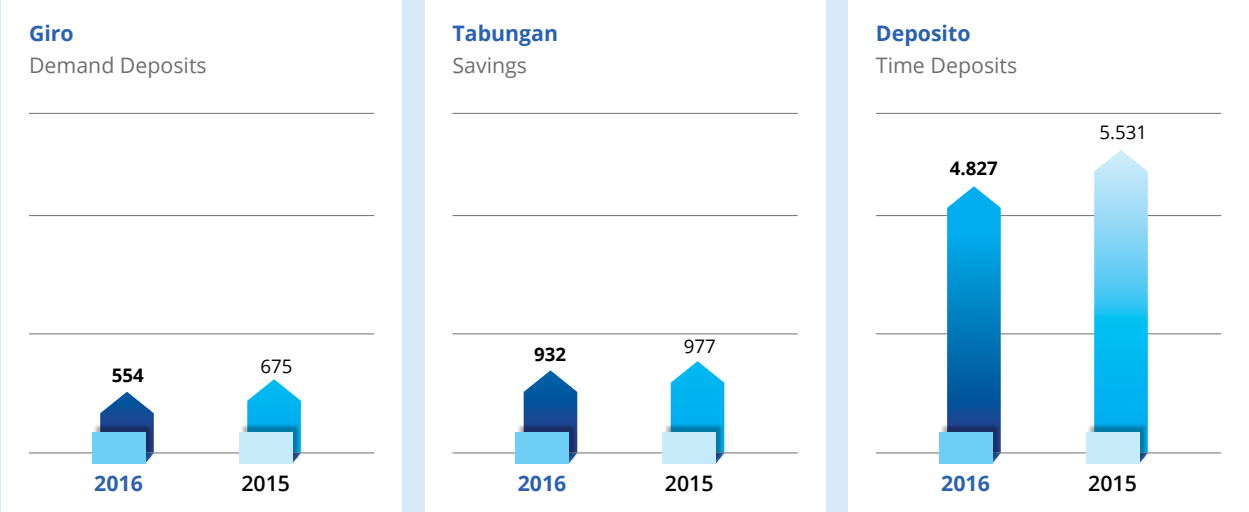

Komposisi Pendanaan Desember 2016 / Funding Composition December 2016

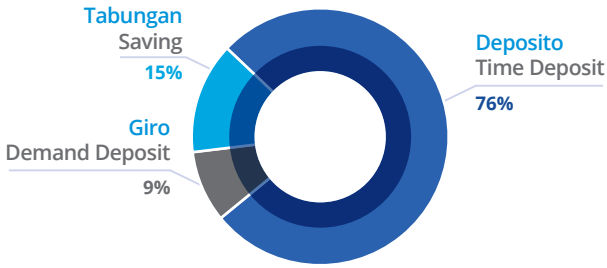

Komposisi Pendanaan Desember 2015 / Funding Composition December 2015

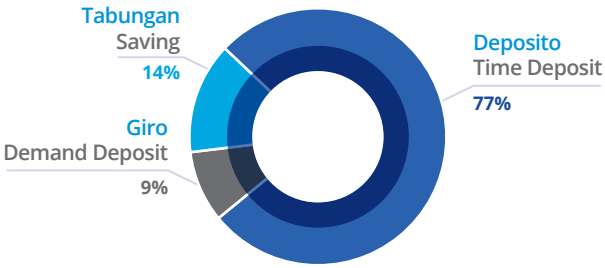

Upaya untuk mempertahankan jumlah dana pihak ketiga telah Bank lakukan dengan tetap menjual beberapa produk simpanan, seperti Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka, di mana masing-masing produk memiliki turunannya sendiri-sendiri yaitu fitur tiap-tiap turunan produk simpanan disesuaikan dengan target market yang dibidik.

Efforts to maintain third party funding have been done by the Bank by marketing various savings products, namely Demand Deposits, Savings, and Time Deposits. Each product has its own derivatives, the features for each derivative product are adjusted to the target market of the respective products.

Sementara itu untuk meningkatkan komposisi dana murah (dari Tabungan dan Giro, yang suku bunganya lebih rendah dibandingkan Deposito), Bank terus berupaya menarik nasabah lama dan mendapatkan nasabah baru pada produk Tabungan Japan dan Sakura, antara lain dengan menawarkan kemudahan bagi para nasabah Tabungan Japan dengan adanya fasilitas *internet banking*.

Di samping melakukan pemasaran langsung atas produk-produk simpanan yang ditawarkannya, Bank BNP juga mengadakan beberapa program-program reguler untuk menarik dana dari masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan promosi.

Pengembangan Bisnis

Selama tahun 2016, Bank BNP menjalankan bisnisnya dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian dengan mengedepankan prinsip *prudential banking*, melakukan upaya efisiensi dan efektifitas operasionalisasi bisnisnya berdasarkan strategi bisnis pada tahun ini.

Tahun 2016 Bank BNP melakukan pembukaan 9 Kantor Kas, 2 Mobil Kas, serta melakukan penutupan 12 Kantor Cabang Pembantu, 4 Kantor Fungsional untuk UMKM dan 1 Kantor Kas, sehingga di tahun 2016 perubahan jumlah jaringan kantor Bank BNP menjadi 62 kantor dengan rincian 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang, 32 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Kas, 1 Kantor Fungsional non operasional, dan 3 Mobil Kas Keliling. Bank BNP juga melakukan relokasi beberapa jaringan kantor ke tempat yang lebih prospektif dan melakukan perubahan status kantor.

Upaya lainnya yang dilakukan Bank BNP untuk mengembangkan bisnisnya selain mengevaluasi kinerja jaringan kantor adalah dengan mengembangkan produk dan aktivitas baru yaitu antara lain melakukan pengembangan fitur internet banking, dan fitur ATM sebagai upaya meningkatkan layanan Bank BNP.

Kebijakan Suku Bunga

Pada bulan Agustus 2016 Bank Indonesia mengumumkan *BI 7-Day Repo Rate* sebagai suku bunga acuan yang baru, sebagai pengganti *BI Rate*. Perubahan suku bunga acuan dipercaya akan memberikan dampak positif, salah satunya adalah transmisi kebijakan moneter bisa berlangsung lebih efektif. Juga diharapkan kebijakan BI atas suku bunga ini dapat langsung direspons dan penyesuaian biaya dana perbankan akan lebih cepat. Kenaikan tingkat suku bunga BI akan mempengaruhi kebijakan tingkat suku bunga Bank BNP baik simpanan maupun pinjaman.

Bank BNP menetapkan suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun 2015 dan 2016, yaitu suku bunga simpanan dan pinjaman sebagai berikut:

Meanwhile, to increase the composition of CASA (from Current Accounts or Demand Deposits and Savings Accounts, which offer lower interest rates compared to Time Deposits), the Bank strives to attract customers to place their money in the Japan and Sakura Savings products. The Bank also offers a greater degree of convenience to Japan Savings account holders with the internet banking feature.

In addition to conducting direct sales of its savings products, Bank BNP also conducts regular programs to collect funds from the public through a wide range of promotional products.

Business Development

Throughout 2016, Bank BNP conducted its business with caution by upholding the principle of prudential banking. It also conducted efficiency measures and increased its operational effectiveness based on the strategies set out for the year.

In 2016, Bank BNP opened 9 Cash Offices, 2 Mobile Cash units, and closed 12 Sub-Branch Offices, 4 Functional Offices for MSMEs and 1 Cash Office. Thus, in 2016, the office network of Bank BNP consisted of 62 offices with the following details: 1 Head Office, 15 Branch Offices, 32 Sub-Branch Offices, 10 Cash Offices, 1 non-operational Functional Office, and 3 Mobile Cash units. Bank BNP also relocated a number of its offices to more prospective locations and altered the status of some of its offices.

Other measures taken by Bank BNP to expand its business network further, aside from evaluating the performance of each office in its business network, were by developing new products and activities, among others the internet banking and ATM features as a means to improve Bank BNP's service to customers.

Interest Rate Policy

In August 2016 Bank Indonesia announced the use of BI 7-Day Repo Rate as the new reference interest rate to replace the BI Rate. This change in interest rate scheme is believed to instigate positive impacts, among others a more effective transmission of monetary policies. It is also expected that the new interest rate policy from Bank Indonesia can receive immediate response and the adjustments to the funding costs in the banking sector be done promptly. The increase in BI's interest rate will affect Bank BNP's interest rate policy for both its lending and funding products.

Bank BNP set its average annual interest rate for the years of 2015 and 2016, for funding and lending products, as follows:

Rata-Rata Suku Bunga/Average Interest Rates

dalam jutaan Rupiah | in million Rupiah

Keterangan	2016	2015	Description
Kredit Rupiah			Loans in Rupiah
Pinjaman Rekening Koran	13,55%	13,95%	Demand Deposits Loans
Pinjaman Berjangka	12,80%	13,44%	Time Loans
Kredit Kendaraan Bermotor	13,77%	13,43%	Vehicle Ownership Loans
Kredit Pemilikan Rumah	12,77%	13,51%	Housing Loans
Kredit Time Loan Flat	21,43%	13,52%	Time Loans Flat
Kredit Mikro	8,85%	14,86%	Micro Finance Loans
Kredit Valuta Asing			Loans in Foreign Currency
Pinjaman Rekening Koran	0,00%	0,00%	Demand Deposits Loans
Kredit Modal Kerja	4,56%	6,42%	Working Capital Loans
Simpanan Rupiah			Deposits in Rupiah
Giro	0,93%	0,94%	Demand Deposts
Tabungan	3,13%	3,43%	Saving Deposits
Deposito Berjangka	7,60%	9,01%	Time Deposits
Simpanan Valuta Asing			Deposits in Foreign Currencies
Giro	0,08%	0,09%	Demand Deposts
Tabungan	0,43%	0,44%	Saving Deposits
Deposito Berjangka	0,89%	1,45%	Time Deposits

Perkembangan suku bunga Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan intermediasi Bank BNP (kredit dan simpanan DPK) adalah sebagai berikut:

The development of the interest rates of Bank Indonesia, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), and Bank BNP's intermediaries (lending and third party funding) is as follows:

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Suku Bunga LPS / LPS Interest Rate	7,50%	7,50%	7,25%	7,25%	7,00%	6,75%	6,75%	6,75%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
BI 7-day (Reverse) Repo Rate	-	-	-	5,50%	5,50%	5,25%	5,25%	5,25%	5,00%	4,75%	4,75%	4,75%
Suku Bunga Kredit BNP	12,71%	12,77%	12,68%	12,80%	12,96%	13,03%	12,94%	13,06%	13,17%	13,27%	13,36%	13,37%
Suku Bunga DPK BNP	6,45%	6,50%	6,51%	6,42%	6,27%	6,16%	6,06%	5,99%	5,93%	5,87%	5,83%	5,80%

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

The Prime Lending Rate (SBDK) is used as a basis to determine the lending interest rate charged by the Bank to the customer. The SBDK does not calculate the component of risk premium estimate, whose amount depends on the Bank's evaluation of the risks carried out by each debtor or group of debtors. Thus the lending interest rate charged to the debtors may not be equal to the SBDK.

Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA). Informasi SBDK

Amount for non-KPR consumer loans does not include lending via non-collateral or unsecured loans. Information

yang berlaku setiap saat tersedia pada setiap kantor Bank dan/atau *website* resmi Bank BNP. Berikut adalah Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang telah dihitung dan dipublikasikan pada akhir Desember 2016:

on the prevailing Prime Lending Rate can be obtained at any time via the Bank's publication available at all of the Bank's offices and/or on its website. The SBDK calculated and published at the end of December 2016 is as follows:

Suku Bunga Dasar Kredit / Prime Lending Rate	**Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Segmen Bisnis /** Prime Lending Rate Based on Business Segment				
	Kredit Korporasi / Corporate Loans	**Kredit Ritel /** Retail Loans	**Kredit Mikro /** Micro Loans	**Kredit Konsumsi /** Consumer Loans	
				KPR / Housing Loans	**Non KPR /** Non-Housing Loans
	12,00%	13,95%	8,69%	9,19%	8,84%

Operasional Bank BNP di Bandung

Sepanjang 2016 secara umum kinerja Bank BNP untuk wilayah kerja Bandung dan sekitarnya mengalami sedikit peningkatan, dengan uraian sebagai berikut:

Pendapatan bunga berikut provisi dan komisi pada Desember 2016 sebesar Rp588,68 miliar meningkat 0,33% dari pendapatan tahun 2015 sebesar Rp586,73 miliar. Sementara laba operasional Bank BNP tercatat sebesar minus Rp53,35 miliar turun dari laba operasional negatif tahun 2015 sebesar Rp24,12 miliar. Penurunan ini diakibatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Laba Bersih yang semula tercatat minus Rp47 miliar di tahun 2015 meningkat menjadi minus Rp57,51 miliar. Total aset dan liabilitas Bank BNP di Bandung juga mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp5,58 triliun dan Rp4,33 triliun dibandingkan perolehan tahun 2015 sebesar Rp5,67 triliun dan Rp4,91 triliun, karena adanya penurunan pada kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga.

Operasional Bank BNP di Jakarta

Pencapaian kinerja wilayah Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2016. Bank BNP Jakarta mencatatkan pendapatan bunga ditambah provisi dan komisi sebesar Rp86,50 miliar menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp112,90 miliar atau turun 23,38%. Penurunan tersebut terjadi karena volume rata-rata pinjaman serta suku bunga rata-rata pinjaman mengalami penurunan.

Pencapaian laba operasional dan laba bersih meningkat yang tercatat masing-masing menjadi sebesar Rp55,74 miliar dan Rp52,24 miliar dari pencapaian tahun 2015 yaitu masing-masing sebesar Rp46,25 miliar dan Rp48,58 miliar.

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 40,10% menjadi Rp504,10 miliar dari semula Rp841,54 miliar di tahun 2015. Sedangkan, jumlah liabilitas juga mengalami penurunan menjadi sebesar Rp1.030,61 miliar di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp1.256,21 miliar.

Bank BNP's Bandung Operations

Throughout 2016, the overall performance of Bank BNP in the business region of Bandung and the surrounding areas improved, with the breakdown as follows:

Interest income, fees and commissions as at end of December 2016 amounted to Rp588.68 billion, an increase of 0.33% from the revenues in 2015 of Rp586.73 billion. Bank BNP's operating profit stood at minus Rp53.35 billion, a decline from a negative operating profit in 2015 of Rp24.12 billion. This decrease was due to allowance for impairment losses.

Net Income, which had been recorded at minus Rp47 billion in 2015, was recorded at Rp57.51 billion in 2016. Decline was also seen in Bank BNP's assets and liabilities, each at Rp5.58 trillion and Rp4.33 trillion compared to 2015 figures of Rp5.67 trillion and Rp4.91 trillion, owing to the decrease in the amounts of lending and third party funds.

Bank BNP's Jakarta Operations

Bank BNP's performance in Jakarta decreased in 2016. Bank BNP Jakarta recorded interest income plus fees and commissions amounting to Rp86.50 billion, a decline compared to Rp112.90 billion in 2015, or down by 23.38%. The decline occurred because the average volume of loans decreased, and was accompanied by a decrease in average interest rates on loans.

Operating profit and net profit increased to Rp55.74 billion and Rp52.24 billion, respectively, compared to 2015's achievements of Rp46.25 billion and Rp48.58 billion, respectively.

Assets also decreased by 40.10% to Rp504.10 billion, from Rp841.54 billion in 2015. Meanwhile, total liabilities decreased to Rp1,030.61 billion in 2016 compared to 2015 figure of Rp1,256.21 billion.

Segmen Operasional Wilayah Lainnya

Pendapatan segmen usaha wilayah lainnya sebesar Rp230,14 miliar turun dari semula Rp306,79 pada tahun 2015. Ini disebabkan karena menurunnya volume rata-rata pinjaman disertai dengan penurunan suku bunga rata-rata pinjaman. Begitu juga dengan perolehan laba operasional dan laba bersih yang tercatat mengalami penurunan menjadi masing-masing Rp14,10 miliar dan Rp13,38 miliar, dari pencapaian tahun 2015 sebesar Rp64,88 miliar dan Rp65,29 miliar.

Jumlah aset dan liabilitas pada tahun 2016 juga mengalami penurunan masing-masing menjadi Rp1.626,03 miliar dan Rp1.151,29 miliar dari semula Rp2.097,79 miliar dan Rp1.256,40 miliar pada tahun 2015.

Profitabilitas

Dari kinerja operasi per segmen tersebut di atas, profitabilitas Bank BNP tercatat sebagai berikut:

Pendapatan Bunga Bersih tercatat sebesar Rp485,71 miliar, meningkat sebesar 8,49% dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp447,69 miliar.

Sementara Laba Operasional Bersih tercatat sebesar Rp16,49 miliar atau turun sebesar 81,05% dari perolehan Laba Operasional tahun 2015 sebesar Rp87,01 miliar.

Begitupun dengan laba bersih yang semula tercatat Rp66,87 miliar pada tahun 2015 turun menjadi Rp8,11 miliar di tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya biaya CKPN pada tahun 2016 sebagai salah satu langkah yang diambil Bank dalam menjaga kualitas rasio NPL.

Penurunan juga terjadi pada total aset dan liabilitas, masing-masing menjadi Rp7.705,78 miliar dan Rp6.508,27 miliar dibandingkan perolehan tahun 2015 masing-masing sebesar Rp8.613,11 miliar dan Rp7.417,62 miliar.

Other Areas' Operations

Other areas' operations recorded revenues of Rp230.14 billion, down from Rp306.79 billion in 2015. This was due to a decrease in average loan volume accompanied by a decrease in average interest rates on loans. Similarly, operating profit and net income decreased to Rp14.10 billion and Rp13.38 billion, respectively, compared to the 2015 figures of Rp64.88 billion and Rp65.29 billion, respectively.

Total assets and liabilities in 2016 also decreased to Rp1,626.03 billion and Rp1,151.29 billion, respecively, from 2015 figures of Rp2,097.79 billion and Rp1,256.40 billion, respectively.

Profitability

From the explanation on operating performance by segment as mentioned above, Bank BNP's profitability is as follows:

Net Interest Income amounted to Rp485.71 billion, an increase of 8.49% from previous year's net interest income of Rp447.69 billion.

Net Operating Profit amounted to Rp16.49 billion, a drop of 81.05% from Rp87.01 billion recorded in 2015.

Net income, which in 2015 stood at Rp66.87 billion, dropped to Rp8.11 billion in 2016 owing to the increase in Provision for Impairment Losses (CKPN) in 2016 as a measure taken by the Bank to maintain NPL quality.

Decline also occurred in assets and liabilities, respectively amounting to Rp7,705.78 billion and Rp6,508.27 billion, compared to Rp8,613.11 billion and Rp7,417.62 billion recorded in 2015.

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Keterangan	2016	2015	Description
Pendapatan Bunga	905.311	1.006.417	Interest Income
Beban Bunga	419.598	558.732	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	**485.713**	**447.685**	**Net Interest Income**
Pendapatan Operasional Lainnya	41.146	38.964	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	510.375	399.640	Other Operating Expenses
Laba Operasional Bersih	**16.485**	**87.009**	**Net Operating Income**
Laba Sebelum Pajak	12.073	90.315	Income Before Tax
Laba Bersih	**8.109**	**66.867**	**Net Income**
Laba per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	12	99	"Earning Per Share (in full Rupiah)"
Jumlah Saham (dalam lembar)	676.833.882	676.833.882	Total Number of Shares

Pendapatan & Beban Bunga

Pada tahun 2016 pendapatan bunga Bank tercatat Rp905,31 miliar, turun 10% dari Rp1.006,42 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh jumlah penyaluran kredit setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai lebih kecil 18% di tahun 2016 (sebesar Rp5.205,93 miliar) dibandingkan realisasi di tahun 2015 (Rp6.376,52 miliar).

Pendapatan bunga tahun 2016 berasal dari kredit yang diberikan sebesar Rp817,77 miliar, penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp43,47 miliar, efek-efek sebesar Rp35 miliar, penempatan pada bank lain sebesar Rp8,08 miliar, dan lainnya sebesar Rp989 juta. Penurunan terbesar dari nilai tahun 2015 tercatat pada kredit yang diberikan, sedangkan kenaikan terbesar tercatat pada penempatan pada bank lain.

Sementara itu, beban bunga juga mengalami penurunan sebesar 25% di tahun 2016, mencapai Rp419,60 miliar, dari Rp558,73 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penurunan simpanan pihak ketiga sebesar 12% dari Rp7.183,83 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp6.312,30 miliar di tahun 2016.

Beban bunga tahun 2016 berasal dari deposito Rp368,19 miliar, tabungan Rp28,56 miliar, premi program penjaminan simpanan Rp13,87 miliar, giro Rp5,05 miliar, *call money* Rp72,05 juta dan pinjaman subordinasi Rp3,85 miliar. Penurunan terbesar dari nilai tahun 2015 tercatat pada nilai beban bunga dari deposito.

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih tahun 2016 adalah Rp485,71 miliar, naik 8% dari Rp447,69 miliar di tahun 2015. Kenaikan pada nilai pendapatan bunga bersih ini berasal dari penurunan beban bunga yang lebih besar daripada penurunan pendapatan bunga di tahun 2016 sebagai akibat penurunan volume yang signifikan dari dana pihak ketiga khususnya simpanan deposito berjangka, dan upaya penurunan rate/suku bunga simpanan deposito berjangka.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya di tahun 2016 mengalami kenaikan 6% dari Rp38,96 miliar di tahun 2015 menjadi Rp41,15 miliar. Kenaikan ini didorong oleh pendapatan lainnya sebesar Rp4,30 miliar atau 15% dari tahun 2015. Peningkatan pendapatan lainnya didukung oleh kenaikan beberapa pendapatan, yaitu: Pendapatan dari denda meningkat sebesar Rp4,57 miliar dari tahun lalu, , dan Pendapatan dari kredit yang telah dihapuskan meningkat sebesar Rp2,69 miliar.

Interest Income & Expenses

In 2016 the Bank's interest income reached Rp905.31 billion, a drop of 10% from Rp1,006 billion in 2015. This was owing to the 18% decline in the amount of loans disbursed less the allowance for impairment losses in 2016 (amounting to Rp5,205.93 billion) compared to in 2015 (Rp6,376.52 billion).

Interest income in 2016 was derived from loans disbursed amounting to Rp817.77 billion, placements with Bank Indonesia amounting to Rp43.47 billion, securities amounting to Rp35 billion, placements with other banks amounting to Rp8.08 billion, and others amounting to Rp989 million. The largest decrease in value from 2015 figure was in loans disbursed, while the largest increase was recorded in placement with other banks.

Interest expenses, meanwhile, dropped by 25% in value in 2016, down to Rp419.60 billion from Rp558.73 billion in 2015. This was owing to the 12% lower third party funds amount, from Rp7,183.83 billion in 2015 to Rp6,312.30 billion in 2016.

Interest expenses in 2016 were derived from time deposits of Rp368.19 billion, savings of Rp28.56 billion, premium for deposit insurance program of Rp13.87 billion, demand deposits of Rp5.05 billion, call money of Rp72.05 million, and subordinated loans of Rp3.85 billion. The largest decrease in value from 2015 figure was recorded in interest expense from time deposits.

Net Interest Income

The Bank's net interest income in 2016 was Rp485.71 billion, up by 8% from Rp447.69 billion in 2015. This increase was owing to the smaller reduction in interest income compared to the reduction in interest expenses in 2016, as a result of a significant drop in third party funds amount in particular from time deposits, as well as the decrease in the interest rates for time deposits.

Other Operating Revenues

Other operating revenues in 2016 rose 6% from Rp38.96 billion in 2015 to Rp41.15 billion. This increase was attributable to the increase in other income by Rp4.30 billion or 15% from its value in 2015. The increase in other operating revenues was bolstered by the increase in various components of revenue, namely: Income from penalties rose by Rp4.57 billion from the previous year's figure, Income from ATM transactions increased by Rp2.10 billion, and Income from loans written off increased by Rp2.69 billion.

Sementara itu, pendapatan provisi dan komisi lainnya serta pendapatan devisa – bersih masing-masing mengalami penurunan 31% dan 11% dari realisasi tahun 2015.

Beban Operasional Lainnya

Pada tahun 2016, jumlah beban operasional lainnya mengalami kenaikan 28% dari Rp399,64 miliar di tahun 2015 menjadi Rp510,38 miliar. Kenaikan ini dikontribusikan terutama dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, dari Rp41,62 miliar menjadi Rp101,12 miliar. Kenaikan juga terjadi pada beban umum dan administrasi sebesar 30% atau Rp39,11 miliar menjadi Rp170,73 miliar, beban gaji dan tunjangan sebesar 3% atau Rp6,69 miliar menjadi Rp216,94 miliar, dan beban lainnya sebesar 35% atau Rp5,63 miliar menjadi Rp21,58 miliar pada tahun 2016.

Pendapatan & Beban Non-Operasional

Pada tahun 2016 Bank mencatat pendapatan non-operasional sebesar Rp1,27 miliar, turun 68% dari nilai tahun 2015, dan beban non-operasional sebesar Rp5,68 miliar, naik 798% dari nilainya di tahun 2015. Beban non-operasional meningkat signifikan disebabkan oleh adanya peningkatan pada kerugian penjualan AYDA pada tahun 2016 sebesar Rp5,23 miliar.

Laba Tahun Berjalan

Bank mencatat perolehan laba sebelum pajak sebesar Rp12,07 miliar di tahun 2016, turun 87% dari Rp90,32 miliar di tahun 2015. Sementara itu beban pajak bersih yang harus dibayar oleh Bank di tahun 2016 adalah Rp3,96 miliar, turun 83% dari tahun 2015. Dengan demikian, laba bersih tahun berjalan untuk tahun 2016 adalah Rp8,11 miliar, atau 88% lebih rendah dari laba tahun berjalan untuk tahun yang 2015 sebesar Rp66,87 miliar.

Other fees and commissions as well as gain from foreign exchanges – net rose by 31% and 11%, respectively, from their figures in 2015.

Other Operating Expenses

In 2016, total other operating expenses increased by 28% from Rp399.64 billion in 2015 to Rp510.38 billion. This increase was contributed primarily from the formation of allowance for impairment losses on financial assets, from Rp41.62 billion to Rp101.12 billion. There was an increase in general and administrative expenses by 30% or from Rp39.11 billion to Rp170.73 billion, an increase of 3% or Rp6.69 billion was recorded in salaries and allowance expenses which reached Rp216.94 billion, and other expenses rose by 35% or Rp5.63 billion to Rp21.58 billion in 2016.

Non-Operating Income & Expenses

In 2016 the Bank recorded non-operating income of Rp1.27 billion, a drop of 68% from 2015 figure, while non-operating expenses amounted to Rp5.68 billion, an increase of 798% from the figure in 2015. Non-operating expenses rose significantly due to the increase in losses from sale of foreclosed collaterals in 2016 by Rp5.23 billion.

Income for the Year

The Bank recorded income before tax expense amounting to Rp12.07 billion in 2016, down by 87% from Rp90.32 billion in 2015. Meanwhile, the Bank's tax expense – net for 2016 was Rp3.96 billion, 83% lower than the 2015 figure. Thus, the income for the year in 2016 was Rp8.11 billion, or 88% lower than the income for the year in 2015 of Rp66.87 billion.

Analisis Posisi Keuangan

Analysis of Financial Position

Aset Keuangan

Financial Assets

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan / Growth		Description
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Kas	88.121	105.015	(16.894)	-16,09%	Cash
Giro pada Bank Indonesia	433.528	561.537	(128.009)	-22,80%	Demand deposits with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	361.355	354.873	6.482	1,83%	Demand deposits with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.882	479.982	(62.100)	-12,94%	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.012.183	568.715	443.468	77,98%	Securities
Tagihan spot dan derivatif	-	8	(8)	-100,00%	Spot and Derivatif Receivables
Kredit yang diberikan	5.313.629	6.477.703	(1.164.074)	-17,97%	Loans
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(107.701)	(101.184)	(6.517)	6,44%	Allowance for Impairment Losses

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan / Growth		Description
Tagihan akseptasi	6.330	20.597	(14.267)	-69,27%	Acceptance Receivables
TOTAL	**7.525.327**	**8.467.246**	**(941.919)**	**-11,12%**	**TOTAL**

Aset

Total aset keuangan Bank BNP pada tahun 2016 mencapai Rp7.525,32 miliar, menurun sebesar Rp941,92 miliar atau 11,12% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp8.467,25 miliar. Penurunan aset keuangan disebabkan beberapa faktor, utamanya kredit yang diberikan, kemudian penempatan pada BI dan bank lain, giro pada Bank Indonesia, dan kas. Rincian atas hal tersebut dapat dilihat pada tabel di atas.

Assets

The Bank's financial assets in 2016 reached Rp7,525.32 billion, a drop by Rp941.92 billion or 11.12% from the previous year's figure of Rp8,467.25 billion. The drop in financial assets was owing to a number of factors, the most dominant one being total loans disbursed, followed by placements with Bank Indonesia and other banks, demand deposits with Bank Indonesia, and cash. Further details are provided in the above table.

Aset Non-Keuangan

dalam jutaan Rupiah

Non-Financial Assets

in million Rupiah

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan / Growth		Description
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Aset Tetap-neto	27.619	29.013	(1.394)	-4,80%	Fixed Assets - Net
Aset Tak Berwujud-neto	3.227	3.658	(431)	-11,78%	Intangible Assets - Net
Aset Lain-lain-neto	149.608	113.196	36.412	32,17%	Other Assets - Net
TOTAL	**180.454**	**145.867**	**34.587**	**23,71%**	**TOTAL**

Aset non-keuangan Bank meningkat Rp34,59 miliar atau 23,71% dari Rp145,87 miliar di tahun 2015 menjadi Rp180,45 miliar di 2016. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya realisasi dari Aset Lain-Lain – Neto yang cukup besar sejumlah 32,17% atau Rp36,41 miliar. Realisasi Aset Lain-Lain – Neto meningkat karena adanya peningkatan pada biaya bayar di muka yang meningkat sebesar Rp23,02 miliar, uang muka pajak meningkat Rp14,57 miliar, pendapatan bunga yang akan diterima meningkat Rp4,90 miliar, tagihan terkait transaksi ATM meningkat Rp4,56 miliar, persediaan barang cetakan meningkat Rp2,85 miliar, dan aset lainnya meningkat sebesar Rp9,30 miliar. Sedangkan agunan yang diambil alih terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp22,10 miliar pada tahun 2016.

The Bank's non-financial assets rose by Rp34.59 billion or 23.71% from Rp145.87 billion in 2015 to Rp180.45 billion in 2016. This was owing to the 32.17% increase in realized amount of Other Assets – Net of Rp36.41 billion. Realization of Other Assets – Net increased due to the increase in advance expenses by Rp23.02 billion, tax advance payment by Rp14.57 billion, deferred interest income by Rp4.90 billion, billing related to ATM transactions by Rp4.56 billion, inventory of print materials by Rp2.85 billion, and other assets by Rp9.30 billion. However, foreclosed collaterals dropped significantly by Rp22.10 billion in 2016.

Secara konsolidasi, pada akhir tahun 2016 Bank mencatat total aset sebesar Rp7.705,78 miliar, turun 10,53% dari total aset per akhir tahun 2015. Kontribusi terbesar dari penurunan ini disebabkan oleh kredit yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.164,07 miliar. Komponen terbesar dari total aset Bank, yakni 69% dari total, adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp5.313,63 miliar.

Overall, total assets of the Bank as at the end of 2016 amounted to Rp7,705.78 billion, or 10.53% lower than total assets as at end of 2015. This decrease was contributed mostly by the decrease in loans disbursed to third parties amounting to Rp1,164.07 billion. The largest component of the Bank's total assets, accounting for 69% of the total, was third party loans, amounting to Rp5,313.63 billion.

Posisi kas Bank per akhir 2016 adalah Rp88,12 miliar, turun 16% dari Rp105 miliar di tahun sebelumnya. Giro pada Bank Indonesia mengalami penurunan 23% menjadi Rp433,53 miliar, sementara giro pada bank lain meningkat 2% menjadi Rp361,36 miliar. Realisasi total kredit yang

The Bank's cash as at the end of 2016 stood at Rp88.12 billion, down 16% from Rp105 billion as at end of 2015. Demand deposits with Bank Indonesia went down by 23% to Rp433.53 billion, while demand deposits with other banks rose by 2% to Rp361.36 billion. Total loans less allowance

diberikan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai adalah Rp5.205,93 miliar, 18% lebih rendah dari Rp6.376,52 miliar per akhir 2015.

Elemen-elemen lain yang berkontribusi terhadap perubahan nilai aset total Bank di tahun 2016 adalah kenaikan 78% pada efek-efek menjadi Rp1.012,18 miliar, sementara terjadi penurunan 69% pada tagihan akseptasi menjadi Rp6,33 miliar.

for impairment losses reached Rp5,205.93 billion, 18% lower than Rp6,376.52 billion as at end of 2015.

Other components that contributed to the change in the Bank's total assets as at end of 2016 were: a 78% increase in securities, totaling Rp1,012.18 billion, while a drop of 69% was recorded in acceptance receivables, totaling Rp6.33 billion.

Liabilitas

Liabilities

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan / Growth		Description
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Liabilitas Segera	12.786	6.183	6.603	106,79%	Obligation Due Immediately
Simpanan Nasabah	6.312.303	7.183.830	(871.527)	-12,13%	Deposits from Customer
Simpanan dari Bank Lain	53.357	69.615	(16.258)	-23,35%	Deposits from Other Banks
Utang Akseptasi	10.342	20.597	(10.255)	-49,79%	Acceptance Payable
Utang Pajak	9.440	14.417	(4.977)	-34,52%	Taxes Payables
Liablitas Spot dan Derivatif	-	8	(8)	-100,00%	Spot and Derivative Liabilities
Pinjaman Subordinasi	79.946	81.800	(1.854)	-2,27%	Subordinated Loans
Liabilitas Lain-lain	30.099	41.171	(11.072)	-26,89%	Other Liabilities
TOTAL	**6.508.273**	**7.417.621**	**(909.348)**	**-12,26%**	**TOTAL**

Total liabilitas Bank per akhir 2016 mencapai Rp6.508,27 miliar, 12% lebih rendah dari Rp7.417,62 miliar per akhir 2015. Penurunan ini terutama berasal dari berkurangnya simpanan nasabah pihak ketiga sebesar 12%, dari Rp7.183,83 miliar di 2015 menjadi Rp6.312,30 miliar di tahun 2016.

Posisi liabilitas segera Bank per akhir 2016 adalah Rp12,79 miliar (naik 107% dari nilainya per akhir 2015), simpanan nasabah Rp6.312,30 miliar (turun 12%), simpanan dari Bank lain Rp53,36 miliar (turun 23%), utang akseptasi Rp10,34 miliar (turun 50%), utang pajak Rp9,4 miliar (turun 35%), pinjaman subordinasi Rp79,95 miliar (turun 2%), dan liabilitas lain-lain sebesar Rp30 miliar (turun 27%).

The Bank's total liabilities as at end of 2016 amounted to Rp6,508.27 billion or 12% lower than Rp7,417.62 billion as at end of 2015. This decrease was primarily owing to the decrease in the amount of third party deposits by 12%, from Rp7,183.83 billion in 2015 to Rp6,312.30 billion in 2016.

The Bank's obligations due immediately as at end of 2016 amounted to Rp12.79 billion (up 107% from its 2015 figure), total deposits of Rp6,312.30 billion (down 12%), deposit from other banks of Rp53.36 billion (down 23%), acceptance payables of Rp10.34 billion (down 50%), taxes payable of Rp9.4 billion (down 35%), subordinated loans of Rp79.95 billion (down 2%), and other liabilities of Rp30 billion (down 27%).

Ekuitas

Ekuitas

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

Uraian	2016	2015	Pertumbuhan / Growth		Description
1	2	3	4 = (2-3)	5 = (2-3)/3	1
Modal Saham	338.417	338.417	-	0,00%	Share Capital
Tambahan Modal Disetor-penuh	221.038	221.038	-	0,00%	Additional Paid in Capital-net
Saldo laba Ditentukan penggunaannya	71.770	65.084	6.686	10,27%	Retained earnings Appropriated
Saldo laba Belum Ditentukan penggunaannya	566.285	570.954	(4.669)	-0,82%	Retained earnings Unappropriated
TOTAL	**1.197.510**	**1.195.493**	**2.017**	**0,17%**	**TOTAL**

Jumlah ekuitas Bank BNP per akhir tahun 2016 adalah Rp1.197,51 miliar, atau 0,17% lebih tinggi dari Rp1.195,49 miliar per akhir 2015. Kenaikan pada ekuitas Bank BNP ini berasal dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp71,77 miliar, 10% lebih tinggi dari saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp65,08 miliar per akhir 2015, sedangkan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya turun 1% dari Rp570,95 miliar di tahun 2015 menjadi Rp566,29 miliar di tahun 2016.

Bank BNP's total equity as at end of 2016 was Rp1,197.51 billion, 0.17% higher than the figure as at end of 2015 of Rp1,195.49 billion. The increase in Bank BNP's equity was derived from appropriated retained earnings of Rp71.77 billion, 10% lower than 2015's appropriated retained earnings of Rp65.08 billion as at end of 2015. Meanwhile, unappropriated retained earnings went down by 1% from Rp570.95 billion as at end of 2015 to Rp566.29 billion as at end of 2016.

Analisis Arus Kas

Analysis of Cash Flows

dalam jutaan Rupiah

in million Rupiah

Uraian	2016	2015	Perubahan / Changes		Description
			Selisih / Difference	YoY	
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	255.730	(556.292)	812.022	145,97%	Net Cash From Operating Activities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	450.160	(53.199)	503.359	946,18%	Net Cash used in Investing Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(6.092)	(9.476)	3.384	35,71%	Net Cash From Financing Activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(200.521)	(618.967)	418.446	67,60%	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.501.407	2.120.375	(618.968)	-29,19%	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.300.886	1.501.407	(200.521)	-13,36%	Cash and Cash Equivalents at the End of Year

Pada awal tahun 2016, jumlah kas dan setara kas Bank adalah Rp1.501,41 miliar. Bank mencatat penurunan dalam kas dan setara kas senilai Rp200,52 miliar, sehingga per akhir tahun 2016 jumlah kas dan setara kas Bank mencapai Rp1.300,89 miliar.

At the start of 2016, total cash and cash equivalents of the Bank amounted to Rp1,501.41 billion. The Bank subsequently recorded a decrease in its cash and cash equivalents of Rp200.52 billion, and thus by the end of 2016 the Bank's cash and cash equivalents stood at Rp1,300.89 billion.

Kas dan setara kas Bank per akhir tahun 2016 terdiri dari kas senilai Rp88,12 miliar, giro pada Bank Indonesia senilai Rp433,53 miliar, giro pada bank lain senilai Rp361,36 miliar, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain senilai Rp417,88 miliar.

The Bank's cash and cash equivalents as at end of 2016 comprised cash of Rp88.12 billion, demand deposits with Bank Indonesia of Rp433.53 billion, demand deposits with other banks of Rp361.36 billion, and placements with Bank Indonesia and other banks of Rp417.88 billion.

Dari aktivitas operasi di tahun 2016 Bank mencatat kenaikan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar 146%.

In 2016 the Bank recorded net cash flow used in operating activities increase by 146%.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2016 meningkat 946% menjadi Rp450,16 miliar dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di tahun 2015 yang sebesar Rp53,20 miliar.

Net cash flow used in investing activities rose by 946% to Rp450.16 billion, from the net cash flow used in investing activities in 2015 of Rp53.20 billion.

Sementara itu di sisi pendanaan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, yaitu pembayaran dividen, pada tahun 2016 adalah Rp6,09 miliar, 36% lebih kecil dari pembayaran dividen tahun 2015, berkenaan dengan laba bersih Bank yang 88% lebih kecil di tahun buku 2016 daripada 2015.

Meanwhile, the net cash flow used in financing activity, namely for the payment of dividend, was Rp6.09 billion in 2016, smaller in amount than the 2015 dividend payment. This was in line with the 88% drop in the Bank's net income in 2016 compared to 2015.

Rasio Keuangan Penting

Key Financial Ratios

Uraian	2016	2015	Description
CAR	20,57%	18,07%	CAR
NIM	6,13%	5,18%	NIM
ROA	0,15%	0,99%	ROA
ROE	0,70%	5,71%	ROE
NPL (Gross)	5,31%	4,74%	NPL (Gross)
NPL (Neto)	4,07%	3,98%	NPL (Neto)
LDR	84,18%	90,17%	LDR
BOPO	98,52%	91,91%	BOPO

Margin Bunga Bersih

Margin bunga bersih, yang dihitung dengan membandingkan pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset produktif di tahun 2016 mencapai 6,13% naik dari 5,18% di tahun 2015. Kenaikan ini berasal dari kenaikan dalam pendapatan bunga bersih di tahun 2016 sementara total aset produktif di tahun 2016 mengalami penurunan. Di samping itu, Bank juga melakukan penyesuaian bunga atas simpanan berjangka, sehingga berdampak pada pendapatan bunga bersih.

Net Interest Margin

Net interest margin, which is the ratio of net interest income to the average total value of productive assets, reached 6.13% in 2016, up from 5.18% in 2015. This increase was owing to the greater amount of net interest income recorded in 2016, while total productive assets within the same period experienced a decline. In addition, there were adjustments to the interest rates for time deposits, thus affecting net interest margin.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO tahun 2016 adalah 98,52%, lebih tinggi daripada rasio BOPO tahun 2015 sebesar 91,91%. Faktor utama kenaikan BOPO adalah adanya peningkatan pada beban operasional lainnya terutama disebabkan oleh kenaikan biaya CKPN sebesar 143% di tahun 2016 sebagai upaya dalam menjaga kualitas rasio NPL.

Operating Expenses to Operating Revenues (BOPO) Ratio

The Operating Expenses to Operating Income (BOPO) Ratio reached 98.52%, higher than the BOPO Ratio in 2015 of 91.91%. The main factor causing this increase in BOPO Ratio was the 143% increase in allowance for impairment losses (CKPN) in 2016, as part of the Bank's measure to maintain NPL quality.

Imbal Hasil atas Aset

Nilai Imbal Hasil atas Aset (ROA) pada tahun 2016 adalah 0,15%, pada tahun 2015, sebesar 0,99%. Penurunan ROA ini disebabkan oleh turunnya perolehan laba sebelum pajak terhadap rata-rata total asetnya pada tahun 2016 dibandingkan di tahun 2015.

Return on Assets

Return on Assets (ROA) in 2016 was 0.15% while in 2015 ROA was 0.99%. The decrease in ROA was owing to lower income before tax expense divided by the average total assets in 2016 compared to the figure in 2015.

Imbal Hasil atas Ekuitas

Nilai Imbal Hasil atas Ekuitas (ROE) pada tahun 2016 adalah 0,70%. Pada tahun 2015, ROE tercatat sebesar 5,71%. Penurunan ROE ini disebabkan oleh turunnya perolehan laba bersih terhadap rata-rata modal intinya (*Tier 1*) pada tahun 2016 dibandingkan di tahun 2015.

Return on Equity

Return on Equity (ROE) in 2016 was 0.70%. In 2015, ROE stood at 5.71%. The decrease in ROE was owing to lower net income divided to the average Tier 1 amount in 2016, than the figure in 2015.

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum

Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* – CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional tercatat sebesar 20,57% pada tahun 2016, meningkat 2,50% dari tahun 2015 yang sebesar 18,07%.

Rasio Kecukupan Modal
Capital Adequacy Ratio

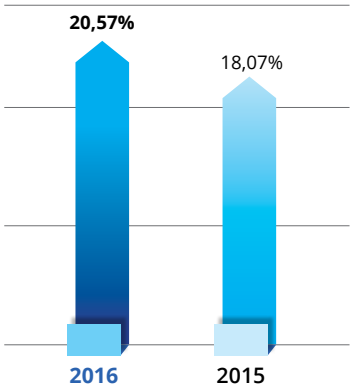

Total modal inti (*Tier 1*) mengalami sedikit penurunan sebesar Rp717 juta menjadi Rp1.181 miliar di tahun 2016. Bank BNP berada pada kategori BUKU 2 (Modal Inti di atas Rp1 triliun – 5 triliun) berdasarkan ketentuan otoritas.

Total Modal Bank BNP per 31 Desember 2016 adalah Rp1.260 miliar atau turun 2% dari Rp1.289 miliar per akhir 2015, akibat adanya amortisasi volume pinjaman subordinasi yang diakui sebagai modal pelengkap. Sementara itu, total ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) turun 14%, dari Rp7.132 miliar per akhir 2015 menjadi Rp6.127 miliar per akhir 2016, utamanya akibat penurunan dari volume aktiva kreditnya. Penurunan total ATMR yang lebih besar daripada penurunan total modal menjadi faktor dari peningkatan CAR pada tahun 2016, dan tetap jauh di atas ketentuan otoritas sebesar 8%.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas Bank tercermin dari rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio*—LDR) maupun rasio pinjaman terhadap total dana yang dihimpun (*Loan to Funding Ratio*—LFR). Bank BNP pada instrumen pendanaannya tidak mengeluarkan instrumen keuangan lainnya seperti *Negotiable Certificate of Deposit*/Surat Hutang, sehingga pendanaannya murni dari simpanan pihak ketiga. Dengan demikian, perhitungan LDR dan LFR adalah sama dan posisi pada akhir tahun 2016 tercatat 84,18%, turun 5,99% dari periode yang sama tahun 2015 yaitu 90,17%.

Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility Level

Capital Adequacy Ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) taking into account credit risk, market risk, and operational risk, was 20.57% in 2016, up by 2.50% from 2015 CAR figure of 18.07%.

Total Tier 1 Capital declined slightly by Rp717 million to Rp1,181 billion in 2016. Bank BNP is in the banking category of BUKU 2 (Banks with Tier 1 Capital between Rp1–5 trillion) based on the regulations set by the authorities.

Total capital of Bank BNP as at 31 December 2016 was Rp1,260 billion or 2% lower than Rp1,289 billion as at the end of 2015, due to the amortization of subordinated loans recognized as Tier 2 Capital. Meanwhile, total RWA (Risk Weighted Assets) dropped by 14%, from Rp7,132 billion as at end of 2015 to Rp6,127 billion as at end of 2016, mainly owing to the decline in loans volume. The increase in total RWA was greater than the decrease in total capital, and accordingly, Capital Adequacy Ratio (CAR) in 2016 improved from CAR in 2015, and remains well above the minimum limit of 8% set by the authorities.

Liquidity Ratios

The Bank's liquidity ratios are calculated as total loans divided by total deposits or commonly known as the Loan to Deposit Ratio (LDR), as well as total loans to total funding or the Loan to Funding Ratio (LFR). Bank BNP's funding instruments do not include other financial instruments such as Negotiable Certificate of Deposit or Bonds, and thus its funding was derived solely from third party funds. Therefore, Bank BNP's LDR and LFR are identical, with the position as at the end of 2016 standing at 84.18%, dropping by 5.99% from the 2015 figure of 90.17%.

Rasio Likuiditas Bank
Loan to Deposit Ratio

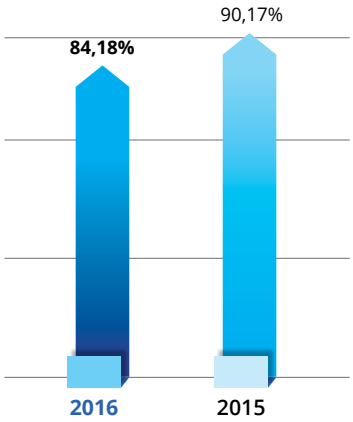

Rasio Kredit Bermasalah

Penyaluran dana melalui kredit oleh Bank BNP mencapai kira-kira 69% dari total aset yang dimiliki Bank. Dengan demikian Bank menghadapi risiko memburuknya kualitas aset akibat adanya kredit bermasalah. Hal ini diantisipasi oleh Bank dengan menerapkan pemberian kredit yang berhati-hati (*prudent*).

Per 31 Desember 2016, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loans* - NPL) Bank adalah 5,31% (bruto) dan 4,07% (netto), dibandingkan per 31 Desember 2015 masing-masing 4,74% (bruto) dan 3,98% (netto). Kenaikan NPL ini berasal dari meningkatnya jumlah kredit bermasalah yang dimiliki karena menurunnya kualitas kredit debitur yang disebabkan faktor kemampuan pengembalian pinjaman disertai dengan penurunan portofolio pinjamannya, namun angka ini berada di bawah ketentuan otoritas sebesar 5%, dan dengan demikian kualitas aset Bank BNP masih cukup aman.

Non-Performing Loans Ratio

Provision of loans by Bank BNP accounted for around 69% of the Bank's total assets. In light of this situation, the Bank faces the risk of declining assets quality due to the existence of non-performing loans. The Bank has anticipated this by conducting prudent lending at all times.

As at 31 December 2016, the Bank's non-performing loans ratio (NPL) stood at 5.31% (gross) and 4.07% (nett), compared to 4.74% (gross) and 3.98% (nett) as at 31 December 2015. The increase in NPL ratios was attributable to the rising amount of non-performing loans recorded by the Bank, owing to the decline in debtors' loan quality in line with their collectibility together with the decline in loan portfolio. However, these ratios were still below the maximum limit set by the authorities, i.e. 5%, and thus the Bank's asset quality has been deemed as financially sound.

Rasio Kredit Bermasalah Bruto
Non-Performing Loans Gross

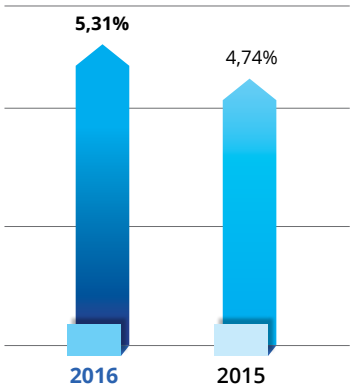

Rasio Kredit Bermasalah Netto
Non-Performing Loans Net

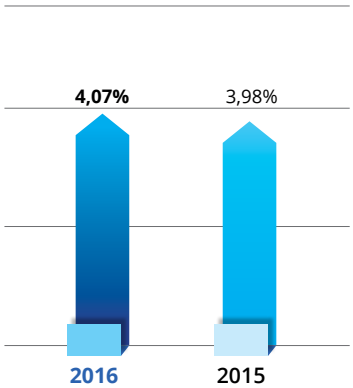

Perbandingan Target dan Realisasi 2016 dan Proyeksi 2017

Target dan realisasi kinerja keuangan Bank di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Comparison of 2016 Targets and Actual Achievements, and Financial Projections for 2017

The targets and actual achievements of the Bank's financial performance in 2016 are as follows:

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Uraian	RBB 2016 2016 Target	Realisasi 2016 / 2016 Realization	Pencapaian / Achievement (%)	Proyeksi 2017 / 2017 Projections	Description
Laporan Laba Rugi					**Income Statements**
Pendapatan Bunga	937.969	905.311	96,52%	901.147	Interest Income
Pendapatan Operasional Selain Bunga	89.100	41.146	46,18%	90.640	Non-Interest Operating Income
Beban Bunga	450.425	419.598	93,16%	344.071	Interest Expenses
Beban Operasi Selain Bunga	480.448	510.375	106,23%	569.397	Non-Interest Operating Expenses
Beban Tenaga Kerja	207.217	216.944	104,69%	227.700	Employment Expenses
Beban Umum, Administrasi, dan Lainnya	273.231	293.431	107,39%	341.697	General, Administrative & Other Expenses
Laba Operasional	96.196	16.485	17,14%	78.319	Operating Income
Laba Non-Operasional	249	(4.412)	-1.771,89%	-	Non-Operating Income
Laba Bersih Setelah Pajak	72.334	8.109	11,21%	58.739	Net Income
Neraca					**Balance Sheet**
Total Aset	9.415.104	7.705.782	81,84%	7.971.070	Total Assets
Pinjaman yang Diberikan	7.039.764	5.313.629	75,48%	5.763.288	Loans
Total Pendanaan	7.909.813	6.312.303	79,80%	6.475.605	Total Funding

Secara umum pencapaian kinerja keuangan belum menunjukkan pencapaian terhadap target Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2016. Hal ini disebabkan langkah prudensial yang diambil manajemen terkait dengan perbaikan seluruh rangkaian proses dan kualitas *monitoring*. Tidak tercapainya beberapa indikator terhadap target RBB 2016 berdampak pada pencapaian Laba periode 2016 yang berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Generally, the financial performance of the Bank did not achieve the targets stated in the Bank's Business Plan (RBB) for 2016. This was due to the prudential measures taken by the management concerning the improvement of the whole monitoring process and quality. The unfulfilled RBB targets for several indicators created an impact on the profit recorded in 2016 which was below target.

Penetapan target-target usaha tahun 2017 dilakukan berdasarkan pendekatan bisnis yang konvensional dengan menjalankan prinsip prudential banking. Sasaran strategi Bank BNP tahun 2017 adalah meningkatkan profitabilitas usahanya melalui penerapan kebijakan suku bunga yang konservatif, dengan mengacu pada suku bunga acuan. Bank BNP berencana untuk mencapai target laba bersih pada tahun 2017 yang lebih baik daripada tahun 2016.

The determination of 2017 business targets has been done based on a conventional business approach, by adhering to the principle of prudential banking. Bank BNP's 2017 strategic target is to increase profitability by implementing a conservative interest rate policy, using the reference interest rate as the base. Bank BNP plans to achieve a higher net income target in 2017 than in 2016.

Kenaikan/Penurunan Material dari Pendapatan Usaha/Bersih

Pada tahun 2016 pendapatan bersih Bank mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 87% atau menjadi Rp8,11 miliar dari sebelumnya Rp66,87 miliar pada tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban

Material Increase/Decline from Operating/Net Income

In 2016, the Bank's net income decreased significantly by 87% to Rp8.11 billion from Rp66.87 billion in 2015. This was due to the increase of other operational expenses by 28% in 2016. One of the causes of this increase was because

operasional lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 28% di tahun 2016. Salah satu penyebab dari kenaikan beban operasional lainnya karena Bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang cukup besar dalam rangka menjaga kualitas rasio NPL yang meningkat sebesar Rp41,62 miliar atau 143% dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp101,12 miliar pada tahun 2016.

the Bank had to form a substantially large allowance for impairment losses of financial assets in order to maintain the NPL ratio quality that increased by Rp41.62 billion or 143% from the same period in the previous year, to Rp101.12 billion in 2016.

Struktur Permodalan dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Struktur permodalan Bank BNP berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP, tanggal 10 Desember 2012, saat ini terdiri dari Modal Inti (*Tier 1*) dan Modal Pelengkap (*Tier 2*) dengan uraian sebagaimana tertera dalam perhitungan rasio kecukupan modal (CAR), diungkapkan secara kuantitatif sebagai berikut:

Capital Structure & Management Policy on Capital Structure

The capital structure of Bank BNP is governed by the Bank Indonesia Circular Letter No. 14/35/DPNP, dated 10 December 2012, to consist of Core Capital (Tier 1) and Supplementary Capital (Tier 2) with the description as stated in the Capital Adequacy Ratio (CAR), the quantitave disclosure thereof is as follows:

dalam jutaan Rupiah / in million Rupiah

Penjelasan	2016	2015	Description
Modal Inti (Tier 1)			**Tier 1 Capital**
Modal disetor	338.417	338.417	Paid in Capital
Tambahan modal disetor bersih	221.038	221.038	Additional Paid in Capital Net
Cadangan umum	71.770	65.084	General Reserve
Laba bersih tahun sebelumnya	558.177	504.087	Net Income of previous year
Laba bersih tahun berjalan	8.109	66.867	Net Income for the year
Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan & aset non-keuangan	(13.625)	(10.459)	Difference between allowance for uncollectible accounts and allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pajak tangguhan	-	-	Deferred taxes
Aset tidak berwujud lainnya	(3.227)	(3.658)	Other intangible assets
Jumlah	1.180.659	1.181.376	Total
Modal Pelengkap (Tier 2)			**Supplementary Capital (Tier 2)**
Cadangan umum atas aset produktif	50.484	46.353	General reserve of the productive assets
Pinjaman subordinasi	29.314	61.343	Subordinated loans
Jumlah Modal (Tier 1 dan Tier 2)	1.260.457	1.289.072	Capital Modal (Tier 1 & Tier 2)
Jumlah ATMR	6.127.141	7.132.317	Total ATMR
CAR setelah Risiko Kredit, Operasional, dan Pasar	20,57%	18,07%	CAR after the credit, operational, and market risk
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%	Capital Adequacy Ratio required

Pengungkapan Permodalan Bank secara Kualitatif, menyangkut unsur/instrumen permodalan yang diterbitkan oleh Bank dalam rangka menyokong permodalan diuraikan berikut ini:

Qualitative Disclosures of the Bank's Capital, involving elements/capital instruments issued by the Bank in order to bolster capital, are outlined below:

Instrumen Permodalan Bank BNP untuk Tier 1/Modal Inti terdiri dari Modal Disetor yang berdasarkan jumlah Saham Biasa yang telah diterbitkan oleh Bank BNP sebanyak 676.833.822 lembar dengan nominal Rp500,- (Rp338.416.941.000,- atau dibulatkan menjadi Rp338.417 juta).

Bank BNP Capital instrument for Tier 1/Capital consists of Paid-in Capital that is based on the number of Common Shares issued by Bank BNP as many as 676,833,882 shares with nominal value of Rp500,- (Rp338,416,941,000.- or rounded up to Rp338,417 million).

Tambahan Modal Bersih bersumber dari agio hasil emisi saham (selisih harga nominal saham perlembar dengan harga pelaksanaan pada saat emisi) setelah dikurangi keseluruhan Biaya Emisi Saham.

Komponen lainnya adalah pembentukan Cadangan Umum sebesar 10% dari laba Bersih Bank BNP selama ini terakumulasi, dan adanya Laba hasil usaha tahun sebelumnya yang tidak dibagikan pada tahun berikutnya disimpan sebagai Laba Ditahan (*retained earning*) atau Laba yang belum ditentukan tujuannya.

Sedangkan untuk Komponen Modal Pelengkap, selain Cadangan Umum atas Aset Produktif, juga terdapat Pinjaman Subordinasi dari ACOM Jepang dan USA, sebesar USD 5 juta dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Kebijakan pengelolaan modal bertujuan untuk memastikan bahwa Bank BNP memiliki modal yang kuat dalam mendukung strategi pengembangan usaha Bank saat ini dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa mendatang. Kebijakan ini juga disusun dengan memperhatikan persyaratan permodalan yang ditentukan oleh regulator. Pada tahun 2016, seluruh kebutuhan permodalan Bank dapat terpenuhi dari pertumbuhan modal secara organik. Bank BNP memandang tidak melakukan penambahan modal akan tetapi manajemen mewaspadai perkembangan makroekonomi, khususnya perbankan dengan risiko-risikonya yang dapat berdampak terhadap tergerusnya permodalan Bank, tentunya dengan memperhatikan masukan dan bimbingan dari otoritas.

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Bank tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal yang dilakukan di tahun 2016. Seluruh kegiatan investasi barang dalam bentuk penambahan mesin kantor, perlengkapan dan perabotan kantor dibiayai oleh Bank dalam mata uang rupiah.

Atas barang modal tersebut, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan pencurian dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 138.740.901.673,-.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Additional sources of additional paid-in capital Net proceeds of the shares (the difference between the nominal price per strip stock at an exercise price at the time of emission) net of issuance costs overall.

Other components are the establishment of General Preserve amounted to 10% of the accumulated Bank's Net profit, and theprofit of previous year which has not distributed and was kept as retained earnings or undetermined goal profit.

As for the supplementary capital components, in addition to General Reserves on Earning Assets, there is also a subordinatedloan of ACOM Japan and the USA, at $5 million for a period of 7 (seven) years.

Management's Policy on Capital Structure
The capital structure management policy has the purpose of ensuring that Bank BNP has a strong capital to support the current business development strategy as well as ensuring a sustainable growth in the future. This policy has also been formulated by taking into consideration the capital adequacy requirements determined by the regulators. In 2016, all capital requirements of the Bank were fully met through organic growth of capital. Bank BNP believes that it does not need any capital injection, however the management is keeping an eye on the prevailing macroeconomic developments, especially in the banking sector along with the associated risks that may result in the diminishing of the Bank's capital, taking into consideration recommendations and guidance from the authorities.

Material Commitments Related to Investments in Capital Goods

The Bank did not have any material commitments in relation to investments of capital in 2016. All activities related to the investment in capital goods involed either office machinery or office equipment, all of which were financed by the Bank in rupiah.

Such capital goods are covered by insurance against losses by fire and other risks with a total insurance coverage of Rp 138,740,901,673 (full amount) and Rp 131,009,120,709 (full amount).

The management of the Bank believes that the amount is adequate to cover possible losses of the fixed assets that have been insured against such risks.

Investasi Barang Modal

Selama tahun 2016, Bank telah melakukan investasi barang modal yang dibutuhkan untuk tujuan kegiatan Operasional Bank dengan jumlah biaya perolehan mencapai Rp 5.212.671.135,-. Kegiatan investasi barang modal tersebut dalam bentuk penambahan mesin kantor sebesar Rp 1.149.692.500,-, perlengkapan dan perabotan kantor sebesar Rp 4.062.978.635,-.

Investments in Capital Goods

In 2016 the Bank made an investment in capital goods required for the Bank's operational activities, with a total acquisition value of Rp 5,212,671,135. The capital goods included the addition of office machinery with the value of Rp 1,149,692,500, and office equipment with the value of Rp 4,062,978,635.

Komitmen dan Kontijensi

Bank BNP mempunyai komitmen dan kontijensi. Ikhtisar komitmen dan kontijensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak sebagai berikut:

Commitments and Contingencies

Bank BNP has certain commitments and contingencies. The summary of Bank BNP's commitments and contingencies stated in their contract values are as follows:

Komitmen dan Kontijensi

Commitments and Contingencies

dalam ribuan rupiah

(in Rp thousand)

Keterangan	2016	2015	Description
Tagihan Komitmen			Commitment Receivables
Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	689,559	Unsettled purchase of spot foreign currency
Jumlah tagihan komitmen	-	689,559	Total commitment receivables
Liabilitas Komitmen			Commitment Liabilities
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1,578,986,781)	(1,698,098,186)	Unused loan facilities
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	(689,250)	Unsettled sales of spot foreign currency
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan			Outstanding irrevocable letters of credit
Pihak ketiga	(19,481,351)	(11,457,000)	Third parties
Pihak berelasi	(26,877,100)	(26,776,363)	Related parties
Jumlah liabilitas komitmen	(1,625,345,232)	(1,737,020,799)	Total commitment liabilities
Jumlah liabilitas komitmen – bersih	(1,625,345,232)	(1,736,331,240)	Total commitment liabilities – net
Kontinjensi			**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi			Contingent Receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	72,751,876	46,491,759	Past due interest receivable
Liabilitas Kontinjensi			Contingent Liabilities
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			Guarantees issued in the form of:
Garansi penawaran Rupiah	(9,282,764)	(100,000)	Bid bonds – Rupiah
Garansi pelaksanaan Rupiah	(41,976,536)	(46,878,635)	Performance bonds – Rupiah
Garansi uang muka Rupiah	-	(100,000)	Advance payment bonds – Rupiah
Lain-lain Rupiah	-	-	Others – Rupiah
Jumlah liabilitas kontinjensi	(51,259,300)	(47,078,635)	Total contingent liabilities
Jumlah liabilitas kontinjensi –bersih	21,492,576	(586,876)	Total contingent liabilities – net
Lain-lain Titipan kliring	(51,635,212)	(95,329,770)	Others – Funds for clearing
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1,655,487,867)	(1,832,247,887)	Total contingent and commitment liabilities

Kebijakan Dividen

Kebijakan pembagian dan penetapan Dividen bagi Bank BNP adalah mutlak menjadi kewenangan Pemegang Saham, di mana Direksi hanya dapat mengusulkan formula perhitungan dan besarannya dan keputusan akhir terletak pada kesepakatan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pembagian Dividen diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan Pemegang Saham, kesehatan keuangan, dan pertumbuhan Bank, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Bank dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dalam Kebijakan Dividen yang dituangkan pada Prospektus Bank BNP saat melakukan aksi korporasinya, dinyatakan komitmen pembagian dividen tunai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dengan memperhatikan kondisi keuangan dan permodalan Bank saat itu.

Pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 untuk tahun Buku 2015 telah disepakati untuk membagikan dividen kepada para Pemegang Saham sebesar Rp 9 per lembar saham atau kurang lebih 9,11% dari hasil usaha tahun buku 2015 yaitu sebesar Rp 6.091.504.938 (enam miliar sembilan puluh satu juta lima ratus empat sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), dan sisanya dipertahankan untuk penguatan permodalan sebagai Laba Ditahan.

Informasi pelaksanaan pembagian dividen tercantum pada tabel berikut ini:

Dividend Policy

The policy for the determination and distribution of dividends in Bank BNP is the sole authority of the Shareholders, whereby the Board of Directors may only propose the formula for the calculation of its amount, and the final decision lies in the agreement of the Shareholders at the General Meeting of Shareholders.

Distribution of Dividends is arranged such that there is a good balance between the interests of Shareholders, and the Bank's financial health and growth, without compromising the financial soundness of the Bank and without prejudice to the right of the GMS to determine otherwise in accordance with the Articles of Association.

In the Dividend Policy as outlined in the Prospectus of Bank BNP at the time of its corporate action, it is declared that a cash dividend of at least 10% (ten per cent) will be distributed, taking into consideration the Bank's financial situation and capital at the time.

At the General Meeting of Shareholders in 2016 for FY 2015, it was agreed that dividends amounting to Rp 9 per share or about 9.11% from the income for the year 2015, amounting to Rp 6,091,504,938 (six billion ninety one million five hundred and four thousand nine hundred and thirty eight rupiah) be distributed to the Shareholders, and the remainder be retained for the purpose of strengthening the Bank's capital as retained earnings.

Information on the dividend distribution is provided the following table:

No	Tahun Buku / Fiscal Year	Laba Bersih (Rp Juta) / Net Income (Rp Million)	Jumlah Dividen (Rp Juta) / Total Dividend (Rp Million)	% Dividend / Dividend Payout Ratio	Dividen Tunai per Saham / Cash Dividends per Share	Jumlah Lembar Saham (ribu) / Number of Shares (thousand)
1	2000	12.201	9.000	73,76%	60	150.000
2	2001	18.238	5.550	30,43%	37	150.000
3	2002	18.245	9.000	49,33%	60	150.000
4	2003	21.263	9.497	44,66%	60	158.275
5	2004	28.044	9.971	35,55%	63	158.275
6	2010	51.085	4.748	9,29%	11	416.513
7	2011	68.146	7.081	10,39%	17	416.513
8	2012	85.430	8.799	10,30%	13	676.833
9	2013	105.234	10.829	10,29%	16	676.833
10	2014	96.532	9.476	9,82%	14	676.833
11	2015	66.867	6.092	9,11%	9	676.833

Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

Bank BNP pada tanggal 2 Mei 2013 telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 260.320.724 lembar saham dari 17 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.150 (nilai penuh) per saham.

100% dana hasil PUT III tersebut telah habis digunakan sebagai modal kerja untuk penyaluran dan pemberian kredit dan dilaporkan pada pelaksanaan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2014.

Dengan demikian untuk tahun-tahun berikutnya, Bank BNP tidak memiliki kewajiban lagi untuk melaporkan hal tersebut.

Actual Use of Public Offering Proceeds

Bank BPN on 2 May 2013 conducted Rights Issue III for the issuance of Preemptive Rights (HMETD) as many as 260,320,724 shares, starting from 17 May 2013 up to 23 May 2013, with offering price of Rp 1,150 (full amount) per share.

The entire proceeds (100%) from the Rights Issue III have been used up for working capital for lending activities, as reported at the Annual General Meeting of Shareholders for FY 2014.

Thus for the subsequent years Bank BNP have not had any obligation to report on such use of public offering proceeds.

Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai

Bank BNP sekalipun sebagai Bank Devisa, namun belum melakukan transaksi berikut turunannya, dan sepanjang tahun 2016 Bank tidak melakukan transaksi derivative atau lindung nilai apapun.

Derivatives And Hedging

Although it is a foreign exchange bank, Bank BNP did not conduct any derivative or hedging transactions nor was involved in such transactions.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan

Hingga tahun 2016 Bank BNP tidak menerapkan program kepemilikan saham oleh manajemen dan karyawan, namun sebagai realisasi dari kepatuhan terhadap ketentuan di Pasar Modal, Bank BNP telah memenuhi jumlah pemegang saham minimum sebagai perusahaan terbuka yaitu sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham yang telah dipenuhi pada bulan Oktober 2016, di mana pemegang saham baru tersebut merupakan karyawan Bank BNP, serta kepemilikannya bukan merupakan/berasal dari program MSOP/ESOP namun perolehan murni dari perdagangan di Pasar Saham.

Berikut ini adalah informasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh Direksi, Komisaris dan karyawan:

Management & Employee Share Ownership Program

Up until 2016 Bank BNP did not conduct any management and employee share ownership program (MSOP/ESOP). However, to comply with the regulations in the capital market, Bank BNP has fulfilled the minimum required number of shareholders for a public company, i.e. at least 300 (three hundred) shareholders. This condition was fulfilled in October 2016, whereby the new shareholders were employees of Bank BNP, and their share ownership did not come from the MSOP/ESOP, but purely from trading in the stock market.

The following is is the share ownership by the Directors, Commissioners, and employees of the Bank:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Saham Number of Shares	Persentase Percentage
Tatang Hermawan	Komisaris/Commissioner	12.001.000	1,77%
Takeru Agawa	Presiden Direktur/President Director	100	0,00%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur/Director	100	0,00%
Markus Sugiono	Direktur/Director	100	0,00%
Trie Karjati Wibowo	Direktur/Director	100	0,00%
Karyawan		29.600	0,00%

Informasi Keuangan Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Di tahun 2016 tidak terdapat informasi keuangan yang luar biasa dan jarang terjadi di Bank.

Informasi Material mengenai Investasi, Divestasi, Restrukturisasi Utang/Modal

Di tahun 2016, tidak terdapat transaksi material mengenai investasi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Selama tahun 2016, Bank BNP tidak melaksanakan transaksi yang bersifat materiil dan mengandung benturan kepentingan, namun terdapat transaksi antara Bank BNP dengan pihak-pihak berelasi/terafiliasi dengan Bank diantaranya Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan. Transaksi tersebut meliputi kegiatan pokok/utama Bank BNP seperti pemberian pinjaman dan penghimpunan dana serta beberapa transaksi sewa-menyewa yang telah dipenuhi sesuai ketentuan sebagaimana terurai dalam Catatan 37 atas Laporan Keuangan Bank BNP Tahun 2016 (dalam ribuan rupiah).

Rare & Extraordinary Financial Events

In 2016 there were no rare or extraordinary financial events taking place in the Bank.

Material Information Regarding Investments, Divestments, and Debt/ Capital Restructuring

In 2016 there were no material transactions involving investments, divestments, mergers, acquisitions, or debt/ capital restructuring.

Material Transactions with Conflict of Interest or Transactions with Related Parties

In 2016 Bank BNP did not perform any material transactions with conflict of interest. However, certain transactions took place between Bank BNP and related parties, such as between the Bank and the Shareholders, the Commissioners, the Directors, Executive Officers, and Employees. These transactions covered the main activities of Bank BNP, such as lending and funding, and a number of lease transactions compliant with the prevailing regulations, as stated in Note 37 to Bank BNP's 2016 Financial Statements (stated in thousands of rupiah).

Keterangan	2016	2015	Description
Aset			Assets
Kredit	41,294,197	51,135,480	Loans
Tagihan Akseptasi	-	2,802,949	Acceptance Receivables
Liabilitas			Liabilities
Simpanan	508,696,165	688,924,843	Deposits
Giro	194,995,186	233,762,725	Demand Deposits
Tabungan	38,377,215	39,215,189	Saving Deposits
Deposito Berjangka	275,323,764	415,946,929	Time Deposits
Utang Akseptasi	4,011,504	7,738,254	Acceptance Payables
Pinjaman Subordinasi	79,945,815	81,800,190	Subordinated Loans
Letter of Credit/Usance	26,877,100	26,776,363	Letter of Credit/Usance
Bank Garansi	-	1,500,000	Bank Guarantees

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Di tahun 2016, Bank BNP tidak mengalami kejadian penting yang berpengaruh cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Bank, yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen No R.7.1/001/02/17 tanggal 28 Februari 2017 atas laporan keuangan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan telah

Subsequent Facts and Information

In 2016 there were no significant events experienced by the Bank that resulted in a material change to the Bank's financial condition and business results, which occurred subsequent to the date of the Independent Auditor's Report No. R.7.1/001/02/17 dated 28 February 2017 on the financial statements for the period of 1 (one) year ended 31 December

diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, dengan pendapat "wajar tanpa pengecualian".

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan

Di tahun 2016 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku yang berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Bank.

Aspek Pemasaran

Untuk menyiasati persaingan di pasar industri perbankan, strategi bisnis dan pemasaran yang diterapkan sangat penting, selain untuk memberikan fokus *target market* yang akan disasar, pengkajian secara komprehensif juga dapat mendukung pencapaian strategi pemasaran yang terintegrasi, yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam menerapkan strategi pemasaran, Bank BNP telah banyak melakukan hal-hal yang didorong untuk mencapai target yang ditetapkan dengan efektif dan efisien, beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Penerapan model bisnis yang mengutamakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkesinambungan melalui peningkatan penghimpunan dana produk konvensional yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan Berjangka/Deposito, serta pertumbuhan penyaluran dana yang memiliki kualitas kredit yang sehat. Pengembangan model bisnis ini juga memperhatikan produktivitas dari tiap insan BNP.
2. Kebijakan suku bunga disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku seperti SBDK, Suku Bunga Bank Indonesia (*7-Day Repo Rate*) dengan memperhitungkan kondisi internal dan eksternal Bank, diantaranya COF dan COM, serta tingkat suku bunga pasar (pesaing).
3. Melakukan optimalisasi jaringan kantor melalui penutupan kantor, membuka kantor baru yang berlokasi strategis, perubahan fungsi dan tetap melakukan penetrasi pasar bagi penyaluran kredit termasuk kredit KTA dan tetap meningkatkan kerjasama strategis dengan mitra-mitra kerja yang produktif yang dapat meningkatkan perolehan *fee based income* juga brand *awareness* Bank BNP.
4. Melakukan service campaign TOUCH yang bertujuan untuk memberikan standar layanan yang lebih baik melalui layanan yang tulus dan mengena di hati nasabah.
5. Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru dalam upaya mendukung akselerasi bisnis Bank BNP dan meningkatkan layanan dan kepuasan kepada nasabah. Ini termasuk melakukan penetrasi pasar melalui peluncuran beberapa produk dan aktivitas baru yang

2016, as audited by the KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, which resulted in an "unqualified opinion".

Changes In Accounting Principles Bearing Significant Impact On Financial Performance

In 2016 there were no changes to the prevailing accounting principles that had any significant impact on the Bank's financial performance.

Marketing Aspect

To cope with the increasingly tight competition in the banking industry, every business and marketing strategy to be implemented must carefully consider the focus on the target market and comprehensively reviewed, in order to achieve an integrated marketing strategy, which in turn will help towards the achievement of the predetermined targets.

In implementing its marketing strategies, Bank BNP has conducted numerous measures that are driven towards achieving the predetermined targets in an effective and efficient manner. The measures include:

1. Application of a business model that promotes healthy and sustainable growth through increased funding from conventional products, consisting of demand deposits, savings, and time deposits, as well as growth in lending with sound credit quality. The development of this business model also considers the productivity of every BNP personnel.
2. Policy to adjust interest rates to the applicable provisions, such as the prime lending rate and BI's 7-Day Repo Rate, by taking into account internal and external conditions, such the Bank's COF and COM, as well as the interest rates offered in the market by competitors.
3. Optimization of branch office network by closing certain branch offices, opening new strategically located offices, changing functions and continuing to penetrate the lending market including for unsecured loans, and maintaining strategic partnerships with productive business partners to increase fee-based income and also brand awareness of Bank BNP.
4. TOUCH service campaign, aimed at providing higher standards of service through sincere and genuine service for the customers.
5. Development of New Products and Activities in support of Bank BNP's business acceleration, customer service, and improvement in level of satisfaction. This includes penetrating the market through the launching of several new products and activities that are accompanied with

disertai dengan kegiatan promosi, sehingga *brand awareness* Bank BNP semakin meluas.
6. Memantau *customer needs* dan juga menganalisis pergerakan bisnis dari kompetitor lainnya, agar Bank BNP dapat terus berkembang sesuai dengan persaingan industrinya.
7. Pembukaan *Counter* dan *Booth* di area target pemasaran.
8. Khusus untuk pemasaran Kredit Tanpa Agunan (MIRAI+), saat ini kegiatan *Direct Sales* selain melalui kantor pemasaran khusus KTA juga dilakukan melalui beberapa rangkaian pameran (*exhibition*) diantaranya *Car Free Day*, Pameran KTA langsung ke lokasi calon nasabah.
9. Pemanfaatan Sosial Media, seperti Facebook dan Twitter. Tujuan Bank BNP memakai sosial media untuk pemasaran dikarenakan Facebook dan twitter saat ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya di negara kita tapi juga dunia. Selain banyak digunakan untuk bersosialisasi, tidak sedikit juga masyarakat yang menggunakan sosial media untuk berbisnis.

their associated promotional activities, so that Bank BNP's brand awareness becomes enhanced.
6. Monitoring of customer needs and analyze the business of competitors, so that Bank BNP can continue to grow in keeping with the competition in the industry.
7. Opening of Counters and Booths in marketing target areas.
8. For the marketing of Collateral Free Loan product (MIRAI+) in particular, Direct Sales activities are not only performed in KTA marketing offices, but also through a series of exhibition, such as Car Free Day or direct visits to potential customers.
9. Use of social media, such as Facebook and Twitter. Bank BNP's aim to make use of social media for marketing strategy is because Facebook and Twitter have become essential needs among the people nationally and globally. Aside from being used to facilitate communication, these social media are also utilized to facilitate businesses.

Prospek Usaha

Sepanjang tahun 2016 kinerja keuangan Bank BNP mengalami perlambatan pertumbuhan bisnisnya dan membukukan laba yang rendah. Hal ini terkait dengan strategi Bank BNP untuk membuat cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar berkaitan dengan kecenderungan meningkatnya NPL. Hal ini terkait dengan kondisi perekonomian mikro dan makro yang masih belum terlalu kondusif.

Di tahun 2017, sejalan dengan harapan akan membaiknya kondisi dan aktivitas ekonomi serta pelonggaran kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia, pertumbuhan bisnis pada sektor perbankan diharapkan dapat meningkat. Prospek membaiknya perekonomian global diperkirakan ikut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, masih ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, antara lain ketidakpastian kenaikan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR), volatilitas harga komoditas, serta tren perlambatan kinerja ekonomi Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 diperkirakan sebesar 3,4% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai 5,1% - 5,5%.

Proyeksi makro yang cukup optimis sangat berpengaruh terhadap Rencana Bisnis Bank di tahun 2017 akan tetapi manajemen masih memfokuskan pada *internal improvement* yang bertujuan memiliki landasan yang kuat dengan menetapkan langkah-langkah strategis dalam upayanya memantapkan *positioning* Bank BNP sebagai Bank

Business Prospect

Throughout 2016, Bank BNP's financial performance slowed down and thus it posted a low net income. This was attributable to Bank BNP's strategy to prepare a larger allowance for impairment losses to address the issue of increasing NPL trend. This condition was related to the micro- and macroeconomic conditions that had not been conducive enough.

In 2017, in line with the expectations of better economic conditions and activities as well as the macroprudential policy easing by Bank Indonesia, business growth in banking sector is expected to improve. The prospect of global economic recovery is expected to bolster national economic growth. However, there are several risks that the Bank must focus on, among others, uncertainties surrounding the Fed Funds Rate (FFR) hike, volatility of commodity prices, and the decelerating trend of China's economic performance. The global economy is expected to grow by 3.4% in 2017, while Indonesia's economic performance is expected to expand by 5.1%-5.5%.

Macroeconomic projections that are rather optimistic greatly affect the Bank's Business Plan for 2017. However, the management shall remain focused on conducting internal improvements, which aim to create a strong foundation to establish strategic steps in the effort of strengthening the positioning of Bank BNP as a sound medium-sized bank. This

menengah yang sehat, diantaranya dengan peningkatan peran dan fungsi manajemen risiko, penerapan G*ood Corporate Governance*, pengupayaan permodalan dan aktiva yang sehat, peningkatan *internal control*, perbaikan model dan proses bisnis serta operasional, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan IT, optimalisasi jaringan kantor yang ada dan pengembangan produk aktivitas disertai dengan *monitoring* terhadap PAB yang telah ada.

Arah Kebijakan Bank

1. Tetap mendukung visi Bank BNP untuk lebih berperan aktif dalam pembiayaan pasar ritel di Indonesia, termasuk tetap menjaga pembiayaan kepada sektor UMKM.
2. Fokus pada perbaikan kualitas bisnis melalui mekanisme perbaikan proses kredit dan operasi yang lebih mengedepankan *Risk Based Approach*. Selain itu juga BNP sudah membuat 1 Divisi yang khusus menangani Debitur yang berpotensi menjadi bermasalah.
3. Menjaga tingkat kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
4. Menjaga dan terus berupaya untuk memperbaiki tingkat kesehatan Bank, *risk profile* dan indikator nilai komposit yang baik secara khusus dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Memastikan fungsi intermediasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan perolehan laba yang positif.
6. Pada sisi aktivitas dan produk perbankan, menyesuaikan pada ketentuan yang diatur pada Kelompok BUKU 2.
7. Dalam hal pelayanan kepada nasabah, Bank BNP terus mengupayakan untuk melengkapi fitur-fitur perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta berpotensi untuk menjaring pasar yang baru dan meningkatkan kualitas layanan.
8. Mengupayakan optimalisasi jaringan kantor disesuaikan dengan strategi bisnis sehingga dapat mendorong upaya efisiensi dan efektivitas bisnis.
9. Mendukung upaya akselerasi bisnis, *improvement model* dan proses bisnis operasional dengan melakukan perubahan struktur organisasi bisnis dan operasional.

Tantangan Indonesia di Tahun 2017

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 mendatang akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan, baik yang datang dari eksternal atau global maupun domestik, diantaranya:

1. Faktor Eksternal/Global
   a. Pertumbuhan ekonomi global yang masih diperkirakan tumbuh lambat.

will be achieved among others by an increase in the roles and functions of risk management, implementation of Good Corporate Governance, efforts to maintain strong capital and sound assets, increased internal control, improvement to the business model, processes and operations, enhanced human resources competence, further development of IT functions, optimization of the network of existing branch offices, and development of products and activities accompanied by close monitoring of the existing PAB.

The Bank's Policy Direction

1. Continue to support Bank BNP's vision to play a more active role in financing to the retail market in Indonesia, including maintaining financing to the MSME sector.
2. Focus on the improvement of business quality through credit process improvement and operations that emphasize the Risk Based Approach. In addition, BNP has established 1 special division to handle the non-performing customers.
3. Maintain capital adequacy in accordance with the provisions stipulated in the Indonesian Banking Architecture (API).
4. Maintain and continually strive to improve the soundness of the Bank, satisfactory risk profile and composite risk indicators particularly as regards implementation of good corporate governance.
5. To ensure that the intermediation runs in accordance with the provision and the positive profit result.
6. As regards banking activities and products, adjust to the provisions stipulated for the BUKU 2 banking category.
7. As regards customer service, Bank BNP continues to introduce new features that fit the needs of its banking customers, as well as those with the potential to capture new markets.
8. Promote office network optimization tailored to the business strategy so as to improve business efficiency and effectiveness.
9. Support the efforts of business acceleration, improvement model and operational business processes by making changes to the organization structure of the business and operations.

Challenges in Indonesia for 2017

The Indonesian economic condition in 2017 will continue to be fraught with tough challenges, both coming from the external or global, and domestic fronts, including:

1. Global/External Factors
   a. Global economic growth is expected to slow down further.

b. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika yang diperkirakan terjadi bulan Desember 2016 sehingga memunculkan ketidakpastian di pasar dan mempengaruhi perkembangan global.
c. Pertumbuhan Tiongkok yang diprediksi melambat.

2. Faktor Internal/Domestik
   a. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan utang luar negeri yang mengalami kenaikan.
   b. Aliran masuk modal asing dan kebijakan pengampunan pajak yang diharapkan dapat mendorong penguatan Rupiah terhadap dolar AS.
   c. Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia terkait dengan rangkaian kebijakan pemerintah dalam perbaikan iklim investasi dan implementasi proyek infrastruktur yang lebih efektif.
   d. Pertumbuhan ekonomi global yang terus melemah dan berdampak pada ekonomi dan fiskal Indonesia.
   e. Kestabilan politik di Indonesia dalam melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2017.
   f. Pertumbuhan kredit yang melambat disertai dengan risiko peningkatan kredit bermasalah.

Langkah Strategis

Sebagai upaya untuk mendukung dan mencapai komitmen atas tujuan dan sasarannya pada tahun mendatang, Bank BNP melakukan beberapa upaya/langkah strategis diantaranya:

1. Penerapan tata kelola perbankan yang sehat (*Good Corporate Governance*), perbaikan Risk Compliance Governance, peningkatan peran dan fungsi Manajemen Risiko;
2. Mengupayakan permodalan dan aktiva yang sehat;
3. Membuat Team Work Out and Recovery Division yang fokus untuk menangani kredit yang berpotensi bermasalah melalui restrukturisasi dan langkah-langkah lainnya;
4. Penerapan model bisnis yang sesuai dengan kekuatan BNP;
5. Peningkatan internal kontrol: *dual control*, waskat, dan *three lines of defense*;
6. Perbaikan proses bisnis dan operasional: sarana, implementasi, dan *review*;
7. Peningkatan kompetensi SDM dan mewujudkan organisasi yang sehat;
8. Pengembangan Teknologi Informasi;
9. Optimalisasi jaringan kantor yang ada;
10. Produk dan Aktivitas Baru dan pengembangan produk dan aktivitas yang ada.

Dalam upaya mengedepankan produk Kredit Tanpa Agunan (MIRAI+) menjadi produk unggulan Bank BNP ke depannya,

b. The Fed Funds Rate (FFR) hike, expected to be done in December 2016, has created uncertainties in the market and affected global economic growth.
c. China's economic growth is expected to decelerate.

2. Domestic/Internal Factors
   a. Slowing economic growth and rising foreign debt level.
   b. Foreign capital inflow and the tax amnesty policy are expected to strengthen the Rupiah's exchange rate against the US dollar.
   c. Investors' positive perception on the Indonesian economic prospect in relation to the government's set of policies to improve investment climate and implementation of more effective infrastructure projects.
   d. Global economic growth that is continuing to slow down and affecting Indonesia's economic and fiscal situation.
   e. Political stability in Indonesia as many regional elections will be taking place at the same time in 2017.
   f. Slowing growth in lending, accompanied by an increase in non-performing loans.

Strategic Measures

As an effort to support and achieve the commitment on its goals and objectives for the upcoming year, Bank BNP has prepared strategic measures, including:

1. Implement good corporate governance (GCG) in banking, improve Risk Compliance Governance, increase Risk Management roles and functions;
2. Promote healthy capital structure and assets;
3. Establish Work Out Team and Recovery Division that focus on handling the potentially troubled credits, through restructuration and other measures;
4. Apply a business model in accordance with the strengths of BNP;
5. Improve internal control: dual control, waskat, and the three lines of defense;
6. Improve business processes and operations: facilities, implementation, and review;
7. Improve HR competencies and foster a healthy organization;
8. Develop Information Technology;
9. Optimize the existing office network;
10. Develop new products and activities and maintaining the existing products and activities.

In order to promote the Unsecured Loans product (MIRAI+) to become the prime product of Bank BNP in the future,

maka Bank BNP pada awal tahun 2016 telah menggunakan JKT 48 sebagai *brand ambassador* produk MIRAI+ ke depannya.

Dengan kondisi dan perspektif sebagaimana diuraikan di atas, pada tahun 2017 mendatang Bank BNP memproyeksikan pertumbuhan bisnisnya sebesar 7% dengan tetap menerapkan prinsip *Prudential Banking*, peningkatan *internal control* dan proses bisnis yang baik.

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Mencermati perkembangan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BNP, pengelolaan risiko *inherent* ke delapan risiko yang dihadapi oleh Bank selama periode Q4-2016 secara komposit tergolong ***Low to Moderate***, dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Control System*) dari ke delapan risiko tergolong ***Satisfactory***.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank BNP, di samping kondisi ekternal perusahaan/makro ekonomi, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank bersumber dari Risiko Kredit tergolong cukup tinggi dan memerlukan perhatian dengan segera, terkait dengan hal sebagai berikut:

- Portfolio penyediaan dana didominasi oleh eksposur kredit yang moderat.
- Terdapat konsentrasi penyediaan dana yang cukup signifikan.
- Penyediaan dana memiliki kualitas *moderate to high*.
- Portofolio penyediaan dana cukup terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal.

Permasalahan yang dihadapi yang diprediksi berpotensi dan dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha Bank BNP secara umum adalah antara lain:

a. Dengan kondisi makroekonomi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar debitur, maka Bank terekspose mengalami peningkatan rasio NPL *Gross* dan *Net*. Peningkatan rasio NPL dimungkinkan terjadi karena penurunan kualitas kredit dan penurunan porfolio kredit (secara portofolio tidak tumbuh), sehingga secara rasio NPL akan berpotensi mengalami peningkatan.
b. Bank juga dihadapi oleh penurunan kualitas portfolio kredit mikro yang meningkatkan NPL dari perburukan/ penurunan kolektibilitas kredit Mikro.
c. Kondisi persaingan perbankan baik dalam hal pemberian suku bunga kredit, kecepatan proses persetujuan kredit, proses layanan, sehingga Bank berpotensi kehilangan potensial debitur dan debitur pindah ke bank lain.

Bank BNP in early 2016 has appointed JKT48 as brand ambassador of MIRAI+ product.

With the conditions and perspectives as described above, in 2017 Bank BNP is projecting a business growth rate of 7%, by applying Prudential Banking principle, improving its internal control, and continuing its proper business processes.

Issues with Significant Potential to Affect Business Continuity

Scrutinizing the development of Bank BNP's business activities, the management of inherent risks encompassing eight risks faced by the Bank throughout the Q4-2016 as a composite is considered Low to Moderate, with the Risk Control System encompassing eight risks considered Satisfactory.

By taking into account Bank BNP's business activities, in addition to the external/macroeconomic conditions surrounding the Bank, the possibility of losses faced by the Bank arises from the relatively high Credit Risk which requires immediate attention, in regards to the following:

- Lending portfolio is dominated by a moderate level of credit exposure.
- There is a significant concentration of lending.
- Lending quality is considered Moderate to High.
- Lending portfolio is relatively affected by changes in external factors.

Issues that are currently faced and are predicted to potentially affect Bank BNP's business continuity in general are as follows:

a. With the current macroeconomic situation that may affect debtors' ability to repay their loans, the Bank is exposed to a risk of increasing NPL gross and NPL net ratio. The increase in NPL ratios is expected to happen owing to the decline in lending quality and the decline in lending portfolio quality (as the portfolio does not grow), and thus the NPL ratios will potentially increase.
b. The Bank is also facing the risk of the decline in micro-lending portfolio quality, which increases NPL from the deteriorating collectibility of micro loans.
c. The competition in the banking industry, both in terms of lending interest rate and speed of loan facility applications approval, service processes, result in the Bank's potentially facing a loss of potential debtors and having some of its existing debtors switch to other banks.

d. Peningkatan *inherent* risiko operasional dalam bidang perkreditan masih diperlukan adanya upaya peningkatan pemahaman proses pembelajaran dan pembahasan terhadap debitur bermasalah serta potensi debitur bermasalah melalui *Vintage Analysis*. Hal ini telah dilakukan melalui diskusi dengan divisi terkait untuk dapat diketahui penyebab permasalahan dan tindakan mitigasi yang diperlukan.
e. Peningkatan risiko *inherent* dapat berakibat pada peningkatan risiko kredit dan berdampak pada risiko lain seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko rentabilitas dan risiko stratejik yang pada akhirnya berdampak pada penilaian GCG dan Tingkat Kesehatan Bank.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, *assessment* dan kajian yang telah dilakukan manajemen Bank BNP dengan tetap berupaya untuk meningkatkan portfolio kredit (volume) dengan kualitas kredit yang baik/sehat untuk dapat mengimbangi laju *run off* dan peningkatan portfolio debitur bermasalah, melalui upaya dan kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan fungsi *monitoring* dan kontrol terhadap potensi dan indikasi penurunan kualitas kredit baik secara individual maupun secara portfolio, melalui mekanisme meeting koordinasi yang dilakukan setiap bulan dan rapat panel perkreditan (*joint meeting* BOD dan BOC serta keseluruhan fungsional perkreditan) yang dilakukan setiap tiga bulanan.
- Melakukan identifikasi terhadap penanganan debitur besar secara lebih awal, yang berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit.
- Melakukan proses identifikasi risiko kredit melalui Vintage Analysis terhadap debitur yang mengalami tunggakan untuk debitur baru di bawah 1 tahun sejak dilakukan pengikatan kredit.
- Meningkatkan fungsi Komite Strategi Anti *Fraud*, untuk melakukan identifikasi terhadap potensi/indikasi *fraud* terhadap debitur bermasalah baik dari data internal (hasil pemeriksaan SKAI dan hasil identifikasi Divisi Manajemen Risiko) maupun eksternal bank (pengaduan nasabah/debitur).
- Meningkatkan *Early Warning Signal* dalam upaya pemantauan terhadap meningkatnya rasio kredit kualitas rendah (kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5) yang disebabkan peningkatan pada kolektibilitas 2.
- Bank telah melakukan *write off* terhadap portfolio kredit bermasalah yang sudah tidak memiliki harapan untuk dilakukan penagihan atau penyelesaian biasa.
- Melakukan monitoring secara intensif terhadap proses dan target *Recovery Asset*.
- Melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah melalui penggunaan jasa pihak ketiga atau pengacara.

d. The increase in inherent operational risk in lending still requires a better understanding in the learning process and discussion of troubled debtors and potential troubled debtors via Vintage Analysis. This has been carried out via discussions with related divisions to seek the root causes of the issues and the mitigative measures required.

e. The increase in inherent risk may result in the increase in lending risk, and may affect other risks, such as legal risk, reputation risk, profitability risk, and strategic risk, which in turn may eventually affect the result of GCG Bank Soundness Level evaluation.

To address the abovementioned issues, assessments and reviews are conducted by Bank BNP's management by continuing to improve lending portfolio in terms of both volume and lending quality, in addition to compensate the run off rate and increase in the troubled debtors portfolio. To that end, the following measures and policies have been set up:

- Strengthening monitoring and control functions regarding the potentials and indications of declining lending quality in terms of both individuals and as a portfolio, via coordination meetings conducted monthly and credit panel meetings (joint meetings of BOD and BOC and the entire lending unit), once every three months.
- Performing early identification of large debtors that have the potential to experience a decline in lending quality.
- Performing credit risk identification process through Vintage Analysis on debtors that have outstanding repayment of debts, for new debtors (less than 1 year since the loan approval).
- Strengthening the function of Anti-Fraud Strategy Committee to identify any potentials/indications of fraud involving troubled debtors, either from internal data (Internal Audit's results and Risk Management Division's identification results) or from external data (complaints/grievances reported by customers/debtors).
- Strengthening the Early Warning Signal mechanism in order to monitor the increase in low-quality lending ratio (collectibility levels of 2, 3, 4, and 5) caused by the increase in collectibility level 2.
- The Bank has written off a certain portion of the non-performing loans portfolio that has been deemed unresovable.
- Performing intensive monitoring on Asset Recovery processes and targets.
- Resolving non-performing loans by employing third parties or lawyers.

Perubahan Undang-Undang yang Berdampak terhadap Kinerja Keuangan

Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016, secara umum berdampak positif terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia.

Pelaksanaan undang-undang tersebut telah dapat meningkatkan likuiditas perbankan, meningkatkan portofolio simpanan atau investasi pada produk perbankan, serta meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat, khususnya terhadap bank yang ditunjuk Pemerintah sebagai gateway penampung dana repatriasi.

Namun demikian, pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Bank BNP, karena Bank BNP bukan merupakan Bank gateway yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Changes to Regulations with Impacts on Financial Performance

The Law No. 11/2016 on Tax Amnesty, issued by the Government of the Republic of Indonesia on 1 July 2016, in general brought about a positive impact on the development of the Indonesian banking industry.

The implementation of said law has increased banking liquidity, enlarged savings and investment portfolio in banking products, as well as increasing lending to the public, and especially affecting banks that have been designated by the Government to become the gateway banks to receive the repatriated funds.

Nonetheless, the implementation of the Tax Amnesty Law has no significant impact on the financial performance of Bank BNP, as Bank BNP is not one of the gateway banks appointed by the Government.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

144 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Implementation

145 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Roadmap

146 Penilaian Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Assessment

153 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance Structure and Mechanism

217 Laporan Manajemen Risiko
Risk Management Report

232 Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Code of Conduct and Corporate Culture

234 Kasus Hukum dan Sanksi Administratif
Litigations and Administrative Sanctions

236 Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Konsumen
Commitment to Consumer Protection

240 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

243 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

244 Kepatuhan Perpajakan
Tax Compliance

245 Kebijakan Strategi *Anti-Fraud*
Policy on Anti-Fraud Strategy

247 Pakta Integritas
Integrity Pact

248 Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank
Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

250 Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan *Roadmap* GCG OJK
Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Implementation

Bank BNP menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* – GCG) dengan baik dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan terkini secara disiplin guna mendukung terciptanya kinerja Bank BNP yang optimal.

Seiring Bank BNP melaksanakan kepatuhannya terhadap segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan di Indonesia, penerapan GCG dijadikan sebagai dasar bagi Bank BNP untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Kelima prinsip dasar GCG terus-menerus ditanamkan dan dijalankan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Prinsip-prinsip dasar GCG tersebut adalah:

Bank BNP implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) in its business and is continuously and with discipline adjusting the practical implementations thereof with the latest developments in the field, to ensure the optimum performance of the Bank.

As Bank BNP complies with all the regulations and laws in the banking industry prevailing within the jurisdictions of the Republic of Indonesia, the implementation of GCG becomes the foundation for the Bank to garner trust from the public, customers, and all stakeholders.

Bank BNP conducts its business activities based on the five principles of GCG. These five GCG principles are:

Prinsip / Principle	**Deskripsi /** Description	**Implementasi /** Implementation
Transparansi Transparency	Merupakan keterbukaan Perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material dan relevan dalam melakukan kegiatan usaha. The Company's transparency in reporting material and relevant information in conducting business activities.	Bank BNP memberikan informasi secara jelas, tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bank BNP provides information in a clear, timely, and acurrate manner, to be easily accessed by all stakeholders, in line with the prevailing regulations

Prinsip / Principle	**Deskripsi /** Description	**Implementasi /** Implementation
Akuntabilitas Accountability	Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. A clarity of function, structure, system, and accountability of the Company's organ in order to conduct its management effectively.	Pengelolaan Bank BNP terlaksana secara efektif melalui pengawasan setiap kinerja organ perusahaan dengan baik. The management of Bank BNP is conducted effectively through the supervision of each of the Company's organs' performance.
Pertanggungjawaban Responsibility	Merupakan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Management of the Company in accordance with the laws and regulations as well as principles of sound and healthy business.	Bank BNP secara konsisten memegang teguh prinsip prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Bank BNP consistently upholds the principles of sound and healthy management of the Bank, and maintains its responsibility to the public.
Independensi Independency	Merupakan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Professional management of the Company without any influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations as well as the principles of sound and healthy business.	Bank BNP dikelola secara profesional dan independen tanpa adanya benturan kepentingan. Bank BNP is managed professionally and independently without any conflict of interest.
Kewajaran Fairness	Merupakan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Equal treatment of stakeholders' rights based on the prevailing laws and regulations.	Bank BNP senantiasa memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham dengan baik, sesuai asas kewajaran dan kesetaraan. Bank BNP pays attention to the interests of stakeholders and shareholders at all times, in accordance with the principle of fairness.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Roadmap

Implementasi GCG yang berkelanjutan disadari oleh Bank BNP bahwa hal tersebut sangat penting dalam menghadapi daya saing yang semakin kompetitif. Untuk itu, suatu peta arah tata kelola perusahaan disusun oleh Bank BNP sesuai acuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia agar menjadi warga nergara korporat yang baik dalam melaksanakan penerapan GCG.

Pada tahun 2016, Bank BNP telah melaksanakan apa yang diarahkan di dalam peta arahan tata kelola perusahaan.

Bank BNP realizes that sustainable GCG implementation is key to facing competition in the field. Bank BNP compiled GCG implementation into a corporate governance roadmap, in accordance with the references issued by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, in order to become a good corporate citizen in terms of GCG implementation.

In 2016, Bank BNP implemented the directives stated in the corporate governance roadmap. The GCG Infrastructure

Pedoman Infrastruktur GCG disusun untuk dijadikan sebagai panduan GCG bagi Bank BNP dan akan menjadi rujukan penting bagi seluruh elemen Perusahaan dalam penerapan GCG di setiap aktivitas Perusahaan. Internal Perusahaan terlibat penuh atas penyusunan pedoman ini khususnya pada *top level* perusahaan, mengingat pendekatan *top down* masih menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menerapkan GCG.

Sedangkan untuk infrastruktur yang meliputi Ketersediaan SDM, Kompetensi yang cukup, Manual GCG *Code, Board Manual*, Mekanisme Penilaian, Penyediaan Kertas Kerja dan Skoring, *Corporate Values*, dan lain-lain masih terus-menerus dikembangkan.

Berikut merupakan diagram *roadmap* GCG Bank BNP:

Guideline was established to be used as a GCG guideline for Bank BNP and as a crucial reference for all elements of the Company in implementing GCG across all of the Company's activities. The Company's internal parties are fully engaged in the formulation of this guideline, in particular the top level of the Company, considering that the top down approach remains the most effective approach to implementing GCG principles.

Infrastructural elements related to the human resources availability, adequate competencies, GCG Code Manual, Board Manual, Assessment Mechanisms, Provision of Working Papers and Scoring, Corporate Values, and others are constantly being enhanced and developed.

The diagram of Bank BNP's GCG roadmap is as follows:

Penilaian Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Assessment

Sebagai wujud peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, Bank secara bertahap melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG. *Assessment* tersebut juga bertujuan mengawasi dan mengevaluasi implementasi GCG serta wujud Bank dalam mengembangkan GCG yang berkelanjutan.

Berikut ini merupakan *self assessment* GCG yang dilaksanakan Bank BNP, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dengan memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG melalui peran pengawasan yang aktif dan efektif, serta memberi masukan/rekomendasi kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank BNP.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memastikan bahwa operasional dan usaha Bank BNP telah diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang berjalan sangat efektif.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, dengan memastikan Bank BNP telah memiliki semua Komite yang dipersyaratkan sesuai ketentuan regulator, dan

As a form of improving the quality of GCG, Bank periodically conducts an assessment (self-assessment) on 11 (eleven) Factors of GCG Implementation Assessment. It also aims to monitor and evaluate GCG implementation as well as the the development of sustainable GCG.

Self Assessment of GCG conducted by Bank BNP is as follows:

1. The duties and responsibilities of the Board of Commissioners, by ensuring GCG implementation through an active and effective supervision, as well as providing advice or recommendation to the Directors with respect to the Company's interest in accordance with the complexity of Bank BNP's business.
2. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, by ensuring that Bank BNP's operations and business have been implemented in accordance with an effective execution of duties and responsibilities.
3. The completion and implementation of the Committees' duties, by ensuring that Bank BNP has all the Committees required in accordance with the regulations, and has

telah melaksanakan fungsi serta tugasnya secara optimal dan efektif dalam memberikan rekomendasi yang digunakan sebagai acuan Dewan Komisaris.

4. Penanganan benturan kepentingan, dengan memastikan Bank BNP telah memiliki kebijakan dan prosedur penanganan benturan kepentingan, yang dilakukan agar tidak merugikan dan mengurangi keuntungan Bank BNP serta terdokumentasikan dengan baik untuk setiap keputusan, yang dilengkapi dengan risalah rapat.
5. Penerapan fungsi kepatuhan, dengan memastikan Bank BNP terus menerus melakukan penerapan fungsi kepatuhan terhadap aktivitas operasional maupun terhadap usaha Bank, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalisasi pelanggaran.
6. Penerapan fungsi audit intern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank BNP telah berjalan lebih efektif, independen dan objektif. Pelaksanaan Audit Intern senantiasa berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank).
7. Penerapan fungsi audit ekstern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi Audit Ekstern berjalan dengan independen serta telah sangat efektif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan, dengan menghasilkan kualitas dan cakupan hasil audit yang sangat baik.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, dengan memastikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah lebih efektif melakukan peran dan fungsinya dalam sistem pengendalian intern yang lebih komprehensif seperti melakukan pengkinian kebijakan, prosedur dan penetapan limit, sesuai dengan regulasi, tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, dengan memastikan bahwa Bank BNP telah memiliki kebijakan tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK, diversifikasi penyediaan dana yang cukup merata serta pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan secara independen.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal, dengan memastikan Bank BNP telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh, termasuk penyampaian laporan pelaksanaan GCG kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Bank yang mampu menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen.

conducted its functions and duties optimally and effectively by providing recommendations for reference to the Board of Commissioners.

4. Handling of conflicts of interest, by ensuring that Bank BNP has established policies and procedures for handling conflicts of interest in order not to harm and reduce the profit of Bank BNP, and in a way that is well-documented regarding each decision, complete with the minutes of meetings.
5. Implementation of compliance function, by ensuring that Bank BNP continuously applies the compliance function on its operational activities and to its business, in order to be in accordance with the applicable regulations and minimize the occurrence of violations.
6. Implementation of internal audit function, by ensuring that the Internal Audit function in Bank BNP has been executed effectively, independently and objectively. Internal Audit implementation always refers to the standards in the SPFAIB (Standards for the Implementation of Internal Audit Function in Banks).
7. Implementation of external audit function, by ensuring that the External Audit function is conducted independently and effectively in accordance with the regulations, producing excellent quality of results within the scope given in relation to the audit.
8. Implementation of risk management including internal control system, by ensuring that the risk management function is conducted as per its role and function effectively within a more comprehensive internal control system, such as updating policies, procedures and limit determination, in accordance with the regulations, purpose, and complexity of the Bank's business.
9. Provision of funds to related parties and large exposures by ensuring that Bank BNP has a written policy regarding the provision of funds to related parties and provision for large exposures. There has been no violation of BMPK, diversification of equitable fund provision, and decision-making in the provision of funds conducted independently.
10. Transparency of financial and non-financial conditions of the Bank, GCG implementation report, and internal report, by ensuring that Bank BNP has been transparent in providing information regarding its financial and non-financial conditions to the public in a timely, complete, accurate, current, and holistic manner, including the submission of GCG reports to the shareholders and other stakeholders, with the support of the Management Information System of the Bank that is able to provide data and information for the management's decision-making.

11. Rencana strategis Bank, dengan memastikan penyusunan RBB Bank BNP dilakukan dengan realistis dan telah memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip prudent dan azas perbankan yang sehat dan sesuai dengan visi dan misi Bank serta rencana korporasi Bank.

Self assessment tersebut dilakukan Bank secara komprehensif dan terstruktur yang digabungkan ke dalam 3 (tiga) aspek governance, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkelanjutan dilakukan secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali oleh *Corporate Secretary* sebagai tahap *preliminary* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 bahwa *corporate secretary* membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) dan dibahas secara kolektif pada rapat Komite Kepatuhan. Di tahun 2016 Bank BNP telah melakukan penilaian dengan bantuan sistem aplikasi, untuk mempercepat dan mempermudah proses penilaian.

1. Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.
2. Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

3. Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Bank BNP telah melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG untuk periode 2016 dan memperoleh Peringkat 2 (BAIK).

11. The Bank's strategic plan, by ensuring that the preparation of Bank's Business Plan (RBB) of Bank BNP is conducted realistically and with due consideration to external and internal factors, principle of prudence, principle of healthy banking, and in accordance with the vision and mission of the Bank as well as the Bank's corporate plan.

The self-assessment is conducted by the Bank comprehensively and structurally, combining three (3) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process and is carried out once every six months by the Corporate Secretary as the preliminary stage, as stipulated in the OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 which states that the corporate secretary must assist the Board of Directors and Board of Commissioners in ensuring good corporate governance (GCG) implementation, and this is discussed collectively at the Compliance Committee meetings. In 2016 Bank BNP began to make use of an application to conduct the self-assessment in a more speedy and convenient manner.

1. Assessment of governance structure is aimed at assessing the structure and infrastructure of the Bank's governance, so that GCG implementation process produces outcomes that are in line with the expectations of the Bank's stakeholders.
2. Assessment of governance process is aimed at assessing the efficacy of the implementation of GCG principles supported by an adequate governance structure and infrastructure of the Bank, so that this produces outcomes that are in line with the expectations of the Bank's stakeholders.
3. Assessment of governance outcomes is aimed at assessing the quality of the outcome that meets the expectations of the Bank's stakeholders, which is the result of implementation of GCG principles supported by an adequate governance structure and infrastructure of the Bank.

Bank BNP conducted a self-assessment of the implementation of GCG principles for the period of 2016 and obtained the Score of 2 (GOOD).

LAMPIRAN IV
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum

ATTACHMENT IV
Bank Indonesia Circular No. 15/15/DPNP on Good Corporate Governance (GCG) Implementation for Commercial Banks

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)

Nama Bank : PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
Posisi : Desember 2016

SELF ASSESSMENT REPORT ON IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Bank Name: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
Position: December 2016

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG
Self Assessment Report on Implementation of GCG

	Peringkat Score	**Definisi Peringkat /** Scoring Definition
Individual	2	**Baik**: Mencerminkan Manajemen Bank BNP telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank / **Good**: Reflecting that Bank BNP's management has implemented GCG properly in general terms. This is demonstrated by adequate fulfillment of the GCG principles. Any weaknesses found in the GCG implementation were generally not significant and thus were able to be addressed by normal course of action by the Bank's management.
Konsolidasi Consolidation	-	-

Analisis / Analysis

Pada tahun 2016, Bank BNP telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu TARIF yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang mencakup 3 (tiga) aspek *governance* (*Structure, Process dan Outcome*) secara umum yang direfleksikan dalam 11 (sebelas) faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah dilakukan Bank dengan Baik.	In 2016 Bank BNP implemented GCG principles based on the five basic principles, i.e. TARIF, classified into a governance system that covers three governance aspects (Structure, Process, and Outcome), that are generally reflected in eleven factors for GCG Implementation Assessment, which resulted in an assessment score of Good.
Berdasarkan pada hasil analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure, Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. *Governance Structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan cukup memadai, bilamana terdapat kekurangan masih dapat diatasi dengan cara normal oleh manajemen Bank. 2. *Governance Process* tata kelola pada pelaksanaan GCG secara umum sudah berjalan sesuai dengan struktur dan infrastukturnya, dalam hal masih terjadi beberapa kelemahan dalam proses pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena ekses dari perbaikan kualitas proses yang sedang dan tengah dijalankan oleh manajemen Bank BNP, sehingga masih ditemui *human error/ fraud*/kesalahan proses. 3. *Governance Outcome* tata kelola pada hasil dari aspek *governance process* masih belum memadai dan belum mencapai target/hasil yang diharapkan sebagaimana pada struktur dan infrastruktur (*governance structure*). Hal ini tercermin dari deviasi pencapaian kinerja dibandingkan dengan target, penurunan kualitas aset, tidak tumbuhnya bisnis yang berujung pada perolehan hasil usaha yang rendah.	Based on the self assessment result analysis conducted by the Bank on the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome aspects on each of the eleven factors for GCG Implementation Assessment, the following conclusions have been made: 1. There is an adequate and complete Governance Structure across all factors considered in the GCG Implementation Assessment. Any weaknesses found could be addressed via normal course of action by the Bank's management. 2. The Governance Process in the overall GCG implementation has taken place in line with the existing structure and infrastructure. Any weaknesses found were owing to the excess of quality improvement processes currently undertaken by the Bank's management, and thus it might result in human errors/frauds/ process errors. 3. The Governance Outcome as a result of the governance process has not been adequate and has not achieved the expected targets in terms of the governance structure and infrastructure. This is reflected in the deviation of performance achievement against the target, decline in asset quality, and business stagnation resulting in a low business profitability.
Kinerja tata kelola perusahaan yang diinisiasi oleh manajemen menunjukkan upaya yang terus-menerus dari seluruh perangkat Perusahaan yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan yang semakin baik, sehingga Bank beralasan kuat perbaikan dalam sisi pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah Baik.	The corporate governance performance initiated by the management showed a continuous effort by all elements of the Company, and this is expected to demonstrate a stronger improvement so that the Bank has a solid reason that improvements in the corporate governance implementation of the Bank have been Good.

Prinsip dan Rekomendasi Tata Kelola Perusahaan

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pedoman tata kelola adalah konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pedoman tata kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang diharapkan dapat diterapkan oleh Perusahaan Terbuka untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola.

Bank BNP selaku perusahaan terbuka telah menerapkan prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman tata kelola sebagaimana dimaksud mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran SEOJK, antara lain sebagai berikut:

Principles and Recommendations of Corporate Governance

Good corporate governance principles in the governance guideline provide the foundational concept for good corporate governance in line with the international best practices. Recommendations on the implementation of aspects and principles of good corporate governance in the governance guideline are a set of standards for the implementation of aspects and principles of good corporate governance, expected to be implemented by public companies in their corporate governance.

As a public company, Bank BNP has implemented the principles and recommendations of corporate governance as stipulated in the OJK Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 on Implementation of Corporate Governance Guideline for Public Companies, and the OJK Circular (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 on Good Corporate Governance Guideline.

The corporate governance guideline as mentioned above covers five aspects, eight principles, and 25 recommendations for the implementation of aspects and principles of good corporate governance as stated in the governance guideline prescribed by the SEOJK. It includes the following:

	Prinsip & Rekomendasi Principles & Recommendations	**Sudah Dipatuhi/Dijelaskan** Comply/Explain
A.	**Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham** **Relationship of the Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights**	
Prinsip/ Principle	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Enhancing the Value of General Meeting of Shareholders (GMS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The Public Company has a means or technical procedures for voting both in an open and closed manner, that uphold independence and interest of the shareholders.	Telah dipenuhi Complied with
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.	Telah dipenuhi Complied with
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Minutes of the GMS are made available on the Public Company's website for at least one year.	Telah dipenuhi Complied with
Prinsip/ Principle	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Enhancing the Quality of Communications of the Public Company with Shareholders or Investors.	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a communications policy to deal with shareholders or investors.	Pokok-pokok kebijakan komunikasi dalam tahap finalisasi. Points in the communications policy are being finalized.

	Prinsip & Rekomendasi Principles & Recommendations	**Sudah Dipatuhi/Dijelaskan** Comply/Explain
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company discloses its communications policy to deal with shareholders or investors, on its website.	Sedang dalam proses. In process.
B	**Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** **Board of Commissioners Functions and Roles**	
Prinsip/ Principle	Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris. Strengthening the Board of Commissioners Membership and Composition.	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the Public Company's conditions.	Telah dipenuhi Complied with
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the Board of Commissioners composition takes into account the aspect of diversity in expertise, knowledge, and experience required.	Telah dipenuhi Complied with
Prinsip/ Principle	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Increasing the Quality of Board of Commissioners Execution of Duties and Responsibilities.	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance.	Telah dipenuhi Complied with
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Telah dipenuhi Complied with
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding resignation of members of the Board of Commissioners should they be involved in financial crimes.	BOC telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri, namun untuk yang mengatur khusus mengenai kejahatan keuangan masih dalam tahap penyusunan. BOC has a policy on resignation, however an exclusive policy for resignation due to involvement in financial crime is currently being developed
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the committee executing the Nomination & Remuneration function has a succession policy in place for the nomination of members of the Board of Directors.	Telah dipenuhi dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Complied with, through the Remuneration and Nomination Charter.
C.	**Fungsi dan Peran Direksi** **Board of Directors Functions and Roles**	
Prinsip/ Principle	Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi. Strengthening the Board of Directors Membership and Composition.	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the Public Company's conditions and effectiveness in decisionmaking.	Telah dipenuhi Complied with
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors composition takes into account the aspect of diversity in expertise, knowledge, and experience required.	Telah dipenuhi Complied with
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors that are in charge of finance and accounting have expertise and/or knowledge in accounting.	Telah dipenuhi dan disesuaikan dalam Board Manual Complied with, Board Manual adjusted accordingly

	Prinsip & Rekomendasi Principles & Recommendations	Sudah Dipatuhi/Dijelaskan Comply/Explain
Prinsip/ Principle	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Increasing the Quality of Board of Directors Execution of Duties and Responsibilities.	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance.	Telah dipenuhi Complied with
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to evaluate the Board of Directors performance is disclosed in the Public Company's Annual Report.	Telah dipenuhi Complied with
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding resignation of members of the Board of Directors should they be involved in financial crimes.	BOD telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri, namun untuk yang mengatur khusus mengenai kejahatan keuangan masih dalam tahap penyusunan. BOD has a policy on resignation, however an exclusive policy for resignation due to involvement in financial crime is currently being developed.
D.	**Partisipasi Pemangku Kepentingan** **Stakeholders Participation**	
Prinsip/ Principle	Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan. Enhancing the Aspect of Corporate Governance via Stakeholder Engagement.	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. The Public Company has a policy in place to prevent insider trading.	Masih dalam tahap penyusunan Currently being prepared
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *Anti-Fraud*. The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy.	Telah dipenuhi (kebijakan strategi Anti-Fraud) Complied with (anti-fraud strategic policy)
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy on the selection and enhancement of capacity of suppliers or vendors.	Telah dipenuhi Complied with
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors' rights.	Masih dalam tahap penyusunan Currently being prepared
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. The Public Company has a whistleblowing system policy.	Telah dipenuhi Complied with
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. The Public Company has a policy to provide long term incentive to the Board of Directors and the employees.	Telah dipenuhi Complied with
E.	**Keterbukaan Informasi** **Information Disclosure**	
Prinsip/ Principle	Meningkatkan pelaksaaan keterbukaan informasi. Improving Information Disclosure.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology in a wide sense, beyond the use of website, as media for information disclosure.	Telah dipenuhi Complied with
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership of at least 5% (five percent), aside from the disclosure of the ultimate recipient of profits based on the Public Company's share ownership through the majority shareholders and controlling shareholders.	Telah dipenuhi Complied with

Struktur & Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Structure & Mechanism

Struktur GCG di Bank BNP disusun berdasarkan peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan terkait lainnya yang sejalan dengan praktik-praktik terbaik. Struktur GCG Bank memastikan pelaksanaan GCG berjalan dengan sistematis melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas.

Bank BNP's GCG structure was prepared based on the regulations of Bank Indonesia, Financial Service Authority (OJK), Articles of Association of the Company, and other relevant regulations that are in line with the best practices in the field. The GCG structure ensures that GCG implementation is systematic, through the clear division of roles and responsibilities.

Struktur GCG Bank BNP terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris, Fungsi Audit Intern, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Pengendalian Internal, dan Sekretaris Perusahaan. Setiap bagian dari struktur ini harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank BNP's GCG structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Board of Directors, Committees assisting the Board of Commissioners, Internal Audit, Compliance Function, Internal Control Function, and Corporate Secretary. Each part of this structure should conduct its respective functions in accordance with the applicable laws and regulations.

Rapat Umum Pemegang Saham

Organ tertinggi di Perusahaan yang memegang seluruh kewenangan yang tidak terdapat pada Direksi dan Dewan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melalui RUPS Tahunan (RUPST), Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank BNP kepada para pemegang saham dengan pembahasan mengenai strategi, kebijakan, hasil-hasil usaha dan hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Bank BNP juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) sewaktu-waktu jika diperlukan.

General Meeting Of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ within the Company which holds certain authority not conferred to neither the Board of Directors nor the Board of Commissioners. Through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), the Board of Directors and the Board of Commissioners report and are held accountable for the performance of Bank BNP to the shareholders, through the discussion on strategies, policies, business results and other important matters, including the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners and the Directors. Bank BNP can also conduct Extraordinary General Meetings of Shareholders (EGMS) at any time when deemed necessary.

Selama tahun 2016, Bank BNP menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2016, Bank BNP held Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders, with the details as follows:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diadakan pada tanggal 27 Juni 2016 dengan hasil keputusan sebagai berikut:

General Meeting of Shareholders (GMS)

An Annual General Meeting of Shareholders was held on 27 June 2016, with the following resolutions:

Mata Acara 1 / Agenda 1		
Keputusan	Resolution	**Realisasi /** Actualization
Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2016-2018, serta Laporan Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan pengawasan atas jalannya Perseroan oleh Direksi.	Approved the Directors' Report regarding the activities of the Company for the year ended 31 December 2015 and the Bank's Business Plan for 2016–2018, as well as the Board of Commissioners' report regarding the supervision of the management of the Company by the Board of Directors.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 2 / Agenda 2		
Menyetujui Neraca dan Perhitungan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan Neraca Perseroan untuk tahun buku 2015.	Approved the Company's Balance Sheet and Profit for the year ended 31 December 2015, and fully absolved the responsibility (acquit et de charge) of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and management actions, as long as these actions are reflected in the Company's Balance Sheet for the fiscal year of 2015.	Telah direalisasikan Actualized
Mata Acara 3 / Agenda 3		
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp. 66.866.856.514,- (Enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat belas Rupiah) dengan cara sebagai berikut: a. Membagikan Dividen Tunai kepada pemegang saham sebesar Rp. 9,-/lembar saham; b. Membentuk Cadangan Umum sebesar Rp 6.686.000.000,- (Enam miliar enam ratus delapan puluh enam juta Rupiah) atau sama dengan +/- 10% dari hasil usaha tahun buku 2015 sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; c. Sisanya sebesar Rp 54.089.351.576,- (Lima puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah) digunakan untuk menambah Saldo Laba Ditahan Perseroan; d. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa tindakan yang dikecualikan, termasuk untuk mengumumkannya di media massa.	Approved the use of the Company's net profit for the fiscal year of 2015 amounted to Rp 66,866,656,514 (sixty six billion eight hundred and sixty six million six hundred and fifty six thousand five hundred and fourteen Rupiah), in the following manner: a. Distribution of cash dividends to shareholders amounting to Rp9/share; b. Establishment of general reserve amounting to Rp 6,686,000,000 (six billion six hundred and eighty six million Rupiah) or equal to about 10% of the profit for the year 2015 in accordance with Article 70 paragraph 1 of the Limited Liability Company Law No. 40/2007; c. The remaining total of Rp 54,089,351,576 (fifty four billion eight nine million three hundred and fifty one thousand five hundred and seventy six Rupiah) to be used to increase the Company's Retained Earnings; d. Authorized the Directors to conduct all actions deemed necessary in accordance with the above details in line with the prevailing regulations, without exception, including to announce it in the media.	Telah direalisasikan Actualized
Mata Acara 4 / Agenda 4		
a. Memberikan bonus kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pencapaiannya dalam tahun buku 2015 dengan total maksimal sebesar Rp. 2.296.623.000,- (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPH 21, yang pemberiannya hanya dilakukan setahun satu kali dan menjadi Beban Usaha di Tahun Buku 2016; b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan butir (1) dimaksud.	a. Provided bonuses to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their achievements in 2015 with a total of Rp 2,296,623,000 (two billion two hundred and ninety six million six hundred and twenty three Rupiah), inclusive of PPH 21 Income Tax, only provided one time per year and recognized as Operating Expenses in the fiscal year of 2016; b. Conferred authority to the Board of Directors to implement resolution (1) as above.	Telah direalisasikan Actualized
Mata Acara 5 / Agenda 5		
a. Menyetujui Perubahan Remunerasi dan/ atau Tunjangan Lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam bentuk pemberian gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya maksimal secara keseluruhan Rp. 15.192.000.000,- (lima belas miliar seratus sembilan puluh dua juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Juni 2016; b. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan butir (1) dimaksud.	a. Approved the changes to the remuneration and/or other benefits for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the form of salary/honorarium and/or other benefits, which now amounts to a maximum of Rp 15,192,000,000, (fifteen billion one hundred and ninety two million Rupiah) per year starting in June 2016; b. Conferred authority to the Directors to conduct all actions deemed necessary in accordance with the implementation of point (1) above.	Telah direalisasikan Actualized

Mata Acara 6 / Agenda 6		
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Peseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan Umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tahun 2016 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya.	Approved the conferment of authority to the Board of Directors to appoint a public accounting firm that will audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year of 2016 as well as to determine the honorarium and other requirements for the appointment.	Telah direalisasikan Actualized

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Bank BNP menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 19 Februari 2016 dengan hasil keputusan RUPSLB sebagai berikut:

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Bank BNP held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 19 February 2016, with the following resolutions:

Keputusan	Resolution	Realisasi / Actualization
1. Menyetujui pengangkatan Sdr. Eiichiro Sakai sebagai Direktur, sehingga Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Michio Atsuda Komisaris : Tatang Hermawan Komisaris Independen : Karel Tanok Komisaris Independen : Bachtiar Alam Direksi Presiden Direktur : Takeru Agawa Direktur : Kevin Cahyadi Tatang Direktur : Markus Sugiono Direktur : Eiichiro Sakai Direktur Independen : Trie Karjati Wibowo	1. Approved the appointment of Eiichiro Sakai as Director, so the management of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the fourth Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year of 2018 becomes as follows: Board of Commissioners: President Commissioner : Michio Atsuda Commissioner : Tatang Hermawan Independent Commissioner : Karel Tanok Independent Commissioner : Bachtiar Alam Board of Directors Director : Takeru Agawa Director : Kevin Cahyadi Tatang Director : Markus Sugiono Director : Eiichiro Sakai Independent Director : Trie Karjati Wibowo	Telah direalisasikan Actualized
2. Menyetujui penyesuaian jumlah remunerasi dan atau tunjangan lainnya yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pergantian pengurus ini menjadi total kurang lebih Rp. 14.052.000.000,-/tahun, dari semula Rp. 13.499.000.000,-/tahun atau naik 4,10% dari keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2015 yang lalu.	2. Approved the changes to the remuneration and/or other benefits for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors in the form of salary/honorarium and/or other benefits, which now amounts to Rp14,052,000,000/year, up from Rp 13,499,000,000/year or an increase of 4.10% from the resolution of the EGMS on 23 November 2015.	Telah direalisasikan Actualized
3. Memberikan kuasa kepada Mario Yahya selaku Corporate Secretary Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut di dalam suatu Akta Notaris tersendiri dan memberitahukannya kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai maksud tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.	2. Conferred authority to Mario Yahya, the Corporate Secretary of the Company, to take all measures necessary in line with the change in the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not limited to declaring it in a separate Notarial Deed and informing it to the authorities and performing other actions required to achieve the purpose stated above, without exception.	Telah direalisasikan Actualized

Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau Bank, atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah yang saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau memiliki saham perusahaan dan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung disebut Pemegang Saham Pengendali.

Pemegang saham pengendali di Bank BNP dimiliki oleh 2 (dua) institusi keuangan yang berasal dari negara Jepang yaitu ACOM CO., LTD. (ACOM) dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) dilakukan dengan mengakuisisi saham Bank BNP sebanyak 75,50% pada tanggal 17 Desember 2007, sehingga menjadikan dua perusahaan tersebut sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank BNP, sedangkan bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali Akhir/*Ultimate Shareholders* adalah Keluarga Kinoshita dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG).

1. **ACOM CO., LTD. (ACOM)**
   ACOM adalah suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Jepang, berkedudukan dan berkantor di 1-1, Marunouchi 2-chome. Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Jepang. Sahamnya tercatat di Tokyo Stock Exchange. ACOM adalah anak perusahaan dari Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

   Bisnis utama group ACOM adalah pinjaman dan bisnis kartu kredit, bisnis penjaminan, pelayanan pinjaman dan bisnis keuangan di luar negeri, dan ACOM sendiri bergerak dalam bidang industri jasa pembiayaan dengan menyediakan pinjaman kepada perorangan.

2. **THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. (BTMU).**
   BTMU adalah suatu perusahaan yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1919 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Jepang, berkedudukan dan berkantor di 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, dan merupakan salah satu bank berkelas internasional di Jepang yang kegiatan utamanya adalah usaha perbankan komersial.

Principal And Controlling Shareholders

Principal shareholder is any party that either directly or indirectly own at least 20% (twenty per cent) of the total voting rights from all the shares with voting rights issued by the Company or the Bank, or any smaller amount as regulated by the Financial Services Authority.

Any legal entity, individual, and/or group of entities that owns the Company's or the Bank's shares amounting to 25% (twenty five per cent) or more of the total shares issued with voting rights or own the Company's or the Bank's shares amounting to less than 25% (twenty five per cent) of the total shares issued with voting rights as long as the party can be proven to have controlled the Company or the Bank either directly or indirectly, is designated as the Controlling Shareholder.

The controlling shareholders of Bank BNP are 2 (two) financial institutions from Japan, namely ACOM CO., LTD. (ACOM) and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), which have acquired the shares of Bank BNP amounting to 75.50% of the total on 17 December 2007, which rendered both companies as the Controlling Shareholders of Bank BNP. The ultimate shareholders of the Bank are the Kinoshita Family and Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG).

1. **ACOM CO., LTD. (ACOM)**
   ACOM is a public company established based on the the laws and regulations prevailing in Japan, domiciled and headquartered in 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8307, Japan. Its shares are listed on the Tokyo Stock Exchange. ACOM is a subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG).

   ACOM Group's main businesses are loan and credit card business, loan guarantee, loan services, and overseas financial business, while ACOM itself is engaged in the financing services industry by providing loans to individuals.

2. **THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, Ltd. (BTMU)**
   BTMU is a company established on 15 August 1919 based on the laws and regulations prevailing in Japan, domiciled and headquartered in 2-7-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Japan, and is one of the banks with international standards in Japan. Its main business is commercial banking.

Sedangkan pemegang saham lainnya yang memiliki saham di atas 5% yaitu PT Hermawan Sentral Investama yang juga merupakan bagian dari pemegang saham pendiri.

The other shareholder with ownership of more than 5% is PT Hermawan Sentral Investama, which is part of the founding shareholders.

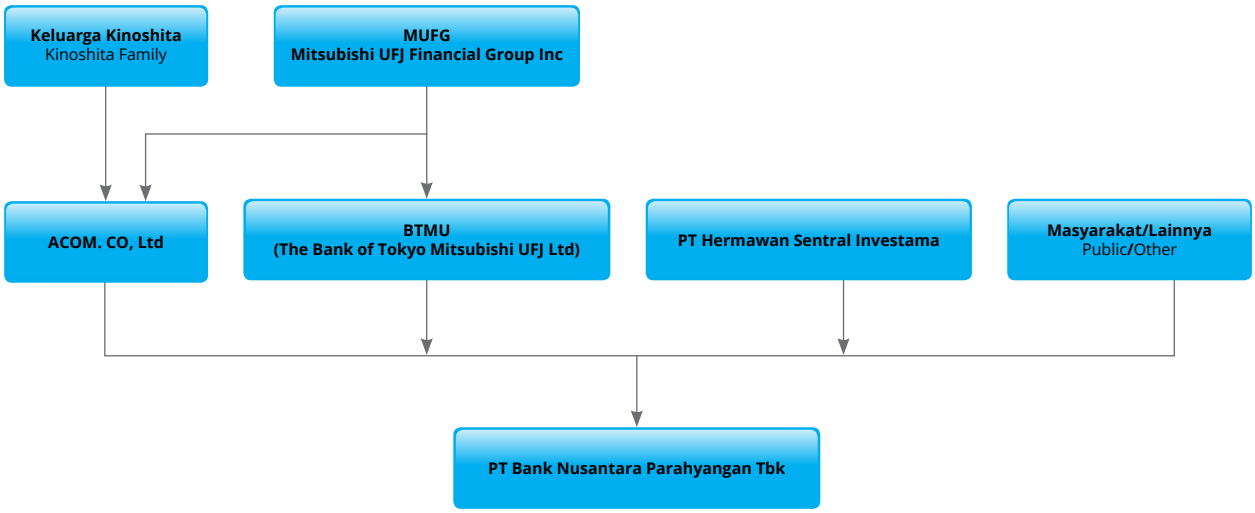

Dewan Komisaris

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ Perusahaan yang melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris turut melakukan pemantauan terhadap efektivitas implementasi GCG yang dilakukan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar.

Berdasarkan RUPS pada tanggal 27 Juni 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) orang dengan susunan sebagai berikut:

Board Of Commissioners

Composition, Criteria, and Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is an organ of the Company which is responsible for supervising and advising the Board of Directors in carrying out the management of the Bank. The Board of Commissioners also participates in monitoring the effectiveness of the implementation of GCG by the Bank in accordance with the Articles of Association.

Based on the GMS on 27 June 2016, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with the following composition:

Nama / Name	**Jabatan /** Position
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Komposisi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan tenaga kerja asing Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menetapkan bahwa 50% atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

The composition of the Board of Commissioners is in accordance with Bank Indonesia regulations stipulating that 50% or more members of the Board of Commissioners should be Indonesian citizens.

Anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan, baik sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga/Perusahaan bukan

Members of the Board of Commissioners must not hold concurrent position either as a Member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or as Executive

Lembaga Keuangan Lain/Bukan Bank atau sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Pengawasan pada Perusahaan Anak Bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Bank, di mana hal tersebut dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, Bank BNP memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dengan setiap Komisaris Independen mengetuai Komite-komite di bawah Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan SE Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang mana telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan mengarahkan Direksi untuk menjamin keberlangsungan bisnis Bank BNP. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi. Tugas pokok, fungsi (TUPOKSI) dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih detail di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*) Tahun 2016.

Pernyataan Pedoman/Piagam Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman kerja yang disebut *Board Manual,* yang merupakan salah satu komponen dari Struktur Tata Kelola dalam penjabaran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan merupakan uraian komitmen Dewan Komisaris yang bertujuan untuk:

1. Menjadikan pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ perusahaan.
2. Meningkatkan & memperjelas kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.

Officer in any Non-Financial/Non-Bank Institution or Company or as a Member of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Executive Officer performing Supervisory Function in a Non-Bank Subsidiary controlled by the Bank.

The Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have any financial, management, share ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners and/or with major shareholders or any other relations with the Bank, which may affect decision-making and independence of action. In accordance with Bank Indonesia Regulations, Bank BNP has 2 (two) members as Independent Commissioners, with each of the Independent Commissioners chairing the Committees under the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

In accordance with PBI No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, as amended by the PBI No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 and Bank Indonesia Circular No. 15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as revoked and supplanted by the OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Board of Commissioners is not involved in decision-making activities related to daily operations.

The Board of Commissioners performs a supervisory function on management policies and advises the Board of Directors with respect to the Bank's business sustainability. The Board of Commissioners performs its duties and responsibilities by conducting the Board of Commissioners meetings, as well as joint meetings with the Board of Directors. The main duties, functions, and responsibilities of the Board of Commissioners are further detailed in the 2016 Board Manual.

Statement on the Board of Commissioners Charter/ Guideline

The Board of Commissioners has a guideline called the Board Manual as a component of the Governance Structure as explained in the Corporate Governance Guideline that refers to the Company's Articles of Association. It is a detailed explanation of the Board of Commissioners' commitments, whose purposes are:

1. To prepare the guideline for the primary duties and functions of each organs of the Company.
2. To improve and clarify the quality and efficacy of working relationships between the organs.

Dengan diberlakukannya *Board Manual*, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip GCG.

With the Board Manual in place, all of the Company's business activities can be conducted in harmony by referring to the principles of GCG.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan, maka Dewan Komisaris berkomitmen untuk membangun Bank BNP yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparansi, serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

In an effort to achieve the Company's vision and mission, the Board of Commissioners is committed to promoting the growth of Bank BNP in a clean, honest, and transparent manner, while avoiding at all times any conflict of interest.

Hal tersebut di atas dinyatakan dalam pernyataan komitmen bersama Dewan Komisaris dan Direksi serta ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 16 Maret 2016.

The above is stated in the joint statement of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, signed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors on 16 March 2016.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Manual*)

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam kebijakan dan Tata Tertib Dewan Komisaris (*Board Manual*). *Board Manual* merupakan suatu petunjuk penatalaksanaan pekerjaan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara sistematis, terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dilakukan dengan konsisten, sehingga dengan sendirinya *Board Manual* ini dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kebijakan strategis Bank.

Board of Commissioners' Board Manual

The work guidelines for the Board of Commissioners are regulated in the Board Manual. The Board Manual provides a guideline for the work procedures of the Board of Commissioners, detailing the stages of activities in a systematic, structured and easily understandable manner so as to be able to be executed with consistency, and automatically the Board Manual will be used as the reference for the Board of Commissioners in carrying out their duties in order to achieve the Vision and Mission of the Company as stipulated in the Bank's strategic policy.

Board Manual bagi Dewan Komisaris merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan sesuai Anggaran Dasar Bank BNP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan memperhatikan arahan dari Pemegang Saham maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan GCG.

The Board Manual for the Board of Commissioners details the duties and obligations, rights and authority, functions, requirements, membership, term of office, work ethics, and the meetings of the Board of Commissioners, all of which are prepared based on the principles of corporate laws, in line with Bank BNP's Articles of Association as well as the prevailing regulations and the principles of a sound corporation, by taking into account the directive from the Shareholders and the best practices in GCG implementation.

Penyusunan *Board Manual* ini ditujukan untuk memberi batasan/arahan serta untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta pengelolaan perusahaan yang secara profesional, transparan dan efisien. Board Manual Edisi Revisi 1 Tahun 2016 ini telah disahkan di dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP: 049-DIR/CORP/03/2016.

The preparation of the Board Manual is intended to provide boundaries/directives as well as to explain the working relationship of the Board of Commissioners in carrying out its duties so as to foster a professional, transparent, and efficient management of the Company. The Board Manual, 1st Revised Edition 2016, has been ratified by the Directors' Decree NOKEP: 049-DIR/CORP/03/2016.

Isi dari Board Manual Edisi Revisi 1 Tahun 2016 mengatur Dewan Komisaris mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan Dewan Komisaris
B. Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) dan Tanggung Jawab
C. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
D. Pengisian Jabatan Lowong Dewan Komisaris

The Board Manual, 1st Revised Edition 2016's contents regulate the following aspects of the Board of Commissioners:

A. Institution of the Board of Commissioners
B. Main Duties and Functions and Responsibilities
C. Appointment, Resignation and Dismissal of Members of the Board of Commissioners
D. Filling of Vacancies in the Board of Commissioners

E. Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

F. Pengaturan Kerja Dewan Komisaris
G. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
H. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional
I. Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris
J. Sarana dan Prasarana Dewan Komisaris
K. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
L. Benturan Kepentingan
M. Organ Pendukung Dewan Komisaris
N. Pelaporan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan berhak menerima gaji/remunerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS serta dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS.
2. Dewan dalam melakukan pengawasannya dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
   b. Hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank BNP atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, maka penetapan limit plafon penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan dalam rapat Dewan. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan, sehingga tidak menghapuskan/meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
4. Anggota Dewan melalui Rapat Dewan setiap waktu berhak dan dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian anggota Direksi tersebut wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
   Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Dewan diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) yang akan memutuskan apakah anggota Direksi tersebut akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Terhadap anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila setelah melewati batas 90 (sembilan puluh) hari

E. Independence and Transparency of the Board of Commissioners
F. Work Procedures of the Board of Commissioners
G. Performance Evaluation of the Board of Commissioners
H. Policy on Obtaining Professional Advice
I. Rights and Authority of the Board of Commissioners
J. Facilities for the Board of Commissioners
K. Orientation and Capability Enhancement of the Board of Commissioners
L. Conflict of Interest
M. Supporting Organs of the Board of Commissioners
N. Reporting of the Board of Commissioners' Responsibility

Rights and Authority of the Board of Commissioners

1. Members of the Board of Commissioners has the right to receive salary/remuneration and/or other benefits whose amount and form from time to time can be adjusted based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as established and approved by the GMS and stipulated in separate decrees in line with the mandate of the GMS.
2. The Board of Commissioners in conducting its duties are not allowed to be involved in the decision-making part of any operational activities of the Bank, except:
   a. Provision of funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia Regulation on Maximum Lending Limit for Commercial Banks;
   b. Other aspects stipulated in the Articles of Association of Bank BNP or the prevailing regulations.
3. In the event that an approval is given for the provision of funding to a related party, the lending limit for the funding to the related party must be established in a Board of Commissioners meeting. The decision must be made as part of the supervisory duty of the Board of Commissioners, so that this does not eliminate/release the responsibility of the Board of Directors for managing the Bank.
4. Members of the Board of Commissioners through the Board of Commissioners meetings at any time have the rights and may suspend temporarily one or more members of the Board of Directors should said member or members have acted in violation of the Articles of Association and/or the prevailing regulations. The dismissal of the member or members of the Board of Directors must be notified to the person(s) in question along with the reason.
   Within 90 (ninety) calendar days since that temporary suspension, the Board of Commissioners is required to convene GMS (in accordance with the prevailing regulations) to determine whether the member or members of the Board of Directors in question will be permanently dismissed or reinstated. The member or members of the Board of Directors in question are allowed to attend the meeting to provide explanation or defense. If after the 90 (ninety) calendar day limit a

kalender setelah tanggal pemberhentian sementara tidak dapat dilaksanakan RUPS, maka dengan sendirinya pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali seperti posisi dan jabatan semula.

5. Berhak untuk memanggil anggota Direksi, sejauh diperlukan dan secara signifikan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka.
6. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan berhak untuk mendapatkan data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dari Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
   a. Rencana penyusunan, penyusunan dan hasil akhir dari Rencana Bisnis Bank (RBB);
   b. Laporan Bulanan/periodik dalam bentuk *financial highlights*; dan
   c. Laporan-laporan tertentu dan Laporan Lainnya, segera setelah diketahui mengenai adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud*/penyimpangan dan kondisi lainnya serta kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank, sesuai dengan ketentuan.
7. Setiap keputusan/kebijakan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara kuorum anggota Dewan, dalam hal rapat Dewan tidak terlaksana, maka mekanisme *Circular Resolution*/Sirkulasi diperkenankan kepada seluruh Anggota Dewan.
8. Menandatangani seluruh dokumen yang berkaitan dengan administratif Dewan, perkreditan, pelaporan dan kelengkapan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kelancaran operasional bank sejauh sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

9. Legal formal dalam administrasi surat-menyurat atau berupa dokumentasi atas keputusan Dewan tersebut, berdasarkan keputusan Rapat Dewan dapat menunjuk Presiden Komisaris bersama seorang Komisaris Independen dapat menandatangani dokumen dimaksud atas nama Dewan Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan, maka dengan tanpa harus dibuktikan kehadirannya, Komisaris Independen bersama anggota Dewan Komisaris Lainnya berdasarkan surat penunjukan dari Presiden Komisaris dapat bertindak mengatasnamakan Dewan Komisaris.

GMS cannot be convened, the temporary suspension is automatically revoked by law, and the person(s) in question can return to work in their previous roles and positions.

5. The Board of Commissioners has the right to summon the Directors when deemed necessary and significant to provide explanation in relation to the execution of their duties.
6. In conducting its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has the right to acquire accurate, relevant and timely information and data from the Directors, including but not limited to:
   a. Planning, preparation and results of the Bank's Business Plan (RBB);
   b. Monthly (period) reports in the form of financial highlights; and
   c. Certain reports and other reports as soon as it is known that a violation of any law or regulation or fraud or other such conditions have occurred, or that a situation that may endanger the existence of the Bank exists. This must be carried out in line with the prevailing regulations.
7. All decisions/policies of the Board of Commissioners are reached through the Board of Commissioners meetings attended by quorum of its members. In the event that a Board of Commissioners meeting fails to be convened, the Circular Resolution mechanism is allowed to be applied to all members.
8. The Board of Commissioners has the right to sign all documents related administratively to the Board of Commissioners, lending, reporting and other administrative requirements in relation to the Bank's operations, as long as they are in accordance with the Board of Commissioners' authority established by the prevailing regulations and the Bank's Articles of Association.
9. Legal-formal aspect in correspondence administration or documentation of the Board of Commissioners' decisions based on the decision of the Board of Commissioners meeting, may appoint a President Commissioner along with an Independent Commissioner to sign said document on behalf of the Board of Commissioners. In the event that the President Commissioners is absent, thus without having to prove his/her attendance, the Independent Commissioner along with other members of the Board of Commissioners based on the appointment letter from the President Commissioner can act on behalf of the Board of Commissioners.

Rapat Dewan Komisaris

Selama 2016, Dewan Komisaris melakukan 9 (sembilan) kali pertemuan dalam rapat internalnya. Pengambilan keputusan rapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, serta dituangkan dalam risalah rapat yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Jika dalam mekanisme rapat tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat Dewan Komisaris, dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat tersebut perbedaannya beserta alasannya.

Board of Commissioners' Meetings

Throughout 2016, the Board of Commissioners held 9 (nine) internal meetings. The decisions of the meetings are made through deliberation and consensus, and disclosed in the minutes of meetings circulated to all members of the Board of Commissioners to be documented properly. If the meeting is not conducted through deliberation and consensus, decisions will be made through majority vote. However, if there are dissenting opinions in the Board of Commissioners' meetings, the dissenting opinions and their reasons have to be clearly stated in the minutes of meetings.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris sepanjang 2016 sebagai berikut:

Frequency of meetings and attendance rate of members of the Board of Commissioner in the Board of Commissioners meetings throughout 2016 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner	9	9	100%
Tatang Hermawan	Komisaris / Commissioner	9	2	22%
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner	9	9	100%
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner	9	9	100%

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

The results of the Board of Commissioners meetings are recommendations and/or suggestions that can be implemented by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Meeting Agendas

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
8 Jan 2016	Penunjukan Tanda Tangan atas nama Dewan Komisaris	Appointment of signatures on behalf of the Board of Commissioners
	Agenda Kerja Dewan Komisaris dan Komite – Komite tahun 2016	Work Agendas for the Board of Commissioners and Committees in 2016
	Laporan Kinerja Komite-Komite tahun 2015	Committees' Performance Reports for 2015
	Lain-lain	Others
22 Jan 2016	Usulan Nominasi & Remunerasi untuk Direktur Kredit, Perencanaan & IT yang baru	Nomination & Remuneration Recommendations for the new Credit, Planning & IT Director
	Usulan Perubahan Charter Komite Remunerasi & Nominasi	Recommendations on the Amendment of the Remuneration & Nomination Charter
	Lain-lain	Others
4 Mar 2016	Kandidat Calon Komisaris Independen	Candidates for Independent Commissioners
	Penunjukan Tanda Tangan Dokumen atas nama Dewan Komisaris	Appointment of signatures of documents on behalf of the Board of Commissioners
4 Mar 2016	*Self Assessment* GCG 2015	2015 GCG Self Assessment
	Lain-lain	Others
23 Mar 2016	Kandidat Komisaris Independen	Candidates for Independent Commissioners
	Lain-lain	Others
10 Jun 2016	Pembahasan Beberapa Isu Penting	Discussion on Material Issues

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
27 Jun 2016	Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris	Board of Commissioners Membership Composition
	Remunerasi Dewan Komisaris	Board of Commissioners Remuneration
	Ketentuan Mengenai Pemegang Saham	Provisions on Shareholders
	Lain-lain	Others
29 Sep 2016	Pembahasan Mengenai Temuan OJK	Discussion on OJK Findings
	Lain-lain	Others
24 Nov 2016	Membahas Evaluasi Kinerja Direksi Terhadap Pelaksanaan RBB	Discussion on the Board of Directors' Performance against the Bank's Business Plan

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan dan rekomendasi atas kebijakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris meliputi:

1. Mengawasi Direksi dalam melaksanakan jalannya operasional Bank dalam mencapai target atau sasaran sesuai dengan rencana bisnis Bank;
2. Mengawasi komitmen Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan Pemeriksaan audit internal maupun eksternal;
3. Mengawasi pelaksanaan GCG dan Manajemen Risiko pada seluruh level atau tingkatan organisasi unit kerja;
4. Merekomendasikan calon Direktur Kredit, Perencanaan dan Teknologi Informasi yang baru;
5. Menyetujui perpanjangan masa jabatan dan perubahan nominasi susunan pengurus Bank;
6. Merekomendasikan usulan kenaikan gaji karyawan tahun 2016;
7. Merekomendasikan usulan perubahan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta pemberian bonus atas Laba Perseroan Tahun Buku 2015;
8. Merekomendasikan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan untuk Tahun Buku 2016 yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) (member of BKR International).;
9. Merekomendasikan usulan remunerasi Direktur Kredit, Perencanaan dan Teknologi Informasi yang baru;
10. Menyetujui perubahan Piagam Komite Remunerasi & Nominasi.

Uji Kemampuan & Kepatutan

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, dan tidak berasal dari mantan anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Setiap anggota Dewan Komisaris juga telah lulus *Fit & Proper Test* (Uji Kemampuan dan Kepatutan) dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Dengan demikian, Dewan Komisaris secara efektif diangkat setelah dinyatakan lulus *Fit & Proper Test*.

Board of Commissioners' Supervision and Recommendations

The supervisory function on management policies that has been performed by the Board of Directors, among others, covers:

1. Supervision of the Board of Directors in carrying out the Bank's operations to achieve target or goals that are in accordance with the Bank's business plan;
2. Supervision of the Board of Directors' commitment to taking actions following up the findings from internal and external audits;
3. Supervision of the implementation of GCG and Risk Management at all levels or degrees of the work units;
4. Recommendation of candidates for the new Credit, Planning & Information Technology Director;
5. Approval of the extension of the term of office and change to the nominations for the Bank's management;
6. Recommendation of the proposed employee salary increase in 2016;
7. Recommendation of the proposed changes to the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as the awarding of bonus based on the Company's Profit for the Fiscal Year 2015;
8. Recommendation of the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) (member of BKR International) to audit the Company's financial statements for the Fiscal Year 2016;
9. Recommendation of the proposed remuneration of the new Credit, Planning & Information Technology Director;
10. Approval of the amendments to the Remuneration & Nomination Committee Charter.

Fit & Proper Test

Each of the members of the Board of Commissioners of Bank BNP possesses a strong integrity, competence, and adequate financial reputation, and does not come from the previous members of the Board of Directors and/or Bank Executive Officers or other parties related to the Bank.

Each member of the Board of Commissioners has passed the Fit & Proper Test and has been approved by Bank Indonesia. Therefore, members of the Board of Commissioners are appointed effectively after being declared as passing the Fit & Proper Test.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru
Program orientasi bagi Komisaris yang baru diangkat, diatur di dalam *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan maupun Direksi, kunjungan ke kantor-kantor Perseroan, perkenalan dengan para pejabat eksekutif/*Branch Manager* serta pengenalan program-program SDM lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dibuat sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolegial dan individu. Evaluasi penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Mayoritas/ Pengendali. Penilaian kinerja Dewan Komisaris yang telah ditetapkan di awal periode dituangkan sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*—KPI) Dewan Komisaris sesuai dengan target-target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

KPI Dewan Komisaris, pada dasarnya adalah KPI Korporat dan sama dengan KPI untuk Direksi, hanya saja penekanan pertanggungjawabannya adalah pada aspek fungsi pengawasan, mitigasi risiko dan kepatuhan pada seluruh peraturan perundangan yang berlaku.

Selain penilaian KPI yang dilaksanakan berdasarkan pencapaian kinerja korporat, Bank BNP juga melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan penilaian kualitas penerapan praktik GCG sesuai kriteria indikator penilaian penerapan *best practices* GCG di Bank BNP.

Distribusi Kompetensi/Pelatihan oleh Dewan Komisaris

Pada 22-23 Agustus 2016, sebagai bagian dari program pengembangan kompetensi/ pembelajaran berkelanjutan Dewan Komisaris, Karel Tanok, salah satu Komisaris Independen, memberikan pelatihan mengenai Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty* kepada 39 orang karyawan, yang diadakan secara internal.

Direksi
Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh kegiatan usaha Bank BNP dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS. Direksi berwenang dan bertanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Bank BNP yang merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, OJK dan ketentuan terkait lainnya.

Orientation for New Commissioners
The orientation program for newly appointed commissioners is regulated in the Board Manual for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The orientation program provided can take the form of a meeting featuring a presentation from the Board of Commissioners or the Directors, visitation to the Company's offices, introduction to the executive officers or branch managers, and introduction to other HR programs in line with the perceived needs.

Board of Commissioners Performance Assessment
The Board of Commissioners performance assessment measures the efficacy of execution of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, both collegially and individually. The performance assessment of the Board of Commissioners is conducted by the Shareholders, in particular the Primary/Controlling Shareholders. The performance assessment of the Board of Commissioners has its targets determined in the beginning of the period and manifested as Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners, and aligned with the targets stated in the Bank's Business Plan (RBB).

The KPI for the Board of Commissioners are essentially the same for the Company and the Board of Directors, with a difference in focus, i.e. on the functions of supervision, risk mitigation, and compliance to the prevailing regulations.

In addition to the KPI assessment that refers to the achievement of corporate targets, Bank BNP also assesses the Board of Commissioners performance in terms of the implementation of GCG practices quality in line with the criteria for the implementation of GCG best practices in Bank BNP.

Competence Development Distribution by the Board of Commissioners
On 22-23 August 2016, as part of the Board of Commissioners continuous competence development, Karel Tanok, Independent Commissioner, conducted training on the Tax Amnesty Policy to 39 employees of the bank. This training was conducted internally.

Board of Directors
The Board of Directors is an organ of the Company which is responsible for the management of all business activities of Bank BNP and is the one that assumes accountability for the execution of its duties to the GMS. The Board of Directors has the authority and responsibility that correspond to the Articles of Association of Bank BNP, which refer to the Limited Liability Company Law, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, and other relevant regulations.

Komposisi dan Kriteria Direksi
Berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Februari 2016, jumlah anggota Direksi adalah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:

Composition and Criteria of the Board of Directors
Based on the General Meeting of Shareholders on 19 February 2016, the Board of Directors consists of 5 (five) members, with the following composition:

Nama / Name	**Jabatan /** Position
Takeru Agawa	Presiden Direktur / President Director
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Perencanaan & IT / Credit, Planning & IT Director
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director

Terkait persyaratan dan ketentuan mengenai Direksi, Bank BNP patuh pada ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan calon Direktur wajib memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Uji Kemampuan & Kepatutan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Demikian halnya, merujuk pada Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang mewajibkan setiap Perusahaan Tercatat sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Direktur Independen, Direktur yang membawahkan Kepatuhan & Manajemen Risiko telah ditetapkan sebagai Direktur Independen.

For the requirements and the regulations concerning the Board of Directors, Bank BNP complies with Bank Indonesia regulations that require candidates for Directors to meet the requirements and to pass the Fit & Proper Test held by Bank Indonesia.

Referring to the Indonesian Stock Exchange Regulation regarding amendments to Regulation No. I-A on Shares Listing and Securities other than Shares issued by Listed Companies, which requires all Listed Companies to have at least 1 (one) Independent Director, the Director in charge of Compliance & Risk Management was appointed as an Independent Director.

Independensi Direksi
Independensi Direksi Bank BNP dapat dilihat dari tidak terdapat perangkapan jabatan dan kepemilikan saham yang tidak sesuai peraturan, tidak terdapat hubungan keluarga, baik antara anggota Direksi maupun antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank BNP tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain, selain yang diizinkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bank Umum, yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Board of Directors' Independence
The independence of the Board of Directors of Bank BNP is reflected by the fact that its members have no concurrent position and share ownership that is not in accordance with the regulations, no family relations either with other members of the Board of Directors or with the members of the Board of Commissioners and with the controlling shareholders. All members of the Board of Directors of Bank BNP do not have concurrent position as a Commissioner, Director or Bank Executive Officer, other than those permitted by Bank Indonesia Regulations No. 8/4/PBI/2006 and No. 8/14/PBI/2006 on the Implementation of GCG for Commercial Banks, as revoked and supplanted by the OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 on the Implementation of GCG for Commercial Banks.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Direksi bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan usaha Bank, yaitu dari terselenggaranya kegiatan bisnis Bank BNP sesuai dengan ketentuan yang mengatur dan memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), serta amanat yang dituangkan dalam RUPS. Direksi turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors
The Board of Directors has the duties and responsibilities on all of the Bank's business activities, in line with the regulations regarding implementation of Bank BNP's business activities and the achievement of goals set out in the Bank's Business Plan, as well as the mandate set out in the GMS. The Board of Directors also assumes the responsibility and is involved in decision-making activities related to the Bank's daily operations.

Nama / Name	**Jabatan /** Position	**Tugas dan Tanggung Jawab /** Duties & Responsibilities
Takeru Agawa	Presiden Direktur President Director	Sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan penanggung jawab utama atas penatalaksanaan bisnis dan operasional Bank, serta mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi dalam mewujudkan dan memenuhi sasaran/target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, dengan mengacu pada Good Corporate Governance, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. As the Chief Executive Officer (CEO) and the main party responsible for the administration of the Bank's business and operations, responsible for coordinating the duties and responsibilities of all members of the Board of Directors in achieving the Bank's business targets as stated in the Bank's Business Plan, by abiding to the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis Business Director	Bertanggung jawab atas pencapaian dan pengendalian atas target bisnis Bank sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, menjaga posisi likuiditas Bank, melakukan perluasan usaha, menetapkan strategi pemasaran yang efektif, dan inovasi bisnis yang berkesinambungan, dengan mengacu pada prinsip Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, serta kebijakan yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for achieving and controlling the Bank's business targets as stated in the Bank's Business Plan, maintaining the Bank's liquidity position, expanding business, determining effective marketing strategies, and continuously innovating the business, by abiding to the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Markus Sugiono	Direktur Operasional Operations Director	Bertanggung jawab atas kecepatan dan ketepatan proses dan layanan operasional Bank, akurasi pengelolaan dokumen operasional, pelaksanaan administrasi dokumen perkreditan Bank, memastikan proses pengikatan kredit sesuai dengan prinsip-prinsip legalitas yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, dengan mengacu pada Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for the speed and accuracy of processes and operational services of the Bank, accuracy in the management of operational documents, administering of the Bank's credit-related documentation, ensuring the alignment of lending approval processes with the prevailing legal principles, as stated in the Bank's Business Plan, by abiding to the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Eiichiro Sakai	Direktur Kredit, Perencanaan & IT Credit, Planning & IT Director	Bertanggung jawab atas penyusunan Rencana Bisnis Bank, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian Rencana Bisnis Bank, menata administrasikan keuangan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan akurasi data keuangan yang dihasilkan, penerapan sistem informasi teknologi yang tepat guna bagi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank, dengan mengacu pada Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS. Responsible for the development of the Bank's Business Plan, and for conducting monitoring and evaluation of the targets set in the Bank's Business Plan, administering the Bank's finances in keeping with the prevailing accounting principles and ensuring the accuracy of the publication of financial data, implementing an effective information technology system as stipulated in the Bank's Business Plan to help improve the Bank's performance, by abiding to the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Compliance & Risk Management Director	Bertanggung jawab atas terlaksananya kepatuhan atas prosedur dan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal yang telah ditetapkan dan penerapan pelaksanaan manajemen risiko oleh seluruh level organisasi, dengan mengacu pada Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko, serta kebijakan lainnya yang diamanatkan oleh RUPS. Responsible for the Bank's compliance with the prevailing procedures and provisions applied internally and externally, and the implementation of risk management by all levels of the organization, by abiding to the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.

Pernyataan Pedoman/Piagam Direksi

Direksi memiliki pedoman kerja yang disebut *Board Manual* Edisi Revisi 1 Tahun 2016, sebagai salah satu komponen dari Struktur Tata Kelola dalam penjabaran atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG Code*) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan merupakan uraian komitmen Direksi yang bertujuan untuk:

Statement on the Board of Directors Charter/Guideline

The Board of Directors has a guideline called the Board Manual as a component of the Governance Structure as explained in the Corporate Governance Guideline that refers to the Company's Articles of Association. It is a detailed explanation of the Board of Directors' commitments, whose purposes are:

1. Menjadikan pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ perusahaan.
2. Meningkatkan & memperjelas kualitas dan efektifitas hubungan kerja antar organ.

Dengan diberlakukannya *Board Manual* ini, maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi perusahaan, maka Direksi berkomitmen untuk membangun Bank BNP yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan transparan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

Hal tersebut di atas dinyatakan dalam pernyataan komitmen bersama Direksi dan Dewan Komisaris serta ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 16 Maret 2016.

Pedoman Kerja Direksi (*Board Manual*)

Sama halnya dengan Dewan Komisaris, Pedoman kerja Direksi diatur pula di dalam kebijakan dan Tata Tertib Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* merupakan suatu petunjuk penatalaksanaan pekerjaan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara sistematis, terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dilakukan dengan konsisten, sehingga dengan sendirinya *Board Manual* ini dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kebijakan strategis Bank.

Board Manual bagi Direksi merupakan uraian tentang tugas dan kewajiban, hak dan wewenang, fungsi, persyaratan, keanggotaan, masa jabatan, etika jabatan, serta rapat Direksi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan sesuai Anggaran Dasar Bank BNP maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat dengan memperhatikan arahan dari Pemegang Saham maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan GCG.

Penyusunan *Board Manual* ini ditujukan untuk memberi batasan/arahan serta untuk menjelaskan hubungan Direksi dalam melaksanakan tugasnya agar tercipta pengelolaan perusahaan yang secara profesional, transparan dan efisien. Board Manual ini telah disahkan di dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP: 049-DIR/CORP/03/2016.

Isi dari *Board Manual* Edisi Revisi 1 Tahun 2016 mengatur Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Kelembagaan Direksi
B. Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) & Tanggung jawab

1. To prepare the guideline for the primary duties and functions of each organs of the Company.
2. To improve and clarify the quality and efficacy of working relationships between the organs.

With the Board Manual in place, all of the Company's business activities can be conducted in harmony by referring to the principles of GCG.

In an effort to achieve the Company's vision and mission, the Board of Directors is committed to promoting the growth of Bank BNP in a clean, honest, and transparent manner, while avoiding at all times any conflict of interest.

The above is stated in the joint statement of commitment of the Board of Commissioners and the Board of Directors, signed by both the Board of Commissioners and the Board of Directors on 16 March 2016.

Board of Directors' Board Manual

As is for the Board of Commissioners, the work guidelines for the Board of Directors are regulated in the Board Manual. The Board Manual provides a guideline for the work procedures of the Board of Directors, detailing the stages of activities in a systematic, structured and easily understandable manner so as to be able to be executed with consistency, and automatically the Board Manual will be used as the reference for the Board of Directors in carrying out their duties in order to achieve the Vision and Mission of the Company as stipulated in the Bank's strategic policy.

The Board Manual for the Board of Directors details the duties and obligations, rights and authority, functions, requirements, membership, term of office, work ethics, and the meetings of the Board of Directors, all of which are prepared based on the principles of corporate laws, in line with Bank BNP's Articles of Association as well as the prevailing regulations and the principles of a sound corporation, by taking into account the directive from the Shareholders and the best practices in GCG implementation.

The preparation of the Board Manual is intended to provide boundaries/directives as well as to explain the working relationship of the Board of Directors in carrying out its duties so as to foster a professional, transparent, and efficient management of the Company. The Board Manual has been ratified by the Directors' Decree NOKEP: 049-DIR/CORP/03/2016.

The Board Manual, 1st Revised Edition 2016's contents regulate the following aspects of the Board of Directors:

A. Institution of the Board of Directors
B. Main Duties and Functions and Responsibilities

C. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Anggota Direksi
D. Pengisian Jabatan Lowong Direksi
E. Independensi & Transparansi Direksi
F. Pengaturan Kerja Direksi
G. Penilaian Kinerja Direksi
H. Kebijakan Menggunakan Saran Profesional
I. Hak dan Kewajiban Direksi
J. Sarana dan Prasarana Direksi
K. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas Direksi

L. Benturan Kepentingan
M. Organ Pendukung Direksi
N. Pelaporan Tanggung Jawab Direksi

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur di dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) & Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mengelolanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank BNP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Secara khusus tugas dan wewenang Direksi diatur lebih terperinci sebagaimana garis besar yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank sebagai berikut:

1. Presiden Direktur sebagai penanggung jawab utama atas pelaksanaan bisnis dan operasional Bank, serta mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota Direksi dalam mewujudkan dan memenuhi sasaran/target perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dan mengacu pada *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya yang telah diamanatkan oleh RUPS.
2. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan termasuk di dalamnya mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pejabat eksekutif/ pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Bertanggung jawab atas pengendalian bisnis, aktivitas operasional, ketersediaan likuiditas, Kualitas aktiva dan aktiva produktif, penggunaan teknologi informasi yang tepat guna serta melakukan perluasan usaha, menetapkan strategi pemasaran yang efektif, dan inovasi bisnis yang berkesinambungan dengan mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance*, Manajemen Risiko serta kebijakan lainnya, yang telah diamanatkan oleh RUPS.

C. Appointment, Resignation and Dismissal of Members of the Board of Directors
D. Filling of Vacancies in the Board of Directors
E. Independence and Transparency of the Board of Directors
F. Work Procedures of the Board of Directors
G. Performance Evaluation of the Board of Directors
H. Policy on Obtaining Professional Advice
I. Rights and Authority of the Board of Directors
J. Facilities for the Board of Directors
K. Orientation and Capability Enhancement of the Board of Directors
L. Conflict of Interest
M. Supporting Organs of the Board of Directors
N. Reporting of the Board of Directors' Responsibility

Several main work guidelines for the Board of Directors regulated in the Board Manual are further detailed below.

Main Duties, Functions and Responsibilities

The Board of Directors bears full responsibility to manage the Company in line with its authority and responsibilities mandated to the Board of Directors as stipulated in Bank BNP's Articles of Association and the prevailing regulations. Specifically, the duties and authority of the Board of Directors are stipulated in greater detailed in accordance with the following outlines present in the Bank's Articles of Association:

1. The President Director is the main party responsible for business and operations of the Bank and for coordinating tasks and responsibilities of all the members of the Board of Directors in achieving the Company's targets as stipulated in the Bank's Business Plan and with due regard to Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.
2. Determine the Company's management policy, including to establish the transfer of authority of the Board of Directors to represent the Company in and outside of the court of law to one or more members of the Board of Directors specifically appointed for the purpose, or to one or more executive officers of the Company, either individually or collectively, or to one or more persons or institutions.
3. Responsible for managing the business, operational activities, liquidity, quality of assets and productive assets, use of effective information technology and business expansion, determination of an effective marketing strategy, and sustainable business innovation, by upholding the principles of Good Corporate Governance, Risk Management, and other policies mandated by the GMS.

4. Dalam hal RUPS tidak memutuskan pembagian kerja dan tanggung jawab Direksi, maka Presiden Direktur bersama anggota Direksi lainnya melakukan pembagian tugas sesuai jabatan dan fungsinya serta seluruh Direksi harus menandatangani kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut dalam sebuah dokumen resmi.

5. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk mengangkat/memberhentikan, penetapan remunerasi dan/atau tunjangan, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
7. Menatalaksanakan/melakukan kegiatan penyelamatan aktiva bermasalah melalui restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan penghapusan tagih dan hapus buku atas piutang macet (NPL) yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan Bank.
9. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan (*Corporate Planning*), Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan (RBB)/Business Plan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
10. Melaksanakan rapat-rapat reguler dan rutin Direksi maupun Joint Meeting dengan Dewan Komisaris.
11. Bertanggungjawab untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kinerja dalam periode tahun buku dan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk hal-hal yang bukan kewenangan Direksi dan Komisaris serta pelaksanaan RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan.
12. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat *Joint Meeting* dengan Komisaris.

13. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
14. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

4. In the event that the GMS does not determine the division of duties and responsibilities of the Board of Directors, the President Director and the other members of the Board of Directors divide the duties in accordance with their respective positions and functions, and all members of the Board of Directors must sign an agreement for the division of duties and responsibilities made into a formal document.
5. Set rules regarding the Company's employment aspect, including appointment/dismissal, remuneration and/or benefits, pension or retirement fund, production fee and other income for the Company's employees based on the prevailing regulations.

6. Establish the Corporate Secretary function.
7. Salvage non-performing assets through restructuring and/or resolution of credit, with obligation to report to the Board of Commissioners, for which the procedures are determined by the Board of Commissioners.

8. Writeoff non-performing loans (NPL), subsequently reported and accounted for in the Bank's Annual Report.

9. Prepare the Bank's Long-Term Planning, Work Plan and Budget (Business Plan), and other work plans, along with their amendments, and submit them at the latest 60 (sixty) days before the start of a new fiscal year to the Board of Commissioners for approval.

10. Conduct regular meetings of the Board of Directors as well as joint meetings with the Board of Commissioners.
11. Be responsible to convene the Annual General Meeting of Shareholders as part of its accountability for the performance in the fiscal year and request the approval of the Shareholders for issues that are beyond the Board of Directors's or the Board of Commissioners' authority, and to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders as deemed necessary.
12. Prepare and maintain the Shareholders' List, Special List, Minutes of GMS, and Minutes of Board of Directors Meetings and Minutes of Joint Meetings with the Board of Commissioners.
13. Prepare the Annual Report as part of its accountability for managing the Company and the Company's financial documents as mentioned in the laws on Company Documents.
14. Prepare the Financial Statements based on the Financial Accounting Standards and submit the statements to a public accountant to be audited.

15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
16. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
17. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya, serta menghindari terjadinya temuan berulang.
18. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan pembagian tugasnya.
19. Memastikan fungsi komite-komite di bawah Direksi berjalan dengan maksimal dan efektif serta mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang terintegrasi, memaksimalkan fungsi pengawasan oleh unit Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sesuai dengan SPFAIB, penerapan dan pelaksanaan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
20. Menciptakan budaya kerja yang harmonis, kondusif, objektif, keterbukaan dan wajib menerapkan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh dan menyeluruh terhadap seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, serta menjaga image/citra perusahaan.
21. Menjalankan fungsi sosial dan kemasyarakatan (CSR, Edukasi & Literasi Keuangan) juga menghadiri pertemuan/undangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Pasar Modal, BMPD, Perbanas, dan instansi terkait lainnya.
22. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris, pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan untuk Pengawasan Bank maupun peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
23. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak dan Kewenangan Direksi

Direksi berwenang untuk melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Direksi berhak menerima gaji/renumerasi dan/atau tunjangan lainnya yang besaran dan bentuk tunjangan lainnya dari waktu ke waktu disesuaikan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh RUPS

15. Prepare an accounting system in line with the Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the segregation of management, recording, storage, and supervisory functions.
16. Provide regular reports according to the manner and timing required by the prevailing regulations, and other reports when requested by the Board of Commissioners and/or shareholders, by taking into account the prevailing regulations especially those in the capital markets.
17. Follow up audit findings and recommendations from the IAU, external auditors, supervision results from Bank Indonesia/OJK and/or other authorities, and prevent similar findings from reoccurring.
18. Prepare the organization structure of the Company, complete with the details and division of duties.
19. Ensure that the committees under the Board of Directors function optimally and effectively and support the implementation of an integrated Internal Control System, which maximizes the function of supervision by the Internal Audit Unit (IAU) in accordance with the SPFAIB, implementation of Risk Management and Compliance.
20. Foster a harmonious, conducive, objective, transparent work culture where risk management and Good Corporate Governance principles are upheld fully and entirely across all levels of the organization, and maintain the image of the Company.
21. Carry out the social functions (CSR, Education & Financial Literacy) as well as attend events/invitations from Bank Indonesia, OJK, the capital market authorities, BMPD, Perbanas, and other relevant institutions.
22. Provide explanation on any issues inquired by the members of the Board of Commissioners, shareholders, or OJK regarding the Bank's supervision or the prevailing regulations, especially those prevailing in the capital market.
23. Ensure that other obligations are conducted in line with the stipulations of the Articles of Association and as determined by the GMS based on the prevailing regulations.

Rights and Authority of the Board of Directors

The Board of Directors has the right to do among others the following:

1. Members of the Board of Directors has the right to receive salary/remuneration and/or other benefits whose amount and form from time to time can be adjusted based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee as established and

serta dituangkan dalam Surat Keputusan tersendiri sesuai amanat RUPS
2. Dalam hal pemberian persetujuan penyediaan dana kepada pihak ketiga, berdasarkan jumlah tertentu harus diputuskan melalui mekanisme Rapat Komite Perkreditan, atau ditetapkan lain sebagaimana keputusan Rapat Direksi, kecuali penetapan limit plafon dan penyediaan dana kepada pihak terkait harus disetujui Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, namun tidak menghapuskan/ meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank dengan mengacu pada ketenuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.
3. Mewakili dan mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan kepengurusan dan kepemilikan sesuai kententuan yang mengaturnya;
4. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan surat kuasa untuk tindakan-tindakan tertentu;
5. Direksi diberikan hak untuk melakukan entertain dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan usaha Bank, dalam jumlah dan limit yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di Bank BNP.
6. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara waktu berhak untuk memperoleh kembali posisinya/ dikembalikan kepada kedudukannya semula, apabila dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara tersebut, Bank tidak/lalai menyelenggarakan RUPS (sesuai ketentuan yang mengaturnya) atau RUPS diselenggarakan sesuai ketentuan dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut diberikan kesempatan untuk hadir guna membela diri sehingga hasil akhir RUPS tersebut menolak usulan pemberhentian anggota Direksi tersebut.

approved by the GMS and stipulated in separate decrees in line with the mandate of the GMS.
2. In the event of approving any provision of funds to third parties, approval for certain amounts of funding must be avhieved through the meeting of Credit Committee or determined otherwise as stipulated in the Board of Directors meeting, with the exception of the determination of the lending limit and provision of funds to related parties, which must obtain approval from the Board of Commissioners. Such decisionmaking is part of the supervisory function of the Board of Commissioners, but does not eliminate/release the responsibility of the Board of Directors for managing the Bank.
3. Represent and bind the Company with other parties as well as conduct all management and ownership functions in line with the prevailing regulations;
4. Appoint one or more persons as representatives of the Board of Directors by power of attorney to perform certain actions;
5. The Board of Directors has the right to entertain third parties related to the Bank's businesses, within an amount determined in line with the prevailing regulations in Bank BNP.
6. Members of the Board of Directors that are temporarily suspended may regain their post or be reinstated to their original positions if within the period of 90 (ninety) calendar days after the temporary suspension the Bank does not or fails to convene a GMS (in line with the prevailing regulations) or that the GMS is conducted in line with the prevailing regulations, and the suspended members attend the GMS and are given the opportunity to defend their position, which results in the GMS resolving to reject the motion to dismiss the members in question.

Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat di tahun 2016 sebanyak 12 rapat internal. Rincian rapat dan kehadiran Direksi dalam rapat dijabarkan berikut ini.

Board of Directors' Meetings

Throughout 2016, the Board of Directors held 12 internal meetings. The meetings and meeting attendance details are provided below.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jumlah Rapat** Total Meetings	**Jumlah Kehadiran** Total Attendance	**Frekuensi** Frequency (%)
Takeru Agawa	Presiden Direktur / President Director	12	12	100%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director	12	12	100%
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director	12	12	100%
Eiichiro Sakai*	Direktur Kredit, Perencanaan & IT / Credit, Planning & IT Director	10	10	100%
Trie Karjati W	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director	12	12	100%

*) Eiichiro Sakai diangkat sebagai Direktur Kredit, Perencanaan & IT berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Februari 2016 / Eiichiro Sakai was appointed the Credit, Planning & IT Director based on the resolution of the EGMS on 19 February 2016.

Agenda Rapat Dewan Direksi 2016 **The Board of Directors Meeting Agenda 2016**

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
19 Jan 2016	Laporan Kinerja data Desember 2015	Performance Report for December 2015
	Laporan *Self Assessment* Profil Risiko Desember 2015	Risk Profile Self Assessment Report for December 2015
	Laporan *Compliance* data Desember 2015	Compliance Report for December 2015
	Lain-lain	Others
18 Feb 2016	Laporan Kinerja data Januari 2016	Performance Report for January 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Januari 2016	Risk Profile Self Assessment Report for January 2016
	Laporan *Compliance* Januari 2016	Compliance Report for January 2016
	Lain-lain	Others
18 Mar 2016	Laporan Kinerja data Februari 2016	Performance Report for February 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Februari 2016	Risk Profile Self Assessment Report for February 2016
	Laporan *Compliance* Februari 2016	Compliance Report for February 2016
	Lain-lain	Others
20 Apr 2016	Laporan Kinerja data Maret 2016	Performance Report for March 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Maret 2016	Risk Profile Self Assessment Report for March 2016
	Laporan Compliance data Maret 2016 dan *update new regulation*	Compliance Report for March 2016 & updates of new regulations
	Business update Q1/2016	Q1/2016 Business update
	Lain-lain	Others
16 Mei 2016	Laporan Kinerja data April 2016	Performance Report for April 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko April 2016	Risk Profile Self Assessment Report for April 2016
	Laporan *Compliance* data April 2016 dan update new regulation	Compliance Report for April 2016 & updates of new regulations
	Pembahasan draft revisi RBB 2016 berdasarkan posisi April 2016	Discussion on 2016 RBB revised draft based on April 2016 position
	Lain-lain	Others
20 Juni 2016	Laporan Kinerja Mei 2016	Performance Report for May 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Mei 2016	Risk Profile Self Assessment Report for May 2016
	Pembahasan draft Revisi RBB 2016	Discussion of 2016 RBB revised draft
	Lain-lain	Others
22 Juli 2016	Laporan Kinerja data Juni 2016	Performance Report for June 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Juni 2016	Risk Profile Self Assessment Report for June 2016
	Laporan *Compliance* data Juni 2016 dan *update new regulation*	Compliance Report for June 2016 & updates of new regulations
	Business Update Q2/2016	Q2/2016 Business update
	Lain-lain	Others
25 Ags 2016	Laporan Kinerja data Juli 2016	Performance Report for July 2016
	Skenario *minimum requirement operating profit* RBB revisi	Scenario of minimum requirement operating profit in revised RBB
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Juli 2016	Risk Profile Self Assessment Report for July 2016
	Laporan *Compliance* data Juli 2016 dan update new regulation	Compliance Report for July 2016 & updates of new regulations
	Update pemenuhan peraturan OJK (Bursa Efek) No. 1.A	Update on OJK Regulation No. 1.A
	Lain-lain	Others

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
22 Sep 2016	Laporan Kinerja data Agustus 2016	Performance Report for August 2016
	Skenario minimum *requirement operating profit* RBB Revisi	Scenario of minimum requirement operating profit in revised RBB
	Update Recovery Asset Division	Updates on Recovery Asset Division
	Laporan *Self Assessment* Profil Risiko Agustus 2016	Risk Profile Self Assessment Report for August 2016
	Laporan *Compliance* data Agustus 2016 dan *update new regulation*	Compliance Report for August 2016 & updates of new regulations
	Lain-lain	Others
25 Okt 2016	Laporan Kinerja data September 2016	Performance Report for September 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko September 2016	Risk Profile Self Assessment Report for September 2016
	Laporan *Compliance* data September 2016	Compliance Report for September 2016
	Lain-lain	Others
23 Nov 2016	Laporan Kinerja data Oktober 2016	Performance Report for October 2016
	Laporan *Self-Assessment* Profil Risiko Oktober 2016	Risk Profile Self Assessment Report for October 2016
	Laporan *Compliance* data Oktober 2015 & *update new regulation*	Compliance Report for October 2016 & updates of new regulations
	Re-organisasi unit kerja SAM & RAD	Reorganization of SAM & RAD work units
	Struktur Organisasi dan Strategi bisnis 2017	2017 Organization Structure and Business Strategy
	Lain-lain	Others
21 Des 2016	Laporan kinerja Data November 2016	Performance Report for November 2016
	Laporan *Self Assessment* Profil Risiko November 2016	Risk Profile Self Assessment Report for November 2016
	Laporan *Compliance* data November 2016 & u*pdate new regulation*	Compliance Report for November 2016 & updates of new regulations
	Re-organisasi unit kerja SAM & RAD	Reorganization of SAM & RAD work units
	Lain-lain	Others

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Mekanisme pengambilan keputusan rapat yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat tersebut sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu juga dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani seluruh peserta rapat dan diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris untuk selanjutnya didokumentasikan. Jika dalam mekanisme rapat tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui suara terbanyak dan jika terjadi perbedaan pendapat dalam rapat, dicantumkan dengan jelas dalam risalah rapat tersebut perbedaannya beserta alasan perbedaan pendapat.

Sepanjang 2016, Direksi menyelenggarakan 10 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The decision-making mechanism of the meeting through deliberation and consensus is the same with the mechanism on the Board of Commissioners meetings, which is noted in the minutes of meeting, to be signed by all participants of the meeting and to be circulated to all members of the Board of Commissioners to be documented later on. If the meeting is not conducted through deliberation and consensus, decisions will be made through majority vote. However, if there are dissenting opinions in the meetings, the dissenting opinions and its reasons has to be clearly stated in the minutes of meetings.

Throughout 2016, the Board of Directors held a total of 10 joint meetings with the Board of Commissioners.

Tingkat Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan

Attendance of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Michio Atsuda	Presiden Komisaris / President Commissioner	10	10	100%
Tatang Hermawan	Komisaris/ Commissioner	10	1	10%
Karel Tanok	Komisaris Independen / Independent Commissioner	10	10	100%
Bachtiar Alam	Komisaris Independen / Independent Commissioner	10	10	100%
Takeru Agawa	President Direktur / President Director	10	10	100%
Kevin Cahyadi Tatang	Direktur Bisnis / Business Director	10	9	90%
Markus Sugiono	Direktur Operasional / Operations Director	10	10	100%
Eiichiro Sakai*	Direktur Kredit, Perencanaan, & IT / Credit, Planning & IT Director	9	9	100%
Trie Karjati Wibowo	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko / Compliance & Risk Management Director	10	9	90%

*) Eiichiro Sakai diangkat sebagai Direktur Kredit, Perencanaan & IT berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Februari 2016 / Eiichiro Sakai was appointed the Credit, Planning & IT Director based on the resolution of the EGMS on 19 February 2016.

Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris 2016

Joint Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners 2016 Agenda

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
22 Jan 2016	Pembahasan Kinerja Bank per Q4/2015	Discussion on the Bank's Performance in Q4/2015
	Tindak Lanjut Direksi atas hasil temuan OJK	Board of Directors' follow up on OJK findings
	Pembahasan Strategi Penyelesaian AYDA	Discussion on AYDA Resolution Strategy
	Lain-lain	Others
19 Feb 2016	Rapat Panel Perkreditan:	Lending Panel Meeting:
	KTA Mirai+ Portofolio *Report*	KTA Mirai+ Portfolio Report
	Lower SME Update	Lower SME Update
	Overview Perkembangan 25 Debitur inti & Action Plan	Overview of Developments concerning 25 Core Debtors & Action Plan
	Update Special Asset Management	Update Special Asset Management
	NPL & AYDA *Report*	NPL & AYDA Report
	Credit Risk Management & Compliance Issue	Credit Risk Management & Compliance Issue
	Lain-lain	Others
22 Apr 2016	Pembahasan Kinerja Bank per Q1/2016	Discussion on the Bank's Performance in Q1/2016
	Lain-lain	Others
10 Juni 2016	Rapat Panel Perkreditan:	Lending Panel Meeting:
	Economic Outlook dan Loan Portofolio Monitoring	Economic Outlook and Loan Portofolio Monitoring
	KTA Mirai+ Portofolio Report	KTA Mirai+ Portfolio Report
	Lower SME Update	Lower SME Update
	Overview Perkembangan 25 Debitur inti & Action Plan	Overview of Developments concerning 25 Core Debtors & Action Plan
	Update Special Asset Management	Update Special Asset Management
	NPL & AYDA Report	NPL & AYDA Report
	Segregation of Planning Function	Segregation of Planning Function
	Lain-lain	Others
10 Jun 2016	Pembahasan Revisi RBB 2016	Discussion on 2016 Revised RBB
	Pembahasan Loan Strategy	Discussion on Loan Strategy
	Lain-lain	Others

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Materials
2 Ags 2016	Pembahasan Kinerja Bank per Q2/2016	Discussion on the Bank's Performance in Q2/2016
	Penerapan APU/PPT Semester 1/2016	Implementation of APU/PPT Semester 1/2016
	Lain-lain	Others
28 Sep 2016	Rapat Panel Perkreditan:	Lending Panel Meeting:
	Economic Outlook dan Loan Portofolio Monitoring	Economic Outlook and Loan Portofolio Monitoring
	KTA Mirai+ Portofolio *Report*	KTA Mirai+ Portfolio Report
	Lower SME Update	Lower SME Update
	Overview Perkembangan 25 Debitur inti & Action Plan	Overview of Developments concerning 25 Core Debtors & Action Plan
	Update Special Asset Management	Update Special Asset Management
	NPL & AYDA *Report*	NPL & AYDA Report
	Credit Risk Management & Compliance Issue	Credit Risk Management & Compliance Issue
	Lain-lain	Others
26 Okt 2016	Pembahasan Kinerja Bank per Q3/2016	Discussion on the Bank's Performance in Q3/2016
	Rancangan RBB 2017-2019	Drafting of 2017-2019 RBB
	Lain-lain	Others
24 Nov 2016	Persetujuan RBB 2017-2019	Approval of 2017-2019 RBB
	Lain-lain	Others
24 Nov 2016	Rapat Panel Perkreditan:	Lending Panel Meeting:
	KTA Mirai+ Portofolio *Report*	KTA Mirai+ Portfolio Report
	Lower SME Update	Lower SME Update
	Overview Perkembangan 25 Debitur inti & *Action Plan*	Overview of Developments concerning 25 Core Debtors & Action Plan
	NPL & AYDA *Report*	NPL & AYDA Report
	Credit Risk Management & Compliance Issue	Credit Risk Management & Compliance Issue
	Lain-lain	Others

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Program orientasi bagi Direksi yang baru diangkat, diatur di dalam *Board Manual* Direksi. Program Orientasi mengenai Bank BNP wajib diberikan kepada anggota Direksi yang baru pertama menjabat di Bank BNP. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa sebuah sesi pertemuan yang disertai dengan presentasi baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi, kunjungan ke kantor-kantor Perseroan, perkenalan dengan para pejabat eksekutif/*Branch Manager* serta pengenalan program-program SDM lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2016 terdapat Direktur baru yaitu Eiichiro Sakai yang diangkat sebagai Direktur Kredit, Perencanaan dan IT berdasarkan RUPSLB tanggal 19 Februari 2016, menggantikan Takeru Agawa.

Penilaian Kinerja Direksi

Peran organ perusahaan dalam pelaksanaan GCG merupakan salah satu aspek yang penting dalam mengimplementasikan GCG. Sinergi antara segitiga organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi harus terjalin dalam pelaksanaan GCG maupun pelaksanaan pengurusan Perusahaan.

Orientation Program for New Directors

The orientation program for newly appointed directors is regulated in the Board Manual for both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The orientation program provided can take the form of a meeting featuring a presentation from the Board of Commissioners or the Directors, visitation to the Company's offices, introduction to the executive officers or branch managers, and introduction to other HR programs in line with the perceived needs. In 2016, a new Director, namely the Credit, Planning & IT Director, Eiichiro Sakai, was appointed based on the resolution of the EGMS on 19 February 2016, to replace Takeru Agawa.

Board of Directors Performance Assessment

The roles of the Company's organs in implementing GCG make up one crucial aspect in GCG implementation. The synergy between the triad of organs, i.e. GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors, must be maintained both for implementing GCG as well as for running and managing the Company.

Kedua organ lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun.

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan dengan cara melaksanakan *self assessment* dan di-*review* oleh Presiden Direktur serta direkomendasikan kepada Komite Nominasi untuk kemudian mendapatkan persetujuan oleh Dewan Komisaris/Presiden Komisaris.

Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi yang tercermin dalam *Key Performance Indicators* (KPI) masing-masing anggota Direksi yang memuat antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja Perencanaan/*Performance Planning*
   Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam merencanakan/menyusun strategi yang sejalan dengan visi dan misi Perseroan dalam program kerja di tahun berjalan, jangka pendek dan jangka panjangnya dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Perseroan dan prinsip-prinsip dalam GCG.
2. Kinerja Pelaksanaan/*Performance Review*
   Bagaimana eksekusi/pelaksanaan dari kinerja stratejik dalam perencanaan Bank untuk tahun berjalan dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan berbagai macam parameter penilaian dan dilakukan secara mandiri/*self assessment* berdasarkan KPI yang dimilikinya.
3. Kinerja Monitoring/Evaluasi dan *Improvement*
   Bagaimana Direksi melakukan *monitoring*, evaluasi dan melakukan *improvement* atas kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat memastikan kinerjanya sesuai dengan target stratejik, prinsip GCG dan Manajemen Risiko yang dapat memberikan nilai tambah di kemudian hari.

Kebijakan Remunerasi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNP direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan perumusan remunerasi yang berpedoman kepada kebijakan internal Bank BNP, peraturan eksternal yang berlaku, serta pertimbangan atas kinerja Bank BNP. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan pada RUPS untuk mendapatkan persetujuan, sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diperoleh Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

a. Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya antara lain tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya; dan

Two organs, i.e. the Board of Commissioners and the Board of Directors, have their respective functions and roles. Performance assessment of each member of the Board of Directors is conducted once a year.

Performance assessment of each member of the Board of Directors takes place in the form of a self assessment, subsequently reviewed by the President Director and nominated to the Nomination Committee to obtain subsequent approval from the Board of Commissioners/President Commissioner.

The main aspects that serve as the basis for the performance assessment of the members of the Board of Directors reflected in the Key Performance Indicators (KPI) of each of the members of the Board of Directors contain the following:

1. Performance Planning
   How the Board of Directors implements planning and formulation of strategies that are aligned with the Company's vision and mission within the work programs for the current year, the short term, and the long term, while upholding the corporate values and the GCG principles.
2. Performance Review
   The strategic performance in executing the Bank's plans for the current year by the Board of Directors using various assessment parameters, carried out through a self assessment mechanism based on their own KPI.

3. Evaluation and Improvement Performance
   How the Board of Directors has monitored, evaluated and made improvements to its performance to ensure that it is aligned with the Bank's strategic targets, GCG principles and Risk Management that can provide added value in the future.

Remuneration Policy

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BNP is recommended by the Nomination and Remuneration Committee and calculated based on the remuneration formula that refers to the Bank's internal policy, the prevailing external regulations, as well as taking into account the Bank's performance. The recommendation made by the Nomination and Remuneration Committee is submitted to the Board of Commissioners and then submitted to the GMS for approval, as stipulated in the Bank's Articles of Association.

The remuneration package/policy and other facilities for the Board of Commissioners and the Board of Directors are:

a. Remuneration in the form of non-natura, including salary and other fixed income among other benefits, stock-based compensation and other forms of remuneration; and

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi, paling kurang meliputi:
a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank;
b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, paling kurang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana tabel di bawah ini:

b. Other facilities in the form of natura/non-natura, which is not other fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities that can as well as cannot be possessed.

The disclosure on remuneration package/policy includes at least:
a. Remuneration package/policy and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors set by the General Meeting of Shareholders;
b. Types of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, at least covering the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the Board of Directors, and the entire remuneration package/policy and other facilities as referred to in point a above, as shown in the following table:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Amount of Remuneration and Other Facilities	**Jumlah Diterima dalam 1 Tahun** Amount Received in 1 Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors	
	Orang Person	Rp Juta Million Rp	Orang Person	Rp Juta Million Rp
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonuses, regular benefits, and other facilities in the form of non-natura)	4	2.695	5	12.933
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang/ Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc.) which: a) dapat dimiliki/can be possessed b) tidak dapat dimiliki/cannot be possessed	4	12	5	1.281
TOTAL	**4**	**2.707**	**5**	**14.214**

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

The number of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who received remuneration in 1 (one) year are classified by income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 Tahun Amount of Remuneration per Person in 1 year*)	**Jumlah Direksi** Number of DIrectors	**Jumlah Komisaris** Number of Commissioners
Di atas Rp 2 Miliar / More than Rp 2 billion	2	-
Di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 2 Miliar / From Rp 1 billion to Rp 2 billion	2	1
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar / From Rp 500 million to Rp 1 billion	1	1
Rp 500 juta ke bawah / Below Rp 500 million	-	2

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
1. Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

Ratio of Highest to Lowest Salary
1. Salary is defined as the right of an employee to be received, and is stated in monetary terms, as a compensation from company or employer to said employee, and is determined and paid out based on a work agreement, a contract, or the prevailing regulations, including benefits

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

2. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
   a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
   b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah;
   c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
   d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

for the employee and their family for the work and/or service rendered.

2. The highest to lowest salaries are compared as follows:
   a. the highest employee's salary against the lowest;
   b. the highest Director's salary against the lowest;
   c. the highest Commissioner's salary against the lowest; and
   d. the highest Director's salary against the highest employee's salary.

The salaries compared in the salary ratios are the monthly amount received by members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the employees.

Employees are defined as permanent employees up to the Executive level.

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Highest & Lowest Salaries	**Rasio** Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah / The highest employee's salary against the lowest	26,80
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah / The highest Director's salary against the lowest	2.86
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah / The highest Commissioner's salary against the lowest	1.4
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi / The highest Director's salary against the highest employee's salary	2,99

Keterangan *) Description	Gaji Tertinggi Highest Salary	Gaji Terendah Lowest Salary	Rasio Ratio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah / The highest employee's salary against the lowest	67.000.000	2.500.000	26,80
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah / The highest Director's salary against the lowest	200.000.000	70.000.000	2.86
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah / The highest Commissioner's salary against the lowest	70.000.000	50.000.000	1.4
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi / The highest Director's salary against the highest employee's salary	200.000.000	67.000.000	2,99

*) Jenis & jumlah remunerasi diambil dari tabel gaji dan fasilitas Komisaris & Direksi.
Type & amount of remuneration refer to the table of Commissioners & Directors salaries and facilities.

Saat ini Bank BNP masih dalam tahap persiapan untuk penerapan remunerasi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Currently Bank BNP is in preparation for implementing remuneration schemes based on the provisions in the OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 on the Implementation of Corporate Governance in Remuneration in Commercial Banks.

Program Pelatihan Dewan Komisaris & Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal kepemimpinan dan kaderisasi yang baik. Selama tahun 2016, pelatihan yang diikuti meliputi:

Board Of Commissioners & Board Of Directors Training Programs

Members the Board of Commissioners and the Board of Directors participated in a number of training programs to improve their competence in leadership and regeneration. In 2016, they participated in the following training programs:

Komisaris **Commissioners**

Nama Name	Materi Pelatihan/ Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time And Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Karel Tanok	• Penerapan Manajemen Risiko Operasional menggunakan strategi yang efektif, Kuat & Sesuai Kebutuhan;	24-25 Agustus 2016, Jakarta	Training, Risk Management Guard
	• Lokakarya akuntansi dan audit overview proses akuntansi terkait tutup buku EOY 2015 dan pemutakhiran PSAK-IFSR & SPAP – ISA terkait pelaporan keuangan dan opini auditor;	27 Februari 2016, Bandung	Training, Institut Akuntan Publik Indonesia
	• Kode etik profesi akuntan publik & standar pengendalian mutu KAP;	16 April 2016, Bandung	Training, Institut Akuntan Publik Indonesia
	• Akuntansi & pelaporan keuangan pengaturan bersama serta penjanjian konsesi jasa;	13 Mei 2016, Bandung	Training, Institut Akuntan Publik Indonesia
	• Lokakarya akuntansi – audit isu terkini implementasi PSAK 70 (2016) terkair UU pengampunan pajak aspek auditnya;	12 Nov 2016, Bandung	Training, Institut Akuntan Publik Indonesia
	• Akuntan profesional membangun negeri	8-9 Des 2016, Bandung	Konvensi/Convention, Ikatan Akuntan Indonesia
Bachtiar Alam	• Pelatihan BSMR Level 3;	2-3 Mei 2016, Jakarta	Sertifikasi/Certification, GPS
	• Penerapan Manajemen Risiko Operasional menggunakan strategi yang efektif, kuat & sesuai Kebutuhan	24-25 Agustus 2016, Jakarta	Training, Risk Management Guard

Direksi **Board of Directors**

Nama Name	Materi Pelatihan/ Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time And Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Takeru Agawa	• Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty	23 Agustus 2016, Bandung	Training, BNP University
Kevin Cahyadi Tatang	• Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty	23 Agustus 2016, Bandung	Training, BNP University
Markus Sugiono	• International Trade Workshop	7 Maret 2016, Jakarta	Training, Standar Chartered Bank
	• Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty	23 Agustus 2016, Bandung	Training, BNP University
	• Workshop Pelaporan SID dalam rangka Program data Quality Control (QC) SID tahun 2016	8 September 2016, Jakarta	Training, Bank Indonesia
	• Risk Management Certification Refresher Program	1 -2 Desember 2016, Bandung	Refresher, BaRa Risk Forum
Eiichiro Sakai	• Seminar Business Risk	16 Juni 2016, Bandung	Training, JAC

Nama Name	Materi Pelatihan/ Title/Topic	Waktu & Tempat Pelatihan Time And Place	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Type of Training and Organizer
Trie Karjati Wibowo	• Peningkatan Pemahaman tentang Proses Hukum Litigasi Penyelesaian Kredit bermasalah dan Permasalahannya dalam Praktek	5 Februari 2016, Bandung	Training, PT. Leinad Aganis
	• Workshop Restrukturisasi dan Penyelamatan Kredit yang Efektif Guna Meningkatkan Kinerja Bank	11 April 2016, Jakarta	Training, BSMR
	• Seminar Kesiapan Perbankan Dalam Menghadapi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Terhadap Indonesia	23 Agustus 2016, Bandung	Training, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
	• Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty	23 Agustus 2016, Bandung	Training, BNP University
	• Pembekalan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level Eksekutif	15 -17 September 2016 Jakarta	Sertifikasi, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
	• Pelatihan Data Debitur Melalui SLIK	7 November 2016, Jakarta	Training, OJK
	• Workshop OJK – Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	14 November 2016, Jakarta	Training, OJK
	• EY Thought Leadership Financial Services 2016	15 November 2016, Jakarta	Training, EY

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris & Direksi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan Bank. Dewan Komisaris dan Direksi juga tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain dari yang telah ditetapkan RUPS.

Affiliations Of The Board Of Commissioners & The Board Of Directors

Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors do not exploit the Bank for personal, family, and/or other parties interests which may cause losses to the Bank. The Board of Commissioners and the Board of Directors do not take and/or receive personal gain from the Bank other than those set forth in GMS.

Nama/ Name	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga Dengan Family Relationship with					
	Komisaris Commissioner		Direktur Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Komisaris Commissioner		Direktur Director		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Michio Atsuda		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Tatang Hermawan		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Karel Tanok		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Bachtiar Alam		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Takeru Agawa		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Kevin Cahyadi Tatang		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Markus Sugiono		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eiichiro Sakai		✓		✓	✓			✓		✓		✓
Trie Karjati Wibowo		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk menjaga efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dari segi pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan audit (eksternal/internal) dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Dasar hukum pembentukan Komite Audit adalah:

1. Keputusan Ketua Bapepam-LK NO. KEP-643/BL/2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit, yang ditelah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pelaksanaaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 060-DIR/KOM/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, Susunan Komite Audit per akhir tahun 2016 adalah:

Ketua : Bachtiar Alam
Anggota : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.,CA
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc Akt.

Audit Committee

The Audit Committee is formed by the Board of Commissioners to work collectively, with the function of maintaining the effectiveness of its duties and responsibilities, in particular with regard to monitoring and evaluation of internal audit planning and implementation as well as supervision of the follow up to the internal and external audit findings in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process.

The legal basis for the establishment of the Audit Committee is as follows:

1. Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 on 7 December 2012 on the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee, as revoked and supplanted by POJK No. 55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 on the Establishment and Work Guideline of Audit Committee.
2. Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 on 20 September 1999 on Assignment of the Compliance Director and Implementation of Internal Audit Function Standards for Commercial Banks.
3. Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on 30 January 2006 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
4. Bank Indonesia Regulation No./14/PBI/2006 on 5 October 2006 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
5. Bank Indonesia Circular No. 15/15/DPNP on 29 April 2013 on Good Corporate Governance Implementation for Commercial Banks.
6. The Company's Articles of Association on the Duties and Authority of the Board of Commissioners.

Audit Committee Composition

Based on the Decree NOKEP: 060-DIR/KOM/07/2015 dated 6 July 2015, the composition of the Audit Committee as at end of 2016 was as follows:

Chairman : Bachtiar Alam
Member : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi,Ak.,CA
Member : Dra. Inge Berlian, M.Sc.Akt.

Profil Anggota Komite Audit

Profiles of the Audit Committee Members

Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST pada tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPSLB 26 Desember 2007. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Beliau merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko. Pemegang gelar Doctor of Philosophy (PhD) jurusan Antropologi dari Harvard University tahun 1995 dan Master of Art di bidang Regional Studies East Asia dari Harvard University tahun 1989. Pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, sejak 1987, Visiting Professor di Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, tahun 2003. Memperoleh penghargaan bintang jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette dari pemerintah Jepang pada tahun 2016 untuk kontribusinya bagi kemajuan Studi Jepang di Indonesia dan peningkatan saling pengertian di antara Indonesia dan Jepang. Pelatihan yang telah diikuti di tahun 2016 antara lain pelatihan persiapan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional Menggunakan Strategi yang Efektif.

Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Indonesian citizen, 58 years old. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, and was initially appointed as Independent Commissioner of Bank BNP at the EGMS on 26 December 2007. Thus he had served for more than two terms of office, and thus in accordance with SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies (Paragraph III no. 8.i), the Statement of Independence of the Independent Commissioner has been accepted by the Company. He also serves as the Chairman of the Audit Committee and the Chairman of the Risk Monitoring Committee. Graduated as Doctor of Philosophy (PhD) in Anthropology from Harvard University in 1995 and as Master of Art in Regional Studies East Asia from Harvard University in 1989. Has been working as Lecturer at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia, since 1987, and was Visiting Professor at Department of Cultural Anthropology, University of Tokyo, in 2003. Recipient of The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette, an award from the Japanese government in 2016 for his contributions to the advancements of Japanese Studies in Indonesia and the promotion of mutual understanding between Indonesia and Japan. He participated in training programs in 2016 that included the Level 3 Risk Management Certification Examination and Implementation of Operational Risk Management using Effective Strategies.

Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.,CA
Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Padjajaran Bandung tahun 1985, melanjutkan S2 Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Magister Sains tahun 1996, kemudian memperoleh gelar Doktor Akuntansi pada tahun 2003 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Pengalaman jabatan sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2006–2014), sebagai Kepala Biro Keuangan Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2003–2005), sebagai Ketua Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1998–2003), dan memulai karirnya sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1991–1998).

Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.,CA
Indonesian citizen, 56 years old. Became member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. Graduated with a bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from Padjajaran University in 1985, a master's degree in Economics from the University of Indonesia, a master's degree in Science in 1996, and a doctorate in Accounting in 2003 from Padjajaran University, Bandung, in 2003. Previously worked as the Dean of the Faculty of Economics of Parahyangan University, Bandung (2006–2014), Head of the Finance Bureau of Parahyangan Catholic University, Bandung (2003–2005), Head of Accounting Department of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1998–2003), and Secretary at the Accounting Department of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1991–1998).

Dra. Inge Barlian, M.Sc. Akt.
65 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank BNP sejak Oktober 2014. Latar belakang pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan tahun 1978, dan melanjutkan S2 Magister Teknik dan Manajemen Industri di Institut Teknologi Bandung tahun 1984, kemudian memperoleh Sarjana Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 1986. Pengalaman bekerja sebagai Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2008–2010), sebagai Ketua Ujian Saringan Masuk Universitas Katolik Parahyangan (1990), sebagai Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (1987–1993), dan memulai karirnya sebagai Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1985–1986).

Dra. Inge Barlian, M.Sc. Akt.
65 years old, Indonesian citizen. Became member of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee of Bank BNP in October 2014. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from the Parahyangan Catholic University in 1978, a master's degree in Industrial Management and Engineering at Bandung Institute of Technology in 1984, and a bachelor's degree in Accounting from the Parahyangan Catholic University in 1986. Previously worked as Secretary of the Senate of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (2008–2010), as Chair of Entry Examination of Parahyangan Catholic University (1990), as Assistant Dean I of Academic Affairs of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1987–1993), and as Assistant Dean II of Administration and Finances of the Faculty of Economics of Parahyangan Catholic University, Bandung (1985–1986).

Piagam Komite Audit

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Audit dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab Komite Audit, maka dilengkapi dengan Piagam Komite Audit yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit", Piagam Komite Audit ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Audit dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), serta unit-unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Piagam Komite Audit berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No.008-KOM/KEP/11/2015 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris tanggal 13 November 2015. Piagam Komite Audit berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Definisi
4. Visi dan Misi Komite Audit
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Audit
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Bank BNP bertugas dan bertanggung jawab mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank BNP. Dalam menjalankan tugas tersebut, Komite audit diberikan kewenangan untuk menyelidiki seluruh temuan yang dinilai perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktik akuntansi, dan GCG Bank BNP terlaksana dengan baik dan sehat.

Adapun perincian tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Bank BNP kepada publik dan atau pihak otoritas berwenang lainnya atas laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank BNP;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait kegiatan Bank BNP;

Audit Committee Charter

The Board of Commissioners ensures that the Audit Committee is able to carry out its duties effectively. In order to improve the effectiveness of the duties and responsibilities of the Audit Committee, the committee is equipped with the Audit Committee Charter which is the "Guidelines and Procedures of the Audit Committee", a necessary tool that provides a basis the work of the Audit Committee and to provide clarity to all parties associated with the tasks and responsibilities of the Audit Committee, i.e. the Board of Commissioners, the Management, Internal Audit Unit (IAU), as well as other units and other committees related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Consequently, the Audit Committee Charter was drafted pursuant to the prevailing regulations and continues to be periodically reviewed. It was approved through the Board of Commissioners Decree No. 008-KOM/KEP/11/2015 on the Ratification of the Amendment to the Charters of Committees under the Board of Commissioners, dated 13 November 2015. The Charter contains among others the following aspects:

1. Background
2. References
3. Definitions
4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Audit Committee Duties & Responsibilities

Bank BNP's Audit Committee has the duties and responsibilities to perform supervision on financial reporting, internal control and corporate governance of Bank BNP. To facilitate the Committee in carrying out its duties, the Audit Committee is authorized to conduct necessary investigation on all findings as an effort to ensure that the Bank's internal control, accounting practices and GCG practices are proper and sound.

The details of the Audit Committee's duties and responsibilities are:

1. Reviewing financial information issued by Bank BNP to the public and or other authorities on the financial statements, projections and other statements relating to financial information of Bank BNP;

2. Reviewing compliance with the prevailing regulations relating to the activities of Bank BNP;

3. Memberikan pendapat yang bersifat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan jasa layanan (*fee*);
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa internal/eksternal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Manajemen;
6. Melakukan evaluasi atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank BNP;
7. Melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank BNP.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai Laporan Keuangan dan/atau hal-hal lain yang disampaikan oleh Direksi;
2. Melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait dan pihak-pihak lain di Bank BNP serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa Bank BNP untuk memperoleh informasi dan klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite Audit;
3. Meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Auditor Eksternal, serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya;
4. Meminta Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Audit Eksternal, melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengakses data/informasi tentang karyawan, data asset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
6. Meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Selama 2016, Komite Audit mengadakan 6 (enam) kali rapat, dengan tingkat kehadiran 94%. Hasil rapat berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang ditetapkan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Audit disajikan pada tabel berikut:

3. Providing independent opinion in case of disagreements between the Management and the Public Accountant;
4. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of the Public Accountant based on the considerations of independence, scope of assignment, and fee;
5. Reviewing implementation of inspection by internal/external examiners and supervising the implementation of follow up actions taken by the Management;
6. Evaluating complaints relating to accounting and financial reporting processes in Bank BNP;
7. Conducting evaluations and advising the Board of Commissioners in relation to the potential conflict of interest in Bank BNP.

Audit Committee Authority

In performing its duties, the Audit Committee has the authority to:

1. Give opinion to the Board of Commissioners on the Financial Reports and or other matters submitted by the Board of Directors;
2. Communicate with relevant work units and other parties in Bank BNP as well as the public accounting firm that audits Bank BNP to obtain information and clarification and request documents and reports, in relation to the implementation of the tasks of the Audit Committee;
3. Request for Inspection Result Report (LHP) from the Internal Audit Unit (IAU) and the External Auditor, as well as institutional supervisors/other parties;
4. Request the Internal Audit Unit and/or the External Auditor to conduct special inspection/investigation, if there is a strong suspicion of foul play, violations of the law or the prevailing regulations;
5. Access the data/information about employees, assets data, as well as other resources related to the performance of its duties;
6. Request for outside help in specific and highly technical audits with the approval of the Board of Commissioners.

Audit Committee Meetings

Throughout 2016, the Audit Committee held 6 (six) meetings with 94% attendance rate. Results of the meetings, taking the form of recommendations as well as decisions, were recorded in the minutes of meetings and properly documented.

The frequency of meetings and attendance of the Audit Committee members are provided in the table below:

No	Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Audit Audit Committee Meetings		
			Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % ttendance
1	Bachtiar Alam	Ketua Komite/Komisaris Independen Committee Chairman/Independent Commissioner	6	5	83%
2	Elizabeth Tiur Manurung	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	6	6	100%
3	Inge Barlian	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	6	6	100%

Agenda Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting Agendas

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
17 Februari 2016	Pembahasan Hasil Pemeriksaan KAP sebelum *Exit Meeting*	Discussion on external auditor's audit result prior to Exit Meeting
	Lain-lain	Others
22 April 2016	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I Tahun 2016	Report of Follow-up to IAU Audit Results for Q1/2016
	Lain-lain	Others
8 September 2016	Pemeriksaan KAP	External auditor's audit result
12 Agustus 2016	Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan II Tahun 2016	Report of Follow-up to IAU Audit Results for Q2/2016
	Lain-Lain	Others
20 Oktober 2016	Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan III Tahun 2016	Report of Follow-up to IAU Audit Results for Q3/2016
	Lain-Lain	Others
22 Desember 2016	Laporan Kinerja Komite Semester II – 2016	Committee Performance Report for 2nd Semester 2016
	Lain-lain	Others

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Audit

Selama 2016 anggota Komite Audit mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Audit Committee Training/Education Programs

In 2016 members of the Audit Committee participated in the following competence enhancement programs:

Nama Name	Materi Pelatihan/ Training Material	Waktu & Tempat Pelatihan Training Period & Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Training type & Organizer
Bachtiar Alam	• Pelatihan BSMR Level 3;	2-3 Mei 2016, Jakarta	Sertifikasi/Certification, GPS
	• Penerapan Manajemen Risiko Operasional menggunakan strategi yang efektif, Kuat & Sesuai Kebutuhan.	24-25 Agustus 2016, Jakarta	Training, Risk Management Guard
Elizabeth Tiur Manurung	• Audit Methodology, Risk Based Audit (RBA) Planning, dan Review Internal;	11-12 Mei 2016, Jakarta	Training, RMG
	• IT Based Enterprise Risk Management.	18 November 2016, Jakarta	Training, IAMI Atmajaya
Inge Barlian	• Audit Methodology, Risk Based Audit (RBA) Planning, dan Review Internal;	11-12 Mei 2016, Jakarta	Training ,RMG
	• Operational Risk Indentification & Analysis;	16-17 November 2016, Bandung	Training, RMG
	• Strategic Workshop & Panel Discussion 2017; Economic & Financial Outlook.	23 November 2016, Jakarta	Training, RMG

Laporan Pelaksanaan Tugas

Komisaris melakukan fungsi pengawasan proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi GCG.

Pada 2016 Komite Audit melaksanakan beberapa hal, antara lain:

1. Memberikan rekomendasi mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Tahun Buku 2016, yaitu Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a), *independent member* BKR International.
2. Menanggapi hasil temuan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali terkait kelengkapan dokumen pemeriksaan untuk menjadi masukan dan pertimbangan bagi KAP.
3. Menberikan rekomendasi dan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Manajemen.
4. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara intensif dan berkala.
5. Membantu melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan komunikasi secara langsung maupun dalam rapat dengan Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
6. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
7. Melakukan pengawasan atas penyusunan laporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.

Hasil evaluasi Komite Audit menunjukkan bahwa seluruh proses kegiatan Bank BNP telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG.

Hal senada terdapat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 yang disajikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Independensi dan objektivitas KAP dalam mengaudit Laporan Keuangan Bank BNP berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Report of Duties Implementation

The Audit Committee reported the results of its supervision to the Board of Commissioners after performing its duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners to supervise financial reporting process, risk management, auditing, and GCG implementation.

In 2016 the Audit Committee carried out a number of tasks, among others:

1. Provided recommendation for the appointment of Public Accounting Firm for the audit of the FY 2016 financial statements, namely Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a), independent member of BKR International.
2. Provided response to the findings of the Public Accounting Firm Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) as regards completeness of audit documentation to be used as input and consideration of the Public Accounting Firm.
3. Provided regular reports and recommendations and inputs to the Board of Commissioners to help the Board of Commissioners supervise the management.
4. Monitored and evaluated the duties and implementation of Internal Audit Unit intensively and periodically.
5. Monitored the follow up of audit result in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of financial reporting process, by communicating directly and via meetings with the Internal Audit Unit Head.
6. Monitored and evaluated the conformity of the audit implementation by Public Accountant Firm with the applicable Auditing Standards.
7. Supervised the financial statements preparation to ensure compliance with the applicable accounting standards.

The result of Audit Committee's evaluation indicated that the whole Bank BNP activity process has been able to support the risk management and GCG implementation.

Likewise, the Financial Statements for FY 2016 presented by the Public Accounting Firm (KAP) and has been in accordance with applicable Financial Accounting Standards and Bank Indonesia Regulations. The independence and objectivity of KAP in auditing the Bank BNP Financial Statements is guided by auditing standard stipulated by Indonesia Accountant Association (IAI).

Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris

Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan GCG melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris, Bank BNP membentuk Komite Pemantau Risiko yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan perbankan.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Pemantau Risiko dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengefektifkan tugas Komite Pemantau Risiko, maka diperlukan Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko", Piagam Komite Pemantau Risiko ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Pemantau Risiko dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Tugas Komite Pemantau Risiko, yaitu Dewan Komisaris, Manajemen, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Divisi Kepatuhan serta unit kerja dan komite-komite lain yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Piagam Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 008-KOM/KEP/11/2015 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris tanggal 13 November 2015. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Definisi
4. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan Dewan Komisaris terhadap Direksi dalam penerapan manajemen risiko. Dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai analisis sistem manajemen risiko dan perbaikannya, Komite Pemantau Risiko Bank BNP melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

Other Committees Under the Board of Commissioners

Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is formed to increase the implementation of GCG by enhancing the Board of Commissioners' functions. Bank BNP formed the Risk Monitoring Committee, comprising 3 (three) members, namely 1 Independent Commissioner as Committee Chairman and 2 (two) independent parties with expertise in risk management and banking.

Risk Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners ensures that the Risk Monitoring Committee is able to carry out its duties effectively and efficiently. In improving the efficacy of the tasks of the Risk Monitoring Committee, a Guideline and Work Procedures for the Risk Monitoring Committee in the form of a Risk Monitoring Committee Charter is required as a foundation for the work of the Risk Monitoring Committee and to provide clarity of information to all parties dealing with the Risk Monitoring Committee, namely the Board of Commissioners, the Management, the Risk Management Unit (RMU), the Compliance Division, and other work units and committees related to Good Corporate Governance (GCG). Accordingly, the Risk Monitoring Committee Charter has been formulated based on the prevailing regulations and is reviewed regularly and has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners No. 008-KOM/KEP/11/2015 on the Ratification of the Amendment to the Charters of Committees under the Board of Commissioners dated 13 November 2015. The Risk Monitoring Committee Charter contains among others the following:

1. Background
2. References
3. Definitions
4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Duties of the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is responsible for assisting the supervision and advisory functions of the Board of Commissioners on the Board of Directors with regard to risk management. To provide recommendations to the Board of Commissioners in reviewing the risk management system and its improvements in the Bank, Risk Monitoring Committee carries out the following tasks:

1. Menelaah Kecukupan Kebijakan Manajemen Risiko;
2. Melakukan penelaahan atas berfungsinya manajemen risiko;
3. Melakukan penelaahan atas kualitas informasi;
4. Laporan Profil Risiko yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia;
5. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko; dan
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Untuk melaksanakan tugasnya, anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Pedoman Kerja yang berlaku memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan terhadap masalah yang timbul.
2. Memperoleh informasi secara menyeluruh tentang aset, liabilitas, serta sumber daya Bank lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pejabat eksternal dalam melaksanakan fungsi pemantauan risiko dan kegiatan lainnya (apabila ada).
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko dapat meminta bantuan tenaga ahli, dan atau Konsultan Independen.
5. Melakukan pertemuan dengan pihak eksternal, termasuk menghadiri pertemuan anggota Komite Eksekutif apabila diperlukan.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta komite–komite lain yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Surat Keputusan NOKEP: 060-DIR/KOM/07/2015 tanggal 6 Juli 2015, susunan Komite Pemantau Risiko pada akhir 2016 adalah:

Ketua : Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Anggota : Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.,CA
Anggota : Dra. Inge Barlian, M.Sc Akt.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di dalam **Profil Anggota Komite Audit**.

1. Review the Adequacy of Risk Management Policy;
2. Review the functioning of risk management;
3. Review the quality of information;
4. Risk Profile Report submitted to Bank Indonesia;
5. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners in relation to the policy of risk management and its implementation; and
6. Provide advice and recommendations to the Board of Commissioners regarding the Risk Management Policy and its implementation.

Risk Monitoring Committee Authority

To conduct their duties, the members of the Risk Monitoring Committee in accordance with the prevailing regulations have the following authority:

1. Review issues that arise.
2. Obtain information thoroughly on assets, liabilities, and other resources of the Bank in line with its performance of duties.
3. Directly communicate with the employees, including the Board of Directors and external officers in performing the risk monitoring function and other activities (if any).
4. When necessary, and by written approval from the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee may acquire outside help from experts and or independent consultants.
5. Conduct meetings with external parties, including attending the meetings of the Executive Committee when necessary.

In carrying out the above authority, the Risk Monitoring Committee may cooperate with the Risk Management Unit (RMU), and other committees under the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Composition

In accordance with the Decree NOKEP: 060-DIR/KOM/07/2015 dated 6 July 2015, the composition of the Risk Monitoring Committee at the end of 2016 was as follows:

Chairman: Bachtiar Alam, M.Si., A.M., Ph.D.
Members: Dr. Elizabeth Tiur Manurung, Msi.Ak.,CA
Members: Dra. Inge Barlian, M.Sc.Akt.

Profile of the Risk Monitoring Committee Members

Profiles of the Chairman and Members of the Risk Monitoring Committee are presented in the **Profile of the Audit Committee Members.**

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama 2016, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran 89%. Hasil rapat berupa kajian, analisis maupun rekomendasi dan keputusan yang telah ditetapkan, dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko disajikan pada tabel berikut:

Risk Monitoring Committee Meetings

Throughout 2016, the Risk Monitoring Committee organized 15 (fifteen) meetings with 89% attendance rate. Results of the meetings, such as studies, analysis, recommendations or decisions, were stated in minutes of meetings and properly documented.

The frequency of meetings and attendance of the Risk Monitoring Committee members are provided in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Bachtiar Alam	Ketua Komite/Komisaris Independen Committee Chairman/Independent Commissioner	15	15	100%
Elizabeth Tiur M.	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	15	13	87%
Inge Barlian	Anggota Komite Independen Independent Committee Member	15	12	80%

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting Agendas

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
8 Januari 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan November 2015	Presentation of Monthly Risk Management Report for November 2015
	Lain-lain	Others
29 Januari 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Desember 2015	Presentation of Monthly Risk Management Report for December 2015
	Lain - lain	Others
26 Februari 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Januari 2016	Presentation of Monthly Risk Management Report for January 2016
	Lain-lain	Others
23 Maret 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Februari 2016	Presentation of Monthly Risk Management Report for February 2016
	Lain-Lain	Others
22 April 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Maret 2016	Presentation of Monthly Risk Management Report for March 2016
	Lain-Lain	Others
27 Mei 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan April 2016	Presentation of Monthly Risk Management Report for April 2016
	Lain-lain	Others
24 Juni 2016	*Pending matters*	Pending matters
	Presentasi Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Mei 2016	Presentation of Monthly Risk Management Report for May 2016
	Lain-lain	Others

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
15 Juli 2016	- Pembahasan mengenai pemberian kredit	Discussion on lending
	- Lain-lain	Others
22 Juli 2016	- Pembahasan mengenai file kredit	Discussion on credit file
	- Lain-lain	Others
2 Agustus 2016	- Laporan Manajemen Risiko Juni 2016	Risk Management Report for June 2016
	- Lain-lain	Others
2 September 2016	- Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Juli 2016	Risk Management Report for July 2016
	- Lain-lain	Others
29 September 2016	- Laporan Manajemen Risiko Agustus 2016	Risk Management Report for August 2016
	- Lain-lain	Others
26 Oktober 2016	- Laporan Manajemen Risiko bulan September 2016	Risk Management Report for September 2016
	- Lain-lain	Others
24 November 2016	- Laporan Manajemen Risiko bulan Oktober 2016	Risk Management Report for October 2016
	- Lain-lain	Others
22 Desember 2016	- Laporan Kinerja Komite Semester II – 2016	Committee Performance Report for 2nd Semester 2016
	- Lain-lain	Others

Program Pendidikan/Pelatihan Komite Pemantau Risiko
Program Pendidikan/Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat di dalam Program Pendidikan/Pelatihan Anggota Komite Audit.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2016 Komite Pemantau Risiko melaksanakan beberapa hal, antara lain:
1. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan yang seharusnya;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan gambaran tentang risiko kepada Dewan Komisaris;
3. Memberikan laporan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya termasuk memberikan saran dan rekomendasi terkait dengan peningkatan pengendalian risiko;
4. Melakukan kaji ulang terhadap Komite Pemantau Risiko termasuk pengkinian Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Risk Monitoring Committee Training/Education Programs
The training/education programs for members of the Risk Monitoring Committee are presented in the section on Training/Education Programs for Members of the Audit Committee.

Report of the Risk Monitoring Committee's Duties Implementation
The Risk Monitoring Committee reports their supervision results to the Board of Commissioners after performing their duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners supervise the Bank.

In 2016 the Risk Monitoring Committee performed among others:
1. Evaluated the conformity of risk management policy with the implementation thereof;
2. Monitored and evaluated the execution of duties of the risk management committee and the risk management unit, in order to provide an overview of risk to the Board of Commissioners;
3. Provided reports to the Board of Commissioners on the execution of duties and responsibilities including provision of advice and recommendations related to improvement of risk management performance;
4. Reviewed the Risk Monitoring Committee including updating the Work Guideline of the Risk Monitoring Committee.

Hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko menunjukan bahwa seluruh proses kegiatan Bank BNP telah mampu mendukung pelaksanaan manajemen risiko dan GCG.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Remunerasi dan Nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari minimal 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjabat Ketua serta 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Kepala Divisi Human Capital & Corporate Services sebagai anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 143-DIR/KOM/11/2015 tanggal 23 November 2015, susunan Komite Nominasi & Remunerasi per akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Karel Tanok, Ak.
Anggota : Michio Atsuda
Anggota : Tatang Hermawan
Anggota : Bachtiar Alam
Anggota : Agung Subagiyo

The Risk Monitoring Committee's evaluation results show that all of the activities of Bank BNP have been adequately supporting the implementation of risk management and GCG principles.

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners in assisting the Board of Commissioners carry out its functions related to Remuneration and Nomination as regards members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and to provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for Executive Officers and employees in general, to be submitted to the Board of Directors.

The Remuneration and Nomination Committee consists of at least 3 persons, namely 1 (one) Independent Commissioner who serves as the Chairman, 1 (one) Commissioner and 1 (one) Human Capital & Corporate Services Division Head as members.

Based on the Decree NOKEP: 143-DIR/KOM/11/2015 dated 23 November 2015, the composition of the Remuneration and Nomination Committee as at the end of 2016 was as follows:

Chairman : Drs. Karel Tanok, Ak.
Member : Michio Atsuda
Member : Tatang Hermawan
Member : Bachtiar Alam
Member : Agung Subagiyo

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of Remuneration and Nomination Committee Members

Drs. Karel Tanok, Ak.

Warga Negara Indonesia, 78 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen pada RUPST pada tanggal 26 Juni 2015, dan pertama kali menjadi Komisaris Independen Bank BNP pada RUPST tanggal 26 Mei 2001. Dengan demikian beliau telah menjalankan masa jabatannya melampaui 2 (dua) periode sesuai dengan SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (Butir III no. 8.i) oleh karenanya Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen telah diterima Perseroan. Pemegang gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 1967. Pernah bekerja sebagai Akuntan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat (1968–1973), Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran (1969–1982), Senior Consultant Group PT Jasumana, General Manager PT Carlo Erba, Direktur Keuangan & Administrasi PT Naintex, dan Managing Partner Kantor Akuntan Drs. Karel Widyarta. Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2016 antara lain Lokakarya Akuntansi dan Audit *Overview* Proses Akuntansi Terkait Tutup Buku EOY 2015 dan Pemutakhiran PSAK-IFRS & SPAP-ISA Terkait Pelaporan Keuangan dan Opini Auditor Independen, Kode Etik Profesi Akuntan Publik & Standar Pengendalian Mutu KAP, Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pengaturan Bersama Serta Perjanjian Konsesi Jasa, Lokakarya Akuntansi – Audit Isu Terkini Implementasi PSAK 70 (2016) Terkait UU Pengampunan Pajak Beserta Aspek Auditnya, Akuntan Profesional Membangun Negeri, dan Penerapan Manajemen Risiko Operasional Menggunakan Strategi yang Efektif.

Drs. Karel Tanok, Ak.

Indonesian citizen, 78 years old. Appointed as Independent Commissioner at the AGMS on 26 June 2015, and was initially appointed as Independent Commissioner of Bank BNP at the AGMS on 26 May 2001. Thus he had served for more than two terms of office, and thus in accordance with SE OJK No. 30/SEOJK.04/2016 on the Form and Content of Annual Report of Issuers or Public Companies (Paragraph III no. 8.i), the Statement of Independence of the Independent Commissioner has been accepted by the Company. Graduated with a bachelor's degree in Economics and Accounting from Padjajaran University in 1967. Previously worked as Accountant (BPKP) West Java Representative (1968–1973), Lecturer at the Faculty of Economics, Padjajaran University (1969–1982), Senior Consultant for PT Jasumana Group, General Manager of PT Carlo Erba, Finance &Administration Director of PT Naintex, and Managing Partner at Public Accounting Firm of Drs. Karel Widyarta. Participated in a number of training programs in 2016, including Workshop on Accounting and Audit Overview of Accounting Process related to EOY 2015 and Updating of PSAK-IFRS & SPAP-ISA related to Financial Reporting and Independent Auditor's Opinion, Code of Conduct for Public Accountants & Public Accounting Firm Quality Control Standards, Accounting & Financial Reporting for Jointly Controlled Entities and Agreement of Services Concessions, Workshop on Accounting – Latest Issues Audit related to Implementation of PSAK 70 (2016) concerning Tax Amnesty Law and Its Audit Aspects, Professional Accountants Building the Nation, and Implementation of Operational Risk Management using Effective Strategies.

Agung Subagiyo
44 tahun, Warga Negara Indonesia. Menjadi Kepala Divisi Human Capital & Corporate Services sejak tahun 2009. Latar belakang pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari STIE Inaba Bandung tahun 2008, Magister Manajemen dari Universitas BSI Bandung tahun 2011. Pengalaman bekerja sebagai Team Leader/Senior Consultant di PT Asuransi Bumi Asih Jaya (1998–1999), sebagai Manager di Marubeni Consortium (1993–1998). Pelatihan yang pernah diikuti selama tahun 2016 antara lain, New Regulation Update POJK No. 45/POJK.03/2015 – Prinsip Remunerasi dan Implikasinya bagi Sistem Kompensasi Perbankan, Training Strategi Eksekusi Sesuai UU yang Berlaku & Pengelolaan Dampak PHK, *Corporate Workshop* 2016, Sosialisasi Kebijakan *Tax Amnesty,* dan Indonesia *Banking Human Capital Conference*.

Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya dapat dilihat di **Profil Dewan Komisaris.**

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengefektifkan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi, maka diperlukan Piagam Remunerasi dan Nominasi yang merupakan "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi", Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi ini diperlukan sebagai landasan kerja dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan untuk kejelasan bagi semua pihak yang berkaitan dengan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengkinian piagam

Agung Subagiyo
44 years old, Indonesian citizen. Became the Human Capital & Corporate Services Division Head in 2009. Has a bachelor's degree in Economics majoring in Management from STIE Inaba Bandung in 2008 and Master of Management from BSI University Bandung in 2011. Previously worked as Team Leader/Senior Consultant at PT Asuransi Bumi Asih Jaya (1998–1999), and as Manager at Marubeni Consortium (1993–1998). Participated in a number of training programs in 2016, including New Regulation Update POJK No. 45/POJK.03/2015 – Remuneration Principles and Implications on the Banking Compensation System, Training on Execution Strategy based on the Prevailing Regulations & Handling of Job Termination Impacts, Corporate Workshop 2016, Dissemination of Tax Amnesty Policy, and the Indonesia Banking Human Capital Conference.

Profiles of the other Members of the Remuneration and Nomination Committee are presented in the **Profile of the Board of Commissioners.**

Remuneration and Nomination Committee Charter
The Board of Commissioners ensures that the Remuneration and Nomination Committee is able to carry out its duties effectively and efficiently. In improving the efficacy of the tasks of the Remuneration and Nomination Committee, a Guideline and Work Procedures for the Remuneration and Nomination Committee in the form of a Remuneration and Nomination Committee Charter is required as a foundation for the work of the Remuneration and Nomination Committee and to provide clarity of information to all parties dealing with the Remuneration and Nomination Committee. Updating of

sedang dilakukan oleh Bank BNP mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai kebijakan Komite Remunerasi dan Nominasi, seperti POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, serta POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 002-KOM/KEP/01/2016 tentang Pengesahan Perubahan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 22 Januari 2016. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Referensi
3. Definisi
4. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko
5. Kode Etik
6. Pedoman Komite
7. Komposisi Keanggotaan
8. Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko
9. Pengangkatan Keanggotaan
10. Masa Tugas Anggota
11. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi ialah sebagai berikut:

1. Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (*GCG) dalam pengelolaan Bank yang meliputi transparansi, akuntabilitas. pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran;
2. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan;
3. Dalam menentukan kebijakan Remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi wajib mempertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:
   a. Kondisi kinerja keuangan Bank dan Kewajiban pemenuhan cadangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran *peer group*;
   d. Sasaran dan strategi jangka panjang Bank;
4. Menyusun kebijakan dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

the charter is currently underway at Bank BNP, to align with the regulations issued by the regulator concerning the policy for the Remuneration and Nomination Committee, such as POJK No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 on Implementation of Corporate Governance in Remuneration in Commercial Banks, and POJK No. 27/POJK.03/2016 dated 22 July 2016 on the Fit and Proper Test for Primary Parties in Financial Services Institutions. The Remuneration and Nomination Committee Charter has been ratified by the Decree of the Board of Commissioners No. 002-KOM/KEP/01/2016 on the Ratification of the Amendment to the Remuneration and Nomination Charter dated 22 January 2016. The Remuneration and Nomination Committee Charter contains among others the following:

1. Background
2. References
3. Definitions
4. Audit Committee Vision and Mission
5. Code of Conduct
6. Guidelines
7. Composition of Membership
8. Terms of Membership
9. Appointment of Members
10. Term of Office
11. Rules and Procedures

Remuneration and Nomination Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

1. Supporting the continuous implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles in the management of the Bank, covering the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness;
2. Evaluating the Remuneration Policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers and Employees;
3. In determining the Remuneration Policy, the Remuneration and Nomination Committee must consider the following components:
   a. The Bank's financial performance and condition and minimum reserve requirement as stipulated in the prevailing regulations;
   b. Individual work performance;
   c. Fairness in the peer group;
   d. The Bank's long-term strategies and goals;
4. Preparing policies and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to be submitted to the GMS;

5. Memberikan rekomendasi tentang Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS melalui Dewan Komisaris;

6. Memberikan rekomendasi tentang Calon Pihak Independen yang dapat menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan prosedur yang berlaku memiliki wewenang untuk membuat Sistem Remunerasi dan Nominasi Perusahaan.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan 9 (sembilan) kali rapat, dengan seluruh hasil rapat yang memerlukan keputusan dari pemegang saham akan direkomendasikan untuk diagendakan dalam pelaksanaan RUPS dan didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi disajikan pada tabel berikut:

5. Providing recommendations on the candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to be submitted to the GMS through the Board of Commissioners;
6. Providing recommendations on the candidates from independent parties for members of the Remuneration and Nomination Committee, to the Board of Commissioners.

Remuneration and Nomination Committee Authority

In performing their duties, members of the Remuneration and Nomination Committee in accordance with the prevailing procedures have the authority to create a Corporate Remuneration and Nomination System.

Remuneration and Nomination Committee Meetings

In 2016, the Remuneration and Nomination Committee held 9 (nine) meetings, with the entire meeting results that require the decision from the shareholders will be proposed to be scheduled in the GMS and properly documented.

The frequency of meetings and attendance of the Remuneration and Nomination Committee members are provided in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Remunerasi/Nominasi		
		Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Frekuensi Frequency (%)
Karel Tanok	Ketua Komite/Komisaris Independen Committee Chairman/Independent Commissioner	9	9	100%
Michio Atsuda	Anggota Komite Committee Member	9	3	33%
Hideki Horikoshi	Anggota Komite Committee Member	9	9	100%
Tatang Hermawan	Anggota Komite Committee Member	9	0	0%
Agung Subagiyo	Kepala Divisi HC & Services HC & Services Division Head	9	9	100%

Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting Agendas

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
22 Januari 2016	Upah Minimum Regional (UMR)	Regional minimum wage
	Kenaikan gaji karyawan	Salary increase
	Nominasi & Remunerasi BOC-BOD (Direktur Kredit, Perencanaan & IT)	Nomination & Remuneration for BOC-BOD (Credit, Planning & IT Director)
	Lain-lain	Others
11 Maret 2016	Kandidat Komisaris Independen	Candidates for Independent Commissioners
	Lain-lain	Others

Tanggal Rapat / Meeting Date	Materi Rapat	Meeting Agenda
8 April 2016	Kandidat BOC-BOD tahun 2016-2017	Candidates for BOC-BOD 2016-2017
	Remunerasi, Benefit, Bonus/Tantiem BOC-BOD periode 2016-2017	Remuneration, Benefits, Bonuses for BOC-BOD for 2016-2017
	Lain-lain	Others
13 Mei 2016	Kandidat BOC-BOD tahun 2016-2017 (final)	Candidates for BOC-BOD 2016-2017 (final)
	Remunerasi, Benefit, Bonus/Tantiem BOC-BOD periode 2016-2017 (final)	Remuneration, Benefits, Bonuses for BOC-BOD for 2016-2017 (final)
	Lain-Lain	Others
12 Agustus 2016	BPJS	BPJS
	Dana Pensiun	Pension Fund
	Lain-Lain	Others
29 September 2016	Remunerasi dan Nominasi BOC-BOD	Remuneration & Nomination of BOC-BOD
	Lain-lain	Others
20 Oktober 2016	Penilaian Performance Management BOC & BOD	BOC-BOD Management Performance Assessment
	Lain-lain	Others
10 November 2016	Pengembangan Program Pendidikan Karyawan	Employee Educational Development Programs
	Lain-lain	Others
15 Desember 2016	Evaluasi kinerja Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2016	Remuneration & Nomination Committee 2016 Performance Evaluation
	Rencana Kerja Komite Remunerasi & Nominasi tahun 2017	Remuneration & Nomination Committee 2017 Work Plan
	Lain-lain	Others

Program Pendidikan/ Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama 2016 anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengikuti sejumlah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Remuneration & Nomination Committee Training/ Education Programs

In 2016 members of the Remuneration & Nomination Committee participated in the following competence enhancement programs:**Report of the Remuneration and**

Nama Name	Materi Pelatihan/ Training Material	Waktu & Tempat Pelatihan Training Period & Venue	Jenis Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan Training type & Organizer
Karel Tanok	• Penerapan Manajemen Risiko operasional menggunakan strategi yang efektif, kuat dan sesuai kebutuhan;	24-25 Agustus 2016, Jakarta	Training, RMG
	• Lokakarya Akutansi dan Audit Overview Proses Akuntansi terkait tutup Buku EOY 2015 dan Pemutakhiran PSAK-IFRS & SPAP-ISA Terkait Pelaporan Keuangan dan Opini Auditor Independen;	27 Februari 2016, Bandung	IAPI
	• Kode etik Profesi Akuntan publik dan standar pengendalian mutu KAP;	16 April 2016, Bandung	IAPI
	• Akuntansi& pelaporan keuangan pengaturan bersama serta perjanjian konsesi jasa;	13 Mei 2016, Bandung	IAPI
	• Lokakarya Akuntansi – Audit Isu terkini implementasi PSAK 70 (2016) terkait uu pengampunan pajak beserta aspek auditnya;	12 November 2016, Bandung	IAPI
	• Akuntan profesional membangun negeri.	9 Desember 2016, Bandung	IAI

Bachtiar Alam	• Pelatihan BSMR Level 3; • Penerapan Manajemen Risiko Operasional menggunakan strategi yang Efektif, Kuat & Sesuai Kebutuhan	2-3 Mei 2016, Jakarta 24-25 Agustus 2016, Jakarta	Sertifikasi, GPS Training, Risk Management Guard
Agung Subagiyo	• New Regulation Update POJK No.45/POJK.03/2015 – Prinsip Remunerasi dan Implikasinya bagi Sistem Kompensasi Perbankan; • Training Strategi Eksekusi Sesuai UU yang Berlaku & Pengelolaan Dampak PHK; • Corporate Workshop 2016; • Sosialisasi Kebijakan Tax Amnesty; • Indonesia Banking Human Capital Conference	31 Maret s/d 1 April 2016, Jakarta 13-14 April 2016, Jakarta 23 Juli 2016, Bandung 23 Agustus 2016, Bandung 13 Oktober 2016, Jakarta	Infobank Learning Center PT. Mitra Kelola Insani Internal BNP BNP University Perbanas

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris setelah menjalankan tugas secara profesional dan independen dalam membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan.

Pada tahun 2016 Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan penyusunan tentang struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyetujui usulan Nominasi dan Remunerasi untuk Direktur Kredit, Perencanaan & IT; dan
5. Menyetujui perubahan piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil evaluasi Komite Remunerasi dan Nominasi menunjukan bahwa seluruh proses kegiatan pemberikan remunerasi dan nominasi telah sesuai dengan penerapan manajemen risiko.

Nomination Committee's Duties Implementation

The Remuneration and Nomination Committee reports their supervision results to the Board of Commissioners after performing their duties professionally and independently in assisting the Board of Commissioners supervise the Bank.

In 2016 the Remuneration and Nomination Committee performed among others:

1. Assisted the Board of Commissioners conduct assessment of performance and conformity with remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
2. Provided recommendation to the Board of Commissioners and formulated the remuneration structure for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
3. Provided recommendation to the Board of Commissioners on the amount of remuneration for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
4. Approved the Nomination & Remuneration recommendation for he Credit, Planning & IT Director; and
5. Approved the amendments to the Remuneration & Nomination Charter.

The Remuneration and Nomination Committee's evaluation results show that all of the remuneration and nomination activities have been adequately supporting the implementation of risk management.

Komite-Komite Di Bawah Direksi

Direksi dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah tanggung jawab Direksi dan mendukung peran dan tugas keseharian Direksi meliputi:

1. Komite Pemutus Kredit, sesuai dengan SK NOKEP 125-DIR/RM/10/2015 di mana tugasnya:
   a. Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
   b. Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
      - Debitur-debitur besar;
      - Industri-industri yang tidak biasa diterima atau ditangani Bank BNP.
   c. Melakukan koordinasi dengan ALCO, dalam aspek pendanaan perkreditan (pengelolaan sumber dana dan penyediaan dana).
   d. Memastikan bahwa keputusan dan persetujuan pemberian kredit dilakukan berdasarkan ketersediaan informasi yang maksimal dan transparan untuk mendukung proses analisa kredit dan proses persetujuan kredit yang optimal.
   e. Memastikan bahwa keputusan pemberian kredit telah dilakukan melalui analisa/evaluasi kuantitatif dan kualitatif secara objektif, jujur, cermat, independen dan komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan dampak ekonomi makro dan mikro, *industry analysis*, *business cycle* debitur dan prospek usaha debitur, kompetisi atau persaingan usaha, karakter debitur, kemampuan membayar debitur, permodalan debitur, tujuan kredit, sumber pembayaran atau *cash flow*, profitabilitas, kemampuan agunan sebagai *second way out*, *risk bearing ability* berupa asuransi atas agunan, dan *protection* atau */guarantee* dari induk perusahaan.
   f. Memastikan keputusan pemberian kredit telah memenuhi atau sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, azas-azas perkreditan yang sehat, maupun Kebijakan Perkreditan dan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan Bank, dalam upaya membangun dan meningkatkan budaya risiko kredit dan kepatuhan bank yang sehat dan *prudent*.
   g. Memastikan bahwa dalam melakukan keputusan pemberian kredit telah dilakukan proses identifikasi terhadap sumber-sumber risiko kredit terkait dengan risiko risiko lainnya, yakni *market risk, legal risk, strategic risk, operational risk*, dan risiko-risiko lain yang dianggap relevan).

Committees Under The Board Of Directors

Board of Directors are supported by committees under its responsibility, to assist in the execution of roles and duties of the Board of Directors, including:

1. Credit Approval Committee, in accordance with Decree NOKEP 125-DIR/RM/10/2015, whose duties include:
   a. Providing direction if it is deemed necessary to perform more thorough and comprehensive credit analyses;
   b. Making decisions or providing recommendations on lending decision design proposed by the recommending party, in relation to:
      - Large debtors;
      - Uncommon industries.
   c. Coordinating with the ALCO in terms of loan funding (funding source management and provision of funds).
   d. Ensuring that the decisions and credit approvals are arrived at based on the optimal presence of transparent information, in order to support credit analysis process and optimal credit approval process.
   e. Ensuring that credit approvals have taken into account the quantitative analysis/evaluation and qualitative evaluation in an objective, honest, prudent, independent and comprehensive manner, and considering the current macro- and microeconomic conditions and their impacts, industry analysis, business cycle of the debtor, business competition, debtor's characteristics, debtor's ability to repay loans, debtor's capital structure, loan purpose, cash flows, profitability, usability of collateral as second way out, risk bearing ability in the form of insurance of collaterals, and protection/guarantee from the parent company.
   f. Ensuring that credit approvals have been in compliance with the regulations of the Financial Services Authority, the prevailing regulations, the sound lending principles, as well as the Lending Policy and Lending Guidelines of the Bank, in order to develop and increase the credit risk culture and compliance risk culture of a financially sound and prudent bank.
   g. Ensuring that prior to credit approval, identification has been done on the potential sources of credit risk in relation to other risks, namely market risk, legal risk, strategic risk, operational risk, and other relevant risks.

h. Keputusan pemberian kredit harus mempertimbangkan *risk and return* seperti bobot risiko kredit, kecukupan modal Bank, besarnya cadangan kerugian kredit yang dibentuk, *pricing* (pemberian suku bunga) yang didasarkan pada suku bunga dasar kredit bank yang berdampak pada *interest income*, administrasi/*fee* dan provisi melalui analisa *cost and benefit*, jangka waktu kredit dan risiko konsentrasi kredit (portofolio kredit, sektor ekonomi, industri dan segmen bisnis).

i. Bertanggung jawab atas segala keputusan kredit dan persetujuan pemberian kredit terhadap penyimpangan dari standar penilaian kredit dan kebijakan perkreditan yang berlaku, dengan dilandasi pada alasan dan analisa yang kuat, serta harus memberikan tindakan mitigasi yang diperlukan dalam upaya meminimalisasi dampak risiko yang akan terjadi.

j. Memastikan bahwa setiap syarat dan ketentuan kredit termasuk dokumen dan perijinan yang diwajibkan (*Covenant*) telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan waktu yang telah ditentukan.

k. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuantan dan struktur organisasi Bank, Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko tidak memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan dan persetujuan pemberian kredit, namun hanya terbatas pada memberikan opini/komentar terkait dengan risiko kredit dan kepatuhan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemutus kredit, demikian pula halnya dengan Anggota Independen lainnya.

2. Asset Liabilities Committee (ALCO), bertugas untuk mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dana dan penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas, risiko suku bunga dan risiko nilai tukar yang terkendali sehingga diperoleh *high level and stable pattern of NIM* (*Net Interest Margin*). Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur sesuai dengan SK NOKEP: 046-DIR/RM/06/2015.
3. Komite Manajemen Risiko, bertugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko & toleransi risiko, kerangka manajemen risiko dan Kebijakan Rencana Darurat (*contingency plan*) apabila terjadi kondisi yang tidak normal; menyempurnakan proses Manajemen Risiko baik secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang berpengaruh terhadap kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; menetapkan kebijakan dan/atau rekomendasi terkait keputusan bisnis apabila terdapat ketidaksesuaian dengan Kebijakan dan

h. Credit approval must take into consideration the risk and return, such as the weighting of credit risk, the Bank's capital adequacy, amount of provision for impairment, pricing (setting of interest rate) based on the Bank's base lending interest rate affecting interest income, fees, and provisions through a cost and benefit analysis, loan time frame and risk of credit concentration (credit portfolio, economic sector, industry, and business segment).

i. Being responsible for all credit-related decisions and credit approvals against violations from the prevailing lending policies and credit evaluation standards, with sufficient grounds and strong analyses, and being responsible for providing mitigation measures required to minimize the potential risk impacts that may occur.

j. Ensuring that all lending requirements and provisions, including required covenants, have been fulfilled as per the agreed upon terms and timeframe.

k. In accordance with the Regulations of the Financial Services Authority and the Bank's organization structure, the Compliance & Risk Management Director has no authority to decide and approve any lending, as his/her authority is limited only to providing opinion/comment related to the credit risk and compliance risk that may be a point to be considered by the loan approval officer. The same applies to other Independent Parties.

2. Asset Liabilities Committee (ALCO), responsible for managing the policies and strategies in coordinating the fund resources and the use of the fund effectively and efficiently to achieve the optimum profitability for the Bank, while controlling liquidity risk, interest rate risk, and foreign exchange risk, so that a high level and stable pattern of Net Interest Margin (NIM) can be achieved. This committee is chaired by the President Director, in accordance with Decree NOKEP: 046-DIR/RM/06/2015.
3. Risk Management Committee, in charge of preparing the Risk Management policy and subsequent amendments thereof, the risk level and risk appetite, the framework for risk management, and contingency plan should abnormal conditions take place; enhancing risk management processes both regularly and incidentally as a result of changes in external conditions and/or internal to the Bank that have substantial effect on capital adequacy, risk profile, and ineffective implementation of the Bank's risk management based on evaluation results; determining the policy and/or recommendations related to business decisions should gaps occur between Policies and Procedures, for example when there is a significant excess of business expansion that

Prosedur, misalnya terjadi pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan; menyiapkan dan melakukan pembahasan hasil penilaian *self assessment* mengenai hasil penilaian *risk profile* triwulanan untuk disampaikan pada Rapat Direksi dan kepada Komite Pemantau Risiko; memberikan masukan kepada seketaris komite berupa topik yang dibicarakan pada rapat komite; Komite Manajemen Risiko mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Rapat Direksi; turut membangun dan menciptakan budaya risiko (*risk culture*) di seluruh unit kerja; serta memberikan pelaporan dan/atau rekomendasi kepada Rapat Direksi mengenai tugas dan pelaksanaan fungsi Komite Manajemen Risiko serta pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Komite ini diketuai oleh Presiden Direktur; sesuai dengan SK NOKEP: 048-DIR/RM/04/2016.

4. Komite Produk dan Aktivitas Baru, bertugas untuk mempertimbangkan setiap pengajuan Produk dan Aktivitas Baru dari unit kerja yang akan mengembangkan produk atau aktivitas di Bank BNP dengan memperhatikan kajian/opini/disposisi dari unit kerja terkait. Komite ini diketuai oleh Direktur Kredit, Perencanaan & Teknologi Informasi sesuai dengan SK NOKEP: 120-DIR/CPPM/06/2016.
5. Komite Kepatuhan, bertugas mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha serta mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank BNP termasuk ketentuan kehati-hatian Bank, Tingkat Kesehatan Bank, serta Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank BNP. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan SK NOKEP: 044-DIR/COMP/03/2016.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi, bertugas memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait dengan rencana strategis IT, pengembangan dan evaluasi sistem IT yang digunakan dan yang akan digunakan kemudian dan lain-lain. Komite ini diketuai oleh Direktur Kredit, Perencanaan & Teknologi Informasi sesuai dengan SK NOKEP: 099-DIR/IT/05/2016.
7. Komite Kebijakan Perkreditan, yang diketuai oleh Presiden Direktur sesuai dengan SK NOKEP: 122-DIR/RM/06/2016 memiliki fungsi sebagai berikut:
   a. Membantu Direksi dalam merumuskan terkait dengan kebijakan perkreditan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
   b. Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

is greater than the Bank's Business Plan as established and determined previously and the taking of position/risk exposure that is beyond the predetermined limits; preparing and discussing the self-assessment result on the quarterly risk profile evaluation result to be presented to the Board of Directors meetings and to the Risk Monitoring Committee; providing input to the secretary of committee related to the topics to be discussed in committee meetings; the Risk Management Committee has the authority to review and provide recommendation on issues related to risk management to be decided at the Board of Directors meeting; building and creating risk culture in all work units; and reporting and/or providing recommendations to the Board of Directors meetings on the duties and implementation of the Risk Management Committee's functions as well as the exercise of its authority. This committee is chaired by the President Director, in accordance with the Decree NOKEP: 048-DIR/RM/04/2016.

4. New Products and Activities Committee, in charge of carefully considering each application of new product and activity from the work units developing new products or activities in Bank BNP by taking into consideration the review, opinion, or disposition from the related work units. This committee is chaired by the Credit, Planning & Information Technology Director in accordance with the Decree NOKEP: 120-DIR/CPPM/06/2016.
5. Compliance Committee, in charge of implementing the compliance culture across all organization levels and business activities, and managing the Bank's compliance risk, including the provisions on banking prudence, the Bank's soundness level, and the implementation of good corporate governance (GCG) in Bank BNP. This committee is chaired by the Compliance and Risk Management Director in accordance with the Decree NOKEP: 044-DIR/COMP/03/2016.
6. Information Technology Steering Committee, in charge of providing recommendations to the Board of Directors related to the strategic IT plans, development and evaluation of IT systems currently used or will be used by the Bank, and so forth. This committee is chaired by the Credit, Planning & Information Technology Director in accordance with the Decree NOKEP: 099-DIR/IT/05/2016.
7. Credit Policy Committee, chaired by the President Director in accordance with the Decree NOKEP: 122-DIR/RM/06/2016, has the following functions:
   a. Assisting the Board of Directors in formulating lending policy by upholding the principle of banking prudence.
   b. Monitoring and evaluating the implementation of the lending policy in a consistent and consequent manner.

c. Melakukan pengkajian secara berkala terhadap KPB dan memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
d. Memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.

8. Komite Strategi *Anti-Fraud*, yang diketuai oleh Kepala Divisi Human Capital & Corporate Services sesuai dengan SK NOKEP: 056-DIR/COMP/06/2015, bertugas membantu manajemen Bank BNP dalam rangka pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti-Fraud pada seluruh jenjang organisasi di lingkungan Bank BNP, mengusulkan kode etik terkait dengan pencegahan fraud, mengusulkan strategi *anti-fraud* secara menyeluruh kepada manajemen Bank BNP serta melakukan pengawasan terhadap penerapannya, membantu manajemen dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya terkait peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*, melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud dan penetapan tindak lanjut, mengusulkan saluran komunikasi yang efektif dalam rangka pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian *fraud*, melakukan penilaian terhadap laporan terhadap *fraud* kepada Bank Indonesia serta penegak hukum. Komite Strategi *Anti-Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SK NOKEP: 056-DIR/06/2015.

Sekretaris Perusahaan & Hubungan Investor

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Bank BNP dengan otoritas Pasar Modal, pemegang saham dan investor/calon investor, media massa, dan pihak eksternal lainnya. Sekeretaris Perusahaan bertanggung jawab menyampaikan laporan tahunan, laporan triwulanan, mengelola laman Bank, rilis pers, dan media lainnya. Berdasarkan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat butir III.I.8, Bank BNP memiliki Sekretaris Perusahaan yang diatur dan ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

c. Reviewing the KPB regularly and monitor the developments and conditions of the credit portfolio.
d. Providing recommendations to the Board of Directors when changes or improvements to the KPB are required, by monitoring the developments and conditions of the credit portfolio.

8. Anti-Fraud Strategy Committee, chaired by the Human Capital & Corporate Services Division Head in accordance with the Decree NOKEP: 056-DIR/COMP/06/2015, in charge of supporting the management of Bank BNP in order to develop a culture and concern for anti-fraud at all organizational levels within Bank BNP, proposing elements to the code of conduct related to fraud prevention, propose an overarching anti-fraud strategy to the management of Bank BNP, and supervising the strategy's implementation, supporting the Bank's management in its aim to improve the quality of human resources related particularly to enhancing awareness for fraud and fraud control, conducting supervision and evaluation of fraud activities and determining the follow-up measures, proposing an effective communication channel to foster understanding and compliance with the policies and procedures of fraud control, carrying out assessments on the fraud reports and submitting said assessments to Bank Indonesia and the authorities. The Anti-Fraud Strategy Committee is directly responsible to the President Director and has a direct line of communication and reporting with the Board of Commissioners, in accordance with the Decree NOKEP: 056-DIR/06/2015.

Corporate Secretary & Investor Relations

The Corporate Secretary serves as a liaison between Bank BNP with Capital Market authorities, shareholders and investors/potential investors, the media, and other external parties. The Corporate Secretary is responsible for the submission of annual reports, quarterly reports, managing the Company's website, press releases and other media. In accordance with the Rule No. I-A on the Listing of Shares and Other Non-Share Securities Issued by Listed Companies, point III.I.8, Bank BNP has appointed a Corporate Secretary whose conduct is governed and defined by the prevailing regulations.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Mario Yahya
53 tahun, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, Jawa Barat, pada tahun 1963. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Perbankan Indonesia dan bergabung dengan Bank BNP pada tahun 1999. sebelumnya bekerja di PT Bank Umum Nasional (BUN) dari 1987 sampai 1998.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
   - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penguhubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Mario Yahya
53 years old, Indonesian Citizen, born in Sukabumi, West Java in 1963. Graduated with a bachelor's degree in Indonesian Banking and joined Bank BNP in 1999, after previously working at PT Bank Umum Nasional (BUN) from 1987 to 1998.

Based on the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary are:

a. Keeping abreast with the Capital Market Developments especially the prevailing regulations in the Capital Market;
b. Providing input to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to comply with the rules and regulations in the Capital Market;
c. To help the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing corporate governance which includes:
   - Information disclosure to the public, including the availability of information on the Company's website.
   - Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
   - Organizing and documenting the General Meetings of Shareholders;
   - Organizing and documenting the Board of Directors' and Board of Commissioners' Meetings; and
   - Implementing the corporate orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
d. Serving as a liaison between the Company with its Shareholders, the Financial Services Authority, and other Stakeholders.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan Bank BNP menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. X.I.4 No. 1. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan Bank BNP selama 2016 adalah:

1. Mengirimkan pemberitahuan dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan RUPS dan mempublikasikan hasil keputusan rapat;
2. Menjaga hubungan baik dengan otoritas Pasar Modal dan mempersiapkan laporan-laporan mengenai pengungkapan keterbukaan informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Melakukan koordinasi dan administrasi pencatatan kepemilikan saham dan tindakan korporasi;
4. Membuat Laporan Tahunan;
5. Melaksanakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
6. Melaksanakan program edukasi literasi dan inklusi keuangan untuk masyarakat;
7. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* (GCG);
8. Menjaga dan memelihara hubungan dengan media dan sarana informasi lainnya;
9. Menjadi juru bicara perusahaan dalam hal berhubungan dengan Media/Regulator/Investor; dan
10. Melaksanakan pemenuhan ketentuan V2 Peraturan Bursa No. I-A atas jumlah minimum pemegang saham, yang sebelumnya 36 pemegang saham menjadi 335 pemegang saham pada Oktober 2016.
11. Merevisi *Board Manual* Maret 2016;
12. Membuat Laporan Transparansi Pelaksanaan GCG Tahun 2015;
13. Menjadi anggota Tim Konglomerasi Keuangan dengan BTMU;
14. Mempersiapkan Kebijakan dan Prosedur Penerapan POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum; dan
15. Pembuatan video *e-learning* GCG.

Pendidikan/Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2016 Sekretaris Perusahaan mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:

Implementation of the Corporate Secretary's Duties

Corporate Secretary of Bank BNP performs its function and duties in accordance with the Rule No. X.I.4 No. 1. Activities conducted by the Corporate Secretary of Bank BNP in 2016 were as follows:

1. Delivered the notification and prepare things related to the implementation of GMS and published the meeting resolutions;
2. Maintained good rapport with the Capital Market authorities and prepare reports on the Company's information disclosure in accordance with the prevailing regulations;
3. Coordinated and administered the record-keeping of shares ownership and corporate actions;
4. Prepared the Annual Report;
5. Implemented CSR programs;
6. Implemented the financial literacy and inclusion programs for the public;
7. Assisted the Board of Directors and the Board of Commissioners in implementing good corporate governance (GCG);
8. Maintained relationship with the media and other means of information disclosure;
9. Acted as the Company's spokesperson in matters related to the Media/Regulators/Investors; and
10. Fulfilled the requirements of the IDX Regulation No. I-A point V2 on the minimum number of shareholders, from previously 36 shareholders to 335 shareholders as of October 2016.
11. Revised the Board Manual in March 2016;
12. Prepared the 2015 GCG Implementation Transparency Report;
13. Participated as member of the Financial Conglomeration Team with BTMU;
14. Prepared the Policy and Procedures for Implementation of POJK No. 45/POJK.03/2015 on Implementation of Corporate Governance in Providing Remuneration in Commercial Banks; and
15. Created the GCG e-learning video.

Corporate Secretary Education/Training Programs

In 2016, the Corporate Secretary participated in the following training programs and seminars intended to enhance the Corporate Secretary's competencies, covering:

Nama Name	Materi Pelatihan/ Training Material	Waktu & Tempat Pelatihan Training Period & Venue
Mario Yahya	• Sosialisasi PT. Pefindo Biro Kredit; • Seminar Corporate Social Responsibility Talk For Leaders; • Seminar Perubahan Penerapan PSAK Tahun 2016; • Corporate Workshop 2016; • Seminar "Indonesia Economic Outlook 2017"; • Workshop 6 GCG Series 2016.	19 Januari 2016 1 Februari 2016 1 Juni 2016 23 Juli 2016 23 November 2016 8-9 Desember 2016

Satuan Kerja Audit Internal & Sistem Pengendalian Internal

Fungsi SKAI

Fungsi audit internal di Bank BNP dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SKAI dengan jabatan *Internal Audit Division Head*. Dalam menjalankan fungsinya, SKAI berperan dalam:

- Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas.
- Membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengawasan atas transaksi keuangan, pelaksanaan peraturan, prosedur dan sistem.
- Membantu manajemen dengan menjalankan fungsi konsultasi dalam meningkatkan kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya.

Pengangkatan Kepala SKAI

Kepala SKAI diangkat oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris efektif per tanggal 1 November 2015.

Internal Audit Unit & Internal Control System

IAU Function

The internal audit function at Bank BNP is carried out by the Internal Audit Unit (IAU) led by the Internal Audit Division Head. In carrying out its function, the IAU plays a role in:

- Assisting all levels of management in securing the operational activities of the Bank that involves public funds.
- Assisting the management in carrying out supervision on financial transactions, implementation of regulations, procedures, and systems.
- Assisting the management in carrying out the consultative function in improving the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of execution thereof.

Appointment of the IAU Division Head

The IAU Division Head is appointed by the President Director upon approval of the Board of Commissioner on 1 November 2015.

Raden Widawati

Kepala SKAI

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Menjabat Kepala SKAI Bank BNP sejak 1 November 2015. Memulai karir di perbankan sebagai *Money Market Dealer* di Bank Tiara Asia sejak tahun 1994. Kemudian sebagai *Money Market* dan *Valas Dealer* di Bank Papan Sejahtera di tahun 1996. Pada tahun 1998, sebagai *Senior Derivative and Option Dealer* di Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta dan tahun 2012 ditempatkan sebagai Deputy Manager Risk Management di Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Singapore. Karirnya berlanjut dengan menjabat sebagai *Vice President Risk Management Bank of*

Raden Widawati

IAU Division Head

Indonesian citizen, 45 years old. Appointed as the IAU Division Head of Bank BNP on 1 November 2015. Started her banking career as Money Market Dealer at Bank Tiar Asia in 1994. Then she worked as Money Market and Forex Dealer at Bank Papan Sejahtera in 1996. In 1998, she worked as Senior Derivative and Option Dealer at Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta and in 2012 was appointed as Deputy Manager Risk Management at Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Singapore. She then served as Vice President Risk Management at the Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta until 2013. She was

Tokyo Mitsubishi-UFJ Jakarta kembali sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Prima Aras Jaya. Beliau menyelesaikan pendidikan di Jurusan Kimia Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994.

appointed as President Director of PT Prima Aras Jaya. She completed her bachelor's degree in chemical engineering at the Bandung Institute of Technology in 1994.

Struktur Organisasi SKAI

IAU Organization Structure

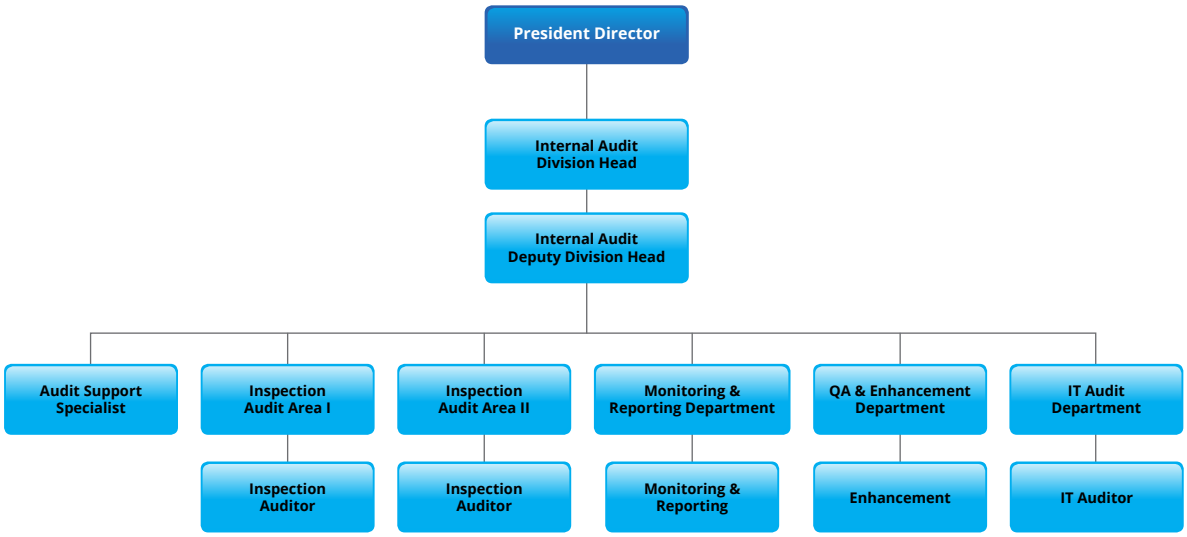

Jumlah Pegawai dan Sertifikasi

Sampai dengan akhir Desember 2016, pegawai SKAI berjumlah 44 orang termasuk Pejabat SKAI. Guna meningkatkan kompetensi, seluruh pegawai dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi profesi audit intern. Program sertifikasi profesi audit intern yang telah diikuti di tahun 2016 adalah Sertifikasi Profesi Audit Intern Level Auditor yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, selain sertifikasi manajemen risiko sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK, sebagai berikut:

Number of Staff & Certifications

Until the end of December 2016, the number of employees working at the IAU was 44, including the IAU Officer. In order to enhance their competence, all staff are required to obtain internal audit professional certifications. The internal audit professional certifications in which the staff participated in 2016 were the Internal Audit Professional Certification for Auditor Level, organized by the Banking Profession Certification Institution, and the risk management certification as required by OJK, as follows:

Sertifikasi Certification	Jumlah Auditor Number of Auditors 2015	Jumlah Auditor Number of Auditors 2016
Sertifikat Kompetensi Level Auditor Auditor Level Competence Certification	14	23
BSMR Level 1	11	17
BSMR Level 2	4	5
BSMR Level 3	3	3
BSMR Level 4	-	1

Piagam Audit Intern

SKAI dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya berpedoman pada Piagam Audit Intern yang memuat Kedudukan, Visi, Misi, Peran, Ruang Lingkup, Wewenang, Tanggung Jawab, Akuntabilitas, Independensi, Tidak Memihak, Kode Etik, Standar Pelaksanaan Audit Intern, Pengawasan Manajemen, dan Hubungan dengan Auditor Ekstern.

Internal Audit Charter

In the establishment and execution of its duties, the IAU uses the Internal Audit Charter as its guideline. The Internal Audit Charter defines the Position, Vision, Mission, Roles, Scope of Work, Authority, Responsibilities, Accountability, Independence, Impartiality, Code of Conduct, Internal Audit Execution Standards, Management Supervision, and Relationship with External Auditors.

Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris pada tanggal 4 Januari 2016 dan telah mengikuti ketentuan regulator yaitu:

1. Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 perihal Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum;
2. Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 perihal Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (konversi dari ketentuan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/ BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal);
3. POJK 18.3.2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, khususnya Hubungan dengan Auditor Ekstern.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan yang tertuang dalam Piagam Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Audit Tahunan (RAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pemeriksaan berbasis risiko, berkonsultasi dengan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) dan disetujui oleh Presiden Direktur;
2. Memelihara dan mengembangkan auditor profesional yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai;
3. Menerbitkan laporan intern secara periodik dan tepat waktu yang disetujui oleh Presiden Direktur, dengan tembusan laporan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
4. Menerbitkan laporan hasil audit setelah penugasan audit dan menyampaikan laporannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), dengan tembusan laporan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko;
5. Menerbitkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia secara periodik dan tepat waktu yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit), dengan tembusan laporan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko, untuk disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan;
6. Menerbitkan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) untuk segera disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui;

The Internal Audit Charter was established by the Board of Directors upon approval from the Board of Commissioners on 4 January 2016, in accordance with provisions from the regulators, namely:

1. BI Regulation No. 1/6/PBI/1999 on 20 September 1999 on the Appointment of Compliance Director and Implementation of Internal Audit Function Standards for Commercial Banks;
2. OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guideline for Preparation of Internal Audit Charter (converted from the Bapepam-LK Regulation No. IX.I.7 Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 on 28 November 2008 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Charter);
3. OJK Regulation 18.3.2014 on Integrated Governance Implementation for Financial Conglomerates, in particular Relations with External Auditors.

Functions and Responsibilities

In line with the provisions in the Internal Audit Charter, the functions and responsibilities of the IAU are as follows:

1. Prepare the Annual Audit Plan (RAT) that is flexible using a risk-based audit methodology, in consultation with the Board of Commissioners (through the Audit Committee) and approved by the President Director;
2. Maintain and develop professional auditors who have adequate knowledge, expertise and experience;
3. Publish internal reports periodically and in a timely manner, as approved by the President Director, with a copy of the report sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee);
4. Publish audit result reports upon audit completion and submit the reports to the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director;
5. Publish implementation report and summary of internal audit results, including confidential information from the audit results, in a timely and regular manner, and signed by the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director, to be presented to the OJK at the latest two months after the reporting month;
6. Publish a special report for each internal audit finding that is believed to have a potential to disrupt the Bank's business continuity, and signed by the President Director and the Board of Commissioners (through the Audit Committee), with a copy sent to the Compliance & Risk Management Director, to be presented to the OJK at the latest seven days after the date of the audit finding;

7. Memberikan informasi kepada Presiden Direktur perihal pelaksanaan audit dan memberikan rekomendasi untuk keperluan pengkinian Piagam Audit Intern, Panduan Audit Intern, dan kebijakan audit intern;
8. Membantu dalam melakukan penyelidikan atau investigasi atas indikasi aktivitas kecurangan (bila diperlukan) dan melaporkan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
9. Memastikan bahwa auditor patuh terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), Piagam Audit Intern, Panduan Audit Intern, dan kebijakan audit intern;
10. Melaporkan temuan audit yang belum ditindaklanjuti oleh Auditee kepada Presiden Direktur secara periodik setiap 1 bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) setiap 3 bulan sekali;
11. Berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit intern.

Fokus dan Pelaksanaan Audit 2016

Pada tahun 2016, kegiatan SKAI berfokus pada hal-hal berikut:

1. Melanjutkan pemeriksaan pada cabang di mana pemilihan cabang yang akan diperiksa berdasarkan parameter risiko.
2. Melanjutkan pemeriksaan yang sifatnya *mandatory* dari BI, yaitu SKNBI dan RTGS.
3. Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor dengan mengikutsertakan dalam program sertifikasi dan pelatihan intern maupun ekstern.
4. Melanjutkan pengembangan aplikasi sistem manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit.
5. Memperluas cakupan pemeriksaan pada aktivitas fungsional Bank meliputi pemeriksaan unit/divisi/departemen, seperti unit KTA *processing* dan pemeriksaan proses seperti proses kredit dari awal hingga akhir.
6. Menambah pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan secara *surprise*/tanpa skedul dan pemeriksaan khusus (untuk kasus-kasus tertentu berdasarkan instruksi/permintaan manajemen).
7. Melakukan pemeriksaan pada kantor cabang tutup, pemeriksaan serah terima jabatan dan pemeriksaan pada produk baru/aktivitas baru.
8. Mengkinikan dan melengkapi kebijakan audit intern agar sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan metodologi pemeriksaan.
9. Mulai melakukan analisa temuan dan mendokumentasikan temuan dalam *soft file* untuk memudahkan analisa. Analisa ini bertujuan untuk mencari problem inti dari

7. Provide information to the President Director regarding the audit process and provide recommendations for the purposes of updating the Internal Audit Charter, Internal Audit Guideline, and the internal audit policy;
8. Assist in the investigation of indications of fraud activity (if needed) and report it to the President Director with a copy sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee);
9. Ensure that the auditors adhere to the Standards for the Execution of Functions of the Internal Audit in Banks (SPFAIB), Internal Audit Charter, Internal Audit Guideline, and the internal audit policy;
10. Report audit findings that have not been followed up on by the auditees to the President Director periodically, every 1 month, with a copy sent to the Board of Commissioners (through the Audit Committee) once every 3 months;
11. Serve as a consultant for the Bank's internal parties that may require such service, especially within the scope of work of internal audit.

Audit Focus and Execution in 2016

In 2016, the IAU's activities were focused on the following matters:

1. Continued audit at branches, where the branch selection for audit was based on the risk parameters.
2. Continued BI mandatory audits, i.e. SKNBI and RTGS.
3. Continued the competence enhancement programs for auditors through certification, and internal and external training.
4. Continued the development of audit management system to improve effectiveness in planning, implementation, and monitoring of audit results.
5. Expanded the audit scope on the Bank's functional activities, encompassing audit on units/divisions/departments, such as KTA processing unit, and audit on processes, such as lending process from beginning to end.
6. Increased the frequency of surprise/unscheduled audits and special audits (for special cases based on instruction or request from the management).
7. Conducted audit on the closed branches, audit on handover of positions, and audit on new products and activities.
8. Updated and completed the internal audit policy to be in line with the Bank's business and auditing methodology.
9. Began to analyze findings and document the findings in a soft file to facilitate analysis. The analysis is intended to discover the root cause of the finding. After analysis is

temuan. Setelah dianalisa kemudian didiskusikan dengan Presiden Direktur dan bagian *planning* sesuai dengan permasalahan terkait. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan pencegahan masalah terjadi pada cabang lain yang bukan termasuk sample SKAI sehingga tidak terjadi temuan berulang.

10. SKAI mulai mencoba untuk terus memonitor tindakan yang akan dilakukan oleh *department*/divisi terkait pada butir ke-9 di atas, sehingga dapat dilakukan pencegahan untuk mencegah temuan berulang.
11. Di tahun 2016 SKAI mencoba berbagi pengetahuan diantara anggota SKAI dengan mengadakan *meeting* pagi untuk *sharing* mengenai ekonomi, peraturan OJK/BI/internal jika ada sehingga diharapkan semua anggota SKAI memiliki pengetahuan dan pandangan yang sama.

Pada pelaksanaan SKAI selama tahun 2016, terdapat beberapa hal penting yang masih perlu mendapatkan perhatian dan penyempurnaan secara fokus, seperti kepatuhan terhadap SOP yang akan berdampak pada kualitas proses operasional Bank yang berujung pada kualitas pengambilan keputusan oleh Manajemen. Demikian pula halnya dengan proses persetujuan pemberian kredit, masih diperlukan penyempurnaan yang mengintegrasikan peran dan fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan agar terhindar dari kualitas aset yang kurang baik dimiliki Bank. Optimalisasi fungsi monitoring dalam melakukan *dual control* dalam proses pemberian kredit serta fungsi evaluasi yang diperlukan menjadi sangat penting, oleh karenanya SKAI terus melakukan upaya dengan mengadakan pertemuan dengan unit kerja terkait, baik di sisi *support* maupun sisi bisnis/ujung tombak serta unit yang melakukan fungsi kontrol. Rapat koordinasi ini berlangsung hingga akhir tahun 2016 dengan pokok pembahasan mengenai upaya-upaya agar SOP dapat dijalankan sesuai dengan yang seharusnya dan fungsi *dual control* dapat berjalan tanpa membebani unit kerja bisnis.

Fokus Audit 2017

Untuk tahun 2017, SKAI telah menyusun rencana kerja sebagai berikut:

1. SKAI masih melanjutkan semua aktivitas yang baru di tahun 2016 dan aktivitas lama.
2. Meningkatkan kualitas temuan agar lebih dalam terhadap kunci permasalahan. Untuk ini di tahun 2107, pembuatan RAT melibatkan semua anggota SKAI, dilakukan *meeting* intens oleh *Department Head* sebelum para auditor pergi ke lapangan dan dilakukan *meeting* dengan Wakil Kepala SKAI atau Kepala SKAI bilamana perlu.
3. Meningkatkan kualitas laporan dengan kunjungan ke lapangan oleh Wakil Kepala SKAI atau Kepala SKAI di hari akhir pemeriksaan lapangan agar diperoleh temuan yang lebih berkualitas dan dapat menyajikan laporan yang lebih efisien dan efektif.

done, the result is discussed with the President Director and the planning unit related to the finding. The next step is taking preventive actions so that the problem does not replicate at other branches that are not sampled by the IAU, in order to avoid similar findings.

10. IAU began to monitor actions that will be performed by related departments/divisions as stated in point 9 above so that preventive measures can be taken to avoid similar findings.
11. In 2016 IAU shared knowledge among its members by conducting morning meetings for sharing about the economic situation, latest OJK/BI/internal regulations (if any) so that there is a standard level of knowledge and understanding across all members of the IAU.

In the implementation of IAU duties in 2016, there were a number of important issues requiring specific attention and improvement, such as compliance with SOP which will affect the Bank's operational process quality and eventually affect the Management's decisionmaking quality. Likewise was the loan approval process that sill requires further improvement to integrate the role and function of Risk Management and Compliance, so the Bank's asset quality can be improved. The optimization of the monitoring function in conducting dual control for the loan approval process and the required evaluation function become of great importance, and thus IAU continued to perform meetings with the related units, including support and business and the units in charge of the control function. These coordination meetings took place until the end of 2016 with topics including efforts to ensure SOP enforcement and dual control functions to be performed without considerably hampering the business units' performance.

Audit Focus 2017

For 2017, the IAU has developed a work plan as follows:

1. IAU will continue all activities in 2016 and prior years.
2. Improve audit findings' quality to provide a deeper understanding of the root causes. Thus in 2017 the preparation of the work plan and budget involves all IAU members and an intense meeting has been held by the Department Head before the auditors are assigned to their jobs, and meetings are done with the IAU Deputy Head or Head when deemed necessary.
3. Improve the quality of reporting with the IAU Deputy Head or Head conducting site visits at the final day of the site visits, so that a higher quality report can be obtained, while continuing to improve efficiency and effectiveness.

4. Meningkatkan kendali mutu audit (*Quality Assurance*) yaitu melakukan pemeriksaan terhadap cara kerja para auditor apakah telah sesuai dengan RAT, program audit, apakah waktunya telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (SLA).
5. Meningkatkan efektivitas proses kerja pemantauan tindak lanjut hasil audit agar kelemahan pengendalian dapat diperbaiki dengan optimal.
6. Mengembangkan observasi ke proses operasional Bank secara menyeluruh (*bank-wide*) apabila diperlukan.

Di tahun 2017, SKAI akan mendorong unit kerja terkait untuk melakukan perbaikan pengendalian internal lainnya seperti penggunaan *checklist* dokumen dan sebagainya dan SKAI akan melakukan pemantauan terhadap fasilitas-fasilitas kredit yang berpotensi terekspos risiko kredit ataupun risiko operational yang melekat di dalamnya (risiko inheren).

Mengacu pada Piagam Audit Intern, SKAI mulai menerapkan *Rating* Audit yang merupakan penilaian terhadap pengendalian internal yang telah dilakukan *auditee*, dihitung berdasarkan hasil temuan audit intern dan hal-hal baik yang telah dilakukan *auditee*.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal (SPI) Bank BNP telah menyesuaikan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) dan sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, dan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank BNP Serial No. RM-02 Versi 0 tanggal 10 Oktober 2011.

Sistem pengendalian internal (SPI) Bank BNP merupakan proses penggabungan seluruh aktivitas SDM secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan Bank melalui kerjasama yang baik. SPI dilakukan sebagai wujud Bank dalam mencapai kesuksesan melalui pertumbuhan yang signifikan dalam laporan keuangan dan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPI juga memiliki peranan sebagai pencegah dan mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang terjadi di dalam Bank dengan meningkatkan dan menguatkan lingkup pengendalian internal melalui efektivitas Bank.

4. Improve audit quality assurance, namely auditing the work methodology of the auditors to ensure their compliance with the work plan and budget, the audit program, the timeline provided, and the SLA.
5. Improve the effectiveness of the monitoring of follow up to audit findings, so that weaknesses in control can be more optimally addressed.
6. Expand the observation to all of the Bank's operational processes (bank-wide), if deemed necessary.

In 2017 the IAU will encourage related units to improve internal control, such as by using document checklist, etc., and the IAU will monitor the loan facilities that have the potential to be exposed to inherent credit risks and inherent operational risks.

With reference to the Internal Audit Charter, the IAU will initiate to implement the Audit Rating that evaluates internal control performed by the auditee, measured based on the internal audit findings and the positive actions taken by the auditee.

Internal Control System

The Internal Control System of Bank BNP has been adjusted to the Internal Control Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), and is in compliance with the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks, OJK Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Bank Indonesia Circular (SEBI) No. 5/22/DPNP dated 29 September 2003 on the Standard Guidelines of Internal Control System for Commercial Banks, and Bank BNP's Internal Control System Policy No. RM-02 Version 0 dated 10 October 2011.

The Internal Control System (SPI) of the Bank is a continuous overarching process of all Human Resources activities to achieve the target of the Bank through mutual cooperation. The SPI was established as a form of the Bank's commitment to achieving sustainable success through a significant growth in financial reporting and compliance with the prevailing regulations. SPI also plays a role in preventing and detecting fraud occurences in the Bank. This function is conducted by improving and strengthening the scope of internal control through the Bank's effectiveness.

Model Sistem Pengendalian Internal Bank BNP mengacu pada model pertahanan 3 (tiga) lapis (*Three Lines of Defense*). Model ini berupa rangkaian aktivitas pengendalian dengan melibatkan seluruh unit kerja yang terdiri dari *First Line*, *Second Line*, dan *Third Line* yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pengendalian intern yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pengendalian intern.

Fungsi pengendalian internal 3 (tiga) lapis, yaitu:
1. Fungsi pelaksanaan/pemilik risiko sebagai *First Line of Defense*: *First Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern dilakukan oleh unit kerja yang melakukan aktivitas yang langsung mengandung risiko. Unit kerja yang masuk dalam kategori *First Line of Defense* ini terdiri dari unit kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari seperti aktivitas bisnis, transaksi operasional harian dan aktivitas pendukung atau penunjang lainnya;
2. Fungsi yang mengelola dan memantau risiko sebagai *Second Line of Defense*: *Second Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan;
3. Fungsi yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan risiko secara independen sebagai *Third Line of Defense*: *Third Line of Defense* dalam pelaksanaan pengendalian intern ini dilakukan oleh unit kerja yang melakukan fungsi penilaian secara independen yaitu auditor internal dan auditor eksternal.

Meskipun model *Three Lines of Defense* lebih menitikberatkan hubungan dan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja namun pertanggung jawaban pelaksanaannya menjadi tanggung jawab akhir dari Direksi dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris.

Secara struktur, infrastruktur SPI di Bank BNP hingga tahun 2016 telah sesuai dengan tuntutan regulasinya, termasuk terkait *three lines of defense*, namun implementasi proses SPI masih memerlukan peningkatan dalam hal koordinasi, komunikasi dan komprehensi dari seluruh unit terkait dari 3 (tiga) lapis SPI ini sehingga dapat dihasilkan suatu SPI yang terintegrasi. Kekuatan fungsi kontrol dan *monitoring* di segala lini sangat diperlukan mengingat segmen bisnis Bank BNP didominasi segmen retail, dan upaya ini adalah untuk meminimalisasi risiko yang timbul di kemudian hari, dan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar perbankan nasional khususnya.

Kegiatan Pengendalian & Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak.

The Internal Control System of Bank BNP employs the Three Lines of Defense model. This model is a series of control activities that involves all work units classified into the First Line, Second Line and Third Line. Each line and its work units have their respective duties and responsibilities related to internal control. The duties shall be carried out comprehensively and in an integrated manner to achieve the target of internal control.

The three lines of internal function comprise:
1. Function of risk implementer/owner as the First Line of Defense: In the implementation of internal control, the work units that conduct activities with potential risks serve as the First Line of Defense. Work units that are classified in this category are the units that perform regular operations such as daily business activities, operational transactions, and other supporting activities;
2. Functions that manage and monitor risk as the Second Line of Defense: The Second Line of Defense in this implementation of internal control is manned by the work units that carried out the functions of risk management and compliance;
3. Functions that assess the implementation of risk management independently as the Third Line of Defense: The Third Line of Defense in this internal control implementation is manned by work units that conduct independent assessments, namely the internal auditors and external auditors.

Although the Three Lines of Defense Model emphasizes more on the relationships and responsibilities of each work unit, the responsibility of its implementation ultimately becomes the duty of the Board of Directors under active supervision from the Board of Commissioners.

Structurally, Bank BNP's internal control system infrastructure up to 2016 had been made to align with the regulatory requirements, including those of the three lines of defense. However, in its implementation, the internal control system still requires improvement in terms of coordination, communications, and comprehension from all units involved in these three layers of internal control system, so as to result in an integrated system. Strength in control and monitoring across all lines is essential, considering the Bank's business is dominated by retail business, and thus efforts must be done to minimize future risk as well to enhance quality and competitiveness in the national banking industry.

Control & Segregation of Functions

Controlling activities are aimed at ensuring that the supervision mechanism is implemented effectively and continuously, with the participation of all parties. All related

Semua pihak yang terlibat dalam struktur organisasi Bank harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi yang jelas sehingga dapat meminimalkan tingkat risiko penyimpangan.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi pada Bank BNP, antara lain sebagai berikut:

1. **Pengendalian Kebijakan dan Prosedur**
   Kegiatan pengendalian kebijakan dan prosedur dilaksanakan melalui:
   - Arahan dari Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan penerapan kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh *Three Lines of Defense*;
   - Pengkinian kebijakan dan prosedur secara periodic berdasarkan hasil review dari divisi terkait ataupun membuat kebijakan dan prosedur baru sesuai dengan pengembangan produk baru dan organisasi;
   - Kewajiban untuk mengetahui, membaca, dan melaksanakan setiap kebijakan dan prosedur yang berlaku, minimal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan;
   - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan prosedur kepada karyawan;
   - Serangkaian kecukupan kebijakan dan prosedur tersedia sebagai bentuk mitiasi risiko terhadap kegiatan operasional dan bisnis, yang melibatkan unit kerja dan/atau karyawan serta pejabat;
2. Pengendalian Aset Fisik
   Pengendalian aset fisik mencakup pengamanan aset, catatan, program komputer dan *file* data;
3. Pengendalian Transaksi
   Pengendalian transaksi mencakup sumber data, infrastruktur dan proses pengolahan data transaksi, untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan aman. Aktivitas pengendalian transaksi meliputi *Dual Control*, Verifikasi, Otorisasi;
4. Pengendalian Sumber Daya Manusia
   Pengendalian SDM meliputi proses rekrutmen, penerimaan karyawan, penempatan karyawan, promosi, demosi, pengembangan kompetensi, rotasi, imbal jasa, cuti dan sebagainya.
5. Pemisahan Tugas dan Pendelegasian Wewenang.
   Kejelasan dalam pemisahan tugas dan fungsi akan memberikan kepastian tanggung jawab dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kapabilitas fungsi dan jabatannya, dan pemisahan tugas ini disertai dengan kewenangan yang diberikan sesuai dengan skala tugas dan tanggung jawabnya.

parties that are involved in the Bank's organization must reflect a clear separation of functions so as to minimize the risk of fraud.

The activities of Control and Segregation of Functions in the Bank are as follows:

1. **Control of Policies and Procedures**
   The activities to control policies and procedures are implemented through:
   - Directions from the Board of Commissioners and the Board of Directors on the implementation of policies and procedures of risk management and control carried out by the Three Lines of Defense;
   - Updating of policies and procedures periodically based on the results of reviews from related divisions, or drafting of new policies and procedures according to the development of new products and the organization;
   - Obligation to know, read and implement each policy and procedure, at least those that are related to their respective duties and responsibilities as employees;
   - Dissemination of policies and procedures to all employees;
   - An adequate set of policies and procedures made available as a form of risk mitigation for the operational and business activities involving the work units and/or employees and officers;
2. Physical Assets Control
   Physical assets control includes asset security, records, computer programs, and data files;
3. Transactions Control
   Transactions control includes the controlling of data source, infrastructure and processing of transaction data to produce accurate and secure information in timely manner. The activity of transaction control covers Dual Control, Verification, and Authorization;
4. Human Resources Control
   HR Control covers the processes of recruitment, admission and placement of employees, promotion, demotion, competence development, job rotation, remuneration, leave, etc.
5. Segregation of Duties and Delegation of Authority.
   Clarity in the segregation of duties and functions provide certainty of responsibility and authority based on the abilities and capabilities of functions and positions, and this segregation of duties is also accompanied with authority granted in proportion to the scale of the respective duties and responsibilities.

Akuntan Perusahaan & Auditor Eksternal

Sesuai dengan ketentuan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan umum atas Laporan Keuangan Tahunan Bank BNP harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan yaitu mendapat kajian dan rekomendasi dari Komite Audit serta disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Untuk kepentingan Pemeriksaan Keuangan Bank BNP tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, telah ditunjuk KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a/member of BKR International) untuk ketiga kalinya, di mana untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, juga dilakukan oleh KAP yang sama dan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali telah terdaftar di Bank Indonesia ataupun di OJK.

Penetapan penggunaan KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dilakukan melalui Surat Penunjukan No. 032-KOM/2016 tanggal 28 Juni 2016, hal ini berdasarkan pada Surat Rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi melalui surat No. 031-KOM/KA/2016 tanggal 24 Juni 2016, di mana sebelumnya Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun 2016 telah mendapat Kuasa dari pemegang saham untuk menunjuk KAP yang akan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 beserta dengan hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan KAP tersebut, diantaranya persetujuan biaya Audit.

Nama Kantor Akuntan Publik:
KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Nama Akuntan Publik:
Deddy Supardi CPA.

Kapasitas KAP
Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali adalah kantor akuntan hasil merger beberapa kantor akuntan publik pada tahun 2000 dan memiliki 20 (dua puluh) partner akuntan, dan 250 (dua ratus lima puluh) staf profesional dengan berbagai macam pengalaman di bidang audit, perpajakan, sistem informasi & teknologi, manajemen keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. Klien KAP tersebut termasuk diantaranya adalah perusahaan nasional dan asing, perusahaan publik (terdaftar di Bursa Efek Indonesia), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali berdasarkan hasil *review* yang dilakukan oleh JSX WATCH 2009-2010 merupakan Kantor Akuntan Publik yang menduduki peringkat ke-6 teratas dari seluruh Kantor Akuntan di Indonesia yang mengaudit perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal.

External Auditor & Accountant

In accordance with the regulations, the appointment of a Public Accounting Firm (KAP), for the purpose of performing a general audit on the Annual Financial Statements of Bank BNP, should be carried out through mechanisms that have been established, namely by assessment and recommendation of the Audit Committee and approved by the General Meeting of Shareholders.

For the purposes of Examination of Bank BNP's Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2016, KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a/member of BKR International) has been appointed for the third time, following the fiscal year ended 31 December 2015. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang and Ali is registered at Bank Indonesia and the OJK.

The decision to contract KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali was made via the Letter of Appointment No. 032-KOM/2016 dated 28 June 2016, based on the Letter of Recommendation from the Audit Committee to the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 031-KOM/KA/2016 dated 24 June 2016, whereby prior to that the Board of Commissioners and the Board of Directors based on the resolution of the 2016 Annual GMS had obtained the authority from the shareholders to appoint a KAP to audit the financial statements of the Bank for the year ended 31 December 2016, along with matters relating to the KAP appointment, including the audit fee approval.

Public Accounting Firm:
KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Certified Public Accountant:
Deddy Supardi CPA.

Public Accounting Firm Capacity
The Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali is the accounting firm that resulted from the merging of several public accounting firms in 2000 and has 20 (twenty) partners and 250 (two hundred and fifty) professional staff with a wide range of experience in auditing, taxation, information system & technology, financial management, and human resources development. Its clients include among others national and foreign companies, public companies (listed on the Indonesia Stock Exchange), and many state-owned enterprises (SOEs).

The Public Accounting Firm (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, based on the results of a review conducted by the JSX WATCH 2009-2010 is ranked in the top six public accounting firms in Indonesia that audit the companies listed on the capital market.

Ruang Lingkup Pemeriksaan KAP

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab KAP yang ditunjuk untuk hanya memberikan jasa audit yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 meliputi sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan;
2. Laporan Laba Rugi Komperhensif;
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Laporan Arus Kas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank, yang didasarkan atas penilaian sekurang-kurangnya mencakup 70% dari jenis Aktiva Produktif Bank dengan sekurang-kurangnya mencakup 25 Debitur terbesar atau berdasarkan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Akuntan Publik;
7. Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk namun tidak terbatas pada agunan yang diambil alih oleh Bank;
8. Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia yang berlaku termasuk catatan atas Laporan Keuangan;
9. Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus;
10. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
11. Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang meliputi nama Debitur, kualitas penyediaan dana, presentase dan jumlah pelanggaran BMPK;
12. Rincian Pelampauan BMPK yang meliputi presentase dan jumlah pelampauan BMPK;
13. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum;
14. Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi OJK dengan KAP;
15. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif;
16. Rasio Posisi Devisa Neto;
17. Keandalan sistem pelaporan Bank kepada OJK dan pengujian terhadap keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh Bank kepada OJK;
18. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015; dan
19. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001, tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, pasal 18 (4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012, tanggal 12 Oktober 2012.

Scope of Audit

The scope of work and responsibility of the KAP appointed by the Bank is to strictly provide audit services of the financial statements for the year ended 31 December 2016, including the following:

1. Statements of Financial Positions;
2. Statements of Comprehensive Income;
3. Statement of Changes in Equity;
4. Statements of Cash Flows;
5. Notes to the Financial Statements;
6. Classification of Earning Assets Quality and Adequacy of Allowance for Earning Assets formed by the Bank, which is based on an assessment that shall include at least 70% of the Bank's Earning Assets with at least the 25 largest debtors of the Bank or based on the communication between the Financial Services Authority (OJK) with the KAP;
7. Assessment of miscellaneous assets including but not limited to foreclosed assets by the Bank;
8. Other matters set forth in the applicable Financial Accounting Standards and Guidelines for Indonesian Banking, including the notes to the Financial Statements;
9. Opinion on the fairness of transactions with related parties as well as unrelated parties that have been carried out with special treatment;
10. Amount and quality of the provision of funds to Related Parties;
11. Details of violations of the Lending Limit (BPMK), which include the name of the debtors, the quality of provision of funds, the percentage and number of violations of the BPMK;
12. Details of Excess BPMK, including the percentage and amount of excess;
13. Calculation of the Minimum Capital Requirement;
14. Other matters as determined by the results of the communication between OJK and the KAP;
15. Spot Transactions and Derivative Transactions;
16. Ratio of Net Open Position;
17. Reliability of reporting systems of the Bank to the OJK and testing of the reliability of the financial statements submitted by the Bank to the OJK;
18. Board of Directors' Statement of Responsibility for the Financial Statements for 2015;
19. The scope of work as referred to in the Regulation of Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001, dated 13 December 2001 on Transparency of Financial Condition of Banks, Article 18 (4) as amended by Regulation of Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012, dated 12 October 2012.

Independensi & Profesionalitas Akuntan Publik dan KAP

KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank BNP tepat waktu, dan manajemen menilai KAP tersebut mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Periode KAP dan Akuntan dalam Pemeriksaan Keuangan Bank

KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali telah tiga kali ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank BNP masing-masing yang berakhir tahun 2014, 2015, dan 2016. Penunjukan KAP ini masih sejalan dengan peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan, di mana penunjukan KAP yang sama diperkenankan untuk 5 (lima) tahun berturut-turut.

Independence & Professionalism of Certified Public Accountants and KAP

KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali has submitted the results of the audit and management letter to Bank BNP timely, and management assess KAP is able to work independently, meet professional standards and agreements public accountant and audit scope defined.

Number of Audit Periods of the KAP and Certified Public Accountant with the Bank

KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali has been appointed three times to audit the financial statements of Bank BNP respectively for 2014, 2015, and 2016. The appointment of the KAP was in accordance with Regulation of Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 on Transparency of Financial Conditions of Companies, which stipulates that the KAP is allowed to audit the financial statements of the same company for a total of 5 (five) consecutive years.

Tahun Year	Nama Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant
2016	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2015	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2014	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (BKR)	Deddy Supardi, CPA
2013	Gani Mulyadi & Handayani (Grant Thornton)	Johanna Gani
2012	Gani Mulyadi & Handayani (Grant Thornton)	Johanna Gani

Biaya Audit Tahun 2016

Biaya jasa audit untuk Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 berkisar Rp475 juta.

Opini Kantor Akuntan Publik

Laporan Keuangan terlampir telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank BNP tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2016 Audit Fee

The audit fee for KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali for the audit of the financial statements for the year ended 31 December 2016 was around Rp475 million.

Auditor's Opinion

The enclosed Financial Statements have presented fairly, in all material aspects, the financial position of Bank BNP on 31 December 2016, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on said date, in accordance with the prevailing Financial Accounting Standards in Indonesia.

Laporan Manajemen Risiko

Risk Management Risiko

"Peran manajemen risiko dari Bank BNP adalah untuk memastikan pencapaian tujuan strategis Bank dalam kondisi ketidakpastian penuh dengan risiko, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada."

"The role of Bank BNP's risk management is to ensure the achievement of the Bank's strategic goals in a condition rife with risks and uncertainties, namely by seizing the available opportunities."

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

Acuan dasar penerapan manajemen risiko dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 (POJK No. 18) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (SE OJK 34), yang dilaksanakan melalui suatu kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko melalui tahapan proses manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada semua unit kerja dan lini organisasi Bank, serta didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko.

The reference for the application of risk management is the Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 (POJK No. 18) and the Financial Services Authority Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 on the Application of Risk Management for Commercial Banks (SEOJK 34), which is implemented through a risk management governance framework and through risk management processes of identification, measurement, monitoring and control of risks in all work units and organizational lines of the Bank, supported by the risk Management Information System.

Kompleksitas risiko kegiatan usaha perbankan semakin meningkat akibat pesatnya perkembangan kondisi eksternal dan internal Bank. Namun demikian Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan, termasuk dalam cakupannya adalah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

The complexity of risks in the banking business is increasing due to the rapid development of external and internal conditions of banks. However, the Bank still emphasizes the principle of prudence by focusing on improving the governance of Risk Management and Compliance, including within its scope the application of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU-PPT).

Adapun dalam melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank BNP mengacu pada 4 (empat) pilar sebagaimana ditetapkan dalam POJK, yaitu:

As for an effective risk management, Bank BNP refers to the four pillars as defined in the POJK, namely:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
    a. Komite Pemantau Risiko/*Risk Oversight Committee* (KPR) sebagai komite yang beranggotakan Komisaris independen, pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang memiliki tugas utama melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan

1. Active supervision by the Board of Commissioners and the Directors
    a. Risk Monitoring Committee/Risk Oversight Committee (KPR) as a committee made up of independent commissioners, independent parties with expertise in finance and independent parties with expertise in risk management under the supervision of the Board of Commissioners who has the primary duty of evaluating the compatibility between the risk management policies and implementation of

dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

b. Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (KMR) sebagai komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi dan/ atau Kepala Departemen yang memiliki tugas utama menyusun Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk merancang dan menetapkan strategi manajemen risiko dan rencana darurat (*contingency plan*) pada saat kondisi eksternal menjadi tidak normal, mengawasi penerapan atau pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direksi Bank BNP berkaitan dengan manajemen risiko.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
Bank BNP secara berkala melakukan kaji ulang terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur Bank untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan atau perundang- undangan yang berlaku serta evaluasi terhadap limit *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* terutama kesesuaiannya dengan Rencana Bisnis Bank.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
Bank melakukan identifikasi risiko terhadap seluruh produk dan aktivitas Bank, termasuk didalamnya adalah identifikasi risiko atas produk dan/ atau aktivitas baru. Bank antara lain menggunakan metode sensitivitas dan *stress testing* untuk mengukur risiko. Pemantauan terhadap risiko dilakukan oleh pemangku risiko (*Risk Owner*) dan *Risk Management Division* dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh Bank.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Sistem pengendalian dilakukan dengan prinsip *Three Lines of Defense.*
Penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang efektif dapat mendukung pencapaian rencana bisnis Bank BNP baik tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang secara sehat dan berkelanjutan, di mana setiap keputusan strategis yang diambil selalu mempertimbangkan prinsip kewajaran, tingkat risiko (*risk appetite dan risk tolerance*) serta tingkat pengembalian yang akan diterima, yang didasarkan pada 5 (lima) prinsip manajemen risiko Bank BNP, yaitu:
   1. Transparansi
      Pengelolaan risiko Bank BNP bersifat inklusif dan transparan dengan melibatkan semua pihak yang

said policies, as well as monitor and evaluate the implementation of the Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit.

b. Risk Management Committee (RMC) as a committee made up of the Directors and Division and/ or Department Heads who have the primary task of preparing the Risk Management Policy and amendments thereto, including drafting and determining the risk management strategy and contingency plan when external conditions become abnormal, overseeing the implementation or execution of the policies and providing recommendations on matters that need to be performed by the Board of Directors of Bank BNP linked to risk management.

2. Adequacy of policies, procedures and limits
Bank BNP periodically conducts a review of the adequacy of the Bank's policies and procedures to ensure its compliance with the prevailing regulations or laws as well as the evaluation of the limit of Risk Appetite and Risk Tolerance especially in terms of their compliance with the Bank's Business Plan.

3. Adequacy of identification, measurement, monitoring and control of risk and risk management information system
The Bank identifies the risks carried by all products and activities of the Bank, including the identification of risks for the new products and/or activities. The Bank uses, among others, sensitivity method and stress testing to measure risks. Monitoring of the risks is undertaken by the Risk Owners and the Risk Management Division, with the support of the Risk Management Information System owned by the Bank.

4. Thorough internal control system
The internal control system is carried out with the principle of Three Lines of Defense.
Implementation of an effective Risk Management and Compliance governance can effectively support the achievement of the business plan of Bank BNP including its short-term, medium-term and long-term goals in a sustainable and sound manner, whereby each strategic decision taken always considers the principle of fairness, the level of risk (risk appetite and risk tolerance) and returns that will be received, which is based on Bank BNP's five risk management principles, namely:
   1. Transparency
      Bank BNP's risk management is inclusive and transparent by involving all parties with respect to

terkait dengan risiko tersebut dan Bank secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko.

2. Akuntabilitas
   Bank menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
3. Responsibilitas
   Bank memastikan bahwa setiap pemangku risiko (*Risk Owner*) memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan identifikasi risiko dan pengelolaan risiko.
4. Independensi
   Manajemen Bank bertindak secara professional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain dalam merumuskan penanganan risiko.
5. Terintegrasi
   Penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi pada seluruh lini organisasi Bank.

these risks and the Bank openly conveys the relevant information in the process of risk-taking.

2. Accountability
   The Bank implements policies and procedures to ensure the accountability of management to the stakeholders.
3. Responsibility
   The Bank ensures that every Risk Owner has a good understanding in risk identification and risk management.
4. Independence
   The Bank's management acts in a professional way and is free from pressures and influences from other parties in formulating the risk management procedures.
5. Integrated
   Application of risk management is comprehensive and integrated in all organizational lines of the Bank.

POJK No. 18 dan SE OJK No. 34 juga mensyaratkan Bank untuk menyusun rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai atas rencana darurat dan menguji efektivitas dari kebijakan dan prosedur dengan melakukan simulasi, antara lain:

- Tanggap darurat kebakaran di kantor pusat Juanda, Bandung
- SMS tree di kantor pusat Juanda, Bandung
- Uji coba *Disaster Recovery Site* pada 57 kantor Bank dengan melakukan uji coba input transaksi pada *Core Banking System* melalui *server* di luar Bank BNP serta melakukan simulasi terhadap kesiapan dan keamanan data transaksi jika terjadi kondisi *force majeure* seperti bencana alam.

The POJK No. 18 and SEOJK No. 34 also require the Bank to draw up a Contingency Plan in the worst conditions. The Bank has adequate policies and procedures in place on these contingency plans and has tested the effectiveness of policies and procedures by conducting a simulation, among others:

- Fire incident quick response at the head office in Juanda, Bandung
- SMS tree at head office in Juanda, Bandung
- Trial of the Disaster Recovery Site at 57 offices of the Bank by conducting a test on transactional input to the Core Banking System via a non-Bank BNP server, as well as conducting a simulation on the readiness and security of transactional data should a force majeure such as a natural disaster occurs.

Terkait dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 14 November 2014 (POJK No. 17) dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 (SE OJK No. 14) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BNP adalah merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam kelompok konglomerasi keuangan MUFG Group di Indonesia dengan Bank BTMU-UFJ Cabang Jakarta sebagai Entitas Utama.

In line with POJK No. 17/POJK.03/2014 dated 14 November 2014 (POJK No. 17) and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 dated 25 May 2015 (SEOJK No. 18) on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates, Bank BNP is part of the financial services institutions under the MUFG Group financial conglomerate in Indonesia, with the BTMU–UFJ Jakarta Branch as the Main Entity.

Menindaklanjuti POJK No. 17 dan SEOJK No. 14 tersebut maka disusun Piagam Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan MUFG yang berlaku efektif tanggal 1 Desember 2015. Piagam tersebut menjadi panduan bagi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam melakukan pemantauan terhadap aktivitas manajemen risiko yang terintegrasi. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diadakan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila terdapat peristiwa atau kejadian yang dapat berdampak

Following up on the POJK No. 17 and SEOJK No. 14, the Integrated Risk Management Charter for the MUFG Finances Conglomeration was formulated and deemed valid starting from 1 December 2015. This charter serves as a guideline for the Integrated Risk Management Committee to conduct monitoring of the integrated risk management activities. The Integrated Risk Management Committee meetings are held once per semester or at any time should there be an event that may significantly result in the business activities

signifikan pada aktivitas usaha dari konglomerasi keuangan. Selama tahun 2016 telah diadakan dua kali rapat Komite Manajemen Risiko yaitu pada tanggal 13 Januari 2016 dan 11 Agustus 2016 untuk membahas profil risiko manajemen risiko terintegrasi serta kunjungan dari Tim Manajemen Risiko BTMU-UFJ Cabang Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2016.

and financial conglomerates. Throughout 2016 the Risk Management Committee conducted two meetings, namely on 13 January 2016 and 11 August 2016 to discuss the risk profile of the integrated risk management and visitation from the Risk Management Team from BTMU-UFJ Jakarta Branch on 10 October 2016.

Struktur Kerja Penerapan Manajemen Risiko

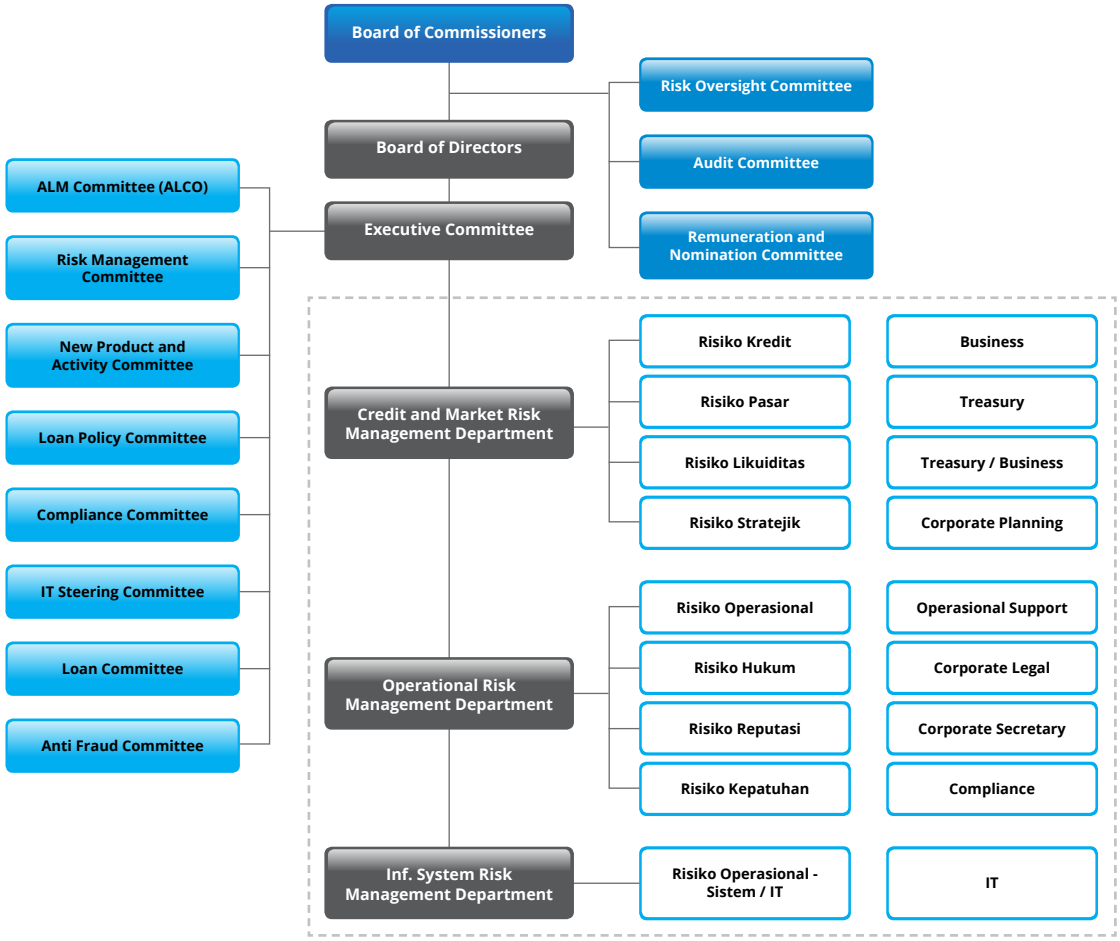

Kerangka Kerja Penerapan Manajemen Risiko

Kerangka kerja manajemen risiko Bank BNP merupakan dasar atau landasan dalam penataan seluruh kegiatan operasional Bank di segala lini organisasi untuk membantu mengelola risiko secara efektif. Kerangka kerja ini akan memastikan bahwa Unit Kerja Manajemen Risiko memperoleh informasi risiko yang lengkap, terintegrasi dan akurat dari seluruh risk taking unit untuk kemudian dilaporkan secara transparansi, dapat dipertanggung jawabkan, serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan.

Risk Management Implementation Framework

Bank BNP's risk management framework is the basis for organizing all operational activities of the Bank across all organizational lines to ensure that the Bank manages its risks effectively. This framework shall ensure that the Risk Management Work Unit has obtained a complete, integrated and accurate set of risks, and all risk taking units to be presented transparently, be made liable, and used as a basis for decisionmaking.

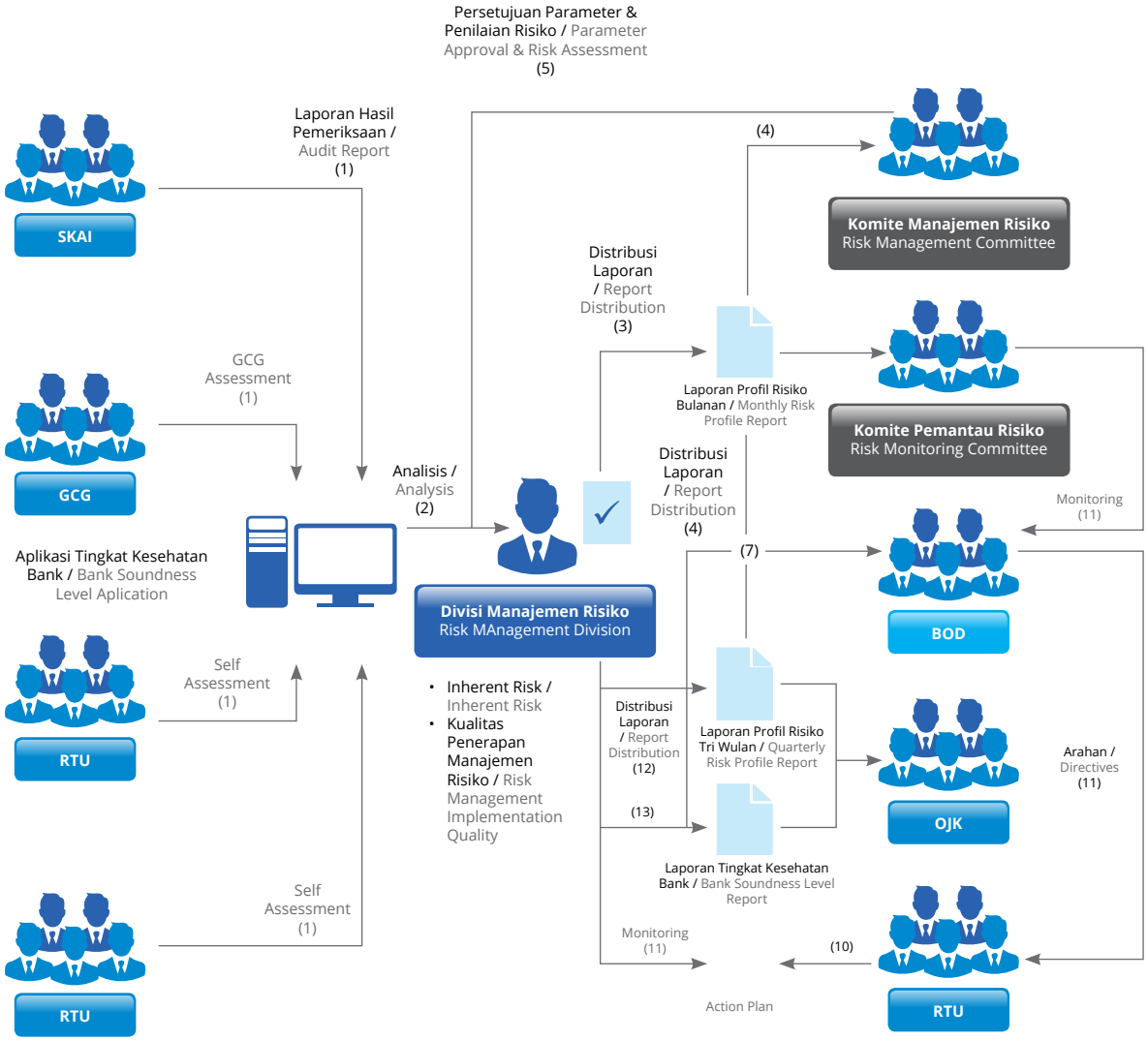
Persetujuan Parameter & Penilaian Risiko / Parameter Approval & Risk Assessment (5)
Laporan Hasil Pemeriksaan / Audit Report (1)
SKAI
(4)
Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee
Distribusi Laporan / Report Distribution (3)
GCG Assessment (1)
GCG
Laporan Profil Risiko Bulanan / Monthly Risk Profile Report
Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee
Analisis / Analysis (2)
Distribusi Laporan / Report Distribution (4)
Monitoring (11)
Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank / Bank Soundness Level Aplication
(7)
Divisi Manajemen Risiko
Risk MAnagement Division
BOD
Self Assessment (1)
RTU
Inherent Risk / Inherent Risk
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko / Risk Management Implementation Quality
Distribusi Laporan / Report Distribution (12)
Laporan Profil Risiko Tri Wulan / Quarterly Risk Profile Report
OJK
Arahan / Directives (11)
(13)
Laporan Tingkat Kesehatan Bank / Bank Soundness Level Report
Self Assessment (1)
Monitoring (11)
(10)
RTU
Action Plan

Bank BNP memiliki misi untuk berperan serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang ritel. Untuk mencapai misi tersebut Bank BNP memfokuskan pada pertumbuhan kredit di segmen kredit usaha kecil dan menengah, dan kredit *retail* yaitu Kredit Tanpa Agunan Mirai+. Untuk mendukung pertumbuhan kredit, maka diperlukan suatu pengelolaan risiko yang handal melalui:

1. **Pengelolaan Risiko Melalui Permodalan**
   Pengelolaan risiko melalui permodalan dengan melakukan diversifikasi sumber permodalan yang disinkronisasi dengan rencana strategis jangka panjang dan kebijakan alokasi modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki profil *risk-return* yang optimal. Hal ini bertujuan untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan termasuk investor dan regulator.

Bank BNP has a mission to participate in shaping the national economic growth and development especially in the retail sector. To achieve this mission, Bank BNP focuses on the growth of loans in small and medium enterprises (SMEs) segment and retail segment, i.e. Non-Collateral Loan Mirai+. To support credit grwoth, reliable risk management is required, and this is achieved via:

1. **Capital Risk Management**
   Capital risk management is performed by capital resources diversification which is efficiently synchronized with long-term strategic plan and capital allocation policy for business segment which is having optimum risk-return profile. This is to fulfill the expectation of stakeholders, including investors and regulators.

Untuk pengukuran risiko kredit, Bank menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), dan saat ini untuk *stress test* risiko kredit bank secara bertahap sedang dilakukan simulasi pendekatan berdasarkan Internal model. Untuk risiko pasar, Bank menggunakan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), sedangkan secara internal Bank telah menggunakan *Value at Risk* sebagai model internal. Pengukuran risiko operasional Bank menggunakan *Basic Indicator Approach*. Bank BNP memiliki kecukupan modal terhadap potensi kerugian risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku (*regulatory capital*) maupun kebutuhan internal (*economic capital*).

To measure credit risk, the Bank uses the Standardized Approach, and currently the simulation approach based on internal model is being gradually performed for bank credit risk stress test. For market risk, the Bank implements the Standardized Approach, while internally the Bank uses Value at Risk as internal model. Operational risk measurement uses the Basic Indicator Approach. Bank BNP has sufficient capital to overcome the potential loss owing to credit risk, market risk and operational risk, both based on regulatory capital or internal needs (economic capital).

Berikut adalah penilaian kecukupan permodalan bank melalui *Internal Capital Adequacy Assessment Process* yang didasarkan pada profil Risiko Bank.

The following is the Bank's capital adequacy valuation done through the Internal Capital Adequacy Assessment Process based on the Bank's risk profile.

No	Keterangan	31 Desember 2015 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	Description
A	**Kecukupan Modal Bank (Pilar 1)** Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar.	18,08%	20,57%	**Capital Adequency (Pilar 1)** Minimum Capital Adequacy Requirement by taking into consideration Credit Risk, Operation Risk and Market Risk.
B	**Kecukupan Modal Bank (Pilar 2)** Profil Risiko Bank Kecukupan Pemenuhan Modal sesuai Profil Risiko	 2 9,00%	 2 9,00%	**Capital Adequency (Pilar 2)** Bank's Risk Profile Minimum Capital Adequacy based on risk profile
C	**Add on** 1. Risiko Konsentrasi 2. Risiko Likuiditas 3. Risiko Suku Bunga Banking Book 4. Risiko Stratejik 5. Risiko Reputasi 6. Risiko Hukum 7. Risiko Kepatuhan **Total Add on**	 0,15% 0,00% 0,01% 0,06% 0,01% 0,01% 0,03% **0,27%**	 0,07% 0,02% 0,02% 0,14% 0,00% 0,00% 0,05% **0,30%**	**Add on** 1. Concentration Risk 2. Liquidity Risk 3. Banking Book Interest Rate Risk 4. strategic Risk 5. Reputation Risk 6. Legal Risk 7. Compliance Risk **Total Add on**
D	**Total Modal Menurut Pilar 2 (B + C)**	**9,27%**	**9,30%**	**Total Capital Pilar 2 (B + C)**
E	**Excess Modal (A-D)**	**8,81%**	**11,28%**	**Capital Excess (A-D)**

2. Pengelolaan Risiko Melalui Aktivitas Operasional

Pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional lebih ditujukan terhadap risiko operasional pada aktivitas perkreditan, pasar dan operasional pada level yang dapat diterima. Bank BNP juga menerapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam bentuk kebijakan limit dan sistem limit.

Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko maupun limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. Kebijakan limit tidak saja berfungsi dalam proses pengendalian risiko namun juga mendorong strategi bisnis dan ekspansi bisnis ke dalam koridor pertumbuhan dengan profil *risk-return* yang optimal. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui *front end, middle end* dan *back end*. Pengelolaan risiko pasar dan likuiditas dilakukan melalui sistem limit. Pengelolaan risiko operasional pada produk dan aktivitas Bank dilakukan oleh seluruh unit kerja dan dikaji ulang secara menyeluruh oleh *Risk Management Unit*, serta diukur efektivitas pelaksanaannya (*assurance*) oleh unit Internal Audit.

Pengelolaan Manajemen Risiko

1. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit berasal dari aktivitas pemberian kredit, penempatan pada surat berharga dan kepada bank lain dan aktivitas trading. Risiko kredit juga berasal dari transaksi komitmen dan kontinjensi dengan nasabah dan pihak lawan lainnya. Pengelolaan risiko kredit bertujuan untuk mengukur, mengantisipasi, dan meminimalkan kerugian akibat kegagalan nasabah debitur atau pihak lawan lainnya dalam memenuhi kewajibannya.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

Proses Manajemen Risiko Kredit adalah penerapan secara sistematik kebijakan manajemen, prosedur dan praktik manajemen dalam pelaksanaan tugas untuk melakukan *monitoring* dan *reporting*, identifikasi, *assessment* (pengukuran dan evaluasi), respons risiko dan mitigasi risiko untuk memastikan atas seluruh aktivitas perkreditan Bank dapat dikendalikan dengan baik pada tingkat risiko yang telah ditetapkan.

2. Operational Activities Risk Management

Operational activities risk management is addressed for operational risk on credit, market and operational activities on acceptable levels. Bank BNP is applying risk appetite and risk tolerance in the form of limit policy and limit system.

Limit determination is based on the overall limit, limit by risk type and limit by certain functional activities that carry risk exposure. Limit policy not only functions in the risk control process, but also in the supporting business strategy and business expansion into a growth corridor with optimum risk-return profile. Credit risk management is performed on front end, middle end and back end. Market risk management and liquidity is performed through limit system. Operational risk management on product and Bank activity is performed by all units and wholly reviewed by the Risk Management Unit, and the effectiveness of the assurance is measured by Internal Audit.

Risk Management Governance

1. Credit Risk Management

Credit risk arises from credit disbursement, placement in securities and with other banks, and trading activities. Credit risk also arises from commitment and contingency transactions with customers and other counterparties. Credit risk management aims to measure, anticipate, and minimize loss caused by any customer's or counterparty's failure in fulfilling their obligations.

Credit Risk Management Framework

Credit Risk Management Process is a systematic implementation of management policy, procedures and practices in performing duties on monitoring and reporting, identification, assessment (measurement and evaluation), risk response, and risk mitigation to ensure that all credit activities of the Bank can be well controlled on the risk level that has been set.

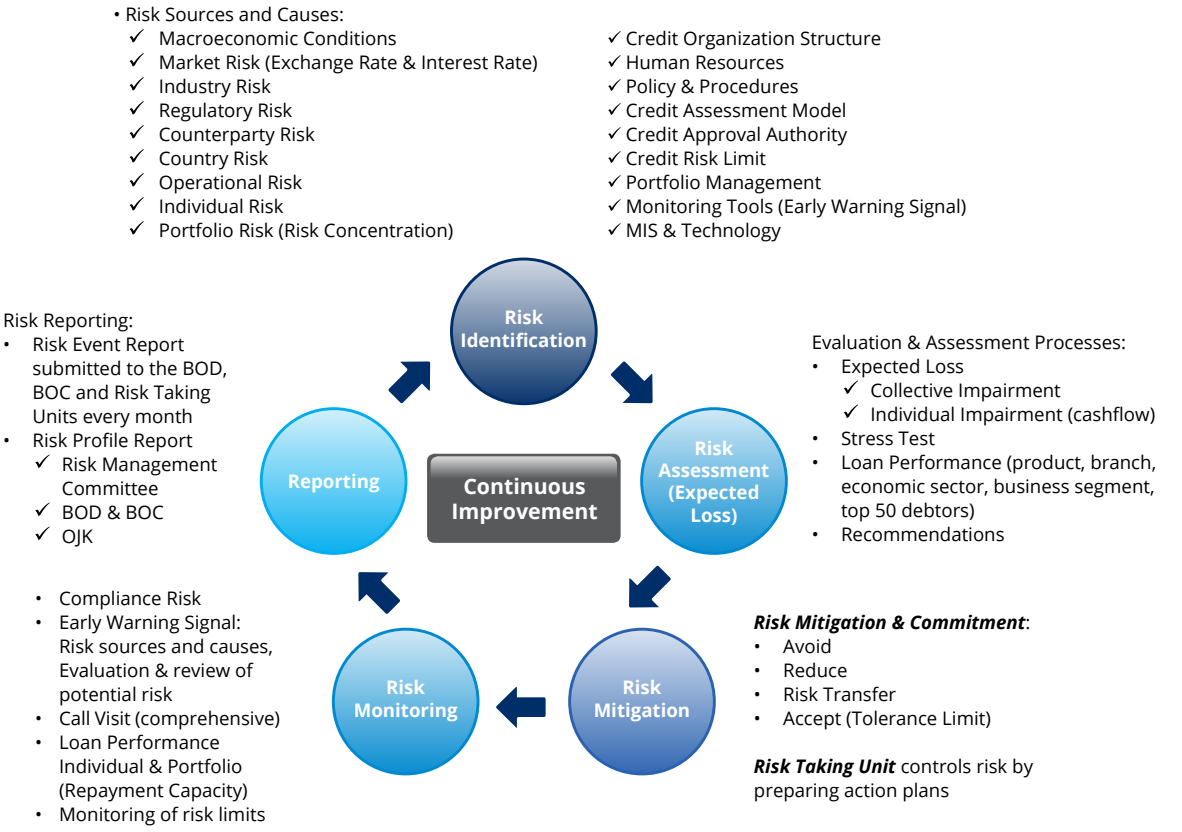
• Risk Sources and Causes:
✓ Macroeconomic Conditions
✓ Market Risk (Exchange Rate & Interest Rate)
✓ Industry Risk
✓ Regulatory Risk
✓ Counterparty Risk
✓ Country Risk
✓ Operational Risk
✓ Individual Risk
✓ Portfolio Risk (Risk Concentration)
✓ Credit Organization Structure
✓ Human Resources
✓ Policy & Procedures
✓ Credit Assessment Model
✓ Credit Approval Authority
✓ Credit Risk Limit
✓ Portfolio Management
✓ Monitoring Tools (Early Warning Signal)
✓ MIS & Technology
Risk Identification
Risk Assessment (Expected Loss)
Risk Mitigation
Risk Monitoring
Reporting
Continuous Improvement
Risk Reporting:
• Risk Event Report submitted to the BOD, BOC and Risk Taking Units every month
• Risk Profile Report
✓ Risk Management Committee
✓ BOD & BOC
✓ OJK
Evaluation & Assessment Processes:
• Expected Loss
✓ Collective Impairment
✓ Individual Impairment (cashflow)
• Stress Test
• Loan Performance (product, branch, economic sector, business segment, top 50 debtors)
• Recommendations
• Compliance Risk
• Early Warning Signal: Risk sources and causes, Evaluation & review of potential risk
• Call Visit (comprehensive)
• Loan Performance Individual & Portfolio (Repayment Capacity)
• Monitoring of risk limits
Risk Mitigation & Commitment:
• Avoid
• Reduce
• Risk Transfer
• Accept (Tolerance Limit)
Risk Taking Unit controls risk by preparing action plans

Bank BNP secara berkelanjutan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang dalam penyempurnaan pengelolaan risiko kredit meliputi:

- Peningkatan dan Pengembangan manusia yang bersumber daya untuk menunjang pengelolaan risiko kredit yang layak;
- Pembenahan infrastruktur untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko kredit dengan melakukan re-organisasi (perubahan struktur organisasi) dengan mengedepankan prinsip pengendalian internal secara melekat, pengembangan sistem dan teknologi, Kecukupan Manajemen sistem informasi secara terintegrasi;
- Pengelolaan Portofolio Kredit yang dibagi berdasarkan sektor ekonomi dan industri yang didasarkan pada prinsip *risk and return* dan risiko konsentrasi kredit;
- Mengembangkan dan meningkatkan *Early Warning System*, metode identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit secara berkelanjutan.
- Penyusunan penetapan batas wewenang pemutus kredit dalam rangka penegakan prinsip kehati-hatian perbankan;

Bank BNP is sustainably performing evaluation and reviews in risk management improvement as follows:

- Human capital development and growth to support decent credit risk management;
- Infrastructure revamping to support efficiency and effectiveness of credit risk management by performing re-organization (change of organization structure) by prioritizing the internal control principle inherently, system and technology development, and integrated information system management adequacy;
- Credit portfolio management, which is divided by economic and industry sector based on risk and return and credit concentration risk principle;
- To develop and improve Early Warning System, identification method, measurement, monitoring, and controlling of the credit risk continuously.
- Preparation of credit approval officer's authority in order to establish prudent banking principle;

- Proses pemberian kredit berprinsip pada *four eyes principles* dan kehati-hatian dengan melalui beberapa tahapan, di mana keputusan persetujuan kredit diberikan oleh Komite Kredit dan dibantu rekomendasi dari *Credit Process Division* (*Legal Credit Department*), *Credit Quality Division* (*Credit Review Department*), serta opini dari *Compliance & Risk Management Directorate* apabila diperlukan.
- Pemantauan pergerakan kualitas kredit yang dilakukan secara periodik oleh *Risk Management Division* sebagai unit kerja independen;
- Menetapkan dan melakukan pengawasan terhadap kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengaruhnya terhadap pencapaian target laba bank dan *economic capital*;
- Kecukupan proses administrasi, pengukuran dan pemantauan kredit secara lengkap, antara lain dengan mengelola informasi dan dokumentasi legal jaminan kredit untuk meminimalkan dampak risiko.

2. Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan suku bunga dan nilai tukar, termasuk instrumen derivatif. Dalam hal pengelolaan Risiko Pasar didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- Pengembangan SDM yang berkompeten dalam melakukan transaksi sesuai dengan kewenangan dan batas;
- Senantiasa mengembangkan metode *Early Warning System*, dan metode identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar (risiko suku bunga dan risiko nilai tukar);
- Menetapkan dan melakukan kaji ulang atas limit-limit risiko pasar;
- Pelaksanaan *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang dijalankan secara periodik, yang bertugas mengelola kebijakan dan strategi dalam mengkoordinasikan sumber dan penggunaan dana secara efektif dan efisien melalui pengelolaan likuiditas, suku bunga dan nilai tukar, serta penetapan batas risiko dan pengukuran risiko yang ditunjang oleh sistem yang mencukupi;
- Pemantauan terhadap suku bunga penempatan pada Surat Berharga dan Bank Lain secara rata-rata di atas suku bunga DPK;
- Pengelolaan Posisi Devisa Netto (PDN) pada posisi harian yang selalu berada pada tingkat ketentuan yang berlaku.

3. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Bank tidak mampu menyediakan likuiditas dengan tingkat harga yang wajar yang akan berdampak kepada profitabilitas dan modal Bank. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur

- Credit disbursement process is based on the four eyes principle and the principle of prudence through certain phases where credit approval decision is granted by Credit Committee and supported by the recommendation from Credit Process Division (Legal Credit Department), Credit Quality Division (Credit Review Department), and opinion from Compliance and Risk Management Directorate if required.
- Monitoring of credit quality movement, which is performed periodically by Risk Management Division as an independent unit;
- To set and perform supervision toward sufficiency of impairment loss reserves and its effect to profit target achievement and economic capital;
- Adequacy of administration processes, complete credit measurement and monitoring, by organizing legal information and documentation of credit insurance to minimizing risks.

2. Market Risk Management

Market risk is a potential loss arising from the change in interest rates and exchange rates. In terms of management, market risk is based on the following:

- The development of competent human capital in performing transactions in accordance with the authority and limitation;
- Constantly developing Early Warning System method and identification, measurement, monitoring and controlling of market risk (interest rate risk and exchange rate risk);
- Setting and performing reviews on limits of market risk;
- Implementation of Asset and Liability Committee (ALCO) periodically, whose task is to manage policy and strategy in coordinating fund sources and utilization effectively and efficiently through liquidity management, interest rate and exchange rate, and also arrangement of risk limit and risk measurement, supported by an adequate system.
- Monitoring of interest rates and the placements in securities and other banks so that on average they are above the interest rate for Third Party Funds;
- Daily management of Net Open Position to be always compliant with the applicable regulations.

3. Liquidity Risk Management

Liquidity risk is the risk of the Bank being unable to provide liquidity at the appropriate price which affects its profitability and capital. The Bank's liquidity is influenced by the funding structure, asset liquidity, liabilities to

pendanaan, likuiditas aset, kewajiban kepada pihak lawan dan komitmen kredit kepada debitur. Risiko likuiditas Bank diukur melalui beberapa indikator, antara lain primary reserve ratio (rasio Giro Wajib Minimum dan Kas), *secondary reserve* (cadangan likuiditas), dan Loan Funding Ratio (LFR). Pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan menetapkan limit-limit yang mengacu pada ketentuan regulator maupun internal.

Pengelolaan risiko Likuiditas dilakukan dengan cara:
- Mengembangkan metode *Early Warning System* yang efektif secara berkesinambungan;
- Melakukan *review* dan mengembangkan metode proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas;
- Menetapkan batas kecukupan *secondary reserves*/ *liquidity reserves* Bank, baik dalam kondisi normal maupun kondisi ekstrem;
- Melakukan kaji ulang dan pengawasan terhadap limit risiko likuiditas Bank secara periodik;
- Pengawasan Maturity Gap (*Asset and Liabilities*) setiap bulan sebagai tindakan mitigasi risiko likuditas;

- Pelaksanaan Komite ALCO yang secara periodik bertanggung jawab langsung kepada Direksi untuk memastikan kondisi likuiditas Bank sesuai dengan kondisi industri perbankan di Indonesia;
- Melaksanakan analisis *behavioural dynamic* dengan melakukan *cashflow projection* setiap bulan yang dilakukan secara komprehensif oleh *Business Division, Risk Management Division, Treasury Division* dan *Financial Control Division* untuk mengetahui *Core* dan *Non-Core* Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *projection Net Interest Income* (NII).
- Memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

4. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional dapat disebabkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Manajemen risiko operasional yang efektif dapat menekan kerugian akibat risiko operasional. Kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional mengacu pada regulasi Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan internal Bank yang berlaku.

Selain itu, dalam rangka mendukung inovasi Bank untuk memenuhi kebutuhan Nasabah atas produk dan layanan Bank, maka disusun pedoman mengenai pengelolaan risiko dan langkah-langkah mitigasi pada Produk atau Aktivitas Baru (PAB), yaitu Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru yang bertujuan

counterparties, and credit commitment to debtors. The Bank's liquidity risk is measured using certain indicators, such as primary reserve ratio, secondary reserve, and Loan to Funding Ratio (LFR). Liquidity risk control is performed by setting up limits in accordance wih the regulations and internal provisions.

Liquidity risk management is performed by:
- Developing effective Early Warning System continuously;
- Performing review and developing identification process method, measurement, monitoring, and control of liquidity risk;
- Setting the limit for the Bank's secondary reserves/ liquidity reserves, in normal as well as extreme conditions;
- Reviewing and monitoring liquidity risk limit periodically;
- Controlling maturity gap (Asset and Liabilities) on a monthly basis as an action of liquidity risk mitigation;

- Periodic meetings of the ALCO, responsible directly to the Board of Directors to ensure that the Bank's liquidity is in accordance with banking industry's conditions in Indonesia;
- Performing behavioral dynamic analyses through monthly cash flow projection conducted comprehensively by Business Division, Risk Management Division, Treasury Division, and Financial Control Division to find out Core and Non-Core Third Party Funds and Net Interest Income projections.
- To maintain Minimum Reserve Requirement in accordance with Bank Indonesia regulations.

4. Operational Risk Management

Operational risk may be caused by inadequacy and/ or dysfunction of the internal process, human error, system failure, or the existence of external factors that influence the Bank's operations. An effective operational risk management is able to suppress the loss caused by the operational risk. The Operational Risk Management Framework refers to Bank Indonesia/OJK regulations and the applicable internal provisions of the Bank.

In order to support the Bank's innovation to fulfill the customers' needs regarding the Bank's services and products, a guidance on risk management and mitigation phases for New Products and Activities has been prepared, and called the Policy and Procedures for Filing New Products or Activities, which is aimed to

untuk menetapkan standarisasi dalam pengelolaan risiko PAB secara *end to end* dan menghasilkan produk atau aktivitas yang handal serta dapat meningkatkan keuntungan, *corporate image*, dan kualitas layanan Bank.

Sebagai upaya untuk senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola yang baik, maka dalam Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru dirumuskan metodologi penilaian terhadap 8 (delapan) jenis risiko. Hal ini untuk menjaga seluruh produk atau aktivitas baru yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan regulator.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

standardize the management of PNA risk in an end-to-end manner and produce reliable products or activities, and also able to improve profit, corporate image, and service quality of the Bank.

As an effort to constantly perform the prudent banking principle and good governance, in the Policy and Procedures for Filing New Products or Activities the methodology for evaluating 8 types of risk has been defined. This is to ensure that all new products or activities are in compliance with the regulations.

Operational Risk Management Framework

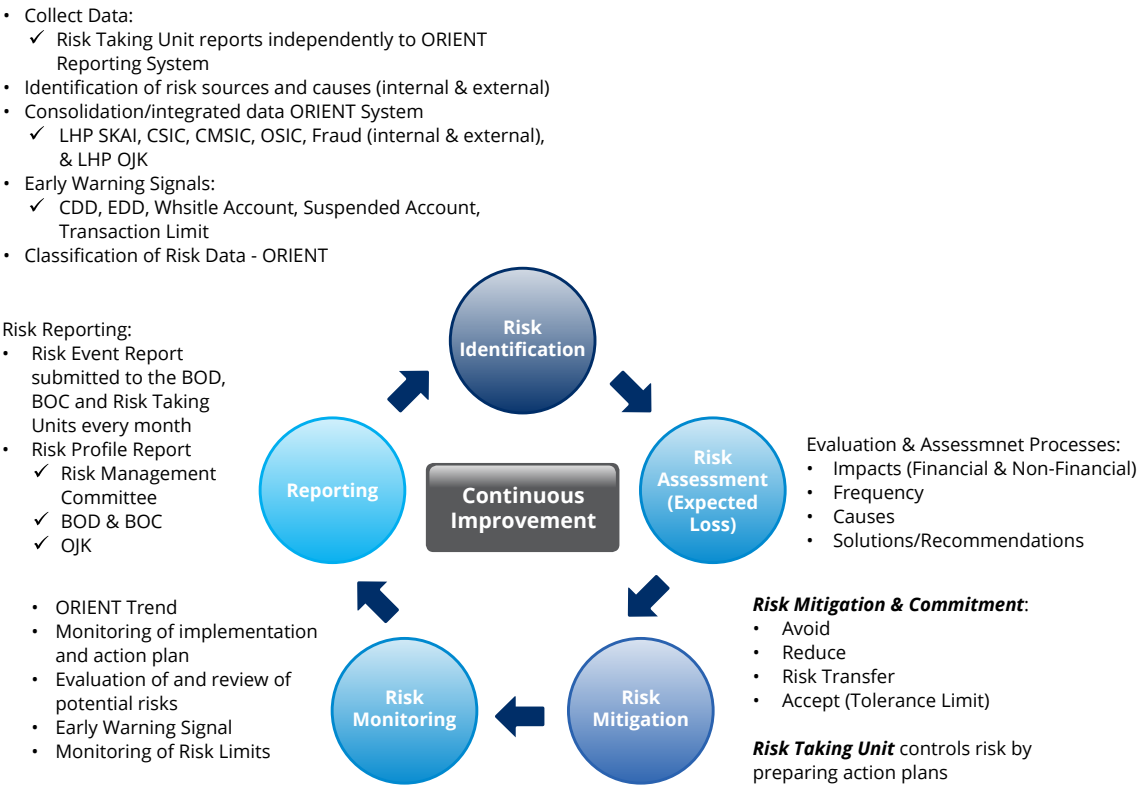
• Collect Data:
✓ Risk Taking Unit reports independently to ORIENT Reporting System
• Identification of risk sources and causes (internal & external)
• Consolidation/integrated data ORIENT System
✓ LHP SKAI, CSIC, CMSIC, OSIC, Fraud (internal & external), & LHP OJK
• Early Warning Signals:
✓ CDD, EDD, Whsitle Account, Suspended Account, Transaction Limit
• Classification of Risk Data - ORIENT
Risk Identification
Risk Assessment (Expected Loss)
Evaluation & Assessmnet Processes:
• Impacts (Financial & Non-Financial)
• Frequency
• Causes
• Solutions/Recommendations
Risk Mitigation
Risk Mitigation & Commitment:
• Avoid
• Reduce
• Risk Transfer
• Accept (Tolerance Limit)
Risk Taking Unit controls risk by preparing action plans
Risk Monitoring
• ORIENT Trend
• Monitoring of implementation and action plan
• Evaluation of and review of potential risks
• Early Warning Signal
• Monitoring of Risk Limits
Reporting
Risk Reporting:
• Risk Event Report submitted to the BOD, BOC and Risk Taking Units every month
• Risk Profile Report
✓ Risk Management Committee
✓ BOD & BOC
✓ OJK
Continuous Improvement

Pengelolaan Risiko Operasional dilakukan antara lain dengan cara:

1. Memberikan pengarahan, pemahaman budaya risiko kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal secara komprehensif, sehingga tidak terjadi kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem, kesalahan manusia, kesalahan proses dan kejadian eksternal;

Operational Risk Management is performed by:

1. Briefing and giving understanding of risk culture to all employees to comprehensively improve internal control system, so that there is no loss because of system failure, human error, process failure, and external factors;

2. Mengembangkan dan meningkatkan parameter *Early Warning System* dalam upaya menemukan lebih awal risiko operasional dan *fraud*;
3. Menetapkan dan meningkatkan sistem pengawasan yang terpadu atas seluruh kegiatan operasional dengan format-format laporan dan mekanisme sistem pelaporan secara terstruktur dengan mengedepankan prinsip pengendalian internal;
4. Membangun budaya risiko dengan adanya laporan kegiatan *Operational Risk Event* (ORIENT) dari seluruh akitivitas fungsional yang disampaikan kepada Departemen Risiko Operasional untuk dilakukan analisis, evaluasi dan mitigasi risiko yang selanjutnya dilaporkan kepada Direksi;
5. Meningkatkan proses pengendalian pelaksanaan aktivitas operasional bank dan kesesuaian dengan *Standard Operating Procedures* (SOP);
6. Melakukan kaji ulang, pengkinian, pengawasan dan sosialisasi terhadap *Standard Operating Procedure* yang disesuaikan dengan hasil analisis ORIENT, rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), perkembangan bisnis, kompleksitas produk serta aktivitas Bank secara bertahap, termasuk peluncuran produk/aktivitas baru.

2. Developing and improving Early Warning System parameters in order to detect early operational risk and fraud;
3. Setting and improving an integrated monitoring system on all operational activities with structured report format and reporting system mechanism by prioritizing internal control principles;
4. Building risk culture through Operational Risk Event (ORIENT) activity report from all functional activities delivered to the Operational Risk Department for analysis, evaluation, and risk mitigation, which is subsequently reported to the Board of Directors;
5. Improving the controlling the process of operational activities and their suitability with the Standard Operating Procedures (SOP);
6. Performing review, updates, monitoring, and information dissemination of Standard Operating Procedures adjusted with the ORIENT analysis result, Internal Audit Unit, business development, product complexity, and the Bank's activities gradually, including the launching of new product/activity.

System Information Management Operational Risk Event

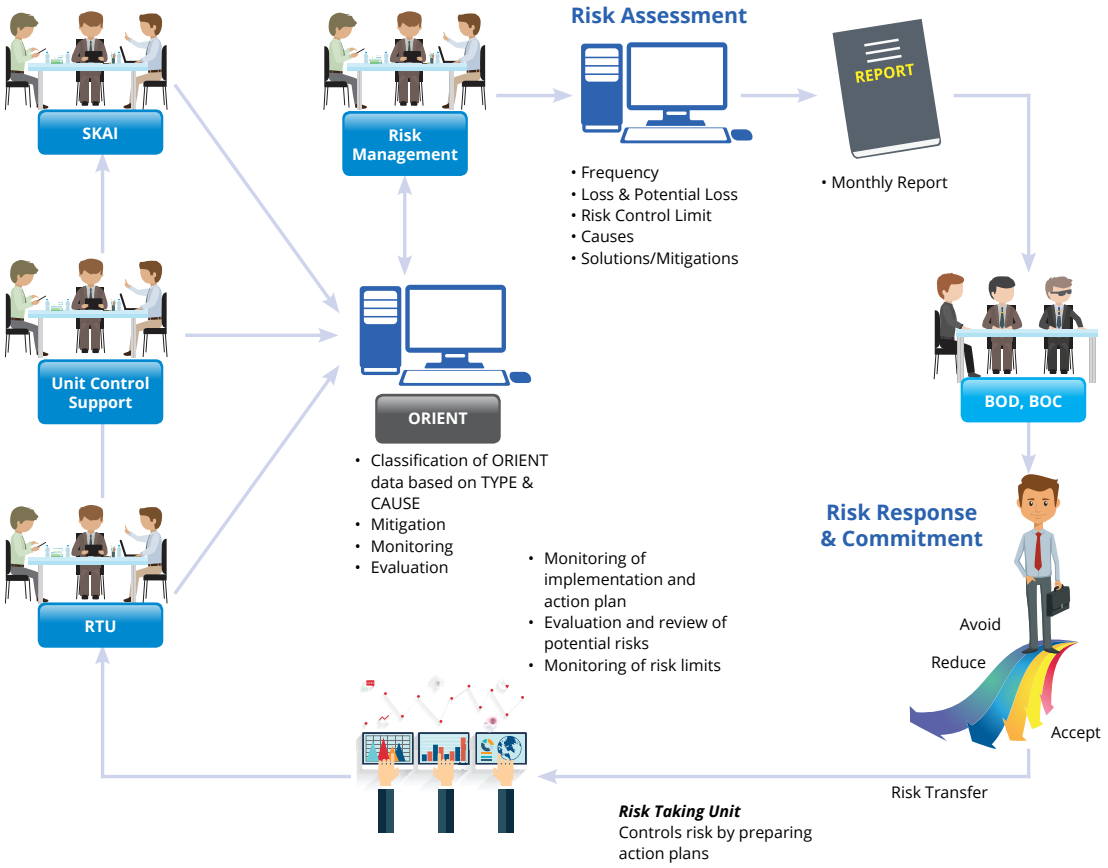

5. **Pengelolaan Risiko Hukum dan Reputasi**
   Pengelolaan risiko hukum dan Reputasi dengan melakukan identifikasi, mitigasi, pemantauan serta pengendalian dalam seluruh aktivitas dan hubungan Bank dengan semua pihak yang dilandaskan pada regulasi dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan nasabah. Upaya Bank dalam menangani risiko hukum dan risiko reputasi dalam hal menghindari pemberitaan dan tanggapan negatif yaitu dengan melakukan pemantauan berita di media. Oleh karena itu, setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditangani dengan cepat sesuai prosedur internal Bank.

6. **Pengelolaan Risiko Strategi**
   Corporate Planning and Performance Management Division, Business Division dan *Risk Management Division* mengelola risiko strategis secara bersama-sama dengan membandingkan rencana bisnis yang disusun Bank dengan hasil pencapaian setiap unit terkait. Pengelolaan risiko strategis turut dilakukan dengan melaksanakan proses identifikasi secara berlanjut terhadap faktor-faktor yang berpotensi menghambat terwujudnya rencana strategis Bank, baik faktor eksternal, antara lain kondisi ekonomi global, regional, perubahan nilai tukar, suku bunga, persaingan bank, dan teknologi, maupun faktor internal, antara lain manusia yang bersumber daya, *Management Information System* (MIS), sistem pengendalian internal, kebijakan dan prosedur, kewenangan dan tanggung jawab.

7. **Pengelolaan Risiko Kepatuhan**
   Pengelolaan risiko kepatuhan dikoordinasikan oleh *Compliance Division* yang bertanggung jawab langsung kepada *Compliance & Risk Management Director*. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, *Compliance Division* melakukan identifikasi, analisis, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan pelaksanaan peraturan, yang dilakukan melalui perumusan kebijakan kepatuhan, dan pelaksanaan program-program kepatuhan secara rutin untuk memastikan seluruh karyawan dalam setiap aktivitas fungsional telah mengetahui, memahami dan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Profil Risiko

Bank melakukan penilaian profil risiko secara bulanan yang kemudian dibahas dalam rapat Direksi. Setiap triwulan, penilaian profil risiko dipresentasikan dalam Komite Manajemen Risiko sebelum dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

5. **Legal & Reputation Risk Management**
   Legal and reputation risk management is performed through identification, mitigation, monitoring and controlling of all activities and relationships of the Bank with all parties based on the terms and regulations which are able to protect the Bank's interests as well as its customers'. The measure in handling legal and reputation risks in terms of avoiding negative news and responses is to monitor various media. Hence, every customer's complaint has to be addressed promptly in accordance with the Bank's internal procedures.

6. **Strategic Risk Management**
   Corporate Planning and Performance Management Division, Business Division and Risk Management Division manage strategic risk together by comparing business plan with achievement outcome of every related unit. Strategic risk management is performed by continuously running the identification process toward factors that have potential to deter the achievement of the Bank's strategic plans, be they external factors, such as global or regional economic conditions, changes in exchange rate, interest rate, banking competition, and technologies, or internal factors, such as human resources, Management Information System (MIS), internal control, policies and procedures, authority and responsibilities.

7. **Compliance Risk Management**
   Compliance risk management is coordinated by the Compliance Division which is directly responsible to the Compliance and Risk Management Director. In order to manage compliance risk, Compliance Division performs identification, analysis, measurement, monitoring and controlling on the fulfillment of regulations through compliance policy arrangement and regular compliance programs implementation to ensure that all employees in all functional activities have known, understood, and conduct their work in accordance with the rules and regulations.

Risk Profile

The Bank evaluates its risk profile on monthly basis prior to being discussed in the Board of Directors meetings. Every quarter, the risk profile evaluation is presented in Risk Management Committee meeting before being reported to OJK.

Penilaian jenis risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yangmelekat pada setiap aktivitas fungsional (risiko inheren) dan sistem pengendalian risiko. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan, yang terdapat pada aktivitas fungsional Bank dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank.

The evaluation of risk types is a combination of the risks inherent to functional activities (inherent risk) and risk management system. The evaluation of the risk profile is performed on 8 risks: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk, all of which are present in the Bank's functional activities and may cause losses for the Bank.

Penilaian profil risiko Bank pada posisi Q4- 2016 secara agregat adalah "*Low to Moderate*", di mana peringkat komposit baik inherent risk maupun penerapan kualitas manajemen risiko Bank adalah "*Low to Moderate*".

The Bank's risk profile assessment in Q4-2016 resulted in an aggregate ranking of "Low to Moderate", and the composite ranking for both inherent risk and the Bank's risk management quality implementation.

Namun demikian dari hasil penilaian profil risiko bank pada posisi Q4-2016, Bank BNP perlu melakukan evaluasi yang terintegrasi secara menyeluruh terhadap risiko-risiko yang dihadapi. Beberapa hal yang dihadapi Bank BNP berikut mitigasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

However, from the evaluation result of the Bank's risk profile for Q4-2016, Bank BNP needed to perform an integrated and overall evaluation on the risks it faces. A number of issues encountered by the Bank, including the mitigation measures that were undertaken, are:

Risiko yang Dihadapi Risk Faced	**Keterangan** Description	**Mitigasi** Mitigation
Konsentrasi kredit Credit Concentration	Eksposur yang berlebihan kepada satu atau beberapa individu atau entitas, sekelompok entitas yang saling terkait, suatu wilayah geografis, sektor industri, produk tertentu dan lain sebagainya yang mempunyai kriteria sistematik yang serupa, dapat mengakibatkan potensi kerugian yang sangat besar / Excessive exposure on one or some individuals or entities, a group of related entities, geographic areas, industrial sectors, certain products, etc. with similar systematic criteria, may cause huge loss for the Bank.	• Mengembangkan *Portfolio Management* yang terintegrasi pada seluruh tahapan pengelolaan risiko kredit / Develop integrated Management Portfolio on all credit risk management stages • Melakukan pembatasan eksposur melalui kebijakan limit (limit industri dan limit debitur) / Perform exposure limitation through limit policy (industry limit and debtor limit)
Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena krisis global / Economic growth slowdown due to global crisis	Meningkatnya potensi risiko kredit individual dan/ atau group / Increase of individual and/or group credit risk potential.	• Melakukan pengelolaan portfolio secara aktif untuk mendapatkan portfolio kredit di sektor-sektor yang prospektif. / Actively perform portfolio management to secure credit portfolio in prospective sectors. • Melakukan stress testing secara komprehensif dan berkala, serta menyusun *contingency plan*. / Perform stress testing comprehensively and periodically, and arrange contingency plans. • Memantau secara ketat sektor industri yang berpotensi terkena dampak krisis dan resesi, misalnya pertambangan, komoditas dan tekstil. / Tightly monitor the industrial sectorsthat can be affected by crisis and recession, like mining, commodity and textile. • Mengembangkan *watch list tools / Negatif List Industry*. / Develop watch a list tool/negative list of industries. • Melakukan *review* parameter *Credit Assessmnet Process dan Credit Ealy Warning Signal*. / Review the parametersfor Credit Assessment Process and Credit Early Warning Signal.

Risiko yang Dihadapi Risk Faced	Keterangan Description	Mitigasi Mitigation
Internal dan Eksternal Fraud Internal and External Fraud	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/ atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. / Action of irregularities or omissions intentionally done to deceive and manipulate the Bank, its customers, or other parties, that happen withinthe Bank's environment and/or using the facilities of the Bank that cause losses and/or the fraud-committing party gaining economic benefiteither directly or indirectly.	• Pengelolaan risiko operasional oleh seluruh unit kerja. / Conduct operational risk management by all units. • Meningkatkan *risk awareness* melalui serangkaian program sosialisasi kepada seluruh unit kerja di seluruh aktivitas fungsional, yang dipantau secara periodik melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. / Improve risk awareness through information disseminationto all units in all functional activities, which is monitored periodically by Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee. • Menerapkan proses due dilligence dan pengelolaan risiko terhadap nasabah mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia dan didasarkan pada prinsip risk-based approach. / Apply due diligence process and risk management on customersby referring to Bank Indonesia regulations and based on risk-based approach principle.

Proses Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Untuk mengetahui efektivitas Sistem Manajemen Risiko dan penerapannya, maka dilakukan evaluasi dan *review* baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanaan fungsi pengawasan. Satuan kerja audit intern secara rutin melakukan *review* dan audit terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan prinsip *risk-based audit* dengan tujuan bukan saja sebagai pengendalian intern namun juga untuk perbaikan penerapan manajemen risiko secara terus berkelanjutan.

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

To mesaure the effectiveness of Risk Management System and its implementation, evaluation and internal or external review have to be performed. Internally, Risk Monitoring Committee and Audit Committee have duties and responsibilities to review and evaluate the policy and risk management implementation, and also to give inputs and recommendations to the Board of Commissioners in order to perform the monitoring function. Internal Audit unit routinely performs review and audit on risk management of the Bank based on risk-based audit principle with the intention not only as internal control but also for sustainable improvement of risk management implementation.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2016

Compliance Function Implementation in 2016

Sepanjang tahun 2016, pelaksanaan fungsi Kepatuhan fokus pada pengembangan budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi, melakukan Uji Kepatuhan (*Compliance Testing*) atas penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudential Banking*), memastikan pelaksanaan tugas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) serta memastikan terlaksananya upaya penerapan Perlindungan Konsumen yang tercakup dalam setiap aspek kegiatan operasional dan bisnis di Bank BNP.

Throughout 2016, the implementation of the Compliance function was focused on fostering the culture of compliance across all levels of the organization, conducting the Compliance Testing on the prudential banking principles, ensuring that the duties of Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (APU & PPT) be performed, as well as upholding consumer protection in each aspect of Bank BNP's operations and business.

A. Kegiatan

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengembangkan budaya kepatuhan antara lain melalui:

1. Sosialisasi dan Edukasi

a. Memberikan pelatihan atau sosialisasi secara berkala kepada karyawan mengenai berbagai aspek kepatuhan.
b. Menyampaikan penjelasan singkat mengenai peraturan dan atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Kepatuhan.
c. Memberikan pelatihan/*training* mengenai pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada karyawan/*staff* baru sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.
d. Mendistribusikan Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang terkini dan atau perubahannya kepada Unit Kerja terkait serta mendiskusikan implementasinya.
e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia di Unit Kerja Kepatuhan dengan mengirimkan *staff* pada pelatihan/seminar eksternal terkait dengan Bidang Kepatuhan Bank yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi terkait lainnya.

2. Verifikasi dan Validasi

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan antara Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaannya terhadap Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan atau Peraturan Perundang-undangan terkait lain yang berlaku.
b. Memastikan pemenuhan komitmen bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan/ pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Monitoring dan Review

a. Membuat pengecekan kepatuhan *(Compliance Check)* terhadap kegiatan operasional dan bisnis antara lain kepatuhan terhadap aturan ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan, dan lain-lain.

A. Activities

Measures taken in order to develop the culture of compliance among others are:

1. Dissemination and Education

a. Providing training or dissemination periodically to employees regarding various aspects of compliance.
b. Delivering succinct description regarding the prevailing regulations and/or amendments thereto as well as other aspects related to Compliance.
c. Providing training regarding the guidelines and prevailing regulations to new staff and employees as the first step towards developing the awareness about compliance.
d. Circulating the Regulations of Bank Indonesia, Financial Services Authority, and/or other updated pertinent regulations and/or the amendments thereto to the relevant Work Units and discussing the implementation thereof.
e. Enhancing knowledge and capability of human resources in the Compliance Unit by enrolling the staff on external seminars and training programs related to Banking Compliance, which were organized by the Compliance Director Communication Forum (FKDKP), Bank Indonesia, Financial Services Authority, Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK), and other related institutions.

2. Verification and Validation

a. Conducting monitoring and evaluation to ensure the appropriateness and alignment of policies and procedures and the implementation thereof against the Regulations of Bank Indonesia, Financial Services Authority, and/or other prevailing regulations that are of relevance.
b. Ensuring that the Bank's commitment to the Financial Services Authority regarding the follow up to the audit/monitoring results of the Financial Services Authority be held at all times.

3. Monitoring and Review

a. Preparing the Compliance Check List on all operational and business activities, among others compliance with the regulation on Capital Adequacy Ratio, compliance with Taxation Regulations, and others.

b. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan data dan informasi Nasabah pada *banking system* sebagai tempat dan sumber data/informasi Nasabah yang dilakukan secara bulanan.
c. Melakukan pemantauan terhadap proses Pembukaan Rekening dan penetapan Klasifikasi Risiko Nasabah.
d. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan Transaksi Nasabah.
e. Melakukan pemantauan terhadap kelengkapan informasi/data termasuk dokumen pendukungnya dan pelaksanaan Pengkinian Data Nasabah.

4. Ketersediaan dan Kecukupan

a. Melakukan kaji ulang terhadap kecukupan dan kesesuaian Kebijakan dan Prosedur Internal serta pelaksanaannya yang mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang kegiatan operasional dan bisnis Bank BNP.
b. Melaksanakan fungsi *advisory* kepatuhan internal terkait dengan kegiatan di bidang perkreditan, operasional atau treasuri & *market*.

B. Bidang-Bidang yang Menjadi Prioritas

Beberapa hal yang menjadi fokus utama pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian Bank (*Prudential Banking Principles*)

Dalam rangka menaati ketentuan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Bank, maka sepanjang tahun 2016 Bank BNP senantiasa mematuhi ketentuan tersebut dalam menjalani kegiatan operasional dan bisnis. Adapun pemenuhan ketentuan Bank Indonesia tersebut pada posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

b. Monitoring the completeness of customer data and information in the banking system as a repository and source of customer data/information, on a monthly basis.
c. Monitoring the processes of Account Opening and determination of Customer Risk Classification.
d. Monitoring customers' transactional activities.
e. Monitoring the completeness of data/information including the supporting documents and the implementation of customer data updating.

4. Availability and Adequacy

a. Reviewing the adequacy and alignment of internal policies and procedures as well as the implementation thereof by referring to the prevailing rules and regulations that support Bank BNP's operational and business activities.
b. Performing the advisory function for internal compliance in relation to the activities of lending, operations, treasury and market.

B. Areas of Priority

Various areas that were prioritized in terms of compliance aspect throughout 2016 were as follows:

1. Prudential Banking Principles

In order to comply with the regulations of Bank Indonesia in relation to the Prudential Banking Principles, throughout 2016 Bank BNP continued to abide by said regulations in conducting its business and operational activities. The fulfillment of such regulations of Bank Indonesia as at 31 December 2016 was demonstrated as follows:

Aspek Kepatuhan Compliance Aspect	**Kepatuhan Bank BNP** Bank BNP's Level of Compliance	**Persyaratan Otoritas** Requirement from Authority	**Status** Status
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Capital Adequacy Ratio	20,58%	≥8%	Terpenuhi Fulfilled
Pelampauan/Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Violation of Legal Lending Limit	Tidak ada None	Tidak Diperkenankan Not Allowed	Terpenuhi Fulfilled
Rasio *Non Performing Loan* (NPL)-Net NPL-Net Ratio	4,07%	≤5%	Terpenuhi Fulfilled
Posisi Devisa Neto (PDN) Net Open Position	0,25%	≤20%	Terpenuhi Fulfilled

Aspek Kepatuhan Compliance Aspect	Kepatuhan Bank BNP Bank BNP's Level of Compliance	Persyaratan Otoritas Requirement from Authority	Status Status
Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Minimum Reserve Requirement – Primary	6,68%	≥7,5%	Terpenuhi Fulfilled
Rasio GWM Sekunder Minimum Reserve Requirement – Secondary	15,15%	≥4%	Terpenuhi Fulfilled
Rasio GWM dalam Valuta Asing Minimum Reserve Requirement in Foreign Currencies	8,10%	≥8%	Terpenuhi Fulfilled

2. **Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)** dengan menitikberatkan pada pemenuhan dan pelaksanaan:
   a. Analisa Transaksi Nasabah dan *Walk In Customer (WIC)* terkait dengan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)/Suspicious Transaction Report (STR) ke PPATK,
   b. Penerapan *Risk-Based Approach* Pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhanced Due Diligence (EDD)* yang berkaitan dengan pemantauan profil nasabah,
   c. Pelaporan Transaksi Kiriman Uang Dari dan Ke Luar Negeri/*International Fund Transfer Instruction (IFTI),*
   d. *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).*

   Dalam tahun 2016 beberapa hal telah dilakukan untuk menunjang terlaksananya penerapan APU & PPT lebih baik dan memadai dengan melakukan:
   a. Pengembangan aplikasi yang dapat mendukung program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme agar mampu mendeteksi awal *(red flag)*, mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara lebih efektif terhadap karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan *walk in customer* (WIC) sebagai bentuk ketersediaan sistem informasi manajemen.

   b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya penerapan program APU & PPT di setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank untuk menghindarkan Bank BNP dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan teroris dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh Petugas Bank yang berkaitan langsung dengan Nasabah, kepada seluruh karyawan baru, dan kepada karyawan yang mendapatkan promosi jabatan. Bentuk sosialisasi dan edukasi dilakukan juga melalui pembuatan video

2. **Anti-Money Laundering and Prevention of Financing of Terrorism (APU & PPT)** with emphasis on fulfillment and implementation of:
   a. Customers & Walk In Customers (WIC) Transaction Analyses, in relation to the reporting of suspicious financial transactions report to PPATK,

   b. Risk-Based Approach to the Implementation of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) in relation to the monitoring of customer profile,
   c. Reporting of International Fund Transfer Instructions (IFTI),
   d. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

   In 2016 the following were implemented to support stronger performance of APU & PPT:

   a. Development of applications that support anti-money laundering and prevention of financing of terrorism programs in order to be able to perform early detection (red flag), identification, analysis, monitoring, and more effective reporting of transactions performed by customers and walk in customers (WIC) with certain characteristics, as part of the management information system.

   b. Enhancement of knowledge and understanding on the importance of the APU & PPT program implementation across all of the Bank's operational and business activities, to ensure that Bank BNP will not be utilized as a means of money laundering and/or financing of terrorism, by conducting dissemination and education to all Bank Officers that are interacting directly with the customers, as well as to new employees and employees that have been recently promoted. This dissemination and education also took place in the form of animation

animasi berdurasi ± 10 menit yang disebarluaskan kepada seluruh kantor Bank dan ditayangkan pada saat program-program pembelajaran yang dilaksanakan di *Learning Center* Bank BNP.

c. Pemanfaatan Hak Akses Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk digunakan sebagai alat deteksi dan identifikasi keabsahan dan kelengkapan data kependudukan terhadap calon Nasabah (penyimpan dan/atau debitur) yang akan memulai melakukan hubungan usaha dengan Bank BNP dan digunakan juga terhadap Nasabah *existing* dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya dilakukan pengembangan dalam *core banking system* atas hasil proses *query* ke *database* DUKCAPIL tersebut.

3. **Perlindungan Nasabah** yang diantaranya mencakup tentang Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah *(Customer Complaint).*

Sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan yang menerapkan 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

a. Transparansi
b. Perlakuan adil
c. Keandalan
d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen
e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau,

Maka sepanjang tahun 2016, Bank BNP senantiasa melaksanakan dan menerapkan ketentuan tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan evaluasi terhadap produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.
b. Melakukan identifikasi dan verifikasi atas penyimpangan kegiatan operasional yang memungkinkan timbulnya kerugian pada nasabah.
c. Membuka layanan pengaduan nasabah untuk memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko operasional.

video with a duration of around 10 minutes, circulated to all offices of the Bank and presented during learning programs conducted in Bank BNP's Learning Center.

c. Utilization of the Right to Access to National Identification Number, Population Data, and Electronic Identification Card (KTP-el), to be used as a means to detect and identify the validity and completeness of prospective customers' (creditors and/or debtors) data who will begin to have a business relationship with Bank BNP. This was also performed on existing customers by entering into Cooperation Agreement with the Directorate General of Population and Civil Registration (DUKCAPIL) – Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, and subsequently the core banking system was developed based on the result of the query process to DUKCAPIL's database.

3. **Customer Protection** measures include the handling of customer complaints.

In line with the regulation on Consumer Protection in the Financial Services sector where the following five basic principles are implemented:

a. Transparency
b. Fair treatment
c. Reliability
d. Confidentiality and security of customer data and information
e. Handling of complaints and resolution of consumer disputes in a simple, quick, and affordable manner,

throughout 2016 Bank BNP continued to perform the above regulation via the following activities:

a. Evaluating the products offered to the public.

b. Identifying and verifying the violations to the operational activites that might result in losses having to be borne by the customers.
c. Setting up the customer care center to obtain direct input from customers regarding aspects that needed improvement in order to minimize the operational risk.

4. **Pengendalian Internal *(Internal Control)***
   Pengendalian internal merupakan bentuk pengawasan yang harus ditetapkan oleh manajemen secara berkesinambungan (*on going basis)* guna:
   a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
   b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
   c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
   d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
   e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan sumber dayanya dan meningkatkan efisiensi dalam hal pengendalian biaya.

5. **Pengendalian, deteksi dan pencegahan terjadinya pelanggaran atau kecurangan** (*Fraud Management)* yang mencakup tentang
   a. Pengaduan pelanggaran/*Whistleblowing*
   b. Perbaikan jalur pelaporan/*Reporting Line*
   c. Kaji ulang pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis Bank yang memiliki risiko tinggi.

6. **Melakukan kaji ulang/*enhance* terhadap Budaya Kepatuhan** *(Compliance Culture/Compliance Awareness)* diantaranya dengan menyebarkan kuesioner secara rutin per triwulan kepada seluruh karyawan untuk memastikan tentang pemahaman karyawan terhadap Ketentuan dan atau Perundang-undangan lain yang terkait dengan praktik perbankan.

7. **Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi**

   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Tata Kelola dan Risk Management Terintegrasi, maka Bank BNP sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) telah melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung kepatuhan terhadap ketentuan dimaksud, antara lain:

   a. Secara berkala (semesteran), BTMU sebagai Entitas Utama telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di Bank BNP melalui kunjungan langsung.
   b. Melakukan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku secara berkala kepada BTMU sebagai Entitas Utama untuk selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. **Internal Control**
   Internal control is a type of supervision that must be performed by the management on an ongoing basis, in order to:
   a. Protect and secure the assets of the Bank;
   b. Ensure the availability of more accurate reporting;
   c. Enhance compliance to the prevailing regulations;
   d. Reduce the financial impact/losses, violations including fraud, and violation to the aspect of prudent banking;
   e. Enhance the organizational effectiveness and resource and improve cost control efficiency.

5. **Control, detection and prevention of fraud** (Fraud Management), which includes:
   a. Whistleblowing mechanism availability
   b. Reporting line improvement
   c. Review of the Bank's business and operational activities that carry a high level of risk.

6. **Review and enhancement of the Compliance Culture/ Compliance Awareness,** among others by distributing a quarterly questionnaire to all employees to ensure that their understanding of the prevailing rules and regulations related to banking practices is up to date.

7. **Compliance Risk Management & Integrated Governance Function**
   In line with the Regulation of the Financial Services Authority on Integrated Governance and Risk Management, Bank BNP as a member of the financial conglomeration of Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) conducted a number of activities to support its compliance with the abovementioned regulations, among others:
   a. Every semester, BTMU as the Main Entity, conducts monitoring and evaluation of the implementation of the compliance function in Bank BNP via direct visit.
   b. Reporting to BTMU as the Main Entity is conducted by abiding to the prevailing regulations, and subsequently submitted also to the Financial Services Authority.

8. *Compliance Opinion/Compliance Check List*

Dalam rangka memastikan kegiatan usaha Bank BNP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka setiap penyediaan dana lebih besar dari Rp10 miliar serta penerbitan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank wajib untuk dilakukan kajian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kegiatan tersebut di atas, maka pelaksanaan fungsi kepatuhan tahun 2016 di Bank BNP dinilai telah memadai, dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNP memiliki *awareness* dan pemahaman yang baik terkait fungsi kepatuhan.
2. Bank BNP memiliki strategi manajemen risiko kepatuhan yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan.
3. Bank BNP memiliki perangkat organisasi yang mendukung terlaksananya manajemen risiko kepatuhan secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab.
4. Tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*).
5. Kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank BNP dari risiko kepatuhan tergolong rendah.
6. Pelanggaran/sanksi yang dibebankan oleh regulator merupakan sanksi yang bersifat administratif.

8. Compliance Opinion/Compliance Check List

To ensure that Bank BNP's business activities are in line with the prevailing regulations, for the provision of funding whose amount is larger than Rp10 billion and the issuance of documents related to banking business activities, a compliance check list review against the prevailing regulations must be performed.

Based on the aforementioned activities, the implementation of the compliance function in Bank BNP throughout the year 2016 was considered adequate, taking into consideration that:

1. The Board of Commissioners and the Board of Directors of Bank BNP have excellent awareness and understanding of the compliance function.
2. Bank BNP has a compliance risk management strategy that is aligned with the risk level to be taken and the determined risk tolerance.
3. Bank BNP has an adequate organizational tool to ensure the effective implementation of compliance risk management including the clarity of authorities and responsibilities.
4. There have been no violation to the prudential banking principles.
5. The possibility of losses for Bank BNP from its compliance risk is considered low.
6. Violations/sanctions from the regulator have been administrative sanctions.

Kode Etik & Budaya Perusahaan

Code of Conduct & Corporate Culture

Kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan. Citra dan reputasi Perusahaan dengan kepercayaan para pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku setiap individu dalam Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan.

Atas dasar pemikiran ini, maka Perusahaan menyusun Kode Etik (*Code of Conduct—COC*) ini untuk diterapkan sebagai suatu standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Individu Perusahaan di semua level organisasi, yang akan mencerminkan kualitas dan budaya Perusahaan. Kode Etik (COC) ini merupakan serangkaian komitmen yang terdiri dari visi misi Bank BNP; informasi "BNP *Hotline*" sebagai media pelaporan atas perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan/atau kejadian *fraud*, aspirasi dan/atau ide perbaikan; informasi budaya kerja Perusahaan; prinsip karyawan profesional dan integritas; implementasi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif; pengelolaan dan pengamanan informasi; ketentuan dalam penggunaan fasilitas perusahaan; pencegahan dan penanganan *fraud*; dan penerapan kode etik.

Informasi mengenai isi Kode Etik Perusahaan disampaikan melalui buku Kode Etik Perusahaan yang dibagikan kepada seluruh level organisasi di Bank BNP dari jenjang level tertinggi sampai yang paling bawah, serta melalui media informasi internal Bank BNP yang dapat diakses oleh seluruh level organisasi Bank BNP.

Seluruh level organisasi Bank BNP wajib untuk menerima dan menerapkan Budaya Perusahaan dan Kode Etik Perusahaan sebagai panduan bertindak dalam menetapkan hubungan kerja, pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dengan sesama karyawan dan/atau pihak-pihak lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada mitra kerja, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.

Pelanggaran Kode Etik

Penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran terhadap Kode Etik yang menyebabkan kerugian Perusahaan akan dikenakan sanksi, setinggi-tingginya, baik secara perdata ataupun pidana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan pada tingkat tertentu dapat mengakibatkan

The confidence of stakeholders, such as employees, customers, suppliers, and other parties, is a key factor in increasing the value and ensuring the business continuity of the Company. The Company's image and reputation, bolstered by the stakeholders' confidence, is closely linked to the behaviors of every individual within the Company and is manifested in their interaction with the stakeholders of the Company.

In light of this, the Company has established the Code of Conduct (COC) to be implemented as a behavioral standard that must be adhered to by all individuals within the Company across all levels, thus reflecting the quality and culture of the Company. The COC is a set of commitments comprising Bank BNP's vision and mission, information regarding "BNP Hotline" as the medium for reporting misconducts and/or fraud activities, employee aspirations and/or ideas for improvement; information on the work culture of the Company; the principles of professionalism and integrity; implementation in creating a conducive working environment; information management and security; regulations regarding the use of company facilities; prevention and handling of fraud; and implementation of the COC.

Information regarding the Company's COC is presented in the book titled "The Company's Code of Conduct", distributed to all levels of Bank BNP's organization, from the highest to the lowest level, and also circulated through Bank BNP's internal media accessible by all levels of Bank BNP's organization.

All levels of Bank BNP's organization are obliged to accept and apply the Corporate Culture and the COC of the Bank as a guideline in their action, shaping the wys they relate to each other at work, how they think, how they behave, and how they interact daily with fellow employees and/or other parties, which include but not limited to the suppliers, the general public, and other stakeholders.

Violations to the Code of Conduct

Irregularities, negligence or violation of the COC which have led to losses suffered by the Company will be penalized, as harshly as possible, either via civil or criminal court in accordance with the prevailing procedures and regulations, and to a certain extent may result in termination of

Pemutusan Hubungan kerja dengan atau tanpa peringatan. Karyawan yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik tapi tidak melaporkannya, dianggap melanggar Kode Etik.

Selama tahun 2016 terdapat 18 (delapan belas) penyimpangan, kelalaian atau pelanggaran terhadap kode etik di Bank BNP, dengan sanksi yang diberikan sebagai berikut:

- 6 (enam) pelanggaran diberikan Surat Teguran;
- 12 (dua belas) pelanggaran diberikan Surat Peringatan.

Budaya Perusahaan

NEVER SAY NO merupakan bentuk komitmen dan aksi nyata dari seluruh karyawan Bank BNP sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang tercermin dalam sikap, pendapat, pandangan serta tindakan yang diterapkan dalam pernyataan "apa yang bisa saya bantu".

NEVER SAY NO diterapkan dalam prinsip *T0hree No's*, yaitu:

- ***NO EXCUSES***
  Penuh tanggung jawab serta tidak mencari alasan atas permasalahan yang timbul.
- ***NO PENDING***
  Tidak menunda pekerjaan atau sigap dalam memberikan respons.
- ***NO EYES CLOSING***
  Peka dan tanggap terhadap segala hal yang terjadi di lingkungan Bank BNP.

employment with or without prior warning. Employees who are aware of such violations or attempted violations of the COC but choose not to report them are themselves considered to be violating the COC.

In 2016 there were 18 (eighteen) cases of violation, negligence, or misconduct involving the implementation of Bank BNP's Code of Conduct, with the sanctions given as follows:

- Reprimand Letter given to the perpetrators in 6 (six) cases of violation;
- Warning Letter given to the perpetrators in 12 (twelve) cases of violation.

Corporate Culture

NEVER SAY NO is a commitment and manifesto for real action of all employees of Bank BNP, serving as a value that becomes the behavior, habit and encouragement, as reflected in the attitudes, opinions, views, and actions that can all be distilled into the statement of "what assistance I can provide".

NEVER SAY NO is implemented through the Three No's principle, that is:

- ***NO EXCUSES***
  Fully responsible and not finding faults from the issues that arise.
- ***NO PENDING***
  Never postpones work and always alert to provide response.
- ***NO EYES CLOSING***
  Sensitive and responsive to the issues that arise within Bank BNP.

Kasus Hukum & Sanksi Administratif

Litigations & Administrative Sanctions

Selama periode tahun 2016, tidak ada satupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank BNP yang dalam masa jabatannya memiliki/terjerat permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana, yang dihadapi oleh Bank BNP selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan mengenai permasalahan hukum Bank adalah sebagai berikut:

a. Jumlah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b. Jumlah permasalahan hukum Non-Pidana (Perdata, PTUN, PHI, Perpajakan, dll.) dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Throughout 2016 there were no members of the Board of Directors or the Board of Commissioners of Bank BNP that during their term of office were involved in litigations in either criminal or civil.

The legal issues that are present are Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, faced by Bank BNP throughout the reporting year, which are being duly processed in the legal domain.

The disclosure of the Bank's legal issues are as follows:

a. Number of legal issues or litigations both Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, which are faced by the Bank and have obtained verdict with permanent legal standing; and
b. Number of legal issues or litigations both Non-Criminal (Civil, Administrative, Industrial Relations, Taxation, etc.) and Criminal, which are faced by the Bank and are currently being processed.

Permasalahan Hukum Litigation	**Jumlah Kasus Pidana** Number of Criminal Cases	**Jumlah Kasus Non-Pidana** Number of Non-Criminal Cases
Telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap / Obtained verdict with permanent legal standing	0	1
Dalam proses penyelesaian / In process	11	22
Total	**11**	**23**

Dari 23 (dua puluh tiga) kasus hukum Non-Pidana tersebut: sejumlah 22 (dua puluh dua) kasus hukum masih dalam proses penanganan di Pengadilan, dan terdapat 1 (satu) kasus hukum sudah mendapat putusan tetap (*inkracht*). Atas 1 kasus hukum yang telah diputus tersebut, tidak terdapat sanksi administratif dan potensi kerugian bagi Bank BNP. Mengenai materi permasalahan hukum tersebut, sebagian besar materinya adalah merupakan gugatan bantahan/ perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Debitur atau Pihak Ketiga agar eksekusi yang dilakukan oleh Bank BNP ditunda/dibatalkan.

Out of the 23 (twenty three) non-criminal litigations, as many as 22 (twenty two) cases are still under trial at the Court, and one has received a legally binding verdict (inkracht). On that one case that has received the verdict, there was no administrative sanction given to Bank BNP and thus the Bank does not bear any potential losses. The case material was mainly regarding the appelant's response with respect to the Execution of Mortgate Rights by the Debtor or Third Party so that the execution carried out by Bank BNP could be delayed or annulled.

Dari 11 (sebelas) kasus hukum Pidana: sejumlah 3 (tiga) kasus merupakan permasalahan non perkreditan dan 8 (delapan) kasus terkait permasalahan perkreditan, yang sampai saat dibuatnya Laporan ini masih dalam tahap proses rencana pelaporan dan sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian. Terkait kasus pidana mengenai permasalahan

Out of the 11 (eleven) criminal cases, three cases were related to non-lending issues, and the remaining eight cases were related to lending. At the point of writing of this Annual Report, these cases are in the process of being reported to the Police. In relation to the lending criminal cases, although up to this point Bank BNP has not suffered any financial

perkreditan tersebut, walaupun sampai saat ini belum menimbulkan kerugian finansial bagi Bank BNP, namun atas kasus pidana tersebut fasilitas kreditnya dapat berpotensi menjadi kredit bermasalah sehingga hal ini secara finansial akan berdampak merugikan bagi Bank BNP yang mana harus mengeluarkan biaya penanganan kasus hukum dan melakukan pencadangan atas kredit bermasalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

losses, owing to these cases its lending facility may become non-performing and thus this may result in certain financial losses to be borne by Bank BNP, which may be required to disburse certain fees for the handling of the criminal cases and form allowances for the non-performing loans in accordance with the prevailing regulations.

Dalam penyelesaian kredit bermasalahnya, Bank BNP telah melakukan upaya-upaya persuasif, namun dikarenakan Debitur tidak kooperatif, maka Bank BNP melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 dengan mengajukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Bank BNP.

In resolving its non-performing loans issues, Bank BNP has taken certain persuasive measures, however as the Debtors prove to refuse to cooperate with the Bank, Bank BNP thus has taken legal measures based on the Law of the Republic of Indonesia No. 4/1996 by Executing the Auction of the Collaterals handed over by the debtors to Bank BNP in the process of obtaining the loans.

Dampak terhadap Perusahaan

Atas timbulnya permasalahan hukum perdata dan pidana selama tahun laporan (baik yang masih proses hukum dan telah diputus oleh Pengadilan), pengaruhnya terhadap Perusahaan tidak signifikan karena telah dilakukan mitigasi, namun untuk satu perkara perdata yang beritanya telah dipublikasikan dalam beberapa media cetak maupun online, berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh karyawan Bank BNP terhadap dana deposan sebagaimana telah tercantum dalam laporan tahunan 2015, maka dapat kami sampaikan bahwa atas perkara perdata tersebut sampai saat ini masih menunggu putusan Kasasi (Mahkamah Agung) yang diajukan oleh nasabah deposan sehingga putusan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan terkait perkara pidananya juga masih dalam tahapan proses penyidikan di Kepolisian.

Impacts on the Company

All civil and criminal litigations being processed during the reporting year and filed through due legal process have no significant impact on the Company, as the Company has taken all necessary measures to mitigate them, except for one civil case for which information has been disclosed on various news media both print and online, in relation to the allegations of misuse of authority by an employee or employees of Bank BNP over a depositor's money as stated in the 2015 annual report, it can be reported that this civil case is still awaiting the cassation verdict from the Supreme Court from the appeal by the depositor, and thus the case does not yet have a legally binding verdict. Meanwhile, the criminal case related to it is currently being processed by the Police.

Dalam setiap penanganan kasus hukum baik perdata dan pidana yang melibatkan Bank BNP, seringkali dapat juga menimbulkan dampak finansial terhadap Bank BNP, namun bila melihat pada tahapan atau status penanganan atas perkara hukum yang masih dalam proses penanganan, maka secara material tidak menimbulkan kerugian yang signifikan dan tidak berpengaruh terhadap finansial Bank BNP.

In the handling of litigations both civil and criminal that involve Bank BNP, certain financial impacts may have to be borne by Bank BNP, however, due to the nature of the litigations and their status, and the legal proceedings that are still underway, there are no material or significant impact of these litigations on Bank BNP's financial condition.

Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Konsumen

Commitment to Consumer Protection

Sebagai wujud tanggung jawab dalam penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG") kepada Nasabah atau masyarakat yang menggunakan produk atau layanan Bank BNP ("Konsumen") dan agar sejalan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, maka Bank BNP telah menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Transparansi,
2. Perlakuan yang adil,
3. Keandalan,
4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
5. Penanganan Pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dalam rangka penerapan Perlindungan Konsumen, Bank BNP selalu menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur dan tidak menyesatkan yang telah tertuang dalam dokumen atau sarana lain dan disampaikan pada saat konsumen akan menggunakan produk atau layanan Bank BNP. Penyediaan dan/atau penyampaian informasi oleh Bank BNP ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Konsumen terhadap produk dan/atau layanan serta hak dan kewajiban Konsumen.

Setelah Nasabah/Konsumen menyetujui untuk menggunakan produk/layanan yang disediakan oleh Bank BNP, maka apabila dikemudian hari terjadi perubahan pada produk/layanan (baik mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan) dan sebelum diberlakukannya perubahan dimaksud, Bank BNP telah menginformasikannya kepada Nasabah/Konsumen melalui media sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Bank BNP juga memiliki tanggungjawab untuk memenuhi harapan nasabahnya, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan menindaklanjuti setiap Keluhan/Pengaduan yang disebabkan oleh ketidakpuasan Pengadu terhadap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank.

As a form of responsibility to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) to Customers and the public that utilize the products and services of Bank BNP (collectively referred to as the "consumers"), and to be aligned with the implementation of the provisions on Consumer Protection, as stipulated in the OJK Regulation No. 1/POJK.07/2013 on Consumer Protection in the Financial Services Sector, and OJK Circular No. 2/SEOJK.07/2014 on Financial Services Consumer Complaints Handling and Resolution, Bank BNP currently implements the following Consumer Protection principles:

1. Transparency,
2. Fair treatment,
3. Reliability,
4. Confidentiality and security of consumer data/ information,
5. Handling of complaints and resolution of consumer disputes in a simple, prompt and affordable manner.

In the implementation of Consumer Protection, Bank BNP always provides and/ or conveys information about the products and/or services in an accurate, truthful and not misleading manner, as described in the document or other means and delivered at a time before the consumers will use the products or services of Bank BNP. The provision and/or delivery of information by Bank BNP is expected to give understanding to the consumers regarding the products and/or services and the rights and obligations of the Customer.

After the Client/Customer agrees to use the products/ services provided by Bank BNP, should in the future there be a change in the product/service (either on the benefits, costs, risks, terms and conditions) and before the enactment of the change, Bank BNP has informed to Customer/ Consumer through media as well as the prevailing laws. Bank BNP also has a responsibility to meet the expectations of its customers, therefore it is necessary to take measures in anticipation to follow up on any complaint/grievance caused by the dissatisfaction of the Consumers related to the products or services provided by the Bank.

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank BNP telah memiliki Unit Kerja yang dibentuk secara khusus untuk menangani Pengaduan Nasabah yang berfungsi untuk menerima, menangani dan menyelesaikan Pengaduan secara baik serta tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan yang baik di setiap Kantor Bank BNP akan meningkatkan kepercayaan Nasabah (*confidence*), dan kepercayaan nasabah akan meningkatkan kesetiaan nasabah (*loyality*) dan kesetiaan Nasabah akan meningkatkan potensi pendapatan Bank (*profitability*). Unit Kerja Penanganan Pengaduan Nasabah (disebut juga "*Complaint Care Unit*") ini secara struktur organisasi berada di bawah *Corporate Service Division* dan *Corporate Legal Department*.

Referring to Bank Indonesia Regulation No. 10/10/PBI/2008 on Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 on the Settlement of Customer Complaints and Bank Indonesia Circular Letter No. 10/13/DPNP dated 6 March 2008 on Amendment to Bank Indonesia Circular Letter No. 7/24/DPNP dated 18 July 2005 on the Settlement of Customer Complaints, Bank BNP has a work unit formed specifically to deal with Customer Complaints, whose function is to receive, handle and resolve complaints properly and timely in accordance with applicable regulations. The proper Complaints Handling and Resolution any branch office of Bank BNP will increase customer confidence, and in turn customer confidence will increase customer loyalty, which in turn will improve the profitability potential of the Bank. The Work Unit for Handling Customer Complaints (called the "Complaint Care Unit") is the placed under the Corporate Services Division and the Corporate Legal Department.

Apabila Nasabah/Konsumen memiliki pertanyaan atau ketidakpuasan terkait produk dan/atau layanan Bank BNP, maka Bank BNP memiliki mekanisme Pengaduan Nasabah yang dapat disampaikan melalui Kantor Cabang terdekat, Website Bank BNP, Media sosial Bank BNP (*Facebook dan Twitter*), Kotak Saran yang tersedia di setiap Kantor Cabang, Email pengaduan.nasabah@bankbnp.com dan BNP Call.

Should the Customer/Consumer have any questions or dissatisfaction related products and/or services of Bank BNP, Bank BNP has a mechanism that allows the Customer Complaints to be submitted through the nearest branch office, the Website of Bank BNP, Bank BNP's social media accounts (Facebook and Twitter), Suggestion Box available in each branch office, email address of pengaduan.nasabah@bankbnp.com, and BNP Call.

Adapun mekanisme Pengaduan Nasabah sebagai tindak lanjut terhadap Pengaduan Nasabah ditentukan sebagai berikut:

1. Nasabah/Konsumen menyampaikan pengaduan melalui Kantor Cabang terdekat, Website Bank BNP, Media sosial Bank BNP (*Facebook dan Twitter*), Kotak Saran yang tersedia di setiap Kantor Cabang, Email pengaduan. nasabah@bankbnp.com dan BNP Call.

2. Nasabah datang ke Kantor Cabang kemudian mengisi Formulir Pengaduan untuk keluhan/pengaduan yang terkait dengan transaksi keuangan, layanan jasa, dan pengaduan lainnya.

The Customer Complaint mechanism as a follow-up to the Customer Complaint consists of the following steps:

1. The Customer/Consumer delivers the complaint through the nearest branch office, Website of Bank BNP, Bank BNP's social media accounts (Facebook and Twitter), Suggestion Box available in each branch office, the email address of pengaduan.nasabah@bankbnp.com, or BNP Call.
2. The Customer visits the branch office and fills out the Complaint Form for complaint related to financial transactions, services, and other issues.

3. Keluhan/Pengaduan yang tidak dapat ditangani langsung oleh Petugas Bank BNP/*Risk Taking Unit* wajib segera disampaikan dan dikonsultasikan kepada *Complaint Care Unit* melalui email pengaduan.nasabah@bankbnp.com.
4. Keluhan/pengaduan yang tidak dapat ditangani oleh Unit Kerja dan/atau Pejabat Bank BNP yang berwenang wajib segera disampaikan dan dikonsultasikan kepada Direksi Bank BNP.
5. Petugas Bank BNP/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan (*Complaint Care Unit*) harus segera menyampaikan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan kepada Nasabah/Konsumen secara tertulis.
6. Petugas Bank BNP wajib mencantumkan tanggal dan hasil penyelesaian penanganan keluhan/pengaduan di kolom penyelesaian pada Formulir Pengaduan.
7. Petugas Bank BNP/unit kerja yang terkait dengan keluhan/pengaduan Nasabah/Konsumen (*Complaint Care Unit*) wajib melakukan dokumentasi dan administrasi terhadap tanggal dan hasil penyelesaian keluhan/pengaduan pada Formulir Pengaduan.
8. Sesuai ketentuan yang mengatur mengenai waktu penanganan, maka keluhan/pengaduan yang diterima oleh Kantor Cabang Bank BNP harus dilakukan penyelesaian dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keluhan/pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Bank BNP dapat melakukan perpanjangan waktu sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dan mengenai hal ini Bank BNP akan memberitahukan kepada Nasabah/Konsumen.

3. Complaints that cannot be handled directly by Bank BNP Officer/Risk Taking Unit shall be immediately communicated and consulted with the Complaint Care Unit via the email address of pengaduan.nasabah@bankbnp.com.
4. Complaints that cannot be handled by the Work Unit and/or authorized officials of Bank BNP shall be immediately communicated and consulted with the Board of Directors of Bank BNP.
5. Bank BNP Officers/Unit related to complaint handling (Complaint Care Unit) must immediately submit the results of the settlement of grievances/complaints to the Customer, in writing.
6. Bank BNP Officer shall include the date and the complaint settlement results in the "completion" column in the Complaint Form.
7. The Complaint Care Unit shall carry out the documentation and administration of the dates and results of the completion of the complaint in the Complaint Form.
8. In accordance to the provisions governing the handling time, the grievance/complaints received by the Bank BNP branch office should be resolved within a period of 20 (twenty) working days from the receipt of the complaint. In special circumstances, Bank BNP can extend the settlement time by up to 20 (twenty) working days and regarding this extension Bank BNP has to notify the Customer/Consumer.

Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan Nasabah di Bank BNP, maka Nasabah/Konsumen dan Bank BNP dapat melakukan penyelesaian sengketa/Pengaduan Nasabah di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan saat ini Bank BNP sudah tercatat sebagai anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut.

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 on Alternative Institution for Dispute Resolution in the Financial Services Sector, and in the case where no agreement is reached in the process of settlement of Customer Complaint, the Customer/Consumer and Bank BNP can arbitrate the dispute outside of the court through the Indonesian Banking Alternative Institution for Dispute Resolution (LAPSPI), of which currently Bank BNP is registered as member.

Dalam hal pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank BNP melalui Unit Kerja Pengaduan Nasabah (*Complaint Care Unit*) telah melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah. Sedangkan mengenai kewajiban pelaporan tentang penanganan dan penyelesaian pengaduan yaitu kepada regulator:

In terms of monitoring the handling and settlement of Customer Complaints, Bank BNP through the Complaint Care Unit has conducted administration of documents related to the receipt, handling, and settlement of Customer Complaints. Meanwhile, the reporting obligations concerning the handling and settlement of complaints to regulators are as follows:

a. Bank Indonesia melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), yang meliputi laporan:
   1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
   2) Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen Terkait Penyetoran dan/atau Penarikan Uang.
b. Menyampaikan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen terkait Sistem Informasi Debitur (SID).
c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen (SI PEDULI).

Kewajiban pelaporan secara internal juga dilakukan kepada:
a. *Regulatory Compliance Department* melalui *system Aplikasi Monitoring* (AMOR).
b. *Operational Risk Management Departement* melalui sistem Aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB) yang terdiri dari:
   1) Frekuensi Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank.
   2) Frekuensi dan Materialitas Keluhan/Pengaduan Nasabah.

Adapun tingkat penyelesaian Pengaduan Nasabah selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. To Bank Indonesia through the Commercial Bank Head Office Report (LKPBU), which includes the statement of:
   1) Report of Customer Complaints Handling and Resolution.
   2) Report of Consumer Complaints Related to Deposits and/or Cash Withdrawals.
b. Delivering Report of Service and Consumer Complaints Settlement related to the Debtors Information System (SID).
c. Financial Services Authority (OJK) via the Consumer Protection and Reporting Information System (SI CARES).

Internal reporting obligation is also fulfilled by reporting to:
a. Regulatory Compliance Department through the Application Monitoring (AMOR) system.
b. Operational Risk Management Department via the Banking Soundness Level (TKB) system, consisting of:
   1) Frequency of Negative Coverage Materiality and Exposure of the Bank.
   2) Frequency and Materiality of Customer Complaints.

The Customer Complaint settlement rate for 2016 is as follows:

Triwulan Quarter **(2016)**	**Jumlah Pengaduan** Number of Complaints		**% Tingkat Penyelesaian** Completion Rate (%)
	Penerimaan Received	**Penyelesaian** Resolved	
TW 1	166	153	92,17%
TW 2	143	124	86,71%
TW 3	145	128	88,27%
TW 4	110	96	87,27%
Total	**564**	**501**	**88,83%**

Selama tahun 2016, total Pengaduan Nasabah sebanyak 673, dengan 109 pengaduan yang masuk berkenaan dengan kelalaian nasabah terkait sistem pembayaran. Sebanyak 105 pengaduan telah terselesaikan dan 4 pengaduan belum terselesaikan, sehingga tingkat penyelesaiannya 96,33%. Total pengaduan nasabah yang tidak disebabkan kelalaian nasabah adalah 564 pengaduan. Sampai akhir tahun 2016, Bank telah menyelesaikan 88,83% dari total pengaduan nasabah tersebut.

In 2016 there were 673 Customer Complaints filed to the Bank, with 109 of which were related to lapses on the part of the customers themselves regarding the payment system, from which 105 complaints have been resolved, 4 are in process, resulting in a complaint resolution rate of 96.33%. Meanwhile, total customer complaints not related to customers' lapses were 564 complaints. Up until the end of 2016, the Bank had resolved 88.83% of these cases.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Bank BNP berkomitmen untuk menjalankan perusahaan secara profesional dengan berdasarkan pada prinsip dan ketentuan-ketentuan pengelolaan perusahaan terbuka, memperhatikan batasan etika bisnis yang berlaku serta berdasarkan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan budaya dan sikap kerja perusahaan, serta melengkapi infrastruktur etika dan mendeteksi adanya pelanggaran kode etik/pedoman perilaku, dengan menerapkan suatu sarana untuk menyampaikan informasi/aspirasi maupun guna melaporkan perbuatan atau perilaku atau peristiwa pelanggaran, yaitu berupa BNP *Hotline* (*whistleblowing system*).

Bank BNP is committed to running its business in a professional manner based on the principles and provisions of the management of a public company, to attending to the limits of accepted business behaviors and based on the corporate behaviors in accordance with the culture and work ethic of the Company, as well as to enhancing the infrastructure of ethics and detect any violation of code of conduct, by applying a means to convey information/ aspirations as well as to report any misconduct or violation, namely in the form of BNP Hotline (whistleblowing system).

BNP *Hotline* merupakan sarana yang terkoordinasi dan terintegrasi dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penegakan dugaan pelanggaran yang disediakan oleh Manajemen Bank untuk menerima informasi tentang fakta atau adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun eksternal dan/atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh Karyawan dengan menggunakan sarana elektronik (telepon, pesan singkat (*short message sevice*), dan email), dimana tidak memungkinkan atau sulit bagi Karyawan untuk melaporkan melalui proses penyampaian informasi melalui jalur formal yang normal.

BNP Hotline is a means that is co-ordinated and integrated, from the receipt of the report to the follow-up enforcement of alleged violations, performed by the Bank's management to receive information about facts or indications of violations of the applicable regulations both internal and external and/ or aspiration to be conveyed by employees using electronic means (telephone, short message service, and email), which may be impossible or difficult for employees to convey through the normal process of delivery via formal channels.

Sarana BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) ini juga dilaksanakan sebagai wujud penerapan Pilar 2 (dua) tentang deteksi fraud pada ketentuan Strategi *Anti-Fraud* dan juga merupakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

BNP Hotline (whistleblowing system) is also implemented as a form of application of Pillar 2 (two) pof fraud detection as stated in the Anti-Fraud Strategy provisions, and also an application of Good Corporate Governance.

Peran serta Manajemen dan seluruh Karyawan dalam pemanfaatan Sarana BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penanganan terhadap kejadian pelanggaran dapat dilakukan dengan segera, efektif dan efisien. BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) harus dikelola dengan baik agar tujuan penyediaan sarana pelaporan pelanggaran tersebut dapat terwujud dan bermanfaat, yaitu untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja secara konsisten khususnya pelaksanaan Budaya Integritas;
2. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja;
3. Mencegah kemungkinan Karyawan memanfaatkan pihak luar/pihak ketiga untuk menyampaikan informasi/ aspirasi termasuk pengaduan Karyawan;

The role and participation of the management and all employees in the use of BNP Hotline (whistleblowing system) is important to prevent violations and handling of the incidence of violations in a prompt, effective, and efficient manner. The BNP Hotline (whistleblowing system) must be managed properly so that the purpose of the provision of reporting the violation can be realized and become beneficial, i.e. to:

1. Implement the Work Culture consistently in particular the implementation of Integrity Culture;
2. Create a working environment that is comfortable and conducive, so as to increase productivity;
3. Prevent the possibility of employees utilizing external/ third parties to submit information/aspiration including employee grievances;

4. Meminimalkan risiko kerugian keuangan, operasional, reputasi dan hukum yang mungkin dihadapi Bank akibat pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank;
5. Meningkatkan dan menjaga reputasi Bank di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum;
6. Memberikan masukan kepada Bank untuk mengkaji kelemahan pengendalian internal, serta merancang tindakan perbaikan (*improvement*) yang diperlukan;
7. Menciptakan sistem saling mengawasi terhadap kesesuaian perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Insan Bank untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, termasuk akuntabilitas dalam penegakan dugaan ataupun indikasi pelanggaran.

Dalam penerapan BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) memiliki azas-azas sebagai berikut:

1. Azas Kerahasiaan
   a. Informasi yang diterima dijamin kerahasiaannya untuk membangun kepercayaan dan independensi BNP *Hotline* (*whistleblowing system*),
   b. Kerahasiaan yang dimaksud mencakup kerahasiaan terhadap:
      1) Identitas Karyawan/Pelapor
      2) Hal-hal atau materi informasi yang disampaikan
      3) Seluruh data pendukung yang terkait dengan informasi
2. Azas Keadilan atau Tidak Diskriminatif
   Setiap Karyawan baik Karyawan Tetap, Karyawan *Outsourcing*, dan/atau Karyawan Kontrak di Bank BNP berhak untuk menyampaikan informasi/aspirasi kepada BNP *Hotline* (*whistleblowing system*).
3. Azas Perlindungan Pelapor
   a. Karyawan yang menyampaikan informasi melalui BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) tidak akan dikenakan sanksi apapun.
   b. Perlindungan Pelapor hanya diberikan kepada Karyawan yang menyampaikan informasi dengan kategori *full disclosure*.
   c. Perlindungan Pelapor tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Karyawan dari ancaman/tindakan akibat penyampaian informasi/aspirasi yang dilakukan.
   d. Dalam kondisi tertentu Karyawan sebagai Pelapor dapat diberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Hukum yang berlaku.

4. Minimize the risk of financial loss, or operational, reputation and legal risks that might be encountered by the Bank due to violations occurred within the Bank;
5. Improve and maintain the Bank's reputation in the view of stakeholders, regulators and the general public;
6. Provide feedback to the Bank to assess the internal control weaknesses, as well as designing the corrective action (improvement) as required;
7. Create a system of mutual monitoring of the alignment of behaviors and adherence to work procedures implemented by the Bank's personnel to always maintain integrity and professionalism, including accountability in the enforcement of the alleged violation or indication of violation.

In the application of BNP Hotline (whistleblowing system), the following principles are upheld:

1. Principle of Confidentiality
   a. Information received is guaranteed to be confidential, to build confidence and independence of BNP Hotline (whistleblowing system),
   b. Confidentiality encompasses confidentiality as regards:
      1) Identity of the Employee/Reporting Party
      2) Matter or information submitted
      3) Supporting data relating to information submitted
2. Principles of Fairness or Non-Discrimination
   Every employee, be they permanent employee, outsourced employee, and/or contract employee of Bank BNP, is entitled to submit information/aspiration to the BNP Hotline (whistleblowing system).
3. Principle of Protection of the Reporting Party
   a. Employees who submit information via BNP Hotline (whistleblowing system) will not be subject to any sanctions.
   b. The reporter's protection is given only to employees who conveyed the information that can be categorized as full disclosure.
   c. The Reporting Party protection aims to provide a sense of security to the employees of threats/reprisals due to the submission of information/aspiration.
   d. Under certain conditions, the Reporting Party can be given protection under the prevailing provisions or laws concering Legal Protection.

Penanggung jawab dalam pengelolaan sarana BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Komisaris Independen. Tim pengelola BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait seperti *Internal Audit Division* (SKAI), *Compliance Division, Risk Management Division, Human Capital Division,* dan lainnya, untuk melakukan proses investigasi dengan proses tindak lanjut dengan SLA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan informasi/aspirasi; dan apabila informasi atau laporan yang disampaikan berindikasi tindakan fraud maka pengelola BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) akan berkoordinasi dengan Komite Strategi Anti-Fraud untuk dilakukan tindak lanjut/penelusuran lebih lanjut dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Karyawan yang melaporkannya.

The party responsible for managing the BNP Hotline (whistleblowing system) is a team chaired by the Independent Commissioner. The BNP Hotline (whistleblowing system) team may coordinat with the relevant Work Units, such as the Internal Audit Division (SKAI), Compliance Division, Risk Management Division, Human Capital Division, and others, to proceed with the investigation with the follow up whose SLA covers at the latest 5 (five) working days since the date of receipt of the information/aspiration; and should the information or the report has an indication of fraud, the BNP Hotline (whistleblowing system) management team will be coordinating with the Anti-Fraud Strategy Committee to perform further investigation, by upholding the confidentiality of the Reporting Party's identity.

Pengelola BNP *Hotline* (*whistleblowing system*) wajib mendokumentasikan seluruh laporan informasi/aspirasi yang diterima dan menyusun laporan secara bulanan untuk disampaikan kepada Direktur Utama dan *Compliance and Risk Management Directorate* yang mencakup tentang:

1. Informasi/ aspirasi yang diterima;
2. Tindak lanjut penyelesaian informasi/ aspirasi Karyawan, termasuk keputusan yang diambil.

The BNP Hotline (whistleblowing system) management team must document all reports of information/ aspiration received, and prepare a monthly report to be submitted to the President Driector and the Compliance and Risk Management Directorate. The report should cover:

1. The information/ aspiration received;
2. Follow up on the resolution of information/ aspiration of the Employees, including decisions taken.

Akses Informasi & Data Perusahaan

Access to Company Information & Data

Informasi dan data mengenai Bank BNP dapat dilihat oleh publik melalui laman www.bankbnp.com maupun melalui nomor telepon (+62 22) 82560163-164 (*hunting*) dan faksimili (+62 22) 2514580 87831900, serta email corp_communication@bankbnp.com, corp_secretary@bankbnp.com.

Information and data concerning Bank BNP is made available to the public through www.bankbnp.com and may be obtained through telephone (+6222) 82560163-164 (hunting) and facsimile (+6222) 2514580 87831900, and email: corp_commmunication@bankbnp.com, corp_secretary@bankbnp.com.

Kepatuhan Perpajakan

Tax Compliance

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam sisi kewajiban pembayaran Pajak, senantiasa dipatuhi Bank BNP dalam setiap aktivitas bisnisnya. Ini merupakan wujud konsistensi komitmen Bank dalam turut serta membangun Negara melalui penerimaan Pajak oleh Negara.

Sistem Perpajakan di Indonesia masih menerapkan sistem penilaian mandiri (*self assessment*) yang menyerahkan kepercayaan kepada wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya, diawali dengan mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak, menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutangnya. Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selama tahun buku 2016, beberapa kebijakan perpajakan yang baru/perubahan telah diterbitkan antara lain:

1. *Tax Amnesty*
   Tax Amnesty dibagi dalam 3 tahapan pembayaran yaitu:

   a. 1 Juli 2016 s/d 30 September 2016;
   b. 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016;
   c. 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
   Besarnya penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak ini adalah:
   - PTKP untuk wajib Pajak: 54.000.000
   - PTKP untuk tambahan wajib Pajak kawin: 4.500.000
   - PTKP untuk tambahan tanggungan maksimal 3 orang: 4.500.000

3. Dokumen *Transfer Pricing*.
   Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tatacara pengelolaannya.

Sekarang ini Pemeriksaan oleh Kantor Pajak kepada Bank BNP sedang berlangsung untuk tahun buku 2015.

Bank BNP always complies with all the taxation regulations and Government Regulations of the Republic of Indonesia, including the regulations concerning the obligation to pay taxes. This shows the consistency of the Bank's commitment to participating in the building of the nation via state revenue from tax proceeds.

The Indonesian taxation system applies the self assessment method, giving the opportunity to taxpayers to self-assess their tax obligations, starting from registering themselves as taxpayers, calculating, paying, and reporting their taxes. The taxpayers must comprehend the general provisions on taxation as stipulated in the Law No. 28/2007 on the General Provisions and Procedures for Taxation, and Law No. 36/2008 on Income Tax.

Throughout 2016, various new tax policies or amendments to the existing tax policies were issued, among others:

1. Tax Amnesty
   Tax Amnesty is divided into three phases of payment, namely:
   a. 1 July 2016 – 30 September 2016;
   b. 1 October 2016 – 31 December 2016;
   c. 1 January 2017 – 31 March 2017;

2. Non-Taxable Income (PTKP)
   The amount of Non-Taxable Income is:

   - For taxpayers: 54,000,000
   - Additional for taxpayers that are married: 4,500,000
   - Additional for taxpayers with dependents of maximum 3 persons: 4,500,000

3. Transfer Pricing Document
   The Finance Minister Regulation regulates the types of documents and/or additional information that must be kept by the taxpayers that perform transactions with parties with special relationships and the procedures for managing these transactions.

Currently Bank BNP is being audited by the Tax Office for FY 2015.

Kebijakan Strategi Anti-*Fraud*

Policy on Anti-Fraud Strategy

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Perihal Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Bank Umum, maka dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut dan dalam rangka mendukung dan untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi Anti-*Fraud* serta upaya pencegahan tindakan penyimpangan dalam aktivitas operasional perbankan yang dilakukan baik oleh pihak internal bank (*internal fraud*), atau oleh pihak eksternal bank, ataupun dilakukan secara bersama-sama oleh pihak internal dengan eksternal bank, Bank BNP telah menindaklanjuti dengan membentuk satu fungsi atau unit pengelola yang bertugas menangani penerapan strategi Anti-*Fraud* ke dalam satu komite yang dibentuk oleh Menejemen Bank BNP yaitu Komite Strategi Anti-*Fraud* (selanjutnya disingkat KSAF) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP: 056-DIR/COMP/06/2015 Tentang Komite Strategi Anti-Fraud guna melengkapi dan menggantikan Surat Keputusan sebelumnya yaitu NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012 tentang Komite Strategi Anti-*Fraud*. Adapun struktur keanggotaan dari KSAF diketuai oleh *Corporate Service Deputy Director* dengan anggota tetap terdiri dari beberapa Kepala Divisi terkait, dan anggota tidak tetap adalah Kepala Divisi/Kepala Departemen/Manager dari Unit Kerja terkait.

Referring to the provisions of Bank Indonesia as stipulated in Bank Indonesia Circular No. 13/28/DPNP on Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks, to fulfill these provisions and in order to support and improve the efficacy of the Anti-Fraud strategy implementation and to prevent any misconduct or violation in the operational activities in banking conducted both by the internal parties of the bank (internal fraud) or by external parties, or jointly performed by both the internal and external parties, Bank BNP has established a specific function to manage the implementation of the Anti-Fraud strategy, as a committee formed by Bank BNP's Management. The committee, called the Anti-Fraud Strategy Committee (KSAF) was established based on the Decree of the Board of Directors NOKEP 056-DIR/COMP/06/2015 on Anti-Fraud Strategy Committee, to improve and replace the previous Decree NOKEP: 015-DIR/COMP/1/2012 on Anti-Fraud Strategy Committee. The KSAF is chaired by Corporate Service Deputy Director, with the permanent members being the relevant Division Heads and the non-permanent members being the Division/Department Heads or Managers from related Work Units.

Sebagai wujud komitmen Manajemen Bank BNP untuk mendukung efektivitas pelaksanaan strategi Anti-*Fraud,* maka dalam penerapannya selain menerapkan manajemen risiko juga diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud* (*fraud control system*) yang mengacu kepada 4 (empat) pilar yaitu (1) pencegahan, (2) deteksi, (3) investigasi, pelaporan, dan sanksi, (4) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut; serta dilakukannya upaya peningkatan agar pencegahan fraud tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Bank BNP pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Manajemen maupun Karyawan.

The manifestation of Bank BNP's management's commitment to supporting the efficacy of Anti-Fraud strategy implementation, aside from implementing risk management, anti-fraud strategy also takes into account the fraud control system that refers to the four pillars of (1) prevention, (2) detection, (3) investigation, reporting, and sanctioning, (4) monitoring, evaluation, and follow up; and these measures are constantly improved so that fraud prevention becomes truly the focus of Bank BNP in its culture across the entire organization, from the Management to all the employees.

Dalam pelaksanaan fungsinya, KSAF menangani implementasi strategi Anti-*Fraud* dengan melakukan pengendalian dan pemantauan senantiasa berkoordinasi dengan fungsi-fungsi kontrol/unit-unit kerja kontrol seperti Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Risk Management*, *Compliance*, dan dari *First Line Defense* (Unit Kerja Operasional & Bisnis Bank) dalam rangka perumusan dan pelaksanaan strategi pencegahan, deteksi awal, merekomendasikan perbaikan, dan memantau tindaklanjut perbaikan.

In performing its functions, the KSAF handles the implementation of the Anti-Fraud strategy by continuously controlling and monitoring and coordinating with control functions/work units, such as the Internal Audit Unit, Risk Management, Compliance, and units along the First Line of Defense (Operations and Busines Units of the Bank) in order to formulate and implement the strategy for prevention, early detection, recommendation of improvements, and monitoring of recommendation follow ups.

Untuk mendukung pelaksanaan penerapan strategi *Anti-Fraud*, telah dilengkapi juga dengan satu pedoman kebijakan strategi *Anti-Fraud* dengan ruang lingkup meliputi seluruh aspek aktivitas operasional perbankan baik bisnis maupun fungsional dalam lingkungan Bank maupun sarana Bank yang diterapkan pada seluruh jenjang organisasi Bank BNP dan mengikat bagi:

1. Segenap Pegawai dan Manajemen Bank,
2. Hubungan antara sesama Insan Bank,
3. Hubungan antara Insan Bank dengan pihak ketiga antara lain nasabah, debitur, vendor, rekanan jasa profesi, dan pihak ketiga lainnya.

Upaya-upaya penguatan dan peningkatan kepedulian *Anti-Fraud* (*Anti-Fraud awareness*) adalah dengan mengintensifkan fungsi pengendalian dan pemantauan termasuk penerapan *four eyes principle*, identifikasi kerawanan, peningkatan kesadaran risiko fraud pada setiap aktivitas Bank, kepedulian terhadap lingkungan kerja, dan *know your employee* (KYE) dengan memanfaatkan sarana/media pengelolaan *whistleblowing* yang lebih komprehensif, melakukan *surprise audit* sebagai deteksi awal meminimalkan kejadian *fraud*, serta penegakan Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*). Keseluruhan ini sejalan dengan kampanye (*campaign*) "Anti-*Fraud*" and "Say No To *Fraud*".

To support the Anti-Fraud strategy implementation, the Anti-Fraud strategy policy has been established, whose scope covers all the Bank's operational activities in Banking, both business and functional, within the Bank's environment as well as the Bank's means implemented across all of the organization of Bank BNP. The policy is binding to:

1. All employees and management of the Bank;
2. The relationships between the employees of the Bank;
3. The relationships between the employees of the Bank with third parties, such as customers, debtors, vendors, business partners, and other third parties.

Efforts to strengthen and improve Anti-Fraud awareness include increasing the intensity of control and monitoring function, including the implementation of the four eyes principle, indentification of vulnerabilities, improvement of fraud risk awareness across all activities of the Bank, concern regarding working environment, and know your employee (KYE) by making use of the whistleblowing system management media in a more comprehensive manner, conducting surprise audit early detection method to minimize fraud occurences, and enforcement of the Code of Conduct. These activities are in line with the "Anti Fraud" Campaign and the "Say No To Fraud" Campaign.

Pakta Integritas

Integrity Pact

Untuk menilai integritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, setiap satu tahun sekali dibuatkan surat pernyataan (pakta) yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pakta Integritas dilakukan sebagai acuan terhadap penilaian integritas masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dengan komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, kewenangan dan peran sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan melalui beberapa tindakan, antara lain:

1. Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan tingkat kompetensi SDM yang dikerahkan dalam rangka membangun keberhasilan Bank;

2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir;
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;

4. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, atau Direksi;
5. Baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
6. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
7. Menjalankan dengan baik Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan *Code of Conduct* agar tercapai Tata Kelola Perusahaan yang baik.

To evaluate the integrity of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, every year an integrity pact has to be signed by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Integrity Pact is adhered to as a reference to the integrity assessment of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, given the commitment to execute all the duties, functions and responsibilities, authority and roles in accordance with the GCG principles and the prevailing regulations. This is conducted through several actions, as follows:

1. Perform the duties and responsibilities in a professional manner in accordance with the principles of good corporate governance and the level of competence of Human resources employed in order to bring the Bank to success;
2. Never have been convicted and found guilty of committing Certain Criminal Acts that have been decided by court with a legal force (inkracht van gewisjde) within the past 20 (twenty) years;
3. Not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officer in any banking institutions, companies or other institutions;
4. Not have a family relationship to the second degree, including in-laws with fellow members of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
5. Whether alone or together, not have more than 25% of the paid-up capital of any other companies;

6. Have the commitment to a healthy development of the Bank's operations.
7. Implement the Good Corporate Governance Guidelines and Code of Conduct to achieve good corporate governance.

Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank

Disclosure of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions

Bank BNP telah mengungkapkan seluruh Laporan Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, tidak ada laporan yang belum diungkapkan di dalam laporan lainnya.

Bank BNP mengungkapkan Laporan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala baik bulanan, triwulanan maupun tahunan, seperti yang diungkap sebagai berikut:

a. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan mengacu kepada POJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SE OJK No. 30/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta POJK No. 32/POJK.03/2016 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dengan cakupan:

a) Informasi umum: yang meliputi antara lain kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha Bank dan Kelompok usaha Bank BNP, strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha Bank, laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank oleh Pengurus dalam rangka *good corporate governance* dengan menginformasikan beberapa cakupan yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut;

b) Laporan Keuangan Tahunan: yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) *member of BKR International* yang menyajikan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan termasuk informasi mengenai komitmen dan kontijensi dan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku yang disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya;

c) Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Bank BNP has disclosed the entire Report on the Bank's Financial and Non-Financial Conditions. There were no reports that have not been disclosed in other reports.

Bank BNP discloses its financial and non-financial conditions transparency report on a regular basis, i.e. monthly, quarterly, and annually, as detailed below:

a. Annual Report

The Annual Report refers to the POJK No. 29/POJK.04.2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies, and SEOJK No. 30/POJK.04/2016 on the Annual Report of Issuers or Public Companies, and POJK No. 32/POJK.03/2016 on the Transparency and Publication of Bank Reports, with the following scope:

a) General information: covering, among others, the management, share ownership details, business growth and business group of the Bank, management strategy and policies in developing the Bank's business, management report containing information on the running of the Bank by the Management in order to implement good corporate governance, by informing the various scopes determined in the regulations;

b) Annual financial statements: audited by a Public Accounting Firm that is registered in Bank Indonesia or the Financial Services Authority (OJK), i.e. KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (dbsd&a) member of BKR International, which provides the Statements of Financial Positions, Statements of Comprehensive Income, Statements of Changes in Equity, Statements of Cash Flows, and Notes to the Financial Sttements, including information on the commitments and contingencies, prepared to cover a period of 1 (one) fiscal year and presented with comparisons to the previous 1 (one) fiscal year;

c) The Public Accounting Firm's Opinion on the Financial Statements, i.e. that the Financial Statements have presented, in all material aspects, the financial position of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as at 31 December 2016, and the financial performance and cash flows for the year ended on said date, in line with the Financial Accounting Standards prevailing in Indonesia.

d) Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi Bank BNP serta praktik manajemen risiko yang diterapkan dalam permodalan Bank;
e) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
f) Aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha;
g) Aspek pengungkapan sesuai Standar Akuntansi Keuangan;
h) Informasi lainnya.
Laporan Tahunan Bank BNP dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dipublikasikan dalam website Bank BNP (www.bankbnp.com), dan disampaikan kepada pemegang saham, Bank Indonesia, lembaga lain yang berkepentingan terhadap usaha Bank BNP, serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
Laporan Publikasi Triwulanan telah disesuaikan cakupannya dengan mengacu pada PBI No. 14/14/PBI/2012 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, yang memuat: Laporan Keuangan, Komitmen dan Kontijensi, Transaksi *Spot*, jumlah dan kualitas aset produktif, perhitungan KPMM, rasio kepatuhan Bank terhadap pengelolaan BMPK, rasio GWM, dan rasio PDN, serta informasi lain. Laporan ini disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya, ditanda tangani oleh 2 (dua) orang Anggota Direksi yang pengumumannya dilakukan dalam Surat Kabar Media Indonesia dan Bisnis Indonesia, dipublikasikan dalam *website* Bank BNP (www.bankbnp.com) serta telah mengirimkan *softcopy* laporan tersebut kepada Bank Indonesia.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
Laporan keuangan publikasi bulanan Bank BNP dilakukan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, memuat: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Komitmen dan kontijensi, perhitungan KPMM, kualitas aset produktif dan informasi lain berupa jumlah penyediaan dana, kredit kepada debitur UMKM, kredit yang memerlukan perhatian khusus dan informasi cadangan penyisihan kerugian. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan

d) Types of risk and risk exposure of Bank BNP as well as the risk management practices implemented in relation to the Bank's capital structure;
e) All aspects of transparency and information required to be reported in the Quarterly Financial Statements;
f) Disclosure of aspects reltaed to the business group;
g) Disclosure of aspects related to the Financial Accounting Standards;
h) Other information.
The Annual Report of Bank BNP is published in Indonesian and English, and is available on the Bank BNP website (www.bankbnp.com), and is presented to the shareholders, Bank Indonesia, and other institutions that have interest in the business of Bank BNP, as well as other parties as per the prevailing regulations.

b. Quarterly Financial Statements
The Quarterly Financial Statements have had their scope conformed with the PBI No. 14/14/PBI/2012 on the Transparency and Publication of Bank Reports, to include: Financial Statements, Commitments and Contingencies, Spot Transactions, Amount and Quality of Productive Assets, CAR Calculation, ratio of the Bank's compliance with the CAR management, MRR ratio, and PDN ratio, along with other relevant information. This report is presented in comparison with the Quarterly Financial Statements from the previous year, and is signed by 2 (two) members of the Board of Directors, and announced in Media Indonesia and Bisnis Indonesia newspaper, published on Bank BNP's website (www.bankbnp.com) and submitted in electronic format to Bank Indonesia.

c. Monthly Financial Statements
The Monthly Financial Statements of Bank BNP are reported at the latest on the fifth of the following month, and include: Statements of Financial Positions, Commitments and Contingencies, CAR Calculation, Quality of Productive Assets, and other information such as provision of funds, loans to MSME debtors, loans requiring specific attention, and information on provision for impairment. The preparation and submission of the monthly financial statements are in line with the format of the Commercial Banks' Monthly

peraturan dari Bank Indonesia dan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Bank Indonesia.

d. Laporan Non Keuangan Bank

Selain Laporan Transaksi Keuangan, Laporan Transaksi Non-Keuangan yang terjadi di Bank BNP telah disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni pada media keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia dan melalui media informasi publik lainnya, seperti situs web Bank.

Selama tahun 2016, tidak terdapat informasi non-keuangan yang signifikan. Seluruh informasinya telah diakomodasi dalam Laporan Tahunan Bank BNP tahun 2016. Sedangkan untuk informasi Non-Keuangan secara periodik dilaporkan oleh Bank secara transparan pada setiap pelaksanaan Paparan Publik atas Kinerja Keuangan maupun Non-Keuangan, termasuk penyampaian informasi produk dan jasa, penerapan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, serta pemeliharaan data dan informasi pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

Report (LBU) in accordance with the regulations of Bank Indonesia and based on the Financial Accounting Standards. Subsequently, the report is used as a basis for Bank Indonesia to publish monthly financial statements on Bank Indonesia's website.

d. Non-Financial Reports

In addition to Financial Transactions Report, the Non-Financial Transactions taking place in Bank BNP have been reported in accordance with the prevailing regulations on the Indonesia Stock Exchange's information disclosure platform as well as in other media accessible by the public, such as the Bank's website.

In 2016 there were no non-financial information of significance. All relevant information has been adequately accommodated in the 2016 Annual Report of Bank BNP. Non-financial information is periodically reported transparently by the Bank at the Public Expose on Financial and Non-Financial Performance, including the delivery of information regarding products and services, effective implementation of customer complaints management, and maintenance of customers' personal data and information in accordance with the prevailing regulations.

Pernyataan Kesesuaian Penerapan GCG Bank dengan *Roadmap* GCG OJK

Statement of Conformity of the Bank's GCG Implementation with OJK GCG Roadmap

Dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai GCG serta yang dituangkan dalam bentuk *Roadmap* GCG, Bank BNP senantiasa menyesuaikan dan patuh dalam penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi atas pelaksanaan prinsip-prinsip dari GCG dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

In implementing the provisions and regulations regarding GCG as well as the stipulations of the GCG Roadmap, Bank BNP continues to adapt and comply with the formulation, implementation, assessment and evaluation of the implementation of GCG principles in its daily operations.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

252 Filosofi dan Dasar Kebijakan CSR
CSR Philosophy and Policy

253 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan
Corporate Social Responsibility towards Environmental Conservation

254 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility towards Social & Community Empowerment

255 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility towards Labor Practices and Occupational Health and Safety

256 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Nasabah
Our Responsibility towards Customers

257 Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan
Banking Education for the Public

Filosofi & Dasar Kebijakan CSR

Bank BNP bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas dan tatanan masyarakat di sekitar lokasi operasinya sebagai bagian dari misinya menjalankan bisnis sebagai institusi keuangan yang berkepentingan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya sepanjang waktu. Kualitas hidup masyarakat sekitar yang lebih baik berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis Bank, karena semakin maju suatu masyarakat, semakin tinggi kebutuhan mereka akan layanan perbankan.

Bank BNP dengan demikian secara berkesinambungan merumuskan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Operasi Bank BNP bergantung pada ketersediaan sumber-sumber daya alam, antara lain kertas, air, dan energi. Oleh karena itu, Bank BNP memiliki kepedulian tinggi terhadap upaya pelestarian sumber-sumber daya alam ini dan terus mengupayakan cara-cara untuk menjalankan operasi yang lebih efisien dalam penggunaan sumber dayanya.

Selanjutnya, bisnis Bank BNP sangat bergantung pada profesionalisme dan kinerja seluruh karyawannya. Sebagai aset terpenting, karyawan Bank BNP perlu dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya, termasuk untuk mendapatkan penghidupan yang layak, kesempatan untuk berkembang, dan untuk bekerja dengan perasaan aman dan sehat. Karena itulah Bank BNP memastikan setiap karyawannya bekerja di lingkungan kerja yang aman, dan mendorong karyawan untuk menerapkan pola hidup sehat.

CSR Philosophy & Policy

Bank BNP has a responsibility to improve the quality and state of the society amongst which it operates. This is part of its vision to conduct its business as a financial institution that has an interest in maintaining its business continuity over time. Better quality of life of the surrounding community has a direct positive impact on the growth potential of the Bank, for the more developed a society, the greater the needs for banking services.

Bank BNP thus has formulated and executed a range of community empowerment programs, all designed to improve the quality of life of the society in a sustainable manner.

Bank BNP's operations are dependent on the availability of certain natural resources, among others paper, water, and energy. Owing to that, Bank BNP has a great concern to preserve these natural resources, and is striving to find means to conduct a more efficient operation in terms of the use of these natural resources.

Bank BNP's business is closely linked to the professionalism and performance of all its employees. As the Bank's most important asset, employees of Bank BNP must have their basic rights and needs fulfilled, including their rights to decent life, opportunity for development, and health and safety at the workplace. To this end, Bank BNP ensures that all its employees work in locations that are safe for their work, and encourages its employees to practice a healthy lifestyle.

Di penghujung mata rantai bisnis Bank BNP adalah para nasabah yang menggunakan jasa Bank untuk berbagai kebutuhan keuangan. Bank BNP selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah, dan terus berupaya untuk melindungi tak hanya aset keuangan milik nasabah, tetapi juga kerahasiaan data pribadi mereka. Dengan demikian, Bank BNP membina dan mempertahankan loyalitas mereka sebagai nasabah Bank, agar dapat terus menyumbangkan nilai nyata bagi pertumbuhan Bank, seiring bisnis mereka sendiri bertumbuh.

Bagian-bagian berikut menyoroti kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan Bank di tahun 2016.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pelestarian Lingkungan

Kelestarian lingkungan merupakan hal utama dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Lingkungan yang baik akan mempengaruhi secara positif segala aktivitas keseharian masyarakat. Bank BNP menyoroti hal ini dalam memperhatikan kualitas hidup masyarakat. Dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan, Bank BNP secara konsisten melakukan kegiatan untuk menunjang terwujudnya lingkungan yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang dijelaskan berikut.

Bank BNP menggunakan lampu hemat energi di kantor bank, baik kantor pusat, cabang, kantor cabang pembantu, kas, kantor fungsional operasional dan non-operasional.

Bank BNP telah menerapkan sistem *paperless* dalam beberapa proses di Bank, menggunakan kertas bekas untuk pembuatan *draft* dan konsep, dan menghemat penggunaan kertas melalui pemberian informasi ke seluruh jaringan kantor melalui *intranet*.

Bank BNP menerapkan sistem *car pooling* untuk memenuhi permintaan kendaraan operasional, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi atau asap yang dihasilkan dari penggunaan kendaraan. Bank BNP juga melakukan penggantian kendaraan operasional dengan kapasitas mesin (cc) lebih kecil, serta melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala, dengan salah satu keuntungannya adalah menurunkan emisi kendaraan.

At the end of Bank BNP's business chain are the customers that benefit from the services offered by the Bank to fulfill their various financial needs. Bank BNP upholds the trust given by the customers at all times, and strives to protect not only their financial assets but also the confidentiality of their personal data. This will help Bank BNP cultivate and maintain their loyalty as the Bank's customers, so that they may continue to yield real value to bolster the Bank's growth as their own businesses grow.

The following sections highlight the Bank's corporate social responsibility activities conducted throughout 2016.

Corporate Social Responsibility towards Environmental Conservation

Environmental conservation is crucial to the continuity of life of mankind. A desirable state of the environment will positively affect all activities of the population in their daily life. Bank BNP addresses this issue by paying attention to the people's quality of life. With a high regard on environmental conservation, Bank BNP consistently conducts various activities to ensure the creation of a desirable environment. The activities are described below.

Bank BNP uses low-energy lightbulbs in all of its offices, be it the head office, branch offices, sub-branch offices, as well as operational and non-operational functional offices.

Bank BNP has implemented a paperless system for several of its processes, utilized used paper for drafting and concepting purposes, and reduced the use of paper by circulating information across the entire office network using the intranet.

Bank BNP also implements the car pooling system for meeting the need for operational transport vehicles, with the aim of reducing the use of fuel and at the same time helping to reduce traffic jams and emissions resulting from the use of said vehicles. Bank BNP has also replaced its operational vehicles with those having lower engine capacity (cc's), and conducts regular checks and servicing of its operational vehicles, a benefit of which being lower emissions from these vehicles.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial & Kemasyarakatan

Bank BNP menyadari bahwa Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, dan dengan demikian memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar, termasuk instansi dan organisasi.

Bank BNP berpartisipasi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat melalui program pemberdayaan sosial kemasyarakatan yang meliputi program-program yang dijelaskan berikut.

Bank BNP menyelenggarakan Pasar Murah Ramadhan, bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung pada 27–29 Juni 2016 di Halaman Stasiun Kiaracondong, Bandung. Pasar ini bersifat terbuka bagi semua, tidak menyasar pada golongan masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu, namun terbuka untuk masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan. Program ini bertujuan membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, permasalahan yang selalu berulang setiap tahun. Biaya untuk kegiatan ini adalah Rp5.000.000.

Corporate Social Responsibility towards Social & Community Empowerment

Bank BNP realizes that the Company is part of the people and thus bears a social responsibility for helping the surrounding communities, inclusing institutions and organizations.

Bank BNP participates in the improvement of livelihoods by social empowerment programs that include the ones described below.

Bank BNP organized the Ramadan Low-Cost Market, in collaboration with Bank Indonesia's Representative Office for West Java, on 27–29 June 2016 at the Kiaracondong Train Station Courtyard in Bandung. This low-cost market was open for all, i.e. not targeted on any particular group of the society with certain economic level, but is open fo the surrounding communities. This program was aimed at helping the communities address the issue of rising prices of basic goods during the month of Ramadan and in anticipation of the Eid Mubarak, an issue that always arises year after year. The total funding to support this activity was Rp5,000,000.

Bekerja sama dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bandung, Bank BNP menyelenggarakan kegiatan Donor Darah pada tanggal 22 September 2016 bertempat di Kantor Pusat Bank BNP Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh 78 orang karyawan yang memenuhi syarat sebagai pendonor. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp1.967.270.

In collaboration with the Blood Drive Unit of the Indonesian Red Cross – Bandung Regency Chapter, Bank BNP conducted a Blood Drive on 22 September 2016 at its headquarters in Bandung. A total of 78 employees that were qualified to donate their blood participated in the event. The total cost of the activity was Rp1,967,270.

Bank BNP memberikan bantuan untuk warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menjadi korban banjir bandang. Bantuan ini diberikan melalui Perbanas pada September 2016. Kegiatan ini merupakan wujud empati Perusahaan terhadap korban bencana. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp10.000.000.

Selanjutnya, sebagai bentuk pengabdian Bank BNP terhadap masyarakat dan konsistensi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, pada hari Minggu 27 November 2016 Bank BNP bekerjasama dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) secara resmi memberikan bantuan berupa renovasi bangunan sekolah di PKBM Al-Falah Sumur Batu, Bantar Gebang Bekasi .

PKBM Al-Falah adalah merupakan sebuah sekolah kesetaraan yang didirikan pada tahun 2007 dan diperuntukan bagi anak-anak pemulung, sekolah yang bersebelahan dengan TPA Bantar Gebang ini memiliki beberapa program pendidikan, diantaranya pendidikan anak usia dini (Paud), Paket A (Setara SD), Paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA). Dukungan dan kontribusi yang diberikan adalah dengan merenovasi setiap kelas yang ada di sekolah tersebut agar para siswa dan siswi bisa merasa nyaman untuk belajar. Selain memberikan bantuan tersebut, pada kesempatan yang sama Bank BNP melakukan kegiatan edukasi tentang manfaat menabung kepada siswa-siswi yang hadir. Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp. 20.000.000,-.

Bank BNP provided assistance to the residents of Garut Regency in West Java that were suffering from flooding. The assistance was extended to the beneficiaries via Perbanas in September 2016. This activity demonstrated the Company's concern for victims of natural disasters. The total cost of the activity was Rp10,000,000.

Furthermore, as a form of social service and consistency in implementing corporate social responsibility, Bank BNP on Sunday, 27 November 2016 collaborated with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) to extend assistance in the form of renovation of school building of PKBM Al-Falah Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi.

PKBM Al-Falah is an equivalence school established in 2007 for children of waste collectors/recyclers. The school, located next to the Bantar Gebang Landfill offers several educational programs, among others early childhood education, "Paket A" (equivalent to Elementary School), "Paket B" (equivalent to Secondary School), and "Paket C" (equivalent to High School). Support and contribution of the Bank came in the form of renovation of the classrooms in the school, thus enabling the students to feel more comfortable when studying inside the classrooms. In addition to this, at the same occasion Bank BNP also explained the benefits of saving to the attending students. The total cost incurred for this activity was Rp 20 million.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja

Bank BNP berkomitmen untuk memastikan seluruh karyawannya telah mendapatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap akses ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Selama tahun 2016, Bank BNP telah melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan akses K3 di lingkungan Perusahaan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Bank BNP senantiasa menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawannya untuk meniti karir sesuai kompetensi dan pilihan mereka. Kesempatan diberikan tanpa membedakan gender, latar belakang pendidikan, keluarga, agama, ataupun suku bangsa karyawan. Ini didukung dengan penyelenggaraan berbagai program pelatihan, dengan tujuan agar karyawan dapat menampilkan kinerja terbaik di pekerjaannya masing-masing.

Corporate Social Responsibility towards Labor Practices and Occupational Health and Safety

Bank BNP is committed to ensuring that all of its employees have obtained equal rights and opportunities as regards labor practices and occupational health & safety (OHS) measures.

Throughout 2016 Bank BNP conducted various activities related to OHS access within the Company's work environment.

In its labor practices, Bank BNP always provides equal opportunity to each of its employees to pursue a career of their choosing in line with their competence, without prejudice to their gender or their educational, family, religious, or ethnical backgrounds whatsoever. This is further supported by various training programs aimed at encouraging all employees to perform to the best of their abilities in their respective duties.

Dalam bidang kesehatan, Bank BNP mendukung kebiasaan hidup sehat para karyawannya, memberikan fasilitas paket berobat dan fasilitas kacamata atas tanggungan Bank bagi karyawan. Bank BNP menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, dan mengikutsertakan semua karyawan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

In the field of occupational health, Bank BNP encourages a healthy lifestyle to its all employees, by providing medical packages and allowance for prescriptive glasses to its employees. Bank BNP also conducts regular medical check-up and includes all of its employees to the social security program run by the National Social Security Agency (BPJS).

Dalam bidang keselamatan kerja, secara rutin Bank BNP melaksanakan simulasi evakuasi bencana di sejumlah gedung kantornya, dalam rangka memastikan kesiapan setiap unit kerja dalam menghadapi bencana alam ataupun kecelakaan kerja.

In the field of occupational safety, Bank BNP regularly conducts a simulation of disaster evacuation scenarios at many of its offices. This is aimed at ensuring that all units are ready at all times to act accordingly in the event of a natural disaster or an occupational accident.

Bank BNP juga menjaga komitmennya untuk melindungi hak karyawan dalam hal menyampaikan pendapat dan berserikat, sesuai peraturan dan norma yang berlaku.

Bank BNP maintains its commitment to protecting employees' rights to voice their opinions and form unions in line with the prevailing norms and regulations.

Tanggung Jawab Perusahaan kepada Nasabah

Our Responsibility towards Customers

Mengingat perlindungan terhadap konsumen (Nasabah/ Non-Nasabah) merupakan kewajiban setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), maka Bank BNP menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha Bank.

Considering that consumer protection (encompassing both customers and non-customers) is an obligation of every Financial Services Company, Bank BNP implements the principle of consumer protection across all of its activities and business operations.

Bank BNP telah memiliki Kebijakan Perlindungan Konsumen CP-05 sebagai panduan bagi setiap unit kerja di Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen di Bank BNP.

Bank BNP has a CP-05 Consumer Protection Policy in place as a guideline for every unit within the Company in carrying out all consumer protection activities in Bank BNP.

Untuk meningkatkan pelayanan bagi para nasabah, Bank BNP telah menyediakan situs web untuk berinteraksi dengan nasabah, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kritik dan saran selain menerima informasi mengenai produk dan jasa perbankan Bank. Situs web ini senantiasa diperbarui dan dapat ditemukan di www.bankbnp.com.

To improve service to all customers, Bank BNP runs a website to interact with its customers, providing them with a way to submit their criticism and advice to the Bank, aside from obtaining information regarding the Bank's financial products and services. This website is regularly updated and has been made available at www.bankbnp.com.

Bank BNP juga aktif di media sosial, dengan akun resmi pada jejaring sosial Twitter di @Bank_BNP, Facebook BankBNP dan Mirai+ @BNPMiraiPlus, serta YouTube BNP MIRAIPlus. Di media sosial tersebut, Bank BNP menyampaikan informasi terkait kegiatan, produk dan jasanya, sekaligus menerima kritik dan saran terkait layanan Bank.

Bank BNP is also active in various social media platforms, with an official Twitter account of @Bank_BNP, Facebook accounts of BankBNP and Mirai+ @BNPMiraiPlus, as well as YouTube channel of BNP MIRAIPlus. Across these social media Bank BNP discloses information regarding its events, products and services, as well as receives criticisms and advices regarding its service quality.

Bagi nasabah yang ingin melakukan pengaduan melalui jalur formal, Bank BNP menyediakan jalur e-mail pada alamat pengaduan.nasabah@bankbnp.com.

Customers wishing to file a formal complaint directly to the Bank may write an e-mail to pengaduan.nasabah@bankbnp.com.

Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan

Sebagai salah satu upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perbankan dan wujud partisipasi dalam mendukung program Gerakan Indonesia Menabung (GIM) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, Bank BNP melakukan kegiatan edukasi keuangan kepada masyarakat terutama pelajar tentang manfaat menabung serta mengajak mereka untuk menumbuhkan budaya menabung sejak usia dini.

Pada bulan September 2016 Bank BNP bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Wilayah DJP Jawa Barat-1 mengundang nasabah untuk menghadiri acara Sosialisasi *Tax Amnesty*. Ini dilakukan guna mendukung terlaksananya program Pemerintah mengenai Pengampunan Pajak/*Tax Amnesty* sebagaimana telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 dan peraturan turunan yang mengatur mengenai pengampunan pajak, berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016.

Seiring dengan penetapan bulan Oktober 2016 sebagai bulan Akses Keuangan Nasional/Kegiatan Inklusi Keuangan Nasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BNP pada bulan Oktober 2016 melakukan kegiatan Inklusi Keuangan dengan memperkenalkan produk-produk perbankan, memberikan insentif, hadiah, dan *merchandise* menarik pada bulan pelaksanaan Kegiatan Inklusi Keuangan hingga sarana konsultasi langsung seputar kegiatan perbankan.

Kegiatan ini dilakukan guna mendukung Program Nawa Cita yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan tujuan adalah untuk mengubah pola pikir dan pola pandang masyarakat yang belum memahami apa dan bagaimana produk-produk jasa keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang perekonomian dan keuangan agar dapat menggerakkan roda perekonomian nasional sehingga dapat bersaing di pasar global dan regional.

Sepanjang tahun 2016 Bank BNP telah melakukan edukasi dan literasi keuangan ini kepada 1.032 orang dengan total biaya sebesar Rp 68.496.500.

Banking Education for the Public

As an effort to improve public understanding in banking and as a form of partcipation in support of the Indonesia Saving Movement enacted by Bank Indonesia, Bank BNP conducted banking education activities for the public, especially for students, to promote the benefits of saving and encourage them to foster the habit of saving since their early age.

In September 2016, Bank BNP collaborated with the West Java-1 Tax Service Office of the Tax Directorate to invite customers to attend the Tax Amnesty Dissemination event. This was conducted to support the implementation of the Government's Tax Amnesty program, as stipulated in the Law No. 11/2016 and the derivative regulation on tax amnesty, namely the Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016.

In line with the enactment of the month of October 2016 as the National Financial Access Month or the Financial Inclusion Month by the Financial Services Authority (OJK), in October 2016 Bank BNP conducted Financial Inclusion activities by introducing its banking products, distributing incentives, gifts and merchandise for the implementation of the Financial Inclusion Activities, and also offering direct consultation about banking-related activities.

This activity was conducted in support of the *Nawa Cita* Program initiated by Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, with the aim of changing mindsets and perspectives in the public regarding financial products and services, as well as educating the public on economics and finance so as to be able to drive the national economy, making it more competitive in the global and regional markets.

Throughout 2016, Bank BNP conducted financial education and financial literacy programs involving 1,032 people with a total expenditure of Rp 68,496,500.

Foto Kegiatan Edukasi Masyarakat di Bidang Perbankan

Photo of Public Education on Banking activity.

Presiden Direktur Bank BNP, Takeru Agawa memberikan sambutan pada acara CSR berupa bantuan renovasi sekolah sekaligus memberikan edukasi kepada siswa-siswi PKBM Al-Falah pada bulan November 2016.

Takeru Agawa, President Director of Bank BNP, gave a speech and lecture at the CSR activity of Al-Falah school renovation. The lecture was attended by the students of the school.

Bank BNP menerima kunjungan dari siswa siswi TK Trimulia di Bank BNP Cabang Pasteur Bandung, siswa siswi tersebut belajar mengenai cara menabung, pengenalan fungsi dan kegiatan Bank.

Bank BNP Pasteur Branch in Bandung hosted students from Trimulia Kindergarten who visited the Bank to learn about how to save money along with the roles and activities of the Bank.

Bank BNP melakukan kegiatan Edukasi Perbankan ke Sekolah SMAN 1 Bandung pada bulan Agustus 2016.

Bank BNP provided banking education to students of SMAN 1 Bandung in August 2016.

Pada bulan Februari 2016 Bank BNP melakukan kegiatan Edukasi Perbankan ke sekolah SMAN 1 Sukabumi.

In February 2016, Bank BNP provided banking education to students of SMAN 1 Sukabumi.

Laporan Keuangan

Financial Report

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2016 Dan 2015
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen /

Financial Statements
As Of December 31, 2016 And 2015
And For The Years Then Ended
With Independent Auditors' Report

Daftar Isi ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan		*Board of Directors' Statement Regarding The Responsibility for Financial Statements*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1-2	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	4	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	5-6	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	7-106	*Notes to Financial Statements*

BANK BNP

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN – TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016 DAN 2015
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned below :

1. Nama / *Name*	**Takeru Agawa**
Alamat Kantor / *Office Address*	**Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung – 40132, Indonesia**
Alamat Domisili Sesuai KTP /	**Setiabudhi Regency Jl. Zamrud III No. 116**
Domicile as Stated in ID Card	**Bandung - Indonesia**
Nomor Telephon / *Telephone Number*	**(022) 82560100**
Jabatan / *Position*	**Presiden Direktur / *President Director***
2. Nama / *Name*	**Eiichiro Sakai**
Alamat Kantor / *Office Address*	**Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Bandung – 40132, Indonesia**
Alamat Domisili Sesuai KTP /	**Grand Royal Panghegar Apartment Tower A Royal Suite 9B-01**
	Jl. Merdeka No. 2
Domicile as Stated in ID Card	**Bandung – Indonesia**
Nomor Telephon / *Telephone Number*	**(022) 82560100**
Jabatan / *Position*	**Direktur / *Director***

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
2. Laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk.

state that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.*
2. *The financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. *a. All information contained in the financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk is complete and correct.*
   b. The financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts.
4. *We are responsible for the PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Bandung, 28 Febtuari / February 2017

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of The Board of Directors

METERAI TEMPEL 94DEBAEF077644110 6000

Takeru Agawa
Presiden Direktur / *President Director*

Eiichiro Sakai
Direktur / *Director*

dbsd&a
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
Lisence No.: KEP - 401/KM.1/2013

Cabang Bandung
Jalan Haruman No. 2
Bandung 40262 Indonesia
Phone : (022) 7218235 - 7317929
Fax : (022) 7218235 - 7311375
E-mail : kapdbsda_bandung@yahoo.co.id

Pusat Jakarta
Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia

BKR INTERNATIONAL

An independent member of BKR International, with offices throughout the world

No. : R.7.1/001/02/17

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2016, and the statements of comprehensive income, of changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountant. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as of December 31, 2016, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

BANDUNG
28 Februari/*February* 2017

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Deddy Supardi, CPA.
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0352
(Public Accountant Registration No. AP. 0352)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016 and 2015
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016	2015	
ASET				***ASSETS***
Kas	2c,2e,4,38,40	88.120.683	105.014.980	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2c,2e,2f,5,38,40	433.528.205	561.537.039	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2c,2e,2f,2l,6, 38,40	361.355.194	354.873.381	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2c,2e,2g,2l,7, 38,40	417.881.847	479.982.011	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	2c,2e,2h,2l,8, 38,40	1.012.183.450	568.715.175	*Securities*
Tagihan spot dan derivatif	2c,2e,2i,2l,9,40	-	8.500	*Spot and derivatif receivables*
Kredit yang diberikan	2c,2d,2e,2j,2l,			*Loans:*
Pihak berelasi	10,37,38,40	41.294.197	51.135.480	*Related parties*
Pihak ketiga		5.272.334.624	6.426.567.305	*Third parties*
		5.313.628.821	6.477.702.785	
Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai		(107.700.767)	(101.184.113)	*Less: allowance for impairment losses*
		5.205.928.054	6.376.518.672	
Tagihan akseptasi	2c,2d,2e,2k,2l,			*Acceptance receivables*
Pihak berelasi	11,37,38,40	-	2.802.949	*Related parties*
Pihak ketiga		6.330.054	17.794.105	*Third parties*
		6.330.054	20.597.054	
Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 73.872.586 pada 31 Desember 2016 dan Rp 68.568.823 pada 31 Desember 2015	2m,12	27.619.367	29.012.604	*Fixed assets net of accumulated depreciation of Rp 73,872,586 as of December 31,2016 and Rp 68,568,823 as of December 31,2015*
Aset tak berwujud setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 6.003.161 pada 31 Desember 2016 dan Rp 3.961.221 pada 31 Desember 2015	2n,13	3.227.384	3.657.824	*Intangible assets net of accumulated amortization of Rp 6,003,161 as of December 31,2016 and Rp 3,961,221 as of December 31, 2015*
Aset lain-lain	2c,2e,2l,2o,2p, 2q,2x,14,37,38,40	149.608.175	113.378.459	*Other assets*
Dikurangi : Penyisihan kerugian		-	(181.940)	*Less: Provision*
		149.608.175	113.196.519	
JUMLAH ASET		**7.705.782.413**	**8.613.113.759**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2016 and 2015
(Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016	2015	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2c,2e.iii,2r,15, 38, 40	12.786.054	6.183.051	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah	2c,2d,2e.iii,2s,			*Deposits from customers:*
Pihak berelasi	16,37,38,40	508.696.165	688.924.843	*Related parties*
Pihak ketiga		5.803.606.981	6.494.905.606	*Third parties*
		6.312.303.146	7.183.830.449	
Simpanan dari bank lain	2c,2e.iii.,2t, 17,40	53.357.530	69.615.116	*Deposit from other banks*
Utang akseptasi	2c,2e.iii,2k,11,			*Acceptance payables*
Pihak berelasi	37,38,40	4.011.504	7.738.254	*Related parties*
Pihak ketiga		6.330.054	12.858.800	*Third parties*
		10.341.558	20.597.054	
Utang pajak	2c,2z,34b,38	9.439.924	14.417.045	*Taxes payables*
Liabilitas spot dan derivatif	2c,2e.iii,2i,9,40	-	8.191	*Spot and derivative liabilities*
Pinjaman subordinasi	2c,2d,2e.iii,2v 18,37,38,40	79.945.815	81.800.190	*Subordinated loans*
Liabilitas lain-lain	2c,2d,2e.iii,19, 37,38,40	30.098.596	41.169.993	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**6.508.272.623**	**7.417.621.089**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham dengan nilai nominal per saham Rp 500 (nilai penuh) Modal dasar 1.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor dan 676.833.882 lembar saham pada 31 Desember 2016 dan 2015	20	338.416.941	338.416.941	*Share capital Rp 500 (full amounts) par value per share Authorized capital 1,000,000,000 shares Issued and fully paid-up capital and 676,833,882 shares as of December 31,2016 dan 2015*
Tambahan modal disetor-penuh	21	221.037.590	221.037.590	*Additional paid in capital-net*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	22	71.770.036	65.084.036	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	22	566.285.223	570.954.103	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		**1.197.509.790**	**1.195.492.670**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**7.705.782.413**	**8.613.113.759**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016	2015	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				***OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan dan beban bunga				*Interest income and expenses*
Pendapatan bunga	2w,23	905.311.266	1.006.416.947	*Interest income*
Beban bunga	2w,24	(419.598.008)	(558.731.676)	*Interest expense*
Pendapatan bunga-bersih		485.713.258	447.685.271	*Interest income-net*
Pendapatan operasional lainnya				*Other operating income*
Pendapatan provisi dan komisi lainnya	2x,25	3.473.286	5.067.294	*Other fees and commissions*
Pendapatan transaksi devisa-bersih	2c,26a	4.192.866	4.715.093	*Gain of foreign exchanges-net*
Pendapatan lainnya	26b	33.480.338	29.181.392	*Other income*
Jumlah pendapatan operasional lainnya		41.146.490	38.963.779	*Total other operating income*
Beban operasional lainnya				*Other operating expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	2l,3a,27	(101.116.236)	(41.619.992)	*Provision allowance for impairment losses on financial assets*
Penyisihan kerugian atas aset non keuangan	2l,3a,28	-	(181.940)	*Provision for possible losses on non earnings assets*
Beban umum dan administrasi	29	(170.731.924)	(131.624.214)	*General and administrative expenses*
Beban gaji dan tunjangan	2u,3a,30,31	(216.943.749)	(210.258.527)	*Salaries and allowance expenses*
Beban lain-lain	35	(21.582.856)	(15.955.165)	*Other expenses*
Jumlah beban operasional lainnya		(510.374.765)	(399.639.838)	*Total other operating expenses*
Jumlah beban operasional lainnya-bersih		(469.228.276)	(360.676.058)	*Total other operating expenses-net*
LABA OPERASIONAL-BERSIH		**16.484.983**	**87.009.213**	***NET OPERATING INCOME***
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL				***NON-OPERATING INCOME AND EXPENSES***
Pendapatan non-operasional	32	1.266.471	3.938.090	*Non-operating income*
Beban non-operasional	33	(5.678.665)	(632.567)	*Non-operating expenses*
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK		**12.072.789**	**90.314.736**	***INCOME BEFORE TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Beban pajak kini	2y,34a,34c	(3.964.164)	(23.447.880)	*Current tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN		**8.108.625**	**66.866.856**	***INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2z,36	**12**	**99**	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham *Capital stock*	Tambahan modal disetor-bersih/ *Additional paid in capital-net*	Saldo laba/ *Retained earnings*		Jumlah ekuitas/ *Total equity*
				Ditentukan penggunaannya/ *Appropriate*	Tidak Ditentukan penggunaannya/ *Unappropriate*	
Saldo per 31 Desember 2014/ *Balance December 31, 2014*		**338.416.941**	**221.037.590**	**55.430.786**	**523.216.171**	**1.138.101.488**
Laba komprehensif tahun berjalan/ *Comprehensive income for the year*		-	-	-	66.866.856	66.866.856
Pembentukan cadangan umum/ *Allowance for general reserve*	22	-	-	9.653.250	(9.653.250)	-
Dividen tunai *Cash dividend*	22	-	-	-	(9.475.674)	(9.475.674)
Saldo per 31 Desember 2015/ *Balance December 31, 2015*		**338.416.941**	**221.037.590**	**65.084.036**	**570.954.103**	**1.195.492.670**
Penambahan modal *Addtional capital*	21	-	-	-	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan/ *Comprehensive income for the year*		-	-	-	8.108.625	8.108.625
Pembentukan cadangan umum/ *Allowance for general reserve*	22	-	-	6.686.000	(6.686.000)	-
Dividen tunai *Cash dividend*	22	-	-	-	(6.091.505)	(6.091.505)
Saldo per 31 Desember 2016/ *Balance December 31, 2016*		**338.416.941**	**221.037.590**	**71.770.036**	**566.285.223**	**1.197.509.790**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended December 31, 2016 and 2015 (Expressed in thousand of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPRATING ACTIVITIES***
Penerimaan bunga, provisi, dan komisi		903.887.970	1.012.453.409	*Interest, fees, and commission received*
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		35.818.829	45.360.234	*Other operating income received*
Penerimaan pendapatan non-operasional lainnya		1.144.575	3.927.798	*Other non-operating income received*
Pembayaran bunga		(428.017.133)	(561.635.267)	*Interest paid*
Pembayaran beban operasional		(400.383.309)	(351.337.419)	*Operating expenses paid*
Pembayaran beban non-operasional		(5.678.665)	(632.567)	*Non-operating expenses paid*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(6.177.467)	(22.786.474)	*Payment of corporate income tax*
Laba operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		100.594.799	125.349.714	*Operating income before changes in operating assets dan liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Kredit yang diberikan		1.069.474.383	213.574.829	*Loans*
Aset lain-lain		(31.752.958)	20.200.610	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		6.603.004	(10.260.517)	*Obligation due immediately*
Simpanan dari nasabah		(871.527.303)	(692.829.431)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain		(16.257.586)	(216.582.331)	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		4.011.504	-	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		(2.763.818)	(2.925.558)	*Taxes payable*
Liabilitas spot dan derivatif		309	(309)	*Spot and derivative liabilities*
Liabilitas lain-lain		(2.652.272)	7.180.699	*Other liabilities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi		255.730.060	(556.292.294)	*Net cash flows used in operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan/ (pembelian) efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo-bruto		(443.468.275)	(45.911.637)	*Sales/ (purchase) of securities held to maturity-gross*
Penerimaan dari penjualan aset tetap	12	247.519	362.928	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	12	(5.327.781)	(6.136.295)	*Acquisition of fixed assets*
Pembelian aset tak berwujud	13	(1.611.500)	(1.514.184)	*Acquisition of intangible assets*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(450.160.037)	(53.199.188)	*Net cash flows used in investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran deviden		(6.091.505)	(9.475.674)	*Dividend payment*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		(6.091.505)	(9.475.674)	*Net cash flow used in financing activities*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2016 and 2015
(Expressed in thousand of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2016	2015	
KENAIKAN BESRIH KAS DAN SETARA KAS		(200.521.482)	(618.967.156)	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.501.407.411	2.120.374.567	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**1.300.885.929**	**1.501.407.411**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas		88.120.683	105.014.980	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia		433.528.205	561.537.039	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain		361.355.194	354.873.381	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		417.881.847	479.982.011	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Jumlah kas dan setara kas pada akhir tahun		**1.300.885.929**	**1.501.407.411**	***Total cash and cash equivalents at end of year***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (dahulu PT Bank Pasar Karya Parahyangan) selanjutnya disebut "Bank" didirikan berdasarkan akta notaris Komar Andasasmita, SH, No. 47 tanggal 18 Januari 1972. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA 5/11/19 tanggal 15 Mei 1974. Berdasarkan akta notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputro, SH. No. 27 tanggal 10 Maret 1989, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah status Bank dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, dimana akta perubahan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4155.HT.01.04. TH-1989 tanggal 2 Mei 1989. Bank memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Bank juga telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat dihadapan notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M notaris di Bandung sehubungan dengan perubahan modal dasar dan ditempatkan dan disetor. Akta tersebut telah dicatat dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22001 tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan pasal 2 anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan.

Induk perusahaan Bank adalah Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), sedangkan pemegang saham pengendali Bank adalah ACOM CO.LTD., yang didirikan di Jepang. ACOM CO. LTD memiliki anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang tersebar di beberapa negara.

1. GENERAL

a. *The Establishment of the Bank and General*

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (formerly PT Bank Pasar Karya Parahyangan) ("The Bank") domiciled in Bandung, was established based on the Notarial deed No. 47 dated January 18, 1972 of Notary Komar Andasasmita, SH. The Notary deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Virtue of Decree No. Y.A 5/11/19 dated May 15, 1974. Based on the Notary deed No. 27 dated March 10, 1989 of Notary Albertus Sutjipto Budihardjoputro SH, the shareholders has decided to change the status of the Bank from saving and loan bank into commercial bank, which the change of deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Virtue of Decree No. C2-4155.HT.01.04. Year 1989 dated May 2, 1989. The Bank obtained its operating license in general banking from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia by Virtue of Decree No. 748/KMK.013/1989 dated July 3, 1989. The bank also obtained license to engage in foreign excharge activities based on the Directors of Bank Indonesia's Decision Letter No. 27/54/KEP/ DIR dated August 5, 1994.

The Bank's Articles of Association have been amended several times. The latest amended Bank's Articles of Association by Notarial deed No. 5 dated Mei 31, 2013 of Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LL.M, notary in Bandung in connection with the change of the Bank authorized capital and issued and fully paid. The deed was recorded in Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-AH.01.10-22001 year 2013 concerning the approval on amendment of the Articles of Association.

In accordance with Article 2 of the Bank's articles of association, the main activity at the Bank is banking business in general.

The Bank's holding company is Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), while the ultimate holding company of the Bank is ACOM CO. LTD., which is incorporated in Japan. ACOM CO. LTD has subsidiaries and affiliates in some countries.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Bandung. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah seluruh kantor di Indonesia adalah sebagai berikut:

	2016	2015	
Kantor Pusat	1	1	*Head Office*
Kantor Cabang	15	15	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	42	46	*Sub Branch Offices and Cash Offices*
Mobil Kas	3	1	*Mobile Cash*
Kantor Fungsional Non-operasional	1	1	*Non Operation Functional Offices*
Kantor Fungsional Operasional	-	4	*Operation Functional Offices*
Jumlah	62	68	***Total***

b. Penawaran Umum Saham Bank

Pada tanggal 14 Desember 2000, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") melalui surat No. S-3663/PM/2000 melakukan Penawaran Umum Perdana atas 50.000.000 Saham Biasa dengan harga penawaran sebesar Rp 525 setiap saham, dan 20.000.000 Waran Seri I disertai dengan Saham Biasa atas nama, Waran diberikan secara cuma-cuma dan periode pelaksanaan Waran Seri I mulai dari 10 Juli 2001 sampai dengan 9 Januari 2004 dengan harga penawaran sebesar Rp 600 per saham. Pada tanggal 10 Januari 2001 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan Surat Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 tanggal 8 Januari 2001.

Berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 tanggal 22 Juni 2006, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 158.275.000 lembar saham dari 7 Juli sampai dengan 13 Juli 2006 dengan harga penawaran sebesar Rp 550 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan surat pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK No. S-8992/BL/2010 tanggal 30 September 2010, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 99.963.158 lembar saham dari 14 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dengan harga penawaran sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Berdasarkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-102/D.04/2013 tanggal 2 Mei 2013, Bank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 260.320.724 lembar saham dari 17 Mei 2013 sampai dengan 23 Mei 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp 1.150 (nilai penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

a. The Establishment of the Bank and General (continued)

The Bank's head office is located in Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Bandung, as at December 31, 2016 and 2015, the number of all offices in Indonesia were:

b. Public Offering of the Bank's Shares

As of December 14, 2000, the Bank obtained the effective notification from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board ("BAPEPAM") through the letter No. S-3663/PM/2000 the Bank's undertook an Initial Public Offering of 50,000,000 common shares at the offering price was Rp 525 per share and 20,000,000 Warrants Series I which embedded Common Shares, Warrants was issued free in charge and period of exercisable Warrant Series I starting from July 10, 2001 until January 9, 2004 at the offering price of Rp 600 per share. On January 10, 2001, the shares were registered at Indonesia Stock Exchange (formerly Jakarta Stock Exchange) based on the Board of Directors' of Jakarta Stock Exchange letter No. S-0058/BEJ-EEM/01-2001 dated January 8, 2001.

By effective notification from the BAPEPAM-LK No. S-714/BL/2006 dated June 22, 2006, the Bank undertook the Pre-empetive Right Issue I of 158,275,000 shares from July 7, 2006 up to July 13, 2006 at the offering price of Rp 550 (full amounts) per share.

By effective notification from the BAPEPAM-LK No. S-8992/BL/2010 dated September 30, 2010, the Bank undertook the Pre-empetive Right Issue II of 99,963,158 shares from October 14, 2010 up to October 20, 2010 at the offering price of Rp 1,000 (full amount) per share.

By effective notification from the Financial Service Authority ("OJK") No. S-102/D.04/2013 dated May 2, 2013, the Bank undertook the Pre-empetive Right Issue III of 260,320,724 shares from May 17, 2013 up to May 23, 2013 at the offering price of Rp 1,150 (full amount) per share.

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite audit, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Commitee and Employees

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank's Board of Commissioners, Directors and Audit Committe are as follows:

	2016	2015	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Presiden Komisaris	Michio Atsuda	Michio Atsuda	*President Commisioner*
Komisaris	Tatang Hermawan	Tatang Hermawan	*Commissioner*
Komisaris independen	Karel Tanok	Karel Tanok	*Independent Commissioner*
Komisaris independen	Bachtiar Alam	Bachtiar Alam	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Presiden Direktur	Takeru Agawa	Takeru Agawa	*President Director*
Direktur	Eiichiro Sakai		*Director*
Direktur	Markus Sugiono	Markus Sugiono	*Director*
Direktur	Kevin Cahyadi Tatang	Kevin Cahyadi Tatang	*Director*
Direktur Independen	Trie Karjati Wibowo	Trie Karjati Wibowo	*Independent Director*
Komite Audit			***Audit Committee***
Ketua	Bachtiar Alam	Bachtiar Alam	*Chairman*
Anggota	Inge Barlian	Inge Barlian	*Member*
Anggota	Elizabeth Tiur Manurung	Elizabeth Tiur Manurung	*Member*

Pembentukan Komite Audit Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.I.5.

Establishment of the Bank's Audit Committee is in compliance with the requirements of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution (Bapepam-LK) regulation No. IX.I.5.

Kepala Divisi Internal Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Raden Widawati.

The Bank's Internal Audit Division Head as of December 31, 2016 and 2015 is Raden Widawati.

Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Mario Yahya.

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2016 and 2015 is Mario Yahya.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan akta Notaris Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., No. 15 tanggal 19 Februari 2016.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2016 by Notarial deed of Yuliani Idawati, S.H., Sp.N., No. 15 dated February 19, 2016.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan akta Notaris Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LLM., No. 6 tanggal 23 November 2015.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2015 by Notarial deed of Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H., LLM., No. 6 dated November 23, 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 1.243 dan 1.293 karyawan.

At December 31, 2016 and 2015, the Bank has 1,243 and 1,293 permanent employees respectively.

Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing sebesar Rp 2.600.343 dan Rp 12.866.277 pada tahun 2016, Rp 2.634.824 dan Rp 16.060.599 pada tahun 2015.

Total salaries and allowances paid to the Board Commissioners and Directors amounted to Rp 2,600,343 and Rp 12,866,277 respectively, in 2016 and Rp 2,634,824 and Rp 16,060,599 respectively, in 2015.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan Keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI") 2008 dan Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran keputusan ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" yang mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan dan pernyataan kepatuhan. Pos-pos dalam Penghasilan komprehensif lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dasar penyusunan laporan keuangan Bank, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

Laporan keuangan Bank disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada bank Indonesia dan bank lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation and Measurement of Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK") which include the Accounting Guidelines for Indonesia Banking Industry ("PAPI") 2008 and the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Capital Market Supervisory Board and Financial Institution ("BAPEPAM-LK", which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting January 1, 2013) rule No. VIII.G.7, appendix of the decree of the Chairman of the BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Financial Statement Presentation and Disclosure of the Issuer or Public Company".

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements" which regulates presentation of financial statements as to, among others, the objective, components of financial statements, fair presentation, materiality and aggregation, offsetting, distinction between current and non-current assets and short-term and long-term liabilities, comparative information and consistency and introduces new disclosures such as, among others, key estimates and judgments, capital management, other comprehensive income, departures from accounting standards and statement of compliance. The items under Other Comprehensive Income (OCI) should be presented separately between items to be reclassified to profit or loss and items not to be reclassified to profit or loss.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The reporting currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (IDR).

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in related accounting policies of those accounts.

The statements of cash flows are prepared using the modified direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash and demand deposits at Bank Indonesia, other banks, placements with Bank Indonesia and other banks.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 seperti yang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Change in accounting policies and disclosures

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those made in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2015, except for the adoption of several amended FAS which were effective starting on January 1, 2016 as disclosed in this Notes to the Financial Statements.

c. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan dijabarkan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Reuters pada pukul 16.00 WIB. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

c. Foreign currency transactions and balances

The financial statement are presented in Indonesian Rupiah. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statements of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah based on Reuters's middle rates as of 16.00 hours Western Indonesia Time. The resulting gains or losses are credited or charged to current year of statement of profit or loss and other comprehensive income.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran ke dalam Rupiah pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (nilai penuh).

Below are the major foreign currencies exchange rates used for translation into Rupiah as of December 31, 2016 and 2015 (full amounts).

	2016	2015	
	Rp	Rp	
Dolar Amerika	13.472,50	13.785,00	*United States Dollar*
Dolar Singapore	9.311,93	9.758,94	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	115,07	114,52	*Japanese Yen*
Poundsterling	16.555,01	20.439,02	*Great Britain Poundsterling*
Dolar Hongkong	1.737,34	1.778,70	*Hongkong Dollar*
Dolar Australia	9.723,10	10.083,73	*Australian Dollar*
Baht Thailand	376,12	381,97	*Thai Baht*
Dolar Kanada	9.986,28	9.924,31	*Canadian Dollar*
Swiss Franc	13.208,98	13.919,33	*Swiss Franc*
Dolar Brunei	9.313,86	9.759,29	*Brunei Dollar*
Real Saudi Arabia	3.591,90	3.672,48	*Saudi Arabian Real*
Won Korea	11,20	11,72	*Korean Won*
Yuan	1.939,02	2.122,85	*China Yuan Renminbi*
Ringgit Malaysia	3.003,23	3.210,67	*Malaysian Ringgit*
Dolar Taiwan	416,86	419,81	*Taiwanese Dollar*
Euro	14.175,76	15.056,67	*Euro*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 (revisi 2010) mengenai "Pengungkapan pihak-pihak berelasi":

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties

The Bank enters into transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with SFAS No.7 (revised 2010) "Related Party Disclosures" as:

a. A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   i Has control or joint control over the reporting entity;
   ii Has significant influence over the reporting entity; or
   iii Its a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow is related to the others);
   ii An entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv An entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   vi The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan

i. Aset keuangan (selain sukuk)

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 50 (Revisi 2014) berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasikan informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.

PSAK No. 55 (Revisi 2014) mengatur prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitias keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.

PSAK No. 60 (2014) mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengukuran nilai wajar dan risiko likuiditas. Pengukuran nilai wajar terkait pos yang dicatat pada nilai wajar disajikan berdasarkan sumber input dengan menggunakan tiga tingkatan hirarki nilai wajar untuk setiap kelas instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar. Sebagai tambahan, PSAK ini mewajibkan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir untuk pengukuran nilai wajar tingkat 3, demikian pula pengungkapan transfer antar tingkatan dalam hirarki nilai wajar. PSAK ini juga menjelaskan lebih lanjut persyaratan pengungkapan risiko likuiditas transaksi derivatif dan aset yang digunakan untuk pengelolaan likuiditas. Pengungkapan pengukuran nilai wajar diungkapkan pada catatan 40. Pengungkapan risiko likuiditas tidak terpengaruh secara signifikan oleh PSAK ini dan diungkapkan pada catatan 43.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities

i. Financial assets (other than sukuk)

Effective January 1, 2015, the Bank applied SFAS No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", SFAS No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and SFAS No. 60 (2014) , "Financial Instruments: Disclosures".

SFAS No. 50 (Revised 2014) contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interest, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This SFAS requires the disclosures of, among others, information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments.

SFAS No. 55 (Revised 2014) establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This SFAS provides the definitions and characteristics of derivatives, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others.

SFAS No. 60 (2014) requires additional disclosures about fair value measurement and liquidity risk. Fair value measurements related to items recorded at fair value are to be disclosed by source of inputs using the three level fair value hierarchy, by class, for all financial instruments recognized at fair value. In addition, a reconciliation between the beginning and ending balance for level 3 fair value measurements is now required, as well as significant transfers between levels in the fair value hierarchy. The SFAS also clarify the requirements for liquidity risk disclosures with respect to the derivative transactions and assets used for liquidity management. The fair value measurement disclosures are presented in note 40. The liquidity risk disclosures are not significantly impacted by the SFAS and are presented in note 43.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi
- Dimiliki hingga jatuh tempo
- Pinjaman yang diberikan dan piutang
- Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan, jika:
- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:
- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Bank, dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci; atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Financial assets within the scope of the SFAS No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets. Financial assets are measured initially at fair value, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

The Bank's financial assets are classified as follows:
- *Fair value through profit or loss (FVTPL*
- *Held to maturity*
- *Loans and receivable*
- *Available-for-sale financial assets*

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL where the financial asset is either classified as held for trading or designated upon initial recognition as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:
- *it has been acquired principally for the purpose of selling in the near future; or*
- *it is a part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative that is not designated nor effective as a hedging instrument.*

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:
- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *the financial asset forms part of a group of financial assets, which is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with the Bank documented risk management or investment strategy, and information about the grouping is provided internally on that basis; or*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi (FVTPL) (lanjutan)

- merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2011) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai FVTPL.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 2e.iv.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini mencakup tagihan spot dan derivatif (lihat catatan 40).

Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi kerugian penurunan nilai yang ada.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini mencakup efek-efek (lihat catatan 40).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL) (continued)

- *it forms part of a contract containing one or more embedded derivatives, and SFAS 55 (revised 2011) permits the entire combined contract (asset or liability) to be designated as at FVTPL.*

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in statements of income. The net gain or loss recognized in statements of income incorporates any dividend or interest earned on the financial asset. Fair value is determined in the manner described in note 2e.iv.

As of December 31, 2016 and 2015, this category includes spot and derivative receivables (see note 40).

Held to maturity

Financial assets are classified as held-to-maturity investment only if these investments have fixed or determined payments and their maturity date has been determined and the Bank have the positive intention and ability to hold such financial assets to maturity. Held-to-maturity investments are initially measured at fair value plus transaction costs which are attributable directly to the acquisition of the financial assets. After initial recognition, held-to-maturity investments are measured at amortized cost, using effective interest rate method less any impairment losses.

As of December 31, 2016 and 2015, this category includes securities (see note 40).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan ini diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok ini disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi dan aset lain-lain (lihat catatan 40).

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari investasi tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

These financial assets are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method. Interest income on this financial assets classification is presented as finance income in the statements of comprehensive income.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables and recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2016 and 2015, this category includes cash, demand deposits with Bank Indonesia, demand deposits with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities , loans, acceptance receivables and others assets (see note 40).

Available-for-sale-financial assets

The available for sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest method and foreign exchange gains or losses of available-for- sale investments are recognized in the profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (selain sukuk) (lanjutan)

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Perhitungan dari suku bunga efektif termasuk semua fee dan pembayaran atau penerimaan poin yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Biaya transaksi termasuk biaya inkremental yang secara langsung berkaitan dengan akuisisi atas penerbitan aset atau liabilitas keuangan.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

ii. Investasi pada sukuk

Bank menerapkan PSAK No. 110 (Revisi 2011), Akuntansi Sukuk. PSAK 110 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Penerapan PSAK ini berlaku secara prospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

i. Financial assets (other than sukuk) (continued)

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating income on and interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

The calculation of the effective interest rate includes all fees and points paid or received which are integral parts of the effective interest rate. Transaction costs include incremental cost which is directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or liabilities.

Derecognition of financial assets

The Bank derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Bank neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Bank recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Bank retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Bank continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

ii. Investment in sukuk

The Bank has applied SFAS No. 110 (Revised 2011), Accounting for Sukuk. SFAS 110 establishes the recognition, measurement, presentation and disclosures of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions. Implementation of this SFAS is applied prospectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Investasi pada sukuk (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Bank. Klasifikasi dalam investasi sukuk terdiri dari:

- Biaya perolehan

  Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

  Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan yang sudah termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih Antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

  Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi

Bank tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Bank. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (consideration/ijarah) dari sukuk ijarah. Setelah pengakuan awal, jika arus kas aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Bank menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

ii. Investment in sukuk (continued)

Recognition and measurement

Before the initial recognition, the Bank determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of Bank's investment. The classification in sukuk investment comprised of:

- *Acquisition cost*

  If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets of contractual cash and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

  At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which already includes the transaction cost. After the initial recognition, the sukuk investment is measured on amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the period of the sukuk instrument.

  If there is an indication of impairment, then the Bank will measure the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, then the Bank will recognize the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassification

The Bank cannot change investment classification unless there is a change in the business model's purpose. Business model that is intended to gain contractual cash flow is based on the investment purpose set by Bank. The underlying contractual cash flow is cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (consideration/ijarah) from sukuk ijarah. After initial recognition, if the actual cash flow differs from the investment purpose initially set by the Bank, then the Bank reconsiders the consequences of the revised investment purpose.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Liabilitas keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan biaya perolehan yang diamortisasi.

Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Kategori ini terdiri dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif diklasifikasikan sebagai kewajiban diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini mencakup liabilitas spot dan derivatif (lihat catatan 40).

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini mencakup liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman subordinasi, utang akseptasi dan liabilitas lain-lain (lihat catatan 40).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

iii. Financial liabilities

The Bank classified its financial liabilities as financial liabilities at fair value through profit or loss and measured at amortized cost.

Fair Value Through Profit or Loss

This category comprises of financial liabilities classified as held for trading.

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effective as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading are included in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2016 and 2015, this category includes spot and derivative liabilities (see note 40)

Financial liabilities measured at amortized costs

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss fall into this category and are measured at amortized cost.

After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using effective interest rate method.

As of December 31, 2016 and 2015, this category includes obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, subordinated loans, acceptance payables and other liabilities (see note 40).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

iii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

iv. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Bank melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen keuangan yang dimilikinya berdasarkan hirarki berikut:

1. Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk instrumen yang serupa. Untuk aset keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang digunakan adalah *bid price* (harga penawaran). Sedangkan untuk liabilitas keuangan yang dimiliki, nilai wajar yang digunakan adalah *ask price* (harga permintaan).

   Jika instrumen keuangan tersebut tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif, maka digunakan teknik penilaian dalam menentukan nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

iii. Financial liabilities (continued)

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or has expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

iv. Fair value measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Bank uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

The Bank measures the fair value of the financial instruments held based on the following hierarchy:

1. Quoted market price in an active market for similar instruments. For financial assets owned, the fair value used is the bid price. For financial liabilities held, the fair value used is the ask price.

If the financial instrument has no quoted price in an active market, then valuation techniques are used in determining the fair value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

iv. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

2. Teknik penilaian yang berdasarkan pada input yang dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai menggunakan: harga kuotasi pada pasar aktif untuk instrumen yang serupa; harga kuotasi untuk instrumen serupa pada pasar yang dianggap kurang aktif; atau teknik penilaian dimana semua input yang signifikan didapatkan secara langsung atau tidak langsung dari data pasar yang diobservasi.

3. Teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen dimana input untuk teknik penilaian yang digunakan tidak berdasarkan pada data yang dapat diobservasi dan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen serupa dimana penyesuaian atau asumsi yang tidak dapat diobservasi secara signifikan diperlukan untuk menggambarkan perbedaan antara instrumen-instrumen yang ada.

v. Reklasifikasi aset keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan dari atau ke kelompok aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi atas aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (atau sebaliknya). Untuk aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, reklasifikasi dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan maka sisa investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus direklasifikasikan menjadi investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual (*tainting rule*). Apabila terdapat reklasifikasi dari klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual, maka aset keuangan tersebut akan dihitung nilai wajarnya dan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat harus dicatat pada ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

iv. Fair value measurement (continued)

2. Valuation techniques based on observable inputs. Include in this category are instrument assessed using: the quoted market prices in an active market for similar instruments; quoted prices for similar instruments in markets considered to be less active; or valuation techniques in which all significant inputs are obtained directly or indirectly from observed market data.

3. Valuation techniques using unobservable inputs. Include in this category are all instruments in which the inputs to valuation techniques used are not based on observable data and the use of unobservable inputs has a significant impact on the assessment of the instrument. Include in this category are instruments which are valued at quoted price for similar instruments where adjustments or significant unobservable assumptions are necessary to describe the differences between existing instruments.

v. Reclassification of financial assets

The Bank are not allowed to perform reclassification of financial assets from or to a group of financial assets measured at fair value through profit or loss or loans and receivables. The Bank are only permitted to reclassify financial assets from available-for-sale to held-to-maturity (or vice versa). For financial assets held-to-maturity, if the reclassification is in a greater than insignificant amount, then the remaining held-to-maturity investments must be reclassified as available-for-sale (tainting rule). If there is reclassification from held-to-maturity to available-for sale, the financial assets will be measured at fair value and the difference between fair value and carrying amount should be recorded in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset dan Liabilitas keuangan (lanjutan)

vi. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan keuangan jika, dan hanya jika, Bank:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Giro pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (catatan 2e).

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk term deposit, *deposit facility, call money*, deposito berjangka dan lain-lain.

Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (catatan 2e).

h. Efek-efek

Efek-efek pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan efek-efek, dan selanjutnya pengukuran dilakukan berdasarkan klasifikasi efek-efek ke dalam kelompok aset keuangan tertentu dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (catatan 2e).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities(continued)

vi. Off setting financial instrument

Financial assets and liabilities are off setting and the net amount reported in the financial statement if and only if, Bank:

- *has a legally enforceable right to offset the recognized amount; and*
- *has an intention to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously.*

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

f. Current accounts with Bank Indonesia other banks

Demand deposits with Bank Indonesia are stated at amortized costs using effective interest rate and demand deposits with other banks stated at amortized costs using effective interest rate net of impairment losses (note 2e).

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are placements in term deposit, deposit facility, call money, time deposits and others.

Placements with Bank Indonesia are stated at amortized costs using effective interest rate and placements with other banks are stated at amortized costs using effective interest rate net of allowance for impairment losses (note 2e).

h. Securities

At initial recognition, securities are measured at fair value plus transaction costs which are directly attributable to the acquisition of securities and subsequent measurement is done based on classification of securities into groups of certain financial assets net of impairment losses (note 2e).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek dan obligasi Pemerintah, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi yang sesuai dengan PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Efek-efek sukuk yang diukur pada nilai perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama jangka waktu periode hingga jatuh tempo dengan menggunakan metode garis lurus.

2) Efek-efek sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3) Efek-efek sukuk diukur pada nilai wajar, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

i. Tagihan dan liabilitas spot dan derivatif

Tagihan dan liabilitas spot dan derivatif disajikan sebesar keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari kontrak spot dan derivatif dengan tujuan bukan untuk lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut dihitung dari selisih antara nilai kontrak dan nilai wajar instrumen spot dan derivatif pada tanggal laporan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Keuntungan atau kerugian dari instrumen spot dan derivatif yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

j. Kredit yang diberikan

Kredit diakui sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (catatan 2e).

Untuk kredit yang direstrukturisasi, kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities (continued)

Securities and Government bonds, are classified based on business model, determined by the Bank at the date of purchase in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Sukuk securities at cost are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the term using straight-line method until maturity.

2) Sukuk securities at fair value in other comprehensive income, the difference between cost and nominal value is amortized using the straight-line method over the sukuk term and is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

3) Sukuk securities at fair value are stated at fair values. Unrealized gains or losses from the changes in fair values are presented in current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

i. Spot and derivative receivables and payables

Spot and derivative receivables and payables are stated at the amount of unrealized gains or losses arising from spot and derivative contracts with purposes not to hedge. The unrealized gains or losses are calculated from the difference between the contract value and fair value of spot and derivative instruments at the reporting date. The fair value is determined based on market price, pricing models or quoted prices for instruments with similar characteristics. Gains or losses from spot and derivative instruments that do not qualify to be classified as hedges are recognized as profit or loss for the year.

j. Loans

Loans are recognized at amortized costs using effective interest rate net of allowance for impairment losses (note 2e).

For restructured loans, loss which occur from loan restructuring relating to the modification of terms is recognized if the present value of future cash receipts specified in terms of new loans, including receipts designated as interest or principal, is less than the value of loans recorded prior to restructuring.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang di berikan (lanjutan)

Agunan digunakan untuk memitigasi risiko kredit dan kebijakan mitigasi risiko menentukan jenis agunan yang dapat diterima oleh Bank. Umumnya jenis agunan yang diterima Bank untuk memitigasi risiko kredit diantaranya adalah giro, tabungan deposito berjangka, tanah dan bangunan, logam mulia, kendaraan bermotor, piutang, mesin dan persediaan barang.

Umumnya agunan yang diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of credit repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kredit dihapuskan jika tidak ada peluang yang realistis untuk pengembalian masa datang dan semua agunan telah terealisasi atau sudah diambil alih oleh Bank.

Kriteria penghapusbukuan kredit kepada debitur adalah sebagai berikut:

a. Kredit yang memiliki kualitas macet;
b. Fasilitas kredit telah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset sebesar 100% dari pokok kredit;
c. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial write-off*);
d. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil; dan
e. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar.

k. Tagihan dan utang akseptasi

Tagihan akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan utang akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (catatan 2e).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Collateral is held to mitigate credit risk and risk mitigation policies determine the eligibility of collateral types. Typically, the Bank uses demand deposits, savings, time deposits, land and buildings, gold, vehicles, account receivables, machines and inventories.

Generally, collateral is required for all credits extended as a secondary source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

Loans are written-off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Bank.

The criteria for loan write-off to debtors are as follows:

a. "Loss" loan category;
b. Loan facility has been provided with 100% provision from the loan principal;
c. The write-offs are performed for all loan obligations, the loan obligations shall not be written-off partially;
d. Collection and recovery efforts have been performed, but the results are unsuccessful; and
e. The debtors business has no prospect or performance is bad or they do not have the ability to repay the loan.

k. Acceptances receivable and payable

Acceptance receivables are stated at amortized costs using the effective interest rate net of allowance for impairment losses, whereas acceptance payables are stated at amortized costs using the effective interest rate method (note 2e).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomik atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut; atau
- penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya.

Estimasi periode antara peristiwa kerugian dan identifikasinya ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Pertama kali Bank menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of financial and non-financial assets

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each statement of financial position date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been impacted.

The objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *the lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower is unlikely to be granted if the borrower did not experience such difficulties; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation; or*
- *the loss of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *the observable data indicating a measurable decrease in the estimated future cash flows of a group of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decline can not be identified on individual financial assets in the asset group; or*
- *significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost.*

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by management for each identified portfolio.

Initially the Bank assesses whether there is any objective evidence of impairment for financial asset whose balance is individually significant. The individual assessment is performed on the significant impaired financial asset. The insignificant impaired financial asset is included in group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assessed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik untuk aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Akun yang penurunan nilainya telah dinilai secara individual, dan penurunan nilainya diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara individual, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi menggunakan cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

a. kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
b. kredit dengan kualitas non-performing yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
c. Kredit yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

a. debitur yang tidak memenuhi kriteria dilakukan evaluasi penurunan nilai secara individual.
b. debitur yang dievaluasi secara individual, namun tidak terdapat bukti objektif terjadi penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

If the Bank states that there is no objective evidence of impairment for financial asset as individual, both for significant and insignificant amount, hence the account of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

For the purposes of an evaluation of individual impairment, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows that is discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Bank establishes loans that must be evaluated for impairment individually, if fulfill one of these criteria below:

a. loans that individually have significant value and have an objective evidence of the impairment; or
b. Loans with non-performing quality with total outstanding that do not have a significant value; or
c. Restructured loans.

The Bank establishes the loans that must be evaluated for impairment collectively, if fulfill one of these criteria below:

a. debtors who don't qualify the criteria are done by evaluating the impairment losses individually.
b. debtors who were evaluated individually, but there was not objective evidence if there is an impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Bank mulai menerapkan statistical model analysis method yaitu migration analysis method dengan menggunakan data historis kerugian kredit minimal 3 tahun dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif:

- Data historis *probability of default* ,
- Waktu pemulihan,
- Jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*), dan
- Pertimbangan pengalaman manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang didasarkan pada pengalaman historis.

Jika kredit tidak tertagih, kredit tersebut dihapusbuku dengan cara menjurnal balik cadangan penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia, Bank menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" sebagai panduan untuk menghitung minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Aset produktif terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, serta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit.

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang harus dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
e 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

The Bank started to applied statistical model analysis method, namely migration analysis method using historical loan loss data minimum 3 years and taking into account the following in determining the allowance for collective impairment loan loss:

- *Historical trend of the probability of default,*
- *The timing of recoveries,*
- *The amount of loss incurred (loss given default), and*
- *Management's experienced judgment as to whether the current economic and credit conditions are such that the actual level of incurred losses is likely to be greater or less than that suggested by historical experience.*

If loans are not collectible, these loans are written off by reversing allowance for impairment losses. Recovery of written-off loans from previous period are recorded as operational income other than interest income.

Related to compliance with Bank Indonesia, the Bank establishes Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 regarding "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" as a guide to calculate minimum allowance for possible losses of earning assets that should be established in accordance to the provision of Bank Indonesia.

Earning assets consist of demand deposits in Bank Indonesia and other banks, placement in Bank Indonesia and other banks, securities, and commitment and contingencies that have credit risk.

Allowance for possible losses to be calculated according to the Bank Indonesia regulation are as follow:

a. 1% from earning assets that classified as Current, outside the placement in Bank Indonesia, Government Bonds, other debt instruments that issued by Government of Republic of Indonesia and earning asset that guaranteed as cash collateral;
b. 5% from earning assets that classified as Special Mention net of collateral;
c. 15% from earning assets that classified as Substandard net of collateral;
d. 50% from earning assets that classified as Doubtful net of collateral;
e. 100% from earning assets that classified as Loss net of collateral;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penyisihan penghapusan aset sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

- Cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi

  Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit berdasarkan selisih antara nilai amortisasi (nilai tercatat) dan *present value* atas pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

- Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih

  Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih berdasarkan pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realisable value*).

Penurunan nilai aset non-keuangan

Perubahan metode penentuan cadangan kerugian penurunan nilai di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang seharusnya diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali laba rugi komprehensif tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena dampak dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak material terhadap laba rugi komprehensif tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dilakukan penyajian kembali dan dampak perubahan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

m. Aset tetap

Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Criteria for evaluation of collateral that can be minimized in the calculation of impairment losses of assets in accordance with Bank Indonesia regulation.

- *Allowance for impairment losses on commitments and contingencies*

  The Bank determines allowance for impairment losses on commitments and contingencies with credit risk by the difference between the amortized amount (carrying amount) and the present value of any expected payment (when a payment under the guarantee has become probable).

- *Allowance for impairment losses on foreclosed assets*

  The Bank determines allowance for impairment losses on foreclosed assets by the lower of the carrying amount and their net realisable value.

Impairment of non-financial assets

The above changes on the determination of allowance for impairment losses represent changes in accounting policy which should generally be applied retrospectively requiring restatements of comprehensive income of prior years' results. However, as the impacts of the change in respect of prior years' results were not material, no restatements were made and the impacts of the change are charged to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

m. Fixed assets

The Bank adopted SFAS No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets". The revised SFAS No. 16 prescribes accounting for land and therefore, revoked SFAS No. 47, "Accounting the Land". The adoption of the revised FAS has no impact on the financial statements.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah nilai tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk seluruh aset tetap selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	The Estimated useful lives year	***% per tahun/ % per year***	
Gedung dan instalasi	20	*5*	*Buildings and installations*
Inventaris kantor	4 - 8	*25 - 12,5*	*Furnitures and fixtures*
Mesin-mesin kantor	4 - 8	*25 - 12,5*	*Machineries*
Kendaraan bermotor	4 - 8	*25 - 12,5*	*Vehicle*

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi dan dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/ diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Bank menerapkan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. If the recognition criteria are met, the acquisition cost will include the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statements of comprehensive income as incurred.

Depreciation of fixed assets, except for land, is computed using the straight-line method for fixed assets over the estimated useful lives of the assets, as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate for on a prospective basis.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statements of financial position and the resulting gains or losses are recognized in the statements of comprehensive income.

Land are stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

The Bank adopted ISAK No. 25, "Land Rights". ISAK No. 25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Building Usage Rights ("HGB") incurred when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under "Fixed Assets" account and not amortized. The legal cost incurred to extend or renew the land rights are recorded as intangible assets and amortized over the shorter of the rights' legal life or land's economic life.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset dalam penyelesaian disajikan dalam "Aset Tetap" dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

n. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang dibeli Bank.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran untuk pengembangan perangkat lunak secara internal diakui sebagai aset ketika Bank dapat mendemostrasikan maksud dan kemampuannya untuk menyelesaikan pengembangan dan memakai perangkat lunak tersebut dalam menghasilkan keuntungan ekonomis dimasa mendatang, dan dapat secara handal mengukur biaya untuk menyelesaikan pengembangan. Biaya yang dikapitalisasi dari pengembangan perangkat lunak secara internal mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan langsung yang dinyatakan pada biaya yang dikapitalisasi dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan di masa mendatang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaan atau pelepasannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statements of comprehensive income in the year the asset is derecognized.

Construction in progress is presented as part of "Fixed Assets" and is stated at cost. The accumulated cost of the asset constructed is transferred to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

n. Intangible assets

Intangible assets consist of software acquired by Bank.

Software acquired by Bank is stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Expenditure on internally developed software is recognized as an asset when the Bank is able to demonstrate its intention and ability to complete the development and use of the software in a manner that will generate future economic benefits, and can reliably measure the costs to complete the development. The capitalized costs of internally developed software include all costs directly attributable to develop the software, and are amortized over its useful life Internally developed software is stated at capitalized cost less accumulated amortization and impairment losses.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

An intangible asset is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Aset tak berwujud (lanjutan)

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut, dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat dari perangkat lunak adalah empat tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

o. Biaya dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" pada laporan posisi keuangan.

Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit dicatat sebesar nilai wajar tetapi tidak melebihi nilai tercatat kredit yang diberikan. Bank tidak mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai bersih agunan yang diambil alih yang dapat direalisasikan dibebankan pada penyisihan penghapusan. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antarnilai tercatat dengan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjualnya. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi biaya untuk menjualnya diakui sebagai kerugian penurunan nilai di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya.

Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih, dan diakui sebagai pendapatan atau beban non-operasional dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Intangible assets (continued)

Amortization is recognized in statements of income on a straight-line basis over the estimated useful life of the software, from the date it is available for use. The estimated useful life of software is four years.

Amortization method, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if appropriate.

o. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

p. Foreclosed assets

Foreclosed assets are presented in the "Other Assets" account in the statements of financial position.

Forclosed assets acquired in conjunction with settlement of loans are initially recorded at their fair value but not exceeding the carrying value of loans. The Bank does not recognize any gains relating with the acquisition of foreclosed assets. The excess between uncollectible loans balance and net realizable value of foreclosed assets is charged to allowance for losses. Subsequent to initial recognition, foreclosed assets are recorded at carrying amount or at fair value less cost to sell, whichever is lower. The excess between the carrying value and fair value less cost to sell is recognized as impairment losses in the statements of comprehensive income.

Foreclosed assets are not depreciated and expenses in relation with the acquisition and maintenance of those assets are charged as incurred.

The difference between the carrying value and the proceeds from the sale of foreclosed assets is recognized as gain or loss at the time of sale, and recognized as non-operating income or expense in the statements of comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari biaya dibayar di muka, agunan yang diambil alih, pendapatan bunga yang akan diterima, persediaan barang cetakan, persediaan hadiah dan perlengkapan kantor, uang muka, setoran jaminan, beban pra operasi cabang dan lainnya.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai aset apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pembalikan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya pembalikan.

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi (catatan 2e.iii.).

s. Simpanan dari nasabah

Pada saat pengakuan awal simpanan diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif (catatan 2e.iii.).

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat pengakuan awal simpanan diukur sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan suku bunga efektif (catatan 2e.iii).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Other assets

Other assets consist of prepaid expenses, foreclosed assets, accrued interest incomes, printing materials, gift and supplies inventories, advances, security deposits, branch pra operation expenses and others.

Other assets are stated at the carrying amounts less allowance for impairment value.

Bank recognized impairment value of assets if the recoverable amount of assets is lower than the carrying amount. At the statements of financial position date, the Bank evaluates the recoverable amount of assets to determine whether there is or not any indication of assets impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognized as gain in the statements of income when incurred.

r. Obligation due immediately

Obligation due immediately is recorded in the event of its occurrence or due to a direct order from the shareholder both public and other bank. Obligation due immediately are stated at the amortized cost (note 2e.iii.).

s. Deposits from customers

At initial recognition deposits are measured at fair value net of transaction costs directly attributable to the deposits, and are measured subsequently at amortized costs using the effective interest rate method (note 2e.iii.).

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks consist of the liability to other banks, both domestic and overseas in the form of demand deposits, saving deposits and time deposits.

At initial recognition, deposits from other banks measured at fair value net of transaction costs which directly attributable to deposits are measured subsequently at amortized costs using interest rate (note 2e.iii).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Imbalan pasca kerja

Efektif 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja". Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti menggunakan metode Projected Unit Credit dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini. Bank menyelenggarakan program imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan tetap dengan menggunakan kebijakan asuransi untuk mendanai imbalan pasca kerja tersebut sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 16 FPP60297.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial digolongkan sebagai program multipemberi kerja. Berdasarkan PSAK 24 paragraf 8 bahwa, "Program multipemberi kerja adalah program iuran pasti atau program imbalan pasti (selain program jaminan sosial) yang: (a) menyatukan aset yang dikontribusikan dari beberapa entitas yang tidak sepengendali; dan (b) menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja yang berasal lebih dari satu entitas, dengan dasar bahwa tingkat iuran dan imbalan ditentukan tanpa memperhatikan identitas entitas yang mempekerjakan pekerja tersebut."

Selanjutnya, PSAK 24 paragraf 33 menyatakan bahwa, "Jika entitas berpartisipasi dalam program imbalan pasti multipemberi kerja, kecuali paragraf 34 diterapkan, maka entitas: (a) melaporkan bagian proporsionalnya atas kewajiban imbalan pasti, aset program, dan biaya terkait dengan program tersebut dengan cara yang sama dengan program imbalan pasti lain; dan (b) mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh paragraf 135-148 (kecuali paragraf 148 (d)). "

Berdasarkan PSAK 24 paragraf 34, ketika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas: (a) mencatat program sesuai dengan pengaturan di paragraf 51 dan 52 seolah-olah sebagai program iuran pasti; dan (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraph 148.

Informasi terkait bagian proporsional atas kewajiban imbalan pasti, aset program dan biaya terkait polis asuransi tidak tersedia. Bank mencatat polis asuransi tersebut seolah-olah sebagai program iuran pasti sebagaimana diwajibkan pada PSAK 24 paragraf 34.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Post-employement benefits

Effective on January 1, 2015, the Bank has adopted SFAS 24 (Revised 2013), "Employee Benefits". Accounting by an entity for defined benefit plans using the projected unit credit method to determine the present value of the defined benefit obligation and current service cost. The Bank has implemented a defined post-employment benefit plan for its permanent employees, by using an insurance policy to fund post-employment benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003 at Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial in accordance with the Cooperation Agreement Nomor: 16FPP60297.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial is classified as multiemployer plans. Based on SFAS 24 paragraph 8 "Multi employer plans are defined contribution plans or defined benefits plans (other than state plans) that: (a) Pooled the assets contributed by various entities that are not under common control; and (b) use those assets to provide benefits to employees of more than one entity, on the basis that contribution and benefit levels are determined without regard to the identity of the entity that employs the employees."

Further, SFAS 24 paragraph 33 explains, "If an entity participates in a multi-employer defined benefit plan, unless paragraph 34 apllies, it shall: (a) account for its proportional share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with the plan in the same way as for many other defined benefit plan; and (b) disclose the information required by paragraph 135-148 (excluding paragraph 148 (d))".

Based on SFAS 24 paragraph 34, when sufficient information is not available to use defined benefit accounting for a multi-employer defined benefit plan, an entity shall: (a) account for the plan in accordance with paragraph 51 and 52 as if it were defined contribution plan; and (b) disclose the information required by paragraph 148.

Information about proportional share of the defined benefit obligation, plan assets and cost associated with insurance policy is not available. The Bank account for the insurance policy as if it were defined contribution plan as required by SFAS 24 paragraph 34.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar nilai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman subordinasi dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif (catatan 2e.iii).

w. Pengakuan pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (catatan 2e).

Bunga dari liabilitas keuangan, diakui sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan dan beban bunga yang diakui dalam laporan keuangan meliputi:
- Bunga atas aset dan liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi yang dihitung menggunakan suku bunga efektif.
- Bunga atas semua aset yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Pendapatan bunga dari semua aset keuangan yang diperdagangkan dipandang tidak signifikan terhadap kegiatan perdagangan Bank.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau yang pembayarannya secara tetap waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Penerimaan pembayaran dari kredit yang mengalami penurunan nilai diakui sebagai pengurang nilai tercatat.

x. Pengakuan pendapatan dan beban provisi dan komisi

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktunya dengan menggunakan suku bunga efektif.

Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi yang ditangguhkan diakui pada saat kredit dilunasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Subordinated loans

Subordinated loans are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on subordinated loans and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate (note 2e.iii).

w. Income recognition and interest expenses

Interest income and expenses are recognized on an accrual basis using the effective interest rate method (note 2e).

Interest from financial liabilities is recognized as an expense in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Interest income and expense recognized in the financial statement includes:
- *Interest on financial assets and liabilities measured at amortized costs using the effective interest rate method.*
- *Interest on all trading assets. Interest income on all trading financial assets are considered to be incidental to the Bank's trading operations.*

Loans which their principal and interest have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exist as to the timely collection, are generally classified as impaired loans.

Payment receipt from loan that subjected to impairment losses recognized as deduction to carrying value.

x. Recognition of revenues and expenses on fees and commissions

Significant fees and commissions which are directly related to credit activities or period of time are treated as deferred revenues and systematically amortized over the period of the related loan commitments using effective interest rate method.

For loan settled before maturity date, deffered fees or commissions recognized at settlement date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pengakuan pendapatan dan beban provisi dan komisi (lanjutan)

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu, namun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban bunga pada saat terjadinya transaksi.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan jangka waktu, ataupun tidak material menurut Bank diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

y. Pajak penghasilan

Bank menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari periode kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

Beban pajak kini untuk tahun berjalan dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam periode yang bersangkutan. Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda temporer antara dasar pelaporan komersial dan pajak atas aset dan liabilitas dan akumulasi rugi fiskal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Recognition of revenues and expenses on fees and commissions (continued)

Provision and commission that directly related with lending activities and time period, but not material according to the Bank, are recognized as income or interest expense at the time of transaction.

Fees and commissions which are not related to lending activities and period of time, or not material according to the bank are recognized as revenues or expenses at the time the transactions are made.

y. Income tax

The Bank applied SFAS No. 46 (Revised 2010), which prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position and transactionsand other events of the current period that are recognized in the financial statements. The revised FAS also prescribes an entity to present the underpayment/overpayment of income tax including its interest/penalty, if any, on comprehensive income during the period.

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year. Deferred taxes are recognized to reflect the tax effects of the temporary differences between financial and tax reporting bases of assets and liabilities and accumulated tax losses carry forwards.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted as of the statement of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statement of profit or loss and other comprehensive income, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima, atau jika mengajukan banding, pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

z. Laba per saham dasar

Bank menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2011), yang menetapkan prinsip penentuan dan penyajian laba per saham.

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilusif.

aa. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
b. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
c. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal bank yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional dengan menerapkan penyesuaian PSAK 5 (Revisi 2009). Pengambil keputusan operasional Bank adalah direksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset in the statement of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to taxation obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

z. Basic earnings per share

The Bank applied SFAS No. 56 (Revised 2011), which prescribes principles for the determination and presentation of earnings per share.

Basic earnings per share amounts are computed by dividing net income for the current year attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Dilutive earnings per share are computed by dividing income for the current year attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding that have been adjusted to the effect of all potential dilutive common shares.

aa. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

a. That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
b. Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
c. For which discrete financial information is available.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal reporting to the chief operating decision maker by applying the adjustment SFAS 5 (Revised 2009). The Bank's chief operating decision-maker is Board of Director.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus, dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain, termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Pengungkapan ini melengkapi pengungkapan pada manajemen risiko keuangan (catatan 43).

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi

a.1. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik counterparty yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan.

Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

a.2. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam catatan 2e.iv. untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are by past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are by management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

This disclosure supplements the commentary on financial risk management (note 43).

a. Key sources of estimation uncertainty

a.1. Allowance for impairment losses of financial assets

The specific counterparty component of the total allowances for impairment applies to financial assets evaluated individually for impairment and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the counterparty's financial situation and the net realizable value of any underlying collateral.

Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flow considered recoverable are independently approved by the Risk Management.

a.2. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in note 2e.iv. for financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a.3. Imbalan pascakerja

Present value atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuari berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atau asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi carrying amount atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya (pendapatan) untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan present value atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas surat berharga pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

b. Pertimbangan akuntansi yang penting dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank

Pertimbangan akuntansi penting yang dibuat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank meliputi:

b.1. Penilaian atas instrumen keuangan

Kebijakan akuntansi Bank atas pengukuran nilai wajar dibahas dalam catatan 2e.iv.

b.2. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kebijakan akuntansi Bank memberikan ruang atas aset dan liabilitas keuangan, pada saat awal pengakuan, untuk diklasifikasikan ditentukan ke dalam kategori berbeda dalam kondisi tertentu:

Dalam mengklasifikasikan aset keuangan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo", Bank telah menetapkan bahwa Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memilki aset keuangan tersebut hingga tanggal jatuh tempo seperti yang dipersyaratkan (catatan 2e).

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

a. Key sources of estimation uncertainty (continued)

a.3. Employee benefits

The present value of the employee benefits obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for pensions include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the service periods of employees.

b. Critical accounting judgments in applying the bank's accounting policies

Critical accounting judgments made in applying the Bank's accounting policies include:

b.1. Valuation of financial instruments

The Bank's accounting policy on fair value measurements is discussed in note 2e.iv.

b.2. Financial asset and liability classification

The Bank's accounting policies provide scope for assets and liabilities to be designated at inception into different accounting categories in certain circumstances:

In classifying financial assets as "held to maturity", the Bank has determined that Bank has the positive intention and ability to hold the assets until their maturity date as required (note 2e).

4. KAS / *4. CASH*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Kas	61.138.671	72.254.103	*Cash*
Kas pada ATM	9.322.550	11.720.710	*Cash in ATMs*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Dolar Amerika Serikat	14.973.431	17.959.236	*United States Dollar*
Mata uang asing lainnya	2.686.031	3.080.931	*Others foreign currencies*
Jumlah	**88.120.683**	**105.014.980**	***Total***

Kas dalam mata uang asing lainnya adalah Dolar Singapura, Poundsterling, Yen Jepang, Dolar Hongkong, Dolar Australia, Real Saudi Arabia, Dolar Kanada, Yuan, Ringgit Malaysia, Dolar Taiwan, dan Euro (lihat catatan 38).

Cash in other foreign currencies are denominated in Singapore Dollar, Great Britain Poundsterling, Yen Japanese, Hongkong Dollar, Australian Dollar, Saudi Arabian Real, Canadian Dollar, China Yuan Renminbi, Malaysian Ringgit, Taiwanese Dollars, and Euro (see note 38).

Kas ATM, *Cash in Safe*, dan *Cash in Transit* diasuransikan terhadap risiko asuransi kebongkaran kepada PT Avrist General Insurance (pihak ketiga).

Cash in ATMs, Cash in Safe and Cash in Transit are insured for burglary risks with PT Avrist General Insurance (third party).

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko tersebut.

The management of the Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA*

	2016	2015	
Rupiah	379.638.205	488.476.539	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	53.890.000	73.060.500	*United States Dollar*
Jumlah	**433.528.205**	**561.537.039**	***Total***

Sesuai PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 1 November 2010, GWM Primer dan Sekunder dalam mata uang Rupiah ditetapkan masing-masing sebesar 8,00% dan 2,50% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan mulai tanggal 1 Maret 2011, Bank memiliki kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah.

In line with BI regulation No. 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", starting November 1, 2010, Primary and Secondary GWM for Rupiah Currency amounted to 8.00% and 2.50% from total third party funds in Rupiah and starting March 1, 2011, the Bank has an obligation to fulfill the Minimum Reserve Requirement (GWM) Loan to Deposit Ratio in Rupiah.

Sesuai PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", mulai tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5,00% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing dan mulai tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8,00% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

In line with BI regulation No. 13/10/PBI/2011 dated February 9, 2011 regarding Changes on BI Regulation No. 12/19/PBI/2010 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", starting March 1, 2011 until May 31, 2011, GWM in foreign currency amounted to 5,00% from total third party funds in foreign currency and starting June 1, 2011, GWM in foreign currency amounted to 8,00% from total third party funds in foreign currency.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Sesuai PBI No. 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", GWM Sekunder dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 2,50% sampai dengan tanggal 30 September 2013, sebesar 3,00% sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013, sebesar 3,50% sejak 1 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 dan sebesar 4,00% dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah sejak 2 Desember 2013.

Sesuai PBI No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 7,50%,GWM Primer dalam mata uang valuta asing ditetapkan sebesar 8,00%, dan GWM Sekunder dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 4,00% dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah sejak 1 Desember 2015.

Sesuai PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013 tentang "GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing", GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 6,50%, GWM Primer dalam mata uang valuta asing ditetapkan sebesar 8,00%, dan GWM Sekunder dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 4,00% dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah sejak 16 Maret 2016.

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dibentuk oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari DPK.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan BI sebesar persentase tertentu.

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.

GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.

5. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA (continued)

In line with BI regulation No. 15/7/PBI/2013 dated September 26, 2013 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", Secondary GWM for Rupiah Currency amounted to 2.50% until September 30, 2013, amounted to 3.00% from October 1, 2013 until October 31, 2013, amounted to 3.50% from November 1, 2013 until December 1, 2013 and amounted to 4.00% from third party funds in Rupiah from December 2, 2013.

In line with BI regulation No. 17/21/PBI/2015 dated November 26, 2015 regarding Second Changes on BI Regulation No. 15/7/PBI/2013 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", Primary GWM for Rupiah Currency amounted to 7.50% , Primary GWM for Foreign Currency amounted to 8.00% and Secondary GWM for Rupiah Currency amounted to 4.00% from third party funds in Rupiah from December 1, 2015.

In line with BI regulation No. 18/3/PBI/2016 dated March 10, 2016 regarding Third Changes on BI Regulation No. 15/7/PBI/2013 regarding "GWM of Commercial Bank in Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currency", Primary GWM for Rupiah Currency amounted to 6.50%, Primary GWM for Foreign Currency amounted to 8.00% and Secondary GWM for Rupiah Currency amounted to 4.00% from third party funds in Rupiah from March 16, 2015.

Primary GWM is minimum deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with BI in certain percentage of TPF which is determined by BI.

Secondary GWM is minimum reserve that should be maintained by Bank in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), Certificate Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Government Debenture Debt (SUN) and/or Excess Reserve, in certain percentage determined by BI.

GWM LDR is the minimum reserve deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with Bank Indonesia amounting to a percentage of TPF are calculated based on the difference between LDR owned by the Bank with the LDR target.

GWM LFR is the minimum reserve deposits that should be maintained by Bank in the form of demand deposits with Bank Indonesia amounting to a percentage of TPF are calculated based on the difference between LFR owned by the Bank with the LFR target.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, GWM Bank masing-masing sebesar 21,84% dan 14,79%, untuk mata uang Rupiah, serta sebesar 8,10% dan 8,21%, untuk mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Bank memiliki LDR adalah masing-masing sebesar 84,18% dan 90,17%.

GWM Bank dalam Rupiah sebesar 21,84% dan 14,79%, terdiri dari GWM Utama sebesar 6,68% dan 7,63%, dengan menggunakan saldo rekening giro Rupiah pada BI dan GWM Sekunder sebesar 15,16% dan 7,16%, dengan menggunakan SBI dan Obligasi Pemerintah.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.

5. DEMAND DEPOSITS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2016 and 2015, GWM of the Bank were 21.84% and 14.79%, for Rupiah currency, and 8.10% and 8.21%, for foreign currency, respectively. As of December 31, 2016 and 2015 Bank had LDR which are equal to 84.18% and 90.17%, respectively.

GWM of the Bank in Rupiah was 21.84 % and 14.79%, which consists of Primary GWM of 6.68% and 7.63%, through Rupiah demand deposits with BI and Secondary GWM of 15.16% and 7.16%, through SBI and Government Bonds.

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has complied with the Bank Indonesia's regulation regarding the Minimum Statutory Reserve of Commercial Banks.

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak ketiga:			***Third parties:***
PT Bank Central Asia Tbk	6.458.238	4.503.339	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.727.860	1.697.358	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	977.478	137.206	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
Standard Chartered Bank	230.712	67.639	*Standard Chartered Bank*
Jumlah Rupiah	9.394.288	6.405.542	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Bank of Tokyo Mitsubishi	748.736	-	*Bank of Tokyo Mitsubishi*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Standard Chartered Bank	187.076.156	147.315.565	*Standard Chartered Bank*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	83.684.591	64.840.738	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	69.800.503	70.787.469	*PT Bank Central Asia Tbk*
United Overseas Bank (UOB)	5.327.614	2.003.472	*United Overseas Bank (UOB)*
Commonwealth Bank	3.989.306	3.917.929	*Commonwealth Bank*
PT Bank ICBC Indonesia	1.289.738	50.034.045	*PT Bank ICBC Indonesia*
Sumitomo Mitsui Bank	44.262	9.568.621	*Sumitomo Mitsui Bank*
Jumlah mata uang asing	351.960.906	348.467.839	*Total foreign currency*
Jumlah	**361.355.194**	**354.873.381**	***Total***

b. Berdasarkan kolektibilitas

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) yang berlaku, semua giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan lancar.

b. By collectibility

Based on the prevailing Bank Indonesia (BI) regulation, all demand deposits with other banks as of December 31, 2016 and 2015, were classified as current.

c. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat giro pada bank lain dengan pihak berelasi sebesar Rp 748.736.

c. By transaction with related party and third party

As of December 31, 2016, there were demand deposits with other banks with related party amounted Rp 748.736.

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan) / *DEMAND DEPOSITS WITH OTHER BANKS (continued)*

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: / ***d. Average interest rate per annum are as follows:***

	2016	2015	
Rupiah	0,97%	1,04%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,08%	0,07%	*Foreign currencies*

e. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai. / ***e.*** *As of December 31, 2016 and 2015, there were no impairment losses in demand deposits with other banks.*

f. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan. / ***f.*** *As of December 31, 2016 and 2015, there were no demand deposits with other banks pledged as cash collateral.*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN / *PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. By type and currency***

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Deposit facility	417.207.298	454.291.815	*Deposit facility*
Deposito berjangka			*Time deposits*
Bank ICBC Indonesia	-	25.000.000	*ICBC Indonesia Bank*
	417.207.298	479.291.815	
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Dolar Amerika			*United States Dollars*
Setoran jaminan	674.549	690.196	*Security deposits*
Jumlah mata uang asing	674.549	690.196	*Total foreign currency*
Jumlah	**417.881.847**	**479.982.011**	***Total***

b. Berdasarkan kolektibilitas / ***b. By collectibility***

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, penempatan pada BI dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan lancar. / *Based on the prevailing BI regulation, placements with BI and other banks as of December 31, 2016 and 2015 were classified as current.*

c. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga / ***c. By transaction with related party and third party***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat penempatan pada pihak berelasi. / *As of December 31, 2016 and 2015, there were no placements with related party.*

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

d. Berdasarkan jatuh tempo

d. By maturity

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Kurang dari 1 bulan	417.207.298	479.291.815	*Less than 1 month*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
6- 12 bulan	674.549	690.196	*6 - 12 months*
Jumlah	**417.881.847**	**479.982.011**	***Total***

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut :

e. Average interest rate per annum are as follows:

	2016	2015	
Rupiah	5,12%	5,70%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,00%	1,72%	*Foreign currency*

f. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang mengalami penurunan nilai.

f. *As of December 31, 2016 and 2015 there were no placements with other banks pledged as cash collateral.*

g. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan masing-masing sebesar Rp 674.549 dan Rp 690.196.

g. *As of December 31, 2016 and 2015 there were placements with other banks pledged as cash collateral amounting to Rp 674,549 and Rp 690,196, respectively.*

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan posisi keuangan.

h. *Placements with Bank Indonesia dan other banks will be settled within no more than 12 months after the date of the statements of financial position.*

8. EFEK-EFEK

8. SECURITIES

a. Berdasarkan jenis mata uang

a. By type and currency

	2016				
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Bunga yang belum diamortisasi** ***Unamortized interest***	**Premi (Diskonto)/** ***Premium (Discounts)***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Sertifikat Bank Indonesia	465.000.000	(9.691.107)	-	455.308.893	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	334.354.000	-	3.136.668	337.490.668	*Bonds*
Sukuk ijarah	62.000.000	-	316.876	62.316.876	*Sukuk ijarah*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel SKBDN	5.124.906	-	-	5.124.906	*Domestic Letter of Credit (SKBDN)*
Jumlah Rupiah	866.478.906	(9.691.107)	3.453.544	860.241.343	*Total Rupiah*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***8. SECURITIES (continued)***

a. Berdasarkan jenis mata uang (lanjutan) / ***a. By type and currency (continued)***

	2016				
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Bunga yang belum diamortisasi** ***Unamortized interest***	**Premi (Diskonto)/** ***Premium (Discounts)***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***	
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Obligasi	139.333.500	-	11.378.255	150.711.755	*Bonds*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel ekspor	1.230.352	-	-	1.230.352	*Export bills*
Jumlah mata uang asing	140.563.852	-	11.378.255	151.942.107	*Total foreign currency*
Jumlah	**1.007.042.758**	**(9.691.107)**	**14.831.799**	**1.012.183.450**	***Total***

	2015				
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Bunga yang belum diamortisasi** ***Unamortized interest***	**Premi (Diskonto)/** ***Premium (Discounts)***	**Nilai tercatat/** ***Carrying amount***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Sertifikat Bank Indonesia	80.000.000	(1.091.046)	-	78.908.954	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	361.354.000	-	4.070.076	365.424.076	*Bonds*
Sukuk ijarah	17.000.000	-	-	17.000.000	*Sukuk ijarah*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel SKBDN	3.132.923	-	-	3.132.923	*Domestic Letter of Credit (SKBDN)*
Jumlah Rupiah	461.486.923	(1.091.046)	4.070.076	464.465.953	*Total Rupiah*
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Obligasi	86.358.000	-	9.050.003	95.408.003	*Bonds*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel ekspor	8.841.219	-	-	8.841.219	*Export bills*
Jumlah mata uang asing	95.199.219	-	9.050.003	104.249.222	*Total foreign currency*
Jumlah	**556.686.142**	**(1.091.046)**	**13.120.079**	**568.715.175**	***Total***

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***8. SECURITIES (continued)***

b. Berdasarkan jatuh tempo / ***b. By maturity***

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Kurang dari 1 tahun	539.863.526	144.032.319	*Less than 1 year*
1 - 5 tahun	97.302.218	127.313.754	*1 - 5 years*
5 - 10 tahun	165.348.647	135.169.151	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	57.726.952	57.950.729	*More than 10 year*
Jumlah Rupiah	860.241.343	464.465.953	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Kurang dari 1 tahun	1.230.352	11.004.077	*Less than 1 year*
5 - 10 tahun	83.261.581	93.245.145	*5 - 10 years*
Lebih dari 10 tahun	67.450.174	-	*More than 10 year*
Jumlah mata uang asing	151.942.107	104.249.222	*Total foreign currency*
Jumlah	**1.012.183.450**	**568.715.175**	***Total***

c. Berdasarkan penerbit / ***c. By issuer***

	2016	2015	
Pemerintah	1.005.828.192	556.741.033	*Government bond*
Bukan pemerintah	6.355.258	11.974.142	*Non government bond*
Jumlah	**1.012.183.450**	**568.715.175**	***Total***

d. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga / ***d. By maturity and interest rate***

	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga/ Bagi hasil per tahun/ *Annual Interest rate/ Profit sharing*	
Pemerintah				***Government***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held to maturity***
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia/ *Certificates of Bank Indonesia*	< 1 tahun/ *< 1 year*	6,20% - 6,75%	*Bank Indonesia*
Obligasi Republik Indonesia ORI 010	Obligasi/ *Bonds*	15 Oktober 2016/ *October 15, 2016*	8,50%	*RI Government Bonds ORI 010*
Obligasi Pemerintah FR028	Obligasi/ *Bonds*	15 Juli 2017/ *July 15, 2017*	10,00%	*Government Bonds FR028*
Obligasi Pemerintah FR061	Obligasi/ *Bonds*	15 Mei 2022/ *May 15, 2022*	7,00%	*Government Bonds FR061*
Obligasi Pemerintah FR068	Obligasi/ *Bonds*	15 Maret 2034/ *March 15, 2034*	8,38%	*Government Bonds FR068*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***8. SECURITIES (continued)***

d. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan) / ***d. By maturity and interest rate (continued)***

	Jenis/ *Type*	Tanggal Jatuh tempo/ *Maturity date*	Suku bunga/ Bagi hasil per tahun/ *Annual Interest rate/ Profit sharing*	
Pemerintah				***Government***
Dimiliki hingga jatuh tempo				***Held to maturity***
Obligasi Pemerintah FR069	Obligasi/ *Bonds*	15 April 2019/ *April 15, 2019*	7,88%	*Government Bonds FR069*
Obligasi Pemerintah FR070	Obligasi/ *Bonds*	15 Maret 2024/ *March 15, 2024*	8,38%	*Government Bonds FR070*
Obligasi Pemerintah FR071	Obligasi/ *Bonds*	15 Maret 2029/ *March 15, 2029*	9,00%	*Government Bonds FR071*
Obligasi Pemerintah PBS006	Obligasi/ *Bonds*	15 September 2020/ *September 15, 2020*	8,25%	*Government Bonds PBS 006*
Obligasi Pemerintah Indon 0018	Obligasi/ *Bonds*	17 Januari 2018 *January 17, 2018*	6,88%	*Government Bonds Indon 18*
Obligasi Pemerintah Indon 0320	Obligasi/ *Bonds*	13 Maret 2020 *March 13, 2020*	5,88%	*Government Bonds Indon 0320*
Obligasi Pemerintah Indon 0422	Obligasi/ *Bonds*	14 April 2022 *April 14, 2022*	3,75%	*Government Bonds Indon 0422*
Obligasi Pemerintah Indon 1023	Obligasi/ *Bonds*	17 Oktober 2023 *October 17, 2023*	5,38%	*Government Bonds Indon 1023*
Obligasi Pemerintah Indon 0125	Obligasi/ *Bonds*	15 Januari 2025 *January 15, 2025*	4,13%	*Government Bonds Indon 0125*
Sukuk Ijarah Ritel Negara Indonesia SR-005	Obligasi/ *Bonds*	27 Pebruari 2016/ *February 27, 2016*	6,00%	*Sukuk Ijarah Indonesia Ritel Bond SR-005*
Sukuk Ijarah Ritel Negara Indonesia SR-007	Obligasi/ *Bonds*	11 Maret 2018/ *March 11, 2018*	8,25%	*Sukuk Ijarah Indonesia Ritel Bond SR-007*
Surat Pembendaharaan Negara 12170302	Obligasi/ *Bonds*	2 Maret 2017/ *March 2, 2017*	6,25% - 6,35%	*Treasury Bills 12170302*
Pinjaman yang diberikan dan piutang				***Loans and receivables***
Lain-lain	Wesel SKBDN dan wesel ekspor/ *Domestic letters of credit SKBDN and export bills*	< 1 tahun/ *< 1 year*	6,00% - 10,50%	*Others*

8. EFEK-EFEK (lanjutan) / ***8. SECURITIES (continued)***

e. Berdasarkan peringkat obligasi / ***e. By rating securities***

	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying amount*		
	2016	**2015**	**2016**	**2015**	
Rupiah:					***Rupiah:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Sertifikat Bank Indonesia	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	455.308.893	78.908.954	*Certificates of Bank Indonesia*
Obligasi	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	337.490.668	365.424.076	*Bonds*
Sukuk ijarah	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	62.316.876	17.000.000	*Sukuk ijarah*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel SKBDN	-	-	5.124.906	3.132.923	*Domestic Letter of Credit (SKBDN)*
Jumlah Rupiah			860.241.343	464.465.953	*Total Rupiah*
Mata uang asing:					***Foreign Currency:***
Dimiliki hingga jatuh tempo					*Held to maturity*
Obligasi Pemerintah RI	Baa3/BBB-	Baa3/BBB-	150.711.755	95.408.003	*RI Government bonds*
Pinjaman yang diberikan dan piutang					*Loans and receivables*
Wesel ekspor	-	-	1.230.352	8.841.219	*Export bills*
Jumlah mata uang asing			151.942.107	104.249.222	*Total foreign currency*
Jumlah			1.012.183.450	568.715.175	***Total***

Efek-efek di atas telah diperingkat oleh *Standard & Poors, Moodys, dan Fitch.*

Bonds rating classified by Standard & Poors, Moodys and Fitch.

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun / ***f. Annual average interest rate***

	2016	**2015**	
Rupiah	7,35%	7,88%	*Rupiah*
Mata uang asing	3,73%	5,16%	*Foreign currency*

g. Berdasarkan kolektibilitas / ***g. By collectibility***

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, efek-efek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 diklasifikasikan lancar.

Based on the prevailing BI regulation, securities as of December 31, 2016 and 2015 were classified as current.

h. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat efek-efek yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

h. *As of December 31, 2016 and 2015, there were no impairment losses in securities.*

The Bank's management believes that there was no allowance for impairment losses in securities to be provided as of December 31, 2016 and 2015.

9. TAGIHAN DAN LIABILITAS SPOT DAN DERIVATIF / *9. SPOT AND DERIVATIVE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

	2016			
		Nilai Wajar/ Fair Values		
	Jumlah nosional/ *Notional amount* (Jumlah penuh/ *full amount)*	Tagihan spot dan derivatif/ *Spot and derivative receivables*	Liabilitas spot dan derivatif/ *Spot and derivative liabilities*	
Transaksi				***Transactions***
Tidak terkait lindung nilai				*Non Hedging Instrument*
Kontrak spot valuta asing		-	-	*Foreign currency spots*
		-	**-**	

	2015				
			Nilai Wajar/ Fair Values		
	Jumlah nosional/ *Notional amount* (Jumlah penuh/ *full amount)*		Tagihan spot dan derivatif/ *Spot and derivative receivables*	Liabilitas spot dan derivatif/ *Spot and derivative liabilities*	
Transaksi					***Transactions***
Tidak terkait lindung nilai					*Non Hedging Instrument*
Kontrak spot valuta asing	USD	50.000	8.500	-	*Foreign currency spots*
	JPY	208.201	-	8.191	
			8.500	**8.191**	

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 kerugian dan keuntungan atas perubahan nilai wajar kontrak spot valuta asing yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp 309.- dan Rp 309.-

During the year ended December 31, 2016 and 2015 the losses and gains from changes in fair value of foreign currency spot which were recorded in the statements of profit or losses and other comprehensive income amounting to Rp 309,- and Rp 309,- respectively.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, seluruh tagihan spot dan derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 digolongkan lancar.

Based on prevailing Bank Indonesia regulation, all spot and derivatives receivables as of December 31, 2016 were classified as current.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat tagihan spot dan derivatif yang mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The Bank's management believes that there are no impairment in respect of spot and derivative receivables as of December 31, 2016 and 2015.

10. KREDIT YANG DIBERIKAN / *10. LOANS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Modal kerja	3.496.843.500	4.052.935.317	*Working capitals*
Investasi	872.130.651	1.383.063.205	*Investments*
Konsumen	688.870.258	477.509.964	*Consumers*
Ekspor	56.978.778	127.914.352	*Exports*
Karyawan	40.947.666	48.697.468	*Employees*
Jumlah Rupiah	5.155.770.854	6.090.120.306	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Modal kerja	48.582.108	152.323.910	*Working capitals*
Ekspor	104.786.358	174.550.734	*Exports*
Investasi	4.489.501	60.707.835	*Investments*
Jumlah mata uang asing	157.857.967	387.582.479	*Total foreign currency*
Jumlah	5.313.628.821	6.477.702.785	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(107.700.767)	(101.184.113)	*Allowance for impaiment losses*
Jumlah - bersih	**5.205.928.054**	**6.376.518.672**	***Total - net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS (continued)*

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

2016

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	3.204.684.313	108.212.937	34.173.630	9.007.405	140.765.214	3.496.843.500	*Working capital*
Investasi	743.486.065	98.378.674	2.247.881	3.515.955	24.502.076	872.130.651	*Investments*
Konsumen	600.167.633	54.634.834	11.536.969	11.422.554	11.108.268	688.870.258	*Consumers*
Ekspor	53.545.458	-	350.000	-	3.083.320	56.978.778	*Exports*
Karyawan	40.947.666	-	-	-	-	40.947.666	*Employees*
	4.642.831.136	261.226.445	48.308.480	23.945.914	179.458.878	5.155.770.854	
Mata uang asing:							*Foreign currency:*
Modal kerja	48.582.108	-	-	-	-	48.582.108	*Working capital*
Ekspor	74.128.732	-	-	-	30.657.626	104.786.358	*Exports*
Investasi	898.130	3.591.371	-	-	-	4.489.501	*Investments*
	123.608.970	3.591.371	-	-	30.657.626	157.857.967	
	4.766.440.106	264.817.816	48.308.480	23.945.914	210.116.504	5.313.628.820	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.567.118)	(16.857.397)	(3.699.353)	(2.363.566)	(60.213.333)	(107.700.767)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**4.741.872.988**	**247.960.419**	**44.609.128**	**21.582.348**	**149.903.171**	**5.205.928.053**	***Total - net***

2015

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	3.869.416.696	47.908.077	26.434.408	15.241.272	93.934.864	4.052.935.317	*Working capital*
Investasi	1.219.366.343	47.743.918	19.876.390	3.373.376	92.703.178	1.383.063.205	*Investments*
Konsumen	443.067.729	15.465.589	3.502.726	5.028.452	10.445.468	477.509.964	*Consumers*
Ekspor	102.288.190	20.705.404	1.837.438	-	3.083.320	127.914.352	*Exports*
Karyawan	48.697.468	-	-	-	-	48.697.468	*Employees*
	5.682.836.426	131.822.988	51.650.962	23.643.100	200.166.830	6.090.120.306	
Mata uang asing:							*Foreign currency:*
Modal kerja	152.323.910	-	-	-	-	152.323.910	*Working capital*
Ekspor	124.374.159	18.807.833	-	-	31.368.742	174.550.734	*Exports*
Investasi	41.815.800	18.892.035	-	-	-	60.707.835	*Investments*
	318.513.869	37.699.868	-	-	31.368.742	387.582.479	
	6.001.350.295	169.522.856	51.650.962	23.643.100	231.535.572	6.477.702.785	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.708.699)	(24.746.828)	(4.014.172)	(3.063.500)	(41.650.913)	(101.184.113)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.973.641.596**	**144.776.028**	**47.636.790**	**20.579.600**	**189.884.659**	**6.376.518.672**	***Total - net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / *10. LOANS (continued)*

c. Berdasarkan sektor ekonomi / *c. By economic sectors*

	2016						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mentions***	**Kurang lancar *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah:							*Rupiah:*
Industri	1.255.945.198	65.805.188	10.022.051	269.618	42.027.522	1.374.069.576	*Industry*
Pertanian	1.792.876	17.980	-	-	-	1.810.856	*Agricultures*
Perdagangan	1.810.166.470	46.089.976	25.656.596	7.833.369	75.639.699	1.965.386.111	*Trading*
Listrik, gas, dan air	26.171.048,74	-	-	-	-	26.171.049	*Electricity, gas and water*
Transportasi	44.459.958	1.625.033	-	1.420.029	5.189.333	52.694.354	*Transportations*
Konstruksi	300.725.536	32.885.870	600.748	12.500	29.109.029	363.333.683	*Constructions*
Pertambangan	2.673.833	-	-	-	-	2.673.833	*Minings*
Lain-lain	1.200.896.215	114.802.400	12.029.085	14.410.398	27.493.294	1.369.631.392	*Others*
	4.642.831.136	261.226.446	48.308.480	23.945.914	179.458.878	5.155.770.854	
Mata uang asing:							*Foreign currency:*
Industri	114.187.516	-	-	-	30.657.626	144.845.142	*Industry*
Perdagangan	6.736.250	-	-	-	-	6.736.250	*Trading*
Transportasi	-	-	-	-	-	-	*Transportation*
Konstruksi	-	-	-	-	-	-	*Constructions*
Pertambangan	-	-	-	-	-	-	*Minings*
Lain-lain	2.685.204	3.591.371	-	-	-	6.276.575	*Others*
	123.608.970	3.591.371	-	-	30.657.626	157.857.967	
	4.766.440.106	264.817.816	48.308.480	23.945.914	210.116.504	5.313.628.821	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(24.567.118)	(16.857.397)	(3.699.353)	(2.363.566)	(60.213.333)	(107.700.767)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**4.741.872.988**	**247.960.419**	**44.609.128**	**21.582.348**	**149.903.171**	**5.205.928.054**	***Total-net***

	2015						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mentions***	**Kurang lancar *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah:							*Rupiah:*
Industri	1.532.219.284	35.170.574	16.952.319	1.276.868	29.494.407	1.615.113.451	*Industry*
Pertanian	1.669.691	159.959	-	-	-	1.829.650	*Agricultures*
Perdagangan	2.256.997.087	36.228.267	20.879.416	11.155.100	70.809.968	2.396.069.838	*Trading*
Listrik, gas, dan air	-	-	-	-	-	-	*Electricity, gas and water*
Transportasi	71.745.215	2.239.368	-	4.500.000	682.134	79.166.717	*Transportations*
Konstruksi	435.369.457	22.331.995	48.563	47.788	20.852.252	478.650.054	*Constructions*
Pertambangan	6.968.832	-	5.999.320	-	47.323.592	60.291.744	*Minings*
Lain-lain	1.377.866.862	35.692.825	7.771.344	6.663.345	31.004.476	1.458.998.852	*Others*
	5.682.836.426	131.822.988	51.650.962	23.643.100	200.166.830	6.090.120.306	
Mata uang asing:							*Foreign currency:*
Industri	210.006.367	18.807.833	-	-	31.368.742	260.182.942	*Industry*
Perdagangan	49.139.462	-	-	-	-	49.139.462	*Trading*
Transportasi	-	-	-	-	-	-	*Transportation*
Konstruksi	3.023.188	-	-	-	-	3.023.188	*Constructions*
Pertambangan	2.513.258	-	-	-	-	2.513.258	*Minings*
Lain-lain	53.831.593	18.892.035	-	-	-	72.723.629	*Others*
	318.513.869	37.699.868	-	-	31.368.742	387.582.479	
	6.001.350.295	169.522.856	51.650.962	23.643.100	231.535.572	6.477.702.785	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.708.699)	(24.746.828)	(4.014.172)	(3.063.500)	(41.650.913)	(101.184.113)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.973.641.596**	**144.776.028**	**47.636.790**	**20.579.600**	**189.884.659**	**6.376.518.672**	***Total-net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

d. Berdasarkan periode kredit dan sisa umur jatuh tempo

d. By loan period and maturity date

Golongan jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan periode kredit sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The classification of loans by loan period, which is stated in the loan agreements and the remaining period until maturity were as follows:

	2016		2015		
	Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *By remaining period until maturity*	**Berdasarkan periode perjanjian/ *By loan period***	**Berdasarkan sisa umur jatuh tempo/ *By remaining period until maturity***	**Berdasarkan periode perjanjian/ *By loan period***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Kurang dari 1 tahun	3.202.563.609	463.512.374	3.496.248.292	300.200.654	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	330.232.529	2.781.911.118	306.800.517	3.120.486.874	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	1.020.793.278	290.327.346	1.532.106.672	462.803.537	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	602.181.438	1.620.020.016	754.964.825	2.206.629.241	*Over than 5 years*
Jumlah Rupiah	5.155.770.854	5.155.770.854	6.090.120.306	6.090.120.306	*Total Rupiah*
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Kurang dari 1 tahun	152.658.044	51.591.240	283.270.978	48.219.192	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	1.608.553	101.420.928	2.509.150	229.469.352	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	3.591.371	-	43.275.848	3.820.366	*2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	-	4.845.799	58.526.503	106.073.569	*Over than 5 years*
Jumlah mata uang asing	157.857.967	157.857.967	387.582.479	387.582.479	*Total foreign currency*
Jumlah	5.313.628.821	5.313.628.821	6.477.702.785	6.477.702.785	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(107.700.767)	(107.700.767)	(101.184.113)	(101.184.113)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah-bersih	**5.205.928.054**	**5.205.928.054**	**6.376.518.672**	**6.376.518.672**	***Total-net***

e. Berdasarkan pihak berelasi

e. By related parties

	2016	2015	
Pihak berelasi:			***Related parties:***
PT Bintang Warna Mandiri	14.723.036	21.412.046	*PT Bintang Warna Mandiri*
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	2.755.342	11.050.214	*PT Mitra Pinasthika Mustika Finance*
PT Antelas	432.694	714.559	*PT Antelas*
PT Central Texindo	-	12.820.050	*PT Central Texindo*
Keluarga direksi & karyawan kunci	23.383.125	5.138.611	*Directors family and key personnel*
	41.294.197	51.135.480	
Pihak ketiga	5.272.334.624	6.426.567.305	*Third*
Jumlah	5.313.628.821	6.477.702.785	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(107.700.767)	(101.184.113)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah-bersih	**5.205.928.054**	**6.376.518.672**	***Total-net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e. Berdasarkan pihak berelasi (lanjutan)

Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank harus memenuhi persyaratan karyawan tetap. Kredit diberikan untuk membiayai berbagai kebutuhan yang sifatnya primer seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan dan berbagai keperluan lainnya. Jangka waktu kredit maksimal selama 10 bulan.

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti pada pihak ketiga. Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi, seluruhnya berkualitas lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dibebani bunga 5% - 32% dan 5% - 32% per tahun untuk tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan jangka waktu pelunasan maksimal selama 15 tahun.

10. LOANS (continued)

e. By related parties (continued)

The loans to the Bank employees with requirement as permanent employee. The loan is granted to finance various primary needs such as expenses for education, health, nuptials and other various needs. The maximum period of loan is 10 months.

Related party loans are granted based on term and condition similar to those of loans granted to third parties. All loans granted to related parties are classified as current as of December 31, 2016 and 2015.

Interest on loans granted to related parties is 5% - 32% and 5% - 32% per annum as of December 31, 2016 and 2015 , respectively with maximum payment period of 15 years.

f. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

f. Average interest rate per annum

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pinjaman rekening koran	13,55%	13,95%	*Demand deposits loans*
Pinjaman berjangka	12,80%	13,44%	*Time loans*
Kredit kendaraan bermotor	13,77%	13,43%	*Vehicle ownership loans*
Kredit kepemilikan rumah	12,77%	13,51%	*Housing loans*
Kredit time loan flat	21,43%	13,52%	*Time loans flat*
Kredit mikro	8,85%	14,86%	*Micro loans*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Kredit modal kerja	4,56%	6,42%	*Working capital loans*

g. Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 rincian kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

g. Summary of non performing loans by economic sector

As of December 31, 2016 and 2015 detail of non performing loans (substandard, doubtful and loss) according to economic sector are as follows:

	2016		2015		
	Kredit bermasalah/ *Non performing loan*	**Minimum cadangan/ *Minimum allowance***	**Kredit bermasalah/ *Non performing loan***	**Minimum cadangan/ *Minimum allowance***	
Rupiah:					***Rupiah:***
Perdagangan	109.129.665	18.774.179	102.844.484	21.201.598	*Trading*
Industri	52.319.191	9.036.885	47.723.594	10.743.411	*Industry*
Lain-lain	90.264.417	19.018.632	124.892.814	15.632.558	*Others*
Jumlah Rupiah	**251.713.273**	**46.829.697**	**275.460.892**	**47.577.567**	***Total Rupiah***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

g. Ikhtisar kredit bermasalah berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

10. LOANS (continued)

g. Summary of non performing loans by economic sector (continued)

	2016		2015		
	Kredit bermasalah/ *Non performing loan*	**Minimum cadangan/ *Minimum allowance***	**Kredit bermasalah/ *Non performing loan***	**Minimum cadangan/ *Minimum allowance***	
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Perdagangan	-	-	-	-	*Trading*
Industri	30.657.626	19.446.556	31.368.742	1.151.019	*Industry*
Lain-lain	-	-	-	-	*Others*
Jumlah Rupiah	**30.657.626**	**19.446.556**	**31.368.742**	**1.151.019**	***Total Rupiah***
Jumlah-bersih	**282.370.899**	**66.276.253**	**306.829.634**	**48.728.586**	***Total-net***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 kredit yang tergolong sebagai kredit bermasalah masing-masing sebesar Rp 282.370.899 dan Rp 306.829.634. Penurunan kredit bermasalah 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2015 sebesar 7,97%.

As of December 31, 2016 and 2015, loans that classified as non performing loans amounted to Rp 282,370,899 and Rp 306,829,634, respectively. The decrease in non-performing loans December 31, 2016 compared December 31, 2015 was 7.97%.

Langkah-langkah Bank untuk mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan cara:

- Memberikan Surat Pemberitahuan keterlambatan kewajiban untuk membayar ke Bank.
- Memberikan Surat Peringatan I, II dan yang terakhir.
- Melakukan panggilan untuk menghadap ke Bank.
- Melakukan Penagihan dengan mendatangi debitur bermasalah.
- Melakukan musyawarah untuk debitur yang akan menjual aset jaminan atau aset yang lain diluar jaminan.
- Bila debitur bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha untuk disehatkan kembali akan diajukan restrukturisasi.
- Bila debitur tidak dapat bekerja sama maka akan dilakukan proses hukum.

Steps taken by the Bank to reduce non-performing loans are as follows:

- *Giving Notice Letter of Delay in the obligation to pay to the Bank.*
- *Giving Warning Letter I, II, and final Warning Letter.*
- *Making a call to overlook the Bank.*
- *Perform billing by visiting NPL debtors.*
- *Conduct deliberation to debtor who would sell the asset collateral or other assets outside guarantee.*
- *If the debtor has the prospect of NPL that still attempt to brought back to health will be proposed restructuring.*
- *If the debtor is not cooperative will be made to the legal process.*

h. Kredit yang direstrukturisasi

h. Restructured loans

Rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan jenis dan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Details of restructured loans by type and collectibility as of December 31, 2016 and 2015 as follows:

	2016						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mentions***	**Kurang lancar *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	48.262.396	3.229.978	165.278	932.602	1.295.791	53.886.045	*Working capital*
Investasi	29.229.275	59.630.835	625.022	222.222	2.988.110	92.695.465	*Investments*
Konsumen	571.631	1.293.379	-	-	-	1.865.009	*Consumers*
	78.063.303	64.154.192	790.300	1.154.824	4.283.901	148.446.519	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(399.277)	(417.892)	(136.832)	(119.395)	(501.061)	(1.574.457)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**77.664.025**	**77.664.025**	**653.467**	**77.664.025**	**3.782.840**	**146.872.062**	***Total - net***

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS (continued)***

h. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan) / ***h. Restructured loans (continued)***

	2015						
	Lancar/ ***Current***	**Dalam perhatian khusus/** ***Special mentions***	**Kurang lancar** ***Substandard***	**Diragukan/** ***Doubtful***	**Macet/** ***Loss***	**Jumlah/** ***Total***	
Rupiah:							*Rupiah:*
Modal kerja	9.620.149	2.188.349	970.803	134.045	4.892.948	17.806.293	*Working capital*
Investasi	17.850.669	4.751.347	121.716	504.907	48.906.875	72.135.515	*Investments*
Konsumen	1.186.220	-	-	-	-	1.186.220	*Consumers*
	28.657.039	6.939.695	1.092.519	638.952	53.799.823	91.128.028	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(169.452)	(185.151)	(13.369)	(44.913)	(3.652.112)	(4.064.997)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**28.487.587**	**77.664.025**	**1.079.150**	**77.664.025**	**50.147.711**	**87.063.031**	***Total - net***

Pada tanggal 31 Desember 2016, penyisihan kerugian minimum yang dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah Rp 121.326.00 (2015: Rp 111.824.500), sehingga pemenuhan cadangan adalah sebesar 88,77% (2015: 90,48%).

On December 31, 2016, the minimum allowance for losses is calculated based on the provisions of Bank Indonesia Rp 121,326,000 (2015: Rp 111,824,500), thus fulfilling a reserve of 88.77% (2015: 90.48%).

i. Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lainnya.

i. *Loans are generally collateral by powers of atterney to mortgage or sell, time deposits and by other guarantees.*

j. Kredit properti merupakan seluruh kredit terkait properti yang diberikan kepada debitur termasuk di dalamnya kredit real estate. Saldo kredit properti pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 771.804.629. dan Rp 1.095.561.065.

j. *Property loans are all property related to loans granted to the debtors including real estate loans. Balances of property loans on December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 771,804,629 and Rp1,095,561,065, respectively.*

k. Pemberian kredit real estate terhadap total kredit yang diberikan Bank pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 140.881.485 (2,65%), Rp 349.079.925 (5,39%).

k. *Real estate loans to total loans on December 31, 2016 and 2015 , amounted to Rp 140,881,485 (2.65%), Rp 349,079,925 (5.39%), respectively.*

l. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 rasio *Non Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut:

l. *As of December 31, 2016 and 2015 Non Performing Loans (NPL) ratio are as follows:*

	2016	**2015**	
NPL *Gross*	5,31%	4,74%	*Gross*
NPL *Netto*	4,07%	3,98%	*Net NPL*

m. Rasio kredit terhadap total simpanan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 84,18% dan 90,17%

m. *Loan to Deposit ratio as of December 31, 2016 and 2015, are equal to 84.18%, and 90.17%, respectively.*

n. Rasio kredit Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 1,90% dan 3,11%

n. *The ratio of micro business loans to the total loans as of December 31, 2016 and 2015 was 1.90%, and 3.11%, respectively.*

o. Rasio kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap total kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 47,46% dan 47,95%.

o. *The ratio of loans extended to Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) to the total loans as of December 31, 2016 and 2015 was 47.46%, and 47.95%, respectively.*

10. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS (continued)***

p. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: / ***p.*** *The movements in the allowance for impairment losses are as follows:*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Saldo awal	93.831.167	74.469.967	*Beginning balance*
Pembentukan dalam tahun berjalan	89.373.346	39.034.422	*Provision during the year*
Penghapusan selama tahun berjalan	(95.466.947)	(19.673.222)	*Written-off during the year*
Saldo akhir	87.737.566	93.831.167	*Ending balance*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Saldo awal	7.352.946	5.015.188	*Beginning balance*
Pembentukan dalam tahun berjalan	11.742.890	2.585.570	*Provision during the year*
Penghapusan selama tahun berjalan	-	(706.091)	*Written-off during the year*
Selisih kurs	867.365	458.278	*Exchanges rate difference*
Saldo akhir	19.963.201	7.352.946	*Ending balance*
Jumlah	**107.700.767**	**101.184.113**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

The management believes that the amount of allowance for impairment losses is adequate to cover the potential losses arising from bad loans.

Berikut ini adalah saldo kredit bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai yang dievaluasi secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

As of December 31, 2016 and 2015, the gross loan balances and allowance for impairment losses that are assessed from individual and collective impairment, are as follows:

	2016	2015	
Kredit yang dievaluasi secara individual	425.070.973	359.222.737	*Loan assessed by individual impairment*
Penurunan nilai individual	(44.049.684)	(33.134.704)	*Individual impairment*
Sub jumlah-bersih	381.021.289	326.088.033	*Sub total-net*
Kredit yang dievaluasi secara kolektif	4.888.557.849	6.118.480.048	*Written-off during the year* / *Ending balance*
Penurunan nilai kolektif	(63.651.084)	(68.049.409)	
Sub jumlah-bersih	4.824.906.765	6.050.430.639	*Sub total-net*
Total-bersih	**5.205.928.054**	**6.376.518.672**	***Total-net***

q. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) / ***q. Legal Lending Limit (BMPK)***

Kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Bank telah mematuhi peraturan BMPK untuk pihak berelasi dan pihak ketiga.

In compliance with the Bank Indonesia regulation on Legal Lending Limit ("BMPK"), as stipulated in the Bank Indonesia regulation No. 8/13/PBI/2006 dated October 5, 2006. As of December 31, 2016 and 2015 , the Bank has complied with legal lending limit for related parties and third parties.

Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank tidak melanggar atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

As at December 31, 2016 and 2015 , the bank did not breach its Legal Lending Limit (BMPK) which estabslish by Bank Indonesia

11. TAGIHAN DAN UTANG AKSEPTASI / *11. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND PAYABLES*

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2016		2015		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	
Rupiah:					***Rupiah:***
Bank					*Bank*
Pihak ketiga	-	-	-	-	*Third parties*
Jumlah Rupiah	-	-	-	-	*Total Rupiah*
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Bank					*Bank*
Pihak berelasi	-	4.011.504	-	7.738.254	*Related parties*
Pihak ketiga	-	6.330.054	-	12.858.800	*Third parties*
Debitur					*Debtors*
Pihak berelasi	-	-	2.802.949	-	*Related parties*
Pihak ketiga	6.330.054	-	17.794.105	-	*Third parties*
Jumlah mata uang asing	6.330.054	10.341.558	20.597.054	20.597.054	*Total foreign currency*
Jumlah	**6.330.054**	**10.341.558**	**20.597.054**	**20.597.054**	***Total***

b. Berdasarkan jatuh tempo / *b. By Maturity date*

	2016		2015		
	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Utang akseptasi/ *Acceptance payables*	
Rupiah:					***Rupiah:***
1 - 3 bulan	-	-	-	-	*1 -3 months*
Jumlah Rupiah	-	-	-	-	*Total Rupiah*
Mata uang asing:					***Foreign currency:***
Kurang dari 1 bulan	6.330.054	1.859.744	8.976.191	8.976.191	*Less than 1 month*
1 - 3 bulan	-	8.481.814	1.233.303	1.233.303	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	-	-	10.387.560	10.387.560	*3 - 6 months*
Jumlah mata uang asing	6.330.054	10.341.558	20.597.054	20.597.054	*Total foreign currency*
Jumlah	**6.330.054**	**10.341.558**	**20.597.054**	**20.597.054**	***Tota***

c. Berdasarkan kolektibilitas tagihan akseptasi / *c. By collectibility of acceptance receivables*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tagihan akseptasi diklasifikasikan lancar.

As of December 31, 2016 and 2015, acceptance receivables are classified as current.

d. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat tagihan akseptasi yang mengalami penurunan nilai.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai tagihan akseptasi yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

d. *As of December 31, 2016 and 2015, there were no impairment losses on acceptance receivables.*

The Bank's management believes that there were no allowance for impairment losses on acceptance receivables to be provided as of December 31, 2016 and 2015.

12. ASET TETAP / *12. FIXED ASSETS*

	2016							
	Tanah/ *Land*	Gedung dan instalasi/ *Buildings and installations*	Inventaris kantor/ *Office equipment*	Mesin-mesin kantor/ *Office machineries*	Kendaraan bermotor/ *Vehicles*	Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Jumlah/ *Total*	
Harga perolehan:								***Cost:***
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Saldo 1 Januari 2016	12.832.038	7.257.062	60.207.652	15.548.653	1.736.022	-	97.581.427	*Balance January 1, 2016*
Penambahan/ Reklasifikasi	-	-	4.062.979	1.149.693	-	115.110	5.327.781	*Addition/ Reclassification*
Pengurangan/ Reklasifikasi	-	-	(667.368)	(350.252)	(284.525)	(115.110)	(1.417.255)	*Deduction/ Reclassification*
Saldo 31 Desember 2016	12.832.038	7.257.062	63.603.262	16.348.094	1.451.497	-	101.491.953	*Balance December 31, 2016*
Akumulasi penyusutan:								***Accumulated depreciation:***
Saldo 1 Januari 2016	-	5.887.869	49.636.013	11.656.573	1.388.368	-	68.568.823	*Balance January 1, 2016*
Penambahan/ Reklasifikasi	-	245.877	4.860.903	1.344.770	143.845	-	6.595.395	*Addition/ Reclassification*
Pengurangan/ Reklasifikasi	-	-	(667.368)	(339.739)	(284.525)	-	(1.291.632)	*Deduction/*
Saldo 31 Desember 2016	-	6.133.746	53.829.548	12.661.604	1.247.688	-	73.872.586	*Balance December 31, 2016*
Nilai buku bersih 31 Desember 2016							**27.619.367**	*Net book value December 31, 2016*

	2015							
	Tanah/ *Land*	Gedung dan instalasi/ *Buildings and installations*	Inventaris kantor/ *Office equipment*	Mesin-mesin kantor/ *Office machineries*	Kendaraan bermotor/ *Vehicles*	Aset dalam penyelesaian/ *Construction in progress*	Jumlah/ *Total*	
Harga perolehan:								***Cost:***
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Saldo 1 Januari 2015	12.832.038	7.257.062	56.019.955	15.216.015	1.759.322	68.000	93.152.392	*Balance #*
Penambahan/ Reklasifikasi	-	-	5.312.607	542.642	-	281.046	6.136.295	*Addition/ Reclassification*
Pengurangan/ Reklasifikasi	-	-	(1.124.910)	(210.004)	(23.300)	(349.046)	(1.707.260)	*Deduction/ Reclassification*
Saldo 31 Desember 2015	12.832.038	7.257.062	60.207.652	15.548.653	1.736.022	-	97.581.427	*Balance December 31, 2015*
Akumulasi penyusutan:								***Accumulated depreciation:***
Saldo 1 Januari 2014	-	5.652.319	44.963.244	10.360.098	1.233.041	-	62.208.701	*Balance #*
Penambahan/ Reklasifikasi	-	235.551	5.796.200	1.504.370	178.627	-	7.714.748	*Addition/ Reclassification*
Pengurangan/ Reklasifikasi	-	-	(1.123.431)	(207.895)	(23.300)	-	(1.354.626)	*Deduction/*
Saldo 31 Desember 2015	-	5.887.869	49.636.013	11.656.573	1.388.368	-	68.568.823	*Balance December 31, 2015*
Nilai buku bersih 31 Desember 2015							**29.012.604**	*Net book value December 31, 2015*

12. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 6.595.395 dan Rp 7.714.748 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (lihat catatan 29).

Jumlah penambahan aset tetap masing-masing adalah sebesar Rp 5.327.781 dan Rp 6.136.295 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari penjualan kendaraan, mesin, dan inventaris kantor, dengan nilai tercatat dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.417.255 dan Rp 1.291.632.

Pengurangan aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari penjualan kendaraan, mesin, dan inventaris kantor, dengan nilai tercatat dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.707.260 dan Rp 1.354.626.

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut :

12. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation of fixed assets charged to general and administrative expenses amounted to Rp 6,595,395 and Rp 7,714,748 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively (see note 29).

The addition to fixed assets totalling Rp 5,327,781 and Rp 6,136,295 ifor the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively.

The deductions of fixed assets for the year ended December 31, 2016 consist of sale of vehicles, machine, and office equipment, with carrying value and accumulated depreciation totaling Rp 1,417,255 and Rp 1,291,632, respectively.

The deductions of fixed assets for the year ended December 31, 2015 consist of sale of vehicles, machine, and office equipment, with carrying value and accumulated depreciation totaling Rp 1,707.260 and Rp 1,354.626, respectively.

The details of the sale of fixed assets are as follows:

	2016	2015	
Harga jual	132.409	13.882	*Selling Price*
Nilai buku	(10.513)	(3.589)	*Net book value*
Keuntungan penjualan aset tetap	**121.896**	**10.293**	***Gain on sale of fixed assets***

Hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha yang dapat diperbaharui. Sisa umur hak atas tanah tersebut berkisar antara 1 tahun sampai dengan 22 tahun dan dapat diperpanjang. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah, karena seluruh tanah didapatkan secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang sah.

Landrights are held under renewable "Sertifikat Hak Guna Bangunan" and "Hak Guna Usaha" titles. The remaining terms of the rights ranged from 1 to 22 years and can be extended. The management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights, because all land were obtained legally and supported by valid ownership evidences.

Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya kepada PT. Avrist General Insurance (bukan perusahaan berelasi) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 138.740.901.673 (nilai penuh) dan Rp 131.009.120.709 (nilai penuh).

Fixed asset except for land, are covered by insurance against losses by fire and other risks with PT. Avrist General Insurance (non-related party) for the years ended December 31, 2016 and 2015 with insurance coverage Rp 138,740,901,673 (full amount) and Rp 131,009,120,709 (full amount).

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan terjadi.

The management of the Bank believes that the amount is adequate to cover possible losses from such risks.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Estimasi nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp 35.681.517.000.

Berdasarkan penilaian manajemen Bank, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen telah mengkaji ulang estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebesar Rp 54.855.437.678 (nilai penuh).

12. FIXED ASSETS (continued)

The estimated fair value of the Bank's land and buildings as of December 31, 2016 based on Tax Object Sales Value (NJOP) is amounted to Rp 35,681,517,000.

By the assessment of the management of the Bank, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of fixed assets as of December 31, 2016 and 2015.

Management has reviewed the economic useful life, depreciation method and residual value of fixed assets as of December 31, 2016 and 2015.

As of December 31, 2016, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still used amounted to Rp 54,855,437,678 (full amount).

13. ASET TAK BERWUJUD

Aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri dari:

13. INTANGIBLE ASSETS

Intangible assets as of December 31, 2016 and 2015 consist of the following:

	2016				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan:					***Cost:***
Perangkat lunak	7.619.045	1.611.500	-	9.230.545	*Software*
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	3.961.221	2.041.940	-	6.003.161	*Software*
Nilai buku bersih	**3.657.824**			**3.227.384**	***Net book value***

	2015				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Harga perolehan:					***Cost:***
Perangkat lunak	6.104.861	1.514.184	-	7.619.045	*Software*
Akumulasi amortisasi:					***Accumulated amortization:***
Perangkat lunak	2.233.093	1.728.128	-	3.961.221	*Software*
Nilai buku bersih	**3.871.768**			**3.657.824**	***Net book value***

Beban amortisasi untuk periode 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 2.041.940 dan 1.728.128 yang dibebankan dalam beban umum dan administrasi (lihat catatan 29).

Amortization charged to general and administrative expense for period December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 2,041,940 and 1,728,128 (see note 29).

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

	2016	2015	
Biaya dibayar di muka	48.110.360	25.081.576	*Prepaid expenses*
Pendapatan bunga yang akan diterima	43.190.793	38.294.211	*Accrued interest incomes*
Uang muka pajak	21.965.958	7.396.892	*Tax advances*
Agunan yang diambil alih - bersih	8.835.840	30.910.259	*Foreclosed assets - net*
Tagihan terkait dengan transaksi ATM	5.893.700	1.334.854	*Receivables related to ATM transactions*
Persediaan barang cetakan, persediaan hadiah, dan perlengkapan kantor	5.295.103	2.440.273	*Printing materials, gift and office supplies inventories*
Setoran jaminan	3.916.177	4.634.592	*Security deposits*
Piutang transaksi nasabah	-	95	*Receivables from customer transactions*
Aset lainnya	12.400.244	3.103.767	*Others assets*
Jumlah	**149.608.175**	**113.196.519**	***Total***

Biaya dibayar di muka terutama terdiri dari sewa yang dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka, renovasi di bayar dimuka dan lainnya.

Prepaid expenses mainly comprise prepaid rents, prepaid insurance, prepaid renovations and others.

Agunan yang diambil alih terutama terdiri dari tanah dan bangunan.

Foreclosed assets mainly comprise land and building.

Setoran jaminan terutama terdiri dari setoran jaminan ATM provider, ALTO, sewa gedung dan lainnya.

Security deposits mainly comprise security deposits ATM provider, ALTO, building rental and others.

Setoran jaminan merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Security deposits is financial assets which classified as loans and receivables.

Bank harus melakukan pengungkapan atas nilai wajar atas aset keuangannya. Estimasi nilai wajar dari aset lain-lain yang merupakan aset tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus diterima saat ada permintaan Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar dari aset keuangan ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

The Bank should disclose the fair value of financial assets. The estimated fair value of other assets which are non interest bearing assets and with indefinite term, is the amount that should be received on demand. As of December 31, 2016 and 2015, fair value of these financial assets is its carrying value.

Aset lainnya terdiri dari pos dalam penyelesaian dan lainnya.

Other assets consist of suspense account and others.

Perubahan penyisihan kerugian untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut :

The changes in the allowance for possible losses on foreclosed assets are as follows :

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Saldo awal	181.940	-	*Beginning balance*
Pembentukan dalam tahun berjalan	-	181.940	*Provision during the year*
Pemulihan selama tahun berjalan	(181.940)	-	*Recovery during the year*
Saldo akhir	-	181.940	*Ending balance*
Jumlah	**-**	**181.940**	***Total***

Bank telah melakukan upaya penyelesaian atas agunan yang diambil alih sebagaimana diatur oleh peraturan Bank Indonesia.

The Bank has taken actions for the resolution of foreclosed assets as required by Bank Indonesia under its regulation.

Manajemen berpendapat bahwa saldo agunan yang diambil alih merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

The management believes that the foreclosed assets balance represent net realisable value.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak ada cadangan kerugian penurunan nilai yang perlu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2016.

The Bank's management believes that there were no allowance for impairment losses to be provided as of December 31, 2016.

15. LIABILITAS SEGERA / *15. OBLIGATION DUE IMMEDIATELY*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Titipan nasabah	9.631.670	2.512.246	*Customer's advances*
Kiriman uang	827.625	4.815	*Inward remittances*
Bunga deposito yang sudah jatuh tempo	2.301.452	3.570.132	*Interest on deposit maturity*
Jumlah Rupiah	12.760.747	6.087.193	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Kiriman uang	-	27.058	*Inward remittances*
Lainnya	25.308	68.800	*Others*
Jumlah mata uang asing	25.308	95.858	*Total foreign currency*
Jumlah	**12.786.054**	**6.183.051**	***Total***

16. SIMPANAN DARI NASABAH / *16. DEPOSIT FROM CUSTOMERS*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2016	2015	
Pihak berelasi:			***Related Parties:***
Rupiah:			***Rupiah:***
Giro	144.793.859	157.042.112	*Demand deposits*
Tabungan	33.124.114	36.237.370	*Saving deposits*
Deposito berjangka	190.657.564	231.934.648	*Time deposits*
Jumlah Rupiah	368.575.537	425.214.130	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Giro	50.201.327	76.720.613	*Demand deposits*
Tabungan	5.253.101	2.977.819	*Saving deposits*
Deposito berjangka	84.666.200	184.012.281	*Time deposits*
Jumlah mata uang asing	140.120.628	263.710.713	*Total foreign currency*
Jumlah pihak berelasi	508.696.165	688.924.843	*Total related parties*
Pihak ketiga:			***Third Parties:***
Rupiah:			***Rupiah:***
Giro	269.420.298	317.716.627	*Demand deposits*
Tabungan	809.943.557	843.012.079	*Saving deposits*
Deposito berjangka	4.231.712.108	4.763.438.593	*Time deposits*
Jumlah Rupiah	5.311.075.963	5.924.167.299	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Giro	89.477.853	123.431.862	*Demand deposits*
Tabungan	83.515.248	95.199.379	*Saving deposits*
Deposito berjangka	319.537.917	352.107.066	*Time deposits*
Jumlah mata uang asing	492.531.018	570.738.307	*Total foreign currency*
Jumlah pihak ketiga	5.803.606.981	6.494.905.606	*Total third parties*
Jumlah simpanan nasabah	**6.312.303.146**	**7.183.830.449**	***Total deposit from customers***

Informasi mengenai transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan pada catatan 37.

Information on related parties transactions are disclosed in note 37.

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *16. DEPOSIT FROM CUSTOMERS (continued)*

b. Giro / *b. Demand deposits*

i) Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga / *i) By currency, related parties and third parties*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak berelasi	144.793.859	157.042.112	*Related parties*
Pihak ketiga	269.420.298	317.716.627	*Third parties*
Jumlah Rupiah	414.214.157	474.758.739	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Pihak berelasi	50.201.327	76.720.613	*Related parties*
Pihak ketiga	89.477.853	123.431.862	*Third parties*
Jumlah mata uang asing	139.679.180	200.152.475	*Total foreign currency*
Jumlah	**553.893.337**	**674.911.213**	***Total***

ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut : / *ii) Average interest rate per annum are as follows:*

	2016	2015	
Rupiah	0,93%	0,94%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,08%	0,09%	*Foreign currencies*

Giro dijadikan jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan dan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 10.102.104 dan Rp 27.976.084.

Demand deposits pledged as collaterals on bank guarantee, loans and other payments trade transactions facility as of December 31, 2016 and 2015, amounted to Rp 10,102,104 and Rp 27,976,084, respectively.

c. Tabungan / *c. Saving deposits*

i) Berdasarkan mata uang, pihak ketiga dan pihak berelasi / *i) By currency, third parties and related parties*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Tabungan Parahyangan	25.149.456	26.780.078	*Parahyangan savings*
Tabungan Sakura	4.344.641	3.532.511	*Sakura savings*
Tabungan *Payroll*	3.128.504	4.390.611	*Payroll savings*
Tabungan Berjangka	401.279	433.454	*Periodic savings*
Tabungan Ginza	59.728	12.660	*Ginza savings*
Tabungan TabunganKu	34.759	8.911	*TabunganKu savings*
Tabungan Pendidikan	5.746	3.765	*Education savings*
Tabungan Nusantara *)	-	743.638	*Nusantara savings *)*
Tabungan Sehati *)	-	331.742	*Sehati savings *)*
Sub jumlah	33.124.114	36.237.370	*Sub total*

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / ***16. DEPOSIT FROM CUSTOMERS (continued)***

c. Tabungan (lanjutan) / ***c. Saving deposits (continued)***

	2016	2015	
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Tabungan Parahyangan	290.515.148	241.223.488	*Parahyangan savings*
Tabungan Sakura	377.812.639	283.263.338	*Sakura savings*
Tabungan *Payroll*	31.245.164	30.939.127	*Payroll savings*
Tabungan Berjangka	35.596.404	46.228.612	*Periodic savings*
Tabungan Ginza	45.348.658	75.787.571	*Ginza savings*
Tabungan TabunganKu	6.799.412	9.311.702	*TabunganKu Saings*
Tabungan Pendidikan	22.626.132	19.494.605	*Education savings*
Tabungan Nusantara *)	-	106.622.054	*Nusantara savings *)*
Tabungan Sehati *)	-	30.136.800	*Sehati savings *)*
Tabungan Co-Branding **)	-	4.782	*Co-Branding savings **)*
Sub jumlah	809.943.557	843.012.079	*Sub total*
Jumlah Rupiah	843.067.671	879.249.449	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Pihak berelasi:			***Related parties:***
Tabungan dolar	5.253.101	2.977.819	*Dollar savings*
Pihak ketiga:			***Third parties:***
Tabungan dolar	83.515.248	95.061.143	*Dollar savings*
Tabungan berjangka dolar	-	138.236	*Periodic savings*
Jumlah mata uang asing	88.768.349	98.177.198	*Total foreign currency*
Jumlah	**931.836.020**	**977.426.647**	***Total***

*) Terhitung tanggal 1 Februari 2016, produk Tabungan Nusantara dan Sehati ditutup dan saldo nasabah yang ada dikonversi ke Tabungan Parahyangan.

**) As of February 1, 2016 , saving product BNP are Nusantara and Sehati had been terminated and the balance of exsisting customers converted to be Parahyangan savings.*

**) Terhitung tanggal 1 April 2016 , produk Tabungan Co-Branding ditutup dan saldo nasabah yang ada dikonversi ke Tabungan Parahyangan.

***) As of April 1, 2016 , saving product BNP are Co-Branding had been terminated and the balance of exsisting customers converted to be Parahyangan savings.*

ii) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut : / ***ii) Average interest rate per annum are as follows:***

	2016	2015	
Rupiah	3,13%	3,43%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,43%	0,44%	*Foreign currency*

Tabungan yang dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 5.820.000 dan Rp 13.980.000.

Saving deposits pledged as collaterals on loans as of December 31, 2016 and 2015, amounted to Rp 5,820,000 and Rp 13,980,000, respectively.

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *16. DEPOSIT FROM CUSTOMERS (continued)*

d. Deposito berjangka / *d. Time deposits*

i) Berdasarkan mata uang, pihak berelasi dan pihak ketiga / *i) By currency, related parties and third parties*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak berelasi	190.657.564	231.934.648	*Related parties*
Pihak ketiga	4.231.712.108	4.763.438.593	*Third parties*
Jumlah Rupiah	4.422.369.672	4.995.373.242	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Pihak berelasi	84.666.200	184.012.281	*Related parties*
Pihak ketiga	319.537.917	352.107.066	*Third parties*
Jumlah mata uang asing	404.204.118	536.119.347	*Total foreign currency*
Jumlah	**4.826.573.790**	**5.531.492.589**	***Total***

ii) Berdasarkan periode deposito berjangka / *ii) By period of time deposits*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
1 bulan	3.333.090.031	3.770.262.237	*1 month*
3 bulan	988.144.308	1.110.487.879	*3 months*
6 bulan	60.999.656	68.046.105	*6 months*
12 bulan	40.135.677	46.577.021	*12 months*
Jumlah Rupiah	4.422.369.672	4.995.373.242	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
1 bulan	352.157.124	438.228.116	*1 month*
3 bulan	42.012.624	79.492.941	*3 months*
6 bulan	9.020.060	15.470.771	*6 months*
12 bulan	1.014.310	2.927.519	*12 months*
Jumlah mata uang asing	404.204.118	536.119.347	*Total foreign currency*
Jumlah	**4.826.573.790**	**5.531.492.589**	***Total***

iii) Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo / *iii) By remaining period until maturity date*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
1 bulan	3.751.214.480	4.270.821.539	*1 month*
3 bulan	621.949.701	664.513.839	*3 months*
6 bulan	34.121.664	33.848.352	*6 months*
12 bulan	15.083.827	26.189.512	*12 months*
Jumlah Rupiah	4.422.369.672	4.995.373.242	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
1 bulan	368.694.893	454.602.826	*1 month*
3 bulan	30.767.925	70.423.105	*3 months*
6 bulan	4.539.222	10.473.101	*6 months*
12 bulan	202.078	620.315	*12 months*
Jumlah mata uang asing	404.204.118	536.119.347	*Total foreign currency*
Jumlah	**4.826.573.790**	**5.531.492.589**	***Total***

16. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / *16. DEPOSIT FROM CUSTOMERS (continued)*

d. Deposito berjangka (lanjutan) / ***d. Time deposits (continued)***

iv) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: / ***iv) Average interest rates per annum are as follows:***

	2016	2015	
Rupiah	7,60%	9,01%	*Rupiah*
Mata uang asing	0,89%	1,45%	*Foreign currencies*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 deposito berjangka yang diblokir dan sebagai jaminan atas bank garansi, kredit yang diberikan dan fasilitas pembayaran transaksi perdagangan adalah masing-masing sebesar Rp 296.614.906 dan Rp 601.344.703.

As of December 31, 2016 and 2015, time deposits which were blocked and pledged as bank guarantee, loans and payment trade transaction facility amounted to Rp 296,614,906 and Rp 601,344,703, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 deposito berjangka yang diblokir dan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan adalah masing-masing sebesar Rp 237.043.968 dan Rp 552.367.602.

As of December 31, 2016 and 2015 , time deposits which were blocked and pledged as loans amounted to Rp 237,043,968 and Rp 552,367,602, respectively.

17. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *17. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan pihak ketiga / ***a. By types, currency, and third parties***

	2016	2015	
Pihak ketiga:			***Third Parties:***
Rupiah:			***Rupiah:***
Giro	29.772.556	12.527.756	*Demand deposits*
Tabungan	11.140.598	1.750.436	*Saving deposits*
Deposito berjangka	12.444.376	55.336.924	*Time deposits*
Jumlah	**53.357.530**	**69.615.116**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, simpanan dari bank lain hanya dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

As at December 31, 2016 and 2015, deposits from other banks only from third parties and Rupiah currency.

b. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: / ***b. Average interest rates per annum are as follows:***

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Giro	3,06%	6,83%	*Demand deposits*
Tabungan	5,28%	4,62%	*Saving deposits*
Deposito berjangka	7,04%	8,35%	*Time deposits*

c. Berdasarkan periode deposito berjangka dari bank lain / ***c. By period of time deposits from other banks***

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
1 bulan	11.044.376	37.936.924	*1 month*
3 bulan	-	16.000.000	*3 months*
12 bulan	1.400.000	1.400.000	*12 months*
Jumlah	**12.444.376**	**55.336.924**	***Total***

18. PINJAMAN SUBORDINASI / *18. SUBORDINATED LOANS*

Rincian pinjaman subordinasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sebagai berikut:

The details of subordinated loans as of December 31, 2016 and 2015, as follows:

	2016	2015	
ACOM CO., LTD.	**79.945.815**	**81.800.190**	***ACOM CO., LTD.***

ACOM CO., Ltd. / ***ACOM CO., Ltd.***

Pada tanggal 30 September 2011, Bank melakukan perjanjian pinjaman subordinasi dengan Acom Co. LTD, pihak berelasi, senilai USD 3.934.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,253% per tahun. Pada tanggal 1 November 2011 seluruh pinjaman telah dicairkan. Dana yang diperoleh dari pinjaman subordinasi seluruhnya akan digunakan untuk penempatan aset produktif dalam bentuk penyaluran kredit serta memperkuat struktur modal. Jangka waktu pinjaman akan berakhir pada tanggal ulang tahun ketujuh sejak tanggal penarikan. Pinjaman subordinasi ini tidak boleh dibatalkan atau dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman yaitu 7 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman.

On September 30, 2011, the Bank entered into a subordinated loans agreement amounting USD 3,934,000 with Acom, Co, Ltd, related party, with a fixed interest rate of 5.253% per annum. On November 1, 2011 the Bank fully withdraw the subordinated loan. Fund gained from the subordinated loan shall be used entirely in invest in earning assets in the form of loans and to enhance the capital structure. Term of lending will expired on the seventh anniversary date of the withdrawal date of the loan. Subordinated loan should be not canceled or paid in full before the due date without prior approval from Bank Indonesia. Loan period is 7 years from the date of drawdown of the loan.

ACOM (USA) INC. / ***ACOM (USA) INC.***

Pada tanggal 30 September 2011, Bank melakukan perjanjian pinjaman subordinasi dengan Acom (USA) INC., pihak berelasi, senilai USD 2.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 3,76% per tahun. Pada tanggal 1 November 2011 seluruh pinjaman telah dicairkan.

On September 30, 2011, the Bank entered into a subordinated loans agreement amounting USD 2,000,000 with Acom (USA) INC, related party, with a fixed interest rate of 3.76% per annum. On November 1, 2011 the Bank fully withdraw the subordinated loan.

Dana yang diperoleh dari pinjaman subordinasi seluruhnya akan digunakan untuk penempatan aset produktif dalam bentuk penyaluran kredit serta memperkuat struktur modal. Jangka waktu pinjaman akan berakhir pada tanggal ulang tahun ketujuh sejak tanggal penarikan. Pinjaman subordinasi ini tidak boleh dibatalkan atau dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman yaitu 7 tahun terhitung sejak tanggal penarikan pinjaman.

Fund gained from the subordinated loan shall be used entirely in invest in earning assets in the form of loans and to enhance the capital structure. Term of lending will expired on the seventh anniversary date of the withdrawal date of the loan. Subordinated loan should be not canceled or paid in full before the due date without prior approval from Bank Indonesia. Loan period is 7 years from the date of drawdown of the loan.

Berdasarkan perjanjian tanggal 30 November 2015 pinjaman subordinasi dari ACOM (USA) INC. sebesar USD 2.000.000 dialihkan ke ACOM CO., Ltd dengan suku bunga 3,76%.

Based on the agreement dated as November, 30 2015 subordinated loans from ACOM (USA) INC. USD 2,000,000 transferred to ACOM CO., Ltd with 3.76% interest rate.

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), pinjaman subordinasi di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 13/228/APBU/Bd tanggal 12 Desember 2011.

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the subordinated loans are included as supplementary capital after the Bank receives approval letter from Bank Indonesia No.13/228/APBU/Bd dated December 12, 2011.

18. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan) / *18. SUBORDINATED LOANS (continued)*

Perjanjian pinjaman subordinasi ini memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dalam hal-hal sebagai berikut:
1. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor; atau
2. Merubah bidang usaha utama Bank.

Tidak terdapat pelanggaran atas pembatasan perjanjian pinjaman subordinasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The agreement of subordinated loans provide several negative covenants to the Bank conducting the followings:
1. *Decrease the authorized capital, subscribed capital and paid-up capital; or*
2. *Change the main line of business of the Bank.*

There was no violation to the covenant of subordinated loans agreement as of December 31, 2016 and 2015.

19. LIABILITAS LAIN-LAIN / *19. OTHER LIABILITIES*

	2016	2015	
Rupiah:			***Rupiah:***
Bunga yang masih harus dibayar	14.576.492	22.808.336	*Accrued interest*
Liabilitas terkait dengan transaksi ATM	8.792.518	3.519.209	*Payables related to ATM transactions*
Biaya yang masih harus dibayar	3.584.035	2.070.699	*Accrued Expenses*
Setoran jaminan	1.568.800	1.578.000	*Security deposits*
Pendapatan yang ditangguhkan	12.740	28.437	*Deferred income*
Lainnya	886.315	672.359	*Others*
Jumlah Rupiah	29.420.900	30.677.040	*Total Rupiah*
Mata uang asing:			***Foreign currency:***
Bunga yang masih harus dibayar	677.696	864.977	*Accrued interest*
Lainnya	-	9.627.976	*Others*
Jumlah mata uang asing	677.696	10.492.953	*Total foreign currency*
Jumlah	**30.098.596**	**41.169.993**	***Total***

Bunga yang masih harus dibayar / ***Accrued interest***

Merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan dan simpanan dari bank lain, *banker acceptance* dan pinjaman subordinasi.

Represents accrued interest on deposits and deposits from other banks, banker acceptance and subordinated loans.

Setoran jaminan / ***Security deposits***

Merupakan setoran jaminan *safe deposit* dan jaminan kerjasama dengan PT BPR Eka Bumi Artha atas penggunaan jaringan "ATM-Bersama ALTO" (catatan 45 point 5).

Represents security deposits of safe deposit rentals and deposits of cooperation with PT BPR Eka Bumi Artha on the use of network "ATM-Bersama ALTO" (note 45 point 5).

Setoran jaminan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan, diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Security deposits is classified as other financial liabilities measured at cost, amortized using the effective interest rate method.

Bank harus melakukan pengungkapan atas nilai wajar dari liabilitas keuangannya. Estimasi nilai wajar dari liabilitas lain-lain yang merupakan liabilitas tanpa suku bunga dan tanpa jangka waktu adalah jumlah yang harus dikembalikan saat ada permintaan. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar dari liabilitas ini adalah sebesar nilai tercatatnya.

The Bank should disclose the fair value of financial liabilities. The estimated fair value of other liabilities which are non interest bearing liabilities and with indefinite term, is the amount that should be payable on demand. As of December 31, 2016 and 2015 , fair value of these financial liabilities is its carrying value.

20. MODAL SAHAM / *20. SHARE CAPITAL*

Susunan pemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut :

The shareholder composition as at December 31, 2016 and 2015 based on registered by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, are as follows:

	2016			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Total shares***	**Jumlah modal *Total shares capital***	**Persentase kepemilikan/ *Percentages of ownership* (%)**	***Shareholders***
ACOM CO., LTD.	447.707.012	223.853.506	66,15	*ACOM CO., LTD.*
PT Hermawan Sentral Investama	72.564.211	36.282.106	10,72	*PT Hermawan Sentral Investama*
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.	63.310.000	31.655.000	9,35	*The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.*
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	93.252.659	46.626.330	13,78	*Public (Ownership below 5%)*
Jumlah	**676.833.882**	**338.416.941**	**100**	

	2015			
Pemegang saham	**Jumlah saham/ *Total shares***	**Jumlah modal *Total shares capital***	**Persentase kepemilikan/ *Percentages of ownership* (%)**	***Shareholders***
ACOM CO., LTD.	447.737.012	223.868.506	66,15	*ACOM CO., LTD.*
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.	63.310.000	31.655.000	9,35	*The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, LTD.*
PT Hermawan Sentral Investama	43.726.211	21.863.106	6,46	*PT Hermawan Sentral Investama*
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	122.060.659	61.030.330	18,04	*Public (Ownership below 5%)*
Jumlah	**676.833.882**	**338.416.941**	**100**	

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 seluruh saham Bank (maksimum 99% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999) telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

As of December 31, 2016 and 2015, all of The Bank's shares (maximum of 99% by Government Regulation No. 29 in 1999) were listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH / *21. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL-NET*

	2016	**2015**	
Agio saham	229.595.050	229.595.050	*Additional paid-in-capital*
Biaya emisi efek ekuitas	(8.557.460)	(8.557.460)	*Stock issuance costs*
Jumlah-bersih	**221.037.590**	**221.037.590**	***Total-net***

Agio Saham / ***Additional paid-in-capital***

Agio saham berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada tahun 2001, pelaksanaan *warrant* pada tahun 2004, dan penawaran umum terbatas I pada tahun 2006, penawaran umum terbatas II pada tahun 2010, dan penawaran umum terbatas III pada tahun 2013 masing-masing sebesar Rp 1.250.000, Rp 1.241.250, Rp 7.913.750, Rp 49.981.579, dan Rp 169.208.471.

Additional paid-in-capital arised from initial public offering on 2001, warrant on 2004, and preemptive rights issues I on 2006, preemptive rights issues II on 2010, and preemptive rights issues on 2013 amounted to Rp 1,250,000, Rp 1,241,250, Rp 7,913,750, Rp 49,981,579, and Rp 169,208,471, respectively.

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (lanjutan) / *21. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL-NET (continued)*

Biaya Emisi Efek Ekuitas / ***Stock Issuance Costs***

Biaya emisi efek ekuitas berasal dari penawaran perdana yang dilakukan pada tahun 2001 dan penawaran umum terbatas I pada tahun 2006 dan penawaran umum terbatas II pada tahun 2010, dan penawaran umum terbatas III pada tahun 2013, masing-masing sebesar Rp 1.308.050, Rp 1.087.912, Rp 1.496.153, Rp 4.665.345.

Stock issuance costs arised from initial public offering on 2001, and preemmtive rights issues I on 2006 and preemmtive rights issues II on 2010, and preemmtive rights issues III on 2013 amounted to Rp 1,308,050, Rp 1,087,912, Rp 1,496,153 and Rp 4,665,345, respectively.

22. CADANGAN UMUM DAN DIVIDEN TUNAI / *22. GENERAL RESERVE AND CASH DIVIDENDS*

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tanggal 27 Juni 2016, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2015 untuk tujuan pembentukan cadangan umum dan membagikan deviden tunai masing-masing Rp 6.686.000 dan Rp 6.091.505.

Based on the Annual General Meeting of the Shareholders as of June 27 2016, the Bank allocated net profit for the year 2015 for general reserve and dividend payments amounted to Rp 6,686,000 dan Rp 6,091,505.

Berdasarkan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tanggal 26 Juni 2015, Bank mengalokasikan laba bersih tahun 2014 untuk tujuan pembentukan cadangan umum dan membagikan deviden tunai masing-masing Rp 9.653.250 dan Rp 9.475.674.

Based on the Annual General Meeting of the Shareholders as of June 26 2015, the Bank allocated net profit for the year 2014 for general reserve and dividend payments amounted to Rp 9,653,250 dan Rp 9,475,674.

23. PENDAPATAN BUNGA / *23. INTEREST INCOME*

Pendapatan bunga berasal dari: / *Interest income was derived from:*

	2016	2015	
Kredit yang diberikan	817.767.038	915.146.802	*Loans*
Penempatan pada Bank Indonesia	43.470.928	53.540.841	*Placementss with Bank Indonesia*
Efek-efek	35.006.529	33.259.623	*Securities*
Penempatan pada bank lain	8.077.390	2.725.418	*Placementss with others banks*
Lainnya	989.381	1.744.263	*Others*
Jumlah	**905.311.266**	**1.006.416.947**	***Total***

Pendapatan bunga dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 7.196.350 dan Rp 7.870.262.

Interest income from related parties as of December 31, 2016 and 2015 amounted to Rp 7,196,350 and Rp 7,870,262.

24. BEBAN BUNGA / *24. INTEREST EXPENSES*

Beban bunga meliputi bunga atas: / *Interest expense represents interest incurred on:*

	2016	2015	
Deposito	368.187.944	498.524.436	*Time deposits*
Tabungan	28.561.985	31.780.144	*Saving deposits*
Premi program penjaminan simpanan (catatan 44)	13.874.189	15.831.463	*Premium deposit insurance program (note 44)*
Giro	5.048.553	8.274.128	*Demand deposits*
Pinjaman subordinasi	3.852.864	3.863.821	*Subordinated loans*
Call money	72.050	457.326	*Call money*
Lainnya	423	358	*Others fees*
Jumlah	**419.598.008**	**558.731.676**	***Total***

24. BEBAN BUNGA (lanjutan) / *24. INTEREST EXPENSES (continued)*

Beban bunga dari pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 27.530.284 dan Rp 43.589.100.

Interest expense from related party as of December 31, 2016 and 2015 amounted Rp 27,530,284 and Rp 43,589,100, respectively.

25. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI LAINNYA / *25. OTHER FEES AND COMMISSIONS EARNED*

	2016	2015	
Komisi asuransi	906.760	1.596.327	*Insurance commissions*
Provisi kiriman uang	788.357	988.941	*Transfer fees*
Komisi notaris	699.838	1.020.909	*Notary commissions*
Provisi bank garansi	540.498	583.690	*Bank guarantees commissions/ fees*
Provisi/komisi impor	251.354	271.484	*Import commissions/ fees*
Provisi/komisi ekspor	250.157	554.067	*Export commissions/ fees*
Provisi/komisi *exchange*	30.244	46.599	*Exchange commissions/ fees*
Provisi inkaso	5.987	5.145	*Collecting fees*
Provisi lainnya	91	132	*Other fees*
Jumlah	**3.473.286**	**5.067.294**	***Total***

26. PENDAPATAN JASA PERBANKAN / *26. BANK SERVICES INCOME*

	2016	2015	
a. Pendapatan transaksi devisa			***a. Gain of foreign exchange***
Kepada penduduk	3.130.038	3.072.610	*Residents*
Pendapatan selisih kurs	1.552.030	2.179.674	*Foreign exchange rates*
Kepada bukan penduduk	254.255	444.125	*Non residents*
	4.936.323	5.696.409	
Kerugian transaksi mata uang asing	(743.457)	(981.316)	*Losses of foreign exchange*
Sub jumlah	**4.192.866**	**4.715.093**	***Sub total***
b. Pendapatan lainnya			***b. Other income***
Denda - denda	19.162.672	14.597.399	*Penalties*
Pendapatan kredit yang telah dihapuskan	6.841.763	3.926.288	*Recoveries of loans previously written-off*
Beban administrasi	4.370.765	4.154.206	*Administration fees*
Hasil pengantaran uang	785.762	118.342	*Cash delivery fees*
Penyimpanan *safe deposit box*	496.008	487.715	*Safe deposit boxes*
Proses kliring	486.283	710.972	*Clearing process*
Pendapatan *call fee*	341.414	755.806	*Call fee income*
Penjualan buku cek/ bilyet giro	283.691	326.545	*Cheque books*
Pendapatan transaksi ATM	227.041	3.262.193	*ATM's transactions income*
Pembuatan kartu ATM	68.046	27.495	*Processing of ATM card*
Lainnya	416.895	814.431	*Others*
Sub jumlah	**33.480.338**	**29.181.392**	***Sub total***
Jumlah	**37.673.204**	**33.896.485**	***Total***

27. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN / *27. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL ASSETS*

	2016	2015	
Kredit yang diberikan	101.116.236	41.619.992	*Loans*
Jumlah	**101.116.236**	**41.619.992**	***Total***

28. PENYISIHAN KERUGIAN ATAS ASET NON PRODUKTIF / *28. PROVISION FOR POSSIBLE LOSSES ON NON EARNING ASEETS*

	2016	2015	
Agunan yang diambil alih	-	181.940	*Foreclosed assets*
Jumlah	**-**	**181.940**	***Total***

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2016	2015	
Barang dan jasa	94.570.309	69.182.251	*Goods and services*
Beban sewa	27.156.966	26.592.593	*Rent expenses*
Beban promosi	10.706.827	1.683.117	*Promotions expenses*
Beban asuransi	10.424.488	6.747.580	*Insurance expenses*
Pemeliharaan dan perbaikan aset tetap	8.857.370	7.021.670	*Repairs and maintenances of fixed assets*
Penyusutan aset tetap	6.595.395	7.714.748	*Depreciation expense of fixed assets*
Beban telepon/ telex	4.948.228	3.125.431	*Telephone/ telex expenses*
Iuran ATM	3.919.254	5.486.106	*ATM contribution*
Amortisasi aset takberwujud	2.041.940	1.728.128	*Intangible asset amortization*
Beban pajak	1.273.262	2.128.832	*Taxes expenses*
Lainnya	237.885	213.758	*Other*
Jumlah	**170.731.924**	**131.624.214**	***Total***

30. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *30. SALARIES AND ALLOWANCES EXPENSES*

	2016	2015	
Gaji	130.109.689	124.708.271	*Salaries*
Beban imbalan pasca-kerja	18.888.000	14.519.688	*Post-employment benefits expenses*
Tunjangan pajak karyawan	15.624.556	18.534.787	*Employee tax*
Gratifikasi/ bonus	15.290.528	18.855.235	*Annual-bonus*
Tunjangan hari raya	10.237.848	10.098.831	*Religious holiday bonus*
Tunjangan asuransi	8.322.608	7.778.790	*Insurance benefits*
Pendidikan dan latihan	7.352.214	7.338.571	*Education and training*
Tunjangan seragam karyawan	1.881.255	1.330.781	*Uniform benefits*
Honorarium komisaris	1.440.000	1.296.850	*Commisioner fee*
Tunjangan kesehatan	844.361	739.591	*Medical benefits*
Beban perekrutan	511.479	171.652	*Recruitments expense*
Honorarium komite audit	300.000	300.000	*Audit committee fee*
Tunjangan lainnya	6.141.211	4.585.480	*Other benefits*
Jumlah	**216.943.749**	**210.258.527**	***Total***

31. BEBAN LAIN-LAIN / *31. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2016	2015	
Penyelesaian kredit bermasalah	11.655.473	4.782.238	*Completion non performing loans*
Iuran-iuran	4.313.908	5.391.417	*County levies*
Keamanan	1.064.376	1.224.343	*Security*
Parkir	783.917	461.371	*Parking*
Peresmian/ pembukaan cabang	598.518	117.114	*Branches opening*
Administrasi	553.895	814.236	*Administration*
Proses kliring	517.672	483.710	*Clearing*
Lainnya	2.095.098	2.680.736	*Others*
Jumlah	**21.582.856**	**15.955.165**	***Total***

32. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL / *32. NON-OPERATING INCOME*

	2016	2015	
Keuntungan penjualan AYDA	-	2.398.791	*Gain from sale of foreclosed assets*
Pendapatan non-operasional lainnya	1.266.471	1.539.299	*Miscellaneous non-operating income*
Jumlah	**1.266.471**	**3.938.090**	***Total***

33. BEBAN NON-OPERASIONAL / *33. NON-OPERATING EXPENSES*

	2016	2015	
Kerugian penjualan AYDA	5.225.660	-	*Loss from sale of foreclosed assets*
Olah raga	288.391	204.299	*Sports*
Sumbangan dan biaya pergaulan	158.534	289.886	*Donation and entertainment*
Kekurangan kas	2.550	2.139	*Cash shortage*
Lainnya	3.530	136.243	*Others*
Jumlah	**5.678.665**	**632.567**	***Total***

34. PERPAJAKAN / *34. TAXATION*

a. Pajak penghasilan / *a. Income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak yang disajikan dalam laporan laba-rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dengan taksiran laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax as shown in statements of profit or losses and other comprehensive income and estimated fiscal profit for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follows:

	2016	2015	
Laba sebelum pajak penghasilan	12.072.789	90.314.736	*Net income before tax*
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Sewa	2.186.620	1.956.575	*Rent*
Pajak	502.301	393.448	*Taxes*
Olah raga	288.391	204.299	*Sports*
Bahan bakar	277.317	252.127	*Fuel*
Rapat	206.759	121.237	*Meeting*
Beban sumbangan dan pergaulan	158.534	289.886	*Donation*
Pemeriksaan kesehatan	135.963	46.765	*Medical chek-up expenses*
Telepon direksi	27.982	30.505	*Director's phone*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	181.940	*Allowance for impaiment losses*
Jumlah beda tetap	3.783.867	3.476.783	*Total permanent differences*
Laba Fiskal	**15.856.656**	**93.791.519**	*Taxable income*

34. PERPAJAKAN (lanjutan) / *34. TAXATION (continued)*

a. Pajak penghasilan (lanjutan) / *a. Income tax (continued)*

Taksiran pajak penghasilan badan			*Estimate corporate income tax*
25% x Rp 15.856.655	3.964.164		*25% x Rp 15,856,655*
25% x Rp 93.791.519		23.447.880	*25% x Rp 93,791,519*
Jumlah	**3.964.164**	**23.447.880**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

Perhitungan utang pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

The calculation of taxes payable for the years ended as of December 31,2016 and 2015, are as follows:

	2016	**2015**	
Pajak penghasilan pasal 25	-	2.213.303	*Income tax article 25*
Pajak penghasilan pasal 21	3.469.805	4.374.023	*Income tax article 21*
Pajak penghasilan pasal 23	5.923.207	7.765.303	*Income tax article 23*
Pajak penghasilan pasal 26	32.654	33.105	*Income tax article 26*
Pajak Pertambahan Nilai	13.454	18.518	*Value Added Tax*
Lainnya	805	12.793	*Others*
Jumlah	**9.439.924**	**14.417.045**	***Total***

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") Pajak Penghasilan Badan.

The calculation of Corporate Income Tax for the year ended December 31, 2016 will be the basis in filling Annual Corporate Income Tax Return ("SPT").

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 sesuai dengan yang akan dan telah dilaporkan Bank dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") kepada kantor layanan pajak.

The calculation of Corporate Income Tax in 2016 conform with be the amounts that will be and had been reported by the Bank to the tax office in its Annual Tax Return ("SPT").

c. Penghasilan (beban) pajak / *c. Tax income (expense)*

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan dan dikompensasikan dengan laba fiskal pada masa mendatang.

The management believes that deferred tax assets can be utilised and compensated against future taxable income.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amount computed by applying the effective tax rates to income before tax are as follows:

	2016	**2015**	
Laba sebelum pajak	12.072.789	90.314.736	*Income before tax*
Pajak pada tarif yang berlaku	3.018.197	22.578.684	*Tax expense at effective tax rate*
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan			*Tax effect of permanent differences*
Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan			
Beban yang tidak diperkenankan	945.967	869.196	*Non-deductible expense*
Jumlah	**3.964.164**	**23.447.880**	***Total***

34. PERPAJAKAN (lanjutan) / *34. TAXATION (continued)*

d. Administrasi / *d. Administration*

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak. Ketentuan baru yang diberlakukakn terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Bank submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DJP") may assess or amend taxes within ten years of the time the tax becomes due. There are new rules applicable to fiscal year 2008 and subsequent years stipulating that the DJP may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

35. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA / *35. OBLIGATION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS*

Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing dilakukan oleh Mukti Mandiri Creating Solutions dan Prima Aktuaria sebagai aktuaris independen berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 12 Januari 2017 dan 15 Januari 2016. Liabilitas imbalan pasti atas imbalan pascakerja (*post-employment benefit*) tersebut dihitung dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan asumsi-asumsi signifikan sebagai berikut:

The calculation of obligation for post-employment benefits as of December 31, 2016 and 2015 was performed by Mukti Mandiri Creating Solutions and Prima Aktuaria as the independent actuary based on its reports dated January 12, 2017 and January 15, 2016, respectively. Obligation for post-employment benefits are calculated using the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	2016	2015	
Tingkat diskonto per tahun	8,25%	9,50%	*Discount rate per annum*
Kenaikan gaji per tahun	6,50%	6,50%	*Salary increase per annum*
Tingkat kematian	Tabel TMI-2011/ *TMII 2011 table*	Tabel TMI-2011/ *TMII 2011 table*	*Mortality rate*
Usia pensiun	55 tahun/ *years*	55 tahun/ *years*	*Pension age*

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat, yang sejak tanggal 1 Juli 2016 dikelola dan diadministrasikan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial.

the Bank has a defined contribution retirement program covering its qualified permanent employees, which since July 1, 2016 is administered by Dana Pensiun Lembaga Keuangan AIA Financial.

Dengan demikian, selain program pensiun, Perseroan mencatat tambahan kewajiban yang mencerminkan bagian dari imbalan pasca-kerja yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 13/2003, tetapi belum sepenuhnya dicakup oleh iuran pensiun yang diberikan oleh program pensiun.

Therefore, in addition to the pension program, the Company recorded an additional liability, which represented a portion of benefits required by Law No. 13/2003, but had not been fully covered by the benefits provided by the pension plan.

36. LABA PER SAHAM DASAR / *36. BASIC EARNINGS PER SHARE*

	2016	2015	
Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dalam tahun berjalan untuk perhitungan laba per saham dasar (nilai penuh)	676.833.882	676.833.882	*Weighted average number of ordinary shares outstanding during the year for the calculation of basic earning per share(full amounts)*
Laba bersih	8.108.625	66.866.856	*Net income*
Laba per saham dasar (nilai penuh)	12	99	*Basic earning per share (full amounts)*

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan normal usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang berelasi dengan kondisi yang sama kepada pihak ketiga, kecuali pinjaman yang diberikan kepada para karyawan.

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Transactions with related parties

In the normal course of business, the Bank enterd into certain transaction with related parties, at terms similar with those made with third parties, except for loans to employees.

The details of significant balances with related parties as of December 31, 2016 and 2015 were as follows :

	2016	2015	
Giro pada Bank Lain			***Demand deposits with other banks***
Bank of Tokyo Mitsubishi	748.736	-	*Bank of Tokyo Mitsubishi*
Persentase giro pada bank lain dari jumlah aset	0,01%	0,00%	*Percentage of loans from total assets*
Kredit			***Loans***
PT Bintang Warna Mandiri	14.723.036	21.412.046	*PT Bintang Warna Mandiri*
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	2.755.342	11.050.214	*PT Mitra Pinasthika Mustika Finance*
PT Antelas	432.694	714.559	*PT Antelas*
PT Central Texindo	-	12.820.050	*PT Central Texindo*
Keluarga direksi dan karyawan kunci	23.383.125	5.138.611	*Directors family and key personnel*
Jumlah	41.294.197	51.135.480	*Total*
Persentase kredit dari jumlah aset	0,54%	0,59%	*Percentage of loans from total assets*
Simpanan			***Deposits***
Giro	194.995.186	233.762.725	*Demand deposits*
Tabungan	38.377.215	39.215.189	*Saving deposits*
Deposito berjangka	275.323.764	415.946.929	*Time deposits*
Jumlah	508.696.165	688.924.843	*Total*
Persentase simpanan dari jumlah liabilitas	7,82%	9,29%	*Percentage of deposits from total liabilities*
Outstanding Usance and L/C	**26.877.100**	**26.776.363**	***Outstanding Usance and L/C***
Persentase L/C yang masih berjalan	57,98%	70,03%	*Percentage of L/C from total outstanding L/C*
Bank garansi	**-**	**1.500.000**	***Bank guarantee***
Persentase bank garansi dari jumlah bank garansi	0,00%	3,19%	*Percentage of bank guarantees from total bank guarantees*
Tagihan akseptasi			***Acceptance receivable***
PT Bina Nusantara Prima	**-**	**2.802.949**	*PT Bina Nusantara Prima*
Persentase tagihan akseptasi dari jumlah aset	0,00%	0,03%	*Percentage of acceptance receivable from total assets*

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

	2016	2015	
Setoran jaminan	**8.400**	**9.000**	***Security deposits***
Persentase setoran jaminan dari jumlah liabilitas	< 0,01%	< 0,01%	*Percentage of security deposits from total liabilities*
Pinjaman subordinasi	**79.945.815**	**81.800.190**	***Subordinated Loans***
Persentase pinjaman subordinasi dari jumlah liabilitas	1,23%	1,10%	*Percentage of subordinated loans from total liabilities*
Utang akseptasi			***Acceptance payable***
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD	**4.011.504**	**7.738.254**	*The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD*
Persentase utang akseptasi dari jumlah liabilitas	0,06%	0,10%	*Percentage of acceptance receivable from total liabilities*

Sifat yang berelasi / ***Nature of relationship***

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The details of the relationship and type of signicant transactions with related parties as of December 31, 2016 and 2015 were as follows:

No./ *No.*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat relasi istimewa/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*
1.	ACOM CO., LTD.	Pemegang saham mayoritas dan pengendali/ *Majority and controller shareholder*	Pinjaman subordinasi/ *Subordinated loans*
2.	The Bank of Tokyo-Mitubishi UFJ Ltd.	Pemegang saham pengendali/ *Controller shareholder*	Usance dan Sight L/C dan utang akseptasi/ Usance, *and Sight L/C and Acceptance payable*
3.	PT Hermawan Sentral Investama	Pemegang saham/ s*hareholder*	Simpanan dari nasabah dan sewa gedung/ *Deposit from customers and rent building*
4.	PT Hermawan Ladang Arta	Pemegang saham/ *shareholder*	Simpanan dari nasabah dan sewa gedung/ *Deposit from customers and rent building*
5.	Dewan Komisaris, Direktur, dan Pejabat eksekutif/ *Board of Commissioners, Director, and key executives*	Managemen kunci/ *Key management personel, Directors, and key executives*	Simpanan dari nasabah dan kredit yang diberikan/ *Deposit from customers and loans*

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat yang berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

No./ *No.*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat relasi istimewa/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*
6.	PT Leuwi Jaya Utama	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
7.	PT Oriental Indah Bali Hotel	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
8.	CV Kencana Hegar	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
9.	PT Central Georgette Nusantara (CGN)	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, tagihan akseptasi, *Usance* dan *Sight LC*/ *Deposit from customers, acceptance receivables, Usance and Sight LC*
10.	PT Fuji Palapa Textile	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
11.	PT CGN Printing Miles	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah, kredit yang diberikan, dan *Sight LC*/ *Deposit from customers, loans, and Sight LC*
12.	PT CGN Unit Spinning	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
13.	PT Bina Nusantara Prima	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
14.	PT Central Texindo	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
15.	PT Antelas	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ *Loans and deposit from customers*
16.	PT Bintang Warna Mandiri	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang diberikan/ *Loans*

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat yang berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

No./ *No.*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat relasi istimewa/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*
17.	PT Gajah Angkasa Perkasa	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Tagihan akseptasi dan simpanan dari nasabah/ *Acceptance receivable and deposit from customers*
18.	PT Laju Karya Mandiri	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
19.	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ Loans and deposit from customers
20.	Yayasan Oetie Hermawan	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
21.	PT Kafe Bene Indonesia	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
22.	Hermawan Hotel Group	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
23.	PT Hermawan Megah Sentral	Dimiliki oleh pemegang saham yang sama/ *Owned by the same shareholder*	Kredit yang di berikan dan simpanan dari nasabah/ Loans and deposit from customers
24.	PT Kedaung New World Hotel	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
25.	CV Multi Kimia Agung	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
26.	PT Panyaungan Indah Lestari	Dimiliki oleh komisaris dan keluarga/ *Owned by commissioner and family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
27.	PT Vivien Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
28.	PT Novafashion Garment MFG	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
29.	PT Yoogane Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
30.	PT Sawangan Hill	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*

37. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Sifat yang berelasi (lanjutan)

Nature of relationship (continued)

No./ *No.*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat relasi istimewa/ *Nature of relationship*	Jenis transaksi/ *Type of transaction*
31.	PT Bali Nusaintan	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
32.	PT Setia Hospitality Management	Dimiliki oleh komisaris/ *Owned by commissioner*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
33.	PT Hermawan Adi Perkasa	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
34.	PT Yuskitama Lestari	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
35.	PT Cirebon Hotel & Convention	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
36.	PT Capital Resources Indonesia	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*
37.	PT Megaland Development	Dimiliki oleh keluarga komisaris/ *Owned by commissioner's family*	Simpanan dari nasabah/ *Deposit from customers*

Personil manajemen kunci mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/ atau aktivitas operasional Bank.

Key management personnel consists of members of the Board of Commisioners and Board of Directors, and key executives who have direct responsibility to the Board of Directors or have significant influence over policies and/or operational activities of the Bank.

Kompensasi yang dibebankan bagi personil manajemen kunci untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, terdiri dari:

Key management personnel compensation for the years ended December 31, 2016 and 2015, consisted of:

	2016	2015	
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Direksi	12.866.277	16.060.600	*Directors*
Komisaris	2.600.343	2.634.824	*Board of commissioner*
Pejabat eksekutif	16.255.809	15.951.791	*Key executive*
Pesangon pemutusan kerja:			*Termination benefits:*
Direksi	-	4.662.867	*Directors*
Pejabat eksekutif	1.100.678	-	*Key executive*
Jumlah	**32.823.107**	**39.310.081**	***Total***

38. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING / *38. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN EXCHANGE*

		2016		2015		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies* (jumlah penuh/ *full amount)*	Mata Uang Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies* (jumlah penuh/ *full amount)*	Mata Uang Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	
Aset						*Assets*
Kas	USD	1.111.407	14.973.431	1.302.810	17.959.236	*Cash*
	EUR	158.985	2.253.733	29.045	437.321	
	SAR	6.000	21.551	229.900	844.303	
	AUD	6.205	60.332	36.540	368.459	
	JPY	230.000	26.466	545.000	62.413	
	SGD	14.955	139.260	127.564	1.244.889	
	HKD	1.160	2.015	2.400	4.269	
	GBP	5.170	85.589	140	2.861	
	MYR	4.353	13.073	13.489	43.309	
	TWD	19.000	7.920	26.500	11.125	
	RMB	39.113	75.841	27.000	57.317	
	CAD	25	250	25	248	
	THB	-	-	8.830	3.373	
	KRW	-	-	89.000	1.043	
Giro pada Bank Indonesia	USD	4.000.000	53.890.000	5.300.000	73.060.500	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	USD	25.321.785	341.147.744	23.884.097	329.242.279	*Demand deposits with other banks*
	AUD	545.572	5.080.327	388.540	3.917.928	
	SGD	410.292	3.989.307	197.414	1.926.555	
	JPY	6.891.439	792.998	83.554.150	9.568.621	
	EUR	35.859	508.334	198.601	2.990.276	
	RMB	72.724	141.013	289.780	615.160	
	GBP	3.256	53.898	6.365	130.102	
	HKD	142.336	247.286	43.244	76.917	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	USD	50.069	674.549	50.069	690.196	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	USD	11.277.945	151.942.107	7.562.512	104.249.222	*Securities*
Kredit yang diberikan	USD	10.235.277	137.894.766	27.582.846	380.229.533	*Loans*
Tagihan akseptasi	USD	469.850	6.330.054	1.494.164	20.597.054	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	USD	225.963	3.044.284	424.003	5.844.877	*Other assets*
	AUD	-	-	6	56	
Rekening administratif	JPY	-	-	6.021.295	689.559	*Administrative accounts*
Jumlah Aset			723.396.129		954.869.002	*Total Assets*
Liabilitas						*Liabilities*
Liabilitas segera	USD	1.878	25.308	6.954	95.857	*Obligations due immediately*
Giro	USD	9.664.203	130.200.972	13.897.016	191.570.359	*Demand deposits*
	AUD	116.424	1.132.006	117.292	1.182.736	
	JPY	3.005.809	345.878	8.639.720	989.421	
	HKD	4.135	7.184	-	-	
	SGD	593.887	5.530.230	314.191	3.066.175	
	EUR	173.741	2.462.909	222.080	3.343.783	

38. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

38. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN EXCHANGE (continued)

		2016		2015		
		Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies* (jumlah penuh/ *full amount)*	Mata Uang Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies* (jumlah penuh/ *full amount)*	Mata Uang Ekuivalen dalam Rp/ *Equivalent in Rp*	
Liabilitas						*Liabilities*
Deposito berjangka	USD	29.773.404	401.122.180	38.660.319	532.932.500	*Time deposits*
	AUD	316.971	3.081.938	316.039	3.186.847	
Tabungan	USD	6.588.855	88.768.349	7.122.031	98.177.198	*Saving deposits*
Pinjaman subordinasi	USD	5.934.000	79.945.815	5.934.000	81.800.190	*Subordinated loans*
Utang akseptasi	USD	767.605	10.341.558	9.176	20.597.054	*Acceptance payables*
Utang pajak	USD	3.856	51.945	9.154	126.184	*Taxes payable*
	AUD	-	-	22	221	
Liabilitas lain-lain	USD	50.302	677.696	83.267	1.147.841	*Other liabilities*
	AUD	-	-	28	279	
	JPY	-	-	81.600.000	9.344.832	
Rekening administratif	USD	2.497.956	33.653.719	3.988.775	54.985.257	*Administrative account*
	EUR	-	-	20.250	304.898	
	JPY	169.300.000	19.481.351	81.648.000	9.350.329	
Jumlah liabilitas dan rekening administratif			776.829.037		1.012.201.962	*Total liabilities and administrative account*
Jumlah liabilitas dan rekening administratif dalam mata uang asing-bersih			(53.432.908)		(57.332.960)	*Total liabilities and administrative account foreign currencies-net*

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Berdasarkan ketentuan BI yang berlaku, rincian liabilitas komitmen dan kontinjensi untuk pembelian dan penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan, fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan, garansi yang diterbitkan dan titipan kliring berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Based on the prevailing BI regulation, the details of commitments and contingencies payables for unsettled purchase and sales of spot foregin currency, unused loan facilities, outstanding irrevocable letters of credit, guarantees issued and funds for clearing based on collectibility and currency are as follows:

	2016						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas Komitmen							***Commitment Liabilities***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.577.427.095)	(1.509.947)	-	(35.060)	(14.679)	(1.578.986.781)	*Unused loan facilities*
L/C yang irrevocable dan masih berjalan							*Outstanding irrevocable letters of credit*
Pihak ketiga	(19.481.351)	-	-	-	-	(19.481.351)	*Third parties*
Pihak berelasi	(26.877.100)	-	-	-	-	(26.877.100)	*Related parties*
Jumlah liabilitas komitmen	(1.623.785.546)	(1.509.947)	-	(35.060)	(14.679)	(1.625.345.232)	*Total commitment liabilities*
Jumlah liabilitas komitmen-bersih	(1.623.785.546)	(1.509.947)	-	(35.060)	(14.679)	(1.625.345.232)	*Total commitment liabilities-net*

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	2016						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Kontinjensi							***Contingencies***
Tagihan Kontinjensi							***Contingent Receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	72.751.876	-	-	72.751.876	*Past due interest receivable*
Liabilitas Kontinjensi							***Contingent Liabilities***
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:							*Guarantees issued in the form of:*
- Garansi penawaran Rupiah	(9.282.764)	-	-	-	-	(9.282.764)	*Bid bonds - Rupiah*
- Garansi pelaksanaan Rupiah	(41.976.536)	-	-	-	-	(41.976.536)	*Performance bonds - Rupiah*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(51.259.300)	-	-	-	-	(51.259.300)	*Total contingent liabilities*
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	(51.259.300)	-	72.751.876	-	-	21.492.576	*Total contingent liabilities-net*
Lain-lain							***Others***
Titipan kliring	(51.635.212)	-	-	-	-	(51.635.212)	*Funds for clearing*
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1.726.680.058)	(1.509.947)	72.751.876	(35.060)	(14.679)	(1.655.487.867)	*Total contingent and commitment liabilities*

	2015						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Tagihan Komitmen							***Receivables***
Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan	689.559	-	-	-	-	689.559	*Unsettled purchase of spot foreign currency*
Jumlah tagihan komitmen	689.559	-	-	-	-	689.559	*Total commitment receivables*
Liabilitas Komitmen							***Commitment Liabilities***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.687.437.313)	(50.786)	(10.145.079)	(480)	(464.529)	(1.698.098.186)	*Unused loan facilities*
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	(689.250)	-	-	-	-	(689.250)	*Unsettled sales of spot foreign currency*
L/C yang irrevocable dan masih berjalan							*Outstanding irrevocable letters of credit*
Pihak ketiga	(11.457.000)	-	-	-	-	(11.457.000)	*Third parties*
Pihak berelasi	(26.776.363)	-	-	-	-	(26.776.363)	*Related parties*
Jumlah liabilitas komitmen	(1.726.359.925)	(50.786)	(10.145.079)	(480)	(464.529)	(1.737.020.799)	*Total commitment liabilities*
Jumlah liabilitas komitmen-bersih	(1.725.670.366)	(50.786)	(10.145.079)	(480)	(464.529)	(1.736.331.240)	*Total commitment liabilities-net*

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	2015						
	Lancar/ *Pass*	Dalam perhatian khusus/ *Special mentions*	Kurang lancar *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Kontinjensi							***Contingencies***
Tagihan Kontinjensi							***Contingent Receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-	-	46.491.759	-	-	46.491.759	*Past due interest receivable*
Liabilitas Kontinjensi							***Contingent Liabilities***
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:							*Guarantees issued in the form of:*
- Garansi penawaran Rupiah	(100.000)	-	-	-	-	(100.000)	*Bid bonds - Rupiah*
- Garansi pelaksanaan Rupiah	(46.878.635)	-	-	-	-	(46.878.635)	*Performance bonds - Rupiah*
- Garansi uang muka Rupiah	(100.000)	-	-	-	-	(100.000)	*Advance payment bonds - Rupiah*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(47.078.635)	-	-	-	-	(47.078.635)	*Total contingent liabilities*
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	(47.078.635)	-	46.491.759	-	-	(586.876)	*Total contingent liabilities-net*
Lain-lain							***Others***
Titipan kliring	(95.329.771)	-	-	-	-	(95.329.771)	*Funds for clearing*
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	(1.868.078.772)	(50.786)	36.346.680	(480)	(464.529)	(1.832.247.887)	*Total contingent and commitment liabilities*

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat komitmen dan kontinjensi yang mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2016 and 2015, there was no impairment on commitment and contingencies.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

Dalam bisnis normal perbankan, Bank memiliki komitmen dan kontinjensi yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan.

As part of normal banking business, Bank has commitments and contingencies that are not presented in the statement of financial position.

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak setara dengan mata uang Rupiah adalah sebagai berikut:

The following is a summary of Bank commitments and contingencies at the equivalent Rupiah contractual amounts are as follows:

	2016	2015	
Tagihan Komitmen			***Commitment Receivables***
Pembelian valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	689.559	*Unsettled purchase of spot foreign currency*
Jumlah tagihan komitmen	-	689.559	*Total commitment receivables*

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

	2016	2015	
Liabilitas Komitmen			***Commitment Liabilities***
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(1.578.986.781)	(1.698.098.186)	*Unused loan facilities*
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	-	(689.250)	*Unsettled sales of spot foreign currency*
L/C yang *irrevocable* dan masih berjalan			*Outstanding irrevocable letters of credit*
Pihak ketiga	(19.481.351)	(11.457.000)	*Third parties*
Pihak berelasi	(26.877.100)	(26.776.363)	*Related parties*
Jumlah liabilitas komitmen	(1.625.345.232)	(1.737.020.799)	*Total commitment liabilities*
Jumlah liabilitas komitmen-bersih	**(1.625.345.232)**	**(1.736.331.240)**	***Total commitment liabilities-net***
Kontinjensi			***Contingencies***
Tagihan Kontinjensi			***Contingent Receivables***
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	72.751.876	46.491.759	*Past due interest receivable*
Liabilitas Kontinjensi			***Contingent Liabilities***
Garansi yang diterbitkan dalam bentuk:			*Guarantees issued in the form of:*
- Garansi penawaran			*Bid bonds -*
Rupiah	(9.282.764)	(100.000)	*Rupiah*
- Garansi pelaksanaan			*Performance bonds -*
Rupiah	(41.976.536)	(46.878.635)	*Rupiah*
- Garansi uang muka			*Advance payment bonds -*
Rupiah	-	(100.000)	*Rupiah*
Jumlah liabilitas kontinjensi	(51.259.300)	(47.078.635)	*Total contingent liabilities*
Jumlah liabilitas kontinjensi-bersih	**21.492.576**	**(586.876)**	***Total contingent liabilities-net***
Lain-lain			***Others***
Titipan kliring	(51.635.212)	(95.329.771)	*Funds for clearing*
Jumlah liabilitas komitmen dan kontinjensi	**(1.655.487.867)**	**(1.832.247.887)**	***Total contingent and commitment liabilities***

Liabilitas komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi diungkapkan pada catatan 37.

Commitments and contingent liabilities to related parties are disclosed in note 37.

40. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN / *40. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES*

	2016							
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga *jatuh tempo/ Held to maturity*	Tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Total nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset								*Assets*
Kas	88.120.683	-	-	-	-	88.120.683	88.120.683	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	433.528.205	-	-	-	-	433.528.205	433.528.205	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	361.355.194	-	-	-	-	361.355.194	361.355.194	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.881.847	-	-	-	-	417.881.847	417.881.847	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	6.355.258	1.005.828.192	-	-	-	1.012.183.450	1.018.646.430	*Securities*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Spot andderivative receivables*
Kredit yang diberikan	5.205.928.054	-	-	-	-	5.205.928.054	5.205.928.054	*Loans*
Tagihan akseptasi	6.330.054	-	-	-	-	6.330.054	6.330.054	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	47.106.970	-	-	-	-	47.106.970	47.106.970	*Others assets*
	6.566.606.265	1.005.828.192	-	-	-	7.572.434.457	7.578.897.437	
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas segera	-	-	-	-	12.786.054	12.786.054	12.786.054	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	-	-	-	-	6.312.303.146	6.312.303.146	6.312.303.146	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	53.357.530	53.357.530	53.357.530	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi					79.945.815	79.945.815	79.945.815	*Subordinated loans*
Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Spot andderivative liabilities*
Utang akseptasi	-	-	-	-	10.341.558	10.341.558	10.341.558	*Acceptance payables*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	16.822.988	16.822.988	16.822.988	*Others liabilities*
	-	-	-	-	6.485.557.091	6.485.557.091	6.485.557.091	

40. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *40. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)*

	2015							
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Dimiliki hingga *jatuh tempo/ Held to maturity*	Tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	Nilai wajar melalui laporan laba rugi/ *Fair value through profit or loss*	Liabilitas keuangan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Total nilai tercatat/ *Total carrying amount*	Total nilai wajar/ *Total fair value*	
Aset								*Assets*
Kas	105.014.980	-	-	-	-	105.014.980	105.014.980	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	561.537.039	-	-	-	-	561.537.039	561.537.039	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	354.873.381	-	-	-	-	354.873.381	354.873.381	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	479.982.011	-	-	-	-	479.982.011	479.982.011	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	11.974.142	556.741.033	-	-	-	568.715.175	561.620.971	*Securities*
Tagihan spot dan derivatif	8.500	-	-	-	-	8.500	8.500	*Spot andderivative receivables*
Kredit yang diberikan	6.376.518.672	-	-	-	-	6.376.518.672	6.376.518.672	*Loans*
Tagihan akseptasi	20.597.054	-	-	-	-	20.597.054	20.597.054	*Acceptance receivables*
Aset lain-lain	42.928.803	-	-	-	-	42.928.803	42.928.803	*Others assets*
	7.953.434.581	556.741.033	-	-	-	8.510.175.614	8.503.081.410	
Liabilitas								*Liabilities*
Liabilitas segera	-	-	-	-	6.183.051	6.183.051	6.183.051	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah	-	-	-	-	7.183.830.449	7.183.830.449	7.183.830.449	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	69.615.116	69.615.116	69.615.116	*Deposits from other banks*
Pinjaman subordinasi	-	-	-	-	81.800.190	81.800.190	81.800.190	*Subordinated loans*
Liabilitas spot dan derivatif	-	-	-	-	8.191	8.191	8.191	*Spot andderivative liabilities*
Utangakseptasi	-	-	-	-	20.597.054	20.597.054	20.597.054	*Acceptance payables*
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	25.251.313	25.251.313	25.251.313	*Others liabilities*
	-	-	-	-	7.387.285.364	7.387.285.364	7.387.285.364	

41. PELAPORAN SEGMEN / *41. SEGMENT REPORTING*

	2016				
	Bandung	Jakarta	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan:					***Income:***
Pendapatan bunga, provisi dan komisi	588.677.135	86.499.123	230.135.008	905.311.266	*Interest, fees and commision income*
Hasil:					***Income:***
Laba operasional	(53.349.974)	55.735.309	14.099.647	16.484.983	*Operational income*
Laba bersih	(57.506.424)	52.239.549	13.375.500	8.108.625	*Net income*
Aset:					***Assets:***
Jumlah aset	5.575.648.927	504.100.343	1.626.033.143	7.705.782.413	*Total assets*
Liabilitas:					***Liabilities:***
Jumlah liabilitas	4.326.377.338	1.030.607.194	1.151.288.091	6.508.272.623	*Total liabilities*

41. PELAPORAN SEGMEN (lanjutan) / *41. SEGMENT REPORTING (continued)*

	2015				
	Bandung	Jakarta	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan:					***Income:***
Pendapatan bunga, provisi dan komisi	586.730.693	112.899.066	306.787.188	1.006.416.947	*Interest, fees and commision income*
Hasil:					***Income:***
Laba operasional	(24.121.655)	46.246.397	64.884.470	87.009.213	*Operational income*
Laba bersih	(47.004.387)	48.584.351	65.286.892	66.866.856	*Net income*
Aset:					***Assets:***
Jumlah aset	5.673.790.924	841.536.598	2.097.786.237	8.613.113.759	*Total assets*
Liabilitas:					***Liabilities:***
Jumlah liabilitas	4.905.012.164	1.256.208.271	1.256.400.654	7.417.621.089	*Total liabilities*

42. MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN / *42. CAPITAL RISK MANAGEMENT*

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank's capital management objectives is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer, and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing an optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Tabel di bawah ini menunjukkan modal dan rasio kecukupan modal (CAR) untuk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

The following table set forth the CAR as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

	2016 **)	2015 **)	
Modal Inti (Tier I)			*Core Capital (Tier I)*
Modal disetor	338.417	338.417	*Share capital*
Tambahan modal disetor bersih			*Paid in capital - net*
Agio	221.038	221.038	*Agio*
Cadangan umum	71.770	65.084	*General reserves*
Laba bersih tahun sebelumnya	558.177	504.087	*Net income from previous year*
Laba bersih tahun berjalan	8.109	66.867	*Net income for the year*
Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset non-keuangan	(13.625)	(10.459)	*Differences between allowance for losses and impairment losses of financial assets and non-financial assets*
Aset tidak berwujud lainnya	(3.227)	(3.658)	*Intangible assets*
Jumlah	**1.180.659**	**1.181.376**	*Total*

42. MANAJEMEN RISIKO PERMODALAN (lanjutan) / *42. CAPITAL RISK MANAGEMENT (continued)*

	2016 **)	2015 **)	
Modal pelengkap (Tier II)			*Suplementary Capital (Tier II)*
Cadangan umum atas aset produktif	50.484	46.353	*General reserves on earning assets*
Pinjaman subordinasi	29.314	61.343	*Subordinated loans*
Jumlah	**79.798**	**107.696**	*Total*
Jumlah Modal (Tier I dan Tier II)	1.260.457	1.289.072	*Total capital (Tier I and Tier II)*
Jumlah ATMR	6.127.141	7.132.317	*Total Risk Weighted Assets*
CAR setelah risiko kredit, operasional, dan pasar	20,57%	18,07%	*CAR after credit, operational and market risk*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	8,00%	8,00%	*Required Capital Adequacy Ratio*

) dalam jutaan Rupiah / *) expressed in million of Rupiah*

Capital Adequacy Ratio Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing adalah sebesar 20,57% dan 18,07%.

The CAR of the Bank is 20.57% and 18.07% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio [CAR]) adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari dari Modal Inti ("Tier I") dan Modal Pelengkap ("Tier II") dikurangi penyertaan pada anak perusahaan.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) is the ratio of the Bank's capital over its Risk-Weighted Aseets (ATMR). By Bank Indonesia regulations, the total capital for the credit risk consist of core ("Tier I") capital and supplementary capital ("Tier II"), less investments in subsidiary.

Manajemen menggunakan peraturan rasio permodalan untuk memantau kecukupan modal, sesuai dengan standard industri. Pendekatan Bank Indonesia untuk pengukuran modal tersebut terutama didasarkan pada pemantauan kebutuhan modal yang diwajibkan (diukur sebagai 8 persen dari aset tertimbang menurut risiko) terhadap modal yang tersedia.

Management uses regulatory capital ratios in order to monitor its capital base, and these capital ratios remain the industry standards for measuring capital adequacy. BI's approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital resources requirement (measured as 8 percent of risk-weighted assets) to available capital resources.

43. MANAJEMEN RISIKO / *43. RISKS MANAGEMENT*

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum" No. 5/8/PBI/2003 yang diubah dalam PBI No. 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal "Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum". Menurut surat edaran tersebut, penerapan manajemen risiko harus dilakukan pada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

The Bank has implemented risk management policy in accordance with Bank Indonesia's Regulation No. 5/8/PBI/2003 concerning "Application of Risk Management for Commercial Bank" that changed in PBI No. 11/25/PBI/2009 and Bank Indonesia Circular Letter No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011 concerning "Risk Management for Commercial Bank". As stipulated in the decree, processes for application of risk management shall be implemented for credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

Bisnis Bank mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Bank adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini, mengelola posisi risiko dan menentukan alokasi modal. Bank secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

The Bank's business involves taking on risks in a targeted manner and managing them professionally. The core functions of the Bank's risk management are to identify all key risks for the Bank, measure these risks, manage the risk positions and determine capital allocations. The Bank regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, products and best market practices.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Organisasi Manajemen Risiko

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No.Kep 004/DK/III/2009 tanggal 13 Maret 2009, antara lain dalam bentuk pengawasan aktif penerapan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. Sedangkan dalam rangka pengawasan aktif dari Direksi, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No.Kep-035-DIR/10/2009 tanggal 28 Oktober 2009. Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat rutin secara periodik dimana hasil dari rapat tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko pada Bank.

Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang melekat pada Bank. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Untuk meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam rangka pelaksanaan penerapan manajemen risiko serta untuk memberikan arahan tertulis dalam menjalankan operasional bank, Bank membuat kebijakan dan prosedur serta menentukan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Organization of Risk Management

The Board of Commissioners was established Monitoring Risk Committee as per decree No.Kep-004/DK/III/2009 dated March 13, 2009, among other in the form of implementation active control of risk management.

Monitoring Risk Committee was established to assist the Board of Commissioners in implementing their duty relating to policy and risk management strategy prepared by the management. While for the active control, the Board of Directors established a Risk Management Committee as per decree of the Board of Directors No.Kep-035-DIR/10/2009 dated October 28, 2009. Risk Management Committee members consist of Directors and Executive Officers of the Bank who have the responsibility to assist the Board of Directors in implementing their duty to prepare policy and risk management strategy, determine risk limit and evaluate risk management implementation. Risk Management Committee routinely carries out meeting periodically, the result of such meeting is reported to the Board of Commissioners for further evaluation of the application of risk management in the Bank.

Risk Management Unit that is independent from operational unit and internal control unit. The organization structure of risk management is adjusted depending on the bank size, complexity and bank inherent risk. Risk Management Unit is directly responsible to Compliance and Risk Management Director.

To strengthen active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Bank has clearly specified the authority and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors in relation to the application of risk management, in accordance with the prevailing law and regulation.

Policy, Procedure, and Determination of Limit

In order to implement risk management and written guidance in implementing the Bank operation, the Bank makes policy and procedure and determines limit of risk tolerance which relates to the limit of potential loss which can be absorbed by the equity of the Bank and observation facilities on the development of the Bank's risk exposure.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko

Profil risiko triwulanan atau laporan bulanan manajemen risiko dilaporkan dan dibahas dalam rapat dewan direksi dan setiap triwulan dipresentasikan di hadapan Komite Pemantau Risiko dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Penilaian jenis risiko merupakan kombinasi dari risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional (*inherent risk*) dan sistem pengendalian risiko.

Risiko Likuiditas

Penilaian profil risiko dilakukan oleh Bank terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktivitas fungsional bank yang memiliki potensi kerugian bagi bank.

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Bank dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi liabilitas sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko likuiditas juga timbul dari situasi dimana Bank tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2016, profil risiko yang melekat adalah "*low to moderate*" dengan trend stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 205, serta sistem pengendalian risiko adalah "*satisfactory*", sehingga secara komposit profil risiko likuiditas adalah "*low to moderate*".

Dalam rangka pengelolaan risiko likuiditas PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk telah menerapkan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko likuiditas.
2. Meningkatkan fungsi ALCO secara aktif dalam pengelolaan risiko likuiditas.
3. Menambah line money market dengan beberapa counter party baik bank pemerintah, bank swasta ataupun bank asing.
4. Menetapkan posisi *secondary reserves* yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko likuiditas.
5. Mematuhi ketentuan giro wajib minimum.
6. Melakukan analisa atas kebiasaan nasabah deposito yang merupakan konsentrasi terbesar produk Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Risk Profile

Quarterly risk profile or monthly risk management report reported and studied in the Board of Directors meeting and quarterly presented to the Risk Monitoring Committee and reported to Bank Indonesia.

Valuation of risk profile is a combination of inherent risks and risk control system.

Liquidity Risk

The Bank's valuation of risk profile consists of 8 types of risks : credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, law risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk of the functional activities of the Bank which potential losses had been around by the Bank.

Bank's inability to accommodate withdrawals, fund asset growth and otherwise meet contractual obligations through generally unconstrained access to funding at reasonable market rates. Liquidity risk also arises from situations in which the Bank cannot unload its financial assets because nobody in the market wants to trade that asset.

On December 31, 2016, the inherent liquidity risk profile assessed "low to moderate" with stable trend compare to the position profile December 31, 2015, along with risk control assessed "satisfactory", so as composite liquidy risk-profile is assessed "low to moderate".

To manage liquidity risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following :

1. *Specifies policies and guidelines for liquidity risk management.*
2. *To improve the ALCO function actively in liquidity risk management.*
3. *Adds line money market with a few counterparty either state owned bank, private bank or foreign bank.*
4. *Specifies position of secondary reserves required to anticipate liquidity risk.*
5. *Comply with provision of minimum statutory reserve.*
6. *Analyzes time deposits customers' behavior which is the largest third party fund in the Bank.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Liquidity Risk (continued)

Menurut kelompok jatuh temponya berdasarkan periode yang tersisa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following table shows assets and liabilities of the Bank into relevant maturity groupings as of December 31, 2016 and 2015 based on the remaining period to the contractual maturity date:

	2016						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ *> 6 to 12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
Rupiah:							***Rupiah:***
Aset:							*Assets:*
Kas	70.461.222	70.461.222	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	379.638.205	379.638.205	-		-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	9.394.288	9.394.288	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	417.207.298	417.207.298	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	860.241.342	25.464.481	175.156.062	173.793.985	165.448.997	320.377.817	*Securities*
Kredit yang diberikan							*Loans*
- Yang belum jatuh tempo	5.028.017.932	197.429.000	440.194.530	1.026.789.183	1.410.439.475	1.953.165.744	*- Undue*
- Yang sudah jatuh tempo	127.752.922	-	-	123.948.269	3.804.653	-	*- Due*
Lain-lain	132.432.948	41.082.752	31.751.621	12.872.081	8.784.300	37.942.194	*Others*
Jumlah aset Rupiah (A)	7.025.146.156	1.140.677.245	647.102.213	1.337.403.518	1.588.477.425	2.311.485.755	*Total assets Rupiah (A)*
Liabilitas:							*Liabilities:*
Liabilitas segera	12.760.747	3.826.014	8.934.733	-	-	-	*immediately*
Simpanan nasabah	5.679.651.500	4.959.565.667	626.810.332	37.705.490	20.664.984	34.905.027	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	53.357.530	51.957.530	400.000	-	1.000.000	-	*Deposits by other banks*
Lain-lain	38.808.879	36.880.799	41.064	-	887.017	1.000.000	*Others*
Jumlah liabilitas Rupiah (B)	5.784.578.655	5.052.230.009	636.186.128	37.705.490	22.552.001	35.905.027	*Total liabilities in Rupiah (B)*
Selisih (A-B)	1.240.567.502	(3.911.552.764)	10.916.085	1.299.698.028	1.565.925.424	2.275.580.728	*Gap (A-B)*
Akumulasi selisih (A-B)	-	(3.911.552.764)	(3.900.636.680)	(2.600.938.651)	(1.035.013.226)	1.240.567.502	*Accumulated gap (A-B)*
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Kas	17.659.462	17.659.462	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	53.890.000	53.890.000	-	-	-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	351.960.906	351.960.906	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	674.549	-	-	-	674.549	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	151.942.107	1.230.352	-		-	150.711.755	*Securities*
Kredit yang diberikan							*Loans*
- Yang belum jatuh tempo	127.200.341	13.378.435	5.457.537	31.127.864	72.036.582	5.199.923	*- Undue*
- Yang sudah jatuh tempo	30.657.626	-	-	30.657.626	-	-	*- Due*
Tagihan akseptasi	6.330.054	-	6.330.054	-	-	-	*Acceptances receivables*
Lain-lain	3.044.284	2.319.249	235.254	489.781			*Others*
Jumlah aset mata uang asing (A)	743.359.331	440.438.405	12.022.845	62.275.271	72.711.131	155.911.678	*Total assets foreign currencies (A)*
Liabilitas:							*Liabilities:*
Liabilitas segera	25.308	25.308	-	-	-	-	*immediately*
Simpanan nasabah	632.651.646	584.069.158	43.841.188	4.539.222	202.078	-	*Deposits from customers*
Utang akseptasi	10.341.558	1.859.744	8.481.814	-	-	-	*Acceptance payable*
Lain-lain	80.675.456	729.641	-	-	-	79.945.815	*Others*
Jumlah liabilitas mata uang asing (B)	723.693.967	586.683.849	52.323.003	4.539.222	202.078	79.945.815	*Total liabilities foreign currencies (B)*
Selisih (A-B)	19.665.363	(146.245.445)	(40.300.158)	57.736.050	72.509.053	75.965.863	*Gap (A-B)*
Akumulasi selisih (A-B)	-	(146.245.445)	(186.545.603)	(128.809.553)	(56.300.500)	19.665.363	*Accumulated gap (A-B)*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan) / *43. RISKS MANAGEMENT (continued)*

Risiko Likuiditas (lanjutan) / *Liquidity Risk (continued)*

	2015						
	Saldo/ *Balance*	s/d 1 bulan/ *up to 1 month*	> 1 s/d 3 bulan/ *> 1 to 3 months*	> 3 s/d 6 bulan/ *> 3 to 6 months*	> 6 s/d 12 bulan/ > 6 to *12 months*	> 12 bulan/ *> 12 months*	
Rupiah:							***Rupiah:***
Aset:							*Assets:*
Kas	83.974.813	83.974.813	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	488.476.539	488.476.539	-		-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6.405.542	6.405.542	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	479.291.815	479.291.815	-	-	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	464.465.954	10.484.661	62.442.838	26.114.380	44.990.441	320.433.634	*Securities*
Kredit yang diberikan							*Loans*
- Yang belum jatuh tempo	6.005.110.317	251.874.025	567.799.937	997.971.536	1.602.106.974	2.585.357.845	*- Undue*
- Yang sudah jatuh tempo	85.009.989	-	-	77.414.276	7.595.712	-	*- Due*
Lain-lain	74.009.553	37.055.905	10.847.007	5.129.395	4.673.899	16.303.346	*Others*
Jumlah aset Rupiah (A)	7.686.744.522	1.357.563.300	641.089.782	1.106.629.587	1.659.367.027	2.922.094.826	*Total assets Rupiah (A)*
Liabilitas:							*Liabilities:*
Liabilitas segera	6.087.193	4.130.335	1.956.858	-	-	-	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	6.349.381.429	5.539.315.788	672.539.073	42.953.125	61.924.891	32.648.552	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	69.615.116	68.215.116	400.000	-	1.000.000	-	*Deposits by other banks*
Lain-lain	44.975.873	43.086.448	5.222	-	884.203	1.000.000	*Others*
Jumlah liabilitas Rupiah (B)	6.470.059.611	5.654.747.686	674.901.153	42.953.125	63.809.094	33.648.552	*Total liabilities in Rupiah (B)*
Selisih (A-B)	1.216.684.912	(4.297.184.386)	(33.811.372)	1.063.676.462	1.595.557.933	2.888.446.274	*Gap (A-B)*
Akumulasi selisih (A-B)	-	(4.297.184.386)	(4.330.995.758)	(3.267.319.295)	(1.671.761.362)	1.216.684.912	*Accumulated gap (A-B)*
Mata uang asing:							***Foreign currencies:***
Kas	21.040.167	21.040.167	-	-	-	-	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	73.060.500	73.060.500	-	-	-	-	*Demand deposits with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	348.467.839	348.467.839	-	-	-	-	*Demand deposits with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	690.196	-	-	-	690.196	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek	104.249.222	3.086.786	2.610.752	2.587.674	556.007	95.408.003	*Securities*
Kredit yang diberikan							*Loans*
- Yang belum jatuh tempo	387.582.479	6.892.500	33.489.682	101.781.726	141.107.071	104.311.501	-
- Yang sudah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	*- Due*
Tagihan akseptasi	20.597.054	8.976.191	1.233.303	10.387.560	-	-	*Acceptances receivables*
Lain-lain	5.844.933	1.998.555	57.540	545.405	3.959	3.239.475	*Others*
Jumlah aset mata uang asing (A)	961.532.390	463.522.538	37.391.276	115.302.364	142.357.232	202.958.979	*Total assets foreign currencies (A)*
Liabilitas:							*Liabilities:*
Liabilitas segera	95.857	95.857	-	-	-	-	*Obligation due immediately*
Simpanan nasabah	834.449.020	752.794.263	70.561.341	10.473.101	620.315	-	*Deposits from customers*
Utang akseptasi	20.597.054	8.976.191	1.233.303	10.387.560	-	-	*Acceptance payable*
Lain-lain	92.419.547	10.619.357	-	-	-	81.800.190	*Others*
Jumlah liabilitas mata uang asing (B)	947.561.478	772.485.668	71.794.644	20.860.661	620.315	81.800.190	*Total liabilities foreign currencies (B)*
Selisih (A-B)	13.970.912	(308.963.130)	(34.403.368)	94.441.703	141.736.916	121.158.789	*Gap (A-B)*
Akumulasi selisih (A-B)	-	(308.963.130)	(343.366.497)	(248.924.794)	(107.187.878)	13.970.912	*Accumulated gap (A-B)*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Bank yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta *treasury* dan investasi.

Profil risiko pada tanggal 31 Desember 2016 adalah "*moderate*" dengan trend cenderung stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2015, serta sistem pengendalian risiko "*fair*", sehingga secara komposit profil risiko kredit adalah "*moderate*".

Pengaruh dampak ekonomi makro masih dapat dikendalikan dengan baik pada profil risiko kredit posisi tanggal 31 Desember 2016 dikarenakan meningkatnya fungsi monitoring kredit terhadap komposisi portofolio aset, tingkat konsentrasi risiko kredit dan kualitas kredit melalui *early warning signal* secara harian, mingguan dan bulanan. Selain itu Bank secara aktif melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap faktor eksternal yang menyebabkan peningkatan risiko kredit.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit pada aktivitas perkreditan, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kriteria pemberian kredit yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
2. Menetapkan Kebijakan Pemantauan Risiko Kredit sebagai *early warning* sistem dan penanganan terhadap debitur bermasalah.
3. Melakukan reviu terhadap kecukupan struktur organisasi kredit dengan tujuan meningkatkan sistem pengendalian internal, yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis bank.
4. Menetapkan limit eksposur kepada nasabah dan pihak berelasi yang tertuang dalam Kebijakan BMPK.
5. Menetapkan *dual control* dalam rangka *four eyes principles* pada setiap pengajuan kredit.
6. Menetapkan limit dan kewenangan untuk setiap pemutus kredit (Komite Kredit).
7. Menentukan besaran agunan kredit dalam rangka mitigasi risiko kredit.
8. Menggunakan asuransi bagi debitur untuk meng-*cover* kredit pada saat debitur meninggal.
9. Menetapkan target penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan *asset recovery*.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk is a risk caused by failure of counter party in fulfilling its obligation to the Bank. Credit risk can arise from various functional activities of the Bank such as credit (finance of fund), treasury and investment.

On December 31, 2016 risk profile assessed "moderate" with stable trend compare to December 31, 2015 the position profile, along with risk control assessed "fair", so as composite credit risk profile is assessed "moderate".

Effect of the macroeconomic impact can still be controlled by either the credit risk profile position on December 31, 2016 due to increased credit monitoring function of the composition of the portfolio of assets, the level of concentration of credit risk and credit quality through early warning signal on a daily, weekly and monthly. In addition, the Bank actively identification and measurement of the external factors that cause an increase in credit risk.

To manage credit risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following policies :

1. *Specifies vesting criteria of loan written in the Bank's Loan Policy.*
2. *Establish Credit Risk Monitoring Policy as early warning system and the handling of non-performing loans debtor.*
3. *Review the adequacy of the organizational structure to improve the internal control system, accordance to the complexity of the Bank's business.*
4. *Specifies exposure limit to customer and related parties written in Legal Lending Limit Policy.*
5. *Specifies dual of control for the agenda of four eyes principles in each loan application.*
6. *Specifies limit and authority for every loan granted (Loan Committee).*
7. *Determines the amount of collateral to mitigate credit risk.*
8. *Secures insurance for debtor to cover the loan in the event of debtor's death.*
9. *Specifies target of non-performing loans settlement to increase asset recovery.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Selain itu untuk pengelolaan risiko kredit pada aktivitas *treasury*, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kriteria pembelian surat berharga yang tertuang dalam Kebijakan Surat Berharga.
2. Menetapkan *limit* eksposur kepada *counter party* yang tertuang dalam Kebijakan BMPK.
3. Menetapkan *limit* dan kewenangan untuk setiap pemutus pembelian surat berharga.

Tingkat Non-Performing Loan (NPL) gross pada 31 Desember 2016 adalah sebesar 5,31% (*gross*) dan 4,07% (*nett* sedangkan pada 31 Desember 2015 sebesar 4,74% (*gross* dan 3,98% (*nett*), rasio NPL nett berada di bawah angka 5% yang merupakan nilai maksimum NPL yang disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian bagi Bank karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dalam tingkat bunga dan nilai tukar valas di pasar uang dimana Bank beroperasi. Risiko pasar adalah melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Bank baik di *banking book* maupun di *trading book*.

Profil risiko yang melekat (inheren) pada tanggal 31 Desember 2016 adalah "*low to moderate*" dengan trend stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2015, serta sistem pengendalian risiko "*satisfactory*", sehingga secara komposit profil risiko pasar adalah "*low to moderate*".

Dalam rangka pengelolaan risiko pasar, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk melakukan beberapa langkah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan *limit* eksposur surat berharga yang termasuk kategori *trading book*.
2. Menetapkan Posisi Devisa Neto maksimum yang dapat dikelola oleh Bank.
3. Menetapkan *intra day limit* untuk transaksi mata uang asing.
4. Menetapkan *limit cut loss* untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas surat berharga yang dimiliki ataupun transaksi mata uang asing.
5. Melakukan monitoring dan *stres test* terhadap pergerakan suku bunga pasar dan nilai tukar untuk mengukur potensi kerugian risiko pasar.

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank diwajibkan memelihara Posisi Devisa Neto (PDN) setinggi-tingginya 20% atas modal Tier I dan Tier II. Posisi Devisa Neto secara keseluruhan adalah penjumlahan dari nilai absolute atas selisih aset, liabilitas dan ekuitas di laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing ditambah dengan selisih tagihan dan liabilitas dalam bentuk komitmen dan kontinjensi.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

In additon to operational credit risk in treasury activities, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk has implemented the following :

1. *Specifies purchase criteria of commercial paper written in Commercial Paper Policy.*
2. *Specifies exposure limit to counter party written in Legal Lending Limit Policy.*
3. *Specifies limit and authority for every commercial paper purchases.*

Level of gross Non-Performing Loan (NPL) as of December 31, 2016 and 2015 is equal to 5.31% (gross) 4.07% (nett) and 4.74% (gross) 3,98% (nett), respectively which is below the 5% maximum NPL allowed by Bank Indonesia.

Market Risk

Market risk is the potential for losses to the Bank resulting from adverse changes in market factors such as interest and foreign exchange rates in the financial markets in which the Bank operates. Market risk is inherent in most of the Bank's operating positions and/or activities, in the banking book and in the trading book.

On December 31, 2016 inherent risk profile assessed "low to moderate" with stable trend compare to the profile at December 31, 2015, along with risk control assessed "satisfactory", so as composite market risk profile is assessed "low to moderate".

To manage market risk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk implemented the following policies :

1. *Specifies commercial paper exposure limit which includes category trading book.*
2. *Specifies maximum Net Open Position which can be managed by Bank.*
3. *Specifies intra-day limit for arbitrage transaction.*
4. *Specifies limit cut loss to avoid significant loss from commercial paper and/or arbitrage transaction.*
5. *Performs monitoring and stress test on market interest rate movement and exchange rate to measure the market risk of potential losses.*

In accordance with Bank Indonesia regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position for a maximum of 20% of capital Tier I and Tier II. The aggregate Net Open Position is the total amount of the absolute value of the net difference between assets, liabilities, and equity denominated in each foreign currency plus the net difference of receivables and payables of commitments and contingencies.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

Posisi Devisi Neto Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif masing-masing jenis valuta asing adalah sebagai berikut:

Net foreign exchange position on Statements of Financial Position and administrative acccount by currency, as follows:

	2016				
	Aset dan tagihan komitmen dan kontijensi/ *Assets and receivables of commitments and contingencies*	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ *Liabilities and liabilities of commitments and liabilities contingencies*	Posisi devisa neto per valuta/ *Net foreign exchange position by currency*	Posisi devisa neto/ *Net foreign currency Position*	
Dolar Amerika	712.370.103	711.133.216	1.236.887	1.236.887	*United States Dollars*
Dolar Singapura	5.840.873	5.530.230	310.643	310.643	*Singapore Dollars*
Yen	819.464	345.878	473.586	473.586	*Yen*
Pound Sterling	139.487	-	139.487	139.487	*Pound Sterling*
Dolar Hongkong	249.302	7.184	242.118	242.118	*Hongkong Dollars*
Dolar Australia	4.378.248	4.213.943	164.305	164.305	*Australian Dollars*
Real Saudi Arabi	21.551	-	21.551	21.551	*Saudi Arabian Real*
Ren Min Bie China	216.854	-	216.854	216.854	*China Ren Min Bie*
Dolar Taiwan	7.920	-	7.920	7.920	*Taiwanese Dollars*
Euro	2.762.067	2.462.909	299.157	299.157	*Euro*
Ringgit Malaysia	13.073	-	13.073	13.073	*Malaysian Ringgit*
Dolar Kanada	250	-	250	250	*Canadian Dollar*
Jumlah	**726.819.192**	**723.693.361**	**3.125.831**	**3.125.831**	***Total***

	2015				
	Aset dan tagihan komitmen dan kontijensi/ *Assets and receivables of commitments and contingencies*	Liabilitas dan liabilitas komitmen dan kontinjensi/ *Liabilities and liabilities of commitments and liabilities contingencies*	Posisi devisa neto per valuta/ *Net foreign exchange position by currency*	Posisi devisa neto/ *Net foreign currency Position*	
Dolar Amerika	933.251.396	927.136.434	6.114.962	6.114.962	*United States Dollars*
Dolar Singapura	3.171.445	3.066.175	105.269	105.269	*Singapore Dollars*
Yen	11.727.030	10.334.253	1.392.777	1.392.777	*Yen*
Pound Sterling	132.964	-	132.964	132.964	*Pound Sterling*
Dolar Hongkong	81.186	-	81.186	81.186	*Hongkong Dollars*
Dolar Australia	4.453.723	4.370.083	83.640	83.640	*Australian Dollars*
Real Saudi Arabi	844.303	-	844.303	844.303	*Saudi Arabian Real*
Ren Min Bie China	672.477	-	672.477	672.477	*China Ren Min Bie*
Dolar Taiwan	11.125	-	11.125	11.125	*Taiwanese Dollars*
Bath	3.373	-	3.373	3.373	*Bath*
Korean Won	1.043	-	1.043	1.043	*Euro*
Euro	3.427.597	3.343.783	83.814	83.814	*Malaysian Ringgit*
Ringgit Malaysia	43.309	-	43.309	43.309	*Canadian Dollar*
Dolar Kanada	248	-	248	248	
Jumlah	**957.821.218**	**948.250.728**	**9.570.490**	**9.570.490**	***Total***

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Batas nilai (absolut) Posisi Devisa Neto yang diperkenankan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 252.091.400 dan Rp 257.814.400. Persentase nilai absolut Posisi Devisi Neto terhadap modal sendiri masing masing sebesar 0,25% dan 0,74% pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Sesuai PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*), Bank wajib melaporkan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar secara bulanan dengan format yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia secara on-line dan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Market Risk), masing-masing sebesar 20,57% dan 18,07%.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian di luar Bank.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 profil risiko operasional yang melekat adalah "*moderate*" dengan trend stabil dibandingkan profil posisi 31 Desember 2015, serta sistem pengendalian risiko "*fair*" sehingga secara komposit profil risiko operasional adalah "*moderate*."

Beberapa kebijakan dan prosedur yang telah dievaluasi dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Sistem Pengendalian Internal
2. Prosedur Pelaporan Insiden Operasional
3. Kebijakan Risiko Reputasi
4. Kebijakan Risiko Hukum
5. Kebijakan dan Prosedur Pengajuan Produk atau Aktivitas Baru
6. Kebijakan dan Prosedur Rencana Kelanjutan Usaha (*Business Continuity Plan*)
7. Prosedur Outsourcing
8. Kebijakan dan Prosedur Pengamanan Informasi

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

The absolute allowed limit amount of Net Open Position as of December 31, 2016 and 2015 is Rp 252,091,400 and Rp 257,814,400. The percentage ratio of absolute amount of Net Open Position to equities is 0.25% and 0.74% as of December 31, 2016 and 2015, respectively.

Based on PBI No. 5/12/PBI/2003 "Commercial Banks Obligation to Provide Minimum Capital Adequacy with the calculation of the Market Risk", the Bank is obliged to report its position on a monthly basis, taking into consideration the market risk, using the format which has been specified by Bank Indonesia on-line and in reference to the regulation on Periodic Report of Commercial Banks.

As of December 31, 2016 and 2015 the Bank's Capital Adequacy Ratio with consideration for market risk are 20.57% and 18.07%.

Operational Risk

Operational risk is the potential for loss resulting from events involving people, processes, systems and external events.

In the operational risk management, each business unit is responsible for the risk relating to daily operational activity by referring to policy and procedure, control and routine supervisory. In addition, operational risk management also covers matters related to product development, system, human resources and principle of "know your customer" as preventive aspect to the possibility of unexpected matters.

On December 31, 2016 inherent market risk profile assessed "moderate" with stable trend compared to the profile at December 31, 2015, along with risk control assessed "fair", so as composite operational risk profile is assessed "moderate".

Policies and procedures which have been evaluated and specified are as follows :

1. *Policies for Internal Control System*
2. *Operational Incident Reporting Procedures*
3. *Policies for Reputation Risk*
4. *Policies for Legal Risk*
5. *Policies and Procedures for Submission Product and New Activities*
6. *Policies and Procedures for Business Continuity Plan*
7. *Procedures for Outsourcing*
8. *Policies and Procedures for Information Security (Information Security Standard Procedures)*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan pengikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan agar seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif mengenai Bank. Mengingat risiko reputasi ini bukan merupakan risiko yang dikelola secara terpisah dari risiko-risiko lainnya, khususnya bagi Bank dengan kompleksitas usaha yang tinggi, maka pengelolaan setiap aktivitas fungsional Bank sedapat mungkin terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Risiko Strategis

Risiko strategis mengacu pada risiko yang disebabkan oleh adanya keputusan dan/atau penerapan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan strategis yang tidak tepat, atau kegagalan Bank dalam merespon perubahan-perubahan eksternal.

Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan komprehensif di lingkungan komite-komite pengawasan dan eksekutif, yang turut mempengaruhi dan berdampak pada langkah-langkah bisnis yang akan diambil dalam kerangka kebijakan dan arah yang telah ditetapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul ketika Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Risiko kepatuhan, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risks can be caused by weaknesses in legal aspects such as lawsuits, an absence of clear and supportive laws, or weaknesses in contracts, claims or collateral agreements.

Legal risks are managed by ensuring that all activities and business relationships between the Bank and third parties are based on rules and conditions that are capable of protecting the Bank's interests from a legal perspective.

Reputation Risk

Reputation risks arise from negative publicity concerning the operations of the Bank or negative perceptions of the Bank given that reputation risk management is an integral part of risk management, especially in a bank with highly complex operations, the management of each functional aspect of the bank is integrated into a single accurate and comprehensive risk management system and process as much as possible.

Strategic Risk

Strategic risk refers to the risk of a bad outcome attributed due to a decision and/or implementation of a Bank's strategy, a bad or misjudged strategic decision or the Bank's failure to respond to external changes. that the Bank will embark on.

Bank manages strategic risks through a comprehensive and collective consideration and decision-making processes encompassing areas of the supervisory and executive committees that influence and impact business decisions on policies and directions.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk when the Bank does not comply or implement current laws and regulations and other policies. If compliance risk is not managed well, it will potentially lead to penalty charges, punishments, or damage to reputation.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Bank melakukan identifikasi dan pengelolaan risiko kepatuhan sejak awal dengan memberikan bantuan kepada unit bisnis dan unit operasional dalam hal proses perumusan struktur transaksi dan pengembangan produk baru dan secara aktif melakukan penilaian terhadap kebijakan Pedoman dan Prosedur Internal yang dimiliki oleh Bank untuk memastikan bahwa seluruh peraturan eksternal telah diakomodir sedemikian rupa dan selanjutnya untuk dipatuhi dalam pelaksanaannya.

43. RISKS MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

The Bank implements early detection and management of compliance risks by providing assistance to business and operational units in the process of formulating transaction structures and new product developments and also evaluated the Bank's Guidelines and Procedures to ensure that all external regulations have been accommodated and implemented correctly.

44. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin kewajiban bank umum meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan deposit on call, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diterima, *letters of credit*, akseptasi, swap mata uang dan liabilitas kontinjensi lainnya seperti bank garansi, *standby letters of credit*, *performance bonds* dan liabilitas sejenis lain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti pinjaman subordinasi dan liabilitas kepada direktur, komisaris dan pihak berelasi dengan bank.

Peraturan LPS No.1 tanggal 9 Maret 2006, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp 100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp 2.000.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan yang dibayar sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 13.874.189 dan Rp 15.831.463 (lihat catatan 24).

44. GOVERNMENT QUARANTEE ON PUBLIC BANK PAYMENT OBLIGATION

Since 1998, the Government guarantees the obligations of private banks including demand deposits, saving deposits, time deposits, deposits on call, bonds, securities, interbank borrowings, fund borrowings, letters of credit, acceptances, currency swap and other contingent liabilities such as bank guarantees, standby letters of credit, performance bonds and other kinds of liabilities other than those excluded in this regulation such as subordinated loans, liabilities to directors, commissioners and related parties of the Bank.

Based on LPS Regulation No. 1 dated March 9, 2006, guarantees on deposits covers demand deposits, time deposits, certificate of deposits, saving deposits and deposits, from other banks.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 year 2008 regarding the amount of guarantee on deposits guaranteed by LPS. Based on the such regulation, the guaranteed customer's deposit amount in a bank which previously according to Law No. 24 year 2004 amounted to maximum Rp 100,000,000 (full amount), was amended to maximum of Rp 2,000,000 000 (full amount).

As of December 31, 2016 and 2015 , the Bank was a participant of that guarantee program.

Guarantee premium expense paid as of December 31, 2016 and 2015 are Rp 13,874,189 and Rp 15,831,463, respectively (see note 24).

45. PERJANJIAN PENTING

1. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis, sebagai berikut:

   a. Berdasarkan Nomor: B.058-DIR/2002, Nomor: 131/LA/PKS/000/2002, Nomor: 087/PKS.BNP-LA/AJ/000/2002 tanggal 1 Juli 2002, Bank telah melakukan perjanjian untuk menyediakan perangkat lunak atau aplikasi computer yang dapat digunakan Bank sebagai sarana pengiriman laporan perbankan ke Bank Indonesia, yaitu Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) dan Otomasi Sistem Informasi Debitur (SID).

   b. Berdasarkan Perjanjian Nomor: 005/PKS.BNP/AJ/000/2004 tanggal 25 Mei 2004, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang penyediaan, pengelolaan dan pengembangan Layanan Kartu Debit ATM bagi Nasabah Bank yang menggunakan Kartu Debit ATM untuk transaksi pembayaran belanja. Biaya yang harus dikeluarkan Bank tergantung dari jumlah transaksi nasabah. Apabila jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah kurang dari 10.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank dikenakan biaya sebesar Rp 2.000 per transaksi. Apabila jumlah transaksi yang dilakukan nasabah mencapai 10.001 sampai dengan 25.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank dikenakan biaya sebesar Rp 1.250 per transaksi. Dan apabila jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah lebih dari 25.000 dalam 1 bulan, maka untuk setiap transaksi pada bulan berikutnya Bank akan dikenakan biaya sebesar Rp 500 per transaksi. Perjanjian ini berlaku dari sejak perjanjian ditandatangani.

   c. Berdasarkan Perjanjian Nomor: 068/PKS.BNP/AJ/000/2008 tanggal 17 Desember 2008, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan ATM Bersama untuk *principle member*. Jangka waktu perjanjian (masa berlangganan) selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani nya perjanjian dan dapat diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu, Bank tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS

1. The Bank entered into agreements with PT Artajasa Pembayaran Elektronis, as follows:

a. Based on agreement Nomor: B.058-DIR/2002, Nomor: 131/LA/PKS/000/2002, Nomor: 087/PKS.BNP-LA/AJ/000/2002 as of July 1, 2002, The Bank entered into a cooperation agreement to provide software or computer application that can be used by the bank to send the banking report to Bank Indonesia, which is "Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Bulanan Bank Umum" (LBU), "Otomasi Sistem Penyampaian Laporan Berkala Bank Umum" (LBBU) and "Otomasi Sistem Informasi Debitur" (SID).

b. Based on agreement Nomor: 005/PKS.BNP/AJ/000/2004 dated as of May 25, 2004, the Bank has entered into cooperation agreement in providing, managing and developing the ATM Debit Card service for Bank's customer to pay the purchase transactions. The cost that have to be paid by the Bank depends on the total of customer transactions. If the customers transactions is less than 10,000 in 1 month, on the next following month, the Bank will be charged Rp 2,000 per transactions. If total of customer transactions reach 10,001 until 25,000 in 1 month, for the next following month the Bank will be charged Rp 1,250 per transactions. And if the total of customer transactions is more than 25,000 in a month, the Bank will be charged Rp 500 per transaction. This agreement is valid since the agreement was signed.

c. Based on agreement Nomor: 068/PKS.BNP/AJ/000/2008 as of December 17, 2008, the Bank entered into a cooperation agreement of use of "ATM Bersama" for principle member. Term of agreement (subscription) for 3 (three) years from the date of his signed agreement and can be extended automatically remedy period of twelve (12) months if not later than 3 (three) months before the expiry of the period, the Bank does not undertake notification written.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

2. Pada tanggal 13 Juni 2003, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Daya Network Lestari tentang pemakaian ATM-Bersama ALTO. Biaya awal keanggotaan sebesar US$ 300.000 dan biaya tahunan tiga tahun pertama sebesar US$ 48.000 + PPN/tahun dan memasuki tahun ke empat sebesar US$ 60.000 + PPN/ tahun. Perjanjian ini mulai berlaku sejak DNL menerima pembayaran biaya awal keanggotaan secara penuh dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri. Berdasarkan perjanjian Nomor: 053/DIR/PKS/2008 tanggal 16 Mei 2008 terdapat addendum ke 1 untuk mengadakan perubahan dan penambahan pada poin 1 dan 2 lampiran II perjanjian induk, diantaranya mengubah biaya awal keanggotaan menjadi sebesar Rp 2.500.000.000 dan biaya iuran tahunan menjadi biaya iuran per bulan menurut volume transaksi setahun.

3. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Rintis Sejahtera, sebagai berikut:

   a. Berdasarkan Perjanjian Nomor: PKS/RS-BNP/001/I/2004 tanggal 15 Januari 2004, Bank mengadakan perjanjian kerjasama mengenai jasa berlangganan jaringan ATM Prima untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian. Uang jaminan sebesar USD 235.000 dan biaya keanggotaan USD 45.000 per tahun belum termasuk PPN. Melalui surat pemberitahuan nomor 009/RS-DIR/0715, sehubungan telah dikeluarkannya kebijakan baru Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 dan Surat Edaran Bank Nomor 17/11/DKSP tentang kewajiban penggunaan di wilayah NKRI, biaya keanggotaan yang sebelumnya sebesar USD 45.000 menjadi Rp 500.000.000 per tahun belum termasuk PPN. Apabila tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran maka masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 24 bulan dan berikutnya.

   b. Berdasarkan Perjanjian No : PKS/RS-BNP/002/05/2009 tanggal 22 Mei 2009, Bank mengadakan perjanjian kerjasama mengenai PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebagai Acquirer Bank untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian. Pada tanggal 8 Desember 2015, perjanjian ini telah ditandatangani Addendum Pertama dengan nomor 092/DCL/PKS/2015 terkait perubahan beberapa ketentuan dalam Perjanjian. Apabila tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran maka masa berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 24 bulan dan berikutnya.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

2. On June 13, 2003, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Daya Network Lestari of use of "ATM Bersama- ALTO". Joining fee amounted US$ 300,000 and annual fee for the first 3 year amounted US$ 48,000+VAT/year and amounted to US$ 60,000+VAT/year thereafter. The agreement is valid since DNL receipt full amount of joining fee and it will be automatically renewal except there is a notification from one of party to end the agreement. Based on agreement No. 053/DIR/PKS/2008 as of May 16, 2008 there is first addendum to change and adding point 1 & 2 main agreement, such as change of joining fee become Rp 2,500,000,000 and changes annual fee to monthly fee based on volume of transaction of the year.

3. The Bank entered into agreements with PT Rintis Sejahtera, as follows:

a. Based on agreement Nomor: PKS/RS-BNP/001/I/2004 as of January 15, 2004, the Bank entered into a cooperation agreement regarding the subscription of payment of ATM Prima services for the period 24 months from the agreement was signed. Security deposits amounting to USD 235,000 and membership fee amounting to USD 45,000 every year not include VAT. Through the notification letter number 009/RS-DIR/0715, in respect of the issuance of a new policy of Bank Indonesia as stipulated in Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 and Surat Edaran Bank No. 17/11/DKSP about duty of use in NKRI area, membership fee previously amounting USD 45,000 to Rp 500,000,000 per year excluding VAT. If there is no notification of winding up of the subscription period, it will be automatically extended for the period 24 months and thereafter.

b. Based on agreement No : PKS/RS-BNP/002/05/2009 as of May 22, 2009, the Bank entered into a cooperation agreement regarding PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk as Acquirer Bank for the period 24 months from the agreement was signed. On December 8, 2015, this agreement has been signed with the First Addendum with number 092/DCL/MCC/2015 related to the changes in the provisions of the agreement. If there is no notification of winding up of the subscription period, it will be automatically extended for the period 24 months and thereafter.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

4. Pada tanggal 16 Mei 2005, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT BPR Eka Bumi Artha tentang jasa berlangganan Jaringan ATM-Bersama ALTO melalui kerjasama Co–Branding. Uang jaminan sebesar Rp 1.000.000.000 (nilai penuh) dan biaya iuran sebesar USD 20.000 yang berubah menjadi Rp 130.000.000 per tahun. Perjanjian ini berlaku sejak Bank telah menerima pembayaran jaminan dan iuran tahunan Co-Branding tahun pertama secara penuh dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri.

5. Berdasarkan Perjanjian Nomor : B050-DIR/PKS/2005 tanggal 18 Mei 2005, Bank telah melakukan kerjasama dengan PT Bussan Auto Finance ("Bussan") untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran dengan menggunakan sistem Host to Host yang meliputi penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen Bussan melalui jaringan pelayanan Bank. Bank dapat mengenakan biaya transaksi kepada Bussan sebesar Rp 5.000 per transaksi pembayaran yang berhasil. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 18 Mei 2005 sampai dengan 18 Mei 2008 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

6. Pada tanggal 2 Januari 2006, berdasarkan Surat Kontrak No. MA001/BNP-WNI/I-06 Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Wincor Nixdrof Indonesia dalam rangka penyediaan layanan perawatan mesin ATM Procash 2000/xe ATM BNP beserta suku cadangnya. Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pada tanggal 1 Juni 2016, perjanjian ini telah ditandatangani Addendum ketiga dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) tahun berikutnya. Apabila kedua belah pihak tidak memberitahukan secara tertulis pemberhentian kontrak ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka secara otomatis akan diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

4. On May 16, 2005, the Bank entered into a cooperation agreement with PT BPR Eka Bumi Artha on the subscription of payment of ATM-Bersama ALTO through Co-Branding agreement. Security deposits amounting to Rp 1,000,000,000 (full amount) and annual cost is amounting to USD 20.000 that has been changed to Rp 130,000,000 per year. This agreement is valid from the Bank receipt first year annual membership fee and collateral Co-Branding agreement fee, and it will be automatically renewal except there is a notification from one of party to end the agreement.

5. Based on agreement Nomor : B050-DIR/PKS/2005 as of May 18, 2005, Bank has entered into cooperation agreements with PT Bussan Auto Finance (Bussan) to do a cooperation receiving payment by using the system Host to Host which include the receipt of instalment payments from Bussan customers through a network of Bank services. The Bank provide Rp 5,000 each for successful payment. This agreement valid for 3 years from May 18, 2005 up to May 18, 2008 and automatically renewal for the same period.

6. As of January 2, 2006, by virtue of the contract No. MA001/BNP-WNI/I-06 the Bank entered into cooperation agreement with PT Wincor Nixdrof Indonesia in order to the provision of maintenance services for ATM Procash 2000/xe ATM BNP includes spareparts. This agreement is valid until December 31, 2008. As of Juny 1, 2016, this agreement has been signed as of January 1, 2016 until December 31, 2016 and can be extended to 2 (two) years. If the parties do not announce the termination of this contract no later than 2 (two) months before this agreement expires, it is automatically be extended for the next 2 (two) years.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

7. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 101/XI/SOFT/2006 tanggal 22 November 2006, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Teradata Megah Corporation mengenai dukungan purna jual program komputer aplikasi perbankan dan aplikasi interkoneksi antar institusi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2009. Nilai kontrak sebesar USD 76.340 pada tahun 2007 dan meningkat 10% setiap tahunnya. Pada tanggal 10 Mei 2010 perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan nilai kontrak USD 101.608,54 di luar PPN pada tahun pertama, dan USD 111.769,40 di luar PPN pada tahun kedua. Dan pada tanggal 2 Januari 2012 telah dilakukan perpanjangan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan nilai kontrak sebesar USD 122.947 di luar PPN pada tahun pertama, USD 135.241 pada tahun kedua, dan USD 148.765 pada tahun ketiga. Berdasarkan Nomor : 103A//DCL/PKS/2014 tanggal 23 Desember 2014 terdapat addendum pertama untuk mengadakan perubahan pada poin 1 dan 2 dan penambahan pada poin 3 dimana perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan nilai kontrak sebesar USD 163.641 di luar PPN pada tahun pertama, USD 180.000 pada tahun kedua, dan USD 198.000 pada tahun ketiga.

8. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 05/PKS/KjrBdg/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Kelola Jasa Artha cabang Bandung mengenai jasa layanan uang tunai. Perjanjian ini berlaku sejak 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Januari 2010, dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri.

9. Pada tanggal 17 Maret 2009, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Visa Worldwide Pte. Limited mengenai penggunaan network visa untuk pembayaran barang dan jasa. Perjanjian ini berlaku sejak 01 April 2009 sampai dengan 01 April 2014 dan diperpanjang secara otomatis kecuali terdapat pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

7. Based on agreement Nomor : 101/XI/SOFT/2006 as of November 22, 2006, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Teradata Megah Corporation regarding after sales services banking computer application and interinstitution interconnection application. This agreement is valid up to December 31, 2009. The contract is amounted to USD 76,340, in year 2007 and increasing 10% every year. As of May 10, 2010, extension was made and valid from January 1, 2010 until December 31, 2011, with contract amount USD 101,608.54 exclude VAT at first year, and USD 111,769.40 exclude VAT thereafter. And of January 2,2012 has been extended and valid from January 2, 2012 until December 31, 2014 with the contract amounted to USD 122,947 excluded VAT on the first year, USD 135,241 for the second year and USD 148,765 for the third year. Based on agreement Nomor : 103A/DCL/PKS/2014 as of december 23, 2014 there is first addendum to change point 1 & 2 and adding point 3 where this agreement valid from January 1, 2015 until December 31, 2017 with the contract amounted to USD 163,641 excluded VAT on the first year, USD 180,000 for the second year and USD 198,000 for the third year.

8. Based on agreement No : 05/PKS/KjrBdg/III/2009as of March 31, 2009, the Bank entered into a cooperation agreement with PT Kelola Jasa Artha Bandung branch regarding cash service. This agreement is valid from January 20, 2009 up to January 20, 2010, and it will be automatically renewal except there is a notification from one of party to end the agreement.

9. On March 17, 2009, the Bank entered into a cooperation agreement with Visa Worldwide Pte. Limited regarding managing payment products and services for clients participating in the Visa Group`s payment network ("Visa Network"). This agreement is valid from April 1, 2009 up to April 1, 2014, it will be automatically renewal except there is a notification from one of party to end the agreement.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

10. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Finnet Indonesia ("Finnet"), sebagai berikut:

    a. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 198/HK.810/COO-C0025000/2009, Nomor : 067/PKS-002/FINNET-01/2009, Nomor : B.022-DIR/PKS/2009 tanggal 28 Mei 2009 tanggal 28 Mei 2009, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk penerimaan pembayaran Jasa Telekomunikasi di Divisi Regional (DIVRE) II, III, IV, V dan VII Telkom dari pelanggan Telkom melalui fasilitas layanan jasa Cash Teller, ATM, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Autodebit. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 5 Maret 2012, dan diperpanjang otomatis untuk tahun berikutnya.

    b. Berdasarkan perjanjian Nomor : 086-DIR/PKS/2010 Pada tanggal 18 Mei 2010, addendum pertama Nomor 123-DIR/PKS tanggal 8 Juni 2011 dan adendum kedua Nomor 035/DCL/PKS/2015 tanggal 1 Juli 2015, Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk penerimaan pembayaran tagihan biller secara elektronis dengan sistem host to host. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan 11 Oktober 2012, dan diperpanjang otomatis untuk tahun berikutnya.

11. Berdasarkan surat perjanjian No. L-2100/BNP-WNI/I/11 tanggal 3 Januari 2011, Bank telah melakukan kerjasama dengan PT Wincor Nixdrof Indonesia dalam rangka pengiriman dan instalasi atas 20 (dua puluh) mesin ATM Wincor Nixdrof tipe ProCash 2000xe sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak Bank senilai USD 8.735 per unit. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan maksudnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

12. Berdasarkan Perjanjian Nomor : B.071-IT/KP/2010 tanggal 9 Juli 2010, Addendum Pertama Nomor : B-003-IT/KP/2011 & Nomor : 101/ADD/I/2011 tanggal 26 Januari 2011, Bank telah mengadakan perjanjian Kontrak Penyediaan Layanan dan Fasilitas Pusat Pemulihan Sistem Informasi Aplikasi Komputer atau *Disaster Recovery Center* dengan PT Teradata Megah. Biaya awal untuk persiapan dan setup sebesar Rp 50.000.000+PPN dan biaya kontrak setiap bulan selama jangka waktu kontrak sebesar Rp 12.000.000+PPN. Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Penggunaan DRC dan diperpanjang secara otomatis selama 12 (dua belas) bulan.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

10. The Bank entered into agreements with PT Finnet Indonesia ("Finnet"), as follows:

    a. Based on agreement Nomor : 198/HK.810/COO-C0025000/2009, Nomor : 067/PKS-002/FINNET-01/2009, Nomor : B.022-DIR/PKS/2009 tanggal 28 Mei 2009 as of May 28, 2009, the Bank entered into a cooperation agreement for the receive service payment of Telecommunication in Regional Division (DIVRE) II, III, IV, V and Vii Telkom from Telkom customer through cash teller service facility, ATM, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking and Autodebit. This agreement is valid until March 5, 2012, and automatically renewal for the next year.

    b. Based on agreement Nomor : 086-DIR/PKS/2010 dated May 18, 2010, first addendum No 123-DIR/PKS dated June 8,2011 and second addendum No 035/DCL/PKS/2015 dated July 1,2015, the Bank entered into a cooperation agreement for the payment of biller receivable electronically with host to host system. This agreement is valid for 3 years started on October 12, 2009 until October 11, 2012, and automatically renewal for the next year .

11. Based on agreement No. L-2100/BNP-WNI/I/11 dated January 3, 2011, the Bank entered into cooperation agreements with PT Wincor Nixdrof Indonesia in order to the shipment and installation of 20 ATM Wincor Nixdrof machines type 2000xe in accordance to specifications set by the Bank amounted to USD 8,735 per unit. This agreement is valid from the date the agreement was signed until one of the parties terminate this agreement by giving 60 days before to announce the termination date.

12. Based on agreement Nomor : B.071-IT/KP/2010 as of July 9 2010, First Addendum No : B-003-IT/KP/2011 & Nomor : 101/ADD/I/2011 as of January 26, 2011, The Bank entered into a cooperation agreement services and facilities of Disaster Recovery Center with PT Teradata Megah. The initial fee for preparation and setup amounted to Rp 50,000,000+VAT and monthly fee during the period of agreement amounted to Rp 12,000,000+VAT. This agreement is valid since the Minutes of Final Meetings of DRC and automatically extended for the period 12 months.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

13. Berdasarkan perjanjian No. 005/PI/BNP/X/II, tanggal 5 Oktober 2011 dan adendum pertama No. 065/DCL/PKS/2015 tanggal 2 September 2015, Bank telah melakukan kerjasama dengan PT Prismalink International untuk jasa implementasi sistem Internet Banking Individual bagi Bank serta mempersiapkan dan menyerahkan setiap hasil kerja dari jasa implementasi Internet Banking Individual yang disepakati para pihak. Biaya yang harus dikeluarkan Bank diantaranya *Initial Fee* sebesar Rp 450.000.000, *monthly fee* sebesar Rp 75.000.000 dan *Man Days Rate* sebesar Rp 2.000.000 per hari. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2011 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun pada saat jatuh temponya.

14. Pada tanggal 1 Oktober 2013, sesuai dengan perjanjian No. 025/DCL/PKS/2013, Bank melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Trans Dana Perdana dalam rangka pemberian jasa Pick Up Service, Delivery Service, Cash Processing dan Penyimpanan Uang Tunai. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 1 Oktober 2014 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu satu tahun pada saat jatuh temponya.

15. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 025/DCL/PKS/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Bank telah mengadakan perjanjian Kerjasama dengan PT Teradata Megah tentang Outsourcing Disaster Recovery Center mengenai penggunaan jasa Disaster Recovery Center untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia untuk melakukan pengoperasian seluruh jaringan komputer termasuk jaringan komputer pusat yang didalamnya terdapat sistem operasi yang terintegrasi. Perjanjian ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2015.

16. Bank telah mengadakan sejumlah perjanjian dengan PT Phintraco Technology, sebagai berikut:

    a. Pada tanggal 9 Mei 2012, sesuai perjanjian No. 150-DIR/PKS/2012, Bank telah melakukan perjanjian pembelian dan perawatan token dan Velis authenticator server sejumlah 1.000 unit selama masa garansi. Harga pembelian untuk 1.000 unit token adalah sebesar USD 42.933 sudah termasuk PPN. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan 60 hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

45. *SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)*

13. Based on agreement No. 005/PI/BNP/X/II as of October 5, 2011 and First addendum No. 065/DCL/PKS/2015 as of September 2, 2015, the Bank has entered into cooperation agreements with PT Prismalink International about implementation Individual Internet Banking system for Bank and submit all work of implementation Individual Internet Banking services as agreed between the parties. The Bank provide Rp 450,000,000 for Initial Fee, Rp 75,000,000 for monthly fee and Rp 2,000,000 each day for Man Days Rate. This agreement valid for 5 years from October 5, 2011 and automatically renewal for 1 years period at the end of the period.

14. On October 1, 2013, according to the agreement No. 025/DCL/MCC/2013, the Bank entered into an agreement with PT Trans Dana perdana in order to give Pick Up Service, Delivery Service, Cash Processing and Cash deposit. This agreement is valid for a period of one (1) year after the date of October 1, 2013 until October 1, 2014 and is automatically extended for a period of one year at the time of due date.

15. Based on agreement Nomor : 025/DCL/PKS/2015 as of Februari 11 2015, the Bank has entered into cooperation agreements with PT Terdata Megah about Outsourcing Disaster Recovery Center about the use of Disaster Recovery Center Service to fulfil the requirement of Bank Indonesia to perform the entire operation of computer networks include the central network in which there's an integrated operating system. This agreement valid for 4 years from Februari 11, 2015.

16. Bank has entered into cooperation agreement with PT Phintraco Technology as follows :

    a. As of May 9, 2012, in accordance with agreement No. 150-DIR/PKS/2012, Bank has entered into cooperation about purchase and maintenance token and Velis authenticator server for 1,000 units during the warranty period. Purchase price for 1,000 units token is USD 42,933 include VAT. This agreement valid for the period from the date of the agreement was signed until one of the parties terminate this agreement by giving 60 days before to announce the termination date.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

b. Berdasarkan perjanjian Nomor : 013/HO2808/2012 tanggal 28 Agustus 2012, Bank telah mengadakan perjanjian dengan PT Phintraco Technology tentang pemeliharaan hardware dan software Avaya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013. Pada tanggal 5 September 2016, Bank telah memperpanjang masa kerjasama hingga jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan 3 September 2017. Biaya pemberian jasa ini sebesar Rp 342.454.000 (belum termasuk PPN) untuk masa pemeliharaan 1 (satu) tahun.

17. Berdasarkan Perjanjian Nomor : B.95-KKD/PBK/01/2013, Nomor : 005/BIS/PKS/2013 tanggal 23 Januari 2013, Bank telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia dalam rangka penerbitan kartu kredit Co. Branding dengan nama "Kartu Kredit Bank BNP" dengan *unique selling point* yaitu suku bunga *cash advance* sama dengan suku bunga pembelanjaan ritel. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu atau diakhiri sebelum perjanjian ini berakhir.

18. Berdasarkan Perjanjian Nomor : PRJ-34/PB/2013, Nomor : 007/DCL/PKS/2013 tanggal 28 Juni 2013, Bank telah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ("Dirjen Perbendaharaan") untuk penyediaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara ("MPN") dalam rangka menunjang kelancaran penerimaan Negara, untuk rekonsiliasi MPN setiap akhir hari kerja, dan untuk penyampaian laporan apabila diperlukan sesuai permintaan Dirjen Perbendaharaan/Direktur Pengelolaan Kas Negara. Perjanjian ini telah diperpanjang berdasarkan No. 001/DCL/PKS/2015 tanggal 1 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.

19. Berdasarkan Perjanjian Nomor : 073.PJ/041/DIR/2010, Nomor : 039-DIR/PKS/2010 tanggal 22 Februari 2010, Bank telah mengadakan perjanjian dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tentang penerimaan pembayaran listrik clan tagihan lainnya secara online. Perjanjian ini berlaku sejak 22 Februari 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 addendum Perjanjian pada tanggal 3 November 2014 dengan Nomor : 087/DCL/PKS/2014 untuk jangka waktu addendum perjanjian berlaku sejak 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2017.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. Based on agreement Nomor : 013/HO2808/2012 as of August 28, 2012. Bank has entered into cooperation agreement with PT Phintraco Technology about maintenance Avaya hardware and software. This agreement is valid for 1 year from August 1, 2012 until July 31, 2013. As of September 5, 2016, the Bank has extended the agreement period for 1 (one) year valid from September 4, 2016 until September 3, 2017. The cost of providing this service is Rp 342,454,000 (not include VAT) for 1 (one) year maintenance period.

17. Base on agreement Nomor : B.95-KKD/PBK/01/2013, Nomor : 005/BIS/PKS/2013 as of January 23, 2013, The Bank entered into cooperation agreements with PT Bank Rakyat Indonesia in order to the publication of Co. Branding credit card named "Kartu Kredit Bank BNP*" with unique selling point that is cash advance interest rate the same with retail spending interest rate. This agreement is valid for 3 years and may be extended for a certain period of time or terminated before the agreement expires.*

18. Based on agreement Nomor : PRJ-34/PB/2013, Nomor : 007/DCL/PKS/2013 As of June 13, 2013, the Bank has entered into cooperation agreements with "Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*" (*Dirjen Perbendaharaan*) to provide and maintain the information technology system connected to* "Modul Penerimaan Negara*" (MPN) in order to support the government's revenues, to reconcile "MPN" end of period and to submit the report if necessary appropriate with "Dirjen Perbendaharaan/ Direktur Pengelolaan Kas Negara". This agreement has extended based on No. 001/DCL/PKS/2015 as of January 1, 2016 and valid until December 31, 2017.*

19. Based on agreement Nomor : 073.PJ/041/DIR/2010, Nomor : 039-DIR/PKS/2010 as of February 22, 2010, the Bank entered into an agreement with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) for electricity and other bill receipt payment with online system. This agreement is valid from February 22, 2010 until October 31, 2014. There is addendum to change agreement as of November 3, 2014 Nomor : 087/DCL/PKS/2014 an this agreement valid from October 31, 2014 until November 30, 2017.

45. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

20. Berdasarkan perjanjian No. 055/DCL/PKS/2015, tanggal 29 Juni 2015 , Bank telah melakukan kerjasama dengan PT Intelix Global Crossing untuk jasa implementasi E-Centrix Loan Origination System. Biaya yang harus dikeluarkan Bank sebesar Rp 570.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2022.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

20. Based on agreement No. 055/DCL/BNP/2015 as of June 29, 2015, the Bank has entered into an agreements with PT Intelix Global Crossinf about implementation E-Centrix Loan Origination System. The Bank provide Rp 570,000,000 for Fee. This agreement valid for 7 years from June 29, 2015 untill June 29, 2022.

46. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) berlaku efektif 1 Januari 2017:

- PSAK 3 (Penyesuaian 2016) "Laporan Keuangan Interim"
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016) "Imbalan Kerja"
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

46. PROSPECTIVE ACCOUNTING PRONOUNCEMENT

The following are new standards, amendments and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board (DSAK-IAI) effective on January 1, 2017:

- *SFAS 3 (Improvement 2016) "Interim Financial Reporting"*
- *SFAS 24 (Improvement 2016) "Employee Benefits"*
- *SFAS 58 (Improvement 2016) "Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operation"*
- *SFAS 60 (Improvement 2016) "Financial Instrument: Disclosure"*

47. REKLASIFIKASI

Terdapat akun dalam laporan keuangan 2015 telah direklasifikasi agar dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

47. RECLASSIFICATION

There are accounts in the 2015 financial statements have been reclassified to be comparable to the financial statements for the year ended December 31, 2016.

48. KASUS HUKUM

Terdapat kasus Perdata/ Non Perdata yang terjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, antara lain:

48. LAW CASE

There are Civil / Non Civil case which incurred up to date of December 31, 2016, among others:

No. / *No.*	Keterangan / *Description*	Jumlah Kasus / *Total Case*
1.	Pemalsuan dalam pembukuan Perbankan dan/atau pencurian / *Bookkeeping forgery in Banking and / or theft*	1
2.	Perbuatan melawan hukum / *Act against the law*	10
3.	Fraud eksternal / *External fraud*	1
4.	Perbuatan ingkar janji / *Broken promises action*	2
5.	Gugatan mengenai tanah dan bangunan / *Lawsuit regarding land and buildings*	1
6.	Pemalsuan surat dan/ atau penipuan / *Falsification and/ or fraud*	3
7.	Perlawanan eksekusi / *Resistance execution*	8
8.	Penipuan dan/ atau penggelapan / *Fraud and/ or embezzlement*	6
9.	Pembatalan akta notaris / *Cancellation of a notary deed*	1
	Jumlah kasus / *Total case*	33

49. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh manajemen Bank pada tanggal 28 Februari 2017.

49. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of Bank's responsible for the preparation and presentation of these financial statements which were completed and authorized for issue as approved by the management of Bank on February 28, 2017.

Lampiran Laporan Tertentu

Attachment of Other Reports

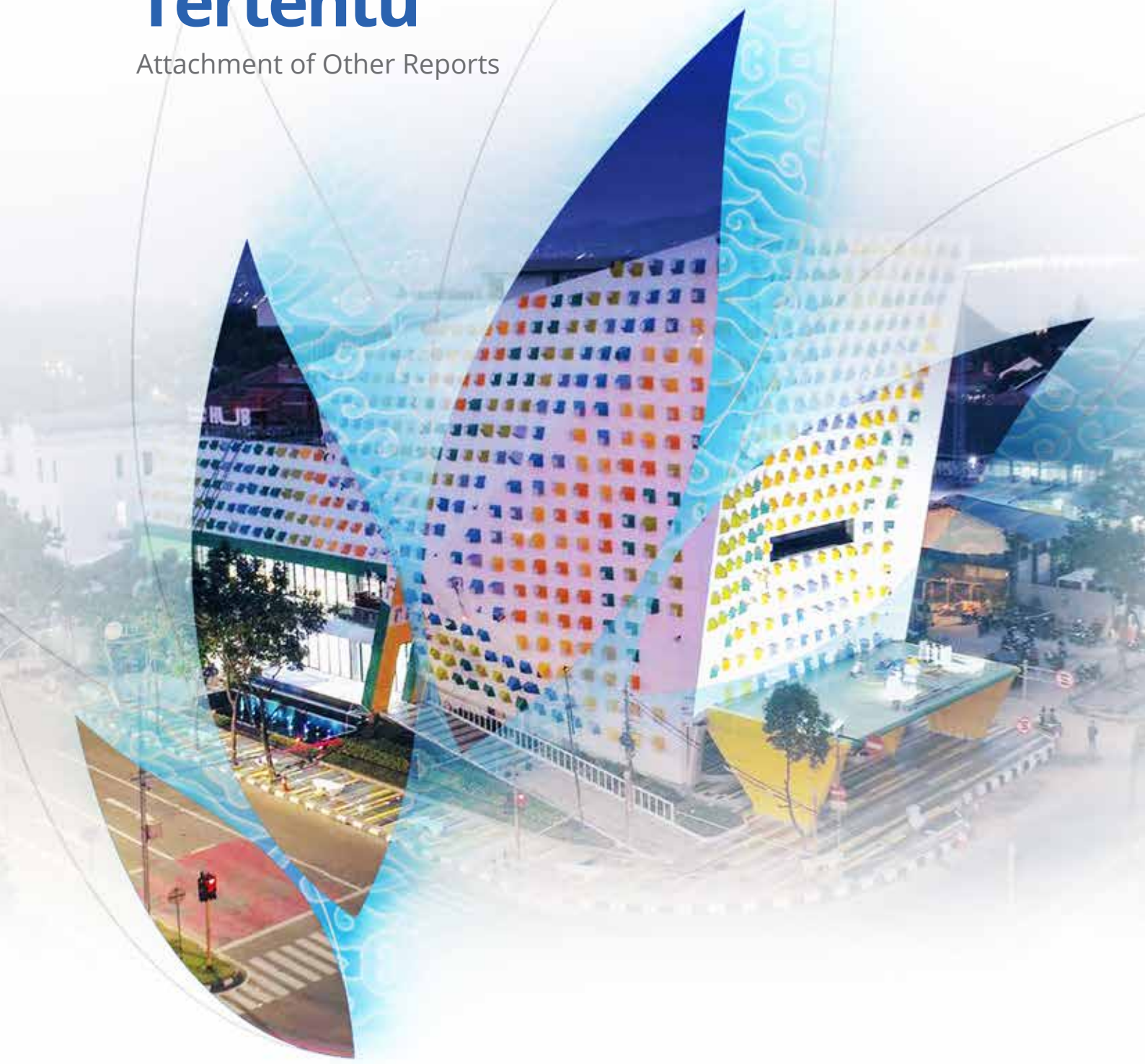

Table 2.1.a

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan (31/12/2015) Report Date Position in (31/12/2015)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Claims per Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	0,04	-	-	0,04
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	212.060,31	19.676,94	25.495,57	257.232,82
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	291.650,25	32.156,95	68.974,23	392.781,44
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/Pensioners	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	407.898,62	9.513,07	33.725,92	451.137,62
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	2.979.987,40	397.527,61	521.198,09	3.898.713,10
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	128.673,82	12.316,86	65.072,36	206.063,04
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-
	Total	**4.020.270,44**	**471.191,44**	**714.466,17**	**5.205.928,05**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2014) Previous Year Report Date Position (31/12/2014)			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Claims per Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Pemerintah	-	-	-	-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral	-	-	-	-
3	Bank	71,43	-	-	71,43
4	Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
5	Korporasi	3.615.488,99	590.221,23	744.129,82	4.949.840,04
6	Ritel	249.797,67	15.888,37	52.880,45	318.566,50
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal	199.749,27	17.395,91	39.405,17	256.550,35
8	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-
9	Kredit Beragun Properti Komersial	424.822,00	70.777,78	136.380,78	631.980,56
10	Lainnya	109.203,03	62.683,53	47.623,23	219.509,79
	Total	**4.599.132,40**	**756.966,82**	**1.020.419,46**	**6.376.518,67**

Table 2.2.a

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan (31/12/2015) / Report Date Position in (31/12/2015) Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims by Remaining Contract Time					
		<= 1 tahun 1 year	> 1 th sd 3 th 1 - 3 years	> 3 th sd 5 th 3 - 5 years	> 5 th 5 years	Non Kontraktual non-contractual	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	0,04	-	-	-	-	0,04
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	-	2.860,93	22.739,87	231.632,01	-	257.232,82
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	153.334,17	9.893,45	66.072,00	163.481,81	-	392.781,44
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/ Pensioners	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	194.736,20	149.134,53	64.066,91	43.199,98	-	451.137,62
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	2.753.568,03	111.171,84	463.891,05	570.082,17	-	3.898.713,10
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	127.327,97	12.316,88	38.775,22	27.642,97	-	206.063,04
11	Aset Lainnya / Other Assets	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-
	Total	**3.228.966,41**	**285.377,65**	**655.545,06**	**1.036.038,95**	**-**	**5.205.928,05**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2014) Previous Year Report Date Position (31/12/2014) Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak Net Claims by Remaining Contract Time					
		<= 1 tahun 1 year	> 1 th sd 3 th 1 - 3 years	> 3 th sd 5 th 3 - 5 years	> 5 th 5 years	Non Kontraktual non-contractual	Total
1	Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral	-	-	-	-	-	-
3	Bank	4,50	66,93	-	-	-	71,43
4	Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
5	Korporasi	3.337.176,13	181.928,49	785.559,10	645.176,32	-	4.949.840,04
6	Ritel	47.026,92	93.434,68	112.363,73	65.741,16	-	318.566,50
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal	3,55	6.076,76	38.491,67	211.978,37	-	256.550,35
8	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-	-	-
9	Kredit Beragun Properti Komersial	173.119,05	31.898,67	137.611,32	289.351,52	-	631.980,56
10	Lainnya	88.527,38	8.982,27	100.198,80	21.801,35	-	219.509,79
	Total	**3.645.857,53**	**322.387,80**	**1.174.224,62**	**1.234.048,73**	**-**	**6.376.518,67**

Table 2.3.a

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Tagihan Kepada Pemerintah Claims against Government	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Claims against Public Sector Entity	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	Tagihan Kepada Bank Claims against Banks
	Posisi Tanggal Laporan (31/12/2015) / Report Date Position (31/12/2015)				15
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Menial Labor and Forestry				-
2	Perikanan / Fisheries				-
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Extractive Industries				-
4	Industri pengolahan / Processing Industry				-
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water				-
6	Konstruksi / Construction				-
7	Perdagangan besar dan eceran / Large Scale Trading and Retailing				-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hospitality				-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehousing and Communications				-
10	Perantara keuangan / Financial Intermediaries				0,04
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real Estate, Leasing, and Corporate Services				-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government Administration, Defense and Mandatory Social Security				-
13	Jasa pendidikan / Education				-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities				-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Social, Cultural, Entertainment, and Other Personal Services				-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal Household Services				-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Organizations and Other Extra International Organizations				-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Indeterminate Activities				-
19	Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) / Non Business Field				-
20	Lainnya / Miscellanous				-
	Total	-	-	-	**0,04**

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Rumah Tinggal Collateralized Housing Loans	**Kredit Beragun Properti Komersial** Collateralized Commercial Property Loans	**Kredit Pegawai/ Pensiunan** Loans to Employees/ Pensioners	**Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan** Portofolio Ritel Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	**Tagihan kepada Korporasi** Claims against Corporations	**Tagihan yang Telah Jatuh Tempo** Mature Claims	**Aset Lainnya** Other Assets	**Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)**
	37	42		36	35	60		
	-	-	-	57,67	21.275,35	-	-	-
	-	-	-	44,61	12.153,75	-	-	-
	-	-	-	-	3.856,25	-	-	-
	-	-	-	12.328,44	1.413.895,05	-	-	-
	-	-	-	-	26.062,58	-	-	-
	-	264.284,94	-	41,67	75.726,82	-	-	-
	-	-	-	27.095,92	1.822.732,28	-	-	-
	-	-	-	4.256,57	180.017,09	-	-	-
	-	-	-	1.812,02	79.849,80	-	-	-
	-	-	-	531,72	6.472,68	-	-	-
	-	128.496,50	-	4.034,82	99.088,99	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	10.283,97	-	-	-
	-	-	-	1.113,76	60.061,00	-	-	-
	-	-	-	4.549,79	53.733,42	-	-	-
	-	-	-	-	445,03	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	227.113,97	-	-	395.270,62	33.059,04	8.387,82	-	-
	8,20	-	-	-	-	-	-	-
	227.122,17	**392.781,44**	**-**	**451.137,62**	**3.898.713,10**	**8.387,82**	**-**	**-**

Table 2.3.a

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector	Pemerintah	Lembaga Pembangunan Multilateral	Bank	Entitas Sektor Publik
	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2014)	10	12	15	
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Menial Labor and Forestry	-	-	-	-
2	Perikanan / Fisheries	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Extractive Industries	-	-	-	-
4	Industri pengolahan / Processing Industry	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water	-	-	-	-
6	Konstruksi / Construction	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran / Large Scale Trading and Retailing	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hospitality	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehousing and Communications	-	-	-	-
10	Perantara keuangan / Financial Intermediaries	-	-	71,43	-
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real Estate, Leasing, and Corporate Services	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government Administration, Defense and Mandatory Social Security	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan / Education	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Social, Cultural, Entertainment, and Other Personal Services	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal Household Services	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Organizations and Other Extra International Organizations	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Indeterminate Activities	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) / Non Business Field	-	-	-	-
20	Lainnya / Miscellanous	-	-	-	-
	Total	-	-	71,43	-

(dalam jutaan rupiah)

	Korporasi	Ritel	Kredit Beragun Rumah Tinggal		Kredit Pegawai / Pensiunan	Kredit Beragun Properti Komersial	Lainnya	
	35	36	37	38		42	60	62
	19.677,34	282,42	-	-	-	-	-	147,38
	8.001,75	161,24	-	-	-	-	-	-
	28.113,40	28,57	-	-	-	-	-	49.857,03
	1.769.307,19	23.041,13	-	-	-	-	-	51.382,69
	-	-	-	-	-	-	-	-
	91.015,16	118,91	-	-	-	367.383,66	-	18.795,64
	2.282.427,90	64.416,51	-	-	-	-	-	65.045,37
	242.914,44	11.374,08	-	-	-	-	-	3.431,93
	89.444,98	2.326,63	-	-	-	-	-	6.634,71
	27.335,27	759,72	-	-	-	-	-	-
	191.469,19	9.101,31	-	-	-	264.596,90	-	9.606,66
	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.411,97	139,22	-	-	-	-	-	-
	63.367,06	1.014,11	-	-	-	-	-	20,24
	81.242,38	9.040,37	-	-	-	-	-	1.778,18
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.469,72	595,68	-	-	-	-	-	-
	43.642,27	196.166,59	226.439,50	30.012,90	-	-	6.824,53	5.985,44
	-	-	97,95	-	-	-	-	-
	4.949.840,04	318.566,50	226.537,45	**30.012,90**	**-**	**631.980,56**	**6.824,53**	**212.685,26**

Table 2.4.a

No.	Keterangan Portfolio Activities	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position			
		Wilayah / Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Tagihan / Claims	4.105.463,56	475.074,33	733.090,94	5.313.628,82
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) / Impaired Claims	211.704,29	39.457,56	96.827,21	347.989,05
	a. Belum jatuh tempo / Outstanding	133.651,48	31.457,56	40.516,41	205.625,45
	b. Telah jatuh tempo / Mature	78.052,81	8.000,00	56.310,80	142.363,61
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individua / Reserves for Impairments (CKPN) - Unconsolidated	32.691,33	1.013,37	10.344,98	44.049,68
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif / Reserves for Impairments (CKPN) - Consolidated	52.501,79	2.869,51	8.279,79	63.651,08
5	Tagihan yang dihapus buku / Written-off Claims	-	-	-	-

Table 2.5.a

No.	tSektor Ekonomi Economy Sector
	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Menial Labor and Forestry
2	Perikanan / Fisheries
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Extractive Industries
4	Industri pengolahan / Processing Industry
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water
6	Konstruksi / Construction
7	Perdagangan besar dan eceran / Large Scale Trading and Retailing
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hospitality
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehousing and Communications
10	Perantara keuangan / Financial Intermediaries
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real Estate, Leasing, and Corporate Services
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government Administration, Defense and Mandatory Social Security
13	Jasa pendidikan / Education
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Social, Cultural, Entertainment, and Other Personal Services
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal Household Services
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Organizations and Other Extra International Organizations
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Indeterminate Activities
19	Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) / Non Business Field
20	Lainnya / Miscellanous
	Total

Table 2.4.a

No.	Keterangan Portfolio Activities	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) Previous Year Report Date Position (31/12/2015)			
		Wilayah / Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
1	Tagihan / Claims	4.674.079,48	767.742,51	1.035.880,80	6.477.702,79
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired) / Impaired Claims	141.343,76	70.766,29	73.971,54	286.081,59
	a. Belum jatuh tempo / Outstanding	72.918,79	60.426,17	51.774,62	185.119,58
	b. Telah jatuh tempo / Mature	68.424,96	10.340,12	22.196,92	100.962,01
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individua / Reserves for Impairments (CKPN) - Unconsolidated	23.015,45	5.831,58	4.287,67	33.134,70
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif / Reserves for Impairments (CKPN) - Consolidated	51.931,63	4.944,12	11.173,67	68.049,41
5	Tagihan yang dihapus buku / Written-off Claims	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Tagihan / Claims	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Impaired Claims		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual Impairments (CKPN) - Unconsolidated	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Reserves for Reserves for Impairments (CKPN) - Consolidated	Tagihan yang dihapus buku Written-off Claims
	Belum Jatuh Tempo Outstanding	Telah jatuh tempo Mature			
21.700,71	-	-	-	212,51	-
12.254,85	-	-	-	56,49	-
3.877,16	-	-	-	20,90	-
1.518.914,72	61.168,93	62.894,72	26.537,40	11.766,39	-
26.171,05	-	-	-	108,46	-
363.333,68	38.923,25	15.998,29	5.822,97	3.012,96	-
1.972.122,36	53.129,32	56.970,69	9.917,60	22.514,03	-
190.295,51	34.654,97	1.500,00	393,25	1.517,25	-
90.131,60	1.867,83	4.999,91	409,57	1.033,61	-
7.030,40	-	-	-	25,96	-
244.913,72	9.554,81	-	548,01	3.635,21	-
-	-	-	-	-	-
10.331,42	-	-	-	47,46	-
61.530,02	-	-	-	336,51	-
60.756,85	338,54	-	38,86	1.441,36	-
446,86	-	-	-	1,83	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
729.809,65	5.987,80	-	382,03	17.920,08	-
8,27	-	-	-	0,07	-
5.313.628,82	**205.625,45**	**142.363,61**	**44.049,68**	**63.651,08**	**-**

Table 2.5.a

No.	Sektor Ekonomi Economy Sector
	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan / Agriculture, Menial Labor and Forestry
2	Perikanan / Fisheries
3	Pertambangan dan Penggalian / Mining and Extractive Industries
4	Industri pengolahan / Processing Industry
5	Listrik, Gas dan Air / Power, Gas and Water
6	Konstruksi / Construction
7	Perdagangan besar dan eceran / Large Scale Trading and Retailing
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum / Hospitality
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi / Transportation, Warehousing and Communications
10	Perantara keuangan / Financial Intermediaries
11	Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan / Real Estate, Leasing, and Corporate Services
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib / Government Administration, Defense and Mandatory Social Security
13	Jasa pendidikan / Education
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial / Health and Social Activities
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya / Social, Cultural, Entertainment, and Other Personal Services
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga / Personal Household Services
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya / International Organizations and Other Extra International Organizations
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya / Indeterminate Activities
19	Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga) / Non Business Field
20	Lainnya / Miscellanous
	Total

(dalam jutaan rupiah)

	Tagihan / Claims	**Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai** Impaired Claims		**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual** Impairments (CKPN) - Unconsolidated	**Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif Reserves for** Reserves for Impairments (CKPN) - Consolidated	**Tagihan yang dihapus buku** Written-off Claims
		Belum Jatuh Tempo Outstanding	**Telah jatuh tempo** Mature			
	20.333,09	-	-	-	225,94	-
	8.188,67	-	-	-	25,68	-
	81.548,63	47.323,59	5.999,32	3.465,88	83,75	-
	1.875.296,39	67.452,12	38.464,18	19.916,95	11.648,44	-
	-	-	-	-	-	-
	481.673,24	24.237,81	15.998,29	2.044,24	2.315,63	-
	2.445.209,30	28.259,68	31.861,16	5.524,41	27.795,11	-
	260.236,52	2.380,66	-	177,70	2.338,37	-
	100.148,69	-	6.674,63	574,70	1.167,66	-
	28.299,25	-	-	-	132,82	-
	479.438,60	10.288,77	1.964,43	1.032,18	3.632,36	-
	-	-	-	-	-	-
	8.603,70	-	-	-	52,51	-
	64.848,44	-	-	-	447,03	-
	93.574,09	-	-	-	1.513,17	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	4.096,73	-	-	-	31,33	-
	526.108,64	5.176,95	-	398,65	16.638,77	-
	98,79	-	-	-	0,84	-
	6.477.702,79	**185.119,58**	**100.962,01**	**33.134,70**	**68.049,41**	**-**

Table 3.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position					
		Tagihan Bersih / Net Claims					
		Lembaga Pemeringkat / Rating Agencies	Peringkat Jangka panjang / Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities		-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Bank		-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans						
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans						
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/Pensioners						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio						
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations		-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims						
11	Aset Lainnya / Other Assets						
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)						
	TOTAL		-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position								
Tagihan Bersih / Net Claims								
	Peringkat Jangka panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr] B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr] A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04
	-	-	-	-	-	-	3.898.713,10	3.898.713,10
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.898.713,14**	**3.898.713,14**

Table 3.1.a

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / Previous Year Report Date Position								
		Tagihan Bersih / Net Claims						
No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Lembaga Pemeringkat Rating Agencies	Peringkat Jangka panjang Long-Term Rating					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT ICRA Indonesia	[Idr] AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr] BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr] BB-	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government		-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities		-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions		-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Bank		-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans							
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans							
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/Pensioners							
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio							
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations		-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims							
11	Aset Lainnya / Other Assets							
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)							
	TOTAL		-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) / Previous Year Report Date Position (31/12/2015)								
Tagihan Bersih / Net Claims								
	Peringkat Jangka panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Total
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr] B-	[Idr]A1+ s.d [Idr]A1	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr] A3		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	71,43	71,43
	-	-	-	-	-	-	4.949.840,04	4.949.840,04
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.949.911,47**	**4.949.911,47**

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position — Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation										ATMR / RWA	Beban Modal / Capital Charge
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
A	**Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure**												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	362.030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	362.030,00	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	-	-	229.022,00	30.263,00	-	-	-	-	-	-	259.285,00	
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	-	-	-	-	-	-	-	396.708,00	-	-	396.708,00	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan / Loans to Employees/ Pensioners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	470.091,17	-	-	-	470.091,17	
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-	-	-	-	3.944.090,00	-	-	3.944.090,00	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	-	-	-	-	-	-	-	8.388,00	197.675,00	-	206.063,00	
11	Aset Lainnya/ Other Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca / Total Blance Sheet Exposure	-	362.030,00	229.022,00	30.263,00	-	-	470.091,17	4.349.186,00	197.675,00	-	5.638.267,17	

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) Previous Year Report Date Position (31/12/2015)												
Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation											ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	
1.770.141,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770.141,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	372.666,00	-	-	-	9.116,00	-	-	-	-	381.782,00		
-	-	234.685,00	22.241,00	-	-	-	-	-	-	256.926,00		
-	-	-	-	-	-	-	691.801,00	-	-	691.801,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	355.378,00	-	-	-	355.378,00		
-	-	-	-	-	-	-	5.094.978,00	-	-	5.094.978,00		
-	-	-	-	-	-	-	7.942,00	119.742,00	-	127.684,00		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.770.141,00	**372.666,00**	**234.685,00**	**22.241,00**	**-**	**9.116,00**	**355.378,00**	**5.794.721,00**	**119.742,00**	**-**	**8.678.690,00**		

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position										ATMR / RWA	Beban Modal / Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
B	**Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif / Commitment/Contingency Exposure in Administrative Account Transactions**												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan / Loans to Employees/ Pensioners	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	-	3.896,00	-	-	-	4.398,00	-	-	-	-	8.294,00	
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	5.375,00	-	-	-	21.232,00	-	-	-	-	26.607,00	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA / Total Exposure of TRA	**-**	**9.271,00**	**-**	**-**	**-**	**25.630,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**34.901,00**	

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) Previous Year Report Date Position (31/12/2015)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	634,00	-	-	-	4.287,00	4.921,00	-	-	-	9.842,00	
	-	3.267,00	-	-	-	17.875,00	-	21.142,00	-	-	42.284,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	**3.901,00**	**-**	**-**	**-**	**22.162,00**	**4.921,00**	**21.142,00**	**-**	**-**	**52.126,00**	

Table 4.1.a

No.	Kategori Portofolio / Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position										ATMR / RWA	Beban Modal / Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit / Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit Risk**												
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk / Total Exposure of Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) Previous Year Report Date Position (31/12/2015)										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Claims after Calculating Effect of Credit Risk Mitigation											
	0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	241,00	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	**241,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**241,00**	

Table 4.2.a

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Report Date Position					
		Tagihan Bersih Net Claims	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Portion Unsecured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	0,04	-	-	-		0,04
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	257.232,82	-	-	-		257.232,82
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	392.781,44	-	-	-		392.781,44
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/Pensioners	-	-	-	-		-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	451.137,62	2.786,15	-	-		448.351,47
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	3.898.713,10	257.068,29	-	-		3.641.644,80
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	206.063,04	-	-	-		206.063,04
11	Aset Lainnya/ Other Assets	-	-	-	-		-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca / Total Blance Sheet Exposure	**5.205.928,05**	**259.854,44**	**-**	**-**	**-**	**4.946.073,61**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif (LC & BG)**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-			-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-			-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-			-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	-	-			-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal / Collateralized Housing Loans	-	-	-			-
6	Kredit Beragun Properti Komersial / Collateralized Commercial Property Loans	-	-	-			-
7	Kredit Pegawai/Pensiunan / Loans to Employees/Pensioners	-	-	-			-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	8.294,34	5.225,00	-			3.069,34
9	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	26.607,00	9.915,00	-			16.692,00
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo / Mature Claims	-	-	-			-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-		-	-
	Total Eksposur Rekening Administratif / Total Exposure of Administrative Account	**34.901,34**	**15.140,00**	**-**	**-**	**-**	**19.761,34**
C	**Eksposur Counterparty Credit Risk**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	-	-	-		-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-		-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		**5.240.829,39**	**274.994,44**	**-**	**-**	**-**	**4.965.834,95**

Table 4.2.a

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) Previous Year Report Date Position (31/12/2015)					
		Tagihan Bersih Net Claims	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured by				Bagian Yang Tidak Dijamin Portion Unsecured
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca / Balance Sheet Exposure**						
1	Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral	-	-	-	-		-
3	Bank	71,43	-	-	-		71,43
4	Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
5	Korporasi	4.949.840,04	596.053,33	-	-		4.353.786,70
6	Ritel	318.566,50	5.320,87	-	-		313.245,62
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal	256.550,35	-	-	-		256.550,35
8	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
9	Kredit Beragun Properti Komersial	631.980,56	-	-	-		631.980,56
10	Lainnya	219.509,79	-	-	-		219.509,79
	Total Eksposur Neraca / Total Blance Sheet Exposure	**6.376.518,67**	**601.374,20**	**-**	**-**		**5.775.144,47**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif (LC & BG)**						
1	Pemerintah	-	-	-	-		-
2	Lembaga Pembangunan Multilateral	-	-	-	-		-
3	Bank	-	-	-	-		-
4	Entitas Sektor Publik	-	-	-	-		-
5	Korporasi	21.142,00	5.128,00	-	-		16.014,00
6	Ritel	4.921,00	1.428,00	-	-		3.493,00
7	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		-
8	Kredit Pegawai / Pensiunan	-	-	-	-		-
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		-
10	Lainnya	-	-	-	-		-
	Total Eksposur Rekening Administratif / Total Exposure of Administrative Account	**26.063,00**	**6.556,00**	**-**	**-**		**19.507,00**
C	**Eksposur Counterparty Credit Risk**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah / Claims against Government	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik / Claims against Public Sector Entities	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional / Claims against Multilateral Development Banks and International Institutions	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank / Claims against Banks	-	-	-	-		-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel / Claims agaist MSMEs and Retail Portfolio	-	-	-	-		-
6	Tagihan kepada Korporasi / Claims against Corporations	-	-	-	-		-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada) / Exposure in Sharia Business Unit (if available)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		**6.402.581,67**	**607.930,20**	**-**	**-**	**-**	**5.794.651,47**

Table 6.1.7

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL

Table 9.1.a

No.	Pos-pos / Posts (IDR)
	-2
I	**NERACA / BALANCE SHEET**
	A Aset / Assets
	1 Kas / Cash
	2 Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia
	3 Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks
	4 Surat Berharga / Securities
	5 Kredit yang diberikan / Loans
	6 Tagihan lainnya / Other Receivables
	7 Lain- lain / Others
	Total Aset / Total Assets
	B. Kewajiban / Liabilities
	1 Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia / Funds from Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain / Funds from Other Banks
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued
	5 Pinjaman yang Diterima / Fund Borrowings
	6 Kewajiban lainnya / Other Liabilities
	7 Lain- lain / Miscellanous
	Total Kewajiban / Total Liabilities
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference Between Assets and Liabilities on Balance Sheets
II	**REKENING ADM INISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**
	A. Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims
	1 Komitmen / Commitments
	2 Kontijensi / Contingencies
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims
	B. Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities
	1 Komitmen / Commitments
	2 Kontijensi / Contingencies
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference

	Posisi Tanggal Laporan Report Date Position	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya Previous Year Report Date Position
	5.189.899,00	6.288.057,00
	-	-

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position					
	Saldo	Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	88.121	88.121				
	1.306.719	875.715	123.998	170.952	136.054	
	362.030	362.030				
	556.875	187	52.686	2.842	30.070	471.090
	5.282.971	29.074	627.385	1.181.865	1.486.281	1.958.366
	6.330		6.330			
	139.441	21.276	58.077	13.362	8.784	37.942
	7.742.487	**1.376.403**	**868.476**	**1.369.021**	**1.661.189**	**2.467.398**
	6.312.304	2.482.562	3.731.725	42.245	20.867	34.905
	63.699	42.021	20.678		1.000	
	79.946					79.946
	52.325	4.973	45.465		887	1.000
	6.508.274	**2.529.556**	**3.797.868**	**42.245**	**22.754**	**115.851**
	1.234.213	**-1.153.153**	**-2.929.392**	**1.326.776**	**1.638.435**	**2.351.547**
	58.668			58.668		
	58.668			**58.668**		
	1.625.344	25.848	420.008	440.143	687.093	52.252
	102.894	2.350	72.666	9.280	7.635	10.963
	1.728.238	**28.198**	**492.674**	**449.423**	**694.728**	**63.215**
	-1.669.570	**-28.198**	**-492.674**	**-390.755**	**-694.728**	**-63.215**

Table 9.1.a

No.	Pos-pos / Posts (IDR)
	-2
I	**NERACA / BALANCE SHEET**
	A Aset / Assets
	1 Kas / Cash
	2 Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia
	3 Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks
	4 Surat Berharga / Securities
	5 Kredit yang diberikan / Loans
	6 Tagihan lainnya / Other Receivables
	7 Lain- lain / Others
	Total Aset / Total Assets
	B. Kewajiban / Liabilities
	1 Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia / Funds from Bank Indonesia
	3 Kewajiban pada bank lain / Funds from Other Banks
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued
	5 Pinjaman yang Diterima / Fund Borrowings
	6 Kewajiban lainnya / Other Liabilities
	7 Lain-lain / Miscellanous
	Total Kewajiban / Total Liabilities
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference Between Assets and Liabilities on Balance Sheets
II	**REKENING ADM INISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**
	A. Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims
	1 Komitmen / Commitments
	2 Kontijensi / Contingencies
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims
	B. Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities
	1 Komitmen / Commitments
	2 Kontijensi / Contingencies
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya (31/12/2015) / Previous Year Report Date Position (31/12/2015)					
	Saldo	Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	105.015	105.015				
	1.094.738	1.015.829	54.529	24.380		
	380.563	354.873	25.000		690	
	489.806	1.328	22.768	4.322	45.546	415.842
	6.446.333	48.802	811.254	1.145.798	1.750.810	2.689.669
	20.605	5.759	4.458	10.388		
	103.293	12.232	61.274	5.675	4.678	19.434
	8.640.353	**1.543.838**	**979.283**	**1.190.563**	**1.801.724**	**3.124.945**
	7.183.828	2.812.154	4.223.055	53.426	62.544	32.649
	90.212	21.229	57.595	10.388	1.000	
	81.800					81.800
	8	8				
	61.770	12.589	47.297		884	1.000
	7.417.618	**2.845.980**	**4.327.947**	**63.814**	**64.428**	**115.449**
	1.222.735	**-1.302.142**	**-3.348.664**	**1.126.749**	**1.737.296**	**3.009.496**
	690	690				
	37.938			37.938		
	38.628	**690**		**37.938**		
	1.737.018	27.048	378.439	452.760	806.150	72.621
	142.409	2.000	99.666	13.295	27.448	
	1.879.427	**29.048**	**478.105**	**466.055**	**833.598**	**72.621**
	-1.840.799	**-28.358**	**-478.105**	**-428.117**	**-833.598**	**-72.621**

Table 9.2.a

No.	Pos-pos (VALAS)	Posisi Tanggal Laporan / Report Date Position					
		Saldo	Jatuh Tempo / Maturity				
			< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
I	**NERACA / BALANCE SHEET**						
	A Aset / Assets						
	1 Kas / Cash						
	2 Penempatan pada Bank Indonesia / Placements with Bank Indonesia						
	3 Penempatan pada bank lain / Placements with Other Banks						
	4 Surat Berharga / Securities						
	5 Kredit yang diberikan / Loans						
	6 Tagihan lainnya / Other Receivables						
	7 Lain- lain / Others						
	Total Aset / Total Assets						
	B. Kewajiban / Liabilities						
	1 Dana Pihak Ketiga / Third-Party Funds						
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia / Funds from Bank Indonesia						
	3 Kewajiban pada bank lain / Funds from Other Banks						
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan / Securities Issued						
	5 Pinjaman yang Diterima / Fund Borrowings						
	6 Kewajiban lainnya / Other Liabilities						
	7 Lain-lain / Miscellanous						
	Total Kewajiban / Total Liabilities						
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca / Difference Between Assets and Liabilities on Balance Sheets						
II	**REKENING ADM INISTRATIF / ADMINISTRATIVE ACCOUNT**						
	A. Tagihan Rekening Administratif / Administrative Account Claims						
	1 Komitmen / Commitments						
	2 Kontijensi / Contingencies						
	Total Tagihan Rekening Administratif / Total Administrative Account Claims						
	B. Kewajiban Rekening Administratif / Administrative Account Liabilities						
	1 Komitmen / Commitments						
	2 Kontijensi / Contingencies						
	Total Kewajiban Rekening Administratif / Total Administrative Account Liabilities						
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif / Difference Between Administrative Account Claims and Liabilities						
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)] / Difference (IA-IB)+(IIA-IIB)						
	Selisih Kumulatif / Cumulative Difference						

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya / Previous Year Report Date Position					
	Saldo	Jatuh Tempo / Maturity				
		< 1 bulan 1 month	> 1 bln s.d. 3 bln 1 - 3 months	> 3 bln s.d. 6 bln 3 - 6 months	> 6 bln s.d.12 bln 6 - 12 months	> 12 bulan 12 months
	-9	-10	-11	-12	-13	-14